PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BLORA
TAHUN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2018

BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BLORA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan untuk menjamin keterkaitan, konsistensi dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2019.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Blora untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari 2019 dan berakhir pada 31 Desember 2019.

Pasal 2

RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi:

a. pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2019; dan
b. pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2019.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Blora menggunakan RKPD Tahun 2019 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora.

Pasal 4

RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN;

b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;

c. BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN;

d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;

e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;

f. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH;

g. BAB VII : PENUTUP.

Pasal 5

Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 29 Juni 2018

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 29 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2018 NOMOR 19

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora

AKHMAD KAIDAR ALI, SH, MH
NIP. 19610103 198608 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR xiii

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen I-6
1.4 Maksud dan Tujuan I-7
1.5 Sistematika Dokumen RKPD I-8
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah II-1
2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis II-1
2.1.1.1 Kondisi Geografis II-1
2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah II-3
2.1.1.4 Kondisi Demografi II-15
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-16
2.1.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II-16
2.1.2.2 Kesejahteraan Masyarakat II-22
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum II-25
2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II-25
2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II-37
2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan II-59
2.1.3.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan II-70

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah II-78
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah II-78
2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur II-81
2.1.4.3 Fokus Iklim Investasi..... II-81
2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia..... II-82
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Kabupaten Blora Tahun 2017 terhadap Realisasi RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 (Tahun II)..... II-83
2.2.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar II-83
2.2.1.1 Pendidikan II-83
2.2.1.2 Kesehatan II-85
2.2.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II-91
2.2.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman II-94
2.2.1.5 Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat..... II-95
2.2.1.6 Sosial II-97
2.2.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar..... II-98
2.2.2.1 Tenaga Kerja II-98
2.2.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak..... II-100
2.2.2.3 Pangan II-101
2.2.2.4 Pertanahan..... II-102
2.2.2.5 Lingkungan Hidup..... II-103
2.2.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil II-104
2.2.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa..... II-105
2.2.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana II-106
2.2.2.9 Perhubungan..... II-107
2.2.2.10 Komunikasi dan Informatika II-109

2.2.2.11 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah II-110
2.2.2.12 Penanaman Modal II-111
2.2.2.13 Kepemudaan dan Olah Raga..... II-113
2.2.2.14 Statistik II-114
2.2.2.15 Kebudayaan II-115
2.2.2.16 Perpustakaan II-115
2.2.2.17 Kearsipan II-116
2.2.3 Urusan Pilihan II-117
2.2.3.1 Kelautan dan Perikanan II-117
2.2.3.2 Pariwisata II-118
2.2.3.3 Pertanian..... II-119
2.2.3.4 Kehutanan II-122
2.2.3.5 Energi dan Sumber Daya Mineral . II-122
2.2.3.6 Perdagangan..... II-123
2.2.3.7 Perindustrian II-124
2.2.3.8 Transmigrasi II-124
2.2.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerinthan II-125
2.2.4.1 Perencanaan Pembangunan II-125
2.2.4.2 Keuangan II-127
2.2.4.3 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan II-128
2.2.4.4 Penelitian dan Pengembangan II-128
2.2.4.5 Fungsi Penunjang Lainnya II-129
2.3 Permasalahan Pembangunan di Kabupaten Blora... II-132
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah..... III-1
3.1.1 Kondisi Perekonomian Daerah..... III-1
3.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi..... III-1
3.1.1.2 Produk Domestik Regional Bruto III-2
3.1.1.3 Laju Inflasi III-3
3.1.1.4 Kesenjangan/Ketimpangan Wilayah III-4

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019 ..... III-4
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-7
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-7
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah III-12
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-16
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-1
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019 ... IV-11
4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional IV-11
4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah IV-14
4.2.3 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD IV-16
4.2.4 Prioritas Pembangunan Kabupaten Blora IV-17
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1
5.1 Kerangka Pendanaan Daerah Tahun 2019..... V-1
5.2 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2019 ..... V-2
5.2.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar V-2
5.2.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar V-10
5.2.3 Urusan Pilihan V-21
5.2.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan..... V-25
5.2.5 Program pada Setiap SKPD V-33
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH VI-1
BAB VII PENUTUP VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel II-1 Penggunaan Lahan di Kabupaten Blora Tahun 2014-2017 ..... II-3

Tabel II-2 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Blora Tahun 2013-2017 ..... II-16

Tabel II-3 Perkembangan PDRB Kabupaten Blora II-17

Tabel II-4 Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Blora Tahun 2013-2017 ..... II-18

Tabel II-5 Besarnya Indek Gini dan Pemerataan Pendapatan Penduduk Kabupaten Blora dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017 ..... II-20

Tabel II-6 Indeks Williamson Kabupaten Blora dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016 ..... II-20

Tabel II-7 Kondisi Penduduk Miskin di Kabupaten Blora Tahun 2013-2017 ..... II-22

Tabel II-8 IPM Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2015-2016 ..... II-22

Tabel II-9 Perkembangan Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Blora dengan Kabupaten/Kota sekitarnya di Jawa Tengah Tahun 2015-2016 ..... II-23

Tabel II-10 TPAK dan TPT Kabupaten Blora Tahun 2013-2017 ..... II-24

Tabel II-11 Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Blora Tahun 2013-2017 ..... II-25

Tabel II-12 Persentase Perkembangan Indikator Pendidikan di Kabupaten Blora Tahun 2013-2017..... II-25

Tabel II-13 Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Blora Tahun 2013-2017 ..... II-27

Tabel II-14 Jumlah Tenaga Medis di Kabupaten Blora Tahun 2013-2017 ..... II-28

Tabel II-15 Kinerja Layanan Rumah Sakit di Kabupaten Blora Tahun 2015-2017 ..... II-28

Tabel II-16 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2013-2017 ..... II-30

Tabel II-17 Kepemilikan Rumah dan Penyediaan Perumahan di Kabupaten Blora Tahun 2012-2017 ..... II-32

Tabel II-18 Kondisi Suprastruktur Politik dan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Blora Tahun 2013-2017 ..... II-33

Tabel II-19 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blora Tahun 2013-2017 ..... II-34

Tabel II-20 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Sosial Kabupaten Blora Tahun 2013-2017 ..... II-36

Tabel II-21 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Blora Tahun 2013-2017 ..... II-37

Tabel II-22 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora Tahun 2013-2017..... II-39

Tabel II-23 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Blora Tahun 2013-2017 ..... II-41

Tabel II-24 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Pertanahan Kabupaten Blora Tahun 2013-2017..... II-42

Tabel II-25 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Blora Tahun 2013-2017 ..... II-42

Tabel II-26 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora Tahun 2013-2017..... II-44

Tabel II-27 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2013-2017 ..... II-45

Tabel II-28 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blora Tahun 2013-2017..... II-46

Tabel II-29 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Perhubungan Kabupaten Blora Tahun 2013-2017.... II-47

Tabel II-30 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora Tahun 2013-2017 ..... II-50

Tabel II-31 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Blora Tahun 2013-2017 ..... II-52

Tabel II-32 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Penanaman Modal Kabupaten Blora Tahun 2013-2017 ..... II-53

Tabel II-33 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blora Tahun 2013-2017 ..... II-54

Tabel II-34 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Statistik Kabupaten Blora Tahun 2013-2017..... II-55

Tabel II-35 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Persandian Kabupaten Blora Tahun 2013-2017 ..... II-56

Tabel II-36 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Kebudayaan Kabupaten Blora Tahun 2013-2017 ..... II-57

Tabel II-37 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Perpustakaan Kabupaten Blora Tahun 2013-2017 ... II-58

Tabel II-38 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Kearsipan Kabupaten Blora Tahun 2013-2017 ..... II-59

Tabel II-39 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Blora Tahun 2013-2017 ..... II-60

Tabel II-40 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Pariwisata Kabupaten Blora Tahun 2013-2017..... II-61

Tabel II-41 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Pertanian Kabupaten Blora Tahun 2013-2017..... II-62

Tabel II-42 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Kehutanan Kabupaten Blora Tahun 2013-2017..... II-65

Tabel II-43 Potensi Jenis Tambang dan Energi di Kabupaten Blora Tahun 2013-2017 ..... II-66

Tabel II-44 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Blora Tahun 2013-2017 ..... II-67

Tabel II-45 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Perdagangan Kabupaten Blora Tahun 2013-2017..... II-68

Tabel II-46 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Perindustrian Kabupaten Blora Tahun 2013-2017.... II-69

Tabel II-47 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Transmigrasi Kabupaten Blora Tahun 2013-2017 .... II-70

Tabel II-48 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Perencanaan Pembangunan Kabupaten Blora Tahun 2013-2017 ..... II-71

Tabel II-49 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Keuangan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2013-2017 ..... II-73

Tabel II-50 Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Blora Tahun 2013-2017 ..... II-74

Tabel II-51 Capaian Kinerja Pembangunan Sub Bidang Reformasi Birokrasi Kabupaten Blora Tahun 2013-2017 ..... II-75

Tabel II-52 Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada SKPD Kabupaten Blora Tahun 2013-2017 ..... II-76

Tabel II-53 Capaian Kinerja Pembangunan Sub Bidang Pengawasan Kabupaten Blora Tahun 2013-2017..... II-78

Tabel II-54 Angka Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Kabupaten Blora Tahun 2014-2016..... II-79

Tabel II-55 Perkembangan Sarana dan Prasarana Wilayah Tahun 2013-2017 ..... II-81

Tabel II-56 Perkembangan Kasus Kriminalitas dan Demonstrasi Kabupaten Blora Tahun 2013-2017 ..... II-82

Tabel II-57 Rasio Ketergantungan Penduduk Tahun 2013-2017 ..... II-83

Tabel II-58 Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Pendidikan dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021 ..... II-83

Tabel II-59 Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Kesehatan dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021 ..... II-85

Tabel II-60 Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021 ..... II-91

Tabel II-61 Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021 ..... II-94

Tabel II-62 Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021 ..... II-95

Tabel II-63 Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Sosial dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021..... II-97

Tabel II-64 Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Tenaga Kerja dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021 ..... II-99

Tabel II-65 Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021..... II-100

Tabel II-66 Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Pangan dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021..... II-101

Tabel II-67 Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Pertanahan dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021 ..... II-102

Tabel II-68 Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Lingkungan Hidup dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021 ..... II-103

Tabel II-69 Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021 ..... II-104

Tabel II-70 Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021 ..... II-105

Tabel II-71 Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana RKPD Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021 ..... II-106

Tabel II-72 Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Perhubungan dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021 ..... II-108

Tabel II-73 Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021 ..... II-109

Tabel II-74 Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam RKPD

Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021 ..... II-111

Tabel II-75 Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Penanaman Modal dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021 ..... II-112

Tabel II-76 Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target akhir RPJMD 2016-2021..... II-113

Tabel II-77 Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Statistik dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021 ..... II-114

Tabel II-78 Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Kebudayaan dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021 ..... II-115

Tabel II-79 Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Perpustakaan dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021 ..... II-116

Tabel II-80 Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Kearsipan dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021 ..... II-117

Tabel II-81 Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021 ..... II-118

Tabel II-82 Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Pariwisata dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021 ..... II-119

Tabel II-83 Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Pertanian dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021 ..... II-120

Tabel II-84 Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021 ..... II-122

Tabel II-85 Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Perdagangan dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021 ..... II-123

Tabel II-86 Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Perindustrian dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021 ..... II-124

Tabel II-87 Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Transmigrasi dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021 ..... II-125

Tabel II-88 Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Perencanaan Pembangunan dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021 ..... II-125

Tabel II-89 Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Keuangan dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021 ..... II-127

Tabel II-90 Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021 ..... II-128

Tabel II-91 Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021 ..... II-129

Tabel II-92 Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Fungsi Penunjang Lainnya dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target akhir RPJMD 2016-2021..... II-129

Tabel II-93 Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Berdasarkan Urusan Pemerintahan dalam RKPD Tahun 2017 ..... II-136

Tabel III-1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blora Tahun 2012-2016 ..... III-2

Tabel III-2 Perkembangan PDRB Kabupaten Blora Tahun 2012-2017 ..... III-2

Tabel III-3 Perkembangan Distribusi Jenis Lapangan Usaha terhadap PDRB adhb Kabupaten Blora Tahun 2012-2017 ..... III-3

Tabel III-4 Inflasi Kabupaten Blora, Semarang dan Nasional Tahun 2012-2016 ..... III-4

Tabel III-5 Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Blora Tahun 2012 - 2017 ..... III-7

Tabel III-6 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2016-2020..... III-10

Tabel III-7 Realisasi dan Proyeksi Belanja Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2016-2020..... III-15

Tabel III-8 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2016-2020 ..... III-17

Tabel IV-1 Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 ..... IV-3

Tabel IV-2 Tujuan, Sasaran dan Indikator RKPD IV-7

Tabel IV-3 Keterkaitan Prioritas Daerah Dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa tengah Tahun 2018 ..... IV-20

Tabel V-1 Kerangka Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 ..... V-1

Tabel VI-1 Indikator Kinerja Utama VI-2

Tabel VI-2 Indikator Kinerja Kunci VI-6

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan I-7

Gambar II-1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Blora II-2

Gambar II-2 Perkembangan Inflasi Kabupaten Blora Tahun 2012-2017 ..... II-19

Gambar II-3 Distribusi Konsumsi Makanan dan Non Makanan terhadap Konsumsi Rumah Tangga ADHB Tahun 2017 ..... II-80

Gambar II-4 Perbandingan lt, lb dan NTP Kabupaten Blora Tahun 2015-2017 ..... II-80

Gambar IV-1 Keterkaitan RKP, RKPD Provinsi Jawa Tengah dan RKPD Kabupaten Blora tahun 2018 ..... IV-22

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BLORA TAHUN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan suatu fungsi utama manajemen pembangunan yang selalu diperlukan karena kebutuhan akan pembangunan lebih besar dari sumber daya (*resources*) yang tersedia. Melalui perencanaan yang baik dapat dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memperoleh hasil yang optimal dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia dan potensi yang ada.

Kebutuhan terhadap ketersediaan rencana pembangunan daerah yang adaptif, aspiratif dan mampu menjadi rujukan pelaksanaan pembangunan di daerah menjadi semakin penting. Rencana pembangunan daerah disusun tidak hanya berdasarkan potensi unggulan, prioritas dan kemampuan yang dimiliki masing masing daerah, tetapi juga harus mampu bersinergi dengan rencana pembangunan provinsi dan nasional.

Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan setiap tahunnya ditujukan untuk mencapai visi RPJP Kabupaten Blora yang telah dituangkan dalam dokumen resmi perencanaan pembangunan yaitu "Terwujudnya masyarakat Blora yang maju, sejahtera, adil, damai dan demokratis."

Berdasar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangannya. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang wajib disusun adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014, dinyatakan bahwa

RKPD disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2019 dilakukan dengan menerapkan pendekatan pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif dan *top-down/bottom up*, serta dilakukan dengan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dimulai penyusunannya dengan pendekatan perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) bertingkat mulai dari desa/kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat kabupaten. Perumusan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2019 mengakomodir program Perangkat Daerah, lintas Perangkat daerah dan program kewilayahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum tahapan dan proses penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2019 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan rancangan RKPD antara lain pembentukan tim penyusun RKPD, penyusunan agenda kerja dan penyiapan data serta informasi;
2. Penyusunan Rancangan RKPD antara lain pengolahan data dan informasi, analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis kondisi perekonomian dan keuangan daerah, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2017, telaah kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, telaah pokok-pokok pikiran DPRD, perumusan permasalahan pembangunan daerah, perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta pagu indikatif, perumusan program prioritas dan pagu indikatif, penyajian dan sosialisasi Rancangan RKPD;
3. Penyusunan Rancangan RKPD sebagai bahan forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD;
4. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD yang sebelumnya didahului dengan kegiatan Forum Perangkat Daerah dan Konsultasi Publik;

5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang RKPD; dan
6. Penetapan RKPD dengan Peraturan Bupati.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentangRencana Pembangunan Jangka Menenengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Rancangan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2019 disusun selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan untuk tahun 2019 dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, RKP Tahun 2019, serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, serta mengacu sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional dan arah kebijakan nasional. Dalam penyusunannya juga memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blora 2005-2025, RTRW Kabupaten Blora Tahun 2011-2031, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.

Dokumen rancangan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2019 menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berupa program dan kegiatan perangkat daerah dan/atau lintas perangkat daerah; landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Hubungan antara dokumen RKPD Kabupaten Blora Tahun 2019 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan pada Gambar I-1 sebagai berikut:

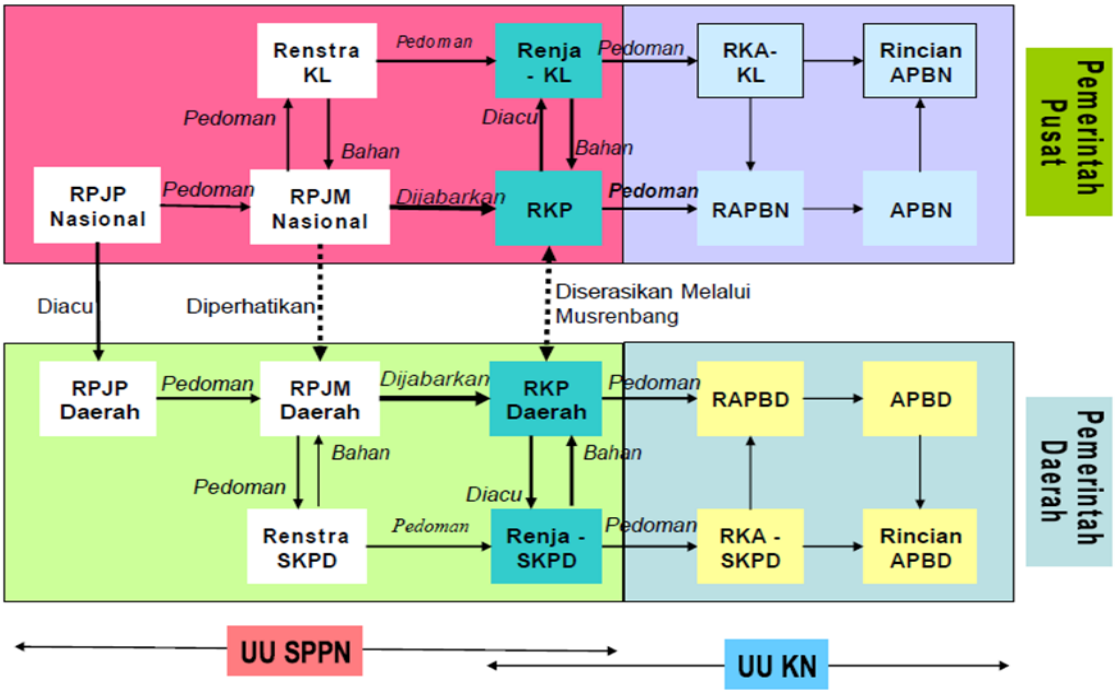

Gambar I-1
Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2019 adalah untuk:

1. Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 dengan memperhatikan prioritas pembangunan provinsi dan pembangunan nasional; dan
2. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2019.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Sebagai dasar/pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2019;
2. Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2019; dan
3. Sebagai alat untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan pembangunan daerah.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019, adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penyusunan, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika dokumen RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memuat kondisi umum daerah meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang arah kebijakan ekonomi daerah, yang mencangkup kondisi ekonomi daerah tahun lalu, tantangan dan prospek perekonomian daerah Tahun 2019; arah kebijakan keuangan daerah mencakup proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat perumusan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2017 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini memuat Rincian Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 sesuai dengan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan, serta non urusan.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini memuat penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2019 sebagai

panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis

2.1.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Blora yang berslogan "Blora Mustika" secara administratif berada di ujung timur Jawa Tengah berbatasan dengan Jawa Timur dengan luas wilayah sebesar 1.820,588 km^2 atau 182.058,797 ha (5,59 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah). Secara geografis terletak diantara 111°16' s.d. 111°338' Bujur Timur dan 6°528' s.d. 7°248' Lintang Selatan. Wilayah utara berupa perbukitan bagian dari rangkaian Pegunungan Kendeng Utara, dan wilayah selatan berupa perbukitan kapur sebagai bagian dari Pegunungan Kendeng selatan. Kabupaten Blora dilalui 2 (dua) sungai utama, yaitu Sungai Bengawan Solo dan Sungai Lusi. Adapun batas daerah Kabupaten Blora yaitu sebelah barat dengan Kabupaten Grobogan; sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang; sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur; dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur.

Dilihat dari kondisi topografi wilayah Kabupaten Blora memiliki wilayah dengan ketinggian terendah 25 mdpl tertinggi 500 mdpl. Kecamatan dengan letak tertinggi adalah Kecamatan Todanan, dan Kecamatan dengan wilayah terendah yaitu Kecamatan Cepu.

Kondisi iklim di Kabupaten Blora merupakan iklim tropis dengan total curah hujan sepanjang tahun 2016 sebanyak 1.142 mm dengan curah hujan rata-rata sebesar 98 mm/bln dengan curah hujan tertinggi pada bulan Januari sebanyak 191 mm dan curah hujan terendah jatuh pada bulan Agustus yaitu sebanyak 0 mm.

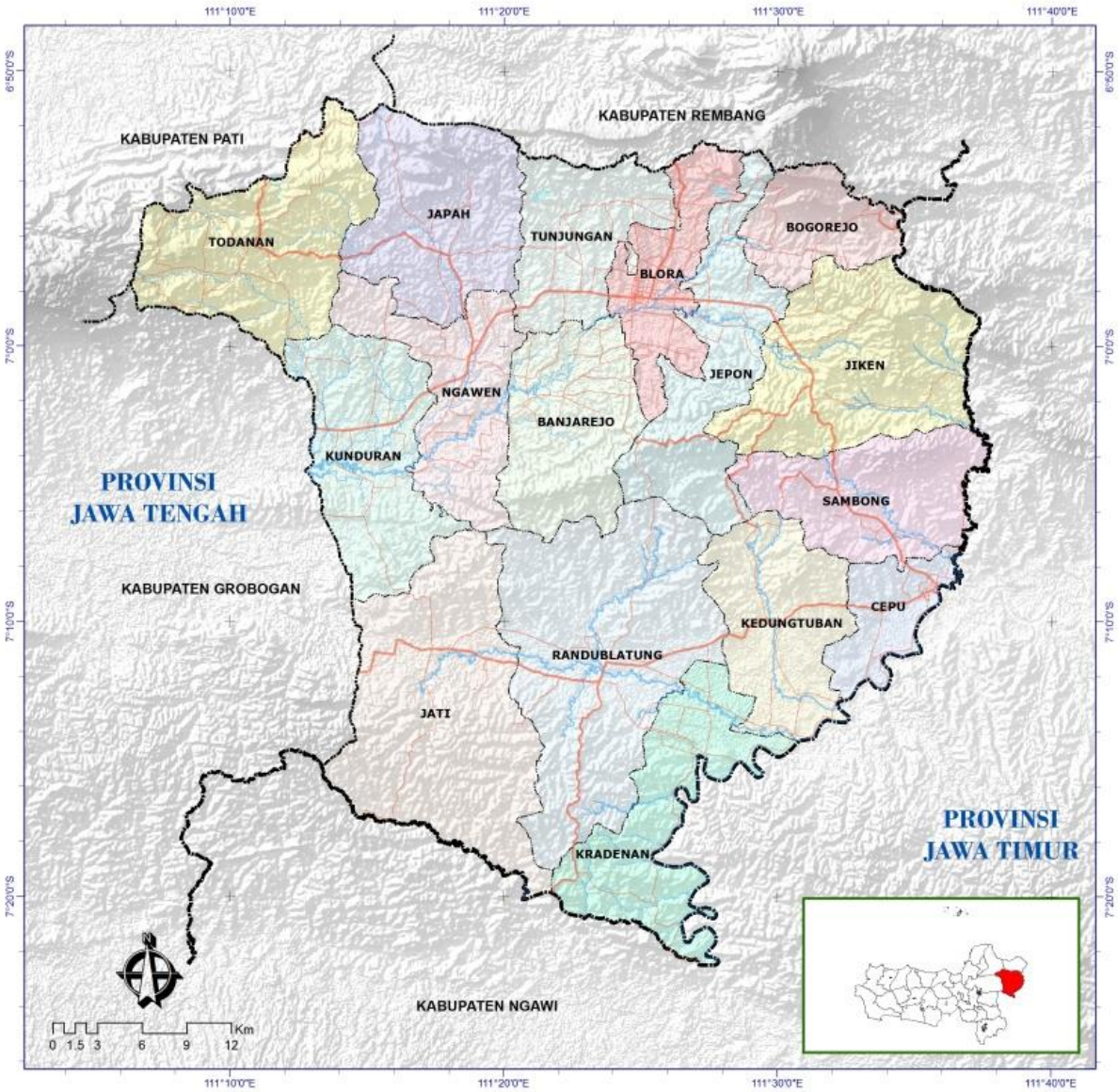

Gambar II-1
Peta Batas Administrasi Kabupaten Blora

Kabupaten Blora mempunyai luas wilayah sebesar 182.058,797 ha, dengan sebagian besar lahan di Kabupaten Blora merupakan lahan kering/bukan sawah yaitu mencapai 136.046,81 ha atau 74,77 persen dan lahan sawah sebesar 46.011,99 ha atau 25,23 persen (2016). Untuk lahan sawah sebagian besar merupakan lahan sawah tadah hujan dengan luas 29.585,99 ha atau 64,30 persen. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel II-1 berikut:

Tabel II-1
Penggunaan Lahan di Kabupaten Blora Tahun 2014-2017

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Tahun			
		2014	2015	2016	2017*)
A.	**Lahan Sawah**	**46.011,99**	**46.993,086**	**45.948,191**	**45.948,191**
1.	Irigasi teknis	7.449,00	7.449,00	7.449,000	7.449,000
2.	Irigasi setengah teknis	967,00	967,00	967,000	967,000
3.	Irigasi sederhana	4.114,00	4.114,00	4.114,000	4.114,000
4.	Irigasi desa/Non PU	1.640,00	1.640,00	1.640,000	1.640,000
5.	Tadah hujan	29.585,99	29.567,086	29.522,191	29.522,191
6.	P2AT	2.256,00	2.256,00	2.256,000	2.256,000
B.	**Lahan Bukan Sawah**	**136.046,81**	**136.065,599**	**136.110,604**	**136.110,604**
1.	Bangunan dan pekarangan	16.991,43	17.004,175	17.049,323	17.049,323
2.	Tegal/kebun	26.182,47	26.188,515	26.188,372	26.188,372
3.	Waduk	56,962	56,962	56,962	56,962
4.	Hutan	90.416,52	90.416,52	90.416,521	90.416,521
5.	Perkebunan	4,000	4,000	4,000	4,000
6.	Lainnya	2.373,825	2.373,825	2.395,430	2.395,430
	Jumlah (A+B)	**182.058,80**	**182.058,685**	**182.058,797**	**182.058,797**

Sumber : Blora Dalam Angka 2017

**) : prediksi*

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan suatu wilayah harus memperhatikan karakteristik wilayah, SDA dan SDM, potensi sumber daya yang tersediayang memiliki nilai tambah bagi keberlanjutan perekonomian dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan hasil Revisi rancangan Perda Revisi RTRW Kabupaten Blora Tahun 2016-2036 dalam rangka untuk memudahkan proses pembangunan di Kabupaten Blora, dari 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Blora dikelompokkan menjadi beberapa Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) yang terdiri dari beberapa kecamatan yang memiliki keterkaitan fungsi pengembangan. SWP di Kabupaten Blora tersebut antara lain:

1. SWP Blora dengan pusat pengembangan Kawasan Perkotaan Blora, meliputi:
   a. Kecamatan Blora;

b. Kecamatan Jepon;

c. Kecamatan Bogorejo;

d. Kecamatan Jiken;

e. Kecamatan Tunjungan; dan

f. Kecamatan Banjarejo.

SWP Blora dengan fungsi pengembangan meliputi pusat pelayanan pemerintahan daerah, perdagangan dan jasa skala kabupaten, pendidikan tinggi, industri, pertanian, pertambangan, dan perhubungan.

2. SWP Cepu dengan pusat pengembangan Kawasan Perkotaan Cepu, meliputi:

   a. Kecamatan Cepu;

   b. Kecamatan Kedungtuban; dan

   c. Kecamatan Sambong.

   SWP Cepu dengan fungsi pengembangan meliputi perdagangan dan jasa, industri, pendidikan tinggi, pertanian, dan perhubungan.

3. SWP Randublatung dengan pusat pengembangan Kawasan Perkotaan Randublatung, meliputi:

   a. Kecamatan Randublatung;

   b. Kecamatan Jati;

   c. Kecamatan Kradenan

   SWP Randublatung dengan fungsi pengembangan meliputi perdagangan, pertanian, dan industri.

4. SWP Ngawen dengan pusat pengembangan Kawasan Perkotaan Ngawen meliputi:

   Kawasan budidaya didefinisikan sebagai bagian wilayah yang secara langsung digunakan atau diambil manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pengelolaan kawasan budidaya bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna sumberdaya serta untuk menghindari konflik pemanfaatan ruang dan kelestarian lingkungan hidup. Sedangkan sasaran yang diinginkan dari pengelolaan kawasan budidaya adalah:

   a. Kecamatan Ngawen;

   b. Kecamatan Kunduran;

c. Kecamatan Japah;

d. Kecamatan Todanan

SWP Ngawen dengan fungsi pengembangan meliputi perdagangan, pertanian, dan industri.

Dalam rangka mengembangkan wilayah di Kabupaten Blora perlu diperhatikan rambu-rambu atau ketentuan yang sudah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Blora. Wilayah atau kawasan yang dapat optimal dikembangkan atau dibudidayakan berada pada kawasan budidaya.

1. Terselenggaranya pemanfaatan ruang dan sumberdaya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

2. Terhindarinya konflik pemanfaatan sumberdaya dengan pengertian pemanfaatan ruang yang berdasarkan pada prioritas pemanfaatan bagi kegiatan yang memberikan keuntungan terbesar pada masyarakat.

Kawasan budidaya di Kabupaten Blora sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dirinci sebagai berikut:

1. Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan digunakan sebagai tempat menghasilkan produksi hutan. Kawasan hutan produksi berfungsi juga sebagai kawasan penyangga. Kawasan penyangga disini dimaksudkan sebagai zona transisi antara kawasan lindung dan budidaya. Perlindungan terhadap kawasan ini dapat berupa pembatasan budidaya seperti arahan sebagai hutan produksi. Kawasan hutan produksi meliputi kawasan hutan produksi dan kawasan hutan produksi terbatas.
Kawasan hutan produksi terdiri atas:

a. Hutan Produksi Terbatas

Hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud berada di wilayah Kabupaten Blora dengan luas kurang lebih 147 hektar berada di Kecamatan Bogorejo.

b. Hutan Produksi Tetap.

Hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud berada di wilayah Kabupaten Blora dengan luas kurang lebih 90.412 hektar dengan lokasi yang tersebar di seluruh kecamatan.

2. Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan Pertanian meliputi kawasan untuk pertanian:

1. Pertanian lahan basah.

   Kawasan pertanian lahan basah diarahkan untuk budi daya tanaman pangan dengan luas kurang lebih 78.802 hektar meliputi:

   - kecamatan Todanan dengan luas kurang lebih 6.314 hektar;
   - kecamatan Tunjungan dengan luas kurang lebih 4.630 hektar;
   - kecamatan Sambong dengan luas kurang lebih 1.149 hektar;
   - kecamatan Randublatung dengan luas kurang lebih 3.442 hektar;
   - kecamatan Ngawen dengan luas kurang lebih 6.241 hektar;
   - kecamatan Kunduran dengan luas kurang lebih 6.571 hektar;
   - kecamatan Kradenan dengan luas kurang lebih 2.410 hektar;
   - kecamatan Kedungtuban dengan luas kurang lebih 4.428 hektar;
   - kecamatan Jepon dengan luas kurang lebih 3.739 hektar;
   - kecamatan Jati dengan luas kurang lebih 2.075 hektar;
   - kecamatan Japah dengan luas kurang lebih 4.501 hektar;
   - kecamatan Cepu dengan luas kurang lebih 2.163 hektar;
   - kecamatan Bogorejo dengan luas kurang lebih 3.113 hektar; dan
   - kecamatan Banjarejo dengan luas kurang lebih 5.446 hektar.

   Arahan pengelolaan Kawasan Pertanian Lahan Basah adalah :

   - Kawasan pertanian lahan basah diarahkan untuk budidaya tanaman pangan;
   - Mempertahankan lahan basah yang beririgasi teknis untuk mendukung program ketahanan pangan nasional;
   - Pertanian lahan basah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
   - Pengaturan debit air irigasi sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan air;

- Pengelolaan pertanian lahan basah harus memperhatikan kaidah pelestarian dan ramah lingkungan;
- Pemeliharaan sumber air untuk menjaga kelangsungan irigasi; dan
- Pada lereng dengan kemiringan lebih dari 8 persen (delapan persen), perlu memperhatikan pengelolaan teknis budidaya padi sawah.

2. Pertanian lahan kering.

   Merupakan Kawasan pertanian yang kawasan yang fungsi utamanya diperuntukkan tidak hanya kegiatan pertanian diluar/selain sawah karena didukung oleh kondisi dan topografi tanah yang memadai dan sumber utama pengairannya berasal dari air hujan.

   Kawasan pertanian lahan kering di Kabupaten Blora dengan luas kurang lebih 18.915 Ha, meliputi:

   - kecamatan Todanan dengan luas kurang lebih 673 hektar;
   - kecamatan Tunjungan dengan luas kurang lebih 604 hektar;
   - kecamatan Sambong dengan luas kurang lebih 881 hektar;
   - kecamatan Randublatung dengan luas kurang lebih 3.608 hektar;
   - kecamatan Kunduran dengan luas kurang lebih 268 hektar;
   - kecamatan Kradenan dengan luas kurang lebih 6.472 hektar;
   - kecamatan Kedungtuban dengan luas kurang lebih 973 hektar;
   - kecamatan Jiken dengan luas kurang lebih 849 hektar;
   - kecamatan Jepon dengan luas kurang lebih 67 hektar;
   - kecamatan Jati dengan luas kurang lebih 3.153 hektar;
   - kecamatan Japah dengan luas kurang lebih 9 hektar;
   - kecamatan Cepu dengan luas kurang lebih 61 hektar;
   - kecamatan Bogorejo dengan luas kurang lebih 421 hektar;
   - kecamatan Blora dengan luas kurang lebih 319 hektar; dan
   - kecamatan Banjarejo dengan luas kurang lebih 555 hektar.

Kawasan pertanian lahan kering di Kabupaten Blora diarahkan pemanfaatannya untuk:

- tanaman pangan;
- Hortikultura;
- Perkebunan;
- hutan rakyat;
- peternakan;
- perikanan; dan
- cadangan pengembangan lahan terbangun.

Dalam rangka melindungi kawasan peruntukan pertanian, maka ditetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang meliputi:

- Lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 52.152 hektar
- Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 6.252 hektar.

3. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan perikanan dikembangkan di daerah yang tersedia pasokan air secara kontinyu yaitu daerah yang tersedia banyak mata air, dan kondisi tanah yang sesuai, khususnya yang sudah tersedia empang/kolam secara alami.

Kawasan perikanan ini diperuntukkan untuk menampung kegiatan perikanan kolam pada hamparan dengan luasan minimum 10 hektar. Kawasan perikanan yang menampung kegiatan perikanan kolam hanya dimungkinkan bila tersedia cukup air.

Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten blora berupa budidaya perikanan air tawar yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Blora.

4. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertambangan bagi wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan, meliputi mineral logam, mineral bukan logam dan batuan. Rencana pemanfaatan potensi tambang dilakukan dengan mempertimbangkan daya dukung alam setempat yang dapat mendukung upaya penyediaan lapangan kerja.

Kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Blora terdiri dari:

1. Minyak dan gas bumi yang berada di seluruh wilayah
2. Mineral logam, bukan logam, batuan, dan batubara yang meliputi batu gamping, batu lempung/tanah liat, pasir kuarsa, phospat, gypsum, sirtu, dan tanah urug.

Arahan pengelolaan untuk kawasan peruntukan pertambangan adalah Sistem penambangan perlu diperhatikan dengan usaha meminimalkan kerusakan lingkungan

5. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan ini merupakan kawasan yang diutamakan untuk menampung kegiatan industri yang penyediaan sarana sepenuhnya dilakukan oleh pengusaha kawasan industri. Kawasan peruntukan industri meliputi industri besar, sedang dan kecil. Kawasan industri memiliki fungsi antara lain:

1. Memfasilitasi kegiatan industri agar tercipta aglomerasi kegiatan
2. produksi di satu lokasi dengan biaya investasi prasarana yang efisien;
3. Mendukung upaya penyediaan lapangan kerja;
4. Meningkatkan nilai tambah komoditas yang pada gilirannya meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah yang bersangkutan;
5. Mempermudah koordinasi pengendalian dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan.

Rencana pengembangan kegiatan industri terdiri atas:

1. kawasan peruntukan industri besar dan industri menengah; dan
2. kawasan peruntukan industri kecil dan mikro.

Kawasan peruntukan industri besar dan industri menengah sebagaimana memiliki luas kurang lebih 563 hektar meliputi:

1. Kecamatan Blora.
2. Kecamatan Jati.
3. Kecamatan Kradenan.
4. Kecamatan Kedungtuban.
5. Kecamatan Cepu.
6. Kecamatan Sambong.

7. Kecamatan Todanan.
8. Kecamatan Jepon.
9. Kecamatan Tunjungan.
10. Kecamatan Ngawen.

Kegiatan industri besar dan industri menengah wajib berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri dan perusahaan industri besar dan menengah yang telah ada dan berizin di luar kawasan peruntukan industri tetap diakui keberadaannya dan tidak diizinkan melakukan perluasan/ pengembangan kawasan.

Sedangkan industri kecil dan/atau mikro dapat dikembangkan pada kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan pertanian lahan kering jika industri kecil dan/atau mikro mengolah hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan/atau pertambangan. Industri kecil dan/atau mikro berlokasi tersebar diseluruh wilayah.

6. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata merupakan kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Kawasan peruntukan pariwisata, terdiri dari : kawasan wisata alam, budaya dan buatan. Kawasan peruntukan pariwisata memiliki fungsi antara lain:

1. Memperkenalkan, mendayagunakan, dan melestarikan nilai-nilai sejarah/ budaya lokal dan keindahan alam;
2. Mendukung upaya penyediaan lapangan kerja yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayah yang bersangkutan.

Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Blora meliputi:

1. Kawasan Wisata Alam;

   Lokasi peruntukan pariwisata tersebut berada di:

   a) Goa Terawang berada di Desa Kedungwungu Kecamatan Todanan.
   b) Goa Kidang berada di Desa Tinapan Kecamatan Todanan.
   c) Goa Sentono berada di Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan.

d) Gunung Manggir berada di perbukitan Manggir Desa Ngumbul Kecamatan Todanan.

e) Bukit Pencu berada di Kecamatan Bogorejo.

Kawasan Wisata Kedungpupur di Desa Ledok berada di Kecamatan Sambong.

2. Kawasan wisata buatan meliputi:

Lokasi peruntukan pariwisata tersebut berada di:

a) Waduk Tempuran berada di perbukitan di Dukuh Juwet Desa Tempuran Kecamatan Blora;

b) Taman Sarbini berada di Kelurahan Tempelan Kecamatan Blora;

c) Waduk Greneng berada di Desa Tunjungan Kecamatan Tunjungan;

d) Waduk Bentolo berada di Desa Tinapan Kecamatan Tunjungan;

e) Waduk Randugunting berada di Desa Kalinanas Kecamatan Japah;

f) Geo-Park wisata migas di Desa Ledok, Kecamatan Sambong

g) Pemandian Sayuran berada di Desa Soko Kecamatan Jepon;

h) Loko Tour di Kecamatan Cepu;

i) Museum Migas di Kecamatan Cepu; dan

j) Kawasan desa wisata meliputi:

1) Kelurahan Jepon;

2) Desa Tempuran;

3) Desa Temengeng;

4) Desa Greneng;

5) Dukuh Temanjang Desa Klopoduwur; dan

6) Kelurahan Wulung.

3. Kawasan wisata budaya meliputi:

Lokasi peruntukan pariwisata tersebut berada di:

a) Taman Budaya dan Seni Tirtonadi berada di Kelurahan Kedungjenar Kecamatan Blora;

b) Makam Bupati Blora Tempo Dulu berada di Desa Ngadipurwo Kecamatan Blora;

c) Makam K. H. Abdul Kohar berada di Desa Ngampel Kecamatan Blora;
d) Makam Sunan Pojok berada di Kelurahan Kauman Kecamatan Blora;
e) Makam Janjang, makam Jati Kusumo, dan makam Jati Swara berada di Desa Janjang Kecamatan Jiken;
f) Petilasan Kadipaten Jipang berada di Desa Jipang Kecamatan Cepu;
g) Makam Srikandi Aceh Poucut Meurah Intan pada pemakaman umum berada di Desa Temurejo Kecamatan Blora;
h) Makam Maling Gentiri berada di Desa Kawengan Kecamatan Jepon;
i) Makam PurwoSuci Ngraho Kedungtuban berada di Desa Ngraho Kecamatan Kedungtuban; dan
j) Makam Mbah Engkrek berada di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo.

7. Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan Permukiman merupakan kawasan di luar kawasan lindung yang diperuntukan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan Penghidupan. Kawasan peruntukan permukiman meliputi permukiman perdesaan dan perkotaan. Tujuan pengelolaan kawasan ini adalah untuk menyediakan tempat permukiman yang sehat dan aman dari bencana alam serta memberikan lingkungan yang sesuai untuk pengembangan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Kawasan peruntukan permukiman memiliki luas kurang lebih 27.334 hektar meliputi:

1. Permukiman Perkotaan

   Kawasan permukiman perkotaan merupakan kawasan permukiman yang tumbuh dan berkembang pada daerah pusat-pusat kota, baik pusat kota kabupaten maupun pusat kota kecamatan.

   Lokasi permukiman perkotaan meliputi PKW, PKL, PKLp, dan PPK yang berada di semua lokasi kawasan perkotaan kecamatan.

2. Permukiman Perdesaan.

Kawasan permukiman perdesaan pada dasarnya adalah tempat tinggal yang tidak dapat dipisahkan (atau letaknya tidak boleh terlalu jauh) dengan tempat usaha. Oleh karenanya, pengembangan permukiman atau rumah tempat tinggal di desa yang bersangkutan, diperkenankan di daerah yang berdekatan dengan desa yang bersangkutan. Lokasi permukiman perdesaan berada di semua kecamatan.

8. Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud merupakan kawasan pertahanan dan keamanan negara. Kawasan pertahanan dan keamanan negara tersebut meliputi:

1. Batalyon Infanteri 410/Alugoro di Kecamatan Blora;
2. Komando Distrik Militer (KODIM) di Kecamatan Blora;
3. Komando Rayon Militer (KORAMIL) tersebar pada masing-masing kecamatan di seluruh Kabupaten Blora;
4. Kepolisian Resor (POLRES) berada di Kecamatan Jepon; dan
5. Kepolisian Sektor (POLSEK) tersebar pada masing-masing kecamatan di seluruh wilayah Daerah.

2.1.1.3 Kawasan Rawan Bencana

Dalam proses pengembangan wilayah juga perlu diperhatikan daerah-daerah rawan terjadinya bencana sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan optimal. Kawasan rawan bencana alam Kabupaten Blora ditetapkan berdasarkan kejadian dan potensi bencana di Kabupaten Blora. Kawasan rawan bencana di Kabupaten Blora berdasarkan RTRW Kabupaten Blora adalah sebagai berikut:

a. Kawasan Rawan Tanah Longsor

Kawasan rawan bencana tanah longsor merupaka wilayah yang kondisi permukaan tanahnya mudah longsor karena terdapat zona yang bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah. Kawasan rawan yaitu di wilayah Kecamatan Jiken, Kecamatan Bogorejo, Kecamatan Japah dan Kecamatan Todanan. Luas kawasan rawan bencana longsor yang terdeteksi adalah 2.911 ha.

Arahan pengelolaan dan pemanfaatannya yaitu:

1. Melakukan rekayasa teknik bangunan untuk menahan kekuatan getaran, dengan memperkuat struktur bangunan pada wilayah yang diketahui rentan terhadap gerakan tanah;

2. Membatasi perkembangan penduduk pada wilayah rawan longsor terutama pada wilayah dengan kemiringan 40persen yang diketahui dapat mengakibatkan bahaya longsor; serta
3. Stabilitasi lereng melalui reboisasi dengan tanaman keras.

b. Kawasan Rawan Banjir

Kawasan rawan bencana banjir merupakan kawasan yang sering/berpotensi tinggi mengalami bencana alam berupa banjir atau tempat-tempat yang secara rutin setiap musim hujan mengalami genangan lebih dari enam jam pada saat hujan turun dalam keadaan musim hujan normal. Kriteria daerah-daerah yang teridentifikasi sering dan berpotensi mengalami bencana banjir terletak di daerah cekungan maupun daerah sekitar sungai. Bencana banjir akibat meluapnya sungai Bengawan Solo adalah di daerah Kecamatan Cepu dengan luas 588,6 ha, Kedungtuban dengan luas 269,6 ha, Kradenan dengan luas 1.649,9 ha. Berdasarkan hasil analisis inventaris kawasan lindung tahun 2008 luas daerah rawan banjir di Kabupaten Blora adalah seluas 2.507 ha.

Rencana dilakukan untuk mengatasi bencana banjir di Daerah Rawan Banjir sebagai berikut:

1. Pelestarian dan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) secara lintas wilayah.
2. Pembuatan tanggul/ embung/ bendung/ kawasan resapan/ saluran pembuang khusus/bangunan air lain pada kawasan-kawasan aliran sungai ataupun yang terkena dampak dengan prioritas pada kawasan rawan banjir dan upaya pengurangan/pengendalian debit air pada kondisi tertentu yang mengkhawatirkan.
3. Mengoptimalkan fungsi kawasan lindung dan kawasan resapan air.
4. Lebih mengoptimalkan lagi sempadan-sempadan sungai, dan saluran yang ada sesuai fungsinya secara bertahap guna kesinambungan hasil penanganan banjir yang optimal.
5. Penyiapan kawasan aman sebagai tempat pengungsian dan evakuasi warga.
6. Normalisasi prasarana drainase sebagai pengendali banjir.

7. Melakukan eliminasi terhadap faktor-faktor yang menghalangi pengaliran air permukaan.
8. Melakukan koordinasi untuk pengelolaan dan pengembangan drainase dengan daerah sekitarnya.

Membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada jaringan primer, sekunder maupun tersier, serta tidak menyatukan fungsi irigasi untuk drainase, dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi program dan hasil antara pemerintah provinsi dan daerah dalam penanganan dan pengendalian bencana banjir, serta menyusun review masterplan penanganan dan pengendalian banjir secara terpadu baik menyangkut sarana maupun prasarananya.

c. Kawasan Rawan Kekeringan

Kawasan kekeringan terjadi di seluruh Kabupaten Blora kecuali Kecamatan Kradenan dan Kecamatan Todanan. Kecamatan yang mengalami kekeringan adalah adalah Kecamatan Jati, Kecamatan Randublatung, Kecamatan Kedungtuban, Kecamatan Cepu, Kecamatan Sambong, Kecamatan Jiken, Kecamatan Bogorejo, Kecamatan Jepon, Kecamatan Blora, Kecamatan Banjarejo, Kecamatan Tunjungan, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Japah dan Kecamatan Kunduran.

d. Kawasan Rawan Angin Topan

Kriteria kawasan ini adalah semua lokasi yang diiedentifikasikan memiliki potensi tinggi terjadi/mengalami bencana alam angin topan. Kawasan rawan angin topan di Kabupaten Blora meliputi Kecamatan Jiken, Kecamatan Randublatung dan Kecamatan Kedungtuban.

2.1.1.4 Kondisi Demografi

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Blora dari Tahun 2013 sampai Tahun 2017 mengalami kenaikan rata–rata sebesar 0.725 persen. Dilihat dari wilayah, dari enam belas Kecamatan di Kabupaten Blora, Kecamatan Blora merupakan kecamatan yang paling padat penduduknya dengan jumlah penduduk 104.113 jiwa, sedangkan Kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Bogorejo. Perkembangan jumlah penduduk per kecamatan di Kabupaten Blora dapat dilihat pada Tabel II-2 berikut:

Tabel II-2
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Blora
Tahun 2013-2017

No.	Kecamatan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jati	56.081	56.576	56.568	56.942	57.309
2.	Randublatung	88.873	89.735	90.458	90.962	91.384
3.	Kradenan	45.997	46.428	46.340	46.535	46.683
4.	Kedungtuban	64.430	64.092	64.969	65.069	65.607
5.	Cepu	84.387	85.096	85.607	85.884	86.184
6.	Sambong	31.235	31.411	31.219	31.311	31.460
7.	Jiken	41.310	41.504	41.643	41.980	42.332
8.	Bogorejo	26.463	26.599	26.620	26.650	26.795
9.	Jepon	67.287	68.003	68.249	68.882	69.510
10.	Blora	101.913	102.738	103.182	103.666	104.113
11.	Banjarejo	66.263	67.057	67.875	68.519	69.184
12.	Tunjungan	50.716	51.365	51.754	52.418	52.921
13.	Japah	38.109	38.587	38.579	38.905	39.208
14.	Ngawen	66.377	67.192	68.051	68.640	69.219
15.	Kunduran	72.357	73.320	73.643	73.940	74.472
16.	Todanan	68.583	69.541	70.364	70.898	71.451
	Jumlah	**969.381**	**979.244**	**984.848**	**991.201**	**997.832**

Sumber : Dindukcapil Kab Blora

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1 PDRB

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan Pendapatan Daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Proses pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan indikator peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), dan distribusi pendapatan sepanjang waktu.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora pada Tahun 2016 meningkat cukup signifikan dibandingkan Tahun 2015, dimana pertumbuhan

ekonomi tahun 2016 tercatat naik sebesar 23,53 persen dibandingkan Tahun 2015 sebesar 5,36 persen, hal ini disebabkan oleh kenaikan sektor pertambangan yakni dengan beroperasinya ladang gas PPBJ di Kecamatan Kradenan akan tetapi pertumbuhan ekonomi tersebut belum tercermin secara nyata terbukti masih tingginya angka kemiskinan dan penangguran di Kabupaten Blora.

Struktur perekonomian suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh potensi Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi wilayah adalah distribusi persentase sektoral. Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor semakin besar pula pengaruh sektor tersebut di dalam perkembangan ekonomi suatu daerah.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Blora Tahun 2016 sebesar 19,964 milyar rupiah meningkat jika dibandingkan Tahun 2015 yang mencapai 16,368 milyar rupiah. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (tahun dasar 2010) pada Tahun 2016 sebesar 15,913 milyar rupiah meningkat dibandingkan Tahun 2015 yang mencapai 12,882 milyar rupiah, sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora Tahun 2016 sebesar 23,53 persen, melonjaknya pertumbuhan ekonomi tahun 2016 dengan faktor utama produksi migas. Pertumbuhan ekonomi 2016 tanpa migas sebesar 5,73%.

Adapun perkembangan PDRB Kabupaten Blora Tahun 2012-2017 dapat dilihat pada Tabel II-3 berikut:

Tabel II-3
Perkembangan PDRB Kabupaten Blora

Tahun	PDRB adhb	PDRB adhk	
	Nilai (Rp. Juta)	Nilai (Rp. Juta)	Pertumbuhan (persen)
2012	12.285.562,55	11.116.865,90	4,90
2013	13.543.661,54	11.712.504,85	5,36
2014	15.101.975,26	12.227.201,29	4,39
2015	16.368.347,06	12.882.587,70	5,36
2016	19.964.349,71	15.913.432,06	23,53
2017*)	18.315.748.28**	13.679.816.08**	5,03**

Sumber : PDRB Kabupaten Blora Tahun 2017

**) prediksi*

Dilihat dari sektor penunjang PDRB ADHB Tahun 2016, lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi penyumbang PDRB tertinggi yakni mencapai 24,80 persen, kemudian disusul oleh Pertambangan dan Penggalian yang mengalami dengan nilai sebesar 23,19 persen kemudian disusul perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,96 persen dan

Perkembangan distribusi PDRB ADHB di Kabupaten Blora dapat dilihat pada Tabel II-4 berikut ini:

Tabel II-4
Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Blora Tahun 2013-2017

Kategori	Klasifikasi Lapangan Usaha	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017*)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29,92	27,78	28,00	24,80	24,80
B	Pertambangan dan Penggalian	13,80	14,47	14,08	23,19	23,19
C	Industri Pengolahan	10,27	11,37	11,01	9,62	9,62
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
F	Konstruksi	4,12	4,31	4,44	3,99	3,99
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,88	16,44	16,48	14,96	14,96
H	Transportasi dan Pergudangan	2,60	2,75	2,83	2,56	2,56
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,30	3,41	3,51	3,22	3,22
J	Informasi dan Komunikasi	1,13	1,10	1,09	0,96	0,96
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,20	3,22	3,33	3,02	3,02
L	Real Estate	1,32	1,37	1,39	1,23	1,23
M	Jasa Perusahaan	0,29	0,29	0,31	0,28	0,26
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,89	3,80	3,85	3,42	3,42
O	Jasa Pendidikan	6,18	6,43	6,34	5,77	5,77
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,90	0,95	0,98	0,87	0,87
Q	Jasa lainnya	2,07	2,18	2,20	2,00	2,00
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MINYAK BUMI		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : PDRB Kab.Blora Tahun 2017

2.1.2.1.2 Inflasi

Laju inflasi yang terjadi di Kabupaten Blora cenderung fluktuatif pada kurun waktu 2013-2017. Inflasi yang terjadi pada kurun waktu tersebut mengalami kondisi tertinggi pada tahun 2013 yaitu mencapai 7,94 persen kemudian turun pada tahun 2014 sebesar 7,13 persen dan tahun 2015 sebesar 2,85 persen. Pada tahun 2016 angka inflasi meningkat menjadi 3,26 persen. Inflasi Tahun 2017 per September 2017 sebesar 3,34 persen.

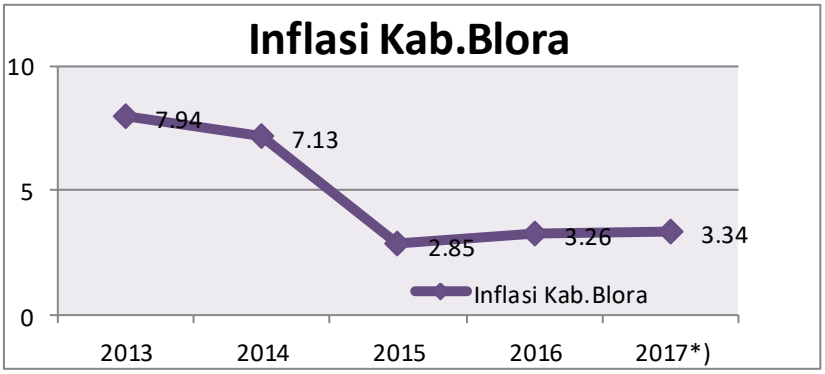

Gambar II-2
Perkembangan Inflasi Kabupaten Blora Tahun 2012-2017

2.1.2.1.3 Indeks Gini dan Indeks Williamson

Indeks Gini merupakan satu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks gini bernilai 0 hingga 1. Ketimpangan antar kelompok pendapatan dikatakan ketimpangan *"rendah"* bila indeks Gini kurang dari 0,3, dikatakan Ketimpangan *"sedang"* bila indeks Gini antara 0,3 – 0,4; dan Ketimpangan *"tinggi"* bila indeks Gini di atas 0,4.

Angka indeks gini di Kabupaten Blora menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang terus meningkat, jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah ketidakmerataan pendapatan Kabupaten Blora memiliki tren yang sama. Hal ini menggambarkan gejolak perubahan pendapatan masyarakat di Jawa Tengah berimbas juga pada perubahan pendapatan masyarakat Kabupaten Blora atau sebaliknya. Dalam beberapa tahun ke depan, diprediksi ketimpangan pendapatan akan naik seiring dengan pertumbuhan ekonomi atau tingkat kemakmuran masyarakat yang meningkat. Peningkatan tingkat kemakmuran cenderung akan semakin meningkatkan ketimpangan pendapatan antar masyarakat.

Secara rinci Perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Blora dikemukakan pada Tabel II-5 berikut:

Tabel II-5
Besarnya Indek Gini dan Pemerataan Pendapatan Penduduk Kabupaten Blora dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017*)
1	Kab. Blora	0,38	0,41	0,39	0,39	0,39
2	Jawa Tengah	0,38	0,39	0,38	0,38	0,38

Sumber : BPS Kabupaten Blora

**) prediksi*

Indeks Williamson digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah. Dari hasil pengolahan Indeks Williamson PDRB, tingkat disparitas antar kecamatan di Kabupaten Blora cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Nilai indeks Williamson pada Tahun 2013 sebesar 0,458 terus mengalami penurunan pada tahun 2017 mencapai angka 0,415 . Jika melihat nilai indeks Williamson di Kabupaten Blora, maka bisa dilihat bahwa tingkat disparitas di Kabupaten Blora masuk dalam kategori sedang, dimana pada kategori ini terlihat daerah-daerah yang perkembangannya cepat dan ada daerah yang cenderung stagnan. Pemerintah Kabupaten Blora mulai Tahun 2016 berupaya meningkatkan Pembangunan melalui Program Percepatan Pertunbuhan Wilayah Selatan agar Ketimpangan wilayah dapat diminimalisir, sehingga hasil – hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata.

Indeks wiliamson Kabupaten Blora lebih rendah dibandingkan Jawa Tengah, seperti terlihat pada Tabel II-6 berikut:

Tabel II-6
Indeks Williamson Kabupaten Blora dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016

Tahun	Blora	Jawa Tengah
2013	0,458	0,680
2014	0,452	0,678
2015	0,425	0,673
2016	0,420	0,669
2017*)	0,415	0,669

Sumber: BPS Kabupaten Blora tahun 2017

2.1.2.1.4 Kemiskinan

Dalam kurun waktu tahun 2013-2017 terjadi penurunan presentase penduduk miskin walaupun tidak signifikan. Pada Tahun 2013 presentase penduduk miskin masih di angka 14,64 persen, dan turun menjadi 13,04 persen pada tahun 2017 . Jika dilihat dari jumlah penduduk miskin di Kabupaten Blora pada tahun 2013 sebanyak 123.800 jiwa, berkurang menjadi 111.880 jiwa pada tahun 2017.

Indeks kedalaman kemiskinan atau sering disingkat P1, merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Capaian P1 Kabupaten Blora pada periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami perkembangan yang fluktuaksi, yaitu pada tahun 2012 sebesar 2,19 pada tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 2,39 kemudian pada tahun 2015 menurun menjadi sebesar 2,08 dan pada tahun terakhir meningkat kembali menjadi sebesar 2,17%. Posisi relatif P1 Kabupaten Blora pada tahun 2016 sebesar 2,17 di bawah rata-rata capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 2,37 dan di atas Nasional sebesar 1,74. Dibandingkan dengan Kabupaten sekitarnya di Jawa Tengah tahun 2016, P1 Kabupaten Blora berada diposisi kedua tertinggi setelah Kabupaten Rembang (3,28).

Indeks Keparahan Kemiskinan atau disingkat P2, merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Perkembangan indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Blora dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami perkembangan yang fluktuaksi, yaitu pada tahun 2012 sebesar 0,47 meningkat menjadi sebesar 0,59 pada tahun 2013 dan, kemudian pada tahun 2016 menjadi sebesar 0,54. Posisi relatif P2 Kabupaten Blora pada tahun 2016 sebesar 0,54 di bawah Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,63 dan diatas Nasional sebesar 0,44. P2 Kabupaten Blora tahun 2016 dibandingkan Kabupaten sekitarnya di Jawa Tengah berada pada posisi tertinggi kedua setelah Kabupaten Rembang sebesar 0,85.

Data kemiskinan secara lengkap dapat dilihat Tabel II-7 berikut:

Tabel II-7
Kondisi Penduduk Miskin di Kabupaten Blora Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	123.800	114.784	115.000	113.900	111.880
2.	Persentase Penduduk Miskin (%)	14,64	13,6	13,52	13,33	13,04
3.	Posisi Relatif Kemiskinan Kabupaten Blora di Jawa Tengah	21	21	24	21	21

Sumber: BPS kab Blora

2.1.2.2 Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, meliputi: Angka Usia Harapan Hidup (UHH) untuk mengukur peluang hidup; rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf untuk mengukur status tingkat pendidikan penduduk; serta pengeluaran rill per kapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak.

IPM Kabupaten Blora Tahun 2016 masih menempati peringkat ke-29, dan merupakan yang terendah nilainya di bandingkan dengan Kabupaten lain se-Eks Karesidenan Pati (Grobogan, Rembang, Pati, Kudus dan Jepara). Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia baik di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi masih tertinggal dari kabupaten/kota lainnya. Perbandingan IPM kabupaten Blora dengan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel II-8 berikut:

Tabel II-8
IPM Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2015-2016

Kabupaten	2015		2016	
	Nilai IPM	Peringkat	Nilai IPM	Peringkat
Kab. Grobogan	68,05	21	68,52	22
Kab. Blora	**66,22**	**29**	**66,61**	**29**
Kab. Rembang	68,18	20	68,60	21
Kab. Pati	68,51	19	69,03	19
Kab. Kudus	72,72	9	72,94	10
Kab. Jepara	70,02	15	69,61	15
Jawa Tengah	**69,49**	**12**	**69,98**	**12**

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Capaian indikator pembentuk IPM Kabupaten Blora kesemuanya meliputi usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita yang disesuaikan mengalami kenaikan dalam kurun waktu 2015-2016. Namun demikian pencapaian indikator komposit IPM, baik angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan masih dibawah target tahunan RPJMD Tahun 2016-2021.

Angka Harapan Hidup, Paritas Daya Beli dan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Blora menempati angka yang terendah dibandingkan Kabupaten lain se- eks Karesidenan Pati. Sedangkan harapan lama sekolah di Kabupaten Blora lebih baik daripada Kabupaten Rembang maupun Pati. Perbandingan capaian angka usia harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Blora dengan kabupaten/kota di Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel II-9 berikut:

Tabel II-9
Perkembangan Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Blora dengan Kabupaten/Kota sekitarnya di Jawa Tengah Tahun 2015-2016

Komponen IPM/Tahun	AHH (tahun)		Harapan Lama Sekolah (tahun)		Rata-rata lama sekolah (tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (000 Rp PPP)	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Kab. Grobogan	74,27	74,37	12,25	12,26	6,33	6,62	9,457	9,847
Kab. Blora	**73,85**	**73,88**	**11,91**	**11,92**	**6,04**	**6,18**	**8,699**	**8,846**
Kab. Rembang	74,22	74,27	12,02	12,03	6,92	6,93	9,122	9,453
Kab. Pati	75,63	75,69	11,79	11,92	6,71	6,83	9,380	9,548
Kab. Kudus	76,41	76,43	13,14	13,19	7,84	7,85	10,203	10,348
Kab. Jepara	75,65	75,67	12,27	12,28	7,31	7,32	9,504	9,695

Sumber: BPS Jawa Tengah

2.1.2.2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Blora dalam kurun waktu tiga tahun (2015-2017) cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2015 angka TPAK sebesar 71,69 persen dan TPT sebesar 4,68 persen, menurun pada Tahun 2016 yakni TPAK sebesar 70,5 persen dan TPT sebesar 4,0 persen, dan tahun 2017 angka TPAK menjadi 70,21 persen

dan TPT menjadi 2,85 persen. Secara lebih lengkap, perkembangan TPAK dan TPT Kabupaten Blora dapat dilihat pada Tabel II-10 berikut:

Tabel II-10
TPAK dan TPT Kabupaten Blora Tahun 2013-2017

Tahun	TPAK (persen)	TPT (persen)
2013	75,10	6,25
2014	68,50	4,30
2015	71,69	4,68
2016	70,5	4,0
2017	70,21	2,85

Sumber: Survei Angkatan Kerja Kabupaten Blora Tahun 2017

2.1.2.2.3 Angka kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat. Semakin tinggi AKI dan AKB serta adanya gizi buruk di suatu wilayah menandakan masih rendahnya derajat kesehatan.

Angka kematian ibu pada Tahun 2016 cukup tinggi yakni terjadi 22 kasus kematian ibu, hal ini disebabkan oleh berbagai hal diantaranya masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan pemeriksaan rutin selama kehamilan di fasilitas pelayanan kesehatan, serta penanganan kasus persalinan beresiko tinggi di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan yang belum optimal, akan tetapi pada tahun 2017, AKI mengalami penurunan menjadi 125,66 KH (15 kasus) sedangkan AKB mengalami peningkatan menjadi 14,07 KH (168 kasus) walaupun secara kasus mengalami penurunan, untuk melihat perkembangan AKI dan AKB selama kurun waktu 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel II-11 sebagai berikut:

Tabel II-11
Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI)
Kabupaten Blora Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Kasus kematian bayi	AKB (per 1000 KH)	Jumlah Kasus kematian ibu	AKI (per 100.000 KH)
2013	129	10,96	14	119
2014	204	16,84	12	99,04
2015	169	14,07	15	124,2
2016	172	13,86	22	185,53
2017	168	14,07	15	125,66

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Blora tahun 2017

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Hasil pelaksanaan kinerja Pemerintah Kabupaten Blora dalam penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan pelayanan publik dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran melalui pelaksanaan RKPD Tahun 2017 yaitu:

2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.1.3.1.1 Pendidikan

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) suatu daerah menunjukkan tingkat pemerataan dan perluasan akses pembangunan pendidikan. Semakin tinggi APK menunjukkan banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah, begitu juga dengan APM, semakin tinggi APM maka semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu.

Tabel II-12
Persentase Perkembangan Indikator Pendidikan di Kabupaten Blora Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	APK SD/MI	101,77	98,51	95,34	104	103,61
2.	APM SD/MI	85,69	82,32	82,82	94,20	94,26
3.	APK SMP/MTs	95,84	99,53	101,37	105,73	104,34

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
4	APM SMP/MTs	62,19	66,55	72,08	84,10	85,38
5	Angka Melek Huruf	85,45	n/a	n/a	n/a	99,9
6	Angka Putus Sekolah tingkat SD/MI/paket A	0,75	0,75	0,69	0,19	0,07
7	Angka Putus Sekolah tingkat SMP/MTs/PAKET B	1,66	1,66	1,2	0,55	0,3
8	Rasio guru /1.000 murid	89,13	90,05	90,05	90,05	72,8
9	Rasio guru/murid per kelas rata - rata	80,19	82,20	82,21	82,3	82,31
10	Guru TK yang memenuhi kualifikasi D IV/S1	68,76	81,87	81,89	98,79	71
11	Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi D IV/S1	67	81,71	82,76	90,36	94,79
12	Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi D IV/S1	98,89	90,84	92,69	86,43	95,98

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Blora tahun 2017

Peningkatan APK maupun APM baik untuk tingkat SD maupun SMP di Kabupaten Blora, menunjukkan bahwa program pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah kabupaten Blora di Kabupaten Blora selama kurun waktu 2013-2017 mengalami kenaikan, hal ini disebabkan oleh program wajib belajar 12 (dua belas) tahun pada anak usia sekolah, program sekolah gratis mendongkrak angka partisipasi sekolah, disamping juga adanya program Kartu Indonesia Pintar yang dicanangkan Pemerintah Pusat .

Kualitas sumberdaya pendidikan dapat dilihat dari kualifikasi guru D-IV/S1 pada jenjang SD maupun SMP pada tahun 2016 tergolong baik akan tetapi tahun kualifikasi sumberdaya pendidikan jenjang TK yang memenuhi kualifikasi D IV/S1 mengalami penurunan dari 98,78 persen pada tahun 2016 menjadi 71 persen pada tahun 2017.

2.1.3.1.2 Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan sekarang ini dititkberatkan pada pendekatan keluarga, dengan lebih mengutamakan kegiatan preventif dan promotif daripada kegiatan kuratif dan rehabilitatif. Prioritas pembangunan kesehatan

antara lain peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal, cepat dan adil serta peningkatan penjaminan kesehatan (*Universal Coverage*) bagi masyarakat. Jumlah sarana kesehatan yang tersedia di Kabupaten Blora dapat dilihat pada Tabel II-13 berikut:

Tabel II-13
Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Blora Tahun 2013-2017

No.	Sarana Kesehatan	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Posyandu	Unit	1.280	1.280	1.280	1.280	1289
2.	Polindes/PKD	Unit	169	204	204	207	207
3.	Puskesmas						
	- Induk	Unit	26	26	26	26	26
	- Pembantu	Unit	57	57	58	58	58
	- Keliling	Unit	32	32	36	36	37
4.	Poliklinik	Unit	19	21	21	21	22
5.	RSU Daerah						
	- Tipe C	Unit	2	2	2	2	2
	- Tipe D	Unit	-	-	-	-	-
6.	RSU Swasta (Tipe D)	Unit	4	3	3	2	3
7.	Klinik/Praktek Dokter	Unit	333	326	407	410	415
8.	Laboratorium Kesehatan						
	- Pemerintah	Unit	1	1	1	1	1
	- Swasta	Unit	6	6	6	6	6

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Blora tahun 2017

Tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat vital dalam rangka pelayanan kesehatan. Rasio tenaga kesehatan baik dokter, dokter gigi, perawat, maupun bidan terhadap penduduk belum mencapai target Indonesia Sehat (45 dokter umum per 100.000 penduduk, 11 dokter spesialis per 100.000 penduduk, 13 dokter gigi per 100.000 penduduk, 180 perawat per 100.000 penduduk, dan 120 bidan per 100.000 penduduk). Pemerintah Kabupaten Blora terus berupaya menambah jumlah dokter spesialis melalui program beasiswa pendidikan spesialis dan pemberian insentif khusus bagi dokter spesialis kontrak. Jumlah Tenaga Kesehatan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II-14 berikut:

Tabel II-14
Jumlah Tenaga Medis di Kabupaten Blora Tahun 2013-2017

No.	Tenaga Kesehatan	Satuan	Tahun				
			2102	2013	2014	2015	2017
1.	Dokter Umum	Orang	72	72	92	92	102
2.	Dokter Spesialis	Orang	30	33	46	46	52
3.	Dokter Gigi	Orang	20	21	19	19	21
4.	Perawat	Orang	558	574	554	554	560
5.	Bidan	Orang	131	145	181	181	183
6.	Ahli Kes. Masy.	Orang	15	15	15	15	15
7.	Ahli Penyeh. Lingk.	Orang	23	20	23	23	23
8.	Apoteker	Orang	27	22	54	54	55
9.	Ahli Gizi	Orang	37	41	43	43	44
10.	Analis Lab.	Orang	43	43	53	53	53
11.	Bidan Desa	Orang	289	289	280	280	284

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Blora Tahun 2017

Pemerintah Kabupaten Blora memiliki 2 (dua) rumah sakit rujukan yang berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah, yaitu: RSUD Dr. R. Soetijono Blora dan RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu. Kinerja layanan kedua RSUD tersebut dapat dilihat pada Tabel II-15 berikut:

Tabel II-15
Kinerja Layanan Rumah Sakit di Kabupaten Blora Tahun 2015-2017

Indikator	Tahun								
	2015			2016			2017		
	RSUD Blora	RSUD Cepu	Rata-Rata	RSUD Blora	RSUD Cepu	Rata-Rata	RSUD Blora	RSUD Cepu	Rata-Rata
BOR (%)	70,96	63,88	67,42	69,7	65,13	67,415	57,13	65,65	61,39
LOS (hari)	3,42	3,96	3,68	3,00	3,91	3,455	3,47	4,72	4,09
TOI (hari)	1,4	2,03	1,715	2,00	2,10	2,05	2,6	2,24	2,42
BTO (kali)	75,7	65.6	70,65	75,8	60,91	68,355	60,09	50,75	55,42
NDR (per 1.000 pasien keluar)	0,011	0,02	0,0155	0,39	1,04	0,715	0,17	1,26	0,72

Sumber: RSUD dr. R Soetijono Blora dan RSUD dr. R. Soeprapto Cepu diolah tahun 2017

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Blora dilalui jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa dan jalan lingkungan baik di kelurahan maupun desa. Panjang jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Blora berdasaran Keputusan Bupati Nomor 620/293/2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Blora yakni 1.210,84 km. Sementara jalan provinsi di wilayah Kabupaten Blora memiliki panjang 115,1 km (sedang diusulkan penambahan jalan kabupaten menjadi jalan propinsi sepanjang 46,16 km) dan jalan nasional dengan panjang 38,48 km.

Pada tahun 2017, jalan kabupaten dengan kondisi baik sebesar 35,56 persen, kondisi sedang 13,22 persen, rusak ringan 28,19 persen dan rusak berat 24,04 persen. Jalan dengan kondisi baik mengalami penurunan dari tahun 2017 karena banyaknya jalan yang rusak, disamping itu adanya pengakuan beberapa ruas jalan disekitar hutan yang menjadi jalan Kabupaten.

Jumlah jembatan yang ada di Kabupaten Blora sebanyak 158 unit dengan panjang 2.500,90 m. Kondisi jembatan baik di Kabupaten Blora tahun 2017 sebesar 80,77 persen atau 2.020 m dari total panjang jembatan.

Kerusakan jalan dan jembatan di Kabupaten Blora antara lain disebabkan kondisi tanah di Kabupaten Blora yang cenderung labil. Selain itu kerusakan jalan dan jembatan juga dipengaruhi oleh tonase kendaraan yang seringkali melebihi kapasitas jalan.

Sarana dan prasarana sumber daya air diantaranya embung dalam keadaan baik di Kabupaten Blora sebanyak 55 %, sedangkan sisanya dalam kondisi rusak sedang maupun ringan (program dana desa Tahun 2017 diprioritaskan untuk pembangunan/pemeliharaan embung di desa). Embung di Kabupaten Blora berfungsi untuk menampung kelebihan air hujan di musim hujan dan air limpasan *(run off)* serta sumber air lainnya. Untuk waduk di Kabupaten Blora (sebanyak 2 unit) sebesar 95 persen dalam kondisi yang baik. Waduk di Kabupaten Blora ini memiliki fungsi utama sebagai irigasi tanah pertanian dan pembesaran ikan air tawar. Pada tahun 2017 Kabupaten Blora mendapat alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat untuk pengembangan Embung Pleret di Kecamatan Blora.

Pada bidang tata ruang, Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang selain tersediannya dokumen perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2011-2031, dan sedang direvisi, juga dilihat dari tersusunnya rencana rinci berupa RDTR kecamatan yang hingga tahun 2016 telah

tersusun sebanyak 11 kecamatan. Yang belum disusun RDTR adalah Kecamatan Banjarejo, Bogorejo, Sambong, Jiken dan Jati. Namun demikian dari RDTR yang telah disusun belum ada yang menjadi perda.

Rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB Kabupaten Blora sebesar 1,10 %. Sementara itu untuk kasus alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan di dalam RTRW juga masih terjadi di Kabupaten Blora.

Secara rinci capaian urusan Pekerjaan Umum dalam kurun waktu tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel II-6 berikut:

Tabel II-16
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
A.	**Program Pembangunan jalan dan Jembatan**						
	Panjang jembatan baru yang terbangun	km	20	24	26	26,5	27,716
B	**Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**						
1	Persentase jalan kondisi baik	%	35,53	45,53	65,7	33,59	35,56
2.	Persentase jembatan kondisi baik	%	74,1	74,4	74,5	75	80,77
3.	Panjang saluran drainase dalam kondisi baik	km	137,18	144,4	152	201,5	240
B.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan**						
1.	Persentase sarana dan prasarana kebinamargaan kondisi baik	%	100	100	100	100	100
C.	**Program pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan lainnya.**						
1.	persentase saluran irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	17	18	19	20,03	24
D.	**Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya**						

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	persentase embung kondisi baik	%	50	50	50	53,6	55
2.	persentase waduk kondisi baik	%	90	90	90	90	90
E.	**Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan**						
1.	Tingkat kualitas jalan lingkungan (jalan tanah menjadi perkerasan paving blok)	%	n/a	n/a	25	50	60
F.	**Program Perencanaan Tata Ruang**						
1.	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan serta digital.	dokumen	n/a	2	1	1	1
2.	Jumlah Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah	dokumen	0	0	0	0	0
G.	**Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang**						
1.	Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan PR Kabupaten Blora tahun 2017

2.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Luasan kawasan kumuh di Kabupaten Blora tahun 2015 teridentifikasi sebesar 66,11 hektar dan mengalami penurunan menjadi 65,05 hektar (Intervensi Program Kota tampa Kumuh Tahun 2017). Dalam rangka mencapai target Universal Acces 2019 yaitu mewujudkan luasan kawasan kumuh sebesar 0% telah dilakukan usaha-usaha penanganan melalui dana APBN maupun APBD. Tahun 2016 telah dilakukan penataan 240 RTLH dengan dana APBD Propinsi Jawa Tengah, dan tahun 2017 telah dilakukan penataan 85 RTLH.

Dalam rangka pengentasan kekumuhan dibantaran sungai telah dilakukan usaha penyediaan perumahan Rusunawa di Kecamatan Cepu dari dana APBN sebanyak 1 *Twin Block* yang berisi 96 unit hunian yang selesai dibangun pada tahun 2016. Harapannya yang

akan menempati rusunawa ini adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum mempunyai rumah, utamanya yang menghuni bantaran sungai.

Penyediaan perumahan di Kabupaten Blora lebih banyak dilakukan oleh perorangan maupun pihak pengembang, dengan perincian dalam kurun waktu tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel II-17 berikut:

Tabel II-17
Kepemilikan Rumah dan Penyediaan Perumahan di Kabupaten Blora Tahun 2012-2017

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Status Kepemilikan rumah						
	a. Rumah milik sendiri	Unit	221.754	221.754	221.884	221.884	231.000
	b. Rumah sewa	Unit	1.717	1.717	2.263	1.171	1.182
2.	Penyediaan Perumahan						
	a. Perumnas	Unit	2.737	2.737	2.737	2.737	2.740
	b. KPR/BTN	Unit	250	250	250	258	268
	c. Real Estate	Unit	-		0	0	0

Sumber: DPUPR Kabupaten Blora tahun 2017

2.1.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Mayarakat

Kerjasama antara partai politik dan organisasi sosial kemasyarakatan dalam menciptakan suasana persaudaraan dan persatuan menunjukkan kondisi yang baik terlihat dari kondusivitas daerah dalam pelaksanaan pemilihan umum, baik Pilpres, Pileg, maupun Pilkada. Kondusivitas wilayah didukung dengan Suprastruktur Politik dan Organisasi Kemasyarakatan yang cukup berkembang di Kabupaten Blora. Kondisi Suprastruktur Politik dan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Blora dapat dilihat pada Tabel II-18 berikut:

Tabel II-18
Kondisi Suprastruktur Politik dan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Blora Tahun 2013-2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	**Jumlah Anggota DPRD**	orang	45	45	45	45	45
	a. Pria	orang	34	37	37	37	37
	b. Perempuan	orang	11	8	8	8	8
2.	Jumlah Fraksi DPRD	Fraksi	7	7	7	7	7
3.	**Partai Politik**						
	a. Jumlah Parpol Daerah	Partai	14	14	12	12	12
	b. Jumlah Parpol Peserta Pemilu	Partai	12	12	12	12	12
4.	**Organisasi Kemasyarakatan**						
	a. Jumlah Orkesmas Berdasarkan Profesi	Buah	17	16	17	17	5
	b. Jumlah Orkesmas Berdasarkan Agama	Buah	20	10	7	17	15
5.	**Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)**						
	a. Jumlah LSM Lokal	Buah	61	95	61	60	60
	b. Jumlah LSM Nasional	Buah	18	19	12	10	3
	c. Jumlah LSM Asing/ Internasional yang Beroperasi di Daerah	Buah	0	0	0	0	0

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blora tahun 2017

Salah satu indikator ketertiban dan keamanan masyarakat dapat dilihat dari angka kriminalitas yang terjadi , dalam kurun waktu 2013-2017 terjadi penurunan kasus kriminalitas dari 275 kasus pada tahun 2013 menjadi sebesar 22 kasus pada tahun 2017. Kasus kriminalitas terbanyak di Kabupaten Blora adalah kasus penggunaan narkoba, dan kasus pencurian, maka perlu dukungan lintas sektor dan peran serta masyarakat dalam penurunan angka kriminalitas.

Sedangkan jumlah kader forum kewaspadaan dini masyarakat di Kabupaten Blora mengalami penurunan menjadi 180 kader tahun 2017 (menurun 40 kader dari tahun 2016 berjumlah 220 kader).

Perkembangan kinerja urusan kesbangpol dan satpol PP Kabupaten Blora dapat dilihat pada Tabel II-19 berikut:

Tabel II-19
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blora Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
A.	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**						
1.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	%	100	100	100	100	100
2.	Jumlah kader Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	orang	100	100	200	220	180
B.	**Program pemeliharaan Ketrantibnas Dan pencegahan tindak Kriminal**						
1.	Angka kriminalitas	kasus	275	275	95	62	22
2	Cakupan patroli petugas Satpol PP	%	37,5	37,5	37,5	37,5	56,25
3.	Jumlah Polisi Pamong Praja	orang	181	181	171	167	198
C.	**Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**						
1.	Jumlah Linmas	orang	8.117	8.117	7.269	7.273	7.248
2.	Jumlah Pos Siskamling	unit	2.559	2.559	2.559	2.559	2.559
	Program pengembangan wawasan kebangsaan						
1.	Jumlah tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat yang mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan	orang	300	300	300	300	450
D.	**Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan**						
1.	Peningkatan kesadaran wawasan kebangsaan pada Ormas dan LSM	kali	1	2	2	2	4
2.	Jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan bela negara.	orang	150	135	135	135	300
E.	**Program Peningkatan**						

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
	Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)						
1.	Jumlah masyarakat yang mendapat penyuluhan Program Penanggulangan pencegahan peredaran gelap narkoba	orang	400	400	400	400	500
F.	**Program Pendidikan Politik Masyarakat**						
1.	Kegiatan pembinaan politik daerah pada ormas dan LSM	kali	1	2	2	2	9
2.	Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu	%	74,5	71,9	80	85	71,6
3.	Jumlah pemuda/pelajar yang memdapatkan peningkatan wawasan kebangsaan dan bela negara.	orang	150	135	135	135	300
4.	Terpeliharaanya konduktivitas wilayah melalui kerjasama Kominda	kali	12	12	12	12	12

Sumber: Kantor Kesbangpol dan Satpol PP Kabupaten Blora tahun 2017

2.1.3.1.6 Sosial

Permasalahan dalam penanganan PMKS sangat kompleks, dan membutuhkan penanganan secara optimal dan intensif. Meskipun ada sebagian pandangan yang beranggapan bahwa persoalan PMKS akan dapat selesai dengan sendirinya tatkala masyarakat makin sejahtera dan diberi keleluasaan untuk mengatur dirinya sendiri. Tetapi, agar program pembangunan kesejahteraan sosial dapat memberikan hasil yang lebih cepat dan tepat sasaran, maka dibutuhkan peran aktif dari pemerintah dan berbagai lembaga dan potensi swakarsa masyarakat dengan melakukan langkah-langkah koordinasi, bersikap proaktif, dan melakukan revitalisasi terhadap berbagai program pembangunan kesejahteraan sosial yang selama ini sudah tidak lagi sesuai dengan perubahan yang terjadi di masyarakat.

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terdiri dari anak terlantar, anak jalanan, penyandang disabilitas, tuna susila, gelandangan dan pengemis, pemulung di Kabupaten Blora sampai dengan Tahun 2017 sebanyak 3.373 jiwa. Sedangkan persentase Penanganan PMKS oleh pemerintah Kabupaten Blora sampai dengan Tahun 2017 hanya dapat mencakup 0,67 % (sekitar 2.260 jiwa) dari

jumlah PMKS yang ada. Capaian kinerja urusan bidang sosial selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II-20 berikut:

Tabel II-20
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Sosial Kabupaten Blora Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2013	2013	2014	2015	2017
A.	**Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**						
1.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	0,51	0,44	0,44	0,55	0,67
2.	persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	100	100	100	100	67
3.	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	100	100	100	100	23
B.	**Program pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**						
1.	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggal darurat	%	100	91.92	91.92	75	100
C.	**Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma**						
1.	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	50	26,02	26,02	50	10
D.	**Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo**						
1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	%	28	26	26	26	25
2.	Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	100	90	90	90	NA
E.	**Program pemberdayaan**						

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2013	2013	2014	2015	2017
	kelembagaan Kesejahteraan Sosial						
1.	Jumlah Panti Sosial						
	- Panti Sosial Asuhan	Buah	26	26	26	26	25
	- Panti Sosial Bina Pasca Lara Kronis	Buah	1	1	1	1	NA
	- Panti Sosial Bina Karya	Buah	1	1	1	1	NA
2.	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	0	0	0	90	100

Sumber: Dinas Sosial dan P3A Kabupaten Blora tahun 2017

2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.1.3.2.1 Tenaga Kerja

Pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Blora menghadapi permasalahan kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor. Permasalahan utamanya adalah adanya kesenjangan yang begitu besar antara ketersediaan kesempatan atau lapangan pekerjaan dengan jumlah angkatan kerja yang ada. Minimnya lapangan/kesempatan kerja ini mengakibatkan jumlah pengangguran dan angka Pengangguran masih tinggi. Perkembangan capaian kinerja urusan ketenagakerjaan dapat dilihat pada Tabel II-21 berikut:

Tabel II-21
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Blora Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2013	2013	2014	2015	2017
A.	**Program Peningkatan Kualitas dan Produkivitas Tenaga Kerja**						
1.	Persentase peserta pelatihan keterampilan bagi pencari kerja yang diterima kerja (%)	%	50	52	52,6	53	60
2.	Jumlah peserta pelatihan	orang	150	200	384	400	520
3.	Jumlah peserta pelatihan yang diterima kerja	orang	75	104	202	212	221

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2013	2013	2014	2015	2017
4.	Rasio penduduk (angkatan kerja) yang bekerja (%)	%	93,75	95,15	95,32	95,4*)	82,24
5.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	75,5	68,5	70,77	71,0*)	70,21
B.	**Program Peningkatan Kesempatan Kerja**						
1.	Tingkat pengangguran terbuka	%	6,25	4,3	4,68	4,0	2,85
2.	Persentase penempatan tenaga kerja dibandingkan penawaran tenaga kerja (%)	%	20	40	50	60	35,63
3.	Jumlah Penawaran Tenaga Kerja	Penawaran	NA	NA	1227	1300	3724
4.	Rasio UMK terhadap KHL (%)	%	99,04	100,05	100,08	98,01	99
5.	Jumlah tenaga kerja yang memperoleh Jamsostek	orang	5.997	NA	7.200	7.500	6.688
6.	UMK Kab. Blora	Rp	932.000	1.009.000	1.180.000	1.328.000	1.438.100
7.	Kebutuhan Hidup Layak	Rp	941.021	1.008.527	1.327.497	1.301.573	1.420.000

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Blora tahun 2017

2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan paling mendasar dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak yang terjadi selama ini adalah rendahnya partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan, di samping masih adanya berbagai bentuk praktek diskriminasi terhadap perempuan. Untuk itu, diperlukan kemauan yang kuat agar semua kebijakan dan program pembangunan memperhitungkan kesetaraan dan keadilan gender, serta peduli anak.

Pemerintah Kabupaten Blora telah berupaya dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak di Kabupaten Blora dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan salah satunya dengan pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A), akan tetapi sampai dengan sekarang masih belum optimal karena kurangnya SDM yakni tenaga psikologi dan tenaga psikiater.

Banyaknya *focal point* (penyusunan perencanaan program di OPD berbasis gender) yang aktif di Kabupaten Blora sampai dengan Tahun 2017 hanya sebanyak 40 unit meningkat 80 persen dari tahun 2016 yang hanya sebanyak 8 unit, hal ini menunjukkan bahwa perangkat daerah sudah membuat kegiatan berbasis gender. Persentase cakupan

penanganan kasus korban kekerasan bagi perempuan dan anak selama kurun waktu lima tahun terakhir mencapai 100 %, hal ini menandakan peran aktif pemerintah dalam penindakan dan penanganan korban kekerasan sangat baik, akan tetapi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan dari 5 kasus pada tahun 2016 menjadi 12 kasus tahun 2017, hal ini perlu penanganan yang lebih serius agar kasus terebut tidak meningkat di tahun yang akan datang. Secara rinci perkembangan kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat pada Tabel II-22 berikut:

Tabel II-22
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora Tahun 2013-2017

No	Program/Indikator	Satuan	Capaian				
			2013	2013	2014	2015	2017
A.	**Program penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender Dan Anak**						
1.	Jumlah Focal point aktif	unit	8	8	8	8	40
2.	Jumlah pusat Pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) di tingkat kecamatan dan kabupaten	unit	1	1	1	1	4
B.	**Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan**						
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	2,4	2,4	2,4	46,9	49
2.	Persentase SKPD menyusun analisis gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	%	20	20	20	20	90
C.	**Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak**						
1.	Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kasus	6	5	4	5	12
2.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan	%	100	100	100	100	100
3.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang	%	100	100	100	100	100

No	Program/Indikator	Satuan	Capaian				
			2013	2013	2014	2015	2017
	mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS.						
4.	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100
5.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan engadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	%	100	100	100	100	100
6.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.	%	100	100	100	100	100
7.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100
8.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100
9.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100
10	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	0	0	0	0	0
11	Jumlah Kelompok anak termasuk forum anak yang ada di Kabupaten, Kecamatan dan desa/kelurahan	kel	1	1	1	1	4

Sumber: Dinas Sosial dan P3A Kabupaten Blora tahun 2017

2.1.3.2.3 Pangan

Pangan merupakan kebutuhan utama bagi manusia, diantara kebutuhan yang lain, pangan harus terpenuhi agar kelangsungan hidup seseorang dapat terkamin. Ketersediaan pangan di suatu wilayah dipengaruhi oleh produksi, distribusi, akses, stabilitas harga dan konsumsi.

Tingkat konsumsi pangan dapat dilihat dari pencapaian indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH Kabupaten Blora meningkat dari 62,0 persen tahun 2016 menjadi 70,5 persen tahun 2017, secara umum potensi sumber pangan sebenarnya cukup beragam, hanya saja beberapa kelompok pangan perlu ditingkatkan konsumsinya adalah umbi-umbian, buah, sayur serta pangan hewani.

Secara rinci perkembangan pembangunan bidang pangan di Kabupaten Blora dapat dilihat pada Tabel II-23 berikut:

Tabel II-23
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Blora Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah desa rawan pangan	Desa	0	0	2	3	3
2.	Jumlah desa rentan pangan yang tertangani	Desa	18	4	5	4	3
3.	Skor Pola Pangan Harapan	%	90,2	92,5	65,6	62,0	70,5
4.	Tingkat Konsumsi protein hewani	gram/ kapita/ hari	58,7	76,3	47,1	54,39	45
5.	Tingkat konsumsi energi	kkal/ kap/hari	1973,9	2016,6	1760,6	2.890	1.842,2

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Blora Tahun 2017

2.1.3.2.4 Pertanahan

Luas tanah di Kabupaten Blora yang telah bersertifikat mengalami peningkatan dari 2.080.148 m2 menjadi 36.286.270 m2 dikarenakan adanya Program Nasional Sertifikat Tanah Gratis dari Pemerintah Pusat. Secara rinci perkembangan pembangunan bidang pertanahan di Kabupaten Blora dapat dilihat pada Tabel II-234 berikut:

Tabel II-24
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Pertanahan Kabupaten Blora Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2013	2013	2014	2015	2017
A.	**Program Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah**						
1.	Luas tanah yang bersertifikat	m^2	6.769.573	4.467.540	2.246.400	2.080.148	36.286.270
2.	Penyelesaian pembebasan lahan	%	100	100	100	100	100
3.	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	0	0	0	0	0
4.	Penyelesian Ijin Lokasi	%	100	100	100	100	100

Sumber: BPN/ATR Kabupaten Blora Tahun 2017

2.1.3.2.5 Lingkungan Hidup

Pelayanan pengendalian pencemaran lingkungan oleh DLH Kab Blora secara capaian sudah 100 persen, akan tetapi perlu adanya peningkatan pelayanan yang komprehensif melalui penambahan laboratorium lingkungan yang lebih lengkap dan memadai. Secara umum perkembangan kinerja bidang lingkungan hidup secara rinci dapat dilihat pada Tabel II-25 berikut:

Tabel II-25
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Blora Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Pelayanan pencegahan pencemaran air	%	100	100	100	100	100
2.	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	%	100	100	100	100	100
3.	Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	%	1,1	1,1	1.1	NA	NA

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
4.	Persentase luas RTH (taman dan makam) terhadap luas wilayah	%	1,1	1,5	2,5*)	2,5*)	2,5*)
5.	Luas lahan kritis (ha)	Ha	8.006,045	8.006,045	8.010,04	621,90	621,90
6.	Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa (%)	%	100	100	100	100	100
7.	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atauperusakan lingkunganhidup (%)	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora Tahun 2017

2.1.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi Kependudukan mempunyai peran yang sangat penting karena selalu bersentuhan dengan setiap aktivitas kehidupan di Indonesia. Di antaranya adalah saat Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, Pemilu Kepala Daerah, mengurus surat-surat kendaraan, mengurus surat-surat tanah,dll. Begitu pula jika kita akan berdomisili pada suatu wilayah maka kita harus memiliki tanda domisili yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Persentase kepemilikan KTP bagi wajib KTP sampai dengan Tahun 2017 mencapai 83,61 persen menurun dari tahun 2016 yang telah mencapai 92,5 persen, hal ini diakibatkan adanya keterlambatan blanko e-KTP dari Pemerintah Pusat, dan hanya 16,39 % penduduk yang belum memiliki KTP. Sedangkan persentase kepemilikan KK bagi setiap keluarga di Kabupaten Blora telah mencapai angka 100 %, hal ini menandakan tiap-tiap Keluarga di Kabupaten Blora telah memiliki KK, hal ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan dengan peningkatan pelayanan yang lebih optimal, melalui kegiatan jemput bola dalam pelayanan administrasi kependudukan di pedesaan.

Begitu juga dengan pencatatan sipil, dimana Pencatatan Sipil merupakan hak dari setiap warga negara dalam arti hak memperoleh akta autentik dari pejabat negara, baik itu akta kelahiran maupun akta perkawinan yang dicatat oleh catatan sipil. Akta kelahiran merupakan kewajiban yang harus disediakan oleh pemerintah terhadap bayi yang lahir, pemenuhannya harus dilakukan oleh orangtua bayi yang

bersangkutan. persentase kepemilikan akta kelahiran seluruh penduduk Kabupaten Blora sampai dengan Tahun 2017 baru sebesar 94,49 persen meningkat dari tahun 2016 yang hanya 47 persen, hal ini karena adanya program pencatatan akte keliling yang dilakukan Dindukcapil di semua desa. Program Kartu Identitas Anak (KIA) yang diluncurkan Pemerintah Pusat guna memenuhi hak terkait dokumen anak, di kabupaten Blora baru mencapai 15,14 persen, dan akan meningkat pada tahun berikutnya (target akhir 100 persen).

Capaian kinerja pembangunan urusan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Blora tahun 2013-2017 dapat dilihat pada

Tabel II-26 berikut:

Tabel II-26
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
A.	**Program Penataan Admnistrasi Kependudukan**						
1.	Kepemilikan KTP bagi wajib KTP	%	83,58	85,08	92,24	92,5	83,61
2.	Rasio bayi berakte kelahiran	%	95,77	96	96,08	97,85	99,2
3.	Kepemilikan akta kelahiran	%	29,21	32,75	46,21	47	94,49
4.	Rasio pasangan berakte nikah	%	100	100	100	100	100
5.	Ketersediaan database kependudukan	Kecamatan	16	16	16	16	16
6.	persentase Kepemilikan KK bagi setiap keluarga di Kabupaten Blora	%	100	100	100	100	100
7	Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak)	%	-	-	-	-	15,14

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora Tahun 2017

2.1.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan perangkat teknis dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Pembangunan di desa yang telah dilaksanakan melalui dana desa dan alokasi dana desa dapat mendongkrak capaian kinerja urusan pemberdayan masyarakat dan desa . Peningkatan kapasitas aparatur di desa merupakan hal yang penting guna peningkatan aksebilitas pengelolaan anggaran di desa.

Secara rinci, capaian kinerja pembangunan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat pada Tabel II-27 berikut:

Tabel II-27
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Posyandu aktif	%	100	100	100	100	100
2.	Jumlah usaha ekonomi produktif perempuan yang terlatih	%	7,14	1,69	1,69	1,69	1,69
3.	Jumlah BUMDes	%	17,86	17,95	17,95	20	70
4.	Jumlah Posyantek Aktif	unit	40	40	40	44	44
5.	Persentase aparatur desa/ kelurahan telah dilatih manajemen pengelolaan desa/kelurahan	%	2,13	1,77	1,77	2,01	98
6.	Persentase desa/kelurahan memiliki profil desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Blora tahun 2017

2.1.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program KB merupakan program Pemerintah yang bertujuan untuk mengendalikan jumlah penduduk. Dalam renstra BKKBN yang merupakan acuan pemerintah pusat dalam pengendalian penduduk adalah persentase laju pertumbuhan penduduk tidak lebih dari 1,2 persen, Angka kelahiran total tidak lebih dari 2,28 persen, persentase pemakaian kontrasepsi diharapkan lebih dari 66 persen (all method), persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) tidak lebih dari 9 persen, serta angka kelahiran pada usia remaja 15 – 19 tahun tidak lebih dari 38 ribu per 1.000 KH. Pencanangan Kampung

KB yang dilaksanakan mulai tahun 2016 diharapkan dapat mencapai target – target yang ditetapkan tersebut.

Kabupaten Blora dalam pelaksanaan pengendalian penduduk mempunyai indikator sebagai berikut : Persentase Pasangan Usia Subur yang menjadi perserta KB aktif pada tahun 2017 sebesar 83,19 persen; Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB sebesar 65 persen dan Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB sebesar 67,35 persen. Sedangkan Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed) mencapai 7,01 persen Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun pada tahun 2017 sebesar 1,2 persen.

Secara rinci, capaian kinerja pembangunan urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat dilihat padaTabel II-28 berikut:

Tabel II-28
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blora Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun	%	7,2	7,07	7,07	1,2	1,2
2	Cakupan peserta KB aktif	%	80	81,21	82,33	81,16	83,19
3.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed) (%)	%	10,97	9,86	9,33	7,9	7,01
4.	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	%	71,51	72,99	80,11	65,8	65
5	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 (semua cara dan cara modern)	%	80,03	80,1	80,69	78,83	96,96
6.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	26,68	81,3	67,86	68,1	67,35
7.	Jumlah Kelompok Masyarakat Peduli KB	kelompok	6	6	6	6	6

Sumber: Dindalduk dan KB Kabupaten Blora Tahun 2017

2.1.3.2.9 Perhubungan

Terminal menjadi prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi (Kepmenhub 35/2003).

Jumlah terminal di Kabupaten Blora tahun 2017 sebanyak 6 terminal, terdiri dari 1 terminal Tipe A (dikelola Kemenhub RI), 1 terminal tipe B (dikelola Propinsi Jawa Tengah), dan 4 terminal tipe C (dikelola Kabupaten). persentase ketersediaan terminal angkutan penumpang dibandingkan jumlah kebutuhan tahun 2017 mencapai 80 persen.

Kasus kecelakaan lalu lintas pada Tahun 2017 menurun sebanyak 25 kasus, dimana pada tahun 2016 terdapat 295 kasus kecelakaan.

Secara umum, Capaian kinerja urusan bidang perhubungan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II-29 berikut ini:

Tabel II-29
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Perhubungan Kabupaten Blora Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
A.	**Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan**						
1.	Terminal						
	* Tipe A	Unit	1	1	1	1	1
	* Tipe B	Unit	1	1	1	1	1
	* tipe C	Unit	4	4	4	4	4
2.	Jumlah terminal yang beroperasi	unit	4	4	4	4	4
3.	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	%	71,42	71,42	71	71,42	71,42
4.	Jumlah pemasangan rambu-rambu	unit	130	130	650	710	820
5.	Jumlah kasus Kecelakaan lintas	kasus	394	324	295	250	200
B.	**Program Rehabilitasi Dan**						

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
	Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ						
1.	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	%	75	80	85	85	87
C.	**Program peningkatan Pelayanan Angkutan**						
1.	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji Perhubungan Bermotor minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	Jumlah unit pengujian kendaraan bermotor	1	1	1	1	1
		Jumlah Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	11	11	11	11	11
2.	Jumlah angkutan kota	unit	201	201	100	100	90
	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	%	8	8	8	8	8
3.	Jumlah orang melalui terminal per tahun	orang	3.912.000	5.185.472	5.185.472	5.736.056	5.920.654
4.	Rasio ijin trayek	%	29	29	29	29	29
5.	Jumlah uji KIR angkutan umum	%	94	90,84	90,84	90,84	91
6.	Kepemilikan KIR angkutan umum	unit	3995	3462	3692	4072	4134
7.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	menit	30	20	20	20	20
8.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	JBB : 0 – 5000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		JBB : 5001-8000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		JBB : >8000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
9.	Persentase kendaraan umum yang memenuhi ambang batas emisi gas buang (Lulus uji emisi)	%	100	100	100	100	100
D.	**Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan**						

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	unit	9	9	9	9	9
2.	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	%	70	70	70	70	70
E.	**Program Peningkatan Dan pengamanan Lalu Lintas**						
1.	Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas	%	62	75	75	85	87
2.	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) Kabupaten/Kota.	%	60,20	70	75	80	84,5

Sumber : Dinas Perumahan, Pemukiman dan Perhubungan Kabupaten Blora Tahun 2017

2.1.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Dalam mendukung kebutuhan komunikasi dan informasi melalui radio, sampai pada tahun 2017, terdapat 9 radio yang melayani masyarakat dilingkup Kabupaten Blora. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui jaringan internet telah banyak menumbuhkan warung internet (warnet) yang dikelola oleh masyarakat. Dalam rangka mempercepat komunikasi dan penyebaran informasi pada pemerintahan Kabupaten Blora, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah memanfaatkan internet dengan membangun jaringan pada masing-masing OPD, serta pembuatan web di masing-masing OPD dapat meningkatakan transparansi pembangunan untuk masyarakat. Kondisi kinerja bidang komunikasi dan infromasi di Kabupaten Blora dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II-30
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
A	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**						
1.	Jumlah jaringan komunikasi	unit	123	134	146	146	146
2.	Jumlah SKPD telah memiliki website	SKPD	19	21	23	28	42
3.	Web site milik pemerintah daerah	unit	1	1	1	1	1
4.	Jumlah surat kabar nasional/lokal	buah	7	9	9	9	9
5.	Jumlah penyiaran radio/TV	buah	7	7	8	9	9
B.	**Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi**						
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	12,5	12,5	12,5	13	15
B.	**Program Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah**						
1.	Fasilitasi Pembinaan PPID SKPD	%	38	38	38	39	40
C	**Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa**						
	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui:						
1	Media massa seperti majalah, radio, dan televisi	kali	12	12	12	9	9
2	Media baru seperti	kali	-	-	-	-	-

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
	website (media online)						
3	Media tradisional seperti pertunjukan rakyat	kali	1	1	1	1	1
4	Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya	kali	1	1	1	1	1
5	Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho	kali	12	12	12	12	12

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Blora Tahun 2017

Sejumlah 42 OPD telah memiliki website, akan tetapi beberapa website pada OPD masih belum masuk portal Kabupaten Blora dan beberapa website OPD masih belum terupdate sehingga masih belum efisien dalam penggunaan.

2.1.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Persentase koperasi aktif di Kabupaten Blora pada tahun 2017 mencapai 82,5 persen meningkat dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya yang hanya 79,96 persen . Meskipun mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, persentase koperasi tidak aktif relatif masih tinggi (17,5 persen). Sedangkan jumlah UMKM sampai dengan tahun 2017 telah mencapai 5.600 unit, sedangkan presentase UMKM yang berbadan hukum masih relative rendah yaitu baru mencapai angka 29 persen.

Perkembangan capaian pembangunan Koperasi dan UMKM Kabupaten Blora secara rinci dapat dilihat pada Tabel II-31 berikut ini:

Tabel II-31
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Blora Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
A.	**Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**						
1.	Jumlah koperasi	unit	548	548	561	649	667
2.	Persentase koperasi aktif	%	79,8	79,56	79,1	79,96	82,5
3.	Persentase koperasi sehat	%	44,1	44,1	30,3	24	26
B.	**Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah**						
1.	Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	unit	6.532	6.596	6.790	5,924	6.500
C.	**Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah**						
1.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang telah berbadan hukum	%	17,25	21,82	27,60	28,1	29
2.	Persentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk	%	1,92	2,01	0,22	1,65	2,04

Sumber: Dinas Perdaganagan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Blora tahun 2017

2.1.3.2.12 Penanaman Modal

Peningkatan investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi tujuan utama dalam pembangunan penanaman modal di Kabupaten Blora. Nilai investasi PMDN sampai dengan Tahun 2017 sebesar Rp 301.6 milyar rupiah. Peningkatan investasi di Kabupaten Blora masih mengalami beberapa kendala, antara lain ketersediaan sarana dan prasarana, khususnya dari sarana transportasi yang kurang mendukung, penyediaan sumber air, dan pelayanan perijinan yang kurang optimal. Sedangkan dalam hal perijinan, sampai dengan tahun 2017 ada 4 jenis pelayanan yang bisa dilakukan secara *online*.

Perkembangan kinerja urusan penanaman modal dapat dilihat pada Tabel II-32 berikut:

Tabel II-32
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Penanaman Modal Kabupaten Blora Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
A.	**Program peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi**						
1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	PMA	14	nodata	9	9	9
		PMDN	73	nodata	101	120	125
		US $	133.440.000 us $	3,5 T	3,5 T	4,6 T	4,6 T
2.	Jumlah nilai realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Milyar Rp	134	1960.9	240.57	320.6*)	301,6
		PMA	14	nodata	9	9	9
3.	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha	Kali	1	1	1	1	2
B.	**Program Pelayanan Perijinan**						
1.	Jumlah jenis pelayanan secara online	jenis	1	1	1	4	4
2.	Sistem informasi Pelayanan Perijinan		Belum ada	ada	ada	ada	ada
3.	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	%	10	0	8	25	25

Sumber: DPMTPSP Kabupaten Blora Tahun 2017

2.1.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Dalam rangka peningkatkan kualitas Sumber daya manusia maka diperlukan pembentukan karakter, pembentukan kapasitas dan daya saing pemuda serta mewujudkan masyarakat yang sehat dan berprestasi di bidang olahraga. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten

Blora telah melaksanakan Berbagai kebijakan dan program di bidang pemuda dan olahraga, akan tetapi melihat capaian kinerja urusan kepemudaan dan olahraga masih belum sesuai target yang diharapkan. Jumlah pemuda berprestasi di Kabupaten Blora selama kurun waktu 2013-2017, terjadi peningkatan hampi 100 persen, hal ini dikarenakan pembinaan dan penguatan Pemerintah Kabupaten Blora dalam membina para pemuda untuk berprestasi. Sedangkan perolehan medali pada PORDA Jawa Tengah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2013 yang hanya 42 medali menjadi 164 medali pada tahun 2017 (cabang olah raga yang diunggulkan tenis lapangan, panahan, panjat tebing dll)

Maka dari itu diperlukan komitmen serta kerjasama dari berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah dan swasta agar pembangunan pemuda dan olahraga dapat terwujud. Perkembangan kinerja urusan kepemudaan dan olahraga dapat dilihat pada Tabel II-33 berikut:

Tabel II-33
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blora Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
A	**Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan**						
1.	Jumlah pemuda berprestasi	orang	n/a	n/a	50	60	120
2.	Presentase organisasi kepemudaan yang telah dibina	%	50	53	53	53	43
3	Jumlah Organisasi pemuda yang memiliki legalitas organisasi dari Pemerintah Kabupaten	Organisasi	50	53	53	53	53
4	Jumlah pemuda yang mampu berwirausaha	orang	310.482	329.316	330.006	350.105	420.116
B.	**Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda**						
1.	Jumlah Kelompok Pemuda produktif (KUPP)	kelompok	73	n/a	n/a	70	90
C.	**Program pembinaan**						

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
	dan pemasyarakatan olahraga						
1.	Jumlah medali tingkat provinsi yang diperoleh	orang	42	40	75	12	164
D.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga**						
1	Gelanggang/ balai Remaja (selain milik swasta)	gelanggang	16	16	2	2	2
2	Lapangan olahraga	unit	538	563	600	600	750

Sumber: Dinporabudpar Kabupaten Blora Tahun 2017

2.1.3.2.14 Statistik

Peran statistik sangat penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan aspek kehidupan masyarakat dalam pembangunan. Data statistik mampu memberikan arah yang obyektif bagi kebijakan pemerintah. Pembangunan akan jauh lebih mahal apabila tanpa data yang menunjang. Maka dari itu ketersediaan data yang tepat, akurat dan *up to date* sangat dibutuhkan demi menunjang proses penentuan kebijakan dalam proses perencanaan pembangunan.

Secara rinci pencapaian kinerja urusan Statistik dalam kurun waktu tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel II-34 berikut:

Tabel II-34
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Statistik Kabupaten Blora Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah dokumen statistik dasar sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan	Buah	5	5	5	5	5
2.	Persentase SKPD yang memiliki buku profil/statistik SKPD	%	100	100	100	100	100

Sumber: Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2017

Ketersediaan data yang tepat, akurat dan *up to date* belum maksimal dikarenakan ketergantungan pada instansi vertikal penyedia data.

2.1.3.2.15 Persandian

Penyelenggaraan persandian di Kabupaten Blora telah berjalan secara baik. Jumlah informasi pemerintah daerah yang melalui sarana sandi dan telekomunikasi seluruhnya telah tersampaikan kepada pihak terkait. Capaian kinerja pembangunan urusan bidang persandian Kabupaten Blora Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel II-35 berikut:

Tabel II-35
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Persandian Kabupaten Blora Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
A.	**Program Sandi dan Telekomunikasi**						
1.	Persentase informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampaikan kepada pihak terkait	%	100	100	100	100	100

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017

2.1.3.2.16 Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan pada prinsipnya menyangkut nilai-nilai budaya, dan pengelolaan kekayaan seni dan budaya daerah. Nilai-nilai budaya Jawa masih melekat di masyarakat Kabupaten Blora, namun perlu terus dilestarikan. Beberapa kesenian daerah juga masih lestari hingga saat ini.Beberapa kesenian yang masih sangat populer dan menjadi salah satu ikon Kabupaten Blora adalah seni barong dan seni tayub. Seni barong ini telah melekat di masyarakat pedesaan Kabupaten Blora. Kesenian tayub juga menjadi identitas dan kebanggaan rakyat, sehingga saat ini masih tetap bertahan berdampingan dengan seni-seni tradisional yang lain.

Pencapaian kinerja urusan kebudayaan dapat dilihat pada Tabel II-36 di bawah ini:

Tabel II-36
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Kebudayaan Kabupaten Blora Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
A.	**Program pengembangan Nilai Budaya**						
1.	Jumlah kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	kali	2	2	2	2	4
B.	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**						
1.	Jumlah pengiriman pementasan seni daerah di luar daerah	kali	5	8	10	10	10
2.	Jumlah mitra dalam pengelolaan kekayaan budaya	%	8	8	8	8	8
3.	Jumlah Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	unit	8	NA	9	9	9
4.	Jumlah grup kesenian	Grup	1618	NA	1700	1700	1710
5.	Cakupan Kajian Seni	%	133,33	100	90	90	90
6.	Cakupan Fasilitasi Seni	%	70	72	75	75	75
7.	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian	%	100	100	100	100	100
8.	Cakupan Organisasi seni	%	50	70	75	75	74
9.	Cakupan Tempat umum	%	50	50	70	70	71
10.	Cakupan Gelar Seni	%	100	100	100	100	100
C.	**Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**						
1.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	21,41	73	78	78	78

Sumber: Dinporabudpar Kabupaten Blora Tahun 2017

2.1.3.2.17 Perpustakaan

Pembangunan dan pengembangan pendidikan harus didukung oleh sarana maupun prasarana dari pendidikan tersebut. Salah satu yang

harus dikelola dengan baik dalam rangka meningkatkan pendidikan adalah pembangunan dan pengembangan perpustakaan.

Jika melihat dari kinerja urusan perpustakan dapat diukur dengan indikator jumlah perpustakaan, tingkat kunjungan perpustakaan dalam satu tahun, dan tingkat koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah. Jumlah perpustakaan dalam kurun waktu 5 tahun 2013-2017 meningkat setiap tahunnya, namun peningkatannya tidak terlalu signifikan. Secara rinci pencapaian kinerja urusan Perpustakaan di Kabupaten Blora dapat dilihat pada Tabel II-37 berikut:

Tabel II-37
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Perpustakaan Kabupaten Blora Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
A.	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**						
1.	Jumlah perpustakaan	buah	360	369	379	450	515
2.	Jumlah pengunjung perpustakaan dalam satu tahun	orang	203.855	167.530	163.232	118.098	97.568
3.	Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	buah	50.230	50.341	19.676	22.755	26.088
4.	Jumlah Perpustakaan sekolah dan desa yang dibina	unit	360	290	293	173	210
B.	**Program Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Pustaka**						
1	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam	eksemplar	300	350	402	500	720

Sumber: DPK Kabupaten Blora tahun 2017

2.1.3.2.18 Kearsipan

Di Kabupaten Blora, persentase arsip (tekstual dan non tekstual) yang tersimpan dengan baik mencapai sebesar 80% pada tahun 2016, sedangkan persentase arsip yang terolah dengan baik sebesar 60%. Capaian indikator SKPD menerapkan pengelolaan arsip secara baku pada tahun 2013 sebesar 20 persen meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2017. Secara rinci pencapaian kinerja urusan Kearsipan dapat dilihat pada Tabel II-38 berikut:

Tabel II-38
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Kearsipan Kabupaten Blora Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
A.	**Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah**						
1.	Persentase arsip tekstual yang terolah dengan baik	%	NA	100	100	100	100
2.	Persentase arsip (tekstual dan non tekstual) yang tersimpan dengan baik	%	100	100	70	80	80
B.	**Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan**						
1.	Persentase sarana dan prasarana kearsipan dalam kondisi baik	%	100	70	70	70	70
C.	**Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan**						
1.	Persentase SKPD menerapkan pengelolaan arsip secara baku	%	60,07	40	100	100	100

Sumber: DPK Kabupaten Blora Tahun 2017

2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

2.1.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Ada tiga jenis komoditas perikanan yang berkembang di Kabupaten Blora, yaitu ikan lele, ikan gurame dan ikan nila. Jumlah produksi perikanan budidaya di Kabupaten Blora ini tergolong kecil, pada tahun 2015 sebanyak 180.600 kg meningkat menjadi 180.641 kg Tahun 2016, dan meningkat menjadi 348.500 kg pada tahun 2017. Jenis komoditas yang produksinya paling banyak adalah ikan lele, ikan nila dan ikan gurame. Ikan lele produksinya paling besar karena pemeliharaannya mudah dan memiliki daya tahan yang baik.

Perkembangan kinerja pembangunan urusan kelautan dan perikanan dapat dilihat pada Tabel II-39 berikut:

Tabel II-39
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Blora Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
A.	**Program Pengembangan Budidaya Perikanan**						
1.	Produksi perikanan	kg	613.580	596.530	180.600	180.641	348.500
2.	Tingkat cakupan bina kelompok ikan	%	33	37	37	37	33
B.	**Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan**						
1.	Tingkat konsumsi ikan penduduk	kg/ kapita	8,7	8,7	8,7	8,7	15,62
2.	Jumlah produksi hasil olahan ikan	kg	25.810	26.231	26.431	27.001	612,183
3	Jumlah industri pengolahan ikan	unit	25	25	25	25	25

Sumber: Dinakikan Kabupaten Blora Tahun 2017

2.1.3.3.2 Pariwisata

Kabupaten Blora memiliki potensi destinasi pariwisata yang beragam, meliputi Makam, Taman dan Pemandian Tirtonadi, Goa, Bumi Perkemahan, Wana Wisata (loco tour), Bendungan, dan wisata Geologi. Obyek wisata di Kabupaten Blora yang paling sering dikunjungi oleh wisatawan mancanegara adalah wana wisata Loco Tour, namun pengelolaan wisata ini oleh Perum Perhutani.Secara umum daya saing obyek wisata di Kabupaten Blora secara umum lebih rendah dibandingkan obyek wisata sejenis di kabupaten sekitar. Jenis obyek wisata lainnya yang cukup potensial adalah obyek wisata geologi, lebih sering dikunjungi masyarakat dari daerah Yogyakarta dan Bandung untuk keperluan penelitian atau memperoleh pengetahuan. Obyek wisata makam juga dikunjungi masyarakat dari daerah Tuban, Jawa Timur, dan kabupaten lain di Jawa Tengah. Obyek wisata Gua Terawang banyak dikunjungi masyarakat dari kabupaten disekitarnya, seperti Pati dan Kudus. Sementara itu obyek wisata pemandian, bumi

perkemahan dan bendungan wisatawan yang mengunjungi adalah masyarakat lokal Kabupaten Blora.

Obyek wisata lain yang akan dikembangkan adalah Kedungpupur Desa Ledok Kecamatan Sambong, bukit Pencu Desa Gandu Kecamatan Bogorejo dan bukit Cengklik Desa Bicak Kecamatan Todanan. Pengembangan Wanawisata Kedungpupur telah disusun masterplannya pada tahun 2016 dengan fokus pemandian alam dan wisata edukasi sumur minyak tua dengan sistem pengelolaan kerjasama antara Perhutani, Pertamina, Pemdes Ledok dan Pemkab Blora.

Daya dukung pariwisata di Kabupaten Blora meliputi hotel dan restoran. Jumlah hotel di Kabupaten Blora pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 34 hotel.Sementara itu jumlah wisatawan domestic mencapai angka 135.522 orang.

Secara rinci pencapaian kinerja urusan pariwisata dapat dilihat pada Tabel II-40 dibawah ini:

Tabel II-40
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Pariwisata Kabupaten Blora Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
A.	**Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata**						
1.	Kunjungan wisata	orang	90.030	90.050	137.225	135.522	170.000
2.	Persentase obyek wisata yang dipromosikan	%	38,46	38,46	40	42	80
B.	**Program pengembangan Destinasi Pariwisata**						
1.	Jumlah obyek wisata unggulan	obyek	11	11	11	12	13
C.	**Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata**						
1.	Jumlah Pokdarwis Aktif	kelompok	2	3	3	3	8
2.	Jumlah restoran	Buah	30	45	50	55	75
3.	Jumlah penginapan/hotel	buah	31	32	33	33	34

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blora Tahun 2017

2.1.3.3.3 Pertanian

Potensi pertanian tanaman pangan di Kabupaten Blora tergolong besar, dengan jenis komoditas berupa padi, jagung, kacang kedelai, singkong dan umbi-umbian. Hal ini menjadikan Kabupaten Blora sering mendapat kunjungan Pejabat Pemerintah Pusat maupun Propinsi.

Produksi tanaman pangan cukup fluktuatif dari tahun ke tahun, dipengaruhi oleh kondisi cuaca terutama curah hujan dan lamanya musim penghujan terjadi. Jumlah produksi padi sawah tahun 2017 mencapai sebesar 525.670 ton (meningkat 81.601 ton dari tahun 2016), sedangkan padi ladang meningkat dari 39.949 ton, jagung menurun 831 ton, produksi kedelai menurun tajam sekitar 9.193 ton dan produksi ubi kayu meningkat sekitar 21.448 ton, untuk kedelai penurunan produksi disebabkan karena banyaknya petani yang enggan menanam kedelai di area pertanian.

Komoditas perkebunan yang cukup menonjol peningkatan produksinya pada tahun 2017 adalah tembakau (naik sekitar 238,92 ton), kelapa (naik sekitar 5,26 ton), dan mete (naik sekitar 4,39 ton). Sedangkan produksi tebu menurun sekitar 218 ton dari tahun 2016. Hal ini dikarenakan banyak petani yang tidak lagi menanam tebu karena ongkos produksi terlalu mahal.

Sedangkan perkembangan pada bidang peternakan pada tahun 2017 terjadi peningkatan produksi sapi potong sebanyak 8,327 ekor , kambing meningkat sebanyak 1.609 ekor dari tahun 2016, Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten Blora dalam rangka meningkatkan produksi ternak yaitu dengan pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat, program SIWAB dari Pemerintah pusat ,pelaksanaan inseminasi buatan, dan pencegahan penanggulangan penyakit menular pada ternak.

Data kinerja pembangunan pada urusan pertanian selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II-41 berikut:

Tabel II-41
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Pertanian Kabupaten Blora Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
A.	**Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**						
1.	Cakupan bina kelompok petani	%	8	8	32	78	90
B.	**Program Peningkatan**						

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
	Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan						
1.	Jumlah promosi produk unggulan pertanian/perkebunan	kali	2	2	2	3	3
C.	**Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan**						
1.	Persentase kelompok tani menerapkan teknologi pertanian/perkebunan	%	99,5	99,2	70	73	95
D.	**Program peningkatan produksi pertanian**						
1.	Produksi pertanian:						
	Padi sawah	ton	409.357	391.842	403.067	444.069	525.670
	Padi ladang	ton	25.545	35.710	35.353	55.155	95.104
	Jagung	ton	228.430	242.178	260.669	349.201	348.370
	Kedelai	ton	5.205	14.622	16.000	11.012	1.819
	Ubi kayu	ton	84.573	92.857	43.211	45.151	66.599
	Cabe Merah	ton	125,990	98,773	101,039	64,174	107.245
	Cabe Rawit	ton	20,661	17,500	24,520	18,076	25.517
	Bawang merah	ton	11,028	8,924	10,897	16,359	17.287
	Jeruk siam	ton	5,247	8,127	21,649	6,582	15.161
2.	Produksi perkebunan:						
	Tembakau	ton	245,11	760,38	133,2	193,68	432,6
	Tebu	ton	15.976,20	16.860,94	18.304	16.740,76	16.522
	Kelapa	ton	141,96	198,79	100,47	66,19	71,45
	Mete	ton	305.23	214.24	214.24	167.87	172,26
E.	**Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan**						
1.	Persentase tenaga penyuluh pertanian/perkebunan yang telah mengikuti pelatihan	%	-	85	100	100	100
F.	**Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak**						

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Angka prevalensi Helminthiosis pada sapi	%	41,0	40,0	39	38	37
2.	Angka prevalensi BEF pada sapi	%	29,0	28,5	27	25	24
G.	**Program peningkatan produksi hasil peternakan**						
1.	Populasi Ternak						
	Sapi Potong	ekor	198.806	199.584	211.559	222.718	231.045
	Kerbau	ekor	1.518	1.694	n/a	1.528	1.528
	Kambing	ekor	112.122	112.650	129.812	130.473	132.082
	Domba	ekor	17.319	17.639	16.619	17.118	17.118
H.	**Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan**						
1.	Jumlah promosi pemasaran hasil produksi peternakan unggulan	kali	1	2	2	2	2

Sumber: Dinas Pertanian dan KP Kabupaten Blora Tahun 2017

2.1.3.3.4 Kehutanan

Sesuai Undang-Undang No 23 tahun 2014 tupoksi pengelolaan kehutan menjadi kewenangan Propinsi, berkaitan hal tersebut sejak Tahun 2017 urusan Kehutanan di kabupaten Blora di kelola Propinsi Jawa Tengah melalui Balai Pengelolaan Hutan Wilayah 1 Propinsi Jawa Tengah

Luas hutan negara Kabupaten Blora mencapai 90.614 ha dengan kawasan konservasi dan kawasan lindung mencapai 4,75 % dari total keseluruhan. Pada tahun 2017, total luas kawasan hutan di Kabupaten Blora mencapai 30.576,045 ha, yang terdiri dari kawasan hutan negara tidak produktif sebesar 22.500 ha dan luas lahan kritis di luar kawasan hutan sebesar 8.076,045 ha. Luas kawasan hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi secara vegetatif dan sipil teknis pada tahun 2017 mencapai 4,85 persen

Selengkapnya mengenai kondisi kinerja pada urusan kehutanan di Kabupaten Blora dapat dilihat pada Tabel II-42 berikut:

Tabel II-42
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Kehutanan
Kabupaten Blora Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
A.	**Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan**						
1	Persentase kawasan hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi secara vegetatif dan sipil teknis	%	10,87	7,81	10,40	10,44	4,85
B.	**Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan**						
1.	Persentase peningkatan kualitas kawasan konservasi dan kawasan lindung	%	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75
2.	Jumlah kasus gangguan keamanan hutan	kali	441	441	818	810	224
3.	Luas Areal Hutan yang Terbakar	ha	16	4	2	3	2
C.	**Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan**						
1.	Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB sektor pertanian	%	25,36	25,2	15,93	16,12*)	10
2.	Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap Total PDRB	%	12,48	12,1	4,64	NA	4,64
3.	Kontribusi PAD sektor kehutanan terhadap Total PAD	%	8,94	3,78	1,54	NA	1,54
4.	Pertumbuhan Produksi Hasil Hutan yang terdiri dari Kayu Bulat dan Kayu Olahan	%	6,2	-16,44	-4,68	NA	4,68
5.	Pertumbuhan luas hutan rakyat	%	1,84	0,39	1,53	0,33	0,33
D.	**Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan**						
6.	Jumlah LMDH mendapat program pemberdayaan/ dan atau Bagi Hasil Sharing PSDH	LMDH	100	100	105	105	148
E.	**Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan**						

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah hutan rakyat terinventarisasi	Kecamatan	-	16	NA	16	16
2.	Jumlah kelompok tani hutan rakyat yang mendapat sertifikasi hutan rakyat lestari standart internasional (SVLK	kelompok	NA	NA	NA	NA	7
E.	**Program Pelayanan Publik Urusan Kehutanan**						
1.	Jumlah kecamatan yang mendapatkan pelayanan publik penatausahaan hasil hutan hak	Kecamatan	16	16	16	16	16

Sumber: Balai Pengelolaan Hutan Wilayah 1 Propinsi Jawa Tengah

2.1.3.3.5 Energi dan Sumber Daya Mineral

Pembangunan urusan energi dan sumberdaya mineral mengarah pada upaya pemenuhan kebutuhan energi listrik, gas, BBM, dan pengawasan bidang pertambangan. Potensi pertambangan dan energi di Kabupaten Blora meliputi minyak mentah, gas alam, gamping, pasir, PLTS, SPBU, dan SPBE dengan perkembangan sebagai berikut:

Tabel II-43
Potensi Jenis Tambang dan Energi di Kabupaten Blora Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Minyak Mentah	Ribu barrel	107,69	NA	45,6	74,6	298.093,94
2.	Gas Alam	MMBTU	279,63	NA	90,6	100,6	10.637.268,44
3.	Gamping	Ton	12.600	NA	NA	NA	-
4.	Pasir	Ton	837.000	837.000	NA	NA	-
5.	PLTS	Unit	135	235	NA	NA	3
6.	SPBU	Unit	12	12	NA	NA	12
7.	SPBE	Unit	2	2	NA	NA	3

Sumber: Balai Pengelolaan Lingkungan Hidup Wilayah 1 Kabupaten Blora

Pencapaian persentase rumah tangga yang menggunakan listrik di Kabupaten Blora telah menunjukan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, ditunjukan pada tahun 2016 sebesar 99,1 persen dan menurun pada tahun 2017 sebesar 90,4 persen. Di bidang pertambangan, persentase lokasi penambangan yang masih dalam kondisi baik pada tahun 2017 mencapai 90 persen turun 10 persen dari 2016 (100 persen). Kasus pertambangan tanpa ijin masih banyak terjadi dengan angka mencapai 88 titik pada tahun 2017 turun 109 titik dari 2016 (197 titik). Perkembangan kinerja urusan energi dan sumberdaya mineral selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II-44 berikut:

Tabel II-44
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Blora Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
A.	**Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan**						
1.	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	%	98,25	98,1	98,3	99,1	90,4
B.	**Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan**						
1.	Pertambangan tanpa ijin	PETI	225	220	220	197	88
2.	Persentase lokasi penambangan yang masih dalam kondisi baik.		100	100	100	100	90

Sumber: Setda Kabupaten Blora Tahun 2017

2.1.3.3.6 Perdagangan

Jumlah pasar dan kualitas sarana prasarana pasar di Kabupaten Blora selama kurun waktu lima tahun (2013-2017) masih stagnan. Sektor perdagangan merupakan sektor kedua setelah sektor pertanian yang memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian di Kabupaten Blora. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB kabupaten Blora dari tahun ke tahun selalalu menunjukkan peningkatan, baik dari sisi nominalnya maupun dari sisi persentasenya. Pada tahun 2015 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB sebesar 14,96 persen. Maka dari itu dalam rangka mendukung dan mengembangkan iklim perdagangan bagi masyarakat, banyak hal yang telah dilakukan oleh

Pemerintah Kabupaten Blora. Capaian kinerja urusan bidang perdagangan tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel II-45 berikut:

Tabel II-45
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Perdagangan Kabupaten Blora Tahun 2013-2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
A.	**Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan Perdagangan**						
1.	Jumlah Pasar	unit	160	160	160	160	160
2.	Jumlah Pasar Yang Diawasi	unit	97	97	60,63	160	160
3.	persentase Pasar Yang Diawasi	%	60,6	60,6	100	100	100
B.	**Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri**						
1.	Persentase pasar tradisional yang memenuhi syarat kenyamanan dan kesehatan	%	-	-	1	26,67	43,75
2.	Persentase Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM)yang telah mengikuti pameran/ promosi produk.	%	5,75	1,34	1,53	1,65	1,73
C.	**Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor**						
1.	Nilai Ekspor Bersih	US$	2.127.251	NA	2.771.862	2.932.952,46	2.932.952,46
2.	Jumlah Produk yang Diterima Pasar Internasional	produk	4	5	5	5	5
3.	Persentase PDRB Sektor Perdagangan	%	13,34	16,45	16,7	16,7	14,96
D.	**Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan**						
1.	Persentase lokasi PKL yang tertata	%	4,4	4,9	6	8	14,06

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Blora

2.1.3.3.7 Perindustrian

Industri yang jumlahnya paling banyak terdapat di Kabupaten Blora adalah industri kecil dan menengah (IKM) yang merupakan penyumbang paling besar pendapatan sektor industri.

Kabupaten Blora saat ini memiliki 5 kluster industri. Dari jumlah tersebut yang berkembang sudah mencapai 3 klaster. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan dan kapasitas para pelaku IKM khususnya pengrajin adalah melakukan pembinaan rutin terhadap para pengrajin. Secara rinci kinerja urusan bidang perindustrian di Kabupaten Blora dapat dilihat pada Tabel II-46 berikut:

Tabel II-46
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Perindustrian Kabupaten Blora Tahun 2013-2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
A.	**Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial**						
1.	Jumlah Industri	unit	11.632	11.697	11.741	11.801	11.900
2.	Jumlah IKM	unit	11.601	11.671	11.738	11.796	11.801
3.	Persentase Pertumbuhan Industri	%	1,14	7,8	8,1	0,51	4,67
4.	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	6,22	NA	12,6	12,1*)	13,4
B.	**Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**						
1.	Sumbangan IKM Terhadap PDRB Sektor Industri	%	41,36	5,41	11,41	NA	15,6
2.	Persentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui P-IRT dan Halal	%	1,56	32,86	34,66	NA	41,5
3.	Persentase IKM yang telah mengikuti pameran promosi produk	%	0,81	0,82	0,82	0,25	0,51
4.	Persentase peningkatan omset penjualan produk IKM	%	5	10,57	21,64	0,66	0,87
5.	Persentase klaster industri yang berkembang	%	60	70	87,5	87,5	89,5
6.	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	24,2	24,5	24,5	30,01	40,1
7.	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi						
8.	Persentase industri yang	%	8,8	NA	NA	NA	NA

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
	memiliki six Sigma (Pengukuran Standarisasi, Pengujian dan Kualitas)						
C.	**Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri**						
1.	Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi	%	100	20	30	30	32

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Blora tahun 2017

2.1.3.3.8 Transmigrasi

Upaya peningkatan kesejahteraan penduduk yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blora salah satunya dengan transmigrasi penduduk. Transmigrasi merupakan penempatan penduduk secara merata yang dilakukan oleh Pemerintah. Pemberangkatan transmigran dari Kabupaten Blora pada tahun 2012 hanya sebanyak 20-30 KK, sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 259 KK. Sedikitnya jumlah transmigran yang diberangkatkan disebabkan keterbatasan alokasi yang diberikan pemerintah kepada Kabupaten Blora. Capaian kinerja pembangunan urusan bidang transmigrasi Kabupaten Blora dapat dilihat pada Tabel II-47 berikut:

Tabel II-47
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Transmigrasi Kabupaten Blora Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
A.	**Program Transmigrasi Regional**						
1.	Jumlah Transmigran diberangkatkan	KK	229	259	10	10	1

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Blora Tahun 2017

2.1.3.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

2.1.3.4.1 Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan menyangkut perencanaan pembangunan pada skala daerah, dan perencanaan di tingkat SKPD (sektoral). Secara

umum perencanaan pembangunan telah berjalan dengan baik, Kabupaten Blora telah memiliki dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, yaitu RPJPD tahun 2005-2025. Dokumen perencanaan tahunan yaitu RKPD telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah juga sudah dilaksanakan, hanya saja pelaksanaannya belum optimal, terlihat dari adanya beberapa kegiatan APBD yang tidak direncanakan dalam RKPD. Perlu upaya peningkatan peran Kepala Bappeda dan kepala SKPD lainnya dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (RPJMD, RKPD dan KUA-PPAS) maupun perencanaan dan penganggaran pada level SKPD (Renstra, Renja dan RKA), sehingga ada keselarasan antar dokumen perencanaan.

Capaian kinerja urusan perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel II-48 berikut:

Tabel II-48
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Perencanaan Pembangunan Kabupaten Blora Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
A.	**Program Pengembangan Data/Informasi**						
1.	Ketersediaan data untuk perencanaan pembangunan daerah	dokumen	1	1	1	1	1
2.	Ketersediaan hasil evaluasi RKPD	dokumen	1	1	1	1	1
B.	**Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh**						
1.	Ketersediaan perencanaan wilayah strategis dan cepat tumbuh	dokumen	2	2	2	2	1
C.	**Program Peningkatan Kapasitas Kelembangaan Perencanaan Pembangunan Daerah**						
1.	Persentase perencana SKPD yang memahami penyusunan dokumen perencanaan SKPD	%	100	100	100	100	100
D.	**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**						
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	dokumen	1	1	1	1	1

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	dokumen	1	1	1	1	1
3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	dokumen	1	1	1	1	1
4.	Persentase SKPD memiliki Renstra SKPD yang selaras dengan RPJMD	%	100	100	100	100	100
E.	**Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**						
1.	Ketersediaan dokumen perencanaan ekonomi sesuai amanat pemerintah	dokumen	2	2	2	2	4
F.	**Program perencanaan Sosial Budaya**						
1	Ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya sesuai amanat pemerintah	dokumen	2	2	2	2	3
G.	**Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam**						
1.	Ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SDA sesuai amanat pemerintah	dokumen	1	1	1	1	2

Sumber: Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2017

2.1.3.4.2 Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kebijakan otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar Pemerintah Kabupaten Blora dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.Dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan daerah, pemerintah Kabupaten Blora berupaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Blora mulai tahun 2014 memperoleh opini Wajar Tampa Pengecualian (WTP) dari BPK, dan akan dipertahankan terus pada tahun-tahun berikutnya, melalui komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan tata kelola keuangan, kapasitas pengelola keuangan dan auditor yang menunjang tersusunnya kualitas laporan keuangan yang baik, serta peningkatan manajemen pengelolaan aset daerah.

Perkembangan kinerja pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Blora tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel II-49 sebagai berikut:

Tabel II-49
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Keuangan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Capaian				
		2013	2014	2015	2016	2017
A.	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**					
1.	PAD	88.864.568.997	145.384.777.039	168.881.353.847	168.881.353.847	299,153,671,126
2.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP*)

Sumber: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017

2.1.3.4.3 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

2.1.3.4.3.1 Kepegawaian dan Sumber Daya Aparatur

Peningkatan sumber daya aparatur yang berkualitas dan berkompeten guna pelayanan kepada masyarakat sangat diperlukan dalam mencapai standar kompetensi baik bagi aparatur pemangku jabatan struktural, fungsional maupun pegawai non jabatan. Dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber daya Aparatur Kabupaten Blora telah banyak melaksanakan program/kegiatan Peningkatan kapasitas SDM aparatur antara lain melalui pengiriman PNS untuk tugas belajar (pengiriman dokter umum untuk melanjutkan ke jenjang spesialis yakni Spesialis Anak dan spesialis THT) dan fasilitasi ijin belajar, pelaksanaan diklat, bimbingan teknis, dll.

Jumlah Aparatur pemerintah Kabupaten Blora pada tahun 2017 sebanyak 8.207 orang, dengan perincian pada Tabel II-50 berikut:

Tabel II-50
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Blora Tahun 2013-2017

No.	Kriteria Pegawai	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
A.	**Berdasarkan Golongan**					
1.	Golongan I	363	358	329	284	246
2.	Golongan II	1.562	1.399	1.438	1.297	1.299
3.	Golongan III	3.478	3.490	3.948	3.915	3.478
4.	Golongan IV	4.166	4.168	3.910	3.706	3.184
	Jumlah	9.569	9.415	9.625	9.202	8.207
B.	**Pejabat Struktural**					
1.	Eselon I	0	0	0	0	0
2.	Eselon II	25	22	26	26	29
3.	Eselon III	146	146	149	147	152
4.	Eselon IV	670	674	695	664	657
5.	Eselon V	52	53	53	48	2.338
	Pejabat Fungsional	6.523	5.729	6.590	5.038	5.021
	Pensiunan	404	265	266	474	433

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017

2.1.3.4.3.2 Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan perbaikan kinerja aparatur dengan penyederhanaan regulasi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam seluruh aspek tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha, diselengarakan melalui: Pelayanan perijinan terpadu satu pintu; Keberadaan LPSE telah dimulai tahun 2012; Pelayanan KTP elektronik tahun 2012; Pelayanan unit pengaduan masyarakat di semua SKPD; dan Peningkatan keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui website Kabupaten Blora dimulai sejak 2010 dan sampai dengan tahun 2015 sebagian besar SKPD telah memiliki website yang mudah diakses masyarakat dan dunia usaha.

Tabel II-51
Capaian Kinerja Pembangunan Sub Bidang Reformasi Birokrasi Kabupaten Blora Tahun 2013-2017

No	Indikator	Capaian				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Penataan SKPD (unit)	27	27	27	44	42
2	Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah (urusan).	15	15	15	75 % capaian	NA
3	Ketepatan waktu penyampaian LAKIP	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
4	Ketepatan waktu penyampaian LPPD	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
5	Nilai SAKIP		C	C	CC	CC

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017

Pencapaian kinerja dalam penerapan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Blora belum optimal.

Kualitas pelayanan sesuai dengan harapan masyarakat berupa pelayanan yang murah, cepat, dan transparan belum sepenuhnya terwujud.Penerapan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang disertai Maklumat Pelayanan belum terlaksana di semua unit pelayanan publik di Kabupaten Blora. SPP ini diamanatkan dalam UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, PP No 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, PermenPAN-RB No. 36 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan, serta PermenPAN-RB No. 38 tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik. Belum adanya standar pelayanan publik pada unit-unit pelayanan publik menjadikan tidak adanya patokan bagi masyarakat dalam menilai apakah suatu unit pelayanan telah memberikan pelayanan sesuai dengan standar.

Beberapa unit telah dilakukan pengukuran capaian indeks kepuasan masyarakat dengan hasil sebagai berikut:

Tabel II-52
Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada SKPD Kabupaten Blora Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Kantor Bappeda	76,65	78,45	NA	NA	NA
2.	Kantor Dinas Daerah	80,80	80,80	NA	NA	NA
3.	Teknis Daerah/PTSP	74,00	79,18	76	74,25	43,61

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017

2.1.3.4.4 Penelitian dan Pengembangan

Untuk meningkatkan kualitas regulasi dan kebijakan pemerintahan daerah, menumbuhkembangkan penguasaan, pemanfaatan, pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dilaksanakan melalui penelitian dan pengembangan penyelenggaraan tugas pemerintahan secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan yang diwujudkan diantaranya dengan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), yang diamanatkan melalui Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor: 03 dan Nomor: 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, dan telah ditindaklanjuti Pemerintah Jawa Tengah melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 65 Tahun 2012 tentang Sistem Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Penguatan Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten Blora berpedoman pada Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 yang telah tersusun pada tahun 2016. Untuk Desa Inovasi pada tahun 2017 Kabupaten Blora Telah mempunyai Pilot Project Desa Inovasi yaitu Desa Greneng (desa wisata) Kecamatan Tunjungan, desa Ngawenombo (desa agropolitan) Kecamatan Kunduran dan desa Japah (desa digital) Kecamatan Japah. Disamping itu Bappeda juga telah membentuk desa inovasi yakni Desa Sumber Kecamatan Kunduran, Desa Blungun Kecamatan Jepon, Desa Sumurboto Kecamatan Jepon, Desa Turirejo Kecamatan Jepon serta Desa Ngawenombo Kecamatan Kunduran.

Disamping itu Kabupaten Blora setiap Tahun aktif mengikuti Lomba dan Pameran Krenova (Kreatifitas dan Inovasi) Tingkat Propinsi Jawa Tengah dan mendapatkan prestasi pada Tahun 2017 yaitu “ Omah Setrum “ dan akan diproses pengurusan hak paten.

Kabupaten Blora juga telah mengadakan Lomba dan Pameran Krenova Tingkat Kabupaten mulai tahun 2012 sampai 2017 . Pada Tahun 2017 sejumlah 16 peserta individual maupun kelompok telah mengikuti lomba Krenova dengan masing-masing judul :

- Pemanfaatan kotoran sapi menjadi bahan bakar biogas sebagai pengganti bahan bakar gas LPG.
- Matahari solusi kekeringan.
- Detektor gempa.
- Pemanfaatan daun jambu sebagai sirup herbal
- Rancangan bangun pembangkit listrik mikro hidro.
- Sirup kunyit jahe dengan pemanis stevia sebagai produk unggulan rendah kalori.
- Fermentasi daun jati tua menjadi pakan ternak, dll.

2.1.3.4.5 Fungsi Lainnya

2.1.3.4.5.1 Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah Kabupaten Blora semakin ditingkatkan melalui pelayanan berbasis teknologi informasi (TI) melalui website Kabupaten Blora yang mudah diakses dunia usaha dan masyarakat. Di samping itu, untuk mendukung perwujudan transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas kinerja SKPD, telah dibangun sebanyak 5 Sistim Informasi Manajemen Pemda.

2.1.3.4.5.2 Kerjasama Daerah

Kerjasama antara pemerintah daerah diperlukan guna mengatasi berbagai masalah lintas wilayah administratif sehingga dapat diselesaikan bersama dan disamping itu untuk menggali berbagai potensi yang dimiliki masing-masing Kabupaten/Kota yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Agar berhasil melaksanakan kerjasama tersebut dibutuhkan prinsip-prinsip umum antara lain prinsip "*Good Governance*". Disamping kerjasama antar daerah juga dilaksanakan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non lembaga pemerintah dalam dan luar negeri, serta peningkatan kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

2.1.3.4.5.3 Pengawasan

Pengawasan internal dilaksanakan secara rutin oleh Inspektorat agar kinerja pembangunan lebih berdaya guna dan berhasil guna tanpa ada penyalahgunaan dalam pemanfaatan keuangan daerah. Capaian kinerja sub bidang pengawasan dapat dikemukakan pada Tabel II-53 berikut:

Tabel II-53
Capaian Kinerja Pembangunan Sub Bidang Pengawasan Kabupaten Blora Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
A.	**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**						
1.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal & eksternal yang telah ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	90
2.	Persentase laporan hasil pemeriksaan dan ekspose temuan hasil pengawasan yang telah disusun	%	100	100	100	100	100
3.	Tingkat Maturitas SPIP	level	2	2	2	2	3,2
B.	**Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Apartur Pengawasan**						
1.	Tingkat Kapabilitas	level	2	2	2	2	2,9

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.1.4.1.1 Konsumsi Rumah Tangga perkapita

Konsumsi Rumah Tangga sering kali dijadikan barometer kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Secara teori peningkatan konsumsi rumah tangga dipacu oleh adanya pertambahan penduduk, peningkatan pendapatan masyarakat mapun perubahan pola konsumsi masyarakat. Peningkatan permintaan atau konsumsi merupakan pangsa pasar yang dapat menggerakan roda perekonomian dapat berjalan lebih cepat dan akan menggerakan sektor-sektor usaha lainnya untuk memenuhi permintaan tersebut. Namun perlu

diwaspadai bahwa tingginya tingkat konsumsi biasanya akan dibarengi dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah, terutama barang dan jasa yang tidak bisa diproduksi oleh wilayah lokal. Akibat tingginya barang dari luar daerah maka secara teori akan menurunkan angka PDRB.

Tabel II-54
Angka Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Kabupaten Blora
Tahun 2014-2016

No	Uraian	2014	2015	2016
1.	Total Pengeluaran RT ADHB	11 663 798.38	12 519 112.12	13 527 077.62
2.	Jumlah RT	243.039	254.816	254.816
3.	Rasio	0,0322	0,0350	0,0156

Sumber : BPS diolah Tahun 2016

Pengeluaran konsumsi rumah tangga atas dasar harga berlaku di Kabupaten Blora pada tahun 2016 sebesar 3,5 mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 5,16. Fluktuasi pengeluaran konsumsi rumah tangga ini biasanya dipengaruhi oleh tingkat harga (inflasi) dan pendapatan rumah tangga.

Bila dilihat dari pembentuknya komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat dikelompokan menjadi dua, konsumsi makanan dan konsumsi non makanan. Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan total penjumlahan dari seluruh konsumsi masyarakat di suatu wilayah, jika dibagi dengan jumlah penduduk akan merupakan konsumsi rata-rata perkapita.

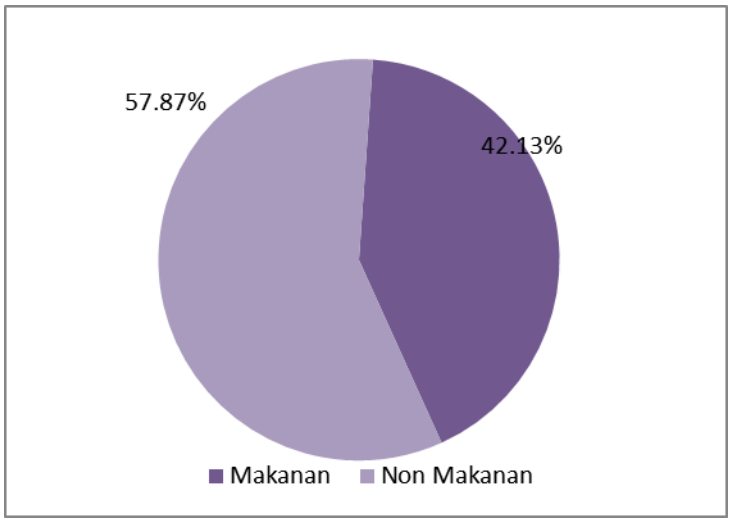

Sumber : BPS Kab.Blora

Gambar II-3
Distribusi Konsumsi Makanan dan Non Makanan terhadap Konsumsi Rumah Tangga ADHB Tahun 2017

Pada tahun 2017, konsumsi non makanan menunjukan peran yang dominan, yaitu sebesar 57,87 %, sedangkan konsumsi makanan perannya tercatat sebesar 42,13 %.

2.1.4.1.2 Nilai Tukar Petani

Sektor pertanian sampai dengan tahun 2017 masih menjadi sektor penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Blora, maka perhatian terhadap kesejahteraan petani dinilai sangat strategis. Salah satu alat ukur kesejahteraan petani yang digunakan saat ini adalah Nilai Tukar Petani (NTP). NTP dihitung dari rasio harga yang diterima petani (HT) terhadap harga yang dibayar petani (HB). Konsep ini secara sederhana menggambarkan daya beli pendapatan petani. Perkembangan NTP Kabupaten Blora Tahun 2015-2017 dapat dilihat pada Gambar II-4 di bawah ini:

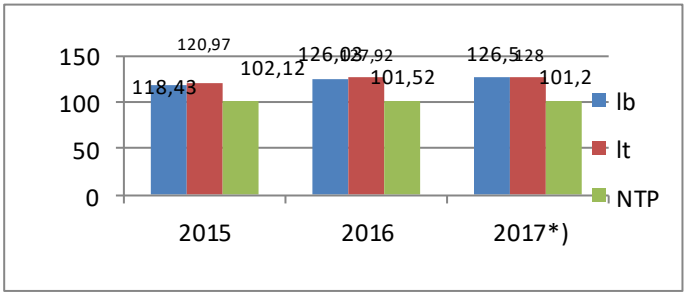

Gambar II-4
Perbandingan It, Ib dan NTP Kabupaten Blora Tahun 2015-2017

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur

Daya saing wilayah dapat diketahui dari ketersediaan sarana prasarana wilayah, diantaranya bank, perusahaan asuransi, hotel dan penginapan, restoran, ketersediaan air bersih, ketersediaan listrik, dan sarana telekomunikasi. Keberadaan infrastruktur tersebut akan mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru dalam bentuk investasi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan sarana-prasarana penunjang pengembangan wilayah di Kabupaten Blora dapat dilihat pada Tabel II-55 berikut:

Tabel II-55
Perkembangan Sarana dan Prasarana Wilayah Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Jenis dan jumlah bank dan cabang	Unit	28	28	28	28	28
2	Jumlah restoran dan rumah makan	Unit	45	46	60	60	62
3	Jumlah penginapan/hotel	Unit	33	35	39	39	40
4	Ketersediaan daya listrik	MWatt	46	46	48	48	48
5	Jumlah kebutuhan listrik	MWatt	136	137	137	137	139

Sumber: Dinporabudpar dan Setda Kabupaten Blora

2.1.4.3 Fokus Iklim Investasi

Penanaman modal dipengaruhi oleh iklim investasi yang kondusif dan kemudahan berusaha. Iklim investasi yang kondusif sangat dipengaruhi oleh kondisi politik dan kebijakan dalam penanaman modal. Masyarakat yang memandang positif arti pentingnya sebuah investasi serta didukung kemudahan dalam perijinan akan menjadi faktor pendorong dan menjadi daya tarik investor untuk berusaha dan menanamkan modalnya di suatu wilayah. Kerawanan sosial dan angka kriminalitas yang rendah juga menjadi faktor pendukung keberhasilan suatu daerah menarik masuknya investasi. Perkembangan jumlah kasus kriminal dan kasus demonstrasi yang terjadi di Kabupaten Blora dapat dilihat pada Tabel II-56 berikut:

Tabel II-56
Perkembangan Kasus Kriminalitas dan Demonstrasi Kabupaten Blora Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah kasus kriminalitas	Kasus	275	275	287	278	278
2	Jumlah demonstrasi dalam 1 tahun	kasus	0	6	5	6	6

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blora Tahun 2017

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Perkembangan rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Blora mengalami fluktuatif dari tahun 2013 hingga 2017. Di Tahun 2013 sebesar 31,95 persen kenaikan cukup signifikan pada Tahun 2017 menjadi sebesar 45,12 persen. Kecenderungan ini memberi gambaran bahwa struktur Kependudukan di Kabupaten Blora mengarah pada proporsi penduduk usia produktif yang lebih besar. Kondisi ini mengarah pada pencapaian bonus demografi, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (dependency ratio) penduduk non-usia kerja kepada penduduk usia kerja. Perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta karena meningkatnya suplai angkatan kerja (labor supply), tabungan (saving), dan kualitas sumber daya manusia (human capital).Kondisi tersebut menguntungkan dalam menggerakkan perekonomian di Kabupaten Blora.Untuk mencapai hal tersebut, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keahlian tenaga kerja diharapkan perlu diupayakan agar tenaga kerja produktif mampu menghadapi persaingan kerja yang kian kompetitif.

Perkembangan ratio ketergantungan penduduk di Kabupaten Blora dapat dilihat pada Tabel II-57 berikut:

Tabel II-57
Rasio Ketergantungan Penduduk Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah penduduk <15 thn dan >64 thn	jiwa	270.046	270.197	270.577	252.935	310.143
2	Jumlah penduduk usia 15-64 thn	jiwa	574.398	578.172	581.511	685.474	687.401
3	*Dependency ratio*	%	31,98	46,73	46,53	36.9	45.12

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Kabupaten Blora Tahun 2017 terhadap Realisasi RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 (Tahun II)

2.2.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.2.1.1 Pendidikan

Penyelenggaraan urusan bidang pendidikan dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 mempunyai 20 target indikator kinerja, adapun target dan realisasi tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel II-58 berikut:

Tabel II-58
Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Pendidikan dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016- 2021	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2017	Status Capaian Target Akhir RPJMD
	Program Pendidikan Anak Usia Dini					
1	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Usia 0-6 Tahun	%	57,48	34,78	58,31	●
2.	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Usia 3-6 Tahun	%	84,51	55,11	52,66	▶
3.	Persentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Terakreditasi.	%	74,54	37,11	2,68	▼

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016- 2021	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2017	Status Capaian Target Akhir RPJMD
	Program Pendidikan Dasar 9 Tahun					
4	APK SD/MI	%	109,5	107	103,61	●
5.	APM SD/MI	%	93	92,25	94,26	●
6.	APK SMP/MTs	%	105	104,50	104,34	●
7.	APM SMP/MTs	%	74	72,50	85,38	●
8.	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,2	0,40	0,07	●
9.	Angka Putus SekolahSMP/MTs	%	0,1	0,20	0,30	▼
10.	Angka Kelulusan SD /MI	%	100	100	100	●
11.	Angka Kelulusan SMP/MTs	%	100	100	99,80	▶
12.	Rata-rata Nilai UN SD/MI	%	6,85	6,75	7,78	●
13.	Rata – rata Nilai UN SMP/MTs	%	6,7	6,50	48,45	▶
14.	Persentase Ruang Kelas SD/MI dalam kondisi baik	%	88,5	87	88,91	●
15.	Persentase Ruang Kelas SMP/MTs dalam kondisi baik	%	83,5	81	88,40	●
	Program Pendidikan Non Formal					
16.	Persentase jumlah anak lulus sekolah yang tidak melanjutkan dan terlayani Paket A,B,C	%	58,4	33,71	35	▼
17.	Persentase lembaga pendidikan non formal yang terakreditasi.	%	68,31	40,31	54,56	●
	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan tenaga Kependidikan					
18	Guru TK yang memenuhi kualifikasi S1/D4	%	83	81,92	71	●
19.	Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D4	%	94	85,10	94,79	●

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016- 2021	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2017	Status Capaian Target Akhir RPJMD
20.	Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D4	%	98,8	94,90	95,98	●

Keterangan:

● : telah tercapai ▶ : akan tercapai ▼ : perlu perhatian/usaha keras

Dari 20 indikator kinerja urusan pendidikan, 14 (empat belas) indikator telah tercapai, 3 (tiga) indikator akan tercapai dan 3 (tiga) indikator perlu perhatian / usaha keras dalam pencapaiannya.

2.2.1.2 Kesehatan

Penyelenggaraan urusan bidang kesehatan dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 mempunyai 57 target indikator kinerja untuk dinas kesehatan dan 11 target indikator kinerja untuk masing-masing rumah sakit, adapun target dan realisasi tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel II-59 berikut:

Tabel II-59
Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Kesehatan dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2017	Status Capaian Target Akhir RPJMD
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak					
1	Cakupan Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100	99	99,99	●
2.	Cakupan Kunjungan Bayi	%	100	98,5	99,05	●
3.	Cakupan Kunjungan ibu hamil K4.	%	100	97,5	97,45	●
4.	Cakupan pelayanan Nifas	%	100	99	99,24	●
5.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	100	100	100	●

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2017	Status Capaian Target Akhir RPJMD
6.	Angka Kematian Bayi	Per 1000 KH	10,9	12,5	14,07	▼
7.	Angka kematian balita	Per 1000 KH	11,7	14,7	15,7	▼
8.	Kasus kematian ibu	Kasus	12	15	15	▼
	Program Upaya Kesehatan					
9.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	10,5	9,5	10	●
10.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	67	63	22,66	▼
	Program Obat dan Perbekalan					
11.	persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan	%	60	45	100	●
	Program Pengawasan Obat dan Makanan					
12.	Proporsi terbinanya apotik dan toko obat	%	100	100	100	●
13.	Proporsi terbinanya warung sekolah dan penjaja makanan	%	75	55	100	●
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan					
14.	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	%	26	19	18	▶
15.	Proporsi terbinanya sarana kesehatan berijin	%	100	100	100	●
16.	Rasio dokter umum per satuan penduduk	Per 100.000 pddk	18	14	8,879	▼
17.	Rasio dokter gigi per satuan penduduk	Per 100.000 pddk	4	3	2,1	▶
18.	Rasio perawat per satuan penduduk	Per 100.000 pddk	57	57	89,14	●
	Program Pelayanan					

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2017	Status Capaian Target Akhir RPJMD
	Masyarakat Miskin					
19.	Cakupan Masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan	%	100	100	22,66	▼
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan					
20	Jumlah Masyarakat yang dijamin kesehatannya melalui BPJS	orang	45.000	45.000	30.000	▶
	Program Pelayanan Kesehatan Lansia					
21.	Proporsi cakupan Pemeriksaan pra usila dan usila	%	85	83	54,6	▶
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita					
22.	Cakupan pemerikasaan pada anak usia dini	%	85	65	90,07	●
23.	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	100	100	100	●
	Program Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit Menular					
24.	Cakupan desa dengan UCI	%	100	100	100	●
	Program penanggulangan dan Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
25.	Cakupan penemuan TB	%	72	60	100	●
26.	Cakupan penemuan dan penanganan DBD	%	100	100	100	●
27	Angka kematian DBD (*incidence rate*)	Per 100.000 pddk	45	49	12,3	●
28	Angka kematian DBD (case fatality rate)	%	1	3	0,9	●
29.	Cakupan penemuan dan penanganan diare	%	100	100	41,2	▼
30.	Prevalensi HIV/AIDS (%) dari total populasi usia 15-49 tahun (per 100.000	Per 100.000 pddk	0,009	0,007	12,7	▼

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2017	Status Capaian Target Akhir RPJMD
	penduduk).					
31.	Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS	%	25	20	30	●
32.	Proporsi penduduk yg terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pd obat antiretroviral	%	85	85	80	▶
33.	Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)	kasus	320	360	107	●
34.	Persentase KLB dapat ditangani < 24 jam	%	100	100	100	●
35.	Penyakit Filariasis yang ditangani	%	100	100	Tidak ada kasus	●
36.	Persentase kelurahan yang melaksanakan Posbindu	%	20	17	47	●
37.	Persentase penduduk 15 tahun mendapat pelayanan tekanan darah	%	15	7	43	●
38.	Persentase penduduk yang mendapatkan pemeriksaan obesitas 15 tahun	%	15	12	43	●
39.	Persentase penduduk >5 tahun pemeriksaan gula darah	%	15	12	43	●
40.	Persentase perempuan usia 15 – 30 tahun deteksi dini kanker servik dan payudara	%	15	12	2	▼
41.	Persentase kasus hipertensi yang mendapat pelayanan pengobatan	%	15	12	78	●
42.	Persentase kasus DM mendapatkan pelayanan	%	15	12	32	●
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat					
43.	Persentase balita gizi buruk (BB/TB)	%	0,09	0,13	0,1	●
44.	Persentase balita gizi kurang (BB/TB)	%	2	2,8	3,86	▶
45.	Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan	%	100	100	100	●
46.	Persentase bayi ditimbang	%	90	82	73,3	●

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2017	Status Capaian Target Akhir RPJMD
	berat badannya (D/S)					
47	Cakupan pelayanan anak balita	%	95,5	93,5	96,02	●
48.	Cakupan MP – ASI anak usia 6 – 12 bulan keluarga miskin	%	100	100	100	●
49.	Persentase bayi mendapat kasul vitamin A	%	100	100	100	●
50.	Persentase ibu hamil mendapat tablet Fe (90)	%	99	93,5	97,4	●
51.	Persentase ibu hamil mengalami KEK	%	5	6,3	8,52	▶
52.	Persentase balita dengan kekurangan energi protein (KEK)	%	3,3	4	8,52	▼
53.	Persentase kecamatan bebas rawan gizi	%	100	100	75	●
	Program Pengembangan Kesehatan lingkungan					
54.	Cakupan rumah sehat	%	76	72	71,13	▶
55.	Cakupan TTU yang memenuhi syarat kesehatan	%	93,5	91,5	91,3	▶
	Program Promosi dan Pemberdayaan masyarakat					
56.	Cakupan rumah tangga yang ber-PHBS	%	90	82	100	●
57.	Cakupan desa / kelurahan siaga aktif	%	100	100	100	●
	RUMAH SAKIT					
	Program peningkatan Pelayanan BLUD RS Dr, R. Soetijono Blora					
58.	Bed Occupacy Rate (BOR)	%	74	73,5	57,13	●
59.	Average length of Stay (AVLOS)	hari	3	3	3,47	●
60.	Turn over interval (TOI)	hari	2	2	2,6	●
61.	Bed Turn Over (BTO)	kali	75	75	60,09	●
62.	Net Death rate (NDR)	%	0,01	1,0	1,7	▼

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2017	Status Capaian Target Akhir RPJMD
63.	Jumlah kunjungan rawat inap	Orang	18.500	16.500	11.304	▶
64.	Jumlah kunjungan rawat jalan	Orang	48.500	45.000	55.596	●
65.	Tingkat kepuasan pasien	%	85	80	73,9	●
66.	Status Akreditasi RS versi KARS	Status	paripurna	Madya	Madya	▼
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit Blora					
67.	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit	%	100	100	99,94	●
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan RS Blora					
68.	Cakupan pengobatan pasien di rumah sakit dari keluarga kurang mampu	%	100	100	100	●
	Program peningkatan Pelayanan BLUD RS Dr, R. Soeprapto Cepu					
69.	Bed Occupacy Rate (BOR)	%	74	66	65,65	●
70.	Average length of Stay (AVLOS)	hari	3	4,76	4,72	●
71.	Turn over interval (TOI)	hari	2	2,23	2,47	▶
72.	Bed Turn Over (BTO)	kali	75	57,06	50,75	▶
73.	Net Death rate (NDR)	%	0,01	0,018	1,26	▼
74.	Jumlah kunjungan rawat inap	Orang	18.500	10.221	9.835	▶
75.	Jumlah kunjungan rawat jalan	Orang	48.500	23.546	36.943	▶
76.	Tingkat kepuasan pasien	%	85	81,03	74,25	●
77.	Status Akreditasi RS versi KARS	Status	Paripurna	Madya	Utama	▼
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit					

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2017	Status Capaian Target Akhir RPJMD
78.	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit	%	100	100	96,15	●
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan RS					
79.	Cakupan pengobatan pasien di rumah sakit dari keluarga kurang mampu	%	100	100	100	●

Keterangan:

● : telah tercapai ▶ : akan tercapai ▼ : perlu perhatian/usaha keras

Dari 79 indikator kinerja urusan kesehatan, yang terdiri atas 57 indikator untuk Dinas Kesehatan (38 indikator telah tercapai, 10 indikator akan tercapai, dan 10 indikator perlu perhatian serius), 11 indikator untuk Rumah Sakit Blora (8 indikator telah tercapai, 1 indikator akan tercapai dan 2 indikator perlu perhatian serius) dan 11 indikator untuk Rumah Sakit Cepu (5 indikator telah tercapai, 4 indikator akan tercapai dan 2 indikator perlu perhatian).

2.2.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyelenggaraan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 mempunyai 21 target indikator kinerja, adapun target dan realisasi tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel II-60 berikut:

Tabel II-60
Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2017	Status Capaian Target Akhir RPJMD
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan					
1	Panjang jembatan baru yang terbangun	km	1		0,45	▶

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2017	Status Capaian Target Akhir RPJMD
	Program Rehablitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan					
2.	Persentase jalan mantap	%	86,41	82,41	75	●
3	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	65	61	46,4	●
4.	Persentase jembatan dalan kondisi baik	%	82	77	76,8	●
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan					
5	persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan	%	100	100	100	●
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah					
6.	Persentase penduduk yang mendapatkan air minum aman	%	73,55	60,51	88,83	●
7.	Cakupan pelayanan sanitasi	%	100	91,92	92,75	●
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya					
8.	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	50,03	30,03	31,5	▶
9.	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	%	55	35,00	30	▶
	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya air lainnya					
10.	Tersedianya air embung untuk irigasi – pertanian	%	50	42	30	▶
	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh					
11.	Persentase luas bangunan/ gedung yang dibangun pada wilayah strategis dan cepat tumbuh	%	0,20	0,20	0,15	●
	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan					

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2017	Status Capaian Target Akhir RPJMD
12.	Persentase realisis fisik pembangunan infrastruktur perdesaan per tahun	%	100	100	100	●
	Program Kinerja Pengelolaan persampahan					
13	Persentase sampah yang terangkut	%	95,24	74,62	50	▶
14.	persentase pengurangan sampah di perkotaan	%	30	10	10	▶
	Program Perencanaan Tata Ruang					
15.	Perda RDTR yang ditetapkan		1	1	1	●
16	Tersedianya informasi mengenai RDTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital		25	9	10	▼
	Program Pemanfaatan Ruang					
17.	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah per HPl/ HGB	%	0,01	0,01	0,05	▶
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang					
18.	Ruang publik yang berubah peruntukanya		0	0	-	-
	Program Penerangan Jalan Umum					
19.	Cakupan pelayanan penerangan jalan umum	%	55	45	30	▶
	Program PengelolaanRuang Terbuka Hijua (RTH)					
20.	persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan	%	20	10	10	▶
	Program Penataan Penugasan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah					
21.	Luasan tanah yang dibebaskan		-	-	-	-

Keterangan:

● : telah tercapai ▶ : akan tercapai ▼ : perlu perhatian/usaha keras

Dari 21 indikator kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, 9 indikator telah tercapai, 9 indikator akan tercapai dan 1 indikator perlu perhatian/usaha keras dalam pencapaiannya.

2.2.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Penyelenggaraan urusan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 mempunyai 6 target indikator kinerja, adapun target dan realisasi tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel II-61 berikut:

Tabel II-61
Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016- 2021	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2017	Status Capaian Target Akhir RPJMD
	Program Pengembangan Perumahan					
1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	68,56	68,56	69,23	●
	Program lingkungan sehat perumahan / pemukiman					
2.	Jumlah rumah tidak layak huni	unit	65.147	68.647	69.262	▼
3.	Luas kawasan kumuh di perkotaan	ha	38	58	65,05	▼
4	Persentase berkurangnya pemukiman kumuh di perkotaan	%	0,55	0,75	8,09	▶
	Program pengembangan areal pemakaman					
6.	Kawasan pemakaman umum yang terpelihara	%	24	24	24	●

Keterangan:
● : telah tercapai ▶ : akan tercapai ▼ : perlu perhatian/usaha keras

Dari 6 indikator kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, 2 indikator telah tercapai, 1 indikator akan tercapai dan 2 indikator perlu perhatian / usaha keras dalam pencapaiannya.

2.2.1.5 Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan urusan bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 mempunyai 13 target indikator kinerja, adapun target dan realisasi tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel II-62 berikut:

Tabel II-62
Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2017	Status Capaian Target Akhir RPJMD
	Program Peningkatan Politik Masyarakat					
1.	Kegiatan pembinaan politik daerah	Kali	30	5	9	▼
2.	Tingkat partisipasi politik masyarakat Kabupaten Blora	%	80	72	71,6	●
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan					
3.	Jumlah tokoh masyarakat yang memahami peningkatan toleransi kerukunan anatar umat beragama, nilai sosial dan solidaritas di kalangan masyarakat serta pelestarian nilai-nilai luhur budaya	org	1.800	300	500	▼
	Program kemitraan wawasan kebangsaan menjaga ketertiban dan keamanan					
4	Jumlah pemuda/pelajar yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan dan bela negara	org	1200	200	300	▼
	Program peningkatan dan kenyamanan lingkungan					
5.	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan (Pembekalan Kader FKDM)	org	1200	200	180	▼
	Program pemeliharaan kantrantibnas dan					

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2017	Status Capaian Target Akhir RPJMD
	pencegahan tindak kriminal					
6.	Terpeliharanya kondusifitas wilayah melalui kerjasama KOMINDA	kali	72	12	12	▼
7.	Cakupan patroli Satpol PP	%	56,25	56,25	56,25	●
8.	Jumlah tokoh masyarakat, pemuda dan pelajar yang mendapatkan penyuluhan narkoba	org	3.000	500	500	▼
	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan linkungan					
9.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di kabupaten	%	85	80	100	●
10.	Cakupan penegakan PERDA	%	82,8	74,19	50/54 kasus	▼
	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan					
11.	Rasio petugas perlindungan masyarakat di Kabupaten	rasio	1,3	1,33	0,72	▼
	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat					
12.	Penyuluhan tentang miras, narkoba, dan perjudian kepada masyarakat di kabupaten	Kec.	16	16	16	●
	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam					
13.	Jumlah anggota linmas yang ditingkatkan pemahamannya dalam penanganan bencana	org	590	100	200	▶

Keterangan:

● : telah tercapai ▶ : akan tercapai ▼ : perlu perhatian/usaha keras

Dari 13 indikator kinerja urusan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, 4 indikator telah tercapai, 1 indikator akan tercapai dan 8 indikator perlu perhatian / usaha keras dalam pencapaiannya.

2.2.1.6 Sosial

Penyelenggaraan urusan bidang sosial dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 mempunyai 14 target indikator kinerja, adapun target dan realisasi tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel II-63 berikut:

Tabel II-63
Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Sosial dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2017	Status Capaian Target Akhir RPJMD
	Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial					
1	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	0,30	0,22	0,67	●
	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma					
2.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	4,79	7,87	10	▶
	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial					
3	Persentase korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa bencana	%	80	80	100	●
	Program pembinaan panti asuhan / panti jompo					
4	persentase panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana dan prasrana pelayanan kesejahteraan sosial	%	100	100	100	●
	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial					
5	persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat yang menyediakan sarana dan prasaran pelayanan kesejahteraan sosial	%	100	100	100	●
	Program pencegahan dini					

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2017	Status Capaian Target Akhir RPJMD
	dan penanggulangan korban bencana alam					
6	Cakupan pelayanan penanganan bencana di Kabupaten Blora	%	99	96	90	●
7	Tingkat waktu tanggap (respon tim rate) daerah layanan	menit	60	60	60	●
8	Persentase aparatur petugas penanggulangan bencana yang memenuhi standar kualifikasi	%	95	60	75	●
9	Jumlah relawan	org	310	302	240	●
	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran					
10	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kab Blora	%	95	85	80	●
11	Tingkat waktu tanggap	Menit	15	15	15	●
12	Persentase aparatur damkar yang memenuhi standar kualifikasi	%	98	85	80	●
13	Jumlah damkar	unit	9	2	4	▼
14	Jumlah alat pemadam ringan (APAR)	unit	20	15	16	●

Keterangan:

● : telah tercapai ▶ : akan tercapai ▼ : perlu perhatian/usaha keras

Dari 14 indikator kinerja urusan sosial, 12 indikator telah tercapai, 1 indikator akan tercapai dan 1 indikator perlu perhatian / usaha keras dalam pencapaiannya.

2.2.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

2.2.2.1 Tenaga Kerja

Penyelenggaraan urusan bidang tenaga kerja dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 mempunyai 7 target indikator kinerja, adapun target dan realisasi tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel II-64 berikut:

Tabel II-64
Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Tenaga Kerja dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016- 2021	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2017	Status Capaian Target Akhir RPJMD
	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja					
1	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	80	68	40	▼
2	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	10	5	30	●
3	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	15	3,75	60	●
	Program peningkatan kesempatan kerja					
4	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,4	4,04	2,85	●
	Program perlindungan dan pengebangan lembaga ketenagakerjaan					
5	Angka keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	%	95	82	70	▶
6	Persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	%	50	50	100	●
7	Buruh/pekerja yang menjadi peserta program jamsostek/ BPJS ketenagakerjaan	org	9.800	7.400	6.595	▶

Keterangan:
● : telah tercapai ▶ : akan tercapai ▼ : perlu perhatian/usaha keras

Dari 7 indikator kinerja tenaga kerja, 4 indikator telah tercapai, 2 indikator akan tercapai dan 1 indikator perlu perhatian / usaha keras dalam pencapaiannya.

2.2.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 mempunyai target 7 indikator kinerja, adapun target dan realisasi tahun 2017 dapat dilihat pada :

Tabel II-65 berikut:

Tabel II-65
Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2017	Status Capaian Target Akhir RPJMD
	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak					
1	Persentase *focal point* aktif	%	100	45	40	▼
2	Jumlah kelompok anak, termasuk forum anak nyang ada di Kabupaten , kecamatan, dan desa/ kelurahan	Kelom-pok	9	5	4	▼
	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan					
3	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	%	10	6	49	●
4	Persentase SKPD/OPD menyusun analisis gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	%	50	30	90	●
	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan					
5	Kasus kekerasan terhadap perempuan	kasus	0	0	12	▼
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan	%	100	100	100	●

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2017	Status Capaian Target Akhir RPJMD
	Program peningkatan peran serta dan keserataan gender dalam pembangunan					
7	Jumlah desa prima yang terbentuk	jumlah	20		5	▼

Keterangan:

● : telah tercapai ▶ : akan tercapai ▼ : perlu perhatian/usaha keras

Dari 7 indikator kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 3 indikator telah tercapai, dan 4 indikator perlu perhatian / usaha keras dalam pencapaiannya.

2.2.2.3 Pangan

Penyelenggaraan urusan bidang pangan dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 mempunyai 9 target indikator kinerja, adapun target dan realisasi tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel II-66 berikut:

Tabel II-66
Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Pangan dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2017	Status Capaian Target Akhir RPJMD
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan					
1	Ketersediaan pangan utama	ton	292.431,97	281.021,80	311.149	●
2	Ketersediaan energi per kapita	Kkal/ kap/ hari	3,.03	3.165	3.268	●
3	Ketersediaan protein per kapita	Gram/ kap/ hari	78,52	77,59	130,49	●
4	Penguatan cadangan pangan	ton	19.000	20.000	15.400	●
5	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah	%	77,78	77,78	95	●
6	Stabilitas harga dan pasokan pangan	%	93	88	95	●

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2017	Status Capaian Target Akhir RPJMD
7	Skor pola pangan harapan	%	67,6	66,8	70,5	●
8	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	95	80	0	▼
9	Penaganan desa rentan pangan	desa	24	4	3	▼

Keterangan:

● : telah tercapai ▶ : akan tercapai ▼ : perlu perhatian/usaha keras

Dari 9 indikator kinerja urusan pangan, 7 indikator telah tercapai dan 2 indikator perlu perhatian / usaha keras dalam pencapaiannya.

2.2.2.4 Pertanahan

Penyelenggaraan urusan bidang pertanahan dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 mempunyai 2 (dua) target indikator kinerja, adapun target dan realisasi tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel II-67 berikut:

Tabel II-67
Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Pertanahan dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2017	Status Capaian Target Akhir RPJMD
	Program Koordinasi Bidang Pertanahan dan Permukaan Bumi					
1	Ketersediaan tanah untuk keperluan Pemerintah Daerah	%	100	100	37	▼
2	Tersusunnya dokumen rupa bumi	Doku-men	70	14	2	▼

Keterangan:

● : telah tercapai ▶ : akan tercapai ▼ : perlu perhatian/usaha keras

Dari 2 indikator kinerja urusan pertanahan 2 indikator perlu perhatian / usaha keras dalam pencapaiannya

2.2.2.5 Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan urusan bidang lingkungan hidup dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 mempunyai 10 target indikator kinerja, adapun target dan realisasi tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel II-68 berikut:

Tabel II-68
Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Lingkungan Hidup dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2017	Status Capaian Target Akhir RPJMD
	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan					
1	Standar IKLH Kabupaten Blora	%	70,42	64,48	64,48	▶
2	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pengelolaan lingkungan hidup	%	100	100	100	●
3	Rasio cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan	%	100	100	100	●
4	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan linkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	●
	Program perlindungan dan konservasi SDA					
5	Rasio cakupan penghijauan di wilayah sumber mata air	%	1,6	0,08	100	●
6	Persentase jumlah sumur resapan dan lubang resapan biopori yang berhasil dimanfaatkan	%	100	100	100	●
	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan					
7	Institusi pendidikan yang menerapkan program sekolah berwawasan lingkungan	sekolah	8	7	20	●

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2017	Status Capaian Target Akhir RPJMD
	(sekolah adiwiyata)					
	Program peningkatan pengendalian polusi					
8	Persentase instalasi pengolah limbah cair yang berhasil dimanfaatkan	%	100	100	100	●
9	Pemantauan uji kulaitas udara	Titik sampel	50	10	10	▼
10	Pemantauan uji kualitas limbah cair	Titik sampel	75	15	18	▼

Keterangan:

● : telah tercapai ▶ : akan tercapai ▼ : perlu perhatian/usaha keras

Dari 10 indikator kinerja urusan lingkungan hidup , 7 indikator telah tercapai, 1 indikator akan tercapai dan 2 indikator perlu perhatian / usaha keras dalam pencapaiannya.

2.2.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 mempunyai 4 target indikator kinerja, adapun target dan realisasi tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel II-69 berikut:

Tabel II-69
Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2017	Status Capaian Target Akhir RPJMD
	Program Penataan Administrasi Kependudukan					
1	Kepemilikan KTP	%	100	97	98,86	●
2	Rasio bayi berakte kelahiran	%	99	98,5	94,22	●

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2017	Status Capaian Target Akhir RPJMD
3	Kepemilikan akte kelahiran anak usia 0 – 18 tahun	%	98	95,5	94.49	●
4	Rasio pasangan berakte nikah	%	100	100	100	●

Keterangan:

● : telah tercapai ▶ : akan tercapai ▼ : perlu perhatian/usaha keras

Dari 4 indikator kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil, 4 indikator telah tercapai.

2.2.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penyelenggaraan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 mempunyai 6 target indikator kinerja, adapun target dan realisasi tahun 2017 dapat dilihat padaTabel II-70 berikut:

Tabel II-70
Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2017	Status Capaian Target Akhir RPJMD
	Program Peningkatan peran perempuan di perdesaan					
1	Posyandu aktif	%	100	100	100	●
2	Jumlah usaha ekonomi produktif perempuan yang terlatih	Kelompok	90	70	44	▼
	Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan					
3	Jumlah BUMDes	Unit	45	16	45	●
	Program peningkatan keberdayaan masyarakat di perdesaan					
4	Jumlah posyantek aktif	Unit	7	1	2	▼

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2017	Status Capaian Target Akhir RPJMD
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa / kelurahan					
5	Persentase aparatur desa/kelurahan telah dilatih managemen pengelolaan desa/kelurahan	%	100	100	100	●
	Program pemberdayaan masyarakat, adat, dan sosial budaya					
6	Persentase desa / kelurahan memiliki profil desa/kelurahan	%	100	100	100	●

Keterangan:

● : telah tercapai ▶ : akan tercapai ▼ : perlu perhatian/usaha keras

Dari 6 indikator kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, 4 indikator telah tercapai, dan 2 indikator perlu perhatian / usaha keras dalam pencapaiannya.

2.2.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penyelenggaraan urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 mempunyai 7 target indikator kinerja, adapun target dan realisasi tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel II-71 berikut:

Tabel II-71
Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana RKPD Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2017	Status Capaian Target Akhir RPJMD
	Program Keluarga Berencana					
1	Cakupan peserta KB aktif	%	90	73	83,1	●
2	Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber_KB	%	5,2	7,2	7,01	●

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2017	Status Capaian Target Akhir RPJMD
	tidak terpenuhi (UnmetNeed)					
3	Angka pemakaian kontarsepsi / CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun (semua cara)	%	84	80,82	96,96	●
	Program Kesehatan reproduksi Remaja					
4	Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	%	6,5	7,5	1,2	▼
	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mendiri					
5	Jumlah masyarakat peduli KB	Kelom-pok	6	6	6	●
6	Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	%	82	74	65	●
	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu PADU					
7	Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB	%	75	70	67,35	●

Keterangan:

● : telah tercapai ▶ : akan tercapai ▼ : perlu perhatian/usaha keras

Dari 7 indikator kinerja urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, 6 indikator telah tercapai dan 1 indikator perlu penanganan serius.

2.2.2.9 Perhubungan

Penyelenggaraan urusan bidang perhubungan dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 mempunyai 9 target indikator kinerja, adapun target dan realisasi tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel II-72 berikut:

Tabel II-72
Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Perhubungan dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2017	Status Capaian Target Akhir RPJMD
	Program Pembangunan dan Prasarana Fasilitas Perhubungan					
1	Tersedianya informasi perhubungan	Doku-men	4	1	2	▼
2	Tersedianya halte pada setiap kecamatan	unit	16	11	15	●
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan					
3	Pembangunan halte	unit	5	0	0	▼
4	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiapkabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam kabupaten/trayek	unit	11	7	10	●
5	Pembangunan terminal barang (pelataran tempat parkir truk)	unit	1	0	0	▼
6	Reaktifasi bandara ngloram	Unit	1	0	0	▼
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ					
7	Tersedianyafasilitas perlengkapan jalan (rambu,marka,guardrail,API LL,dll)	%	98	90	95	●
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas					
8	Persentase prasarana perhubungan dalam kondisi baik	%	98	87	90	●
	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor					
9	Persentase kendaraan yang lulus uji	%	93	85	86	●

Keterangan:
● : telah tercapai ▶ : akan tercapai ▼ : perlu perhatian/usaha keras

Dari 9 indikator kinerja urusan perhubungan , 5 indikator telah tercapai dan 4 indikator yang perlu perhatian.

2.2.2.10 Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan urusan bidang komunikasi dan informatika dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 mempunyai 8 target indikator kinerja, adapun target dan realisasi tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel II-73 berikut:

Tabel II-73
Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2017	Status Capaian Target Akhir RPJMD
	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa					
1	Perangkat Daerah yang telah memiliki jaringan internet	PD	46	46	78	●
2	Persentase Perangkat Daerah telah memiliki website	%	100	100	100	●
	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi					
3	Jumlah menara komunikasi	unit	146	146	151	●
	Program peningkatan tata laksana komunikasi dan informatika					
4	Informasi kebijakan daerah	Doku-men	14	11	5	▼
	Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur pada SKPD yang Menangani Urusan Bidang Komunikasi dan Informasi di Daerah					
5	Keterbukaan komunikasi publik	kali	30	20	9	▼
	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi					

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2017	Status Capaian Target Akhir RPJMD
6	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki SDM berkeahlian teknologi informasi	%	36	31	23	▶
	Program Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah					
7	Fasilitasi pembinaan PPID SKPD	%	50	42	20	▼
	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa					
8	Pelaksanaan desiminasi dan pendistribusian informasi nasional	kali	15	13	27	●

Keterangan:

● : telah tercapai ▶ : akan tercapai ▼ : perlu perhatian/usaha keras

Dari 8 indikator kinerja urusan komunikasi dan informasi , 4 indikator telah tercapai, 1 indikator akan tercapai,dan 3 indikator yang perlu perhatian.

2.2.2.11 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Penyelenggaraan urusan bidang koperasi dan usaha kecil menengah dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 mempunyai 4 target indikator kinerja, adapun target dan realisasi tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel II-74 berikut:

Tabel II-74
Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2017	Status Capaian Target Akhir RPJMD
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi					
1	Persentase koperasi aktif	%	81	80,2	37,72	▼
2	Persentase koperasi sehat	%	40	40	43,72	●
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha					
3	Jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	Unit	6.825	6.725	6.729	●
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah					
4	Persentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk	%	0,8	0,4	1,83	●

Keterangan:
● : telah tercapai ▶ : akan tercapai ▼ : perlu perhatian/usaha keras

Dari 4 indikator kinerja koperasi, usaha kecil dan menengah, 3 indikator telah tercapai dan 1 indikator yang perlu perhatian/ penanganan serius.

2.2.2.12 Penanaman Modal

Penyelenggaraan urusan penanaman modal dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 mempunyai 8 target indikator kinerja, adapun target dan realisasi tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel II-75 berikut:

Tabel II-75
Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Penanaman Modal dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2017	Status Capaian Target Akhir RPJMD
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi					
1	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	Doku-men	8	3	3	▼
2	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan	Kali	20	4	10	▶
3	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal provinsi	Kali	15	3	2	▼
4	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten	Kali	5	1	0	▼
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi					
5	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Unit	632	627	188	▼
6	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp.	5 T	4 T	8,2 T	●
7	Terselenggaranya pelayanan perijinan dan non perijinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal: Pendaftaran Penanamanan Modal Dalam Negeri, Ijin prinsip Penanamanan Modal Dalam Negeri, Ijin Usaha Penanamanan Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja	Hari	1	3	3	●
8	Jenis pelayanan yang terlayani melalui sistem informasi pelayanan perijinan	Ijin	17	17	17	●
9	Terimplementasikannya sistem pelayanan informasi dan	SPIPISE	8	8	8 (100%)	●

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2017	Status Capaian Target Akhir RPJMD
	perijinan investasi secara elektronik (SPIPISE)					

Keterangan:

● : telah tercapai ▶ : akan tercapai ▼ : perlu perhatian/usaha keras

Dari 9 indikator kinerja penanaman modal, 4 indikator telah tercapai, 1 indikator akan tercapai dan 4 indikator yang perlu perhatian/ penanganan serius.

2.2.2.13 Kepemudaan dan Olah Raga

Penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olah raga dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 mempunyai 6 target indikator kinerja, adapun target dan realisasi tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel II-76 berikut:

Tabel II-76
Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target akhir RPJMD 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2017	Status Capaian Target Akhir RPJMD
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan					
1	Jumlah organisasi pemuda yang memiliki legalitas organisasi dari pemerintah kabupaten	organisasi	57	54	53	●
2	Jumlah pemuda berprestasi	orang	105	97	120	●
	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda					
3	Jumlah pemuda yang mampu berwirausaha	Org	180	160	420	●

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2017	Status Capaian Target Akhir RPJMD
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga					
4	Jumlah medali tingkat propinsi yang diperoleh	medali	97	85	164	●
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga					
5	Jumlah Gelanggang olah raga	Gedung	2	2	2	●
6	Jumlah lapangan olah raga	lapangan	770	750	750	●

Keterangan:
● : telah tercapai ▶ : akan tercapai ▼ : perlu perhatian/usaha keras

Dari 6 indikator kinerja pemuda dan olah raga, 6 indikator telah tercapai.

2.2.2.14 Statistik

Penyelenggaraan urusan bidang statistik alam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 mempunyai 2 target indikator kinerja, adapun target dan realisasi tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel II-77 berikut:

Tabel II-77
Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Statistik dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2017	Status Capaian Target Akhir RPJMD
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah					
1	Persentase keterisian data SIPD	%	90	80	94	●
2	Ketersediaan dokumen IKK	dok	1	1	1	●

Keterangan:
● : telah tercapai ▶ : akan tercapai ▼ : perlu perhatian/usaha keras

Dari 2 indikator kinerja statistik, 2 indikator telah tercapai.

2.2.2.15 Kebudayaan

Penyelenggaraan urusan bidang kebudayaan dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 mempunyai 6 target indikator kinerja, adapun target dan realisasi tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel II-78 berikut:

Tabel II-78
Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Kebudayaan dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2017	Status Capaian Target Akhir RPJMD
	Program Pengembangan Nilai Budaya					
1	Jumlah Kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	kali	3	3	4	●
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya					
2	Cakupan kajian seni	%	100	90	90	●
3	Cakupan fasilitasi seni	%	100	78	78	●
4	Cakupan gelar seni	%	100	100	100	●
5	Cakupan sumber daya manusia kesenian	%	100	85	100	●
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya					
6	Persentase benda, situs dan kawasan budaya yang dilestarikan	%	40	27,5	78	●

Keterangan:
● : telah tercapai ▶ : akan tercapai ▼ : perlu perhatian/usaha keras

Dari 6 indikator kinerja kebudayaan, 6 indikator telah tercapai.

2.2.2.16 Perpustakaan

Penyelenggaraan urusan bidang perpustakaan dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 mempunyai 4 target indikator kinerja, adapun target dan realisasi tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel II-79 berikut:

Tabel II-79
Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Perpustakaan dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2017	Status Capaian Target Akhir RPJMD
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan					
1	Jumlah pengunjung perpustakaan	Org	75.000	63.000	118.098	●
2	Jumlah perpustakaan sekolah dan desa yang terbina	Unit	250	190	210	●
3	Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan	Eks.	36.351	24.751	26.088	▶
	Program Penyelematan dan Pelestarian Koleksi Pustaka					
4	Jumlah bahan pustaka yang sudah diselamatkan/dilestarikan	Uks.	950	950	500	▶

Keterangan:
● : telah tercapai ▶ : akan tercapai ▼ : perlu perhatian/usaha keras

Dari 4 indikator kinerja perpustakaan, 2 indikator telah tercapai dan 2 indikator akan tercapai.

2.2.2.17 Kearsipan

Penyelenggaraan urusan bidang kearsipan dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 mempunyai 4 target indikator kinerja, adapun target dan realisasi tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel II-80 berikut:

Tabel II-80
Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Kearsipan dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2017	Status Capaian Target Akhir RPJMD
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah					
1	Persentase arsip tekstual yang terolah dengan baik	%	100	60	100	●
2	Jumlah arsip non tekstual yang terolah dengan baik	foto	750	150	10	▼
3	Jumlah arsip/dokumen yang telah di duplikatkan	berkas	30.000	6.000	43	▼
	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan					
4	Jumlah dokumen/ arsip yang terpelihara dengan baik	berkas	178.000	78.000	134.000	▶

Keterangan:
● : telah tercapai ▶ : akan tercapai ▼ : perlu perhatian/usaha keras

Dari 4 indikator kinerja kearsipan, 1 indikator telah tercapai, 1 indikator akan tercapai dan 2 indikator perlu perhatian / usaha keras.

2.2.3 Urusan Pilihan

2.2.3.1 Kelautan dan Perikanan

Penyelenggaraan urusan bidang kelautan dan perikanan dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 mempunyai 5 target indikator kinerja, adapun target dan realisasi tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel II-81 berikut:

Tabel II-81
Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2017	Status Capaian Target Akhir RPJMD
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan					
1	Produksi perikanan budidaya	kg	890.450	840.388	348.500	▼
2	Tingkat cakupan bina kelompok pembudidayaan ikan	%	65	49	33	▼
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap					
3	Produksi perikanan tangkap	ton	300	290	162,483	▼
	Program Optimalisasi dan Pemasaran Produksi Perikanan					
4	Tingkat konsumsi ikan penduduk	kg/kap	11	9,1	15,62	●
5	Jumlah produksi hasil olahan ikan	ton	962	956	612,183	▶

Keterangan:
● : telah tercapai ▶ : akan tercapai ▼ : perlu perhatian/usaha keras

Dari 5 indikator kinerja kelautan dan perikanan , 1 indikator telah tercapai, 1 indikator akan tercapai dan 3 indikator perlu perhatian / usaha keras.

2.2.3.2 Pariwisata

Penyelenggaraan urusan bidang pariwisata dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 mempunyai 7 target indikator kinerja, adapun target dan realisasi tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel II-82 berikut:

Tabel II-82
Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Pariwisata dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2017	Status Capaian Target Akhir RPJMD
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata					
1	Jumlah kunjungan wisata	orang	300.000	170.000	201.635	▶
2	Persentase obyek wisata yang dipromosikan	%	100	65	80	●
	Program Pengembangan Destinasi Wisata					
3	Jumlah obyek wisata unggulan	objek	22	22	13	▶
4	Jumlah pokdarwis aktif	Kelom-pok	6	4	8	●
5	Jumlah restoran	buah	110	65	75	▶
6	Jumlah penginapan/hotel	buah	45	34	34	▶
	Program Pengembangan Kemitraan					
7	Pemilihan duta wisata	peserta	14	14	5	▼

Keterangan:
● : telah tercapai ▶ : akan tercapai ▼ : perlu perhatian/usaha keras

Dari 7 indikator kinerja pariwisata, 2 indikator telah tercapai, 4 indikator akan tercapai, dan 1 indikator yang perlu perhatian/ penanganan serius.

2.2.3.3 Pertanian

Penyelenggaraan urusan bidang pertanian dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 mempunyai 23 target indikator kinerja, adapun target dan realisasi tahun 2017dapat dilihat padaTabel II-83 berikut

Tabel II-83
Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Pertanian dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2017	Status Capaian Target Akhir RPJMD
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan					
	Produksi pertanian					
1	Padi sawah	ton	420.295	408.730	525.670	●
2	Padi ladang	ton	36.373	35.940	95.104	●
3	Jagung	ton	276.706	265.908	348.370	●
4	Kedelai	ton	11.300	10.860	1.819	▼
5	Ubi kayu	ton	57.907	47.640	66.599	●
6	Cabe merah	ton	5.654	5.433	107.245	●
7	Cabe rawit	ton	1.418	1.336	25.517	●
8	Bawang merah	ton	1.165	1.129	17.287	●
9	Jeruk siam	ton	1.269	1.220	15.161	●
	Produksi Perkebunan	**ton**				
10	Tembakau	ton	1.475	1.375	432,6	▼
11	Tebu	ton	18.600	18.400	16.522	●
12	Kelapa	ton	90	90	71,45	●
13	Mete	ton	220	216	172,26	●
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan					
14	Jumlah promosi produk unggulan pertanian/perkebunan	kali	6	6	6	●
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian					
15	persentase kelompok tani menerapkan teknologi pertanian / perkebunan (intensifikasi dan mekanisme pertanian)	%	85	76	95	●

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2017	Status Capaian Target Akhir RPJMD
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan					
16	persentase tenaga penyuluh pertanian/perkebunan yang telah mengikuti diklat	%	100	100	100	●
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani					
17	Cakupan bina kelompok petani	%	88	80	90	●
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan					
	Populasi ternak					
18	Sapi potong	Ekor	267.290	228.822	231.045	●
19	Kambing	Ekor	146.189	135.056	132.082	●
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak					
20	Jumlah ternak yang terlayani pengobatan dan pencegahan penyakit	Ekor	13.000	9.000	5.100	▼
	Program Pemasaran Hasil Produksi Peternakan					
21	Jumlah promosi pemasaran hasil produksi peternakan unggulan	Kali	3	2	2	●
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriter					
22	Jumlah lokasi yang dilakukan pemeriksaan daging	Lokasi	30	26	4	▼
	Program Peningkatan Teknologi Peternakan					
23	Jumlah sarana dan prasarana teknologi peternakan	Unit	10	4	0	▼

Keterangan:

● : telah tercapai ▶ : akan tercapai ▼ : perlu perhatian/usaha keras

Dari 23 indikator pertanian, 18 indikator telah tercapai dan 5 indikator yang perlu perhatian/ penanganan serius.

2.2.3.4 Kehutanan

Berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan urusan kehutanan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sehingga target indikator dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 tidak dicantumkan.

2.2.3.5 Energi dan Sumber Daya Mineral

Selain urusan kehutanan, dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 juga menyebutkan bahwa kewenangan urusan energi dan sumberdaya mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sehingga target indikator dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 hanya 1 (satu) indikator yang dicantumkan yakni program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan, adapun target dan realisasi tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel II-84 berikut:

Tabel II-84
Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2017	Status Capaian Target Akhir RPJMD
	Program Pembinaan Dan PengawasanBidang Pertambangan					
1	Pertambangantanpa izin (PETI)	Lokasi	120	140	88	▶

Keterangan:
● : telah tercapai ▶ : akan tercapai ▼ : perlu perhatian/usaha keras

Dari 1 indikator energi dan sumber daya mineral 1 indikator akan tercapai.

2.2.3.6 Perdagangan

Penyelenggaraan urusan bidang perdagangan dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 mempunyai target indikator kinerja, adapun target dan realisasi tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel II-85 berikut:

Tabel II-85
Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Perdagangan dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2017	Status Capaian Target Akhir RPJMD
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan					
1	persentase cakupan pasar yang diawasi	%	100	100	100	●
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri					
2	Persentase pasar tradisional yang memenuhi syarat kenyamanan dan kesehatan	%	70	30	43,75	▶
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspo					
3	Nilai ekspor produk- produk asal Kabupaten Blora	$ US	2.942.679	2.827.576	2.932.952	●
	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan					
4	Jumlah cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	Orang	285	205	205	▶
5	Jumlah lokasi PKL yang tertata	Lokasi	12	9	9	▶

Keterangan:
● : telah tercapai ▶ : akan tercapai ▼ : perlu perhatian/usaha keras

Dari 5 indikator perdagangan, 2 indikator telah tercapai, 3 indikator akan tercapai.

2.2.3.7 Perindustrian

Penyelenggaraan urusan perindustrian dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 mempunyai 5 target indikator kinerja, adapun target dan realisasi tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel II-86 berikut:

Tabel II-86
Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Perindustrian dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2017	Status Capaian Target Akhir RPJMD
	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial					
1	Jumlah industri	Unit	11.850	11.770	11.801	●
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah					
2	Cakupan pelaku IKM yang mengikuti promo produk	perajin	18	6	15	●
3	Nilai produksi industri	ribu rupiah	1.349.112.551	1.246.371.460		
4	Cakupan jumlah kelompok pengrajin yang dibina	IKM	1.128	528	34	▼
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri					
5	Persentase industri yang telah menerapkan teknologi	%	50	35	30	▶

Keterangan:
● : telah tercapai ▶ : akan tercapai ▼ : perlu perhatian/usaha keras

Dari 4 indikator perindustrian, 2 indikator telah tercapai, 1 indikator akan tercapai.dan 1 indikator yang perlu perhatian/ penanganan serius.

2.2.3.8 Transmigrasi

Penyelenggaraan urusan bidang transmigrasi dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 mempunyai 1 target indikator kinerja, adapun target dan realisasi tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel II-87 berikut:

Tabel II-87
Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Transmigrasi dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2017	Status Capaian Target Akhir RPJMD
	Program Transmigrasi Regional					
1	Jumlah transmigran diberangkatkan	KK	20	10	1	▼

Keterangan:
● : telah tercapai ▶ : akan tercapai ▼ : perlu perhatian/usaha keras

2.2.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerinthan

2.2.4.1 Perencanaan Pembangunan

Penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 mempunyai 14 target indikator kinerja, adapun target dan realisasi tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel II-88 berikut:

Tabel II-88
Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Perencanaan Pembangunan dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2017	Status Capaian Target Akhir RPJMD
	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh					
1	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	%	100	100	100	●
	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar					
2	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	%	100	100	100	●

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2017	Status Capaian Target Akhir RPJMD
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah					
3	Persentase SKPD mampu menyusun dokumen perencanaan	%	100	100	100	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah					
4	Kesesuaian Progran RKPD dengan Program RPJMD	%	90	84	82,35	
5	Kesesuaian Program di KUA PPAS dengan Program di RKPD	%	98,5	94	100	
6	Kesesuaian Kegiatan di KUA PPAS dengan Kegiatan di RKPD	%	85	70	99,86	
7	Kesesuaian Program di APBD dengan Program di RKPD	%	97	92,5	96,57	
8	Kesesuaian Program di APBD dengan Program di RKPD	%	80	65	98,62	
9	Realisasi Kinerja RKPD	%	100	100	91,79	
10	Realisasi Indikator Kinerja RPJMD	%	92	89	80,90	
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi					
11	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Bidang Ekonomi dengan Pelaksanaan RPJMD	%	100	100	100	
	Program Perencanaan Sosial dan Budaya					
12	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Bidang sosial budaya dengan Pelaksanaan RPJMD	%	100	100	100	
	Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam					
13	Tingkat Kesesuaian Perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam dengan Pelaksanaan RPJMD	%	100	100	100	
	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK					

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2017	Status Capaian Target Akhir RPJMD
14	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penelitian dengan Roadmap	%	100	100	100	●

Keterangan:

● : telah tercapai ▶ : akan tercapai ▼ : perlu perhatian/usaha keras

Dari 14 indikator perencanaan pembangunan, 14 indikator telah tercapai.

2.2.4.2 Keuangan

Penyelenggaraan urusan keuangan dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 mempunyai 3 target indikator kinerja, adapun target dan realisasi tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel II-89 berikut:

Tabel II-89
Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Keuangan dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2017	Status Capaian Target Akhir RPJMD
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah					
1	persentase peningkatan PAD per tahun	%	12,76	12,09	11,31	●
2	Opini LKPD	Status	WTP	WTP	WTP*)	▶
3	Persentase tanah milik Pemkab yang terinventarisir	%	76,67	51,67	26,7	▼

Keterangan:

● : telah tercapai ▶ : akan tercapai ▼ : perlu perhatian/usaha keras

Dari 3 indikator keuangan, 1 indikator akan tercapai dan 1 indikator yang perlu perhatian/ penanganan serius dan indikator penilaian menunggu penilaian dari BPK.

2.2.4.3 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Penyelenggaraan urusan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 mempunyai 4 target indikator kinerja, adapun target dan realisasi tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel II-90 berikut:

Tabel II-90
Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2017	Status Capaian Target Akhir RPJMD
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur					
1	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional	Orang	220	255	230	●
2	Persentase pejabat yang sesuai dengan kompetensi	%	57,6	51,73	43,65	▶
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					
3	Persentase penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin dan proses izin perkawinan dan perceraian	%	100	100	100	●
4	Jumlah ASN yang Pindah Tugas dan Pensiun	Orang	500	600	702	●

Keterangan:
● : telah tercapai ▶ : akan tercapai ▼ : perlu perhatian/usaha keras

Dari 4 indikator kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, 3 indikator telah tercapai dan 1 indikator akan tercapai.

2.2.4.4 Penelitian dan Pengembangan

Penyelenggaraan urusan bidang penelitian dan pengembangan dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 mempunyai 1 target indikator kinerja, dan sudah tercapai target indikatornya, adapun target dan realisasi tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel II-91 berikut:

Tabel II-91
Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2017	Status Capaian Target Akhir RPJMD
	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK					
1	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penelitian dengan Roadmap	%	100	100	100	●

Keterangan:
● : telah tercapai ▶ : akan tercapai ▼ : perlu perhatian/usaha keras

2.2.4.5 Fungsi Penunjang Lainnya

Penyelenggaraan urusan fungsi penunjang lainnya dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 mempunyai 65 target indikator kinerja, yang dilaksanakan di beberapa organisasi perangkat daerah di lingkungan sekretariat daerah dan kecamatan adapun target dan realisasi tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel II-92 berikut:

Tabel II-92
Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Fungsi Penunjang Lainnya dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target akhir RPJMD 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2017	Status Capaian Target Akhir RPJMD
	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan					
1	Nilai Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	nilai	B	B	CC	▶
	Program Optimalisasi Pemanfaaatan Teknologi Informasi					
2	Persentase organisasi perangkat daerah dengan skor nilai	%	90	100	50	▶

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2017	Status Capaian Target Akhir RPJMD
	pelayanan publik “Baik“					
	Program Ketatalaksanaan Perangkat Daerah					
3	persentase organisasi perangkat daerah yang menyusun SOP, SPP dan IKM "baik"	%	100	100	50	▼
	Program Kelembagaan Perangkat Daerah					
4	Jumlah organisasi perangkat daerah yang dievaluasi struktur dan uraian tugas	PD	24	24	24	●
	Program Pendayagunaan Aparatur Daerah					
5	persentase aparat sipil negara yang mendapatkan pelatihan peningkatan kinerja	%	90	50	50	▶
	Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat					
6	Koordinasi bidang kesehatan , tenaga kerja , transmigrasi serta kesejahteraan	kali	50	50	45	●
7	Koordinasi & pemantauan di bidang pemuda , olahraga , pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	kali	50	50	45	●
8	Koordinasi dan pemantaauan di bidang pendidikan perpustakaan, kebudayaan urusan agama	kali	50	50	45	●
9	Jumlah fasilitasi kegiatan keagamaan masyarakat	Keg.	246	246	150	▶
10	Pembangunan tempat ibadah	unit	-	1	-	▼
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
11	Tersusunya dokumen rencana kerja Setda Kab.Blora	Doku-men	1	1	1	●
	Program Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan					
12	Persentase jumlah pengadaan barang/ jasa pemerintah yang dilaksanakan melalui ULP	%	100	100	100	●
13	Persentase kegiatan fisik yang	%	65	55	80	●

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2016-2021	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2017	Status Capaian Target Akhir RPJMD
	dilakukan monev pembangunan					
14	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang mengikuti fasilitasi sertifikasi/lulus sertifikasi ketrampilan.	orang	60	60	30	▼
15	Persentase jumlah SKPD yang mengumumkan seluruh paket Pengadaan Barang/ jasa pemerintah yang diumumkan pada SiRUP	%	95	75	90	●
16	Persentase Jumlah SKPD yang melaporkan TEPRA melalui Sismontepra	%	95	70	90	●
	Program Penataan Peraturan Per-uu-an					
17	Tersusunnya Ranperda	ranc perda	3	3	5	●
18	Tersusunnya Peraturan Bupati	perbup	6	6	15	●
	Program Koordinasi Bidang Pemerintahan Desa					
19	Terlaksananya Sosialisasi Kepada Aparatur Pemerintah desa	kali	2	2	5	●
20	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan mengenai PEMDES	kali	2	2	2	●
21	Tersusunnya Dokumen Inventarisasi	dok	20	20	15	▶
22	Terlaksananya Monev APBDesa	Kali	16	16	16	●
23	Terselenggaranya Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen	Paket	1	1	1	●

Keterangan:

● : telah tercapai ▶ : akan tercapai ▼ : perlu perhatian/usaha keras

Dari 24 indikator Target dan Status Capaian Kinerja Urusan Fungsi Penunjang Lainnya dalam RKPD Tahun 2017 terhadap Target akhir RPJMD 2016-2021, 15 indikator telah tercapai dan 5 indikator akan tercapai, dan 3 indikator perlu mendapat perhatian/penanganan serius.

2.3 Permasalahan Pembangunan di Kabupaten Blora

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Blora yang menjadi isu strategis pembangunan Kabupaten Blora Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Belum Optimal.

   Ini terlihat dari nilai SAKIP pemerintah Kabupaten Blora sebesar 57,17 (CC). LAKIP Perangkat Daerah yang bernilai "baik" baru 6 dari 44 OPD. Perangkat Daerah yang menyusun SOP, SPP dan IKM terkategori "baik" baru mencapai 50%. Juga prosentase tanah milik pemkab yang terinventarisir sampai dengan sekarang baru mencapai 30%.

2. Belum Optimalnya Investasi Ekonomi.

   Saat ini masih banyak indikator ekonomi yang belum memenuhi target, seperti jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA), produksi kedelai yang hanya 1.819 ton masih di bawah target sebesar 10.860 ton dan jumlah obyek wisata unggulan baru tercapai 13 dari target 22 pbyek wisata. Cakupan jumlah kelompok pengrajin yang dibina baru sejumlah 34 IKM dari target sebesar 528 IKM.

3. Belum Memadainya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur.

   Kualitas dan kuantitas infrastruktur ini dapat dilihat dari proporsi panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2017 sebesar 46,4%, prosentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik 76,8%. Capaian prosentase pengurangan sampah di perkotaan baru pada kisaran 50% dari target tahun 2017 sebesar 74,62%.

4. Angka Kemiskinan yang Relatif Tinggi.

   Dalam kurun waktu tahun 2013-2017 terjadi penurunan presentase penduduk miskin walaupun tidak signifikan. Pada Tahun 2013 presentase penduduk miskin masih di angka 14,64 persen, dan turun menjadi 13,04 persen pada tahun 2017. Jika dilihat dari jumlah penduduk miskin di Kabupaten Blora pada tahun 2013 sebanyak 123.800 jiwa, berkurang menjadi 111.880 jiwa pada tahun 2017. Namun demikian, pencapaian ini dalam skala provinsi masih di urutan 21 dari 35 Kab/Kota. Ini bisa terlihat dari masih kecilnya capaian penurunan rumah tidak layak huni sebesar 85 dari target capaian 2017 sebesar 700 RTLH tertangani. Demikian juga di rendahnya Cakupan Masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan yang baru tercapai 22% dari target 100%.

5. Pemerataan dan Mutu Pendidikan Masih Rendah.

Pemerataan pendidikan terlihat dari rata-rata lama sekolah Kabupaten Blora pada tahun 2017 tercatat 6.18, hal ini berarti masyarakat Kabupaten Blora rata-rata menempuh pendidikan selama 6 tahun saja. Persentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Terakreditasi dengan target 37,11% baru tercapai 2,68%. Angka Putus SekolahSMP/MTs masih sangat tinggi dari target 0,2% capaian akhir 2017 masih di kisaran 0,3%

6. Derajat Kesehatan Masyarakat Belum Optimal.

   Derajat kesehatan di Kabupaten Blora terlihat dari : Kasus kematian ibu tahun 2017 sebanyak 15 kasus, AKB sebesar 14,07 per 1.000 KH, capaian AKBa sebesar 15,7 per 1000 KH dari target 14,7 per 1000 KH, dan capaian Balita Gizi Kurang baru sebesar 3,86% dari target 2,8%.

7. Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

   Pada Tahun 2019 akan dilaksanakan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden, merupakan ajang pesta demokrasi yang perlu disukseskan bersama.

Adapun permasalahan pembangunan di Kabupaten Blora sesuai capaian indikator Pembangunan Tahun 2017 terhadap capaian akhir RPJMD Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

A. Urusan Pendidikan

- Masih rendahnya Lembaga PAUD yang terakreditasi.
- Masih tingginya angka putus sekolah jenjang SMP/MTs.
- Masih banyaknya anak lulusan SMP/MTs yang tidak mengikuti jenjang kesetaraan SMA

B. Urusan Kesehatan

- Masih adanya kasus kematian ibu, bayi dan anak.
- Masih adanya balita dengan status gizi kurang.
- Masih rendahnya cakupan pelayanan kesehatan masyarakat
- miskin.
- Belum semua Puskesmas terakreditasi versi baru.
- Kurangnya dokter umum di Puskesmas.
- Masih tingginya angka kesakitan dan angka kematian DBD.
- Kurangnya pengetahuan dan kesadaran wanita terhadap deteksi
- dini kanker.
- Masih adanya kasus gizi buruk, gizi kurang, anemia ibu hamil.
- Masih tinginya kasus kematian di Rumah Sakit.

- Kurangnya capaian Akreditasi Rumah Sakit versi KARS di Rumah Sakit Blora dan Cepu.

D. Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

- Masih adanya kawasan kumuh perkotaan
- Masih banyaknya RTLH
- Kurang Tersedianya informasi mengenai RDTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital

E. Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- Masih rendahnya cakupan penegakan Perda
- Masih kurangnya jumlah tokoh masyarakat yang memahami peningkatan toleransi kerukunan antar umat beragama, nilai sosial, dan solidaritas nilai-nilai luhur budaya.

F. Urusan Tenaga Kerja

- Masih rendahnya persentase pencari kerja yang ditempatkan

G. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Masyarakat

- Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan
- Masih kurangnya jumlah kelompok anak, termasuk forum anak di desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten
- Masih kurangnya desa prima yang terbentuk

H. Urusan Pangan

- Masih rendahnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
- Masih kurangnya penanganan desa rentan pangan

I. Urusan Pertanahan

- Masih kurangnya ketersediaan tanah untuk keperluan Pemerintah Daerah
- Masih kurangnya dokumen rupa bumi yang tersusun

J. Urusan Lingkungan Hidup

- Masih kurangnya pemantauan uji kualitas udara dan limbah cair

K. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Masih kurangnya jumlah usaha ekonomi produktif perempuan yang terlatih
- Masih kurangnya posyantek aktif

L. Urusan Pengendalian Penduduk dan KB

- Masih tingginya cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun

M. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

- Masih rendahnya prosentase koperasi aktif

N. Urusan Penanaman Modal

- Masih rendahnya investor yang menanamkan modal
- Masih kurangnya informasi mengenai peluang usaha sector/bidang usaha unggulan.
- Masih kurangnya kegiatan promosi peluang penanaman modal provinsi
- Masih kurangmya promosi peluang penanaman modal kabupaten

O. Urusan Kearsipan

- Masih kurangnya jumlah arsip non tekstual yang terolah dengan baik
- Masih kurangnya jumlah arsip/dokumen yang telah di duplikatkan

P. Urusan Kebudayaan

- Masih rendahnya cakupan fasilitas seni

Q. Urusan Kelautan dan Perikanan

- Masih rendahnya produksi perikanan budidaya dan perikanan air tangkap
- Masih rendahnya tingkat cakupan bina kelompok pembudidayaan ikan

R. Urusan Pariwisata

- Masih kurangnya jumlah obyek wisata unggulan

S. Urusan Pertanian

- Masih rendahnya produksi kedelai dan tembakau

T. Urusan Peternakan

- Masih kurangnya jumlah ternak yang terlayani pengobatan dan pencegahan penyakit
- Masih kurangnya jumlah lokasi yang dilakukan pemeriksaan daging dan jumlah sarana dan prasarana teknologi peternakan

U. Urusan Perindustrian

- Masih rendahnya cakupan jumlah kelompok pengrajin yang dibina

V. Urusan Transmigrasi

- Masih kurangnya jumlah transmigrasi yang diberangkatkan

W. Urusan Penunjang lainnya

- Masih rendahnya persentase tanah milik Pemkab ynag terinventarisasi .
- Masih rendahnya OPD dengan skor nilai pelayanan public "baik"
- Masih rendahnya OPD yang menyusun SOP, SPP, dan IKM "baik"

Selanjutnya capaian kinerja dan penyerapan anggaran atas kegiatan-kegiatan sesuai dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Kabupaten Blora baik kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas daerah (Prioritas I) maupun kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas urusan SKPD (Prioritas II) Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel II-93 berikut:

Tabel II-93
Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Berdasarkan Urusan Pemerintahan dalam RKPD Tahun 2017

No	Urusan Pemerintahan	Capaian Urusan Pemerintahan		SKPD Pengampu Urusan Pemerintahan	Capaian Belanja Non Urusan	
		Kinerja (%)	Keuangan (Rp)		Kinerja (%)	Keuangan (Rp)
A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR						
1.	PENDIDIKAN	89,80	39.847.462.798	DINAS PENDIDIKAN	96,76	13.604.812.890
2.	KESEHATAN	91,95	189.882.690.715		98,47	25.341.489.171
		88,00	94.821.847.250	DINAS KESEHATAN	95,00	4.463.115.448
		94,06	60.796.407.979	RSUD BLORA	99,24	20.855.873.723
		99,60	34.264.435.486	RSUD CEPU	100,00	22.500.000
3.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	99,42	177.439.633.890	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	83,00	1.265.379.450
4.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	97,00	49.290.786.391	DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	95,00	6.402.151.759
5.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	56,46	7.160.077.600		32,02	4.525.681.902
		100,00	2.352.946.600	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	97,62	654.937.259
		98,32	4.807.131.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	96,88	1.920.647.100
6.	SOSIAL	39,74	1.171.186.970		36,70	1.950.097.543
		95,00	1.035.528.800	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN	94,00	814.044.383

No	Urusan Pemerintahan	Capaian Urusan Pemerintahan		SKPD Pengampu Urusan Pemerintahan	Capaian Belanja Non Urusan	
		Kinerja (%)	Keuangan (Rp)		Kinerja (%)	Keuangan (Rp)
				PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
		66,00	135.658.170	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	66,00	1.136.053.160
Total A		**94,73**	**464.791.838.364**		**88,07**	**53.089.612.715**
B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR						
1.	TENAGA KERJA	100,00	1.385.871.400	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	-	-
2.	PERBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	92,00	1.026.001.500	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-
3.	PANGAN	99,93	988.594.047	`	98,52	10.114.057.835
4.	PERTANAHAN	-	-		-	-
5.	LINGKUNGAN HIDUP	92,04	5.445.328.330	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	93,62	2.644.329.790
6.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	87,28	3.028.514.157	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL	98,79	1.802.037.695
7.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	94,00	3.193.360.464	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	96,00	1.122.825.915
8.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	95,90	4.067.267.030	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	95,29	877.376.940
9.	PERHUBUNGAN	92,00	19.632.652.783	DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	-	-
10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	99,00	2.316.307.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	98,00	1.404.856.672
11.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	58,32	573.902.832	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	99,04	4.316.974.831
12.	PENANAMAN MODAL	97,00	1.258.536.682	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU	96,00	1.330.804.847
13.	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	100,00	4.009.994.350	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	82,08	3.488.322.632
14.	STATISIK	100,00	98.701.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
15.	PERSANDIAN	100,00	17.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
16.	KEBUDAYAAN	100,00	1.283.869.500	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	-	-
17.	PERPUSTAKAAN	94,00	1.028.570.600	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	93,00	1.200.540.400

No	Urusan Pemerintahan	Capaian Urusan Pemerintahan		SKPD Pengampu Urusan Pemerintahan	Capaian Belanja Non Urusan	
		Kinerja (%)	Keuangan (Rp)		Kinerja (%)	Keuangan (Rp)
18.	KEARSIPAN	98,00	378.841.400	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	-	-
Total B		**88,86**	**49.733.313.075**		**52,80**	**28.302.127.557**
C.	URUSAN PILIHAN					
1.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	97,00	2.895.878.900	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	96,00	1.230.405.509
2.	PARIWISATA	93,57	2.241.024.480	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	-	-
3.	PERTANIAN	95,41	14.882.280.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	-	-
4.	PERDAGANGAN	98,79	29.099.814.639	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	-
5.	PERINDUSTRIAN	100,00	831.012.700	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	90,00	893.605.436
6.	TRANSMIGRASI	100,00	53.869.129	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	-	-
	Total C	**97,46**	**50.003.879.848**		**31,00**	**2.124.010.945**
D.	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
1.	PERENCANAAN	93,77	4.511.134.073	BAPPEDA	92,27	1.102.560.906
2.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	100,00	680.035.254	BAPPEDA	-	-
3.	KEUANGAN	94,00	9.558.398.429	BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	97,00	2.567.199.489
4.	KEPEGAWAIAN	96,65	3.427.467.202	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	88,48	1.344.118.216
5.	PENGAWASAN	100,00	3.454.238.175	INSPEKTORAT	100,00	803.930.966
6.	ADMINSTRASI PEMERINTAHAN	100,00	50.396.887.834	ADMINSTRASI PEMERINTAHAN	100,00	23.865.711.392
		99,72	942.737.200	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SETDA	95,45	361.503.478
		93,83	1.264.142.052	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	96,80	265.498.948
		98,00	3.495.357.075	BAGIAN UMUM SETDA	99,00	7.269.150.648
		98,00	951.639.475	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	97,00	239.640.000
		90,35	1.016.417.924	BAGIAN ORGANISASI TATALAKSANA SETDA	94,18	176.588.618
		91,46	465.179.000	BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA	92,91	249.367.300
		71,27	4.536.966.750	BAGIAN KESEJAHTERAAN	71,18	174.879.350

No	Urusan Pemerintahan	Capaian Urusan Pemerintahan		SKPD Pengampu Urusan Pemerintahan	Capaian Belanja Non Urusan	
		Kinerja (%)	Keuangan (Rp)		Kinerja (%)	Keuangan (Rp)
				RAKYAT SETDA		
		67,00	646.097.650	BAGIAN PEMERINTAHAN DESA SETDA	90,00	214.864.850
		73,18	664.435.925	BAGIAN HUKUM SETDA	85,62	177.429.250
		96,62	17.867.558.958	SEKRETARIAT DEWAN	95,68	3.576.604.447
7	PEMERINTAHAN UMUM	96,00	2.699.363.284	KEC. BLORA	97,00	2.052.583.216
		98,00	2.233.415.200	KEC. JATI	95,00	332.711.300
		99,51	674.584.000	KEC. TODANAN	97,34	349.815.500
		99,88	798.838.300	KEC. KEDUNGTUBAN	100,00	235.402.000
		97,77	617.225.884	KEC JEPON	98,12	717.062.500
		95,31	1.438.915.497	KEC SAMBONG	99,86	1.854.796.000
		97,83	1.384.326.000	KEC. BOGOREJO	87,62	177.889.000
		96,00	1.478.233.309	KEC. CEPU	98,00	585.178.198
		98,31	636.865.400	KEC. KUNDURAN	22,96	450.593.200
		99,93	1.548.421.560	KEC. NGAWEN	59,00	1.617.566.219
		97,20	1.922.380.291	KEC. BANJAREJO	99,36	893.610.800
		99,51	731.264.000	KEC. JAPAH	97,34	177.832.400
		99,60	934.346.400	KEC. RANDUBLATUNG	99,30	971.263.600
		79,90	90.120.000	KEC. JIKEN	90,75	352.232.920
		97,00	669.824.300	KEC. TUNJUNGAN	98,97	197.074.700
		90,87	688.232.400	KEC. KRADENAN	83,27	194.572.950
Total D		**97,40**	**72.028.160.967**		**79,63**	**29.683.520.969**
TOTAL CAPAIAN A+B+C+D		94,52	636.557.192.254		75,97	113.199.272.186
TOTAL ANGGARAN URUSAN DAN NON URUSAN		91,71	749.756.464.440			

BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya manusia berkualitas, pelayanan dasar yang makin luas, infrastruktur yang makin berkualitas dan kondisivitas wilayah yang makin mantap serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 bertepatan dengan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021. Dalam konteks ini, Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Blora tahun 2019 yaitu "Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif akuntabel dan bebas KKN di dukung pengembangan ekonomi ekonomi lokal dan pemerataan infrastruktur wilayah".

Pembangunan ekonomi (*economic development*) merupakan bagian terpenting dari pembangunan daerah secara keseluruhan. Pembangunan ekonomi daerah berorientasi pada aspek perubahan struktur ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat. Pertumbuhan dicerminkan oleh adanya perubahan pendapatan masyarakat sedangkan pemerataan ditandai dengan adanya perubahan struktur ekonomi daerah.

3.1.1 Kondisi Perekonomian Daerah

3.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi Kabupaten Blora diperkirakan tidak jauh berbeda dengan prediksi angka nasional maupun regional, karena merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan saling mempengaruhi.

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan akumulasi dari pertumbuhan sektor-sektor ekonomi. Adapun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora, Jawa Tengah dan Nasional kurun waktu tahun 2012-2017 dapat dilihat sebagaimana dalam Tabel III-1 berikut:

Tabel III-1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blora Tahun 2012-2016

Tahun	Kab. Blora (%)	Provinsi Jawa Tengah (%)	Nasional (%)
2012	4,90		
2013	5,36	5,14	5,7
2014	4,39	5,42	5,1
2015	5,36	5,44	5,4
2016	5,03*	5,06	5,2

Sumber : BPS Kabupaten Blora

**) Angka Prediksi*

3.1.1.2 Produk Domestik Regional Bruto

Perkembangan PDRB menunjukkan geliat ekonomi Pada Tahun 2016 PDRB Kabupaten Blora Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) adalah sebesar Rp17,9 triliun dan meningkat menjadi sebesar Rp18,3 triliun pada tahun 2017. Sedangkan berdasarkan ADHK 2010 terjadi peningkatan juga, dimana pada tahun 2016 sebesar Rp13,4 triliun menjadi sebesar Rp. 13,6 triliun pada tahun 2017.

Tabel III-2
Perkembangan PDRB Kabupaten Blora Tahun 2012-2017

Tahun	PDRB adhb	PDRB adhk	
	Nilai (Rp. Juta)	Nilai (Rp. Juta)	(%)
2012	12.285.562,55	11.116.865,90	4,90
2013	13.543.661,54	11.712.504,85	5,36
2014	15.101.975,26	12.227.201,29	4,39
2015	16.368.347,06	12.882.587,70	5,36
2016*)	19.964.349,71	15.913.432,06	23,53
2017*)	18.315.748.28**	13.679.816.08**	5,03**

Sumber : PDRB Kab.Blora Th.2017

**) angka prediksi*

Tabel III-3
Perkembangan Distribusi Jenis Lapangan Usaha terhadap PDRB adhb Kabupaten Blora Tahun 2012-2017

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	29,65	29,92	27,22	25,56	25,80	24,80
2.	Pertambangan dan Penggalian	14,12	13,80	14,64	14,68	14,77	23,19
3.	Industri Pengolahan	10,15	10,27	11,41	11,53	11,78	9,62
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
5.	Pengaan Air, Pengelolaan Sampah, Limba dan Daur Ulang	0,05	0,04	0,05	0,05	0,05	0,04
6.	Konstruksi	4,16	4,12	4,32	4,44	4,53	3,99
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,13	16,88	16,70	17,03	17,10	14,96
8.	Transportasi dan Pergudangan	2,58	2,60	2,76	2,76	2,77	2,56
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,43	3,30	3,43	3,43	3,52	3,22
10.	Informasi dan Komunikasi	1,17	1,13	1,10	1,11	1,12	0,96
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,21	3,20	3,23	3,20	3,19	3,02
12.	Real Estate	1,33	1,32	1,37	1,39	1,40	1,23
13.	Jasa Perusahaan	0,27	0,29	0,30	0,29	0,30	0,26
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,99	3,89	3,81	3,77	3,70	3,42
15.	Jasa Pendidikan	5,80	6,18	6,45	6,50	6,58	5,77
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,89	0,90	0,96	0,98	0,98	0,87
17.	Jasa Lainnya	2,01	2,07	2,19	2,23	2,26	2,00
	Total	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: BPS Kabupaten Blora Tahun 2017

**)angka prediksi*

3.1.1.3 Laju Inflasi

Inflasi merupakan gambaran kenaikan harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat. Inflasi saat ini menjadi salah satu indikator yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah untuk mengendalikan stabilitas harga.

Inflasi di Kabupaten Blora mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun, dimana inflasi di tahun 2016 sebesar 3,26 % dan menurun pada tahun 2017 sebesar 2,4 % dan bilamana dibandingkan dengan inflasi kota Semarang sebesar 2,36% dan nasional sebesar 3,03 % inflasi di Kabupaten Blora masih dikategorikan paling rendah.

Tabel III-4
Inflasi Kabupaten Blora, Semarang dan Nasional Tahun 2012-2016

Tahun	Blora	Semarang	Nasional
2012	3,89	4,85	4,30
2013	7,94	8,19	8,38
2014	7,13	8,53	8,36
2015	2,85	3,06	3,35
2016	3,26	3,87	4,09
2017*)	3,34	2,36	3,02

Sumber: BPS Kabupaten Blora Tahun 2017

**)angka prediksi*

Inflasi memiliki arti penting yaitu inflasi yang ringan memiliki dampak yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian yang lebih baik yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan mendorong masyarakat bergairah untuk bekerja serta mengadakan investasi. Sebaliknya jika laju inflasi yang sangat parah dan tak terkendali akan menyebabkan keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian yang dirasakan lesu, masyarakat tidak bergairah untuk bekerja, berinvestasi dan berproduksi karena harga meningkat dengan cepat.

3.1.1.4 Kesenjangan/Ketimpangan Wilayah

Kesenjangan/Ketimpangan wilayah merupakan hal yang sering kita temui dalam proses pembangunan wilayah. Untuk Kabupaten Blora kesenjangan/ketimpangan wilayah semakin tahun semakin menurun, dimana hal ini dikarenakan tindakan-tindakan yang nyata seperti pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah yang relatif tertinggal. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dimana indeks williamson pada tahun 2012 sebesar 0,436 dan ditahun 2017 hanya sebesar 0,39. Hal ini menunjukan bahwa pemerataan pembangunan diwilayah Kabupaten Blora telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blora secara merata.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019

Kondisi perekonomian Kabupaten Blora tahun 2019 diperkirakan akan dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global, hal tersebut dilihat dari melemahnya harga komoditas ekspor, prospek ekonomi dan kebijakan ekonomi moneter negara-negara maju serta ketidak pastian kondisi pasar keuangan global yang berdampak kepada melemahnya nilai tukar rupiah.

Tantangan yang harus dihadapi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor internal dan eksternal tersebut belum sepenuhnya mendukung kinerja perekonomian Kabupaten Blora secara optimal. Faktor internal antara lain masih belum optimalnya Sumber Daya Manusia dan produk daerah untuk mampu bersaing ditingkat global atau internasional maupun dalam negeri, baik dari sisi ketrampilan maupun kualitas produk dan pemasaran. Faktor eksternal salah satunya adalah adanya kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economics Community yang merupakan kebijakan ekonomi global di ASEAN dan kebijakan terkait kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik serta regulasi paket kebijakan ekonomi dari pemerintah pusat.

MEA tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional, seperti dokter, pengacara, akuntan dan lainnya. Oleh karena itu MEA secara langsung akan mempengaruhi kualitas tenaga ahli di Indonesia. Dengan demikian masyarakat Indonesia, termasuk Kabupaten Blora harus mempersiapkan diri untuk dapat bersaing dengan tenaga kerja asing, baik dari sisi keahlian, kemampuan bahasa maupun mental dalam menghadapi persaingan.

Tahapan bisnis e-commerce Indonesia saat ini masih sebatas ruang perkenalan sehingga belum memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi. Selain masih rendahnya daya beli masyarakat yang rentan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok dan belum terciptanya iklim yang kondusif bagi kinerja sektor riil dan investasi perlu dihadapi dengan strategi penanggulangan kemiskinan, pengendalian inflasi daerah dan peningkatan pelayanan publik, penciptaan iklim kondusif, peningkatan sarana prasarana yang mendukung investasi.

Kondisi ini perlu didukung pula dengan regulasi dan pemenuhan sarana prasarana pendukung dengan tetap berbasis pada potensi unggulan daerah dan optimalisasi Sumber Daya Alam yang berkelanjutan. Diperlukan upaya-upaya riil pemerintah daerah dan masyarakat dalam peningkatan kualitas produk, pemasaran produk akhir, kemasan produk maupun hak paten terhadap produk yang merupakan produk unggulan daerah Kabupaten Blora.

Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan masih harus menjadi fokus perhatian utama pada tahun 2019. Tahun 2015 angka kemiskinan masih mencapai 14,20 % dan tentunya diharapkan ditahun 2019 turun mencapai 11,02%-11,07 %.

Upaya menekan angka kemiskinan perlu dibarengi dengan upaya penurunan angka pengangguran. Oleh karena itu, peningkatan investasi daerah yang menyerap banyak tenaga kerja perlu terus

dikembangkan guna mempercepat penurunan tingkat pengangguran. Disamping itu juga perlu dilakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pemerataan kualitas pendidikan serta pemberian ketrampilan bagi anak didik maupun masyarakat miskin atau masyarakat pada daerah perbatasan serta jaminan pelayanan kesehatan diseluruh wilayah Kabupaten Blora. Kemudahan akan akses terhadap kebutuhan pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin dan daerah perbatasan perlu terus ditingkatkan.

Pembangunan infrastruktur masih terus harus dipacu dalam rangka pemerataan pembangunan, peningkatan akses masyarakat, terutama masyarakat miskin dan masyarakat perbatasan terhadap infrastruktur yang mendukung terwujudnya kedaulatan pangan di Kabupaten Blora. Dengan peningkatan pembangunan infrastruktur diharapkan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dapat segera diatasi dan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai sesuai target. Pembangunan infrastruktur ini tetap dilaksanakan dengan memperhatikan keberlanjutan Sumber Daya Alam dan lingkungan.

Kabupaten Blora memiliki potensi dan daya tarik yang besar untuk pengembangan aktivitas perekonomian masyarakat. Berkembangnya berbagai fasilitas berbagai usaha perekonomian perlu dikaji dan ditata kembali regulasi, sarana dan prasarana infrastruktur publik, kelayakan terhadap sumberdaya alam dan lingkungan serta terhadap kesinambungan aktivitas perekonomian itu sendiri. Hal ini sangat penting agar perkembangan dan pertumbuhan wilayah tidak menimbulkan permasalahan dan biaya sosial yang tinggi dan juga kondisi yang kontra produktif. Dari tantangan yang dihadapi dan asumsi-asumsi tersebut serta dengan mempertimbangkan kemungkinan pertumbuhan sektor riil pada tahun-tahun sebelumnya, maka secara umum proyeksi indikator makro ekonomi daerah dapat digambarkan sebagaimana Tabel III-5 berikut:

Tabel III-5
Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Blora Tahun 2012 - 2017

URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,03	4,98	5,02	4,30	5,17	5,4
Inflasi (%)	3,84	7,94	7,13	6,12	5-6	3-7
PDRB adhb perkapita (Rp. Juta)	14,66	16,08	17,75	19,35	22,42	22,42
Indeks Ketimpangan Pendapatan	0,38	0,41	0,42	0,25	0,42	0,39
Indeks Ketimpangan Wilayah	0,447	0,458	0,483	0,499	0,488	0,400
Indeks Pembangunan Manusia	71,49	71,91	72,10	73,50	73,95	67,84
Jumlah Penduduk miskin (%)	15,10	14,98	14,46	14,20	13,60	13,60
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,88	6,25	4,30	4,25	4,15	3,6
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	74,26	75,50	68,50	90,00	93,5	93,5

Sumber: BPS Kabupaten Blora Tahun 2017

**)angka prediksi*

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 yang merupakan perkiraan yang terukur secara nasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Kabupaten Blora sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan Pendapatan Daerah dari sektor pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan.

Perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Blora sesuai realisasi pendapatan dan proyeksi pendapatan tahun 2016-2020 sesuai dengan Tabel III. 6 diproyeksikan mengalami peningkatan, namun tidak terlalu signifikan. PAD diproyeksikan tumbuh, terutama dipengaruhi oleh peningkatan pajak daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dana perimbangan diproyeksikan meningkat dipengaruhi oleh peningkatan DAU, dan DAK dan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak. Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak ini sangat dipengaruhi oleh perolehan pajak dan fluktuasi harga minyak. Tentunya perlu ada upaya dari perangkat daerah teknis dalam peningkatan perolehan DAK. Sementara itu peningkatan Lain-lain Pendapatan Daerah diproyeksikan meningkat terutama berasal dari peningkatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dari Propinsi dan Pemerintah; Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; dan Bantuan Keuangan Propinsi dan Pemerintah Daerah.

Peningkatan pendapatan ini dihitung menggunakan asumsi sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan memperhatikan kinerja realisasi PAD dan perilaku dari potensi masing-masing objek pajak dan objek retribusi daerah, kinerja, dan rencana bisnis BUMD dan BLUD serta trend pendapatan PAD lainnya.
2. Dana perimbangan disusun dengan asumsi terjadi perubahan kebijakan yang mendasar atas pengalokasian dana transfer dari pemerintah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, DAU dan DAK yang diperoleh dari hasil prioritas Nasional.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah disusun dengan menyesuaikan kebijakan pemerintah, utamanya terkait dengan kebijakan hibah dari pemerintah, dana penyesuaian/Dana Insentif Daerah serta kebijakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Adapun arah kebijakan dalam peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Blora yang masih terus dilaksanakan adalah:

a. Inventarisasi dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui : (i) perbaikan sistem dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah, (ii) penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
b. memperbaiki tarif pajak dan retribusi daerah dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan perbaikan pelayanan kepada masyarakat; seperti Perda no. 5/2015 tentang pajak daerah, perda 9/2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;
c. peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan perijinan dan investasi melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP);
d. optimalisasi pengelolaan BUMD dalam rangka peningkatan deviden atas laba yang dicapai dengan penyertaan modal;
e. peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur pendapatan;
f. pengembangan fasilitas, sarana dan prasarana untuk meningkatkan investasi dan sumber-sumber pendapatan baru;
g. evaluasi dan reformulasi berbagai regulasi kebijakan daerah yang berpotensi menghambat efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah;

h. melakukan pendekatan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola sumber daya alam di Kabapaten Blora untuk membantu peningkatan PAD diluar dana bagi hasil yang telah didistribusikan oleh Pemerintah Pusat;

i. Melakukan pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah bekerjasama dengan pihak ketiga, sehingga dapat diketahui potensi riil dalam penggalian PAD.

j. Intensifikasi dan ektensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan;

k. Peningkatan kualitas pelayanan pajak/reribusi melalui pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) dan sarana prasarana, pengembangan basis data dan potensi pajak dan retribusi daerah; Peningkatan kapasitas SDM aparatur pengelola pajak dan retribusi daerah;

l. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah;

m. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk mendorong peningkatan pendapatan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan bantuan keuangan provinsi.

Tabel III-6
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2016-2020

No.	Uraian	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Blora Tahun 2016-2020				
		Realisasi APBD Tahun Anggaran 2016	Realisasi APBD Tahun Anggaran 2017	APBD Tahun 2018	Proyeksi APBD Tahun Anggaran 2019	Proyeksi APBD Tahun Anggaran 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	**PENDAPATAN**					
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**171.277.522.706**	**299.108.689.557**	**191.752.934.000**	**195.000.000.000**	**248.389.374.000**
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	41.046.674.606	48.449.891.239	46.873.000.000	52.846.000.000	53.240.000.000
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	9.778.925.650	8.480.950.279	11.014.803.000	9.902.000.000	15.270.977.000
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8.105.618.518	21.582.775.295	13.978.000.000	13.100.000.000	12.022.772.000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah	112.346.303.932	220.595.072.744	119.887.131.000	119.152.000.000	167.855.625.000
1.2	**Dana Perimbangan**	**1.332.969.941.558**	**1.294.567.607.691**	**1.380.931.930.000**	**1.824.373.299.558**	**1.352.358.760.000**
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	77.523.014.477	65.198.494.213	115.199.448.000	113.500.000.000	112.648.902.000
1.2.2	Dana bagi hasil Sumber Daya Alam	33.327.730.081	26.129.088.163	-	926.754.000.000	
1.2.3	Dana Alokasi Umum	943.325.498.000	926.754.302.000	926.754.302.000	784.119.299.558	1.105.622.778.000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	277.435.119.000	276.485.723.315	338.978.180.000	**195.000.000.000**	134.087.080.000
1.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**1.358.580.000**	**-**	**-**	**853.289.990.677**	
1.3.3	Pendapatan Hibah	353.940.451.973	315.680.892.145	447.814.775.677	82.490.294.677	676.831.769.000
1.3.4	Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dari Propinsi dan Pemerintah	353.377.298	569.802.156	82.490.294.677	100.000.000.000	133.025.104.000

No.	Uraian	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Blora Tahun 2016-2020				
		Realisasi APBD Tahun Anggaran 2016	**Realisasi APBD Tahun Anggaran 2017**	**APBD Tahun 2018**	**Proyeksi APBD Tahun Anggaran 2019**	**Proyeksi APBD Tahun Anggaran 2020**
1.3.5	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		7.500.000.000	26.250.000.000	0	287.288.163.000
1.3.6	Bantuan Keuangan Propinsi dan Pemerintah Daerah	86.019.445.675	68.401.405.932	-	441.725.215.000	88.645.173.000
1.3.7	Bagi Hasil Retribusi dan Pendapatan Lainnya dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	99.694.300.000	25.107.660.057	110.000.000.000	-	
1.3.8	Dana Desa	167.873.329.000	214.102.024.000	229.074.481.000	229.074.481.000	167.873.329.000
	Jumlah Pendapatan	**1.858.187.916.237**	**1.909.357.189.393**	**2.020.499.639.677**	**2.872.663.290.235**	**2.277.579.903.000**

Sumber : BPPKAD Kabupaten Blora dan RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan wajib terdiri dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta urusan pemerintahan pilihan. Selain itu, juga dialokasikan untuk membiayai Urusan Pemerintahan Penunjang.

Belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar urusan pemerintahan pilihan dan urusan penunjang pemerintahan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

1. pendidikan,
2. kesehatan,
3. pekerjaan umum dan penataan ruang,
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman,
5. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan
6. sosial.

Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

1. tenaga kerja,
2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
3. pangan,
4. pertanahan,
5. lingkungan hidup,
6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
7. pemberdayaan masyarakat dan desa,
8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
9. perhubungan,
10. komunikasi dan informatika,
11. koperasi, usaha kecil dan menengah,

12. penanaman modal,
13. kepemudaan dan olahraga,
14. statistik,
15. kebudayaan,
16. perpustakaan, dan
17. kearsipan.

Urusan pilihan meliputi :

(a) kelautan dan perikanan,

(b) pariwisata,

(c) pertanian,

(d) perdagangan,

(e) perindustrian, dan

(f) transmigrasi.

Urusan penunjang pemerintahan meliputi :

1. Perencanaan,
2. Keuangan,
3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan,
4. Pengawasan
5. Penelitian dan Pengembangan, dan
6. Fungsi Penunjang lainnya.

Kebijakan dalam pengalokasian belanja daerah Kabupaten Blora sebagai berikut :

1. Belanja daerah diprioritaskan untuk pengalokasian belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama, selanjutnya belanja langsung untuk program prioritas pembangunan termasuk pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan, dan sisanya dialokasikan untuk belanja tidak langsung diluar belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama.
2. Belanja tidak langsung dialokasikan untuk belanja pegawai (belanja gaji dan tunjangan, serta mempertimbangkan juga tunjangan tambahan penghasilan yang dievaluasi berdasarkan pendapatan daerah), bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa, belanja tidak terduga, dan belanja bantuan keuangan kepada

propinsi/Kab/Kota dan pemerintahan desa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

3. Belanja Langsung diarahkan untuk pencapaian prioritas daerah tahun 2019, serta memperhatikan alokasi fungsi urusan pemerintahan dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan. Pengalokasian anggaran pada urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar memperhatikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai kewenangan kabupaten yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tabel III-7
Realisasi dan Proyeksi Belanja Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2016-2020

No.	Uraian	REALISASI DAN PROYEKSI BELANJA KABUPATEN BLORA TAHUN 2016-2020				
		Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2016	**Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2017**	**Belanja APBD Tahun 2018**	**Proyeksi Belanja APBD Tahun Anggaran 2019**	**Proyeksi Belanja APBD Tahun Anggaran 2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	BELANJA					
5	Belanja Daerah					
5.1	Belanja Tidak Langsung	**1.303.487.138.993**	**1.221.221.129.463**	**1.219.614.431.477**	**1.197.282.905.677**	**1.372.362.397.000**
5.1.1	Belanja Pegawai	964.603.085.691	900.968.731.263	825.435.558.477	804.647.224.677	1.018.642.236.000
5.1.4	Belanja Hibah	31.053.916.647	16.852.800.000	28.330.200.000	27.646.200.000	26.927.163.000
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.238.542.655	723.948.000	1.285.000.000	1.050.000.000	9.757.300.000
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa	6.093.261.000	4.037.650.000	5.788.000.000	6.300.000.000	6.851.098.000
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa. Serta Partai Politik	299.498.333.000	298.638.000.200	357.775.673.000	356.639.481.000	309.684.600.000
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000	500.000.000
5.2	**Belanja Langsung**	**648.329.315.294**	**698.481.973.276**	**837.042.370.215**	**1.696.880.384.558**	**918.217.506.000**
	Jumlah Belanja	**1.951.816.454.287**	**1.919.703.102.739**	**2.056.656.801.692**	**2.894.163.290.235**	**2.290.579.903.000**
	Surplus / Defisit	**(93.628.538.050)**	**(10.345.913.346)**	**(36.157.162.015)**	**(21.500.000.000)**	**(13.000.000.000)**

Sumber : BPPKAD Kabupaten Blora dan RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari SiLPA tahun sebelumnya, hasil divestasi (dana bergulir) atau pinjaman daerah. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo.

a. Kebijakan Pembiayaan Penerimaan

   SiLPA terhadap Total Belanja Daerah sebesar Rp. 28.000.000.000

b. Pengeluaran Pembiayaan

   Pada tahun 2019 direncanakan adanya pembiayaan pengeluaran atas penyertaan modal kepada BUMD berdasarkan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan.

   Adapun pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan untuk dan penyertaan modal /investasi daerah sebesar Rp. 6.500.000.000,-.

Tabel III-8
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2016-2020

No.	Uraian	Realisasi dan Proyeksi Belanja Kabupaten Blora Tahun 2016-2020				
		Realisasi Pembiayaan APBD Tahun Anggaran 2016	Realisasi Pembiayaan APBD Tahun Anggaran 2017	Belanja APBD Tahun 2018	Proyeksi Pembiayan APBD Tahun Anggaran 2019	Proyeksi Pembiayaan APBD Tahun Anggaran 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	PEMBIAYAAN					
6	**Pembiayaan Daerah**					
6.1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**					
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	139.318.488.840	78.101.558.120	40.157.162.015	28.000.000.000	-
6.1.7	Penerimaan kembali dana bergulir	191.275.000	80.490.100			
	Pencairan dana cadaangan					15.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**139.509.763.840**	**78.182.048.220**	**40.157.162.015**	**28.000.000.000**	**15.000.000.000**
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**					
6.2.1	Pembentukan dana cadangan				-	
6.2.5	Penyertaan Modal/Investasi Daerah	2.233.000.000	-	4.000.000.000	6.500.000.000	2.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**2.233.000.000**	**-**	**4.000.000.000**	**6.500.000.000**	**2.000.000.000**
	Pembiayaan Netto	**137.276.763.840**	**78.182.048.220**	**36.157.162.015**	**21.500.000.000**	**13.000.000.000**
	SILPA	**43.648.225.790**	**67.836.134.874**	**-**	**-**	**-**

Sumber : BPPKAD Kabupaten Blora

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

"Terwujudnya Masyarakat Blora yang Lebih Sejahtera dan Bermartabat"

Visi tersebut merupakan kelanjutan dari visi sebelumnya dengan melanjutkan misi dan program yang belum tercapai secara optimal.

Berdasarkan visi tersebut, diharapkan seluruh elemen masyarakat Blora (termasuk didalamnya unsur pemerintah daerah) lebih mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk mewujudkan masyarakat Blora yang sejahtera dan bermartabat. Penjelasan Visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat yang sejahtera, mengandung maksud bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Blora telah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan secara layak dan berkeadilan. Kondisi ini ditandai tingginya pendapatan per Kapita penduduk, pemerataan pendidikan bagi masyarakat, tingginya derajat kesehatan masyarakat, menurunnya jumlah penduduk miskin, terciptanya iklim investasi, meningkatnya jumlah lapangan kerja di berbagai sektor usaha, ketersediaan infrastruktur dasar dan terciptanya kelestarian lingkungan hidup.
2. Bermartabat mengandung maksud bahwa masyarakat Blora memiliki harga diri yang tercermin melalui akhlak mulia dan berbudaya. Berakhlak mulia dalam arti memperoleh kemajuan pada dimensi mental-spiritual, keagamaan dan kebudayaan yang ditandai dengan terbentuknya masyarakat yang bermoral dan berkarakter, sebagai wujud kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin. Berbudaya dalam arti menjujung tinggi nilai-nilai kebudayaan termasuk didalamnya hukum kearifan lokal sebagai cerminan harkat dan martabat manusia. Berbudaya merupakan aktifitas terus-menerus dalam menumbuhkembangkan kualitas yang ditandai dengan terwujudnya budaya profesionalisme, daya saing, etos kerja dan menghormati hukum. Kebudayaan sebagai

sebuah bidang kehidupan menjadi elemen penting menuju masyarakat yang sejahtera.

Sesuai dengan visi **"Terwujudnya Masyarakat Blora yang Lebih Sejahtera dan Bermartabat"**, maka ditetapkan misi sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan visi, yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintah yang efektif bersih KKN, dan demokratis, melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya daerah yang ramah lingkungan dan berkesinambungan.
3. Meningkatkan iklim kondusif dan kerjasama dengan pihak-pihak berkepentingan serta menciptakan lapangan kerja dan pengembangan inventasi
4. Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia, kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, sosial dasar, pemberdayaan masyarakat dan lainnya serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik.
6. Mewujudkan dan mendorong tersusunnya kebijakan daerah yang berpihak pada masyarakat miskin (*Pro Poor*), *pro job*, *pro growth*, *pro environment* dan *pro gender*.
7. Mewujudkan penegakan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Keterkaitan antara misi tujuan dan sasaran Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel IV-1
Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Blora
Tahun 2016-2021

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Mewujudkan pemerintah yang efektif bersih KKN, dan demokratis, melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik	Meningkatkan Kapasitas, Kompetensi, etos kerja dan integritas Aparatur Sipil Negara	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi
		Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada unit pelayanan pemerintah daerah	Meningkatnya penerapan standar pelayanan pada perangkat daerah yang memberikan pelayanan publik dan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
			Meningkatnya cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
			Meningkatnya kualitas pelayanan statistik, kearsipan, persandian, dan transmigrasi
			Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK
			Meningkatnya kinerja DPRD dalam fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran.
		Meningkatnya kapasitas fiskal daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya pendapatan daerah dan kualitas pengelolaan keuangan daerah
2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya daerah yang ramah lingkungan dan berkesinambungan	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat.	Meningkatnya jumlah, produktivitas dan profitabilitas industri.

No	Misi	Tujuan	Sasaran
			Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi, serta kemandirian usaha mikro kecil dan menengah
			Meningkatnya nilai ekspor dan tertatanya pasar tradisional dan Pedagang Kaki Lima.
			Meningkatnya kunjungan wisatawan di obyek wisata unggulan daerah
		Meningkatkan produktivitas hasil pertanian, peternakan dan perikanan budidaya sebagai penunjang ketahanan pangan	Terpeliharanya produksi dan produktivitas pertanian dan populasi hewan ternak
			Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan.
			Meningkatnya akses, distribusi dan konsumsi pangan masyarakat
		Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup	Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup.
			Meningkatnya kualitas dan kinerja pengelolaan persampahan
3	Meningkatkan iklim kondusif dan kerja sama dengan pihak-pihak berkepentingan serta menciptakan lapangan kerja dan pengembangan investasi	Meningkatkan minat dan realisasi investasi di Kabupaten Blora	Meningkatnya nilai realisasi investasi dan kualitas pelayanan perizinan
		Menurunkan pengangguran	Meningkatnya penempatan tenaga kerja
4	Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia, kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, sosial dasar, pemberdayaan masyarakat dan lainnya serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan

No	Misi	Tujuan	Sasaran
			Meningkatnya minat baca di perpustakaan daerah
			Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk
		Meningkatkan perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
		Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, serta keberdayaan masyarakat	Meningkatnya perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak
			Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran desa, dan kualitas pengelolaan Lembaga Ekonomi Pedesaan
		Meningkatkan prestasi pemuda dan serta apresiasi seni dan budaya daerah	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga
			Meningkatnya pelestarian keragaman dan kekayaan budaya daerah
5	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan, drainase, irigasi, dan perhubungan serta implementasi rencana tata ruang	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan
			Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi
			Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang
			Meningkatnya pelayanan perhubungan darat
		Meningkatkan sarana dan prasarana dasar	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh

No	Misi	Tujuan	Sasaran
		permukiman dan perumahan agar masyarakat hidup layak	perkotaan.
			Meningkatnya kualitas dan kuantitas air bersih dan sanitasi
6	Mewujudkan dan mendorong tersusunnya kebijakan daerah yang berpihak pada masyarakat miskin (Pro Poor), pro job, pro growth, pro environment dan pro gender	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	Meningkatnya Pencapaian target indikator RPJMD
7	Mewujudkan penegakan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).	Meningkatkan Ketenteraman, ketertiban umum	Meningkatnya penegakan Perda

Misi yang telah ditetapkan dan diturunkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Blora, dalam pencapaiannya ditetapkan dalam target tahunan di setiap indikator kinerjanya. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2019 sebeagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel IV-2
Tujuan, Sasaran dan Indikator RKPD

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019 pada RPJMD	Target Tahun 2019	Penjelasan
	Sasaran Pokok Pembangunan Daerah	1. Pertumbuhan Ekonomi	%	5,0-5,3	5,0-5,3	
		2. Inflasi	%	3-7	3-7	
		3. Indeks Gini	Skala	0,39	0,39	
		4. Indeks ketimpangan williamson (Indeks Ketimpangaan Regional)	Skala	0,300-0,400	0,300-0,400	
		5. Persentase penduduk miskin	%	10,5-11,2	10,5-11,2	
		6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	67,84	67,84	
		7. Angka Usia Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,45	12,45	
		8. Rata-rata lama sekolah	Tahun	6,4	6,4	
		9. Usia Harapan Hidup	Tahun	73,95	73,95	
		10. Pengeluaran Riil Per kapita	Ribu Rp	9.223	9.223	
		11. Tingkat pengangguran terbuka	%	3,6	3,6	
		12. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Skor	83,21	83,21	
		13. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Skor	68,34	68,34	
Meningkatkan Kapasitas, Kompetensi, etos kerja dan integritas Aparatur Sipil Negara	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi	14. Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional	%	12,36	12,36	
		15. Persentase pejabat yang sesuai dengan kompetensi	%	52,76	52,76	
		16. Persentase penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin dan proses izin perkawinan dan perceraian	%	100	100	
Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya penerapan standar pelayanan dan kepuasan masyarakat pada perangkat daerah yang memberikan pelayanan publik	17. Nilai Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	Nilai	B	B	
		18. Persentase perangkat daerah yang menyusun SOP dan SPP dan IKM "baik"	%	100	100	
	Meningkatnya cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	19. Rasio penduduk berKTP	%	98	98	
		20. Rasio bayi berakte kelahiran	%	99	99	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019 pada RPJMD	Target Tahun 2019	Penjelasan
	Meningkatnya kualitas pelayanan statistik, kearsipan, persandian, dan transmigrasi	21. Persentase Keterisian data SIPD	%	90	90	
		22. Tersedianya tanah untuk keperluan Pemerintah daerah	%	100	100	
		23. Persentase jenis informasi tingkat kabupaten yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan	%	100	100	
		24. Prosentase dokumen/Arsip yang terpelihara dengan baik	%	90	90	
		25. Jumlah Transmigran diberangkatkan	KK	15	15	
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK	26. Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemda	SIMDA	7	7	
	Meningkatnya kinerja DPRD dalam fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran.	27. Persentase Raperda masuk Prolegda (Propem-perda) yang Dibahas dan Ditetapkan	%	94	94	
Meningkatnya kapasitas fiskal daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya pendapatan daerah dan kualitas pengelolaan keuangan daerah	28. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Status	WTP	WTP	
		29. Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah per tahun	%	6,01	6,01	
		30. Tingkat maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3	
		31. Tingkat kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3	
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat.	Meningkatnya jumlah, produktivitas dan profitabilitas industri.	32. Jumlah Industri	unit	11.805	11.805	
	Meningkatnya kualitas koperasi, serta kemandirian usaha mikro kecil dan menengah	33. Persentase koperasi sehat	%	60	60	
		34. Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	unit	6.775	6.775	
	Meningkatnya nilai ekspor dan tertatanya pasar tradisional	35. Nilai ekspor produk-produk asal Kabupaten Blora	US $	2.884.411	2.884.411	
		36. Persentase pasar tradisional yang memenuhi syarat kenyamanan dan kesehatan	%	100	100	
	Meningkatnya kunjungan wisatawan di obyek wisata unggulan daerah	37. Jumlah Kunjungan wisata	Orang	230.000	230.000	
Meningkatkan produktivitas hasil pertanian, peternakan dan perikanan sebagai penunjang ketahanan pangan	Terpeliharanya produksi dan produktivitas pertanian dan populasi hewan ternak	38. Produktivitas Pangan Utama (Padi Sawah)	Ton/ha	51,25	51,25	
		39. Produksi Padi sawah	ton	414.472	414.472	
		40. Produksi Padi ladang	ton	36.156	36.156	
		41. Produksi Jagung	ton	271.253	271.253	
		42. Populasi Sapi Potong	ekor	247.494	247.494	
	Meningkatnya produksi dan produktvitas	43. Produksi Perikanan	Kg	870,421	870,421	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019 pada RPJMD	Target Tahun 2019	Penjelasan
	perikanan budidaya.					
	Meningkatnya akses, distribusi dan konsumsi pangan masyarakat	44. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	67,2	67,2	
Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup	Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup.	45. Standart IKLH Kabupaten Blora	%	68,50	68,50	
		46. Prosentase usaha dan/ atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pengelolaan lingkungan hidup	%	100	100	
	Meningkatnya kualitas dan kinerja pengelolaan persampahan	47. Persentase sampah yang terangkut	%	82,27	82,27	
Meningkatkan minat dan realisasi investasi di Kabupaten Blora	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan investasi	48. Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Trilyun	4,50	4,50	
		49. Terselenggaranya pelayanan perijinan dan nonperijinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal	Hari	1	1	
Menurunkan pengangguran	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	50. Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	%	75	75	
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	51. Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	
		52. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	
	Meningkatnya minat baca di perpustakaan daerah	53. Jumlah pengunjung perpustakaan	Orang	166.323	166.323	
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	54. Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 KH	9,5	9,5	
		55. Angka Kematian Balita	per 1000 KH	10,5	10,5	
		56. Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	105	105	
		57. Presentase Gizi Buruk	%	0,07	0,07	
		58. Status Akreditasi RSUD Blora versi KARS	Akreditasi	Paripurna	Paripurna	
		59. Status Akreditasi RSUD Cepu versi KARS	Akreditasi	Paripurna	Paripurna	
		60. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	6	6	
Meningkatkan perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah	Meningkatnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	61. Persentase penurunan Jumlah PMKS	%	0,1	0,1	
		62. Persentase PMKS skala	%	6,7	6,7	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019 pada RPJMD	Target Tahun 2019	Penjelasan
Kesejahteraan Sosial (PMKS)	(PMKS)	kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar				
Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, serta keberdayaan masyarakat	Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran desa, dan kualias pengelolaan Lembaga Ekonomi Pedesaan	63. Persentase desa yang memiliki RPJMDes dan APBDes berkualitas baik.	%	95	95	
		64. Prosentase jumlah BUMDes	%	50	50	
	Meningkatnya perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak	65. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan	%	100	100	
Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga, serta apresiasi seni dan budaya daerah	Meningkatnya kegiatan pemuda dan olahraga	66. Jumlah medali tingkat provinsi yang diperoleh	Medali	86	86	
	Meningkatnya pelestarian keragaman dan kekayaan budaya daerah	67. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	32,5	32,5	
		68. Cakupan kelompok seni yang dibina	%	60	60	
Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	69. Persentase Jalan kondisi baik	%	63	63	
		70. Persentase Jembatan dalam kondisi baik	%	79	79	
	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi	71. Panjang salurah drainase dalam kondisi baik	Km	220,8	220,8	
		72. Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	40,03	40,03	
	Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang	73. Perda RDTR yang ditetapkan	dokumen	1	1	
	Meningkatnya pelayanan perhubungan darat	74. Persentase prasarana perhubungan dalam kondisi baik	%	90	90	
		75. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu,marka,guardrail, APILL,dll) pada jalan kota	%	94	94	
Meningkatkan sarana dan prasarana dasar permukiman dan perumahan agar masyarakat hidup layak	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan.	76. Luas kawasan kumuh di kawasan perkotaan	Ha	48	48	
		77. Jumlah rumah tidak layak huni	Unit	67.247	67.247	
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas air bersih dan sanitasi	78. Cakupan pelayanan air minum	%	66,71	66,71	
		79. Cakupan pelayanan sanitasi	%	95,96	95,96	
Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan	80. Presentase Capaian Indikator Kinerja RPJMD	%	91	91	
		81. Kesesuaian Kegiatan di KUA PPAS dengan Kegiatan di RKPD	%	80	80	
		82. Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penelitian dengan Roadmap SIDa	%	100	100	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019 pada RPJMD	Target Tahun 2019	Penjelasan
Meningkatkan Ketenteraman, ketertiban umum	Meningkatnya penegakan Perda	83. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di kabupaten	%	85	85	
		84. Cakupan Penegakan Perda	%	78,49	78,49	

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019

Penyusunan RKPD Kabupaten perlu memperhatikan kebijakan yang berada di atasnya seperti kebijakan nasional dan kebijakan provinsi. Kesinambungan antara kebijakan daerah dengan kebijakan nasional diperlukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan Indonesia.

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional

Visi Pembangunan Nasional untuk Tahun 2015-2019 adalah:

"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut **NAWA CITA**, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Tahun 2019 adalah tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019. Perencanaan pembangunan nasional tahun 2019 dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 dengan tema **"Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas"** yang berfokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN.

Dengan menjaga kesinambungan implementasi *Money Follow Program,* RKP 2019 menekankan untuk :

- Menajamkan Prioritas Nasional, dari yang semula 10 (sepuluh) menjadi 5 (lima) Prioritas Nasional dan dari 30 (tiga puluh) menjadi 25 (dua puluh lima) Program Prioritas.
- Memastikan Pelaksanaan Program, dimana pengendalian dilakukan sampai level proyek (satuan 3).
- Menajamkan Integrasi Sumber Pendanaan, baik belanja K/L, Non K/L, Belanja Transfer ke Daerah, Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) maupun Swasta.

Guna percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional tahun 2019 tersebut, ditetapkan 5 (lima) Prioritas Nasional dan 25 (dua puluh lima) Program Prioritas, yaitu :

1. **Pembangunan Manusia** melalui Pengurangan Kemiskinan dan peningkatan Pelayanan Dasar

1.1. Percapatan Pengurangan Kemiskinan

1.2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat

1.3. Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas

1.4. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak

1.5. Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar

2. **Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah** melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman

2.1. Peningkatan Konektivitas

2.2. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika

2.3. Pengembangan Pusat Kegiatan Ekonomi di Wilayah Timur dan Pembangunan Desa

2.4. Pembangunan daerah Afirmasi

2.5. Pembangunan Konektivitas Untuk Mendukung Pembangunan sektor Unggulan Hulu-Hilir Perikanan.

3. **Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi** melalui pertanian, Industri dan Jasa Produktif

3.1. Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian

3.2. Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Industri Pengolahan

3.3. Peningkatan Nilai Tambah Jasa Produktif

3.4. Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja

3.5. Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas

4. **Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air**

4.1. Peningkatan Produkasi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi

4.2. Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas kOnsumsi Pangan

4.3. Peningkatan Kualitas dan Aksesbilitas Sumber Daya Air

4.4. Peningkatan daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan

4.5. Pemantapan Regulasi dan Penguatan Kelembagaan Energi, Pangan dan Sumber daya Air

5. **Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu**

5.1. Kamtibmas dan keamanan siber

5.2. Kesuksesan Pemilu

5.3. Pertahanan Wilayah Nasional

5.4. Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi

5.5. Efektifitas Diplomasi

Keseluruhan Prioritas Nasional dan Program Prioritas tersebut adalah dalam rangka mencapai sasaran makro tahun terakhir RPJMN 2015-2019 yang terdiri dari :

- Indeks Gini sebesar 0,36;
- Persentase penduduk miskin 7-8%;
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4-5%;
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,98

4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 akan melaksanakan Pemilihan Kepala Dearah periode Tahun 2018-2023 dengan penetapan RPJMD Tahun 2018 – 2023 paling lambat 6 bulan setelah pelantikan. Maka untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, dengan memperhatikan RPJMN 2015-2019, capaian dan kendala dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2013-2018, dinamika lingkungan strategis yang berkembang saat ini dan tantangan yang akan datang, hasil review Rencana Tata Ruang dan Wilayah, prinsip Sustainable Development Goals/SDGs tahun 2016-2030 dan amanat RPJPD tahap ke III yang diarahkan pada Pencapaian Daya Saing Wilayah dan Masyarakat Jawa Tengah Yang Berlandaskan Pada Keunggulan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Pelayanan dasar Yang makin Luas, Infrastruktur Wilayah Yang Makin Berkualitas dan Kondusivitas Wilayah Yang makin Mantap serta Kemmpuan IPTEK Yang Makin Meningkat, ditetapkan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah 2019 adalah untuk **"Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Pemerataan Pembangunan dan Pemanfaatan Iptek"**

Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah tahun 2019 tersebut, ditetapkan prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019, meliputi:

1. **Penanggulangan Kemiskinan** melalui upaya penyediaan *basic life acces* (akses rumah layak, air bersih, sanitasi, listrik, penanganan kawasan kumuh, kesehatan, pangan, perlindungan sosial dan kepemilikan sertifikat lahan) untuk penduduk miskin; penguatan *sustainable livelihood* (peningkatan *start up* wirausaha baru, peningkatan ketrampilan dan kompetensi tenaga kerja serta pemberdayaan ekonomi masyarakat); dan perkuatan basis data, basis spasial, berbasis komunitas dan pendampingan yang kontinyu, serta pelibatan swasta dan pihak lainnya dalam mengatasi kemiskinan.
2. **Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah** yang berbasis pada

meningkatkan produktivitas dan kualitas pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil mikro dan menengah; mendorong pariwisata berbasis masyarakat dan perbaikan iklim investasi.

3. **Peningkatan Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM** dengan fokus pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, kesehatan, dan mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing tinggi.
4. **Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana**
   Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengurangan resiko bencana.
5. **Ketahanan Pangan Dan Energi** dengan fokus pada pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan;
6. **Penurunan Kesenjangan Wilayah** dengan fokus pada penguatan infrastruktur konektivitas, pemerataan sarpras dasar dan ekonomi, penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru dan optimalisasi potensi kelautan dengan penerapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Keci (RZWP3K).
7. **Pemantapan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan** yang berfokus pada peningkatan pelayanan publik, perwujudan pemerintahan yang bersih akuntabel dan profesional, perwujudan kelembagaan birokrasi yang profesional serta peningkatan kualitas kehidupan demokrasi.

Tujuan, arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 merupakan upaya guna mencapai target sasaran makro pembangunan daerah tahun 2019 yaitu :

a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% dengan rentang nilai antara 5,2 – 5,6% dengan menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru bebasis sumberdaya lokal di daerah.
b. Persentase kemiskinan diharapkan dapat menurun pada angka 12,01% yang akan diupayaka melalui sinergitas program kegiatan dengan fokus penangannan pada wilayah kabupaten dan desa dengan tingkat kemiskinan tinggi atau masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah.
c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diharapkan turun menjadi sebesar 4,52% dengan tantangan bonus demografi yang harus diimbangi dengan kualitas SDM utamanya usia produktif.
d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan mencapai sebesar 71,60 melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan pendapatan masyrakat.

4.2.3 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2, disebutkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah meliputi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sebagai bagian dari unsur pemerintahan daerah, DPRD Kabupaten harus dilibatkan secara intensif dalam proses dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan. Dengan dilibatkannya DPRD dalam pembahasan sejak awal, diharapkan dapat memberikan masukan berupa aspirasi masyarakat yang memang dibutuhkan oleh masyarakat yang dihasilkan/didapatkan pada saat melaksanakan reses maupun kunjungan kerja ke daerah.

Berdasarkan masukan dari DPRD maka pokok-pokok pikiran DPRD dalam upaya mewujudkan masyarakat Blora yang lebih sejahtera dan bermartabat adalah:

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan, demokratisasi dan kondusivitas daerah, yang difokuskan pada optimalisasi peran Pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, peningkatan peran serta masyarakat dalam setiap pelaksanaan pembangunan, serta pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah.
2. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, diperlukan pembangunan integratif dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah dan konservasi lingkungan hidup serta upaya penanggulangan bencana.
3. Mengurangi pengangguran, terutama dalam menghadapi persaingan kerja global kedepan diperlukan peran pemerintah untuk memberikan fasilitasi peningkatan daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan permintaan pasar, serta meningkatkan realisasi investasi utamanya yang bersifat padat karya untuk membuka lapangan usaha dengan memperhatikan kearifan lokal dan fasilitasi pengembangan wirausaha baru.
4. Ketahanan pangan dengan memberdayakan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pangan diperlukan upaya konstruktif melalui penataan sumber-sumber produksi pangan, pengembangan kearifan pangan lokal serta kebijakan yang berpihak pada produsen pangan / petani.
5. Menjaga Iklim Politik yang sehat dan kondusif agar tetap terjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan pada Pancasila.

4.2.4 Prioritas Pembangunan Kabupaten Blora

Kabupaten Blora tahun 2019 merupakan tahun ke IV (empat) pelaksanaan RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 yang diarahkan untuk **"Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan bebas KKN, didukung pengembangan ekonomi lokal dan pemerataan infrastruktur wilayah".** Arah kebijakan ini tentunya harus dilaksanakan secara selaras dan sinergis dengan pembangunan nasional, prioritas pembangunan provinsi, memperhatikan permasalahan dan dinamika yang berkembang serta mempertimbangkan keberlanjutan program pembangunan yang masih relevan untuk percepatan pencapaian target sasaran pembanguan.

Berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan di Kabupaten Blora, isu strategis pembangunan Kabupaten Blora Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Belum Optimal.
2. Belum Optimalnya Investasi Ekonomi.
3. Belum Memadainya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur.
4. Angka Kemiskinan yang Relatif Tinggi.
5. Pemerataan dan Mutu Pendidikan Masih Rendah.
6. Derajat Kesehatan Masyarakat Belum Optimal.
7. Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 merupakan upaya mencapai target pembangunan daerah tahun 2019, juga untuk mendukung kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.

Berdasarkan isu strategis Kabupaten Blora dan prioritas dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021, Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 yang kemudian dirumuskan secara terperinci ke dalam sasaran dan fokus pembangunan adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN** dengan fokus pembangunan antara lain:
   a. Peningkatan Kinerja Birokrasi
   b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Apartur Sipil Negara.
   c. Peningkatan kualiyas pelayanan publik melalui tersusunnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), SOP dan SPP di masing-masing unit pelayanan.
   d. Pemanfaatan TIK dalam peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

e. Penegakan peraturan daerah dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum.

2. **Pengembangan Ekonomi Lokal**, dengan fokus pembangunan antara lain :
   a. Pemberdayaan UMKM
   b. Pengembangan Destinasi Pariwisata
   c. Pengembangan Produk Unggulan Daerah
   d. Peningkatan keterkaitan antar usaha ekonomi

3. **Pemerataan Infrastruktur Wilayah**, dengan fokus pembangunan pemerataan dan peningkatan aksebilitas infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sarana dan prasarana persampahan, Penerangan Jalan Umum dan penanganan perbaikan infrastruktur akibat bencana alam antara lain :
   a. Peningkatan Peningkatan sarana dan prasarana wilayah
   b. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan
   c. Peningkatan Infrastruktur pendukung ketahanan pangan
   d. Penataan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman.
   e. Pembangunan sarana dan prasarana desa kawasan hutan.

4. **Percepatan Pengentasan Kemiskinan** dengan fokus pembangunan penurunan angka kemiskinan melalui :
   a. Pemenuhan Kebutuhan dan Pelayanan Dasar Masyarakat
   b. Peningkatan kesejahteraan dan Pemberdayaan masyarakat miskin melalui pendayagunaan sumber daya lokal yang potensial.
   c. Verifikasi dan validasi masyarakat miskin.

5. **Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Yang Bermutu**, dengan fokus pembangunan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik, peningkatan kualitas pendidikan pada setiap jenjang pendidikan, peningkatan akses pelayanan terutama bagi masyarakat tidak mampu di setiap jenjang pendidikan antara lain:
   a. Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
   b. Peningkatan sarana prasarana pendidikan
   c. Peningkatan Kualitas Pendidikan Berkarakter
   d. Pelaksanaan Wajib Belajar 9 tahun melalui Beasiswa Siswa Berprestasi, Penyelanggaraan Kejar Paket A, B, C
   e. Peningkatan peran serta aktif pemuda dalam pembangunan.

6. **Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat** melalui peningkatan sarana prasarana kesehatan dan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, dengan fokus pembangunan antara lain :
   a. Pelatihan, pendidikan teknis dan pendidikan formal bagi tenaga kesehatan/non kesehatan diantaranya pelatihan dan bimbingan teknis.
   b. Peningkatan jumlah tenaga kesehatan, khususnya dokter spesialis.

c. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit.
d. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
e. Peningkatan perbaikan gizi masyarakat

7. **Penciptaan Iklim Politik Yang Kondusif**, melalui :
   a. Peningkatan wawasan kebangsaan dan bela negara
   b. Peningkatan pemahaman politik kepada masyarakat
   c. Peningkatan keamanan dan ketertiban pelaksanaan Pemilihan Umum.

Penentuan Prioritas Pembangunan Kabupaten Blora dan indikator kinerja merupakan upaya dalam rangka menangani permasalahan pembangunan di Kabupaten Blora serta memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 merupakan upaya mencapai target pembangunan daerah tahun 2019, juga untuk mendukung kebijakan pembangunan nasional dan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2019. Keterkaitan antara prioritas nasional, Prioritas Pembangunan Daerah Jawa Tengah tahun 2019 dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Blora Tahun 2019 dapat dilihat dalam Tabel IV-2 berikut :

Tabel IV-3

Keterkaitan Prioritas Daerah Dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa tengah Tahun 2018

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah
1	PN 1 : **Pembangunan Manusia** melalui Pengurangan Kemiskinan dan peningkatan Pelayanan Dasar	Prioritas Prov. 1 : **Penanggulangan Kemiskinan** melalui upaya penyediaan *basic life acces* (akses rumah layak, air bersih, sanitasi, listrik, penanganan kawasan kumuh, kesehatan, pangan, perlindungan sosial dan kepemilikan sertifikat lahan) untuk penduduk miskin; penguatan *sustainable livelihood* (peningkatan *start up* wirausaha baru, peningkatan ketrampilan dan kompetensi tenaga kerja serta pemberdayaan ekonomi masyarakat); dan perkuatan basis data, basis spasial, berbasis komunitas dan pendampingan yang kontinyu, serta pelibatan swasta dan pihak lainnya dalam mengatasi kemiskinan. Prioritas Prov. 3 : **Peningkatan Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM** dengan fokus pada peningkatan penyelenggaraan pendidikan, kesehatan, dan mempersiapkan tenaga kerja yang berdaya saing tinggi.	Prioritas Daerah 4 : **Percepatan Pengentasan Kemiskinan.** Prioritas Daerah 5 : **Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Yang Bermutu** Prioritas Daerah 6 : **Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat**
2	PN 2 : **Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah** melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman	Prioritas Prov. 6 : **Penurunan Kesenjangan Wilayah** dengan fokus pada penguatan infrastruktur konektivitas, pemerataan sarpras dasar masyarakat, penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru dan optimalisasi potensi kelautan denagn penerapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)	Prioritas Daerah 3 : **Pemerataan Infrastruktur Wilayah**

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah
3	PN 3 : **Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi** melalui pertanian, Industri dan Jasa Produktif	Prioritas Prov. 2 : **Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah** yang berbasis pada meningkatkan produktivitas dan kualitas pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil mikro dan menengah; mendorong pariwisata berbasis masyarakat dan perbaikan iklim investasi.	Prioritas Daerah 2 : **Pengembangan Ekonomi Lokal**
4	PN 4 : **Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air**	Prioritas Prov. 4 : **Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana** Prioritas Prov. 5 : **Ketahanan Pangan Dan Energi** dengan fokus pada pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan;	Prioritas Daerah 3 : **Pemerataan Infrastruktur Wilayah**
5	PN 5 : **Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu**	Prioritas Prov. 7 : **Pemantapan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan** yang berfokus pada peningkatan pelayanan publik, perwujudan pemerintahan yang bersih akuntabel dan profesional serta peningkatan kualitas kehidupan demokrasi.	Prioritas Daerah 1 : **Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN** Prioritas Daerah 7 : **Penciptaan Iklim Politik Yang Kondusif**

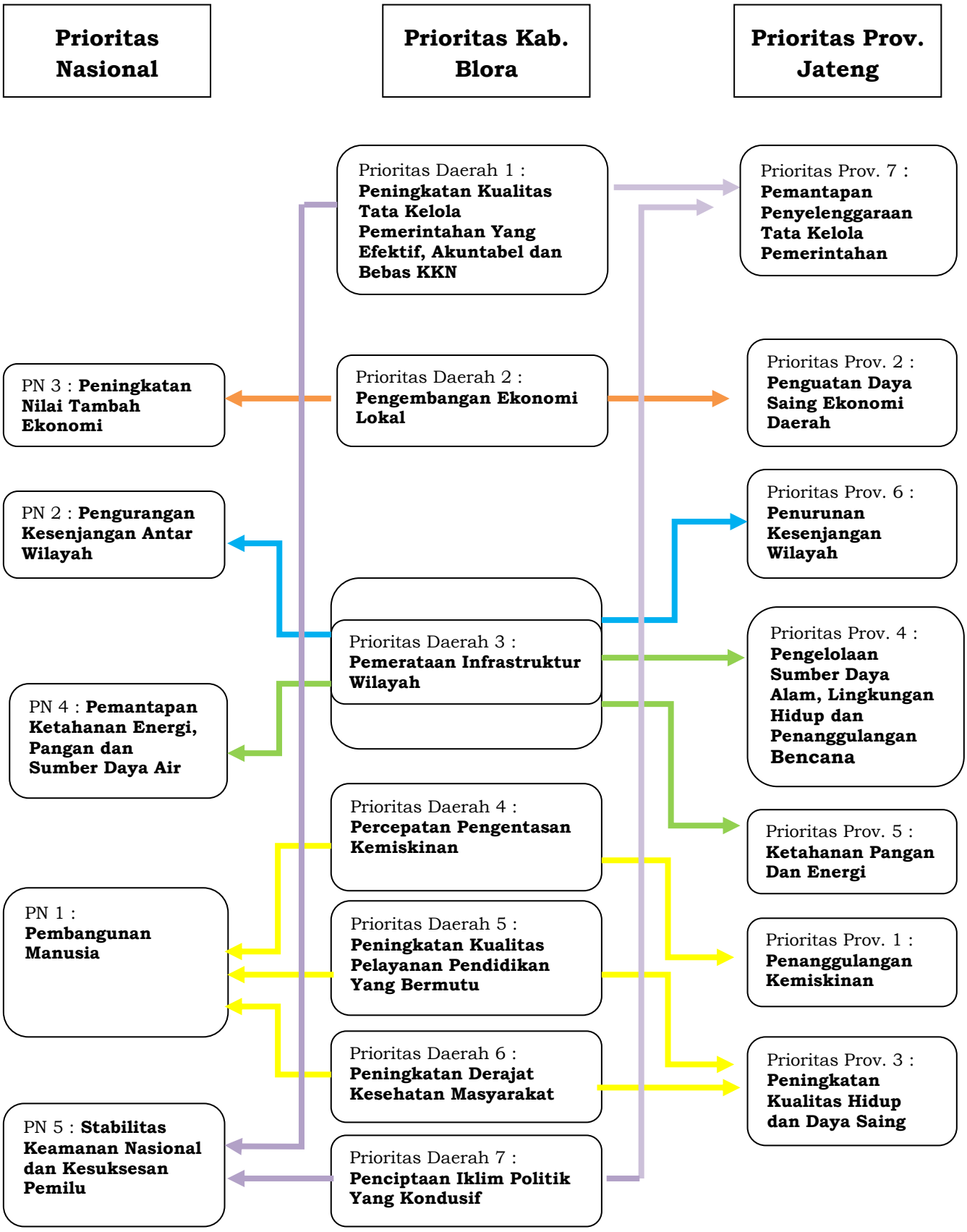

Gambar IV-1
Keterkaitan RKP, RKPD Provinsi Jawa Tengah dan RKPD Kabupaten Blora tahun 2018

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Kerangka Pendanaan Daerah Tahun 2019

Berdasarkan analisis keuangan pada Bab III maka kerangka pendanaan untuk tahun 2019 adalah sebagaimana Tabel V-1 berikut:

Tabel V-1
Kerangka Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019

Uraian	Proyeksi Tahun 2019
Pendapatan Daerah	
Pendapatan Asli Daerah	**195.000.000.000**
Hasil pajak daerah	52.846.000.000
Hasil retribusi daerah	9.902.000.000
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	13.100.000.000
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	119.152.000.000
Dana Perimbangan	**1.824.373.299.558**
Dana bagi hasil pajak/bukan pajak	113.500.000.000
Dana Alokasi Umum	926.754.000.000
Dana Alokasi Khusus	784.119.299.558
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	**853.289.990.677**
Pendapatan hibah	82.490.294.677
Dana bagi hasil pajak dari provinsi	100.000.000.000
Dana penyesuaian dan otonomi khusus	0
Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	441.725.215.000
Dana Desa	229.074.481.000
Jumlah Pendapatan	**2.872.663.290.235**
Belanja Daerah	
Belanja Tidak Langsung	**1.197.282.905.677**
Belanja pegawai	804.647.224.677
Belanja hibah	27.646.200.000
Belanja bantuan sosial	1.050.000.000
Belanja bagi hasil kepada pemerintahan desa	6.300.000.000
Belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa, serta partai politik	356.639.481.000
Belanja tidak terduga	1.000.000.000

Uraian	Proyeksi Tahun 2019
Belanja Langsung Perangkat Daerah	**1.696.880.384.558**
Jumlah Belanja	**2.894.163.290.235**
Surplus / Defisit	**-21.500.000.000**
Pembiayaan Daerah	
Penerimaan Pembiayaan Daerah	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	28.000.000.000
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**28.000.000.000**
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	
Penyertaan Modal/Investasi Daerah	6.500.000.000
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**6.500.000.000**
Pembiayaan Netto	**21.500.000.000**
SILPA	**0**

5.2 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2019

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2019 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 15 (lima belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 6 (enam) urusan pilihan dan 9 (sembilan) fungsi penunjang urusan pemerintahan.

5.2.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Kegiatan diarahkan pada pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah PAUD, penambahan ruang kelas, pengadaan alat praktik dan peraga siswa, pelatihan kompetensi tenaga pendidik, pengembangan PAUD, penyelenggaraan PAUD, pengembangan data dan informasi PAUD, koordinasi dan kerjasama PAUD, perencanaan dan penyusunan program PAUD, sosialisasi pendidikan PAUD,

akreditasi PAUD, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD.

b. Program Pendidikan Dasar 9 Tahun

Kegiatan diarahkan pada Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), penyelenggaraan akreditasi SD, penataan kelembagaan sekolah, pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), pemberian beasiswa siswa dari keluarga kurang mampu, pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana SD dan SMP, pengembangan data dan informasi SD dan SMP, pengelolaan data dan pelaporan aset/barang milik daerah, Pembinaan Sekolah Adiwiyata, penyelenggaran ujian sekoah tingkat SD dan SMP, Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi SD dan SMP, pelatihan penyusunan kurikulum SD dan SMP, pembinaan minat bakat dan kreativitas SD dan SMP, Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi SD dan SMP, pemberian tambahan makanan bergizi anak SD, penyelenggaraan fasilitasi kerjasama pendidikan dasar, pelaksanaan evaluasi hasil kinerja pendidikan dasar, penerapan sistem informasi manajemen pendidikan dasar, pelaksanaan pendataan SPM pendidikan dasar, pelatihan, seminar, lokakarya, dan diskusi ilmiah pendidikan dasar, fasilitasi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Pendidikan Dasar.

c. Program Pendidikan Non Formal

Kegiatan diarahkan pada pemberdayaan tenaga pendidikan non formal, pengembangan pendidikan keaksaraan, pengembangan pendidikan kecakapan hidup, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal, pengembangan kebijakan pendidikan non formal, pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan model pembelajaran pendidikan non formal, perencanaan dan penyusunan program pendidikan non formal, publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal, penyelenggaraan paket A, paket B dan paket C, akreditasi dikmas, dan penyediaan sarana dan prasarana SKB.

d. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kegiatan diarahkan pada pelaksanaan sertifikasi pendidik, pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi, pembinaan kelompok kerja guru (KKG), pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar

kualifikasi, peningkatan mutu dan kualitas program pendidik dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan sistem perlindungan dan penghargaan terhadap profesi pendidik, pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan kesejahteraan GTT dan PTT, evaluasi kinerja kepala sekolah dan pengawas sekolah.

2. Kesehatan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Kegiatan diarahkan pada pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dan peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit.

b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan diarahkan pada pemeliharaan dan pemulihan kesehatan, peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan, penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan, penyelenggaraan penyehatan lingkungan, pelayanan kesehatan gratis di puskesmas, penyediaan operasional dan pemeliharaan puskesmas, laboratorium kesehatan dan gudang farmasi, pelayanan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja, penyediaan biaya pendampingan pelayanan kesehatan, upaya kesehatan olahraga, pembinaan, pengelolaan dan pengawasan fasilitas kesehatan rujukan di kabupaten, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan farmasi, manajemen bantuan operasional kesehatan di puskesmas, distribusi obat, akreditasi puskesmas, jaminan persalinan, akreditasi labkesda, penyediaan sarana dan prasarana alat kesehatan.

c. Program Pengawasan Obat dan Makanan

Kegiatan diarahkan pada peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan.

d. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan diarahkan pada pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat, penyuluhan masyarakat pola

hidup sehat, peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan, dan peningkatan upaya kesehatan kerja.

e. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Kegiatan diarahkan pada penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi, pemberian tambahan makanan dan vitamin, penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia, gizi buruk, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya, pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi, dan peningkatan gizi lebih.

f. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Kegiatan diarahkan pada pengkajian pengembangan lingkungan sehat, dan penyuluhan menciptakan lingkungan sehat.

g. Program Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Kegiatan diarahkan pada penyemprotan/fogging sarang nyamuk, pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging, pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah, pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik, peningkatan imunisasi, peningkatan survelliance epidemilogi dan penanggulangan wabah, peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit, dan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular.

h. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Kegiatan diarahkan pada penyusunan standar pelayanan kesehatan, evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan, dan pelayanan akreditasi dan perijinan.

i. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin

Kegiatan diarahkan pada pelayanan sunatan massal dan pelayanan kesehatan rujukan PPK3.

j. Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Kegiatan diarahkan pada pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan puskesmas dan puskesmas pembantu, pengadaan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu, peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat

inap, pemeliharaan puskesmas keliling dan perencanaan infrastruktur bidang kesehatan.

k. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Kegiatan diarahkan pada kemitraan asuransi kesehatan masyarakat dan pembiayaan pelayanan kesehatan rujukan lanjutan dan jaminan kesehatan bagi pasien kurang mampu.

l. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Kegiatan diarahkan pada penyuluhan kesehatan anak balita.

m. Program Peningkatan Kesehatan Lansia

Kegiatan diarahkan pada pelayanan kesehatan lansia.

n. Program peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak

Kegiatan diarahkan pada penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil risiko tinggi oleh kader dan perawatan secara berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu.

o. Program Peningkatan Pelayanan BLUD

Kegiatan diarahkan pada pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD pada 26 Puskesmas, RSUD Dr. R. Soetijono Blora dan RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu.

p. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit

Kegiatan diarahkan pada pengadaan obat-obatan rumah sakit, penyediaan/pembangunan/rehabilitasi alat kesehatan, sarana dan prasarana rumah sakit.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Kegiatan diarahkan pada peningkatan jalan dan jembatan, serta pembangunan talud/drainase/turap/gorong-gorong/bronjong jalan.

b. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Kegiatan diarahkan pada pemeliharaan jalan dan jembatan.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Kegiatan diarahkan pada pengadaan/rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat berat beserta peralatan dan perlengkapannya.

d. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan rawa dan jaringan pengairan lainnya

   Kegiatan diarahkan pada perencanaan pembangunan jaringan irigasi, peningkatan/rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, operasi dan pemeliharaan bangunan irigasi, pemberdayaan petani pemakai air.

e. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Rawa

   Kegiatan diarahkan pada penanganan longsoran sungai, pengadaan tanah embung/irigasi, pembangunan/rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya.

f. Program Perencanaan Tata Ruang

   Kegiatan diarahkan pada koordinasi tentang rencana tata ruang, pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang, survey dan pemetaan, survei dan pemetaan, koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten/kota.

g. Program Pemanfaatan Ruang

   Kegiatan diarahkan pada fasilitas peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang, sosialisasi kebijakan, norma standar, prosedur, dan manual pemanfaatan ruang, dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang.

h. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

   Kegiatan diarahkan pada sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perumahan

   Kegiatan diarahkan pada fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu dan operasional rusunawa.

b. Program lingkungan sehat perumahan

   Kegiatan diarahkan pada pembangunan jalan lingkungan / drainase /talud di kelurahan.

c. Program pengembangan areal pemakaman

   Kegiatan diarahkan pada pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman.

d. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Kegiatan diarahkan pada pemeliharaan ruang terbuka hijau, perbaikan taman seribu lampu, pengadaan kendaraan operasional, dan pembangunan RTH.

e. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Kegiatan diarahkan pada Rehabilitasi Masjid Agung Baitunnur Blora, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman, pembangunan/rehabilitasi trotoar dan drainase, dan perencanaan kawasan strategis dan cepat tumbuh.

f. Program Penerangan Jalan Umum

Kegiatan diarahkan pada Pembayaran tagihan rekening listrik penerangan jalan umum (PJU), meterisasi PJU, penambahan titik lampu PJU di wilayah kecamatan, pemeliharaan jaringan PJU se-Kabupaten Blora dan pemeliharaan lampu higmass serta lampu jembatan, pemeliharaan jaringan listrik PJU,

g. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Kegiatan diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi, perencanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan, serta pengadaan sarana angkut air limbah.

5. Ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Kegiatan diarahkan pada penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan, pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan, pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat, pengendalian keamanan lingkungan, pengendalian keamanan pemilihan umum kepala daerah, penegakan, dan penindakan pelanggaran perda.

2. Program pemeliharaan Ketramtibmas dan pencegahan tindak Kriminal

Kegiatan diarahkan pada pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja, peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan, kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan, peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah, pemberantasan pita cukai palsu dan rokok polos,

peningkatan kerjasama dengan aparat lain dalam pencegahan pelanggaran perda.

3. Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

   Kegiatan diarahkan pada pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat.

4. Program peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

   Kegiatan diarahkan pada penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba.

5. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

   Kegiatan diarahkan pada pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi, pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam, pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempa penampungan sementara, pelatihan dan simulasi penanganan bencana, dan inventarisasi dan identifikasi kerusakan pasca bencana.

6. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

   Kegiatan diarahkan pada endidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran, pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran, pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran, pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran, peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran.

6. Sosial

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

   Kegiatan diarahkan pada pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin.

2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

   Kegiatan diarahkan pada pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak, pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal,

peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS, penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa, pelayanan pengemis, gelandangan dan orang terlantar kehabisan bekal (PGOT) dan razia tuna sosial, peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS (PKH), operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Singgah dan TMP, dan verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kemiskinan.

3. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma

   Kegiatan diarahkan pada pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma.

4. Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo

   Kegiatan diarahkan pada operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo, sosialisasi dan pembinaan panti asuhan, dan jambore anak panti.

5. Program pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial

   Kegiatan diarahkan pada peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat.

5.2.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Tenaga kerja

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja

   Kegiatan diarahkan pada pembangunan balai latihan kerja, pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja, pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK, dan pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja.

2. Program peningkatan Kesempatan Kerja

   Kegiatan diarahkan pada penyusunan informasi bursa kerja, penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja, pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan, dan pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat.

3. Program Perlindungan dan pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan

Kegiatan diarahkan pada fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial, fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan, dan sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan.

2. Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender Dan Anak

   Kegiatan diarahkan pada advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan, fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2), penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak, pengembangan sistem informasi gender dan anak, dan Bimbingan Teknis Desa Prima.

2. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan

   Kegiatan diarahkan pada pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak, dan Lomba Kreativitas Anak.

3. Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan

   Kegiatan diarahkan pada pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan daerah.

3. Pangan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

   Kegiatan diarahkan pada penanganan daerah rawan pangan, analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan, laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah, pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan, pemantauan dan analisis harga pangan pokok, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan cadangan pangan daerah, pengembangan desa mandiri pangan, pengembangan pertanian pada lahan kering, pengembangan lumbung pangan desa, pengembangan model

distribusi pangan yang efisien, peningkatan mutu dan keamananan pangan, peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan dan produk pertanian, penyuluhan sumber pangan alternatif, dan koordinasi Dewan Ketahanan Pangan.

4. Lingkungan hidup

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

   Kegiatan diarahkan pada koordinasi penilaian kota sehat/adipura, pemantauan kualitas lingkungan, pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup, pengelolaan B3 dan limbah B3, pengkajian dampak lingkungan, peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan, koordinasi pengelolaan prokasih/superkasih, pengembangan produksi ramah lingkungan, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengadaan alat-alat laboratorium lingkungan, peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan, dan koordinasi penyusunan dokumen lingkungan.

2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

   Kegiatan diarahkan pada pengendalian dampak perubahan iklim, peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air, pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA.

3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

   Kegiatan diarahkan pada peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan, dan pengembangan data dan informasi lingkungan.

4. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

   Kegiatan diarahkan pada pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri, pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair, penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran, pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi, dan penerapan sistem manajemen lingkungan bagi masyarakat di lingkungan industri.

5. Program Kinerja Pengelolaan persampahan

   Kegiatan diarahkan pada penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah, penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan, peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan, pengadaan bak kontainer sampah, pengadaan landasan bak kontainer sampah, pembangunan/rehabilitasi pagar TPA, pengadaan tanah tempat pemrosesan akhir sampah, peningkatan pengelolaan persampahan dan TPA, pembangunan drainase TPA, pengadaan dump truk.

5. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program penataan Admnistrasi Kependudukan

   Kegiatan diarahkan pada implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan), pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan, penyediaan informasi dapat diakses masyarakat, peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan, pengembangan database kependudukan, peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil, sosialisasi kebijakan kependudukan, pelaksanaan Program KTP Elektronik, peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk, peningkatan pelayanan pencatatan sipil, dan pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu.

6. Pemberdayaan masyarakat dan desa

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

   Kegiatan diarahkan pada pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat, penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa, sosialisasi Teknologi Tepat Guna dan Posyantek, dan penguatan Pos Pelayanan Teknologi, pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa, pemberian stimulan pembangunan desa, pendampingan KPMD, dan rintisan desa berdikari.

2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Kegiatan diarahkan pada pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa, dan fasilitasi pembentukan BUMDes Bersama.

3. Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa/kelurahan

   Kegiatan diarahkan pada pelatihan aparatur pemerintah desa.

4. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan

   Kegiatan diarahkan pada pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, dan peningkatan Peran Perempuan dalam Pengembangan Posyandu.

5. Program Pemberdayaan Masyarakat, Adat dan Sosial Budaya

   Kegiatan diarahkan pada pendayagunaan profil desa dan evaluasi pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, adat dan sosial budaya.

7. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Keluarga Berencana

   Kegiatan diarahkan pada penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, pelayanan KIE, promosi pelayanan KHIBA, pembinaan keluarga berencana, kegiatan DAK bidang keluarga berencana, pengembangan kualitas sumber daya manusia pengelola program KKBPK, pelayanan konseling KB, dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana.

2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

   Kegiatan diarahkan pada advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat, orientasi program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, orientasi Program KKBPK di Tingkat Lini Lapangan, fasilitasi forum pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya, penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah.

3. Program pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri

   Kegiatan diarahkan pada fasilitasi pembentukan kelompok peduli masyarakat peduli KB, fasilitasi Forum Komunikasi bagi Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), fasilitasi pembinaan

kesertaan KB, fasilitasi bagi mitra kerja dalam Pengendalian penduduk.

4. Program pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU

   Kegiatan diarahkan pada pengkajian pengembangan model operasional BKB-posyandu-PADU, dan pengumpulan bahan-bahan informasi tentang pengasuhan dan pembentukan tumbuh kembang anak.

8. Perhubungan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pembangunan dan prasarana fasilitas perhubungan

   Kegiatan diarahkan pada penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan, koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, dan sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan.

2. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

   Kegiatan diarahkan pada pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor, rehabilitasi/pemeliharaan rambu lalu lintas, dan pengadaan kendaraan operasional perhubungan.

3. Program peningkatan pelayanan angkutan

   Kegiatan diarahkan pada uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang, pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya, [engumpulan dan analisis database pelayanan jasa ngkutan, sosialisasi dan penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan, pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan, koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan, posko lebaran, natal, dan tahun baru.

4. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

   Kegiatan diarahkan pada pembangunan halte bus dan pengadaan tanah perluasan bandara Ngloram.

5. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

   Kegiatan diarahkan pada pengadaan rambu-rambu lalu lintas, pengadaan marka jalan, pengembangan CCTV, pengawalan dan pengamanan lalu lintas.

6. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Kegiatan diarahkan pada pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor.

9. Komunikasi dan informatika

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

   Kegiatan diarahkan pada pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi, pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi, pengadaan alat studio dan komunikasi, pengkajian dan pengembangan sistem informasi, dan perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi.

2. Proram pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

   Kegiatan diarahkan pada pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi.

3. Program kerjasama informasi dan media massa

   Kegiatan diarahkan pada penyebarluasan informasi pembangunan daerah, penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat, dan Sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai Tembakau.

4. Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

   Kegiatan diarahkan pada pelatihan SDM bidang komunikasi dan informasi.

5. Program penguatan kelembagaan dalam pengelolaan komunikasi dan informasi daerah

   Kegiatan diarahkan pada koordinasi bidang komunikasi dan informasi antar lintas SKPD, lintas instansi vertikal di daerah, BUMD, dan swasta lokal, penguatan sinergisitas dan kemitraan pemerintah dan media massa, revitalisasi pendayagunaan media center daerah, penyusunan desain detail jaringan komunikasi, pemberdayaan KIM dan FK Metra.

6. Program peningkatan kapasitas SDM aparatur pada SKPD yang menangani urusan bidang komunikasi dan informasi di daerah

Kegiatan diarahkan pada orientasi atas SKPD tentang Keterbukaan Informasi Publik.

7. Program peningkatan tata laksana komunikasi dan informatika

   Kegiatan diarahkan pada penyediaan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi, pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster, leaflet, baliho dan lainnya, komunikasi publik melalui dialog interaktif radio dan televisi, pelayanan informasi melalui media online.

10. Koperasi, usaha kecil, dan menengah

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah

   Kegiatan diarahkan pada memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah, fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi, penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan, dan pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD.

2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

   Kegiatan diarahkan pada sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan, pengembangan klaster bisnis, pengembangan sarana pemasaran produk usaha mikro kecil menengah, dan penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah.

3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

   Kegiatan diarahkan pada pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi, dan penyebaran model-model pola pengembangan koperasi.

11. Penanaman modal

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi

   Kegiatan diarahkan pada pengembangan potensi unggulan daerah, koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal, peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha, peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan

dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, dan penyelenggaraan pameran investasi.

2. Program peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi

   Kegiatan diarahkan pada penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur, memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi, dan pengembangan sistem informasi penanaman modal.

3. Program Pelayanan Perijinan

   Kegiatan diarahkan pada penyusunan sistem informasi dan dokumen perijinan, sosialisasi pelayanan dan perijinan terpadu, penyusunan rancangan peraturan perijinan, penyusunan penetapan perijinan, pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat.

12. Kepemudaan dan olah raga

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

   Kegiatan diarahkan pada pembinaan organisasi kepemudaan, pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan, fasilitasi aksi bakti sosial kepemudaan, dan pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan.

2. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

   Kegiatan diarahkan pada pelatihan kewirausahaan bagi pemuda, pelatihan keterampilan bagi pemuda, dan kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP).

3. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

   Kegiatan diarahkan pada pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat, pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah, peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi, penyelenggaraan kompetisi olah raga, pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat, pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga, dan pengembangan olahraga rekreasi.

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

   Kegiatan diarahkan pada peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga, dan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga.

13. Statistik

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah

   Kegiatan diarahkan pada penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah, pengelolaan, updating dan analisis data statistik daerah, pengolahan, updating dan analisis data PDRB, dan penyusunan IKK.

14. Persandian

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program sandi dan telekomunikasi

   Kegiatan diarahkan pada pengadaan peralatan dan perlengkapan sandi dan telekomunikasi, dan peningkatan dan pengembangan SDM sandi dan telekomunikasi.

15. Kebudayaan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program pengembangan nilai budaya

   Kegiatan diarahkan pada pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah.

2. Program pengelolaan kekayaan budaya

   Kegiatan diarahkan pada fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya, pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno, penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah, sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah, pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air, pengembangan kebudayaan dan pariwisata, perumusan kebijakan sejarah dan purbakala, pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah, pengelolaan karya cetak dan karya rekam dan pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala.

3. Program pengelolaan keragaman budaya

   Kegiatan diarahkan pada pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan, penyelenggaraan dialog kebudayaan, fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah, fasilitasi

penyelenggaraan festival budaya daerah, fasilitasi pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta, fasilitasi pembentukan kemitraan usaha profesi antardaerah, dan membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antardaerah.

16. Perpustakaan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

   Kegiatan diarahkan pada pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar, pengembangan minat dan budaya baca, supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat, pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan, penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca, publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca, penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum di daerah, pengembangan sarana informasi perpustakaan, dan pembangunan gedung layanan perpustaaan.

2. Program Penyelamatan dan Pelesarian Koleksi Pustaka

   Kegiatan diarahkan pada pendataan karya cetak dan karya rekam dan pelestarian karya cetak dan karya rekam.

17. Kearsipan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah

   Kegiatan diarahkan pada pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip, pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah, penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika, pembangunan data base informasi kearsipan, sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta, dan penyediaan sarana layanan informasi arsip.

2. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

   Kegiatan diarahkan pada pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah.

5.2.3 Urusan Pilihan

1. Kelautan dan perikanan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program pengembangan Budidaya Perikanan

   Kegiatan diarahkan pada pengembangan bibit ikan unggul, pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan, pembinaan dan pengembangan perikanan, pengembangan kolamisasi pedesaan, pendataan dan pengolahan data statistik perikanan, dan penebaran bibit ikan di perairan umum.

2. Program pengembangan perikanan tangkap

   Kegiatan diarahkan pada pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap.

3. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan

   Kegiatan diarahkan pada optimalisasi pengelolaan produksi perikanan.

2. Pariwisata

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program pengembangan pemasaran pariwisata

   Kegiatan diarahkan pada pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata, dan pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri.

2. Program pengembangan destinasi pariwisata

   Kegiatan diarahkan pada peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, pengembangan jenis paket wisata unggulan, rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana obyek wisata, pemeliharaan obyek wisata, rehabilitasi/pemeliharaan Gedung Sasana Bakti, dan Penataan Kawasan Sunan Pojok.

3. Program pengembangan kemitraan

   Kegiatan diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata, peningkatan peranserta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata dan pembinaan sektor pendukung pariwisata.

3. Pertanian

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

   Kegiatan diarahkan pada pelatihan petani dan pelaku agribisnis, dan peningkatan kemampuan lembaga petani.

2. Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

   Kegiatan diarahkan pada promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah, perencanaan dan pengawasan peptisida, dan promosi hasil produksi dan perlindungan tanaman hortikultura.

3. Program peningkatan penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

   Kegiatan diarahkan pada penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna, pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna, penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna, pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi perkebunan tepat guna, penelitian dan pengembangan teknologi perkebunan tepat guna, penguatan kelembagaan dan pengelolaan pasca panen perkebunan, dan penyediaan sarana dan prasarana produksi hortikultura.

4. Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan

   Kegiatan diarahkan pada pengembangan bibit unggul perkebunan dan hortikultura, dan penyediaan sarana produksi hortikultura.

5. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan

   Kegiatan diarahkan pada peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan, penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian /perkebunan dan bantuan operasional pos penyuluh desa.

6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

   Kegiatan diarahkan pada pendataan masalah peternakan, pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak, pengawasan perdagangan ternak antar daerah, pelayanan peningkatan keamanan produk-produk pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal), monitoring penerapan kesejahteraan hewan dan pencegahan serta

penanggulangan penyaakit zoonosi, pembangunan/rehab sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan/ternak.

7. Program peningkatan produksi hasil peternakan

   Kegiatan diarahkan pada pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak, pembibitan dan perawatan ternak, pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat, pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak, pendampingan program perbibitan nasional, Sentra Peternakan Rakyat (SPR), peningkatan angka kebuntingan sapi induk dan pembangunan/rehab sarana dan prasarana peningkatan hasil produksi peternakan.

8. Program peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

   Kegiatan diarahkan pada pembangunan pusat-pusat etalase/eksebisi/promosi atas hasil produksi peternakan, promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah, pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat, dan penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat.

9. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

   Kegiatan diarahkan pada pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna.

4. Perdagangan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Perlindungan Konsumen Dan pengamanan Perdagangan

   Kegiatan diarahkan pada peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa, dan operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah.

2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

   Kegiatan diarahkan pada pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri, membangun jejaring dengan eksportir, dan koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha.

3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

   Kegiatan diarahkan pada pengembangan pasar dan distribusi barang/produk, pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan, peningkatan sistem dan jaringan informasi

perdagangan, sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri, rehabilitasi/pemeliharaan pasar daerah, pembangunan pasar rakyat, pembangunan ruko/ kios, memfasilitasi akses data dan informasi pasar, intensifikasi dan efisiensi pungutan retribusi pasar, pembinaan bagi pengelola dan pedagang pasar tradisional, pengelolaan kebersihan pasar tradisional.

4. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

   Kegiatan diarahkan pada pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan, dan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan.

5. Perindustrian

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

   Kegiatan diarahkan pada fasilitasi bagi industri kecil menengah terhadap pemanfaatan sumber daya, pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri, revitalisasi sentra IKM, dan penyediaan sarana dan prasarana klaster industri.

2. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

   Kegiatan diarahkan pada pembinaan kemampuan teknologi industri, pengembangan dan pelayanan teknologi industri, dan penguatan kemampuan industri berbasis teknologi.

3. Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial

   Kegiatan diarahkan pada penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat.

6. Transmigrasi

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Transmigrasi Regional

   Kegiatan diarahkan pada penyuluhan transmigrasi regional, peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi, pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM.

5.2.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

   Kegiatan diarahkan pada koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh dan penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.

2. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar

   Kegiatan diarahkan pada koordinasi perencanaan perumahan, dan koordinasi perencanaan air minum, drainase, dan sanitasi.

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

   Kegiatan diarahkan pada peningkatan kemampuan teknis aparat perencana, dan pemeliharaan aplikasi sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.

4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

   Kegiatan diarahkan pada penyusunan rancangan RKPD, penyelenggaraan musrenbang RKPD, penetapan RKPD, penyusunan perubahan RKPD, penyusunan KUA dan PPAS, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

5. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

   Kegiatan diarahkan pada penyusunan indikator ekonomi daerah, koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, analisis kesejahteraan petani, penyusunan peraturan daerah tentang rencana pengembangan kawasan industri, penyusunan perencanaan pembangunan bidang investasi, penanaman modal, perindustrian dan tenaga kerja, penyusunan perencanaan pembangunan bidang pertanian, koordinasi perencanaan pembangunan bidang pertanian, koordinasi perencanaan pembangunan bidang industri penanaman modal dan tenaga kerja, dan koordinasi perencanaan pembangunan bidang perdagangan koperasi dan UMKM.

6. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya

   Kegiatan diarahkan pada program KHPPIA, penyusunan perencanaan pembangunan bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat, penyusunan perencanaan pembangunan bidang kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, penyusunan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat, koordinasi perencanaan pembangunan bidang kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan.

7. Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam

   Kegiatan diarahkan pada koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam, koordinasi pengelolaan infrastruktur di wilayah hutan Kabupaten Blora, dan penyusunan perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah.

8. Program Bidang Perencanaan Pembangunan Bersumber Dari Pemerintah Provinsi Serta Pendampingannya

   Kegiatan diarahkan pada penyusunan Profil Daerah Kabupaten Blora, Pendidikan Untuk Semua, koordinasi penanggulangan kemiskinan, FEDEP, Pengawasan Peredaran GAKY.

2. Keuangan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

   Kegiatan diarahkan pada penyusunan standar satuan harga, penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD, penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, pemeliharaan aplikasi SIP APBD, pemeliharaan sistem informasi keuangan daerah, manajemen barang daerah, penataan, dan inventarisasi aset daerah, peningkatan pengelolaan aset daerah, penghapusan, dan penyelesaian kerugian barang daerah, pembinaan, pengawasan, dan penilaian aset daerah, penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual, peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kapasitas pengelolaan aset daerah, pengelolaan administrasi tata usaha keuangan daerah belanja langsung, pengelolaan administrasi tata usaha keuangan

daerah belanja tidak langsung, pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah, penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Pajak Daerah selain PBB P2 dan BPHTB, pelayanan, penetapan dan penanganan keberatan pajak daerah selain PBB P2 dan BPPHTB, penagihan dan pelaporan pajak daerah selain PBB P2 dan BPHTB, pendataan dan penilaian PBB P2 dan BPHTB, penagihan dan pelaporan pajak daerah PBB P2 dan BPHTB, pelayanan dan penetapan PBB P2 dan BPHTB.

3. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

   Kegiatan diarahkan pada pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS daerah, pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah, pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan funngsi bagi PNS daerah, dan pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah.

2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

   Kegiatan diarahkan pada seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar, sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian, pembinaan dan peningkatan disiplin PNS, pengangkatan PNS dalam jabatan, pengadaan ASN, penyelenggaraan administrasi mutasi kepangkatan, penyelenggaraan administrasi kesejahteraan pegawai, penyelenggaraan administrasi pemindahan dan pemberhentian pegawai, dan peningkatan data dan informasi kepegawaian.

4. Penelitian dan pengembangan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK

   Kegiatan diarahkan pada penelitian bidang ekonomi, penelitian bidang sosial budaya, penelitian bidang infrastruktur, rekayasa ilmu pengetahuan dan teknologi, Riset Unggulan Daerah, dan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

5. Sekretariat daerah

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah / Kepala Daerah

   Kegiatan diarahkan pada dialog/audensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial kemasyarakatan, penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri, rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah, kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya, pelayanan jasa pemeliharaan kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan penyediaan makanan dan minuman serta kebutuhan rumah tangga rumah dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

2. Program Optimalisasi Pemanfaaatan Teknologi Informasi

   Kegiatan diarahkan pada penilaian pelaksanaan pelayanan publik.

3. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

   Kegiatan diarahkan pada penyelesaian kasus litigasi dan non litigasi.

4. Program peningkatan kerjasama antar Pemerintah Daerah

   Kegiatan diarahkan pada fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik dan fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi.

5. Program Penataan Peraturan Per-uu-an

   Kegiatan diarahkan pada penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan, legislasi rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan, publikasi peraturan perundang-undangan, kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi, dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah, pengendalian dan pembinaan peraturan perundang-undangan, peningkatan sistem jaringan dokumentasi informasi hukum, penyuluhan hukum peraturan perundang-undangan, dan pembinaan Kadarkum.

6. Program Kelembagaan Perangkat Daerah

Kegiatan diarahkan pada penyusunan pedoman umum perangkat daerah, pembentukan perangkat daerah, penyusunan pedoman teknis perangkat daerah, pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah, dan pelaksanaan analisis jabatan.

7. Program Ketatalaksanaan Perangkat Daerah

   Kegiatan diarahkan pada penyusunan pedoman pakaian dinas, penyusunan pedoman tata ruang kantor, penyusunan pedoman hubungan kerja perangkat daerah, pengkoordinasian dan fasilitasi pelayanan publik, bimbingan teknis penyusunan SPP, dan monitoring dan evaluasi pelayanan publik.

8. Program Pendayagunaan Aparatur Daerah

   Kegiatan diarahkan pada penyelenggaraan rapat koordinasi PAN daerah, publikasi /sosialisasi kebijakan PAN daerah, penyusunan kebijakan bidang PAN daerah dan fasilitasi/koordinasi peningkatan sumber daya aparatur.

9. Program Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan

   Kegiatan diarahkan pada penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Blora, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, Pembentukan dan pelaksanaan ULP, sosialisasi peraturan tentang pelaksanaan pembangunan/pengadaan barang/jasa pemerintah, fasilitasi pelaksanaan bimbingan teknis dan uji kompetensi tenaga kerja, fasilitasi penyusunan Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) satuan kerja perangkat daerah, dan koordinasi sistem monitoring Tim Evaluasi Penyerapan Dan Realisasi Anggaran (TEPRA).

10. Program koordinasi terpadu bidang perekonomian

    Kegiatan diarahkan pada kesiapan ketersediaan kepokmas, fasilitasi penguatan ekonomi sektor riil, fasilitasi penguatan dan penataan manajemen perusahaan milik daerah, fasilitasi dan koordinasi dengan SKPD bidang ekonomi, dan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai.

11. Program koordinasi bidang Tata Pemerintahan

    Kegiatan diarahkan pada Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Pelelangan pengelolaan tanah eks bengkok/bondo desa/kelurahan, Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan untuk PATEN, penegasan batas daerah, inventarisasi administrasi

pemerintahan, dan fasilitasi dan koordinasi pemilu dan pilkada.

12. Program Koordinasi Bidang Pemerintahan Desa

    Kegiatan diarahkan pada fasilitasi dan koordinasi bidang pemerintahan desa, sosialisasi kepada aparatur pemerintah desa dan BPD, sosialisasi peraturan mengenai pemerintahan desa, inventarisasi kekayaan desa, pengelolaan kekayaan desa, pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa, penetapan dan penegasan batas desa, pengelolaan jaringan sistem informasi manajemen pemerintahan desa, desk pemilihan kepala desa, dan pembinaan teknis administrasi pemerintahan desa.

13. Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat

    Kegiatan diarahkan pada koordinasi dan pemantauan di bidang kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi serta kesejahteraan sosial lainnya, koordinasi dan pemantauan dibidang pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, koordinasi dan pemantauan dibidang pendidikan, perpustakaan, kebudayaan, urusan agama serta melaksanakan pelayanan administrasi, fasilitasi kegiatan keagamaan masyarakat se Kabupaten Blora, dan fasilitasi penyelenggaraan ibadah haji.

14. Program koordinasi bidang kehumasan

    Kegiatan diarahkan pada fasilitasi analisis berita dan pengelolaan pendapat umum, pelayanan kehumasan bagi kepala daerah, penyerbarluasan informasi melalui media massa, penerbitan majalah/ jurnal/ buletin/ leaflet/ brosur/ poster, dan pengembangan informasi dokumentasi kehumasan.

15. Program penyelenggaraan keprotokolan daerah

    Kegiatan diarahkan pada penyelenggaraan upacara rutin berkala dan hari besar nasional, dan penyelenggaraan keprotokolan dan pelayanan kedinasan kepala daerah.

16. Program koordinasi bidang Pertanahan dan Permukaan Bumi

    Kegiatan diarahkan pada pembakuan nama-nama rupabumi, dan pengadaan tanah.

17. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelola Keuangan Sekretariat Daerah

    Kegiatan diarahkan pada konsolidasi pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Setda.

6. Sekretariat DPRD

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat

   Kegiatan diarahkan pada pembahasan rancangan peraturan daerah, rapat-rapat alat kelengkapan DPRD, kegiatan reses, kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD, peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, asuransi kesehatan, penyusunan peraturan daerah inisiatif, penyusunan prolegda, fasilitasi hubungan masyarakat dengan DPRD, fasilitasi kegiatan komisi dan fraksi, fasilitasi keprotokolan, kedinasan, pimpinan dan anggota DPRD, dokumentasi kebijakan dan kegiatan DPRD.

7. Kecamatan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program koordinasi dan pelayanan pada kecamatan

   Kegiatan diarahkan pada koordinasi pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa, koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan, koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan, koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan, koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan, dan koordinasi kegiatan pelayanan masyarakat di kelurahan dan desa.

2. Program pengembangan sarana dan prasarana umum dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan

   Kegiatan diarahkan pada sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.

3. Program pengembangan wilayah kecamatan

   Kegiatan diarahkan pada evaluasi perencanaan dan keuangan desa, musyawarah pembangunan desa/kelurahan dan kecamatan, intensifikasi pajak bumi dan bangunan.

4. Program koordinasi dan Pelayanan Pada Kelurahan

   Kegiatan diarahkan pada penyediaan operasional kebutuhan rutin kelurahan, pelayanan kepada masyarakat di wilayah kelurahan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kelurahan.

8. Pengawasan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

   Kegiatan diarahkan pada pelaksanaan pengawasan internal secara berkala, pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH, penanganan kasus pada wilayah pemerintah dibawahnya, tindak lanjut hasil temuan pengawasan, koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif, evaluasi berkala temuan hasil pengawasan, evaluasi pengawasan pembangunan daerah, sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sosialisasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pendataan dan penataan dokumen/arsip terkait pengawasan daerah, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih.

2. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

   Kegiatan diarahkan pada pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.

9. Kesatuan bangsa dan politik

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

   Kegiatan diarahkan pada pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat, dan peningkatan kewaspadaan dan deteksi dini bagi pemuda dan pelajar.

2. Program pemeliharaan Kantramtibnas dan Pencegahan tindak kriminal

   Kegiatan diarahkan pada peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan, monitoring/pemantauan orang asing, monitoring/pemantauan kegiatan organisasi kemasayarakatan, fasilitasi penyelenggaraan keamanan dalam negeri, dan forum komunikasi dan konsultasi organisasi kemasyarakatan/LSM.

3. Program pengembangan wawasan kebangsaan

   Kegiatan diarahkan pada peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat, peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur

budaya bangsa, sarasehan generasi muda dengan Pejuang 45, Pemantapan Ideologi Negara, dan Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila.

4. Program kemitraan wawasan kebangsaan menjaga ketertiban dan keamanan

   Kegiatan diarahkan pada seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan dan pendidikan bela negara.

5. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

   Kegiatan diarahkan pada penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba.

6. Program peningkatan Politik Masyarakat

   Kegiatan diarahkan pada koordinasi forum-forum diskusi politik, penelitian penyerahan permohonan bantuan politik, sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula, pendidikan politik bagi organisasi wanita, dukungan penyelenggaraan pemilu.

5.2.5 Program pada Setiap SKPD

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah, direncanakan program yang sifatnya mendukung operasional Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

   Kegiatan meliputi penyediaan jasa surat-menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, jasa administrasi keuangan, jasa kebersihan kantor, jasa perbaikan peralatan kerja, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan, komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, makanan dan minuman, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah, jasa pendukung pelayanan perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

   Kegiatan diantaranya pembangunan gedung kantor/rumah dinas/rumah jabatan, pengadaan kendaraan dinas/operasional, pengadaan perlengkapan/peralatan rumah jabatan/gedung kantor, pengadaan mebeler/instalasi air, listrik, dan telepon, pengadaan bangunan pendukung/tanah untuk rumah dinas/rumah

jabatan/gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

   Kegiatan diantaranya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, pengadaan pakaian kerja lapangan dan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

   Kegiatan meliputi pendidikan dan pelatihan formal, sosialisasi peraturan perundang-undangan, dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

   Kegiatan meliputi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja, laporan keuangan semesteran, laporan prognosis realisasi anggaran, laporan keuangan akhir tahun, rencana strategis, rencana kinerja dan penetapan kinerja, laporan akuntabilitas kinerja, RKA/DPA dan standarisasi harga indeks.

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KABUPATEN BLORA

DINAS PENDIDIKAN

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif(Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																	
01	01			PENDIDIKAN																	
01	01	15		PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI				Prosentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Terakreditasi.	51,69%					4.459.800.000			7.189.800.000				
								APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Usia 3-6 Tahun	70,41%												
								APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Usia 0-6 Tahun	45,68%												
01	01	15	001	Pembangunan gedung sekolah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah gedung yang dibangun	1 Unit	Jumlah gedung yang dibangun	1 Unit	540.000.000	Dana Infrastruktur	0 Unit	550.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	Gedung PAUD di Kabupaten Blora	
					Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah gedung yang dibangun	1 Unit	Jumlah gedung yang dibangun	1 Unit	600.000.000	BANKEU PROV	1 Unit	600.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	Gedung PAUD di Kabupaten Blora	
01	01	15	003	Penambahan ruang kelas sekolah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah ruang kelas sekolah yang dibangun	1 Unit	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang dibangun	1 Unit	160.000.000	Dana Infrastruktur	1 Unit	320.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	PAUD di Kabupaten Blora	
01	01	15	011	Pembangunan ruang ibadah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Musholla TK Pembina			Jumlah ruang ibadah yang dibangun	1 Unit	Jumlah ruang ibadah TK yang dibangun	1 Unit	150.000.000	Dana Infrastruktur	1 Unit	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN	3	TK Pembina	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif(Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	01	15	018	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	TK PERTIWI TLOGOWUNGU Kec. Japah, TK PERTIWI RIMBAYANI Krocok Kec. Japah , KB "AL-HADI" Beganjing, Kec. Japah, KB LARASATI Padaan Kec. Japah , PAUD KB PERTIWI Kacangan Kec. Todanan. TK Pertiwi 1 Kawengan Kec. Jepon, TK Pertiw			Jumlah pengadaan alat praktik dan peraga siswa	20 Buah	Jumlah pengadaan alat praktik dan peraga siswa	20 Buah	160.000.000	BANKEU PROV	20 Buah	160.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	PAUD di Kabupaten Blora	
					Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah pengadaan alat praktik dan peraga siswa	20 Buah	Jumlah sarana atau peralatan untuk bermain yang mengandung nilai edukatif	20 Buah	400.000.000	PAD, DAU, DBH	20 Buah	330.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	PAUD di Kabupaten Blora	
01	01	15	019	Pengadaan mebeler sekolah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah pengadaan mebeler	5 Buah	Jumlah pengadaan mebeler	5 Buah	125.000.000	BANKEU PROV	5 Buah	125.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	PAUD di Kabupaten Blora	
					Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah pengadaan mebeler	20 Buah	Jumlah mebeleir sekolah PAUD	20 Buah	200.000.000	PAD, DAU, DBH	20 Buah	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	PAUD di Kabupaten Blora	
01	01	15	023	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah bangunan sekolah yang dipelihara secara rutin/berkala	4 Unit	Jumlah bangunan sekolah yang diperbaiki	4 Unit	100.000.000	Dana Infrastruktur	4 Unit	1.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	PAUD di Kabupaten Blora	
01	01	15	042	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah bangunan sekolah yang direhabilitasi sedang/berat	20 Unit	Jumlah bangunan sekolah yang direhabilitasi sedang/berat	20 Unit	500.000.000	Dana Infrastruktur	20 Unit	1.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	PAUD di Kabupaten Blora	
01	01	15	057	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah pendidik PAUD yang dilatih kompetensinya	300 Orang	Jumlah Pendidik PAUD yang mengikuti pelatihan kompetensi	300 Orang	100.000.000	PAD, DAU, DBH	300 Orang	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	Pendidik PAUD di Kabupaten Blora	
01	01	15	058	Pengembangan pendidikan anak usia dini	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah delegasi yang dikirimkan pada lomba gebyar paud ke tingkat provinsi	20 Orang	Jumlah delegasi lomba gebyar PAUD yang dikirimkan ke tingkat provinsi	20 Orang	60.000.000	PAD, DAU, DBH	20 Orang	100.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	Peserta lomba gebyar PAUD Kabupaten Blora	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif(Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	01	15	059	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah kegiatan penyelenggaraan PAUD	2 Keg	Jumlah kegiatan penyelenggaraan PAUD	2 Keg	250.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Keg	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	PAUD di Kabupaten Blora	
01	01	15	060	Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah dokumen data dan informasi program PAUD yang dihasilkan	750 Dokumen	Jumlah sekolah yang menjadi sasaran pengembangan data dan informasi PAUD	750 Sekolah	50.000.000	PAD, DAU, DBH	750 Sekolah	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	PAUD di Kabupaten Blora	
01	01	15	063	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah lembaga PAUD yang berkoordinasi dan bekerjasama	778 Lembaga	Jumlah lembaga yang melaksanakan koordinasi dan kerjasama	778 lembar	75.000.000	PAD, DAU, DBH	778 Lembaga	75.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	PAUD di Kabupaten Blora	
01	01	15	064	Perencanaan dan penyusunan program pendidikan anak usia dini	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah kegiatan perencanaan dan penyusunan program PAUD yang akuntabel	1 Keg	Jumlah kegiatan perencanaan dan penyusunan Progran PAUD yang akuntabel	1 Keg	50.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Keg	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	PAUD di Kabupaten Blora	
01	01	15	065	Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah pengelola PAUD yang mengikuti kegiatan sosialisasi PAUD	200 Orang	Jumlah pengelola PAUD yang mengikuti sosialisai	200 Orang	50.000.000	PAD, DAU, DBH	200 Orang	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	Pengelola PAUD di Kabupaten Blora	
01	01	15	066	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah lembaga PAUD yang menjadi sasaran monitoring dan evaluasi.	350 Lembaga	Jumlah lembaga PAUD yang menjadi sasaran monitoring dan evaluasi	350 Lembaga	50.000.000	PAD, DAU, DBH	350 Lembaga	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	PAUD di Kabupaten Blora	
01	01	15	069	Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah lembaga PAUD yang menjadi sasaran akreditasi	96 Lembaga	Jumlah lembaga PAUD yang menjadi sasaran akreditasi	96 Lembaga	75.000.000	PAD, DAU, DBH	96 Lembaga	75.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	PAUD di Kabupaten Blora	
01	01	15	070	Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD (DAK)	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	TK Negeri Pembina Blora, TK Neger 2 Blora, TK Negeri Cepu, TK Negeri Randublatung			Jumlah sarana dan prasarana penyelenggaraan Pendidikan PAUD yang sesuai standar	18 Unit	Terciptanya pendidkan yang berkualitas untuk menodorong akftivtas dan mengembang kreatifitas anak	18 Unit	610.000.000	DAK FISIK	20 Unit	650.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	TK Negeri Pembina Blora, TK Neger 2 Blora, TK Negeri Cepu, TK Negeri Randublatung	
01	01	15	071	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK Non Fisik)	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah sekolah yang mendapatkan BOP PAUD	5 Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapatkan BOP PAUD	5 Sekolah	154.800.000	DAK NON FISIK	5 Sekolah	154.800.000	DINAS PENDIDIKAN	3	TK Negeri di Kabupaten Blora	
01	01	16		PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN				APK SD/MI	108,5					189.658.279.000			158.698.427.000				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif(Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								APM SD/MI	92,75												
								APK SMP/MTs	104,8												
								APM SMP/MTs	73,5												
								Angka Putus Sekolah SD/MI	0,3												
								Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,2												
								Angka Kelulusan SD/MI	100												
								Angka Kelulusan SMP/MTs	100												
								Rata-Rata Nilai UN SD/MI	6,8												
								Rata-rata Nilai UN SMP/MTs	6,6												
								Prosentase Ruang Kelas SD/MI Dalam Kondisi Baik	87,5												
								Prosentase Ruang Kelas SMP/MTs Dalam Kondisi Baik	82,5												
01	01	16	063	Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara SD/SMP	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah sekolah yang menerima bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA)	693 Sekolah	Jumlah sekolah yang menerima bantuan operasional sekolah	693 Sekolah	9.368.655.000	BANKEU PROV	693 Sekolah	9.368.655.000	DINAS PENDIDIKAN	1	SD Negeri dan SMP Negeri di Kabupaten Blora	
					Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah sekolah yang menerima bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA)	693 Sekolah	Jumlah sekolah yang menerima bantuan operasional sekolah (BOS)	693 Sekolah	4.500.000.000	PAD, DAU, DBH	693 Sekolah	5.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	SD Negeri dan SMP Negeri di Kabupaten Blora	
01	01	16	069	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah peserta workshop MBS yang dilatih	90 Orang	Jumlah peserta pelatihan workshop Manajemen Berbasis Sekolah	90 Orang	50.000.000	PAD, DAU, DBH	90 Orang	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	ASN pada SD dan SMP di Kabupaten Blora	
					Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah peserta workshop MBS yang dilatih	90 Orang	Jumlah peserta workshop MBS yang dilatih	90	100.000.000	BANKEU PROV	90 Orang	100.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	ASN pada SD dan SMP di Kabupaten Blora	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif(Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	01	16	076	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah sekolah dasar yang menjadi target akreditasi	75 Sekolah	Jumlah sekolah dasar yang menjadi target akreditasi	75 Sekolah	300.000.000	PAD, DAU, DBH	75 Sekolah	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	SD di Kabupaten Blora	
01	01	16	078	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah kegiatan yang dimonitoring, evaluasi dan pelaporan	2 Keg	Jumlah kegiatan yang menjadi sasaran monitoring, evaluasi dan pelaporan	2 Keg	50.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Keg	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	SD dan SMP di Kabupaten Blora	
01	01	16	081	Penataan kelembagaan sekolah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah sekolah yang dilakukan penataan kelembagaannya	1 Sekolah	Jumlah sekolah yang ditata kelembagaannya	1 Sekolah	100.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Sekolah	100.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	SD dan SMP di Kabupaten Blora	
01	01	16	086	Pemberian Beasiswa Siswa dari Keluarga Kurang Mampu	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah siswa yang menerima bantuan beasiswa	20 Siswa	Jumlah Siswa yang Menerima Beasiswa Siswa dari Keluarga Kurang Mampu	20 Siswa	300.000.000	PAD, DAU, DBH	20 Siswa	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	Siswa SD dan SMP di Kabupaten Blora	
01	01	16	087	Pembangunan Ruang Kelas SD	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	SDN 2 NGAPUS JAPAH, SDN 3 RANDUBLATUNG RANDUBLATUNG, SDN 3 NGLIRON RANDUBLATUNG, SDN 2 NGRAHO KEDUNGTUBAN, SDN 1 TANJUNG KEDUNGTUBAN, SDN 2 BALONGSARI BANJAREJO, SDN 2 SUMBERAGUNG BANJAREJO, SDN 2 KACANGAN TODANAN			Jumlah ruang kelas SD yang dibangun	13 Unit	Jumlah Ruang Kelas SD yang dibangun	13 Unit	330.000.000	Dana Infrastruktur	11 Unit	2.200.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	SDN 2 NGAPUS JAPAH, SDN 3 RANDUBLATUNG RANDUBLATUNG, SDN 3 NGLIRON RANDUBLATUNG, SDN 2 NGRAHO KEDUNGTUBAN, SDN 1 TANJUNG KEDUNGTUBAN, SDN 2 BALONGSARI BANJAREJO, SDN 2 SUMBERAGUNG BANJAREJO, SDN 2 KACANGAN TODANAN	
01	01	16	089	Pembangunan Ruang Perpustakaan SD	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	SDN 2 KALINANAS JAPAH, SDN 3 PILANG RANDUBLATUNG, SDN 1 GEMBYUNGAN RANDUBLATUNG, SDN 2 PLOSOREJO RANDUBLATUNG, SDN 6 WULUNG RANDUBLATUNG, SDN 1 JERUK RANDUBLATUNG, SDN 1 TANGGEL RANDUBLATUNG, SDN 2 NGLIRON RANDUBLATUNG, SDN P			Jumlah ruang perpustakaan SD yang dibangun	39 Unit	Jumlah Ruang Perpustakaan SD yang dibangun	39 Unit	3.060.000.000	BANKEU PROV	39 Unit	7.800.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	SDN 2 KALINANAS JAPAH, SDN 3 PILANG RANDUBLATUNG, SDN 1 GEMBYUNGAN RANDUBLATUNG, SDN 2 PLOSOREJO RANDUBLATUNG, SDN 6 WULUNG RANDUBLATUNG, SDN 1 JERUK RANDUBLATUNG, SDN 1 TANGGEL RANDUBLATUNG, SDN 2 NGLIRON RANDUBLATUNG, SDN P	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif(Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	01	16	090	Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	SMPN 2 Sambong, SMPN 2 Jiken			Jumlah ruang perpustakaan SMP yang dibangun	2 Unit	Jumlah ruang perpustakaan SMP yang dibangun	2 Unit	720.000.000	BANKEU PROV	2 Unit	720.000.000	DINAS PENDIDIKAN	3	SMPN 2 Sambong, SMPN 2 Jiken	
01	01	16	094	Pembangunan Ruang Laboratorium, Praktikum dan Keterampilan SMP	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	SMPN 7 Blora (Lab. IPA), SMPN 1 Banjarejo dan SMPN 3 Blora (Lab. Komp.)			Jumlah ruang laboratorium, praktikum dan ketrampilan SMP yang dibangun	3 Unit	Jumlah Laboratorium IPA dan Laboratorium Komputer SMP yang dibangun	3 Unit	600.000.000	Dana Infrastruktur	3 Unit	950.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	SMPN 7 Blora (Lab. IPA), SMPN 1 Banjarejo dan SMPN 3 Blora (Lab. Komp.)	
01	01	16	095	Pembangunan Ruang Ibadah SD	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	SDN 2 BITING SAMBONG, SDN 2 JEPANGREJO BLORA, SDN 1 PELEM BLORA, SDN 2 PELEM BLORA, SDN 2 LEDOK SAMBONG			Jumlah ruang ibadah SD yang dibangun	5 Unit	Jumlah Ruang Ibadah SD yang dibangun	5 Unit	300.000.000	Dana Infrastruktur	3 Unit	600.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	SDN 2 BITING SAMBONG, SDN 2 JEPANGREJO BLORA, SDN 1 PELEM BLORA, SDN 2 PELEM BLORA, SDN 2 LEDOK SAMBONG	
01	01	16	103	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi SD	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	SDN 1 KUNDURAN KUNDURAN, SDN 3 KUNDURAN KUNDURAN, SDN 1 NGRONGGAH KUNDURAN, SDN MURAHARJO KUNDURAN, SDN 2 KLOKAH KUNDURAN, SDN BALONG KUNDURAN, SDN 2 TAWANGREJO KUNDURAN, SDN BLUMBANGREJO KUNDURAN, SDN 3 BOTORECO KUNDURAN, SD			Jumlah sarana air bersih dan sanitasi SD yang dibangun	82 Unit	Jumlah Sarana Air Bersih dan Sanitasi SD yang dibangun	82 Unit	1.000.000.000	Dana Infrastruktur	82 Unit	1.230.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	SDN 1 KUNDURAN KUNDURAN, SDN 3 KUNDURAN KUNDURAN, SDN 1 NGRONGGAH KUNDURAN, SDN MURAHARJO KUNDURAN, SDN 2 KLOKAH KUNDURAN, SDN BALONG KUNDURAN, SDN 2 TAWANGREJO KUNDURAN, SDN BLUMBANGREJO KUNDURAN, SDN 3 BOTORECO KUNDURAN, SD	
01	01	16	110	Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga dan Bermain SMP	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	SMPN 4 Blora, SMPN 1 Bogorejo dan SMPN 1 Tunjungan			Jumlah sarpras olahraga dan bermain SMP yang dibangun	3 Unit	Jumlah Sarana Prasarana Olahraga dan Bermain SMP yang dibangun	3 Unit	200.000.000	Dana Infrastruktur	3 Unit	900.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	SMP di Kabupaten Blora	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif(Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	01	16	111	Pembangunan Pagar, Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SD	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	SDN 1 PURWOSARI, SDN 1 TEGALGUNUNG, SDN 1 GEMPOLREJO TUNJUNGAN, SDN 1 TEMUREJO BLORA, SDN 2 MULYOREJO, SDN 1 PURWOREJO BLORA, SDN 2 KUNDEN, SDN 3 BRABOWAN, SDN 4 NGRAHO, SDN 2 TAMBAKROMO, SDN 2 SUMBERJO, SDN 3 SUKOREJO, SDN 3			Jumlah pagar, taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir SD yang dibangun	45 Unit	Jumlah Pagar, Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SD yang dibangun	45 Unit	2.650.000.000	Dana Infrastruktur	34 Unit	4.200.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	SDN 1 PURWOSARI, SDN 1 TEGALGUNUNG, SDN 1 GEMPOLREJO TUNJUNGAN, SDN 1 TEMUREJO BLORA, SDN 2 MULYOREJO, SDN 1 PURWOREJO BLORA, SDN 2 KUNDEN, SDN 3 BRABOWAN, SDN 4 NGRAHO, SDN 2 TAMBAKROMO, SDN 2 SUMBERJO, SDN 3 SUKOREJO, SDN 3	
					Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	SDN 1 Purwosari Blora, SDN 1 Jepangrejo, SDN 1 Tegalgunung Blora			Jumlah pagar, taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir SD yang dibangun	3 Unit	Jumlah Pagar, Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SD yang dibangun	3 Unit	600.000.000	BANKEU PROV	3 Unit	600.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	SDN 1 PURWOSARI, SDN 1 TEGALGUNUNG, SDN 1 GEMPOLREJO TUNJUNGAN, SDN 1 TEMUREJO BLORA, SDN 2 MULYOREJO, SDN 1 PURWOREJO BLORA, SDN 2 KUNDEN, SDN 3 BRABOWAN, SDN 4 NGRAHO, SDN 2 TAMBAKROMO, SDN 2 SUMBERJO, SDN 3 SUKOREJO, SDN 3	
01	01	16	112	Pembangunan Pagar, Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SMP	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	SMPN 4 Blora, SMPN 2 Randublatung, SMPN 2 Jiken, SMPN 1 Sambong, SMPN 2 Jepon, SMPN 3 TUNJUNGAN, SMPN 7 BLORA, SMPN 3 TODANAN SATAP, SMPN 2 JEPON, SMPN 3 JATI, SMPN 2 JIKEN, SMPN 1 TODANAN, SMPN 4 CEPU, SMPN 2 JATI, SMPN 1 JA			Jumlah pagar, taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir SMP yang dibangun	15 Unit	Jumlah Pagar, Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SMP yang dibangun	15 Unit	1.450.000.000	Dana Infrastruktur	5 Unit	900.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	SMPN 4 Blora, SMPN 2 Randublatung, SMPN 2 Jiken, SMPN 1 Sambong, SMPN 2 Jepon, SMPN 3 TUNJUNGAN, SMPN 7 BLORA, SMPN 3 TODANAN SATAP, SMPN 2 JEPON, SMPN 3 JATI, SMPN 2 JIKEN, SMPN 1 TODANAN, SMPN 4 CEPU, SMPN 2 JATI, SMPN 1 JA	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif(Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	01	16	115	Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa SD	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	SDN 1 SELOGENDER JATI, SDN 2 GABUSAN JATI, SDN 1 KALISARI RANDUBLATUNG, SDN 2 BEKUTUK RANDUBLATUNG, SDN 2 JERUK RANDUBLATUNG, SDN 2 GETAS KRADENAN, SDN 6 SUMBER KRADENAN, SDN 2 SOGO KEDUNTUBAN, SDN 4 BALUN CEPU, SDN GADON CEP			Jumlah SD penerima buku perpustakaan	41 Sekolah	Jumlah sekolah penerima buku perpustakaan SD	41 Sekolah	700.000.000	BANKEU PROV	41 Sekolah	700.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	SDN 1 SELOGENDER JATI, SDN 2 GABUSAN JATI, SDN 1 KALISARI RANDUBLATUNG, SDN 2 BEKUTUK RANDUBLATUNG, SDN 2 JERUK RANDUBLATUNG, SDN 2 GETAS KRADENAN, SDN 6 SUMBER KRADENAN, SDN 2 SOGO KEDUNTUBAN, SDN 4 BALUN CEPU, SDN GADON CEP	
01	01	16	119	Pengadaan Alat Praktik, Peraga dan Pembelajaran Siswa SD	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah pengadaan alat praktik, peraga dan pembelajaran siswa SD	11 Sekolah	Jumlah pengadaan alat praktik, peraga dan pembelajaran siswa SD	11 Sekolah	1.300.000.000	BANKEU PROV	11 Sekolah	1.300.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	SDN 1 TODANAN TODANAN, SDN 2 JETIS BLORA, SDN KEDUNGJENAR BLORA, SDN KAUMAN BLORA, SDN 5 KARANGJATI, SDN 1 TAMBAKSARI BLORA, SDN 1 TUNJUNGAN TUNJUNGAN, SDN DALANGAN TODANAN, SDN 1 BANJAREJO BANJAREJO, SDN 1 LEDOK SAMBONG, SDN	
					Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	SDN 1 TODANAN TODANAN, SDN 2 JETIS BLORA, SDN KEDUNGJENAR BLORA, SDN KAUMAN BLORA, SDN 5 KARANGJATI, SDN 1 TAMBAKSARI BLORA, SDN 1 TUNJUNGAN TUNJUNGAN, SDN DALANGAN TODANAN, SDN 1 BANJAREJO BANJAREJO, SDN 1 LEDOK SAMBONG, SDN			Jumlah pengadaan alat praktik, peraga dan pembelajaran siswa SD	11 Sekolah	Jumlah sekolah penerima Alat Praktik, Peraga dan Pembelajaran Siswa SD	11 Sekolah	25.000.000	PAD, DAU, DBH	10 Sekolah	750.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	SDN 1 TODANAN TODANAN, SDN 2 JETIS BLORA, SDN KEDUNGJENAR BLORA, SDN KAUMAN BLORA, SDN 5 KARANGJATI, SDN 1 TAMBAKSARI BLORA, SDN 1 TUNJUNGAN TUNJUNGAN, SDN DALANGAN TODANAN, SDN 1 BANJAREJO BANJAREJO, SDN 1 LEDOK SAMBONG, SDN	
01	01	16	120	Pengadaan Alat Praktik, Peraga dan Pembelajaran Siswa SMP	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	SMP Negeri se Kabupaten Blora			Jumlah pengadaan alat praktik, peraga dan pembelajaran siswa SMP	2000 Unit	Jumlah Alat Praktik, Peraga dan Pembelajaran Siswa SMP	2000 Unit	7.025.000.000	BANKEU PROV	2000 Unit	6.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN	3	SMP Negeri di Kabupaten Blora	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif(Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	SMP Negeri se Kabupaten Blora			Jumlah pengadaan alat praktik, peraga dan pembelajaran siswa SMP	2000 Unit	Jumlah Alat Praktik, Peraga dan Pembelajaran Siswa SMP	2000 Unit	6.094.577.323	PAD, DAU, DBH	2000 Unit	5.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	SMP Negeri di Kabupaten Blora	
01	01	16	122	Pengadaan Mebeler SMP	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	SMPN 2 Blora, SMPN 5 Blora, SMPN 2 Cepu, SMPN 3 Cepu dan SMPN 2 Todanan			Jumlah sekolah penerima pengadaan mebeler SMP	8 Sekolah	Jumlah sekolah penerima mebeler SMP	8 Sekolah	200.000.000	PAD, DAU, DBH	8 Sekolah	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	SMPN 2 Blora, SMPN 5 Blora, SMPN 1 Cepu, SMPN 3 Cepu, SMPN 2 Todanan	
					Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	SMPN 2 Blora, SMPN 5 Blora, SMPN 1 Cepu, SMPN 3 Cepu, SMPN 2 Todanan			Jumlah sekolah penerima pengadaan mebeler SMP	5 Sekolah	Jumlah sekolah penerima pengadaan mebeler SMP	5 Sekolah	200.000.000	BANKEU PROV	5 Sekolah	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	SMPN 2 Blora, SMPN 5 Blora, SMPN 1 Cepu, SMPN 3 Cepu, SMPN 2 Todanan	
01	01	16	127	Rehabilitasi Ruang Kelas SD	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	SDN 2 JAGONG KUNDURAN, SDN 2 PENGKOLREJO JAPAH, SDN KROCOK JAPAH, SDN 1 PADAAN JAPAH, SDN 3 PENGKOLREJO JAPAH, SDN 3 SUMBERJO RANDUBLATUNG, SDN 1 BERAN BLORA, SDN 3 SIDOMULYO, SDN 3 BULUROTO, SDN 3 NGLIRON			Jumlah ruang kelas SD yang direhabilitasi	155 Unit	Jumlah Ruang Kelas SD yang direhabilitasi	155 Unit	1.190.000.000	Dana Infrastruktur	148 Unit	10.680.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	SD di Kabupaten Blora	
					Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	SDN 3 Blungun Jepon, SDN 4 Sumber Kradenan, SDN 3 Pilang Randublatung, SDN Karanganjar Bogorejo, SDN 2 Ngilen Kunduran, SDN Ledok Todanan, SDN 1 Padaan Japah, SDN Kendayaan Ngawen, SD 2 Adirejo Tunjungan, SDN 3 Kamolan Blora,			Jumlah ruang kelas SD yang direhabilitasi	155 Unit	Jumlah ruang kelas SD yang direhabilitasi	155 Unit	1.700.000.000	BANKEU PROV	155 Unit	1.700.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	SD di Kabupaten Blora	
01	01	16	128	Rehabilitasi Ruang Kelas SMP	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	SMPN 2 Blora, SMPN 7 Blora, SMPN 3 Cepu, SMPN 3 Doplang, SMPN 1 Kunduran, SMPN 1 Menden, SMPN 1 Randublatung, SMPN 2 Sambong, SMP Katholik Randublatung			Jumlah ruang kelas SMP yang direhabilitasi	27 Unit	Jumlah Ruang Kelas SMP Rusak Sedang/Berat yang direhabilitasi	27 Unit	600.000.000	Dana Infrastruktur	27 Unit	2.041.200.000	DINAS PENDIDIKAN	1	SMP di Kabupaten Blora	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif(Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	SMPN 2 Blora, SMPN 3 Cepu, SMPN 3 Doplang, SMPN 1 Kunduran, SMPN 1 Menden, SMPN 1 Randublatung			Jumlah ruang kelas SMP yang direhabilitasi	27 Unit	Jumlah ruang kelas SMP yang direhabilitasi	27 Unit	1.020.000.000	BANKEU PROV	27 Unit	1.020.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	SMP di Kabupaten Blora	
01	01	16	130	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SMP	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	SMPN 5 Blora			Jumlah ruang perpustakaan SMP yang direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Ruang Perpustakaan SMP yang direhabilitasi	1 Unit	120.000.000	BANKEU PROV	1 Unit	120.000.000	DINAS PENDIDIKAN	3	SMPN 7 Blora, SMPN 3 Cepu, SMPN 2 Jiken, SMPN 2 Sambong, SMPN 5 BLORA	
					Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	SMPN 7 Blora, SMPN 3 Cepu, SMPN 2 Jiken, SMPN 2 Sambong, SMPN 5 BLORA			Jumlah ruang perpustakaan SMP yang direhabilitasi	5 Unit	Jumlah Ruang Perpustakaan SMP yang direhabilitasi	5 Unit	150.000.000	Dana Infrastruktur	4 Unit	700.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	SMPN 7 Blora, SMPN 3 Cepu, SMPN 2 Jiken, SMPN 2 Sambong, SMPN 5 BLORA	
01	01	16	134	Rehabilitasi Ruang Laboratorium, Praktikum dan Keterampilan SMP	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	SMPN 3 Cepu dan SMPN 3 Randublatung (lab. IPA), SMPN 1 Cepu, SMPN 2 Doplang, SMPN 2 Jepon, SMPN 3 Randublatung (R. Ketrampilan dan Kesenian), SMPN 2 Blora (R. Lab. Komp.)			Jumlah ruang laboratorium, praktikum dan ketrampilan SMP direhabilitasi	7 Unit	Jumlah Ruang Laboratorium, Praktikum dan Keterampilan SMP yang direhabilitasi	7 Unit	700.000.000	Dana Infrastruktur	7 Unit	1.020.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	SMPN 3 Cepu dan SMPN 3 Randublatung (lab. IPA), SMPN 1 Cepu, SMPN 2 Doplang, SMPN 2 Jepon, SMPN 3 Randublatung (R. Ketrampilan dan Kesenian), SMPN 2 Blora (R. Lab. Komp.)	
01	01	16	143	Rehabilitasi Sarana Air Bersih dan Sanitasi SD	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	SDN 2 NGAWEN NGAWEN, SDN SRIGADING NGAWEN, SDN KENDAYAAN NGAWEN, SDN 2 GONDANG NGAWEN, SDN 2 SARIMULYO NGAWEN, SDN 1 TUTUP TUNJUNGAN, SDN 1 GEMPOLREJO TUNJUNGAN, SDN 2 SUMBER KRADENAN, SDN 2 CABEAN CEPU, SDN 1 KARANGBOYO CEPU			Jumlah sarana air bersih dan sanitasi SD yang direhabilitasi	43 Unit	Jumlah Sarana Air Bersih dan Sanitasi SD yang direhabilitasi	43 Unit	400.000.000	BANKEU PROV	43 Unit	430.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	SD di Kabupaten Blora	
01	01	16	151	Rehabilitasi Pagar, Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SD	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	SDN 2 TURIREJO JEPON, SDN MERNUNG			Jumlah pagar, taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir SD yang di rehabilitasi	2 Unit	Jumlah Pagar, Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SD yang direhabilitasi	2 Unit	100.000.000	Dana Infrastruktur	1 Unit	60.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	SD di Kabupaten Blora	
01	01	16	152	Rehabilitasi Pagar, Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SMP	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	SMPN 2 Kedungtuban, SMPN 1 Jiken, SMPN 2 Tunjungan, SMPN 3 Tunjungan, SMPN 1 JATI			Jumlah pagar, taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir SMP yang di rehabilitasi	6 Unit	Jumlah pagar, taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir SMP yang direhabilitasi	6 Sekolah	50.000.000	Dana Infrastruktur	4 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN	1	SMP di Kabupaten Blora	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif(Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	01	16	153	Pengembangan Data dan Informasi Sarana dan Prasarana SD	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah aplikasi data dan informasi sarpras SD yang dihasilkan	1 Aplikasi	Jumlah aplikasi data dan informasi sarpras SD yang dihasilkan	1 Aplikasi	200.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Aplikasi	0	DINAS PENDIDIKAN	1	SD di Kabupaten Blora	
01	01	16	154	Pengembangan Data dan Informasi Sarana dan Prasarana SMP	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah aplikasi data dan informasi sarpras SMP yang dihasilkan	1 Aplikasi	Jumlah aplikasi data dan informasi sarpras SMP yang dihasilkan	1 Aplikasi	100.000.000	PAD, DAU, DBH	0 Aplikasi	0	DINAS PENDIDIKAN	1	SMP di Kabupaten Blora	
01	01	16	155	Pengelolaan Data dan Pelaporan Aset/Barang Milik Daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah dokumen data dan pelaporan aset/barang milik daerah yang dihasilkan	1 Dokumen	Jumlah dokumen data dan pelaporan aset/barang milik daerah yang dihasilkan	1 Dokumen	873.572.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	873.572.000	DINAS PENDIDIKAN	1	Dinas Pendidikan Kabupaten Blora	
01	01	16	156	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sarpras	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah sekolah yang di monev	389 Sekolah	Jumlah sekolah yang di monev	389 Sekolah	100.000.000	PAD, DAU, DBH	0 Sekolah	0	DINAS PENDIDIKAN	1	Sekolah di Kabupaten Blora	
01	01	16	157	Pembinaan Sekolah Adiwiyata	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah sekolah yang diberikan pembinaan Adiwiyata	30 Sekolah	Jumlah sekolah yang diberikan pembinaan Adiwiyata	30 Sekolah	200.000.000	PAD, DAU, DBH	30 Sekolah	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	Sekolah di Kabupaten Blora	
01	01	16	158	Penyelenggaraan Ujian Sekolah Tingkat SD	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah sekolah penyelenggara ujian	600 Sekolah	Jumlah sekolah penyelenggara ujian	600 Sekolah	900.000.000	PAD, DAU, DBH	0 Sekolah	0	DINAS PENDIDIKAN	1	SD se Kabupaten Blora	
01	01	16	159	Penyelenggaraan Ujian Sekolah Tingkat SMP	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah sekolah penyelenggara ujian	145 Sekolah	Jumlah sekolah penyelenggara ujian	145 Sekolah	500.000.000	PAD, DAU, DBH	145 Sekolah	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	SMP se Kabupaten Blora	
01	01	16	160	Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi SD	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah siswa SD yang dilatih kompetensinya	12800 Siswa	Jumlah siswa SD yang dilatih kompetensinya	12800 Siswa	500.000.000	PAD, DAU, DBH	0 Siswa	0	DINAS PENDIDIKAN	1	Siswa SD di Kabupaten Blora	
					Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah siswa SD yang dilatih kompetensinya	12800 Siswa	Jumlah siswa SD yang dilatih kompetensinya	12800 Siswa	50.000.000	BANKEU PROV	12800 Siswa	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	Siswa SD di Kabupaten Blora	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif(Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	01	16	161	Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi SMP	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah siswa SMP yang dilatih kompetensinya	150 Siswa	Jumlah siswa SMP yang dilatih kompetensinya	150 Siswa	200.000.000	PAD, DAU, DBH	150 Siswa	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	Siswa SMP di Kabupaten Blora	
01	01	16	162	Pelatihan Penyusunan Kurikulum SD	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah peserta pelatihan penyusunan kurikulum SD	200 Orang	Jumlah peserta pelatihan penyusunan kurikulum SD	200 Orang	100.000.000	PAD, DAU, DBH	0 Orang	0	DINAS PENDIDIKAN	1	SD se Kabupaten Blora	
					Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah peserta pelatihan penyusunan kurikulum SD	200 Orang	Jumlah peserta pelatihan penyusunan kurikulum SD	200 Orang	235.000.000	BANKEU PROV	200 Orang	235.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	SD se Kabupaten Blora	
01	01	16	163	Pelatihan Penyusunan Kurikulum SMP	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah peserta pelatihan penyusunan kurikulum SMP	400 Orang	Jumlah peserta pelatihan penyusunan kurikulum SMP	400 Orang	100.000.000	PAD, DAU, DBH	400 Orang	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	SMP se-Kabupaten Blora	
01	01	16	164	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa SD	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah lomba minat bakat dan kreativitas SD yang diselenggarakan	10 Lomba	Jumlah lomba minat bakat dan kreativitas SD yang diselenggarakan	10 Lomba	500.000.000	PAD, DAU, DBH	0 Lomba	0	DINAS PENDIDIKAN	1	Siswa SD di Kabupaten Blora	
01	01	16	165	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa SMP	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah lomba minat bakat dan kreativitas SMP yang diselenggarakan	7 Lomba	Jumlah lomba minat bakat dan kreativitas SMP yang diselenggarakan	7 Lomba	500.000.000	PAD, DAU, DBH	7 Lomba	600.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	Siswa SMP di Kabupaten Blora	
01	01	16	166	Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi SD	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah guru SD yang mendapatkan pelatihan metode pembelajaran menggunakan TIK	100 Orang	Mewujudkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat mengekspresikan sumber belajar secara efektif dan efisien	100 Orang	50.000.000	PAD, DAU, DBH	0 Orang	0	DINAS PENDIDIKAN	1	Guru SD di Kabupaten Blora	
01	01	16	167	Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi SMP	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah guru SMP yang mendapatkan pelatihan metode pembelajaran menggunakan TIK	145 Orang	Jumlah Proktor dan Teknisi Sekolah dalam Pelaksanaan UNBK yang dilatih	145 Orang	100.000.000	PAD, DAU, DBH	145 Orang	400.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	Pendidik SMP di Kabupaten Blora	
01	01	16	168	Pemberian Tambahan Makanan Bergizi Anak Sekolah Dasar	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah sekolah penerima bantuan makanan bergizi	5 Sekolah	Jumlah sekolah yang menerima tambahan makanan bergizi	5 Sekolah	1.000.000.000	PAD, DAU, DBH	10 Sekolah	2.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN	3	Sekolah di Kabupaten Blora	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif(Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	01	16	169	Penyelenggaraan Fasilitasi Kerjasama Pendidikan Dasar	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah kerjasama pendidikan dasar yang dilaksanakan	1 Kerja Sama	Jumlah kerjasama pendidikan dasar yang dilaksanakan	1 Keg	200.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Keg	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN	3	Sekolah di Kabupaten Blora	
01	01	16	170	Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Pendidikan Dasar	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah kegiatan rapat koordinasi penilaian kinerja pendidikan dasar yang diselenggarakan	1 Keg	Jumlah kegiatan rapat koordinasi penilaian kinerja pendidikan dasar	1 Keg	400.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Keg	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN	3	Sekolah di Kabupaten Blora	
01	01	16	171	Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Dasar	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah SIM pendidikan dasar yang dihasilkan	3 Sistem	Jumlah sistem informasi manajemen penerimaan peserta didik baru pendidikan dasar yang dihasilkan	3 Unit	500.000.000	PAD, DAU, DBH	3 Sistem	350.000.000	DINAS PENDIDIKAN	3	SD dan SMP di Kabupaten Blora	
01	01	16	172	Pelaksanaan Pendataan SPM Pendidikan Dasar	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah dokumen SPM Pendidikan Dasar yang dihasilkan	1 Dokumen	Jumlah dokumen pendataan SPM pendidikan dasar	1 Dokumen	150.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	100.000.000	DINAS PENDIDIKAN	3	SD dan SMP di Kabupaten Blora	
01	01	16	173	Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, Lokakarya, dan Diskusi Ilmiah Pendidikan Dasar	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah kegiatan, pelatihan, seminar, lokakarya dan diskusi pendidikan dasar yang dilaksanakan	4 Keg	Jumlah pelatihan, seminar, lokakarya dan diskusi ilmiah pendidikan dasar yang dilaksanakan	4 Keg	400.000.000	PAD, DAU, DBH	4 Keg	400.000.000	DINAS PENDIDIKAN	3	ASN di SD dan SMP se-Kabupaten Blora	
01	01	16	174	Penyelenggaraan Fasilitasi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Pendidikan Dasar	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	2 Keg	Jumlah fasilitasi dewan pendidikan dan komite sekolah pendidikan dasar yang dilaksanakan	2 Keg	150.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Keg	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN	3	Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Pendidikan Dasar di Kabupaten Blora	
01	01	16	175	Pengadaan Sarana dan Prasarana SD (DAK)	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	SD Negeri di Kabupaten Blora			Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	493 Unit	Terpenuhinya Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan SD	493 Unit	27.263.030.000	DAK FISIK	0 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN	1	SD Negeri di Kabupaten Blora	
01	01	16	176	Pengadaan Sarana dan Prasarana SMP (DAK)	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	SMP Negeri dan Swasta di Kabupaten Blora			Jumlah sarana dan prasarana SMP yang diadakan	213 Unit	Terpenuhinya Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP	213 Unit	24.643.150.000	DAK FISIK	0	0	DINAS PENDIDIKAN	1	SMP Negeri dan Swasta di Kabupaten Blora	
01	01	16	177	Penyediaan BOS untuk SD dan SMP	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah sekolah yang mendapatkan bantuan operasional	693 Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapatkan bantuan operasional	693 Sekolah	82.490.294.677	BOS	693 Sekolah	83.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN	3	SD dan SMP se Kabupaten Blora	
01	01	18		PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL										3.798.000.000			4.849.000.000				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif(Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	01	18	001	Pemberdayaan tenaga pendidikan non formal	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah PTK-PNF yang mengikuti workshop/sosialisasi/diklat luar daerah	50 Orang	Jumlah PTK PNF yang mengikuti workshop/sosialisasi/diklat luar daerah	50 Orang	40.000.000	PAD, DAU, DBH	50 Orang	80.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	Lembaga pendidikan non formal di Kabupaten Blora	
01	01	18	004	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah PTK-PNF yang mengikuti workshop penyusunan kisi-Kisi dan soal ujian akhir keaksaraan dasar dan keaksaran lanjutan dan Jumlah PTK-PNF yang mengikuti Lomba Keberaksaraan	150 Kelompok	Jumlah PTK PNF yang mengikuti workshop penyusunan kisi-kisi dan soal ujian akhir keaksaraan dasar dan keaksaraan lanjutan dan jumlah PTK PNF yang mengikuti lomba keaksaraan	150 Kelompok	75.000.000	PAD, DAU, DBH	150 Kelompok	75.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	Lembaga pendidikan non formal di Kabupaten Blora	
01	01	18	005	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah peserta pelatihan pendidikan kecakapan hidup	200 Orang	Jumlah peserta pelatihan pendidikan kecakapan hidup	200 Orang	150.000.000	PAD, DAU, DBH	200 Orang	810.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	Lembaga pendidikan non formal di Kabupaten Blora	
01	01	18	006	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah lembaga kursus dan pelatihan penerima bantuan sarpras	10 Lembaga	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan penerima bantuan sarpras	10 Lembaga	300.000.000	BANKEU PROV	10 Lembaga	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	Lembaga pendidikan non formal di Kabupaten Blora	
					Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah lembaga kursus dan pelatihan penerima bantuan sarpras	8 Lembaga	Jumlah penerima bantuan sarana dan prasarana bagi satuan pendidikan non formal	8 Lembaga	75.000.000	PAD, DAU, DBH	8 Lembaga	220.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	Lembaga pendidikan non formal di Kabupaten Blora	
01	01	18	008	Pengembangan kebijakan pendidikan non formal	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Program PNF	1 Keg	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program pendidikan non formal	1 Keg	70.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Keg	80.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	LKP dan PKBM di Kabupaten Blora	
01	01	18	009	Pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan model pembelajaran pendidikan non formal	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah dokumen kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal yang dihasilkan	1 Dokumen	Jumlah dokumen kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Paket A, Paket B dan Paket C	1 Dokumen	30.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	60.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	LKP dan PKBM di Kabupaten Blora	
01	01	18	011	Perencanaan dan penyusunan program pendidikan non formal	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah dokumen kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal yang dihasilkan	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan dan program pendidikan non formal yang tersusun	1 Dokumen	40.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	40.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	LKP dan PKBM di Kabupaten Blora	
01	01	18	012	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah kegiatan publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal	1 Keg	Jumlah kegiatan publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal	1 Keg	50.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Keg	175.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	LKP dan PKBM di Kabupaten Blora	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif(Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	01	18	013	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah lembaga non formal dan informal yang menjadi sasaran monitoring dan evaluasi	50 Lembaga	Jumlah lembaga Pendidikan Non Formal yang menjadi sasaran monitoring dan evaluasi	50 Lembaga	35.000.000	PAD, DAU, DBH	50 Lembaga	60.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	LKP dan PKBM di Kabupaten Blora	
01	01	18	014	Penyelenggaraan Paket A	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah warga belajar peserta Paket A setara SD	100 Orang	Jumlah warga belajar peserta Paket A setara SD	100 Orang	97.000.000	BANKEU PROV	100 Orang	97.000.000	DINAS PENDIDIKAN	3	Warga belajar peserta paket A di Kabupaten Blora	
					Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah warga belajar peserta Paket A setara SD	100 Orang	Jumlah warga belajar peserta Paket A setara SD	100 Orang	97.000.000	PAD, DAU, DBH	100 Orang	97.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	Warga belajar peserta paket A di Kabupaten Blora	
01	01	18	015	Penyelenggaraan Paket B	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah warga belajar peserta Paket B setara SMP	100 Orang	Jumlah warga belajar peserta Paket B setara SMP	100 Orang	140.000.000	BANKEU PROV	100 Orang	140.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	Warga belajar peserta paket B di Kabupaten Blora	
					Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah warga belajar peserta Paket B setara SMP	150 Orang	Jumlah warga belajar peserta paket B setara SMP	150 Orang	210.000.000	PAD, DAU, DBH	150 Orang	210.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	Warga belajar peserta paket B di Kabupaten Blora	
01	01	18	016	Penyelenggaraan Paket C	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah warga belajar peserta Paket C setara SMA	200 Orang	Jumlah warga belajar peserta paket C setara SMA	200 Orang	340.000.000	PAD, DAU, DBH	200 Orang	340.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	Warga belajar peserta paket C di Kabupaten Blora	
					Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah warga belajar peserta Paket C setara SMA	200 Orang	Jumlah warga belajar peserta Paket C setara SMA	200 Orang	340.000.000	BANKEU PROV	200 Orang	340.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	Warga belajar peserta paket C di Kabupaten Blora	
01	01	18	017	Akreditasi Dikmas	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah lembaga pendidikan non formal dan informal yang terakreditasi	40 Lembaga	Jumlah lembaga LKP dan PKBM yang menjadi sasaran akreditasi	40 Lembaga	25.000.000	PAD, DAU, DBH	40 Lembaga	25.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	LKP dan PKBM di Kabupaten Blora	
01	01	18	018	Pengadaan Sarana dan Prasarana SKB (DAK)	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	SKB Blora			Jumlah sarana dan prasarana bagi satuan pendidikan non formal yang disediakan	12 Unit	Terwujudnya pelayanan atas kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan non	112 Unit	1.684.000.000	DAK FISIK	12 Unit	1.700.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	SKB Kabupaten Blora	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif(Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	01	20		PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN										16.954.544.000			24.675.000.000				
01	01	20	001	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah pendidik yang didata dan divalidasi sertifikasinya	150 Orang	Jumlah pendidik yang didata dan divalidasi sertifikasinya	150 Orang	90.000.000	PAD, DAU, DBH	150 Orang	110.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Blora	
01	01	20	002	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah guru yang dinilai kompetensi/angka kreditnya	4510 Orang	Jumlah guru yang dinilai kompetensi/angka kreditnya	4510 Orang	200.000.000	PAD, DAU, DBH	4510 Orang	265.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Blora	
01	01	20	003	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah guru peserta pelatihan asesor Penilaian Kinerja Guru (PKG)	400 Orang	Jumlah guru peserta pelatihan asesor Penilaian Kinerja Guru (PKG)	400 Orang	200.000.000	PAD, DAU, DBH	400 Orang	240.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Blora	
01	01	20	004	Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah KKG yang difasilitasi	122 Kelompok	Jumlah KKG yang difasilitasi	122 Kelompok	100.000.000	PAD, DAU, DBH	122 Kelompok	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Blora	
01	01	20	007	Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah guru peserta program pendidikan lanjutan bagi pendidik ke jenjang S1/D4	175 Orang	Jumlah guru peserta program pendidikan lanjutan bagi pendidik ke jenjang S1/D4	175 Orang	80.000.000	PAD, DAU, DBH	175 Orang	85.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Blora	
01	01	20	008	Peningkatan mutu dan kualitas program pendidik dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah peserta pemilihan PTK berprestasi dan berdedikasi	300 Orang	Jumlah peserta pemilihan PTK berprestasi dan berdedikasi	300 Orang	200.000.000	PAD, DAU, DBH	300 Orang	350.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Blora	
01	01	20	009	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah sistem pendataan dan pemetaan GTK yang dihasilkan	1 Sistem	Jumlah sistem pendataan dan pemetaan GTK yang dihasilkan	1 Sistem	50.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Sistem	125.000.000	DINAS PENDIDIKAN	3	Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Blora	
01	01	20	010	Pengembangan sistem perlindungan dan penghargaan terhadap profesi pendidik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah penanganan kasus kepegawaian PTK	350 Orang	Jumlah penanganan kasus kepegawaian PTK	350 Orang	55.000.000	PAD, DAU, DBH	350 Orang	90.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Blora	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif(Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	01	20	011	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian PTK	2 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian PTK	2 Dokumen	200.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Dokumen	260.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Blora	
01	01	20	013	Peningkatan kesejahteraan GTT dan PTT	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah GTT dan PTT penerima kesra	2810 Orang	Jumlah GTT dan PTT penerima kesra	2810 Orang	15.579.544.000	PAD, DAU, DBH	2810 Orang	22.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	GTT dan PTT di Kabupaten Blora	
01	01	20	014	Evaluasi kinerja kepala sekolah dan pengawas sekolah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	Kabupaten Blora			Jumlah kepala sekolah dan pengawas yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	179 Orang	Jumlah kepala sekolah dan pengawas yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	179 Orang	200.000.000	PAD, DAU, DBH	179 Orang	450.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Kabupaten Blora	
01				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																	
01	01			PENDIDIKAN																	
01	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	1 tahun					0			0				
								Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran													
01	01	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 %	600.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	35.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	Dinas Pendidikan Kab. Blora	
01	01	01	003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	500.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	550.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	Dinas Pendidikan Kab. Blora	
01	01	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100 %	230.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	Dinas Pendidikan Kab. Blora	
01	01	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan	100 %	Jumlah pejabat dan petugas administrasi keuangan dan barang	100 %	600.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	Dinas Pendidikan Kab. Blora	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif(Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	01	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor	100 %	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih dalam 1 tahun	100 %	250.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	Dinas Pendidikan Kab. Blora	
01	01	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	100 %	Jumlah alat tulis kantor dalam 1 tahun	100 %	500.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	225.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	Dinas Pendidikan Kab. Blora	
01	01	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100 %	Jumlah barang cetakan dan penggadaan dalam 1 tahun	100 %	128.500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	140.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	Dinas Pendidikan Kab. Blora	
01	01	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	Jumlah alat listrik dan elektronika yang disediakan dalam 1 tahun	100 %	100.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	100.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	Dinas Pendidikan Kab. Blora	
01	01	01	013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan dalam 1 tahun	100 %	300.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	350.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	Dinas Pendidikan Kab. Blora	
01	01	01	014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga	100 %	Jumlah peralatan rumah tangga kantor yang diadakan dalam 1 tahun	100 %	150.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	Dinas Pendidikan Kab. Blora	
01	01	01	020	Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan dukungan pelayanan perkantoran	100 %	Persentase pemenuhan dukungan pelayanan perkantoran	100 %	975.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	975.000.000	DINAS PENDIDIKAN	3	DInas Pendidikan Kab Blora	
01	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur						0			0				
								Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur													

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif(Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	01	02	005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	52 Unit	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	52 Unit	1.355.000.000	PAD, DAU, DBH	32 Unit	1.355.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	Sarana dan prasarana di lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Blora	
01	01	02	007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan perlengkapan gedung kantor	100 %	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	100 %	300.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	0	DINAS PENDIDIKAN	1	Sarana dan prasarana di lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Blora	
01	01	02	011	Pengadaan instalasi air, listrik, dan telepon	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan instalasi air, listrik dan telepon	100 %	Persentase pemenuhan instalasi air, listrik dan telepon	100 %	500.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN	3	Dinas Pendidikan Kab. Blora	
01	01	02	012	Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor	100 %	Jumlah unit gedung yang dibangun	100 %	500.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	0	DINAS PENDIDIKAN	1	Sarana dan prasarana di lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Blora	
01	01	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	100 %	300.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	325.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	Sarana dan prasarana di lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Blora	
01	01	02	028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	100 %	195.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	210.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	Sarana dan prasarana di Dinas Pendidikan Kab. Blora	
01	01	02	042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Rehab Gedung UPT TK/SD Kecamatan Randublatung, Paving Halaman Kantor UPT TK/SD Kecamatan Japah			Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	2 Unit	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	2 Unit	500.000.000	Dana Infrastruktur	2 Unit	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN	3	Sarana Prasarana di lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Blora	
01	01	02	046	Rehabilitasi sedang/berat instalasi air, listrik, dan telepon	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Persentase instalasi air, listrik, dan telepon dalam kondisi baik	100 %	Persentase instalasi air, listrik, dan telepon dalam kondisi baik	100 %	200.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN	3	Dinas Pendidikan Kab. Blora	
01	01	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR										0			0				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif(Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	01	03	005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi	Kabupaten Blora			Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	140 Unit	Jumlah pakaian khusus yang disediakan	140 Unit	100.000.000	PAD, DAU, DBH	140 Unit	120.000.000	DINAS PENDIDIKAN	1	ASN di Dinas Kabupaten Blora	
TOTAL														223.154.123.000			202.147.227.000				

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KABUPATEN BLORA

DINAS KESEHATAN

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif(Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																	
01	02			KESEHATAN																	
01	02	15		PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN				Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan						875.000.000			20.000.000.000				
01	02	15	001	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	DINAS KESEHATAN			Validitas dan akurasi data aset persediaan kefarmasian dan perbekalan kesehatan di UPTD Puskesmas, UPTD Gudang Farmasi, UPTD Labkesda	100 %	Tersedianya obat dan reagen	120 Jenis	750.000.000	Bagi Hasil Pajak Rokok Daerah	100 %	20.000.000.000	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	15	004	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	DINAS KESEHATAN			Persentase koordinasi dan konsultasi pengelolaan dan pelayanan kefarmasian	100 %	Pengelolaan kefarmasian dan perbekalan kesehatan dan pelayanan kefarmasian di UPT Puskesmas sesuai Standart Pelayanan Minimal Kesehatan	36 Lokasi	125.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	0	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	16		PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	65%					70.458.940.658			87.224.400.000				
								Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	10%												
01	02	16	002	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang meningkat pelayanan UKM dan UKP nya	26 Puskesmas	Ketrampilan petugas jiwa dalam penanganan kegawat daruratan kasus jiwa dipuskesmas meningkat	52 Orang	52.000.000	PAD, DAU, DBH	26 Puskesmas	30.000.000	DINAS KESEHATAN	1		
					Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang meningkat pelayanan UKM dan UKP nya	40 Puskesmas	Terkoordinasikannya Pelaksanaan Penanganan Kasus Kesehatan Jiwa	40 Orang	10.000.000	PAD, DAU, DBH	26 Puskesmas	15.000.000	DINAS KESEHATAN	1		
					Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang meningkat pelayanan UKM dan UKP nya	10 Puskesmas	Terbentuknya Desa siaga Sehat Jiwa	10 Desa	300.000.000	PAD, DAU, DBH	16 Puskesmas	700.000.000	DINAS KESEHATAN	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif(Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang meningkat pelayanan UKM dan UKP nya	26 Puskesmas	Terlaksananya Rujukan Pasien Jiwa	50 Kali	60.000.000	PAD, DAU, DBH	26 Puskesmas	72.000.000	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	16	011	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Dinas Kesehatan			Jumlah program pelayanan kesehatan dan penanggulangan masalah kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas	4 Keg	Jumlah perawat yang mengikuti workshop perkesmas	26 Orang	46.000.000	PAD, DAU, DBH	4 Keg	46.000.000	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	16	012	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Dinas Kesehatan			Jumlah Tenaga Non PNS yang melaksanakan pelayanan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan	177 Orang	Jumlah Tenaga non PNS di Puskesmas dan DKK	177	3.100.000.000	Bagi Hasil Pajak Rokok Daerah	200 Orang	3.200.000.000	DINAS KESEHATAN	1		
					Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Dinas Kesehatan			Jumlah UPTD yang mendapatkan biaya operasional dan pemeliharaan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat	26 UPTD	Terlaksananya bimbingan teknis penyusunan PTP & PKP	26 Puskesmas	110.000.000	Bagi Hasil Pajak Rokok Daerah	26 Orang	110.000.000	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	16	013	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Dinas Kesehatan			Jumlah desa/kelurahan yang diawasi kualitas air minum, air bersih dan jamban keluarga	30 Desa/Kelurahan	Terwujudnya kegiatan pengawasan kualitas air minum, air bersih dan jamban keluarga	100 %	320.000.000	PAD, DAU, DBH	30 Desa/Kelurahan	350.000.000	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	16	014	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk				Jumlah dokumen monev yang terseusun	1 Dokumen	Tersusunnya hasil kegiatan dan dapat diketahui permasalahan sedini mungkin untuk menyususn langkah langkah tindak lanjut guna peningkatan kinerja DKK	50 Buku	90.000.000	PAD, DAU, DBH	6 Dokumen	90.000.000	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	16	017	Pelayanan Kesehatan gratis di puskesmas	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Dinas Kesehatan Kab. Blora			Jumlah puskesmas yang melayanai masyarakat miskin non penjaminan kesehatan	26 Puskesmas	Terbayarnya jasa pelayanan kesehatan non penjaminan	1 Tahun	1.000.000.000	PAD, DAU, DBH	26 Puskesmas	1.000.000.000	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	16	047	Penyediaan operasional dan pemeliharaan Laboratorium Kesehatan	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	UPT Laboratorium Kabupaten Blora			Prosentase biaya operasional UPT Labkesda yang dapat disediakan	100 %	Meningkatnya Mutu dari Pelayanan Kesehatan Dasar UPT Laboratorium Kesehatan	90 %	400.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	450.000.000	DINAS KESEHATAN	1	Masyarakat Kabupaten Blora	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif(Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	02	16	048	Penyediaan operasional dan pemeliharaan Gudang Farmasi	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Dinas Kesehatan Kab. Blora			Prosentase biaya opeasional UPT GFK yang tersedia	100 %	Persentase puskesmas yang mendapatkan obat dan bahan medis habis pakai yang disitribusikan, persentase ketersediaan obat sesuai usulan puskesmas, persentase laporan persediaan obat sesuai permintaan dinas, persentase obat dan bahan medis habis pakai layak	100 %	200.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	200.000.000	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	16	101	Pelayanan Kesehatan Tradisional	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Kecamatan			Jumlah kecamatan yang melaksnakan asuhan mandiri kesehatan tradisional bagi masyarakat	8 Kec	Jumlah kecamatan yang mendapatkan sosialisasi asuhan mandiri kesehatan tradisional	8 Kec	81.000.000	PAD, DAU, DBH	8 Kec	81.000.000	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	16	103	Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah Dan Remaja	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	DINAS KESEHATAN			Jumlah anak usia sekolah dan remaja yang mendapat pelayanan Kesehatan Peduli Remaja dan penanganan Kekerasan Terhadap Anak	830 Anak	TERLAKSANANYA PEMBINAAN / KONSULTASI / EVALUASI PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN ANAK SEKOLAH DAN REMAJA, TERLAKSANANYA PERTEMUAN ORIENTASI PITUTUR PAES MANTEN & KOORDINASI PROGRAM KESEHATAN CALON PENGANTIN, TERLAKSANANYA REVITALISASI KONSELOR SEBAYA	5 Keg	110.000.000	PAD, DAU, DBH	830 Anak	150.000.000	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	16	104	Kegiatan penyediaan biaya pendampingan pelayanan kesehatan	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Dinas Kesehatan Kab. Blora			Prosentase Puskesmas yang Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) dengan status hijau	100 %	Terlaksananya pertemuan koordinasi KBK Puskesmas, terlaksananya pertemuan evaluasi KBK Puskesmas	4 Kali	100.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	100.000.000	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	16	105	Upaya Kesehatan olahraga	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Dinas Kesehatan			Jumlah pegawai di Pemkab Blora yang diperiksa status kebugarannya	550 Orang	Terlaksananya pemeriksaan kesehatan bagi pegawai Dinas Kesehatan Kab. Blora dan OPD lain	550 Orang	85.000.000	PAD, DAU, DBH	550 Orang	100.000.000	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	16	106	Pembinaan, pengelolaan dan pengawasan fasilitas kesehatan rujukan di kabupaten	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk				Jumlah sarana pelayanan yang melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan kegawatdaruratan sehari-hari/bencana	1 Rumah Sakit	Jumlah perawat yang melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan kegawatdaruratan sehari-hari/bencana	9 Orang	280.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Rumah Sakit	280.000.000	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	16	107	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar kesehatan (DAK)	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Puskesmas			Jumlah puskesmas yang sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang meningkat kondisinya	8 Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun	8 Unit	33.703.800.000	DAK FISIK	5 Puskesmas	20.000.000.000	DINAS KESEHATAN	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif(Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	02	16	108	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan farmasi (DAK)	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	UPT Gudang Farmasi			Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan	100 %	Jumlah Obat yang disediakan untuk pelayanan kesehatan dasar	114 Jenis	8.000.000.000	DAK FISIK	100 %	8.000.000.000	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	16	109	Manajemen BOK Kabupaten	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk				Prosentase SPM yang sesuai target	100 %	prosentase	100 %	834.698.000	DAK NON FISIK	100 %	0	DINAS KESEHATAN	1	26 Puskesmas	
01	02	16	110	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Banjarejo	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Puskesmas Banjarejo			Jumlah minilokarya yang dilakukan di Puskesmas	12 Kali	Terlaksananya pencapaian MDGs dan SDGs di Kabupaten Blora	100 %	683.400.000	DAK NON FISIK	12 Kali	100.000.000	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	16	111	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Blora	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk				Jumlah minilokarya yang dilakukan di Puskesmas	12 Kali	jumlah	100 %	700.968.000	DAK NON FISIK	12 Kali	0	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	16	112	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bogorejo	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk				Jumlah minilokarya yang dilakukan di Puskesmas	12 Kali	jumlah	100 %	533.800.000	DAK NON FISIK	12 Kali	0	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	16	113	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Cepu	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk				Jumlah minilokarya yang dilakukan di Puskesmas	12 Kali	jumlah	100 %	513.400.000	DAK NON FISIK	12 Kali	0	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	16	114	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Doplang	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk				Jumlah minilokarya yang dilakukan di Puskesmas	12 Kali	jumlah	100 %	503.400.000	DAK NON FISIK	6 Kali	0	DINAS KESEHATAN	1	Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Doplang	
01	02	16	115	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Gondoriyo	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk				Jumlah minilokarya yang dilakukan di Puskesmas	12 Kali	jumlah	100 %	443.400.000	DAK NON FISIK	12 Kali	0	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	16	116	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Japah	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk				Jumlah minilokarya yang dilakukan di Puskesmas	12 Kali	jumlah	100 %	553.400.000	DAK NON FISIK	12 Kali	0	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	16	117	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Jepon	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk				Jumlah minilokarya yang dilakukan di Puskesmas	12 Kali	jumlah	100 %	533.400.000	DAK NON FISIK	12 Kali	0	DINAS KESEHATAN	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif(Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	02	16	118	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Jiken	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk				Jumlah minilokarya yang dilakukan di Puskesmas	12 Kali	jumlah	100 %	533.400.000	DAK NON FISIK	12 Kali	0	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	16	119	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kapuan	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk				Jumlah minilokarya yang dilakukan di Puskesmas	12 Kali	jumlah	100 %	438.400.000	DAK NON FISIK	10 Kali	0	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	16	120	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kedungtuban	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk				Jumlah minilokarya yang dilakukan di Puskesmas	12 Kali	jumlah	100 %	553.400.000	DAK NON FISIK	12 Kali	0	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	16	121	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Ketuwan	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk				Jumlah minilokarya yang dilakukan di Puskesmas	12 Kali	jumlah	100	413.400.000	DAK NON FISIK	12 Kali	0	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	16	122	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kunduran	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk				Jumlah minilokarya yang dilakukan di Puskesmas	12 Kali	jumlah	100 %	673.400.000	DAK NON FISIK	12 Kali	0	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	16	123	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kutukan	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk				Jumlah minilokarya yang dilakukan di Puskesmas	100 Kali	jumlah	100 %	443.400.000	DAK NON FISIK	100 Kali	445.000.000	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	16	124	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Medang	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk				Jumlah minilokarya yang dilakukan di Puskesmas	12 Kali	jumlah	100 %	503.400.000	DAK NON FISIK	12 Kali	505.000.000	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	16	125	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Menden	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk				Jumlah minilokarya yang dilakukan di Puskesmas	12 Kali	jumlah	100 %	563.400.000	DAK NON FISIK	12 Kali	565.000.000	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	16	126	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Ngawen	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk				Jumlah minilokarya yang dilakukan di Puskesmas	12 Kali	jumlah	100 %	613.400.000	DAK NON FISIK	12 Kali	615.000.000	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	16	127	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Ngroto	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk				Jumlah minilokarya yang dilakukan di Puskesmas	12 Kali	jumlah	100 %	443.400.000	DAK NON FISIK	12 Kali	445.000.000	DINAS KESEHATAN	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif(Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	02	16	128	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Puledagel	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk				Jumlah minilokarya yang dilakukan di Puskesmas	12 Kali	jumlah	100 %	493.400.000	DAK NON FISIK	12 Kali	495.000.000	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	16	129	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Randublatung	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk				Jumlah minilokarya yang dilakukan di Puskesmas	11 Kali	jumlah	100 %	573.400.000	DAK NON FISIK	12 Kali	575.000.000	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	16	130	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Randulawang	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk				Jumlah minilokarya yang dilakukan di Puskesmas	12 Kali	jumlah	100 %	433.000.000	DAK NON FISIK	12 Kali	435.000.000	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	16	131	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Rowobungkul	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk				Jumlah minilokarya yang dilakukan di Puskesmas	12 Kali	jumlah	100 %	473.400.000	DAK NON FISIK	12 Kali	475.000.000	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	16	132	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sambong	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk				Jumlah minilokarya yang dilakukan di Puskesmas	12 Kali	jumlah	100 %	553.400.000	DAK NON FISIK	11 Kali	555.000.000	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	16	133	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sonokidul	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk				Jumlah minilokarya yang dilakukan di Puskesmas	12 Kali	jumlah	100 %	433.400.000	DAK NON FISIK	12 Kali	435.400.000	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	16	134	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Todanan	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk				Jumlah minilokarya yang dilakukan di Puskesmas	12 Kali	jumlah	100 %	663.400.000	DAK NON FISIK	12 Kali	665.000.000	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	16	135	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tunjungan	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk				Jumlah minilokarya yang dilakukan di Puskesmas	12 Kali	jumlah	100 %	563.400.000	DAK NON FISIK	12 Kali	565.000.000	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	16	136	Distribusi Obat (BOK Non Fisik)	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk				Jumlah Perjalanan dinas yang dilakukan untuk distribusi Obat ke Puskesmas	260 Kali	Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan untuk distribusi obat	26 Puskesmas	173.773.000	DAK NON FISIK	260 Kali	175.000.000	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	16	137	Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk				Jumlah Puskesmas yang akan melaksanakan re Akreditasi	14 Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang di re akreditasi	14 Unit	1.604.120.000	DAK NON FISIK	12 Puskesmas	20.000.000.000	DINAS KESEHATAN	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif(Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	02	16	138	Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik Jampersal)	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk				Jumlah Rujukan Persalinan dari rumah ke Fasyankes	500 Kasus	Tercapainya penurunan aki dan akb di Kab Blora	12 Anak	2.187.685.500	DAK NON FISIK	500 Kasus	20.000.000.000	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	16	139	Akreditasi Labkesda (DAK Non Fisik)	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk				Jumlah Labkesda yang meningkat status akreditasinya	1 Labkesda	Meningkatnya mutu pelayanan labkesda	1 UPTD	247.300.000	DAK NON FISIK	1 Labkesda	200.000.000	DINAS KESEHATAN	3		
01	02	16	140	Penyediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (DAK Penugasan)	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk				Jumlah Cold chain yang tersedia untuk Puskesmas	5 Unit	Tersedianya coldchain, antropometri, PHP HIV, sanitarian kit, posbindu kit	5 Paket	3.532.596.158	DAK FISIK	5 Unit	5.000.000.000	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	17		PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN				Proporsi Terbinanya warung sekolah dan penjaja makanan						210.000.000			230.000.000				
								Proporsi terbinanya apotik dan toko obat													
01	02	17	002	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	DINAS KESEHATAN			Perentase sweeping produk makanan minuman dalam kemasan yang tidak layak edar atau tidak layak konsumsi di sarana distribusi makanan minuman	100 %	Pengawasan peredaran produk makanan minuman dalam kemasan yang tidak layak edar / kadaluwarsa	100 %	180.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	200.000.000	DINAS KESEHATAN	1	24 sarana, 6 pasar, 24 SD, 75 ORANG, 1TIM SATGAS KEAMANAN PANGAN	
01	02	17	005	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	DINAS KESEHATAN			Persentase ketersediaan data aset persediaan kefarmasian dan perbekalan kesehatan di UPTD Puskesmas, UPTD Gudang Farmasi, UPTD Labkesda dan program sesuai standart	100 %	monitoring, evaluasi, dan pelaporan	100 %	30.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	30.000.000	DINAS KESEHATAN	1	Apotek daan toko obat	
01	02	19		PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT										575.000.000			280.000.000				
01	02	19	001	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Dinas Kesehatan			Jumlah media promosi kesehatan sebagai sarana promosi kesehatan bagi masyatakat	10 media	Adanya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan melalui media Promosi Kesehatan.	26 Lokal	150.000.000	PAD, DAU, DBH	6 media	0	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	19	002	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Dinas Kesehatan			Jumlah desa/kelurahan yang meningkat strata desa siaga aktif mandiri	26 Desa/Kelurahan	adanya peningkatan pemahaman masyarakat tentang kesehatan serta adanya perubahan perilaku masyarakat untuk Hidup bersih dan Sehat.	26 Desa	200.000.000	PAD, DAU, DBH	26 Desa/Kelurahan	0	DINAS KESEHATAN	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif(Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	02	19	004	Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Dinas Kesehatan			Jumlah anggota FKD yang telah mengikuti orientasi tentang desa siaga	260 Orang	Adanya peningkatan pengetahuan pengurus dan anggota Forum Kesehatan Desa (FKD) tentang Desa Siaga Aktif dan PHBS	26 Desa	100.000.000	PAD, DAU, DBH	180000000 Orang	150.000.000	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	19	005	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang melakukan pencatatan dan pelaporan program promkes dan pemberdayaan	26 Puskesmas	Adanya peningkatan kinerja petugas Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Puskesmas	26 Lokasi	50.000.000	PAD, DAU, DBH	75000000 Puskesmas	50.000.000	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	19	006	Peningkatan Upaya Kesehatan Kerja	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melakukan penyuluhan untuk peningkatan pengetahuan bagi pekerja sektor formal dan informal terkait Upaya Kesehatan Kerja di Wilayah Kab. Blora.	26 Puskesmas	Terlaksananya kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja di Puskesmas dan pembinaan Tim GP2SP ke perusahaan	200 Orang	75.000.000	PAD, DAU, DBH	200 Orang	80.000.000	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	20		PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT				Presentase Balita Gizi Buruk	0,11					793.510.000			878.000.000				
								Prevalensi Balita Gizi Kurang	2,4												
								Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100												
								Persentase Bayi ditimbang berat badannya (D/S)	83												
								Cakupan pelayanan anak balita	94,5												
								Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100												
								Persentase Bayi mendapat kapsul vitamin A	100												
								Persentase Ibu hamil mendapat 90 tablet besi	95,5												
								Persentase ibu hamil mengalami KEK	5,7												

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif(Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Persentase Balita dengan Kekurangan Energi dan Protein (KEP)	3,9												
								Persentase kecamatan bebas rawan gizi	100												
01	02	20	001	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Kab Blora			Jumlah desa/kelurahan yang melakukan pemetakaan daerah rawan gizi	295 Desa/Kelurahan	Terlaksanannya penyusunan peta informasi stunting	26 Puskesmas	81.170.000	Bagi Hasil Pajak Rokok Daerah	295 Desa/Kelurahan	90.000.000	DINAS KESEHATAN	1	Masyarakat Kab Blora	
01	02	20	002	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Kab Blora			Persentase Balita dengan Kekurangan Energi dan Protein (KEP)	100 %	Terlaksananya pembelian PMT dalam penanggulangan kasus stunting	7379 Kasus	195.440.000	Bagi Hasil Pajak Rokok Daerah	100 %	220.000.000	DINAS KESEHATAN	1	Masyarakat Kab Blora	
01	02	20	003	Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia, gizi buruk, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Kab Blora			Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100 %	Terlaksananya peningkatan kapasitas petugas dalam konseling menyusui dan lomba balita sehat	26 Orang	371.900.000	PAD, DAU, DBH	100 %	400.000.000	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	20	004	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Dinas Kesehatan			Persentase Bayi Usia - 6 bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif	295 %	Terlaksananya Pembentukan Pos ASI Eksklusif Desa dan orientasi pemberian makanan bayi dan anak bagi tenaga kesehatan	295 Desa/Kelurahan	130.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	150.000.000	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	20	005	Peningkatan gizi lebih	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Dinas Kesehatan			Jumlah guru UKS yang meningkat pengetahuannya tentang gizi anak	1800 Orang	Terlaksananya monev Faskes dan Nakes dalam melaksanakan PERBUP PPASI No 3 Tahun 2013 dengan indikator peningkatan Cakupan ASI Eksklusif dan IMD	295 Desa/Kelurahan	15.000.000	PAD, DAU, DBH	295 Orang	18.000.000	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	21		PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT										180.000.000			205.000.000				
01	02	21	001	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	Dinas Kesehatan			Jumlah tenaga kesehatan yang meningkat pengetahuannya tentang kesehatan lingkungan	52 Orang	Terselenggaranya kegiatan pengkajian untuk mewujudkan lingkungan yang sehat melalui kegiatan pelatihan petugas sanitarian	52 Orang	50.000.000	PAD, DAU, DBH	52 Orang	60.000.000	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	21	002	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	Dinas Kesehatan			Jumlah tenaga kesehatan lingkungan yang paham tentang hubungan stunting dengan BABS	52 Orang	Terwujudnya lingkungan pemukiman yang sehat, kampanye CTPS, terpilihnya duta sanitasi	51 Orang	100.000.000	PAD, DAU, DBH	26 Orang	110.000.000	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	21	004	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	Dinas Kesehatan			Prosentase desa yang tervalidasi sanitasi dasar	100 %	Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesehatan lingkungan	85 Desa	30.000.000	PAD, DAU, DBH	85 Desa	35.000.000	DINAS KESEHATAN	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif(Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	02	22		PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR				Persentase kasus hipertensi yang mendapat pelayanan pengobatan	15%					3.063.000.000			3.208.000.000				
								Persentase perempuan usia 30-15 tahun deteksi dini kanker servik dan payudara	15%												
								Persentase kelurahan yang melaksanakan Posbindu	20%												
								Penyakit Filariasis yang ditangani	100%												
								Persentase KLB dapat ditangani < 24 jam	100%												
								Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)	340 kasus												
								Proporsi penduduk yg terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pd obat antiretroviral	85%												
								Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS	22%												
								Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi usia 15-49 tahun (per 100.000 penduduk).	0,009												
								Angka kematian DBD (Incidence Rate) IR	47												
								Angka kematian DBD (Case Fatality Rate) CFR	3%												

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif(Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Cakupan penemuan dan penanganan Diare	100%												
								Cakupan penemuan TB	70%												
								Cakupan penemuan dan penanganan DBD	100%												
								Cakupan Desa dengan UCI	100%												
								Persentase penduduk yang mendapatkan pemeriksaan obesitas 15 tahun	546520 orang												
								Persentase penduduk >5 tahun pemeriksaan gula darah	546520 orang												
								Persentase penduduk 15 tahun mendapat pelayanan tekanan darah	546520 orang												
								Persentase kasus DM mendapatkan pelayanan	16256 orang												
01	02	22	001	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Dinas Kesehatan Kabupaten Blora			Jumlah fokus yang difogging	280 Kasus	Terlaksananya fogging kasus dan fogging pencegahan 280 fokus,	280 Kasus	300.000.000	PAD, DAU, DBH	280 Kasus	300.000.000	DINAS KESEHATAN	1	Daerah Endemis dan Epidemis Di kabupaten Blora	
01	02	22	002	Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Dinas Kesehatan Kabupaten Blora			Jumlah Pestisida yang tersedia untuk kegiatan pengasapan lokus DBD	536 Paket	Tersedianya Abate 22 pil,Belanja Pestisida Fogging 536 liter	100 %	180.000.000	PAD, DAU, DBH	100 Paket	200.000.000	DINAS KESEHATAN	1	Daerah Endemis dan Epidemis Se-Kab.Blora	
01	02	22	004	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	DINAS KESEHATAN			Prosentase anak SD kelas I mendapat imunisasi MR dan DT, dan anak SD kelas 2 dan kelas 5 mendapat imunisasi Td	98 %	Tercapainya cakupan BIAS MR, DT dan Td	98 %	158.000.000	PAD, DAU, DBH	98 %	158.000.000	DINAS KESEHATAN	1	Murid kelas SD/MI kelas 1, 2 dan 5	
01	02	22	005	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Dinas Kesehatan Kabupaten Blora			Prosentase penemuan penderita TB	95 %	Terlaksananya RVS,KPD,Penjaringan TB,Rujukan Penderita Kusta,Serah terima pasien TB/MDR,Pengiriman Sample Spes Dahak ke BKPM,Peningkatan Kapasitas Petugas TB	95 %	225.000.000	PAD, DAU, DBH	26 %	225.000.000	DINAS KESEHATAN	1	Masyarakat Se-kab.Blora	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif(Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	02	22	006	Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Dinas Kesehatan Kabupaten Blora			Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS (20 %)	20 %	Jumlah Lokalisasi , LP dan siswa SLTP / SLTA yang sudah tersosialisasi hiv / AIDS	1700 Orang	350.000.000	PAD, DAU, DBH	20 %	350.000.000	DINAS KESEHATAN	1	Masyarakat Kabupaten Blora	
01	02	22	008	Peningkatan imunisasi	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Dinas Kesehatan			Jumlah desa/kelurahan yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi	295 Desa/Kelurahan	Tercapainya UCI desa	295 Desa/Kelurahan	300.000.000	PAD, DAU, DBH	295 Desa/Kelurahan	300.000.000	DINAS KESEHATAN	1	Bayi usia 0-11 bulan dan batita 12-36 bulan	
01	02	22	009	Peningkatan survelliance epidemilogi dan penanggulangan wabah	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Dinas Kesehatan			Persentase KLB dapat ditangani < 24 jam	100 %	Terdeteksinya secara dini kasus PD3I dan penyakit potensial KLB	100 %	150.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	200.000.000	DINAS KESEHATAN	1	Puskesmas, Rumah Sakit dan Masyarakat	
01	02	22	010	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang menerima informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyakit	26 Puskesmas	Tersampaikannya informasi tentang imunisasi	100 %	25.000.000	PAD, DAU, DBH	26 Puskesmas	25.000.000	DINAS KESEHATAN	1	Puskesmas	
01	02	22	011	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk				Jumlah laporan monitong dan evaluasi	1 Laporan	Terlaksananya Monev Program P3M	100 %	50.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Laporan	50.000.000	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	22	012	Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk				Persentase penduduk 15 tahun mendapat pelayanan tekanan darah	100 %	Pemantauan Kawasan Tanpa asap rokok	100 Lokasi	50.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	50.000.000	DINAS KESEHATAN	1		
					Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Dinas Kesehatan Kab. Blora			Persentase kelurahan yang melaksanakan Posbindu	100 %	tersedianya regaen pemeriksaan kolesterol, asam urat, gula darah	5 Paket	445.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	600.000.000	DINAS KESEHATAN	1		
					Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Dinas Kesehatan			Persentase penduduk yang mendapatkan pemeriksaan obesitas 15 tahun	100 %	Terlaksananya Skrining Kesehatan Siswa SLTA	31000 Siswa	540.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	550.000.000	DINAS KESEHATAN	1		
					Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Dinas Kesehatan			Persentase kelurahan yang melaksanakan Posbindu	100 %	Tersedianya Posbindu Kit	20 Set	140.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	140.000.000	DINAS KESEHATAN	1		
					Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Dinas Kesehatan			Persentase kelurahan yang melaksanakan Posbindu	100 %	Terbentuknya Posbindu di Desa/ Kelurahan	50 Kelompok	150.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	60.000.000	DINAS KESEHATAN	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif(Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	02	23		PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN				Rasio dokter umum per satuan penduduk	16					700.000.000			400.000.000				
								Rasio dokter gigi per satuan penduduk	3												
								Rasio perawat per satuan penduduk	57												
01	02	23	001	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	26 Puskesmas	yang mendapatkan pendampingan re-akreditasi puskesmas	12 Puskesmas	400.000.000	PAD, DAU, DBH	14 Puskesmas	400.000.000	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	23	002	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Dinas Kesehatan			Proporsi terbinanya sarana kesehatan berijin	100 %	Terlaksananya pembinaan perijinan sarana kesehatan	100 %	150.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	0	DINAS KESEHATAN	1	pejabat fungsional di lingkungan dinas kesehatan, klinik, rumah sakit dan sarana kesehatan lainnya	
01	02	23	007	Pelayanan akreditasi dan perijinan	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	DINAS KESEHATN			Persentase Terbitnya Ijin PIRT dan Laik Sehat, Perijinan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian	60 %	Terlaksananya pertemuan koordinasi dan konsultasi bagi pengelola / penanggungjawab DAMIU dalam rangka memmenuhi prinsip hygiene sanitasi dan sesuai peraturan yang berlaku	60 Orang	20.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	0	DINAS KESEHATAN	1		
					Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	DINAS KESEHATAN			Persentase Terbitnya Ijin PIRT dan Laik Sehat, Perijinan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian	78 %	Meningkatnya Keamanan dan Kesehatan makanan hasil produksi rumah Tangga masyarakat kab. Blora	78 Orang	40.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	0	DINAS KESEHATAN	1		
					Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Dinas Kesehatan			Persentase Terbitnya Ijin PIRT dan Laik Sehat, Perijinan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian	40 %	Terlaksananya Kursus Sertifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan bagi Penanggung Jawab P-IRT di wilayah Kabupaten Blora	40 Orang	70.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	0	DINAS KESEHATAN	1		
					Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	DINAS KESEHATAN			Persentase Terbitnya Ijin PIRT dan Laik Sehat, Perijinan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian	78 %	Tercapainya Rekomendasi bagi P-IRT, Apotik dan Toko Obat	78 Lokasi	20.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	0	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	24		PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN										180.000.000			180.000.000				
01	02	24	004	Pelayanan Sunatan Massal	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	Dinas Kesehatan			Jumlah Masyarakat Miskin yang mendapat pelayanan kesehatan	170 Anak	jumlah anak dari keluarga kurang mampu yang mengikuti khitanan massal	170 Anak	150.000.000	PAD, DAU, DBH	170 Anak	150.000.000	DINAS KESEHATAN	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif(Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	02	24	014	Pelayanan Kesehatan Rujukan PPK3	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	Dinas Kesehatan			Jumlah rujukan bagi pasien kurang mampu dan atau miskin dengan penyakit bawaan atau kelainan/gangguan jiwa di PPK3	35 Kali	Terlaksananya pelayanan rujukan bagi pasien kurang mampu dan atau miskin dengan penyakit bawaan	35 Kasus	30.000.000	PAD, DAU, DBH	35 Kali	30.000.000	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	25		PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA				Jumlah puskesmas	26					8.578.904.500			18.335.600.000				
								Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	100 %												
								Angka Kematian Bayi (AKB)	10.2												
								Angka Kematian Balita	12												
								Kasus Kematian Ibu	115												
								Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai	100%												
01	02	25	001	Pembangunan puskesmas	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Puskesmas Gondoriyo			Jumlah Puskesmas yang dibangun sesuai standart	75 Unit	Keselamatan petugas dan pasien	75 m	200.000.000	Dana Infrastruktur	5 Unit	0	DINAS KESEHATAN	1		
					Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Puskesmas Gondoriyo, Randublatung, Kutukan, Todanan, Cepu, Jiken, Sambong, Pustu Ketringan, Brabowan			Jumlah Puskesmas yang dibangun sesuai standart	10 Unit	Jumlah Puskesmas yang dibangun	10 Lokasi	2.500.000.000	Dana Infrastruktur	7 Unit	8.000.000.000	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	25	002	Pembangunan puskesmas pembantu	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas Pembantu yang meningkat kondisi bangunannya	12 Unit	Terwujudnya Pembangunan Gedung Puskesmas Pembantu	12 Unit	1.500.000.000	Dana Infrastruktur	12 Unit	4.500.000.000	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	25	006	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk				Jumlah puskesmas yang memilik sarparas sesuai dengan Permenkes 74	26 Unit	Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas	26 Paket	2.000.000.000	Dana Infrastruktur	26 Unit	4.500.000.000	DINAS KESEHATAN	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif(Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	02	25	012	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Kabupaten Blora			Jumlah Puskesmas dan jaringannya yang dipelihara sesuai standart pelayanan	1 Unit	Terpeliharanya Rumah Dinas Puskesmas	1 Unit	100.000.000	Dana Infrastruktur	1 Unit	100.000.000	DINAS KESEHATAN	1		
					Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk				Jumlah Puskesmas dan jaringannya yang dipelihara sesuai standart pelayanan	3 Unit	Terpeliharanya sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu	3 Unit	500.000.000	Dana Infrastruktur	3 Unit	600.000.000	DINAS KESEHATAN	1		
					Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas dan jaringannya yang dipelihara sesuai standart pelayanan	1 Unit	Terpeliharanya Jaringan Komputer	1 Paket	200.800.000	Dana Infrastruktur	1 Unit	200.900.000	DINAS KESEHATAN	1		
					Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas dan jaringannya yang dipelihara sesuai standart pelayanan	1 Unit	Terpeliharanya pagar	1 Unit	150.000.000	Dana Infrastruktur	1 Unit	150.000.000	DINAS KESEHATAN	1		
					Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas dan jaringannya yang dipelihara sesuai standart pelayanan	37 Unit	Terpeliharanya sarana dan prasarana Dinkes dan Puskesmas beserta jaringannya (renovasi pagar serta pemeliharaan pustu ledok, brabowan, ketringan, sumberpitu, dan tinapan)	37 Unit	234.700.000	Dana Infrastruktur	1 Unit	234.700.000	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	25	017	Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk				Jumlah Puskesmas yang meningkat statusnya	1 Unit	Tersedianya peralatan dan sarana penunjang untuk Puskesmas Rawat Inap	10 Jenis	893.404.500	Dana Infrastruktur	0 Unit	0	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	25	029	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan puskesmas keliling	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Dinas Kesehatan			Jumlah Pusling yang kondisinya terpelihara	3 Unit	jumlah pusling yang terpelihara	3 Unit	50.000.000	Dana Infrastruktur	3 Unit	50.000.000	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	25	033	Perencanaan Infrastruktur bidang kesehatan	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Dinas Kesehatan			Jumlah dokumen perencanaan (RAB, Masterplan gedung Puskesmas dan Jaringannya)	26 Dokumen	Dokumen perencanaan kontruksi dan masterplan Puskesmas	26 Puskesmas	250.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	28		PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN										15.831.000.000			2.628.500.000				
01	02	28	001	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	-				Jumlah masyarakat yang mendapatkan penjaminan kesehatan	1355 Orang	jumlah masyarakat yang mendapat penjaminan kesehatan	1355 Orang	800.000.000	DBHCHT	1700 Orang	85.000.000	DINAS KESEHATAN	1		
					Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	Dinas Kesehatan Kab. Blora			Jumlah masyarakat yang mendapatkan penjaminan kesehatan	45000 Orang	Terbayarnya biaya premi peserta PBI daerah	45000 Orang	12.500.000.000	Bagi Hasil Pajak Rokok Daerah	45000 Orang	12.500.000	DINAS KESEHATAN	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif(Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	02	28	009	Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Lanjutan dan Jaminan Kesehatan Bagi Pasien Kurang Mampu	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	Dinas Kesehatan Kab. Blora			Persentase maskin yang mendapat pelayanan kesehatan di RS Rujukan PPK 3	100 %	Terbayarnya biaya pelayanan kesehatan di RS PPK III	12 Bulan	2.531.000.000	Bagi Hasil Pajak Rokok Daerah	100 %	2.531.000.000	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	29		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA				Cakupan pemeriksaan pada anak usia dini	75					600.000.000			1.064.257.300				
								Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	100												
01	02	29	001	Penyuluhan kesehatan anak balita	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	DINAS KESEHATAN			Jumlah ibu balita yang mendapat penyuluhan dalam kelas ibu balita	4000 Orang	TERLAKSANANYA PEMBEKALAN dan PELAKSAAN PEMANTAUAN OLEH KADER DAN TOKOH MASYARAKAT DALAM DETEKSI DINI RESIKO KEGAWATDARURATAN PADA BAYI BARU LAHIR DI MASYARAKAT	345 Orang	500.000.000	PAD, DAU, DBH	400 Orang	765.107.300	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	29	007	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	DINAS KESEHATAN			Persentase kasus kematian bayi dan balita yang diaudit	50 %	TERLAKSANANYA AUDIT KEMATIAN BAYI DAN BALITA DAN TINDAK LANJUT REKOMENDASINYA, TERLAKSANANYA PEMBINAAN / KONSULTASI / EVALUASI PROGRAM KESEHATAN ANAK, TERLAKSANANYA PERTEMUAN TINDAKLANJUT AMP, ERLANKSANANYA Kegiatan Monev Puskesmas Mampu Poned / Persali	50 Kasus	100.000.000	Bagi Hasil Pajak Rokok Daerah	50 %	299.150.000	DINAS KESEHATAN	1	Masyarakat kab Blora	
01	02	30		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA				Proporsi Cakupan Pemeriksaaan Pra Usila dan Usila	umur >72 tahun					149.600.000			150.000.000				
01	02	30	005	Pelayanan kesehatan	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	Dinas Kesehatan			Persentase lansia dan pra lansia yang melakukan pemeriksaaan kesehatan	100 %	Terlaksananya pemeriksaan kesehatan lansia dan senam lansia	200 Orang	136.000.000	Bagi Hasil Pajak Rokok Daerah	100 %	150.000.000	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	30	006	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	26 puskesmas			Jumlah Puskesmas yang melakukan program lansia secara rutin	26 Puskesmas	Terlaksananya monev program lansia, Terlaksananya pertemuan koordinasi dan evaluasi program lansia	26 Puskesmas	13.600.000	PAD, DAU, DBH	26 Puskesmas	0	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	32		PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK				Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100					504.360.000			534.250.000				
								Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	98,5												

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif(Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	02	32	001	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	DINAS KESEHATAN			Jumlah ibu hamil risiko tinggi yang terdetesi oleh kader	1200 Orang	terlaksananya Pendampingan ibu hamil resti oleh kader , Terlaksananya Pertemuan Perencanaan & Evaluasi Kesh.ibu, Koordinasi Jejaring Rujukan KIA, Validasi Data, Pembinaan Bidan Desa., TERLAKSANANYA Pertemuan Review Gadar Obstetri, CETAK KOHORT,	1200 Orang	406.250.000	PAD, DAU, DBH	1200 Orang	426.250.000	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	32	002	Perawatan secara berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	DINAS KESEHATAN			Jumlah ibu hamil yang dilakukan USG	1200 Orang	TERLAKSANANYA PEMERIKSAAN IBU HAMIL RESTI OLEH DR.SPESIALIS	1200 Orang	98.110.000	PAD, DAU, DBH	1200 Orang	108.000.000	DINAS KESEHATAN	1	Ibu hamil di kab Blora	
01	02	33		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLUD KESEHATAN				BOR (Bed Occupancy Ratio						43.450.000.000			43.450.000.000				
								TOI (Turn Over Interval)													
								BTO (Bed Turn Over)													
								Jumlah Kunjungan Rawat Inap													
								Tingkat Kepuasan Pasien													
								AVLOS (Average Length of Stay)													
								NDR (Net Death Rate)													
								Jumlah Kunjungan Rawat Jalan													
								Status Akreditasi Rumah Sakit versi KARS													
01	02	33	003	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD puskesmas Blora	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Puskesmas Blora			Persentase kegiatan operasional Puskesmas yang dapat dibiayai dari BLUD	100 %	Tercapainya Pelayanan BLUD di Puskesmas Blora	1 Tahun	3.895.816.000	BLUD	1 Tahun	3.895.816.000	DINAS KESEHATAN	1	Wilayah kerja Puskesmas Blora	
01	02	33	004	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD puskesmas Medang	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Puskesmas Medang			Persentase kegiatan operasional Puskesmas yang dapat dibiayai dari BLUD	100 %	Terlayaninya Pelayanan BLUD di Puskesmas Medang	1 Tahun	881.590.000	BLUD	1 Tahun	881.590.000	DINAS KESEHATAN	1	Wilayah Kerja Puskesmas Medang	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif(Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	02	33	005	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD puskesmas Banjarejo	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	UPT Puskesmas Banjarejo			Persentase kegiatan operasional Puskesmas yang dapat dibiayai dari BLUD	100 %	Terlaksananya Pelayanan BLUD di Puskesmas Banjarejo	1 Tahun	2.974.616.000	BLUD	1 Tahun	2.974.616.000	DINAS KESEHATAN	1	Wilayah Kerja Puskesmas Banjarejo	
01	02	33	006	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD puskesmas Tunjungan	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Puskesmas Tunjungan			Persentase kegiatan operasional Puskesmas yang dapat dibiayai dari BLUD	100 %	Terlayaninya Pelayanan BLUD Puskesmas Tunjungan	1 Tahun	1.394.548.000	BLUD	1 Tahun	1.394.548.000	DINAS KESEHATAN	1	Wilayah Kerja Puskesmas Tunjungan	
01	02	33	007	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD puskesmas Rowobungkul	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	UPT PUSKESMAS ROWOBUNGKUL			Persentase kegiatan operasional Puskesmas yang dapat dibiayai dari BLUD	100 %	Terlayaninya Pelayanan prima BLUD di Puskesmas Rowobungkul	1 Tahun	815.392.000	BLUD	1 Tahun	815.392.000	DINAS KESEHATAN	1	Masyarakat Puskesmas Rowobungkul	
01	02	33	008	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD puskesmas Jepon	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	UPT PUSKESMAS JEPON			Persentase kegiatan operasional Puskesmas yang dapat dibiayai dari BLUD	100 %	Tercapainya Pelayanan BLUD UPT Puskesmas Jepon	1 Tahun	1.278.244.000	BLUD	1 Tahun	1.278.244.000	DINAS KESEHATAN	1	Wilayah Kerja Puskesmas Jepon	
01	02	33	009	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD puskesmas Puledagel	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Puskesmas Puledagel			Persentase kegiatan operasional Puskesmas yang dapat dibiayai dari BLUD	100 %	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Di UPT Puskesmas Puledagel	1 Tahun	502.122.000	BLUD	1 Tahun	502.122.000	DINAS KESEHATAN	1	Wilayah Kerja Puskesmas Puledagel	
01	02	33	010	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD puskesmas Bogorejo	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Puskesmas Bogorejo			Persentase kegiatan operasional Puskesmas yang dapat dibiayai dari BLUD	100 %	Terlayaninya Pelayanan BLUD di Puskesmas Bogorejo	1 Tahun	1.451.016.000	BLUD	1 Tahun	1.451.016.000	DINAS KESEHATAN	1	Wilayah Kerja Puskesmas Bogorejo	
01	02	33	011	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD puskesmas Jiken	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	UPT PUSKESMAS JIKEN			Persentase kegiatan operasional Puskesmas yang dapat dibiayai dari BLUD	100 %	TERLAYANINYA PELAYANAN BLUD UPT PUSKESMAS JIKEN	1 Tahun	1.663.184.000	BLUD	1 Tahun	1.663.184.000	DINAS KESEHATAN	1	Wilayah Kerja Puskesmas Jiken	
01	02	33	012	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD puskesmas Cepu	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	UPT PUSKESMAS CEPU			Persentase kegiatan operasional Puskesmas yang dapat dibiayai dari BLUD	100 %	Terlayaninya pelayanan Prima di UPT Puskesmas Cepu	1 Tahun	2.603.716.000	BLUD	1 Tahun	2.603.716.000	DINAS KESEHATAN	1	Wilayah Kerja Puskesmas Cepu	
01	02	33	013	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD puskesmas Sambong	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Puskesmas Sambong			Persentase kegiatan operasional Puskesmas yang dapat dibiayai dari BLUD	100 %	Tercapainya peningkatan Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Sambong	100 %	1.239.658.000	BLUD	1 Tahun	1.239.658.000	DINAS KESEHATAN	1	Wilayah Kerja Puskesmas Sambong	
01	02	33	014	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD puskesmas Ngroto	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Puskesmas Ngroto			Persentase kegiatan operasional Puskesmas yang dapat dibiayai dari BLUD	100 %	Terlayaninya Pelayanan BLUD di Puskesmas Ngroto	1 Tahun	555.369.000	BLUD	1 Tahun	555.369.000	DINAS KESEHATAN	1	Wilayah Kerja Puskesmas Ngroto	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif(Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	02	33	015	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD puskesmas Kapuan	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Puskesmas Kapuan			Persentase kegiatan operasional Puskesmas yang dapat dibiayai dari BLUD	100 %	Tercapainya Pelayanan BLUD di Puskesmas Kapuan	1 Tahun	669.700.000	BLUD	1 Tahun	669.700.000	DINAS KESEHATAN	1	Wilayah Kerja Puskesmas Kapuan	
01	02	33	016	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD puskesmas Kedungtuban	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	PUSKESMAS KEDUNGTUBAN			Persentase kegiatan operasional Puskesmas yang dapat dibiayai dari BLUD	100 %	TERLAYANINYA PELAYANAN PRIMA BLUD DI PUSKESMAS KEDUNGTUBAN	1 Tahun	2.090.300.000	BLUD	1 Tahun	2.090.300.000	DINAS KESEHATAN	1	Wilayah Kerja Puskesmas Kedungtuban	
01	02	33	017	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD puskesmas Ketuwan	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	PUSKESMAS KETUWAN			Persentase kegiatan operasional Puskesmas yang dapat dibiayai dari BLUD	100 %	Terlaksananya Pelayanan BLUD di Puskesmas Ketuwan	1 Tahun	766.708.000	BLUD	1 Tahun	766.708.000	DINAS KESEHATAN	1	Wilayah Kerja Puskesmas Ketuwan	
01	02	33	018	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD puskesmas Menden	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk				Persentase kegiatan operasional Puskesmas yang dapat dibiayai dari BLUD	100 %	TERLAYANINYA PELAYANAN BLUD DI UPT PUSKESMAS MENDEN	1 Tahun	2.628.330.000	BLUD	100 %	2.628.330.000	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	33	019	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD puskesmas Randublatung	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk				Persentase kegiatan operasional Puskesmas yang dapat dibiayai dari BLUD	100 %	Terlaksananya Pelayanan BLUD di Puskesmas Randublatung	1 Tahun	3.375.240.000	BLUD	97 %	3.375.240.000	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	33	020	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD puskesmas Kutukan	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Puskesmas Kutukan			Persentase kegiatan operasional Puskesmas yang dapat dibiayai dari BLUD	100 %	Terlayaninya Pelayanan Prima BLUD di Puskesmas Kutukan	1 Tahun	1.243.171.000	BLUD	1 Tahun	1.243.171.000	DINAS KESEHATAN	1	Wilayah Kerja Puskesmas Kutukan	
01	02	33	021	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD puskesmas Randulawang	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Puskesmas Randulawang			Persentase kegiatan operasional Puskesmas yang dapat dibiayai dari BLUD	100 %	Terlayaninya pelayanan BLUD di Puskesmas Randulawang	1 Tahun	618.272.000	BLUD	1 Tahun	618.272.000	DINAS KESEHATAN	1	Wilayah Kerja Puskesmas Randulawang	
01	02	33	022	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD puskesmas Doplang	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Puskesmas Doplang			Persentase kegiatan operasional Puskesmas yang dapat dibiayai dari BLUD	100 %	Tercapainya Pelayanan BLUD di Puskesmas Doplang	1 Tahun	1.698.016.000	BLUD	1 Tahun	1.698.016.000	DINAS KESEHATAN	1	Wilayah Kerja Puskesmas Doplang	
01	02	33	023	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD puskesmas Sonokidul	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Puskesmas Sonokidul			Persentase kegiatan operasional Puskesmas yang dapat dibiayai dari BLUD	100 %	Terlaksananya Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD puskesmas Sonokidul	-1 Tahun	590.003.000	BLUD	1 Tahun	590.003.000	DINAS KESEHATAN	1	Wilayah Kerja Puskesmas Sonokidul	
01	02	33	024	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD puskesmas Kunduran	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Puskesmas Kunduran			Persentase kegiatan operasional Puskesmas yang dapat dibiayai dari BLUD	100 %	Terlaksananya pelayanan BLUD	1 Tahun	2.633.600.000	BLUD	1 Tahun	2.633.600.000	DINAS KESEHATAN	1	Wilayah Kerja Puskesmas Kunduran	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif(Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	02	33	025	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD puskesmas Todanan	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	UPT PUSKESMAS TODANAN			Persentase kegiatan operasional Puskesmas yang dapat dibiayai dari BLUD	100 %	Tercapainya Pelayanan BLUD di Puskesmas Todanan	1 Tahun	3.836.533.000	BLUD	1 Tahun	3.836.533.000	DINAS KESEHATAN	1	Wilayah Kerja Puskesmas Todanan	
01	02	33	026	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD puskesmas Gondoriyo	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Puskesmas Gondoriyo			Persentase kegiatan operasional Puskesmas yang dapat dibiayai dari BLUD	100 %	Terlaksananya pelayanan BLUD di Puskesmas Gondoriyo	1 Tahun	526.616.000	BLUD	1 Tahun	526.616.000	DINAS KESEHATAN	1	Wilayah Kerja Puskesmas Gondoriyo	
01	02	33	027	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD puskesmas Japah	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Puskesmas Japah			Persentase kegiatan operasional Puskesmas yang dapat dibiayai dari BLUD	100 %	Terlaksananya Pelayanan promotif dan preventif bagi masyarakat UPT Puskesmas Japah	1 Tahun	1.503.016.000	BLUD	1 Tahun	1.503.016.000	DINAS KESEHATAN	1	Wilayah Kerja Puskesmas Japah	
01	02	33	028	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD puskesmas Ngawen	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Puskesmas Ngawen			Persentase kegiatan operasional Puskesmas yang dapat dibiayai dari BLUD	100 %	Tercapainya Pelayanan BLUD di Puskesmas Ngawen	1 Tahun	2.015.224.000	BLUD	1 Tahun	2.015.224.000	DINAS KESEHATAN	1	Wilayah Kerja Puskesmas Ngawen	
01				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																	
01	02			KESEHATAN																	
01	02	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	12 bln					0			0				
								Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran													
01	02	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Keshatan			Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat	12 %	Tercapainya kebutuhan surat menyurat meterai,perangko	12 Bulan	10.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	10.000.000	DINAS KESEHATAN	1	Dinas Kesehatan	
01	02	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Kesehatan			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12 %	Terbayarnya keseluruhan langganan telepon,dan listrik	12 Bulan	171.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	171.000.000	DINAS KESEHATAN	1	Dinas Kesehatan	
01	02	01	003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Kesehatan			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	Tercapainya kinerja karyawan secara maksimal dengan peralatan memadai	12 Bulan	325.500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	325.500.000	DINAS KESEHATAN	1	Dinas Kesehatan	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif(Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	02	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	dinas kesehatan			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100 %	Terpenuhinya kebutuhan perpanjangan STNK dan KIR	100 %	21.700.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	21.700.000	DINAS KESEHATAN	1	Dinas Kesehatan	
01	02	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Kesehatan			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan	12 %	Peningkatan kinerja karyawan	12 Bulan	219.600.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	219.600.000	DINAS KESEHATAN	1	Dinas Kesehatan	
01	02	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Kesehatan			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor	12 %	Situasi kantor yang nyaman dan bersih serta karyawan yang sehat	12 Bulan	32.661.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	32.661.000	DINAS KESEHATAN	1	Dinas Kesehatan	
01	02	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Kesehatan			Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	100 %	Tercukupinya keseluruhan kebutuhan alat tulis kantor	12 Bulan	180.110.500	PAD, DAU, DBH	180110500	0	DINAS KESEHATAN	1	Dinas Kesehatan	
01	02	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Kesehatan			Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100 %	Tercapainya kebutuhan kantor	12 Bulan	76.630.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	76.630.000	DINAS KESEHATAN	1	Dinas Kesehatan	
01	02	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Kesehatan			Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13 %	semua kebutuhan instalasi listrik,lampu dsn tsmbsh dsys	13 Jenis	12.405.000	PAD, DAU, DBH	13 Jenis	12.405.000	DINAS KESEHATAN	1	Dinas Kesehatan	
01	02	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Kesehatan			Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	kebutuhan bk bacaan,koran,majalah di DKK	12 Bulan	18.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	18.000.000	DINAS KESEHATAN	1	Dinas Kesehatan	
01	02	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Kesehatan			Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat	100 %	Terpenuhinya kebutuhan makan minum pegawai	12 Bulan	67.620.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	67.620.000	DINAS KESEHATAN	1	Dinas Kesehatan	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif(Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	02	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Kesehatan			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	90 %	Terbayarnya biaya perjalanan bagi karyawan yang melaksanakan perjalanan tugas	12 Bulan	268.650.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	268.650.000	DINAS KESEHATAN	1	Dinas Kesehatan	
01	02	01	019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	dinas kesehatan			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	95 %	Terbayarnya biaya perjalanan dinas bagi karyawan yang melaksanakan perjalanan dinas	200 Kali	123.650.000	PAD, DAU, DBH	200 Kali	123.650.000	DINAS KESEHATAN	1	Dinas Kesehatan	
01	02	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur						0			0				
01	02	02	003	Pembangunan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Kesehatan			Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 Unit	Terbangunnya gedung kantor Dinas Kesehatan	1 Unit	1.200.000.000	Dana Infrastruktur	100 %	7.550.000.000	DINAS KESEHATAN	1	Dinas Kesehatan	
01	02	02	010	Pengadaan mebeler	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Kesehatan			Persentase pemenuhan mebeler	99 %	semua kebutuhan mebeler terpenuhi	5 Jenis	115.525.000	PAD, DAU, DBH	99 Jenis	0	DINAS KESEHATAN	1	Dinas Kesehatan	
01	02	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Kesehatan			Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	KANTOR MENJADI INDAH NYAMAN DAN BERSIH	1 Unit	200.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Unit	0	DINAS KESEHATAN	1	Dinas Kesehatan	
01	02	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	dinas kesehatan			Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	1 %	Pemeliharaan kendaraan dinas yang terpenuhi	1 Tahun	130.045.000	PAD, DAU, DBH	1 Tahun	130.045.000	DINAS KESEHATAN	1	Dinas Kesehatan	
01	02	02	026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Kesehatan			Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	1 %	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor	1 Tahun	25.090.000	PAD, DAU, DBH	100 %	0	DINAS KESEHATAN	1	Dinas Kesehatan	
01	02	02	031	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi air, listrik, dan telepon	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Kesehatan			Persentase instalasi air, listrik, dan telepon dalam kondisi baik	1 %	Terawatnya jarinan instalasi air,listrik,telepon	1 Tahun	205.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Tahun	205.000.000	DINAS KESEHATAN	1	Dinas Kesehatan	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif(Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	02	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				Pemenuhan kebutuhan pakaian seragam dinas						0			0				
01	02	03	005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi	Dinas Kesehatan			Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	120 Unit	karyawan /karyawati DKK menjadi lebih berwibawa	120 Orang	70.200.000	PAD, DAU, DBH	120 Orang	70.200.000	DINAS KESEHATAN	1	Karyawan/karyawati Dinas Kesehatan	
01	02	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				Peningkatan kapasitas SDM aparatur						0			0				
01	02	05	001	Pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Kesehatan Kab. Blora			Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal	200 Orang	Terlalaksananya pelatihan IVA bagi bidan puskesmas, terlaksananya pelatihan konselor HIV, terlaksananya pelatihan rekam medis bagi petugas puskesmas, terlaksananya pelatihan EKG, terlaksananya pelatihan softskill bagi puskesmas	6 Paket	458.000.000	PAD, DAU, DBH	100 Orang	958.000.000	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	05	002	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Kesehatan			Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan	6 Kali	Peningkatan kinerja petugas Tata Usaha,pengelola aset/barang serta terwujudnya laporan aset/barang	6 Kali	67.015.000	PAD, DAU, DBH	6 Orang	69.511.000	DINAS KESEHATAN	1	26 Puskesmas 2 UPT 1 OPD	
01	02	05	003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Kesehatan			Jumlah orang yang mendapatkan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	100 Orang	Tercapainya Trnsfer Knowledge Kustaminasi Aplikasi	100 %	110.000.000	PAD, DAU, DBH	100 Orang	0	DINAS KESEHATAN	1		
01	02	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				Pemenuhan kebutuhan pelaporan kinerja dan keuangan						0			0				
								Pemenuhan kebutuhan pelaporan kinerja dan keuangan													
01	02	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Kesehatan			Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	145 Laporan	Terlaksananya pertemuan Rakerkesda	145 Orang	51.100.000	PAD, DAU, DBH	100 %	51.000.000	DINAS KESEHATAN	1	Dinas Kesehatan	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif(Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	02	06	002	Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Kesehatan			Jumlah laporan keuangan semesteran	4 Laporan	Tersusunnya laporan semesteran 1 tepat waktu	4 Kali	11.064.000	PAD, DAU, DBH	6 Laporan	11.064.000	DINAS KESEHATAN	1	Dinas Kesehatan	
01	02	06	004	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Kesehatan			Jumlah laporan keuangan akhir tahun	4 Laporan	Tersusunnya keuangan yang akuntabel	4 Laporan	25.000.000	PAD, DAU, DBH	4 Laporan	25.000.000	DINAS KESEHATAN	1	Dinas Kesehatan	
01	02	06	005	Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Kesehatan			Jumlah rencana kinerja dan penetapan kinerja	3 Dokumen	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan	3 Buku	30.060.000	PAD, DAU, DBH	6 Dokumen	30.060.000	DINAS KESEHATAN	1	Dinas Kesehatan	
TOTAL														150.374.940.658			189.215.303.300				

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KABUPATEN BLORA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOETIJONO BLORA

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif(Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																	
01	02			KESEHATAN																	
01	02	26		PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA				Persentase pemenuhan kebutuhan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit per tahun	100%					57.000.000.000			2.000.000.000				
01	02	26	019	Pengadaan obat-obatan rumah sakit	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	-				Jumlah obat-obatan dan BHP sesuai FORNAS (Formularium Nasional)	1 Paket	Pemenuhan obat-obatan bagi pasien	100 %	1.000.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Paket	2.000.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOETIJONO BLORA	1	Pasien	
01	02	26	032	Rehabilitasi ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I,II,III)	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	-				Jumlah Paket Pemeliharaan Gedung Rawat Inap	100 Paket	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	4.000.000.000	Dana Infrastruktur	100 Paket	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOETIJONO BLORA	2	RSUD dr. R. Soetijono Blora	
01	02	26	049	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan rujukan kesehatan (DAK)	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	-				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan rujukan kesehatan	100 %	Pengadaan alat kesehatan	54 Unit	25.000.000.000	DAK FISIK	0 %	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOETIJONO BLORA	1	RSUD dr. R. Soetijono Blora	
01	02	26	050	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan rujukan kesehatan (Banprov)	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	-				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan rujukan kesehatan	100 %	Pembangunan gedung 1 unit dan alat kesehatan 8 jenis	100 %	25.000.000.000	BANKEU PROV	0 %	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOETIJONO BLORA	3	RSUD dr. R. Soetijono Blora	
01	02	26	051	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan rujukan kesehatan (DBHCHT)	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	Jl. dr. Sutomo No 42 Blora			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan rujukan kesehatan	100 %	Terpenuhinya alat kesehatan untuk pasien akibat dampak rokok sebesar 100%	100 %	2.000.000.000	DBHCHT	100 %	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOETIJONO BLORA	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif(Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	02	28		PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN				Jumlah masyarakat yang dijamin kesehatannya melalui BPJS						7.000.000.000			0				
01	02	28	007	Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	Jl. dr. Sutomo No 42 Blora			Jumlah masyarakat yang dijamin kesehatannya melalui BPJS	10200 Orang	Terlayaninya (%) Pasien Non Kuota BPJS se Kab. Blora	10200 Orang	7.000.000.000	PAD, DAU, DBH	10000 Orang	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOETIJONO BLORA	1		
01	02	33		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLUD KESEHATAN				Status Akreditasi Rumah Sakit versi KARS						48.040.000.000			47.000.000.000				
								Jumlah Kunjungan Rawat Jalan													
								NDR (Net Death Rate)													
								AVLOS (Average Length of Stay)													
								BOR (Bed Occupancy Ratio													
								TOI (Turn Over Interval)													
								BTO (Bed Turn Over)													
								Jumlah Kunjungan Rawat Inap													
								Tingkat Kepuasan Pasien													
01	02	33	001	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD rumah sakit	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk				Persentase pemenuhan layanan BLUD rumah sakit	65500 Orang	Tercapainya jumlah kunjungan pasien rawat inap dan rawat jalan	65500 Orang	47.000.000.000	BLUD	65750 Orang	47.000.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOETIJONO BLORA	1		
01	02	33	002	Pendukung pelayanan BLUD rumah sakit	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Jl. Dr. Sutomo No 42 Blora			Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan	19 Orang	Terpenuhinya biaya tenaga kontrak daerah di RSUD Dr. R. Soetijono Blora	19 Orang	1.040.000.000	PAD, DAU, DBH	19 Orang	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOETIJONO BLORA	3		
TOTAL														112.040.000.000			49.000.000.000				

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KABUPATEN BLORA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOEPRAPTO CEPU

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																	
01	02			KESEHATAN																	
01	02	26		PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA				Persentase pemenuhan kebutuhan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit per tahun	100 %					61.400.000.000			23.800.000.000				
01	02	26	001	Pembangunan rumah sakit	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	Kabupaten Blora			Jumlah Gedung/bangunan Terbangun	8 Unit	Tersedianya rumah dinas dokter	100 %	1.600.000.000	Dana Infrastruktur	2 Unit	800.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOEPRAPTO CEPU	1	Aparatur	
01	02	26	018	Pengadaan alat-alat rumah sakit	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	Kabupaten Blora			Persentase ketersediaan alat-alat kesehatan rumah sakit	100 %	Terlayaninya pemeriksaan pasien menggunakan alat-alat kesehatan rumah sakit	100 %	1.000.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	1.000.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOEPRAPTO CEPU	1	Masyarakat	
01	02	26	019	Pengadaan obat-obatan rumah sakit	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	Kabupaten Blora			Jumlah obat-obatan dan BHP sesuai FORNAS (Formularium Nasional)	25 Paket	Terpenuhinya kebutuhan obat-obatan untuk pasien	12 Bulan	5.000.000.000	PAD, DAU, DBH	25 Paket	5.000.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOEPRAPTO CEPU	1	Masyarakat	
01	02	26	028	Pengadaan instalasi air bersih rumah sakit	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	Kabupaten Blora			Jumlah unit instalasi Pengolahan Air Bersih	1 Unit	Persentase (%) Ketersediaan air bersih rumah sakit	100 %	1.500.000.000	Dana Infrastruktur	0 Unit	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOEPRAPTO CEPU	1	Masyarakat	
01	02	26	048	Pembangunan Gedung Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	Kabupaten Blora			Jumlah gedung instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit yang dibangun	1 Unit	Persentase (%) tersedianya tempat perbaikan dan penyimpanan barang rumah sakit	100 %	300.000.000	Dana Infrastruktur	0 Unit	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOEPRAPTO CEPU	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan									
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	02	26	049	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan rujukan kesehatan (DAK)	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan rujukan kesehatan	100 %	Terlayaninya pemeriksaan pasien dengan menggunakan sarpras Kesehatan	100 %	50.000.000.000	DAK FISIK	100 %	15.000.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOEPRAPTO CEPU	1	Masyarakat	
01	02	26	051	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan rujukan kesehatan (DBHCHT)	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan rujukan kesehatan	100 %	Terlayaninya pemeriksaan pasien menggunakan alat-alat kesehatan rumah sakit	100 %	2.000.000.000	DBHCHT	100 %	2.000.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOEPRAPTO CEPU	1	Masyarakat	
01	02	33		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLUD KESEHATAN				Status Akreditasi Rumah Sakit versi KARS	Paripurna					23.740.000.000			24.900.000.000				
								Jumlah Kunjungan Rawat Jalan	25.959 orang												
								AVLOS (Average Length of Stay)	5,56 hari												
								NDR (Net Death Rate)	0,016												
								BOR (Bed Occupancy Ratio	70												
								TOI (Turn Over Interval)	2,43												
								BTO (Bed Turn Over)	49,06												
								Jumlah Kunjungan Rawat Inap	10.426 orang												
								Tingkat Kepuasan Pasien	83,03 %												
01	02	33	001	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD rumah sakit	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Kabupaten Blora			Jumlah bulan biaya operasional BLUD rumah sakit	12 Bulan	Terpenuhinya pelayanan kesehatan masyarakat	21000 Orang	22.000.000.000	BLUD	12 Bulan	23.000.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOEPRAPTO CEPU	1	Masyarakat	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan									
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	02	33	002	Pendukung pelayanan BLUD rumah sakit	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	Kabupaten Blora			Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan	188 Orang	Terlaksananya pelayanan pasien dengan tenaga rumah sakit	100 %	1.740.000.000	PAD, DAU, DBH	188 Orang	1.900.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOEPRAPTO CEPU	3	Aparatur	
01				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																	
01	02			KESEHATAN																	
01	02	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%					0			0				
								Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur													
01	02	02	011	Pengadaan instalasi air, listrik, dan telepon	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan instalasi air, listrik dan telepon	100 %	Persentase (%) pasokan daya/listrik rumah sakit	100 %	900.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOEPRAPTO CEPU	1	Masyarakat	
TOTAL														86.040.000.000			48.700.000.000				

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KABUPATEN BLORA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																	
01	03			PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																	
01	03	15		PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN				Panjang jembatan baru yang terbangun	30					544.285.000.000			0				
01	03	15	217	Peningkatan Jalan I	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	JL.REKSODIPUTRO			Panjang jalan yang ditingkatkan	1000 m	Panjang jalan yang ditingkatkan	1000 m	1.000.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Andongrejo - Purworejo			Panjang jalan yang ditingkatkan	3000 m	Panjang jalan Yang Terbangun	3000 m	3.000.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	JIKEN - GUWO - JANJANG			Panjang jalan yang ditingkatkan	1000 m	Panjang Jalan yang dibangun	1000 m	1.000.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	KARANG - NGLENGKIR			Panjang jalan yang ditingkatkan	1500 m	Panjang Jalan yang dibangun	1500 m	3.000.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	TUTUP - SUKOREJO			Panjang jalan yang ditingkatkan	150 m	Panjang Jalan yang dibangun	150 m	150.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	TEMPELEMAHBANG - PRANTAAN			Panjang jalan yang ditingkatkan	500 m	Panjang Jalan yang dibangun	500 m	500.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	TAMBAHREJO - TAWANGREJO			Panjang jalan yang ditingkatkan	350 m	Panjang Jalan yang dibangun	350 m	350.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	BLEBOH - JANJANG			Panjang jalan yang ditingkatkan	1000 m	Panjang Jalan yang dibangun	1000 m	1.000.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	PENGKOLREJO - NGRAMBITAN			Panjang jalan yang ditingkatkan	1000 m	Panjang Jalan yang dibangun	1000 m	1.000.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	SITIREJO - KESER			Panjang jalan yang ditingkatkan	200 m	Panjang Jalan yang dibangun	200 m	200.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	SARIMULYO - PENGKOREJO			Panjang jalan yang ditingkatkan	200 m	Panjang Jalan yang dibangun	200 m	200.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	NGLAWIYAN - BALONG			Panjang jalan yang ditingkatkan	400 m	Panjang Jalan yang dibangun	400 m	400.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	KEDUNGBACIN - KALINANAS			Panjang jalan yang ditingkatkan	500 m	Panjang Jalan yang dibangun	500 m	500.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	SEMAWUR - SRIGADING			Panjang jalan yang ditingkatkan	1300 m	Panjang Jalan yang dibangun	1300 m	1.300.000.000	Dana Infrastruktur	1 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	BRADAK - SEMAWUR			Panjang jalan yang ditingkatkan	400 m	Panjang Jalan yang dibangun	400 m	400.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	BRADAK - KROCOK			Panjang jalan yang ditingkatkan	650 m	Panjang Jalan yang dibangun	650 m	650.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	JAPAH - BRADAK			Panjang jalan yang ditingkatkan	1000 m	Panjang Jalan yang dibangun	1000 m	1.000.000.000	Dana Infrastruktur	1 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	BOGEM - SUMBERJO			Panjang jalan yang ditingkatkan	500 m	Panjang Jalan yang dibangun	500 m	500.000.000	Dana Infrastruktur	500 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	BADONG - KENDURUAN			Panjang jalan yang ditingkatkan	1000 m	Panjang Jalan yang dibangun	1000 m	1.000.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	JAPAH - TUNJUNGAN			Panjang jalan yang ditingkatkan	500 m	Panjang Jalan yang dibangun	500 m	500.000.000	Dana Infrastruktur	500 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	CABAK - BLEBOH			Panjang jalan yang ditingkatkan	700 m	Panjang Jalan yang dibangun	700 m	700.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	SAMBONG - NGROTO			Panjang jalan yang ditingkatkan	500 m	Panjang Jalan yang dibangun	500 m	500.000.000	Dana Infrastruktur	1 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	PAKIS - BANGSRI			Panjang jalan yang ditingkatkan	500 m	Panjang Jalan yang dibangun	500 m	500.000.000	Dana Infrastruktur	500 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	SESO - SUMURBOTO			Panjang jalan yang ditingkatkan	1000 m	Panjang Jalan yang dibangun	1000 m	1.000.000.000	Dana Infrastruktur	1 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	SESO - JATIREJO			Panjang jalan yang ditingkatkan	1499 m	Panjang jalan yang ditingkatkan	1500 m	1.500.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	SOKA - BTS. KAB. REMBANG			Panjang jalan yang ditingkatkan	500 m	Panjang Jalan yang dibangun	500 m	500.000.000	Dana Infrastruktur	1 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	KARANGTALUN - BANJAREJO			Panjang jalan yang ditingkatkan	500 m	Panjang Jalan yang dibangun	500 m	500.000.000	Dana Infrastruktur	1 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	TAWANGREJO - KARANGTALUN			Panjang jalan yang ditingkatkan	500 m	Panjang Jalan yang dibangun	500 m	500.000.000	Dana Infrastruktur	1 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	TUNJUNGAN - NGLANGITAN			Panjang jalan yang ditingkatkan	500 m	Panjang Jalan yang dibangun	500 m	500.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	TAMBAHREJO - TUNJUNGAN			Panjang jalan yang ditingkatkan	1000 m	Panjang Jalan yang dibangun	1000 m	1.000.000.000	Dana Infrastruktur	1 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01 03 15 218	Peningkatan Jalan I (DAK)	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Ruas Bogorejo - Jambetelu			Panjang jalan yang ditingkatkan	5000 m	panjang jalan yang ditingkatkan	5000 m	27.500.000.000	DAK FISIK	1	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	KALISARI - WULUNG			Panjang jalan yang ditingkatkan	2000 m	Panjang jalan yang ditingkatkan	2000 m	16.500.000.000	DAK FISIK	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Maguan - Tunjungan			Panjang jalan yang ditingkatkan	4000 m	Panjang Jalan yang ditingkatkan	4000 m	22.000.000.000	DAK FISIK	1	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	KAMOLAN BANJAREJO			Panjang jalan yang ditingkatkan	7000 m	Panjang Jalan yang ditingkatkan	7000 m	38.500.000.000	DAK FISIK	1	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Kamolan-Klopoduwur			Panjang jalan yang ditingkatkan	2500 m	Panjang Jalan yang ditingkatkan	2500 m	13.750.000.000	DAK FISIK	1	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Jl. Gunandar			Panjang jalan yang ditingkatkan	1000 m	panjang jalan yang ditingkatkan	1000 m	5.500.000.000	DAK FISIK	1	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01 03 15 219	Peningkatan Jalan I (Banprov)	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	KAMOLAN - KLOPODUWUR			Panjang jalan yang ditingkatkan	400 m	Panjang jalan yang ditingkatkan	400 m	1.000.000.000	BANKEU PROV	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	PELEM - JOMBLANG			Panjang jalan yang ditingkatkan	500 m	Panjang jalan yang ditingkatkan	500 m	1.000.000.000	BANKEU PROV	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	BLORA - RANDUBLATUNG			Panjang jalan yang ditingkatkan	5000 m	Panjang jalan yang ditingkatkan	5000 m	20.000.000.000	BANKEU PROV	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan				Panjang jalan yang ditingkatkan	500 m	Panjang jalan yang ditingkatkan	500 m	1.000.000.000	BANKEU PROV	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	JEPON - BOGOREJO			Panjang jalan yang ditingkatkan	2000 m	anjang jalan yang ditingkatkan	2000 m	10.000.000.000	BANKEU PROV	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan				Panjang jalan yang ditingkatkan	600 m	Panjang jalan yang ditingkatkan	600 m	1.200.000.000	BANKEU PROV	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	JL. SUMBAWA			Panjang jalan yang ditingkatkan	1000 m	Panjang Jalan yang dibangun	1000 m	1.000.000.000	BANKEU PROV	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan				Panjang jalan yang ditingkatkan	1000 m	Panjang Jalan yang dibangun	1000 m	1.000.000.000	BANKEU PROV	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	JL. MALUKU			Panjang jalan yang ditingkatkan	1000 m	Panjang Jalan yang dibangun	1000 m	1.000.000.000	BANKEU PROV	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	JL. REKSODIPUTRO			Panjang jalan yang ditingkatkan	1000 m	Panjang Jalan yang dibangun	1000 m	1.000.000.000	BANKEU PROV	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	JL. HALMAHERA			Panjang jalan yang ditingkatkan	1000 m	Panjang Jalan yang dibangun	1000 m	1.000.000.000	BANKEU PROV	1 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	TAMANREJO - KUNDEN			Panjang jalan yang ditingkatkan	1000 m	Panjang Jalan yang dibangun	1000 m	1.000.000.000	BANKEU PROV	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	JL. Taman Makam Pahlawan			Panjang jalan yang ditingkatkan	1000 m	Panjang Jalan yang dibangun	1000 m	1.000.000.000	BANKEU PROV	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	BANGKLE - PAKIS			Panjang jalan yang ditingkatkan	1000 m	Panjang Jalan yang dibangun	1000 m	1.000.000.000	BANKEU PROV	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	DOGLIK - GOATERAWANG			Panjang jalan yang ditingkatkan	1000 m	Panjang Jalan yang dibangun	1000 m	2.000.000.000	BANKEU PROV	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	BOGOREJO - JAMBETELU			Panjang jalan yang ditingkatkan	1000 m	Panjang Jalan yang dibangun	1000 m	2.000.000.000	BANKEU PROV	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	GOATERAWANG - KETILENG			Panjang jalan yang ditingkatkan	1000 m	Panjang Jalan yang dibangun	1000 m	2.000.000.000	BANKEU PROV	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	JATIREJO - SOKA			Panjang jalan yang ditingkatkan	1000 m	Panjang Jalan yang dibangun	1000 m	2.000.000.000	BANKEU PROV	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan				Panjang jalan yang ditingkatkan	5000 m	Panjang Jalan yang dibangun	5000 m	10.000.000.000	BANKEU PROV	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	KALISARI - WULUNG			Panjang jalan yang ditingkatkan	1000 m	Panjang Jalan yang dibangun	1000 m	1.000.000.000	BANKEU PROV	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	KLOPODUWUR - NGLIRON			Panjang jalan yang ditingkatkan	1000 m	Panjang Jalan yang dibangun	1000 m	1.000.000.000	BANKEU PROV	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	PAKIS - PELEM			Panjang jalan yang ditingkatkan	2000 m	Panjang Jalan yang dibangun	2000 m	2.000.000.000	BANKEU PROV	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	NGLANGITAN - BLORA			Panjang jalan yang ditingkatkan	1000 m	Panjang Jalan yang dibangun	1000 m	1.000.000.000	BANKEU PROV	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	KETILENG - NGUMBUL			Panjang jalan yang ditingkatkan	1000 m	Panjang Jalan yang dibangun	1000 m	1.000.000.000	BANKEU PROV	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	MAGUAN - TUNJUNGAN			Panjang jalan yang ditingkatkan	1000 m	Panjang Jalan yang dibangun	1000 m	1.000.000.000	BANKEU PROV	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01 03 15 220	Pembangunan Talud/Drainase/Turap/Gorong-Gorong/Bronjong Jalan I	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Bleboh - Nanas - Singget			Panjang talud/drainase/turap/gorong-gorong/bronjong jalan yang dibangun	200 m	Panjang talud/drainase/turap/gorong-gorong/bronjong jalan yang dibangun	200 m	200.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Turirejo - Sumurboto			Panjang talud/drainase/turap/gorong-gorong/bronjong jalan yang dibangun	300 m	Panjang talud/drainase/turap/gorong-gorong/bronjong jalan yang dibangun	300 m	300.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Puledagel - Karang			Panjang talud/drainase/turap/gorong-gorong/bronjong jalan yang dibangun	450 m	Panjang talud/drainase/turap/gorong-gorong/bronjong jalan yang dibangun	450 m	450.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Bacem - Karang			Panjang talud/drainase/turap/gorong-gorong/bronjong jalan yang dibangun	200 m	Panjang talud/drainase/turap/gorong-gorong/bronjong jalan yang dibangun	200 m	200.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	JEPON - KARANG			Panjang talud/drainase/turap/gorong-gorong/bronjong jalan yang dibangun	5 m	Bangunan Gorong-gorong	5 m	360.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01 03 15 221	Pembangunan Jembatan I	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	JEMBATAN BOGOREJO KEC. BOGOREJO			Panjang jembatan yang dibangun	25 m	Panjang Jembatan yang dibangun	25 m	2.500.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Jembatan Sendangagung Kec. Banjarejo			Panjang jembatan yang dibangun	25 m	Panjang Jembatan yang dibangun	25 m	7.000.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	JEMBATAN NGLAWIYAN I DAN II RUAS JALAN KARANGJATI - BANGKLE			Panjang jembatan yang dibangun	16 m	Panjang Jembatan yang dibangun	16 m	1.500.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	JEMBATAN NGADIPURWO II RUAS JALAN MEDANG - JATIREJO			Panjang jembatan yang dibangun	15 m	Panjang Jembatan yang dibangun	15 m	500.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	JEMBATAN KALANGAN RUAS JALAN JAPAH - TUNJUNGAN			Panjang jembatan yang dibangun	15 m	Panjang Jembatan yang dibangun	15 m	600.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01 03 15 222	Peningkatan Jalan II	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Gabusan - Perbatasan kab. Grobogan			Panjang jalan yang ditingkatkan	1000 m	Panjang Jalan Yang dibangun	1000 m	1.000.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	JL. Ronggolawe			Panjang jalan yang ditingkatkan	1500 m	Panjang Jalan yang dibangun	1500 m	1.500.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Ngraho - Kedinding			Panjang jalan yang ditingkatkan	500 m	Panjang Jalan yang dibangun	500 m	500.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Gempol - Kepoh			Panjang jalan yang ditingkatkan	500 m	Panjang Jalan yang dibangun	500 m	500.000.000	Dana Infrastruktur	-1 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Tlogotuwung - Gempol			Panjang jalan yang ditingkatkan	250 m	Panjang Jalan yang dibangun	250 m	500.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Galuk - Nglangkrang - Temengeng			Panjang jalan yang ditingkatkan	500 m	Panjang Jalan yang dibangun	500 m	500.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Kutukan - Kalisari			Panjang jalan yang ditingkatkan	650 m	Panjang Jalan yang dibangun	650 m	650.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Kadengan - Tanggel			Panjang jalan yang ditingkatkan	650 m	Panjang Jalan yang dibangun	650 m	650.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Tawangrejo - Bergolo			Panjang jalan yang ditingkatkan	650 m	Panjang Jalan yang dibangun	650 m	650.000.000	Dana Infrastruktur	650 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Jati - Singget			Panjang jalan yang ditingkatkan	500 m	Panjang Jalan yang dibangun	500 m	500.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Kutukan - Sumberejo			Panjang jalan yang ditingkatkan	200 m	Panjang Jalan yang dibangun	200 m	200.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Jatisari - Jatiklampok			Panjang jalan yang ditingkatkan	500 m	Panjang Jalan yang dibangun	500 m	500.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Jati - Karangmojo			Panjang jalan yang ditingkatkan	500 m	Panjang Jalan yang dibangun	500 m	1.000.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Kembang - Plosorejo			Panjang jalan yang ditingkatkan	500 m	Panjang Jalan yang dibangun	500 m	500.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Gondel - Wado			Panjang jalan yang ditingkatkan	200 m	Panjang Jalan yang dibangun	200 m	200.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Sambonganyar - Banjarejo			Panjang jalan yang ditingkatkan	1000 m	Panjang Jalan yang dibangun	1000 m	500.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Banjarejo - Mojowetan			Panjang jalan yang ditingkatkan	1000 m	Panjang Jalan yang dibangun	1000 m	1.000.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Ngampon - Gohito			Panjang jalan yang ditingkatkan	400 m	Panjang Jalan yang dibangun	400 m	400.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Sembungin - Adirejo			Panjang jalan yang ditingkatkan	500 m	Panjang Jalan yang dibangun	500 m	500.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Balong - Kepoh			Panjang jalan yang ditingkatkan	600 m	Panjang Jalan yang dibangun	600 m	600.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Karangtalun - Sembungin			Panjang jalan yang ditingkatkan	250 m	Panjang Jalan yang dibangun	250 m	1.000.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Kediren - Sumber			Panjang jalan yang ditingkatkan	250 m	Panjang Jalan yang dibangun	250 m	500.000.000	Dana Infrastruktur	-1 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Ngloram - Sidorejo			Panjang jalan yang ditingkatkan	1000 m	Panjang Jalan yang dibangun	10000 m	1.000.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Mulyorejo - Ngloram			Panjang jalan yang ditingkatkan	500 m	Panjang Jalan yang dibangun	500 m	400.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Ngraho - Ketuwan			Panjang jalan yang ditingkatkan	1000 m	Panjang Jalan yang dibangun	1000 m	2.000.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Sumber - Balong			Panjang jalan yang ditingkatkan	250 m	Panjang Jalan yang dibangun	250 m	600.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Pilang - Menden			Panjang jalan yang ditingkatkan	1000 m	Panjang Jalan yang dibangun	1000 m	1.500.000.000	Dana Infrastruktur	-1 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Wulung - Klatak			Panjang jalan yang ditingkatkan	500 m	Panjang Jalan yang dibangun	500 m	600.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Kemadoh - Bangkleyan			Panjang jalan yang ditingkatkan	1000 m	Panjang Jalan yang dibangun	1000 m	600.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Ketuwan - Gondel - Mojorembun			Panjang jalan yang ditingkatkan	1000 m	Panjang Jalan yang dibangun	1000 m	600.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01 03 15 223	Peningkatan Jalan II (DAK)	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Peting - Sumber			Panjang jalan yang ditingkatkan	3200 m	Panjang Jalan yang ditingkatkan	3200 m	17.600.000.000	DAK FISIK	1	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Ruas Ngraho-Ketuwan			Panjang jalan yang ditingkatkan	4500 m	Panjang Jalan yang dibangun	4500 m	24.750.000.000	DAK FISIK	1	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Pilang - Menden			Panjang jalan yang ditingkatkan	3000 m	Panjang Jalan yang dibangun	3000 m	16.500.000.000	DAK FISIK	1	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Mulyorejo - Ngloram			Panjang jalan yang ditingkatkan	4500 m	Panjang Jalan yang dibangun	4500 m	24.750.000.000	DAK FISIK	1	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Trembulrejo - Plumbon			Panjang jalan yang ditingkatkan	1500 m	Panjang Jalan yang ditingkatkan	1500 m	8.250.000.000	DAK FISIK	1	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Doplang - Kunduran			Panjang jalan yang ditingkatkan	5000 m	Panjang Jalan yang ditingkatkan	5000 m	27.500.000.000	DAK FISIK	1	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01 03 15 224	Peningkatan Jalan II (Banprov)	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Doplang - Kunduran			Panjang jalan yang ditingkatkan	5000 m	Panjang Jalan yang dibangun	5000 m	10.000.000.000	BANKEU PROV	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	JL. RSU			Panjang jalan yang ditingkatkan	1700 m	Panjang Jalan yang dibangun	1700 m	5.000.000.000	BANKEU PROV	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	JL. Ronggolawe			Panjang jalan yang ditingkatkan	650 m	Panjang Jalan yang dibangun	650 m	3.000.000.000	BANKEU PROV	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Ngraho - Ketuwan			Panjang jalan yang ditingkatkan	4500 m	Panjang Jalan yang dibangun	4500 m	10.000.000.000	BANKEU PROV	1 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Randublatung - Getas			Panjang jalan yang ditingkatkan	4000 m	Panjang Jalan yang dibangun	4000 m	20.000.000.000	BANKEU PROV	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Menden - Megeri			Panjang jalan yang ditingkatkan	4000 m	Panjang Jalan yang dibangun	4000 m	15.000.000.000	BANKEU PROV	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01 03 15 225	Pembangunan Talud/Drainase/Turap/Gorong-Gorong/Bronjong Jalan II	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	KAMOLAN - JIPANGREJO - BADONG			Panjang talud/drainase/turap/gorong-gorong/bronjong jalan yang dibangun	300 m	Panjang talud/drainase/turap/gorong-gorong/bronjong jalan yang dibangun	300 m	300.000.000	Dana Infrastruktur	300 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	KALANGREJO - MURAHARJO			Panjang talud/drainase/turap/gorong-gorong/bronjong jalan yang dibangun	300 m	Panjang talud/drainase/turap/gorong-gorong/bronjong jalan yang dibangun	300 m	300.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	GLAGAHAN - NGAMPON			Panjang talud/drainase/turap/gorong-gorong/bronjong jalan yang dibangun	200 m	Panjang talud/drainase/turap/gorong-gorong/bronjong jalan yang dibangun	200 m	200.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	PELEM - NGAMPON			Panjang talud/drainase/turap/gorong-gorong/bronjong jalan yang dibangun	200 m	Panjang talud/drainase/turap/gorong-gorong/bronjong jalan yang dibangun	200 m	200.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	15	228	Pengadaan tanah jalan dan jembatan II	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan				Luas tanah yang dibebaskan	500 m2	Luas tanah yang dibebaskan	500 m2	500.000.000	Dana Infrastruktur	0 m2	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan				Luas tanah yang dibebaskan	500 m2	Luas tanah yang dibebaskan	500 m	350.000.000	PAD, DAU, DBH	0 m2	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan				Luas tanah yang dibebaskan	500 m2	Luas tanah yang dibebaskan	500 m2	75.000.000	PAD, DAU, DBH	0 m2	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	15	231	Pengawasan dan pengendalian kegiatan I	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan				Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian pembangunan jalan dan jembatan	1 Laporan	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian pembangunan jalan dan jembatan	1 Laporan	1.250.000.000	PAD, DAU, DBH	0 Laporan	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	15	232	Pengawasan dan pengendalian kegiatan II	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan				Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian pembangunan jalan dan jembatan	1 Laporan	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian pembangunan jalan dan jembatan	1 Laporan	1.250.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Laporan	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	15	234	Pembangunan jembatan II (Banprov)	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	medalem - ngraho			Panjang jembatan yang dibangun	60 m	Panjang jembatan yang dibangun	60 m	100.000.000.000	BANKEU PROV	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	15	235	Pembangunan Talud/Drainase/Turap/Gorong-Gorong/Bronjong Jalan I (Banprov)	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	BANGKLE - PELEM			Panjang talud/drainase/turap/gorong-gorong/bronjong jalan yang dibangun	1000 m	Panjang talud/drainase/turap/gorong-gorong/bronjong jalan yang dibangun	1000 m	1.000.000.000	BANKEU PROV	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	KAMOLAN - PELEM			Panjang talud/drainase/turap/gorong-gorong/bronjong jalan yang dibangun	550 m	Panjang talud/drainase/turap/gorong-gorong/bronjong jalan yang dibangun	550 m	550.000.000	BANKEU PROV	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	15	236	Pembangunan Talud/Drainase/Turap/Gorong-Gorong/Bronjong Jalan II (Banprov)	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	KAMOLAN - GLAGAHAN - NGAMPON			Panjang talud/drainase/turap/gorong-gorong/bronjong jalan yang dibangun	450 m	Panjang talud/drainase/turap/gorong-gorong/bronjong jalan yang dibangun	450 m	450.000.000	BANKEU PROV	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	PLUMBON - ROWOBUNGKUL			Panjang talud/drainase/turap/gorong-gorong/bronjong jalan yang dibangun	1500 m	Panjang talud/drainase/turap/gorong-gorong/bronjong jalan yang dibangun	1500 m	1.500.000.000	BANKEU PROV	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	ROWOBUNGKUL - KEMIRI			Panjang talud/drainase/turap/gorong-gorong/bronjong jalan yang dibangun	1500 m	Panjang talud/drainase/turap/gorong-gorong/bronjong jalan yang dibangun	1500 m	1.500.000.000	BANKEU PROV	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	GEDONGSARI - JEPANGREJO			Panjang talud/drainase/turap/gorong-gorong/bronjong jalan yang dibangun	450 m	Panjang talud/drainase/turap/gorong-gorong/bronjong jalan yang dibangun	450 m	450.000.000	BANKEU PROV	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	TREMBULREJO - PLUMBON			Panjang talud/drainase/turap/gorong-gorong/bronjong jalan yang dibangun	1500 m	Panjang talud/drainase/turap/gorong-gorong/bronjong jalan yang dibangun	150	1.500.000.000	BANKEU PROV	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	18		PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN				Persentase Jalan kondisi baik						3.500.000.000			0				
								Persentase Jembatan dalam kondisi baik													
01	03	18	109	Pemeliharaan Jalan I	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-				Panjang jalan yang dipelihara	10000 m	Panjang jalan yang dipelihara	10000 m	1.000.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	TUGU PANCASILA (JALAN GUNANDAR)			Panjang jalan yang dipelihara	250 m	Panjang jalan yang dipelihara	250 m	500.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	18	110	Pemeliharaan Jembatan I	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	MEDANG - NGLANGITAN			Panjang jembatan yang dipelihara	6 m	Panjang jembatan yang dipelihara	6 m	200.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	18	111	Pemeliharaan Jalan II	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	SE - KAB BLORA			Panjang jalan yang dipelihara	10000 m	Panjang jalan yang dipelihara	10000 m	1.000.000.000	Dana Infrastruktur	10000 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	SE - KAB BLORA			Panjang jalan yang dipelihara	10000 m	Panjang jalan yang dipelihara	10000 m	800.000.000	Dana Infrastruktur	10000 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	23		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN				Persentasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan	100%					400.000.000			0				
01	03	23	011	Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-				Persentase peralatan dan perlengkapan bengkel dan alat-alat berat dalam kondisi baik	100 %	Terpeliharanya alat alat berat dan perlengkapan workshop	100 %	400.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	24		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA				Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	45%					65.955.860.000			0				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	40,03%												
01	03	24	056	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi I	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi				Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	100.000.000	PAD, DAU, DBH	0 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi				Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	100.000.000	PAD, DAU, DBH	0 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi				Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	100.000.000	PAD, DAU, DBH	0 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi				Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	100.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi	KEC.KUNDURAN			Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	100.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	24	058	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi I	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi	Daerah Irigasi (DI) Greneng			Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	400 m	Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	400 m	400.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi	Daerah Irigasi (DI) Lawungan			Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	500 m	Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	500 m	500.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi	Daerah Irigasi (DI) Kaliwedi Kecamatan Kunduran			Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	400 m	Panjang Saluran Irigasi terbangun	400 m	400.000.000	Dana Infrastruktur	-1 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi	daerah Irigasi (DI) Lego			Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	500 m	Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	500 m	500.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi	Daerah Irigasi (DI) Gembleb			Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	475 m	Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	475 m	475.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi	Daerah Irigasi (DI)Gabus Kecamatan Blora			Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	500 m	Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	500 m	500.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi	Daerah Irigasi (DI) Dumpul			Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	350 m	Panjang Saluran Irigasi terbangun	350 m	350.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi	Daerah Irigasi (DI) Embung Kalangrejo			Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	350 m	Panjang Saluran Irigasi terbangun	350 m	350.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi	Daerah Irigasi (DI) Kedungrejo			Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	350 m	Panjang Saluran Irigasi terbangun	350 m	350.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi	Daerah Irigasi (DI) Karanganyar I			Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	300 m	Panjang Saluran Irigasi terbangun	300 m	300.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi	Daerah Irigasi (DI) Tawang			Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	300 m	Panjang Saluran Irigasi terbangun	300 m	300.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi	Daerah Irigasi (DI) Tempel Lemahbang			Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	300 m	Panjang Saluran Irigasi terbangun	300 m	300.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi	Daerah Irigasi (DI) Nglarohgunung			Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	350 m	Panjang saluran irigasi terbangun	350 m	350.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi	Daerah Irigasi (DI) Palon			Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	300 m	Panjang Saluran Irigasi terbangun	300 m	300.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi	Daerah Irigasi (DI) Kedung Embut			Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	300 m	Panjang Saluran Irigasi terbangun	300 m	300.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi	Daerah Irigasi (DI) Bruk			Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	500 m	Panjang Saluran Irigasi terbangun	500 m	500.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi	Daerah Irigasi (DI) Ledok			Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	300 m	Panjang Saluran Irigasi terbangun	300 m	300.000.000	Dana Infrastruktur	4 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi	Daerah Irigasi (DI) Bradak			Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	400 m	Panjang Saluran Irigasi terbangun	400 m	400.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi	Daerah irigasi (DI) Rondokuning			Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	200 m	Panjang Saluran Irigasi terbangun	200 m	350.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi	Daerah Irigasi (DI) Gayam			Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	200 m	Panjang Saluran Irigasi terbangun	200 m	300.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	03	24	060	Pemberdayaan Petani Pemakai Air I	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi				Jumlah rapat koordinasi	1 Kali	Pelatihan dan praktek lapangan	1 Paket	300.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Kali	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi				Jumlah rapat koordinasi	1 Kali	Pelatihan	1 Kali	75.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Kali	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	24	061	O dan P Bangunan/Jaringan Irigasi I	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi	wilayah Bidang SDA I			Panjang saluran irigasi yang dilakukan OP	500 m	Saluran Irigasi Kondisi baik	500 m	500.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	24	062	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi II	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi				Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan	1 Paket	100.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi				Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	24	064	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi II	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi	Daerah Irigasi (DI) Embung Keruk			Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	300 m	Panjang Saluran Irigasi terbangun	300 m	300.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi	Daerah Irigasi (DI) Sambong			Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	300 m	Panjang Saluran Irigasi terbangun	300 m	300.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi	Daerah Irigasi (DI) Kalen			Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	500 m	Panjang Saluran Irigasi terbangun	500 m	500.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi	Daerah Irigasi (DI) Giyanti			Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	300 m	Panjang Saluran Irigasi terbangun	300 m	300.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi	Daerah Irigasi (DI) Biting			Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	250 m	Panjang Saluran Irigasi terbangun	250 m	250.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi	Daerah Irigasi (DI) Kali Ungkal			Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	300 m	Panjang Saluran Irigasi terbangun	300 m	300.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi	Daerah Irigasi (DI) Ledok			Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	300 m	Panjang Saluran Irigasi terbangun	300 m	300.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	24	065	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi II (DAK)	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi	Daerah Irigasi (DI) Bleboh			Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	1000 m	Panjang Saluran Irigasi terehabilitasi	1000 m	1.600.000.000	DAK FISIK	1 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi	Daerah Irigasi (DI) Mursapa			Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	1000 m	Panjang Saluran Irigasi terehabilitasi	1000 m	1.650.000.000	DAK FISIK	1 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi	Daerah Irigasi (DI) Cabean			Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	600 m	Panjang Saluran Irigasi direhabilitasi	600 m	980.000.000	DAK FISIK	1 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	24	067	O dan P bangunan/jaringan Irigasi II	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi	Wilayah SDA II			Panjang saluran irigasi yang dilakukan OP	500 m	Saluran Irigasi Kondisi baik	500 m	500.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	24	068	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi I (Banprov)	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi	Daerah Irigasi (DI) Waduk Bruk,Daerah Irigasi (DI) Kidangan,Daerah Irigasi (DI) Kundi,Deerah Irigasi (DI) Glagahan, Daerah Irigasi (DI) Kedung Lo, Daerah Irigasi (DI) Prantaan,Daerah Irigasi (DI)Wali			Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	2000 m	Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	2000 m	7.000.000.000	BANKEU PROV	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi	saluran irigasi embung karangjati, Daerah Irigasi (DI) Greneng, Daerah Irigasi (DI) Lawungan,, Daerah Irigasi (DI) Lego , Daerah Irigasi (DI) Gabus,			Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	2000 m	Panjang Saluran Irigasi terbangun	2000 m	7.000.000.000	BANKEU PROV	1 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi	Daerah Irigasi (DI) Kemiri, Daerah Irigasi (DI) Patihan, Daerah Irigasi (DI) Jurangjero,Daerah Irigasi (DI) Adirejo,Jaringan Iirgasi Embung Tawangrejo, DI Cungkup, DI Sonokidul			Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	1400 m	Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	1400 m	7.000.000.000	BANKEU PROV	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	24	070	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi I (DAK)	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi	DI Ngrandu			Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	1000 m	Panjang Saluran Irigasi direhabilitasi	1000 m	652.400.000	DAK FISIK	1 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi	DI Watumalang			Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	750 m	Panjang Saluran Irigasi direhabilitasi	750 m	1.266.700.000	DAK FISIK	1 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi	DI Watesdolok			Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	1250 m	Panjang Saluran Irigasi direhabilitasi	1250 m	1.593.480.000	DAK FISIK	1 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi	DI Gembleb			Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	750 m	Panjang Saluran Irigasi direhabilitasi	750 m	1.146.980.000	DAK FISIK	1 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi	DI. Pelem			Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	1000 m	Panjang Saluran Irigasi Direhabilitasi	1000 m	1.514.840.000	DAK FISIK	1 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi	DI. Ketileng			Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	750 m	Panjang Saluran Irigasi direhabilitasi	750 m	1.137.460.000	DAK FISIK	1 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi	DI. Rondokuning			Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	1000 m	Panjang saluran irigasi direhabilitasi	1000 m	1.296.610.000	DAK FISIK	1 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi	DI. Pengilon			Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	750 m	Panjang Saluran Irigasi direhabilitasi	750 m	999.730.000	DAK FISIK	1 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi	DI Karanggeneng I			Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	1000 m	Panjang Saluran Irigasi direhabilitasi	1000 m	1.296.610.000	DAK FISIK	1 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi	DI Kulur			Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	1000 m	Panjang Saluran Irigasi Direhabilitasi	1000 m	1.296.610.000	DAK FISIK	1 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi	DI Guwolandak			Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	1500 m	Panjang Saluran Irigasi direhabilitasi	1500 m	1.330.340.000	DAK FISIK	1 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi	DI. Watulumbung			Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	1250 m	Panjang Saluran Irigasi direhabilitasi	1250 m	1.609.150.000	DAK FISIK	1 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi	DI. Jembangan			Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	1000 m	Panjang Saluran Irigasi direhabilitasi	1000 m	760.170.000	DAK FISIK	1 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi	DI. Cigrok			Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	900 m	Panjang Saluran Irigasi direhabilitasi	900 m	1.193.520.000	DAK FISIK	1 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi	DI. Pelemsengir			Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	1000 m	Panjang Saluran Irigasi terehabilitasi	1000 m	1.264.130.000	DAK FISIK	1 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi	DI. Bentolo			Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	1000 m	Panjang Saluran Irigasi terehabilitasi	1000 m	1.296.610.000	DAK FISIK	1 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi	DI. Pesantren			Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	1000 m	Panjang Saluran Irigasi terehabilitasi	1000 m	1.304.440.000	DAK FISIK	1 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi	DI. Bogem			Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	750 m	Panjang Saluran Irigasi terehabilitasi	750 m	1.000.900.000	DAK FISIK	1 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi	DI. Gendongan			Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	1000 m	Panjang Saluran Irigasi direhabilitasi	1000 m	1.303.920.000	DAK FISIK	1 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi	DI. Tempuran			Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	2000 m	Panjang Saluran Irigasi direhabilitasi	2000 m	4.361.260.000	DAK FISIK	1 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	24	072	Pengawasan dan pengendalian kegiatan I	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi				Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian pembangunan infrastruktur SDA	1 Laporan	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian pembangunan infrastruktur SDA	1 Laporan	800.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Laporan	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	24	073	Pengawasan dan pengendalian kegiatan II	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi				Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian pembangunan infrastruktur SDA	1 Laporan	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian pembangunan infrastruktur SDA	1 Laporan	450.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Laporan	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	26		PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA				Tersedianya air embung untuk irigasi - pertanian						60.225.000.000			0				
01	03	26	024	Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penunjang Lainnya I	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Bendung/Checkdam Jagong			Jumlah check dam, embung, bendung, yang direhabilitasi	1 Buah	bangunan Check Dam, Embung, Bendung Kondisi baik	1 Buah	400.000.000	Dana Infrastruktur	0 Buah	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-				Jumlah check dam, embung, bendung, yang direhabilitasi	10 Buah	bangunan Check Dam, Embung, Bendung Kondisi baik	10 Buah	200.000.000	Dana Infrastruktur	0 Buah	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Rehabilitasi Embung Kalangrejo Kec Kunduran			Jumlah check dam, embung, bendung, yang direhabilitasi	1 Buah	bangunan Check Dam, Embung, Bendung Kondisi baik	1 Buah	1.000.000.000	Dana Infrastruktur	0 Buah	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Embung Kelurahan KarangJati			Jumlah check dam, embung, bendung, yang direhabilitasi	1 Buah	bangunan Check Dam, Embung, Bendung Kondisi baik	1 Buah	700.000.000	Dana Infrastruktur	1 Buah	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	26	025	Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Lainnya I (Banprov)	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	embung kel kunduran, embung kelurahan karangjati, embung bogem, embung kalangrejo,embung bejirejo, embung bruk, embung rondokuning,embung sumurboto,embung sambeng,			Jumlah check dam, embung, bendung, yang direhabilitasi	9 Buah	bangunan Check Dam, Embung, Bendung Kondisi baik	9 Buah	19.000.000.000	BANKEU PROV	1 Buah	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	embung balong, embung kedungrejo			Jumlah check dam, embung, bendung, yang direhabilitasi	2 Buah	Jumlah check dam, embung, bendung, yang direhabilitasi	2 Buah	2.000.000.000	BANKEU PROV	2 Buah	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	26	026	Penanganan Longsoran Sungai I	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Tanggul Anak Sungai Lusi Grojogan			Panjang longsoran sungai yang ditangani	400 m	bangunan Check Dam, Embung, Bendung Kondisi baik	400 m	800.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Ruas Jalan Sonokidul-Kalangrejo			Panjang longsoran sungai yang ditangani	500 m	bangunan Check Dam, Embung, Bendung Kondisi baik	500 m	1.000.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Anak Sungai Lusi Dk. Ngrayung Desa Sidomulyo			Panjang longsoran sungai yang ditangani	500 m	Lereng sungai kondisi baik	500 m	2.000.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Anak Sungai Lusi Desa Tempurejo			Panjang longsoran sungai yang ditangani	1500 m	Lereng sungai kondisi baik	1500 m	1.500.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Sungai Kidangan Kelurahan Jepon			Panjang longsoran sungai yang ditangani	1000 m	Panjang longsoran sungai yang ditangani	1000 m	1.000.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01 03 26 028	Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Lainnya II	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Embung Temulus Kec. Randublatung (lanjutan)			Jumlah check dam, embung, bendung yang dibangun	1 Buah	bangunan Check Dam, Embung, Bendung Kondisi baik	1 Buah	3.000.000.000	Dana Infrastruktur	0 Buah	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Embung Tambakromo kec.cepu (lanjutan)			Jumlah check dam, embung, bendung yang dibangun	1 Buah	tersedianya bangunan Check Dam, Embung, Bendung	1 Buah	3.000.000.000	Dana Infrastruktur	0 Buah	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Embung Kelurahan Wulung			Jumlah check dam, embung, bendung yang dibangun	1 Buah	tersedianya bangunan Check Dam, Embung, Bendung	1 Buah	1.500.000.000	Dana Infrastruktur	1 Buah	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Bendung Gerak Gumeng Desa Tanggel			Jumlah check dam, embung, bendung yang dibangun	1 Buah	bangunan Check Dam, Embung, Bendung Kondisi baik	1 Buah	1.500.000.000	Dana Infrastruktur	1 Buah	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01 03 26 029	Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Lainnya II	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Checkdam Ds. Ngliron			Jumlah check dam, embung, bendung, yang direhabilitasi	1 Buah	bangunan Check Dam, Embung, Bendung Kondisi baik	1 Buah	300.000.000	Dana Infrastruktur	1 Buah	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Checkdam Kedinding Desa Ngraho			Jumlah check dam, embung, bendung, yang direhabilitasi	1 Buah	bangunan Check Dam, Embung, Bendung Kondisi baik	1 Buah	375.000.000	Dana Infrastruktur	0 Buah	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01 03 26 030	Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Lainnya II (Banprov)	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Checkdam Balongkal Desa Gabusan			Jumlah check dam, embung, bendung, yang direhabilitasi	1 Buah	bangunan Check Dam, Embung, Bendung Kondisi baik	1 Buah	500.000.000	BANKEU PROV	1 Buah	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Checkdam bantengan Desa Jati			Jumlah check dam, embung, bendung, yang direhabilitasi	1 Buah	bangunan Check Dam, Embung, Bendung Kondisi baik	1 Buah	500.000.000	BANKEU PROV	1 Buah	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Checkdam Grogol Desa Doplang			Jumlah check dam, embung, bendung, yang direhabilitasi	1 Buah	bangunan Check Dam, Embung, Bendung Kondisi baik	1 Buah	500.000.000	BANKEU PROV	1 Buah	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Checkdam Ngasem 1 Desa Doplang			Jumlah check dam, embung, bendung, yang direhabilitasi	1 Buah	bangunan Check Dam, Embung, Bendung Kondisi baik	1 Buah	500.000.000	BANKEU PROV	1 Buah	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Checkdam Jeruk Desa Jeruk			Jumlah check dam, embung, bendung, yang direhabilitasi	1 Buah	bangunan Check Dam, Embung, Bendung Kondisi baik	1 Buah	500.000.000	BANKEU PROV	1 Buah	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Checkdam Plosorejo Desa Plosorejo			Jumlah check dam, embung, bendung, yang direhabilitasi	1 Buah	bangunan Check Dam, Embung, Bendung Kondisi baik	1 Buah	500.000.000	BANKEU PROV	1 Buah	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Checkdam Kadengan Desa Kadengan			Jumlah check dam, embung, bendung, yang direhabilitasi	1 Buah	bangunan Check Dam, Embung, Bendung Kondisi baik	1 Buah	500.000.000	BANKEU PROV	1 Buah	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Checkdam Kutukan 1 Desa Kutukan			Jumlah check dam, embung, bendung, yang direhabilitasi	1 Buah	bangunan Check Dam, Embung, Bendung Kondisi baik	1 Buah	500.000.000	BANKEU PROV	1 Buah	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	checkdam Besi Desa Besi			Jumlah check dam, embung, bendung, yang direhabilitasi	1 Buah	bangunan Check Dam, Embung, Bendung Kondisi baik	1 Buah	500.000.000	BANKEU PROV	1 Buah	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	checkdam bumirejo			Jumlah check dam, embung, bendung, yang direhabilitasi	1 Buah	Jumlah check dam, embung, bendung, yang direhabilitasi	1 Buah	750.000.000	BANKEU PROV	1 Buah	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01 03 26 031	Penanganan Longsoran Sungai II	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	sungai Ds. Brabowan			Panjang longsoran sungai yang ditangani	500 m	Lereng sungai kondisi baik	500 m	1.000.000.000	Dana Infrastruktur	1 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Kali Peting Desa Kutukan			Panjang longsoran sungai yang ditangani	250 m	Lereng sungai kondisi baik	250 m	750.000.000	Dana Infrastruktur	1 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Sungai Ngroto			Panjang longsoran sungai yang ditangani	300 m	Lereng sungai kondisi baik	300 m	850.000.000	Dana Infrastruktur	1 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Sungai Wulung Dk Jati Ds Sumber			Panjang longsoran sungai yang ditangani	500 m	Terbangunnya Bangunan Penahan Lereng	500 m	1.000.000.000	Dana Infrastruktur	1 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Sungai Glandangan			Panjang longsoran sungai yang ditangani	300 m	Lereng sungai kondisi baik	300 m	600.000.000	Dana Infrastruktur	1 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01 03 26 033	Penanganan longsoran sungai I (Banprov)	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	talud tanggul anak sungai lusi grojogan, anak sungai lusi dk.ngrayung desa sidomulyo			Panjang longsoran sungai yang ditangani	1000 m	Panjang longsoran sungai yang ditangani	1000 m	5.000.000.000	BANKEU PROV	1 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	03	26	034	Penanganan longsoran sungai II (Banprov)	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	kali peting desa kutukan			Panjang longsoran sungai yang ditangani	200 m	Panjang longsoran sungai yang ditangani	200 m	1.000.000.000	BANKEU PROV	1 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	26	035	Pembangunan saluran pengendali banjir I (Banprov)	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	kel.kunduran, kelurahan tempelan, ruas jalan kemiri - sonokidul, kodokan - kalangrejo			Panjang saluran pengendali banjir yang dibangun	1000 m	Panjang saluran pengendali banjir yang dibangun	1000 m	5.500.000.000	BANKEU PROV	1 m	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	33		PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG										500.000.000			0				
01	03	33	010	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang				Persentase pemenuhan rapat koordinasi tentang rencana tata ruang yang disepakati dan ditindaklanjuti	100 %	Terwujudnya Koordinasi Penataan Ruang	100 %	100.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	33	012	Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang				Jumlah aparat yang dilatih dalam perencanaan tata ruang	5 Orang	Meningkatnya aparatur penata ruang dengan pelatihan	5 Orang	50.000.000	PAD, DAU, DBH	0 Orang	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	33	013	Survey dan pemetaan	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang				Jumlah dokumen SK RTH yang ditetapkan	1 Dokumen	Tersedianya data dukung perencanaan Ruang	1 Dokumen	100.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	33	014	Koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten/kota	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang				Persentase pemenuhan Koordinasi permasalahan tata ruang dan tercapainya penataan ruang yang disepakati dan ditindaklanjuti	100 %	Tersedianya Koordinasi Permasalahan tata Ruang dan Tercapainya Penataan Ruang yang baik	100 %	250.000.000	PAD, DAU, DBH	0 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	34		PROGRAM PEMANFAATAN RUANG										300.000.000			0				
01	03	34	004	Fasilitas peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-				Jumlah orang yang difasilitasi berperan serta dalam pemanfaatan ruang	5 Orang	Terlaksanannya Peringatan Hari tata Ruang	5 Orang	100.000.000	PAD, DAU, DBH	5 Orang	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	34	007	Sosialisasi kebijakan, norma standar, prosedur, dan manual pemanfaatan ruang	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-				Jumlah peserta sosialisasi kebijakan, norma standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	40 Orang	terlaksananya Sosialisasi NSPM Pemanfaatan Ruang	40 Orang	100.000.000	PAD, DAU, DBH	40 Orang	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	34	011	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-				Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang	1 Laporan	Terlaksananya Study banding dan Monitoring Pemanfaatan Ruang	1 Laporan	100.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Laporan	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	35		PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG										100.000.000			0				
01	03	35	007	Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	DPUPR			Jumlah peserta sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	50 Orang	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	50 Orang	100.000.000	PAD, DAU, DBH	50 Orang	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																	
01	03			PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																	
01	03	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	12					0			0				
								Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	12												

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	03	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat	100 %	Tersedianya peralatan Pos	12 Bulan	3.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	3.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	100 %	Terwujudnya pelayanan masyarakat	12 Bulan	230.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	01	003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	153.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100 %	Terselenggaranya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100 %	37.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	37.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan	100 %	Terlaksananya pelayanan Administrasi Keuangan	100 %	500.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor	100 %	Terwujudnya Jasa Kebersihan Kantor	100 %	154.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	01	009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja	100 %	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	100 %	25.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	100 %	Terciptanya Kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	120.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	120.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100 %	Terciptanya Kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	37.200.000	PAD, DAU, DBH	100 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	Terwujudnya kantor yang lebih nyaman	100 Bulan	25.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	03	01	013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	Terwujudnya kantor yang lebih nyaman	100 %	200.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	Terciptanya Kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	20.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat	100 %	tersedianya makan minum rapat	100 %	61.800.000	PAD, DAU, DBH	100 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	tersedianya perjalanan dinas luar daerah	100 %	500.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	01	019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	tersedianya perjalanan dinas dalam daerah	100 %	104.390.000	PAD, DAU, DBH	100 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	01	020	Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan dukungan pelayanan perkantoran	100 %	Tersedianya Honor Tenaga Kontrak	100 Bulan	300.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	300.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	1					0			0				
01	03	02	003	Pembangunan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah gedung kantor yang dibangun	2 Unit	Jumlah gedung kantor yang dibangun	2 Unit	700.000.000	Dana Infrastruktur	1 Unit	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	02	005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	2 Unit	tersedianya kendaraan lapangan	2 Unit	900.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Unit	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	02	007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan perlengkapan gedung kantor	100 %	Persentase pemenuhan perlengkapan gedung kantor	100 Paket	100.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	03	02	010	Pengadaan mebeler	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan mebeler	100 %	pengadaan meja kursi rapat	100 %	200.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	02	012	Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor	100 %	paving halaman, taman kantor, tempat parkir dan pos satpam	100 %	210.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Terwujudnya kantor yang lebih nyaman	100 %	150.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3		
01	03	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	100 %	Tersedianya Kendaraan Operasional dalam keadaan baik	100 %	80.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				Pemenuhan kebutuhan pakaian seragam dinas						0			0				
								Pemenuhan kebutuhan pakaian seragam dinas													
01	03	03	001	Pengadaan mesin/kartu absensi	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi				Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan	5 Unit	terwujudnya disiplin aparatur	5 Unit	40.000.000	PAD, DAU, DBH	5 Unit	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	03	003	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi				Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	150 Unit	tersedianya pakaian kerja lapangan	150 Unit	80.000.000	PAD, DAU, DBH	150 Unit	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	03	005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi				Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	310 Unit	Terselenggaranya kegiatan hari jadi blora dan HUT Kemerdekaan	310 Unit	150.000.000	PAD, DAU, DBH	310 Unit	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				Peningkatan kapasitas SDM aparatur						0			0				
01	03	05	001	Pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal	5 Orang	Meningkatnya kapasitas aparatur	5 Orang	30.000.000	PAD, DAU, DBH	5 Orang	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	03	05	002	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan	20 Orang	tersosialisasinya peraturan perundangan	20 Orang	100.000.000	PAD, DAU, DBH	30 Orang	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	05	003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah orang yang mendapatkan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	5 Orang	Meningkatnya kapasitas aparatur	5 Orang	40.000.000	PAD, DAU, DBH	5 Orang	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				Nilai Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)						0			0				
								Pemenuhan kebutuhan pelaporan kinerja dan keuangan													
01	03	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	tersedianya dokumen laporan capaian kinerja	1 Laporan	10.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Laporan	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	06	004	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	tersedianya Laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	10.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Laporan	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	06	005	Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah rencana kinerja dan penetapan kinerja	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD	1 Dokumen	10.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	06	006	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah laporan akuntabilitas kinerja SKPD	1 Laporan	tersedianya dokumen laporan akuntabilitas kinerja SKPD	1 Dokumen	20.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Laporan	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	06	007	Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah dokumen RKA-SKPD dan DPA SKPD	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	1 Dokumen	10.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
01	03	06	008	Penyusunan dan Evaluasi Standarisasi Harga Indeks	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah dokumen standarisasi harga indeks	1 Dokumen	Tersedianya laporan Indeks Harga bahan	1 Dokumen	20.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1		
TOTAL														680.596.250.000			610.000.000				

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KABUPATEN BLORA

DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																	
01	04			PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN																	
01	04	15		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				Cakupan ketersediaan rumah layak huni						9.656.880.000			1.000.000.000				
01	04	15	006	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	-				Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	51 Unit	Penanganan RTLH Kel. Ngroto Kec. Cepu	51 Unit	511.680.000	DAK FISIK	0 Unit	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
					Percepatan Pengentasan Kemiskinan	-				Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	136 Unit	Penanganan RTLH Kel. Balun Kec. Cepu	136 Unit	1.364.480.000	DAK FISIK	0 Unit	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
					Percepatan Pengentasan Kemiskinan	-				Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	136 Unit	Penanganan RTLH Kel. Cepu Kec. Cepu	136 Unit	1.364.480.000	DAK FISIK	0 Unit	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
					Percepatan Pengentasan Kemiskinan	-				Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	68 Unit	Penanganan RTLH Kel.Tempelan Kec. Blora	68 Unit	682.240.000	DAK FISIK	0 Unit	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
					Percepatan Pengentasan Kemiskinan	-				Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	68 Unit	Penanganan RTLH Kel. Sonorejo Kec.Blora	68 Unit	682.240.000	DAK FISIK	0 Unit	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
					Percepatan Pengentasan Kemiskinan	-				Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	51 Unit	Penanganan RTLH Kel. Kunden Kec. Blora	51 Unit	511.680.000	DAK FISIK	0 Unit	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
					Percepatan Pengentasan Kemiskinan	-				Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	51 Unit	Penanganan RTLH Kel. Kedungjenar Kec. Blora	51 Unit	511.680.000	DAK FISIK	0 Unit	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
					Percepatan Pengentasan Kemiskinan	-				Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	68 Unit	Penanganan RTLH Kel. Kauman, Kec. Blora	68 Unit	682.240.000	DAK FISIK	0 Unit	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
					Percepatan Pengentasan Kemiskinan	-				Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	85 Unit	Penanganan RTLH Kel. Tambakromo Kec. Cepu	85 Unit	852.800.000	DAK FISIK	0 Unit	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
					Percepatan Pengentasan Kemiskinan	-				Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	102 Unit	Pengananan RTLH Kel. Karangjati, Kec. Blora	102 Unit	1.023.360.000	DAK FISIK	0 Unit	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Percepatan Pengentasan Kemiskinan	-				Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	112 Unit	Berkuranganya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	112 Unit	1.020.000.000	Dana Infrastruktur	100 Unit	1.000.000.000	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
01	04	15	008	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	-	DINRUMKIMHUB			Jumlah laporan monitoring dan evaluasi	1 Laporan	Terwujudnya koordinasi dan monitoring bidang perumahan permukiman	1 Lump	50.000.000	PAD, DAU, DBH	0 Laporan	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
01	04	15	011	Operasional Rusunawa	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	-				Persentase pelayanan rusunawa	100 %	Terwujudnya Pengelolaan Rusunawa	1 Tahun	400.000.000	PAD, DAU, DBH	%	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
01	04	16		PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN				Persentase berkuramgnya permukiman kumuh di perkotaan						39.027.960.000			0				
								Jumlah rumah tidak layak huni													
								Luas kawasan kumuh di kawasan perkotaan													
01	04	16	055	Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Randublatung	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	Gang Bugenvil RT 08 RW.02			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	120 m	Pembangunan jaling (pavingisasi) gang Bugenvil RT 08 Rw 02	120 m	100.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	Gang Flamboyan RT 08 RW 02			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	120 m	Pembangunan jaling (pavingisasi) gang Flamboyan RT 08 RW 02	120 m	100.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	Dukuh Pojok			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	300 m	Pembangunan jaling (pavingisasi) Dukuh Pojok	300 m	230.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	Depan Pukesmas Randublatung			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	400 m	Pembangunan Jaling Depan Puskesmas Randublatung Kel. Randublatung	400 m	700.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
01	04	16	056	Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Wulung	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	RT 5 RW 4			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	250 m	Peningkatan jalan RT 5 RW 4 Kelurahan Wulung	250 m	400.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	RT. 04 RW 1			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	250 m	Peningkatan jalan RT 4 RW 1 Kelurahan Wulung	250 m	200.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	RT 03,RT 04 RW 03			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	250 m	Peningkatan Jalan RT 03 dan RT 04 RW 03 Kel. Wulung Kec. Randublatung	250 m	200.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	04	16	057	Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Tambakromo	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	RT 05 RW 01			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	100 m	Pavingisasi Jalan Lingkungan RRT 05 RW 01 Kel. Tambakromo Kec. Cepu	100 m	75.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
01	04	16	058	Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Balun	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	RW 7			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	650 m	Pembangunan Jalan Lingkungan RW 7 Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora	650 m	604.160.000	BANKEU PROV	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	RT.001 RW.007			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	2500 m	Pembangunan Drainase Kelurahan Balun, RT.001 RW.007, Kecamatan Cepu, Kabupaten Ponorogo	2500 m	2.099.900.000	BANKEU PROV	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	Perum BRI RT 05 RW 15 Balun			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	250 m	Peningkatan Jalan Perum BRI RT 05 RW 15 Balun	250 m	200.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	Lingkungan Megal			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	250 m	Pavingisasi Lingkungan Megal Kel. Balun Kec. Cepu	250 m	200.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	Komplek BRI RW.XV Kel. Balun			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	250 m	Pembangunan Jaling Komplek BRI RW. XV Kel. Balun	250 m	200.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	Bangun Asri			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	120 m	Normalisasi Parit Lingkungan Balun Asri	120 m	100.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	Bangun Asri Megalrejo			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	200 m	Lanjutan Jalan Bangun Asri Megalrejo (Paving)	200	150.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	Balun Srikaton Lr. 9			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	250 m	Normalisasi Parit Balun Srikaton Lr.9	250 m	200.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	RT 02/RW.02 Balun			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	120 m	Parit RT. 02 RW. 02 Balun	120 m	100.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	RT 01, 02, 03 RW 08			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	400 m	Peningkatan Jalan/Paving RT 01, 02, dan 03 RW 08 Kel. Balun Kec. Cepu	400 m	350.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	RW 02, 03, dan 04			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	250 m	Pembangunan/Rehab Jalan Paving RW 02, 03, 04 Kelurahan Balun	250 m	200.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	Gang 6 Balun Srikaton			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	200 m	Pembangunan talud gang 6 Balun srikaton	200 m	150.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	Jalan Balun Srikaton Lr.1 RT 04 RW 11			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	100 m	Peningkatan jalan Balun Srikaton Lr.1 RT 04 RW 11	100 m	150.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	Gang 2 Balun Srikaton			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	250 m	Pembangunan Talud Gang 2 Balun Srikaton	250 m	150.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
01 04 16 059	Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Cepu	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan				Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	5000 m	Pembangunan Jalan Linngkungan di Kelurahan Cepu	5000 m	5.664.000.000	BANKEU PROV	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan				Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	2500 m	Pembangunan Drainase Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora	2500 m	2.282.500.000	BANKEU PROV	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	RT 03 RW 011 Sitimulyo Cepu			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	100 m	Drainase Lingkungan RT 03 RW 011 Sitimulyo Cepu	100 m	50.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	Lingkungan Kebun Kelapa			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	200 m	Pavingisasi Lingkungan Kebun Kelapa Kel. Cepu Kec. Cepu	200 m	150.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	Sidodadi RT 06-RW 16			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	200 m	Peningkatan Jalan/Paving Sidodadi RT 06- RW 16 Kel. Cepu Kec. Cepu	200 m	150.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	RT 05/06 RW 09			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	200 m	Pavingisasi dan Drainase RT 05/06 RW 09	200 m	200.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	RW 10			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	120 m	Pembangunan/Rehab Jalan/Gorong-Gorong RW 10 Kelurahan Cepu	120 m	100.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	Jalan Sitimulyo Lorong Ia RT 05 RW 10			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	250 m	Peningkatan Jalan Sitimulyo Lorong Ia RT 05 RW 10	250 m	200.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	Lorong Atletik Cepu RT 04 RW 11			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	250 m	Peningkatan Lorong Atletik Cepu RT 04 RW 11 Kel. Cepu Kec. Cepu	250 m	200.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
01	04	16	060	Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Ngelo	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan				Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	550 m	Pembangunan Jalan Lingkungan Kelurahan Ngelo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora	550 m	528.640.000	BANKEU PROV	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan				Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	2000 m	Pembangunan Drainase Kelurahan Ngelo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora	2000 m	1.552.100.000	BANKEU PROV	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	RT 02 RW 03			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	120 m	Pavingisasi Jalan Lingkungan RT 02 RW 03 Kel. Ngelo	120 m	100.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	Ngelo			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	200 m	Pembangunan Jaling/Drainase kel. Ngelo Kec. cepu	200 m	150.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	RT 3 RW 8 Sarirejo			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	120 m	Pavingisasi Jalan Lingkungan RT 3 RW 8 Sarirejo	120 m	100.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	RT 1, 2, dan 3 RW 05			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	120 m	Pavingisasi Jalan Lingkungan RT 1, 2, dan 3 RW 05 Kel. Ngelo	120 m	100.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
01	04	16	061	Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Karangboyo	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan				Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	2000 m	Pembangunan Drainase Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora	2000 m	1.734.700.000	BANKEU PROV	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	Griya Mustika RT 02 RW 06			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	250 m	Pavingisasi Jaling Griya Mustika RT 02 RW 06 Kel. Karangboyo Kec. Cepu	250 m	200.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	Jalan Makam Menggung s/d Tambakwatu			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	200 m	Pavingisasi Jalan Makam Menggung s/d Tambakwatu Kel. Karangboyo Kec. Cepu	200 m	150.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	Pavingisasi Jalan Karangboyo s/d Dukuh Sambongan			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	200 m	Pavingisasi Jalan Karangboyo s/d Dukuh Sambongan Kel. Karangboyo	200 m	150.000.000	Dana Infrastruktur	200 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	RW. 1			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	120 m	Pembangunan Jaling/Drainase RW 1 Kel. Karangboyo Kec. Cepu	120 m	100.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	Perum Mentul Indah			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	250 m	Lanjutan Paving Perum Mentul Indah	250 m	200.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	GMS			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	250 m	Paving Jalan Lingkungan GMS Kel. Karangboyo Kec. Cepu	250 m	200.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	Jalan Tembus Tambakwatu ke Perum GMS Karangboyo			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	250 m	Pembangunan Jalan Tembus Tambakwatu ke Perum GMS Karangboyo (Paving)	250 m	200.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	RW 01 dan RW 05			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	350 m	Pembangunan/Rehab Jalan Paving RW 01 dan RW 05 Kelurahan Karangboyo	350 m	300.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
01 04 16 062	Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Ngroto	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	RW 02 dan RW 03			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	250 m	Pembangunan Jalan RW 02 dan RW 03 Kel. Ngroto Kec. Cepu	250 m	200.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	RW 1 RT 1, RT 2 RW 2, RT 5 RT 6, RW 3 RT 6			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	550 m	Pembangunan drainase RW 1 RT 1, RT 2 RW 2, RT 5 RT 6, RW 3 RT 6	550 m	450.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
01 04 16 063	Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Jepon	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	RW.05			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	250 m	Peningkatan Jalan Lingkungan RW.05 Kel. Jepon	250 m	200.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	RW. 02			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	200 m	Peningkatan Jalan RW 02 Kel. Jepon Kec. Jepon	200 m	150.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	RW. 05			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	450 m	Talud dan Drainase RW 05 Kel. Jepon Kec. Jepon	450 m	400.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	RW.6			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	450 m	Pembangunan paving jalan RW 6 kelurahan Jepon	450 m	350.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
01	04	16	064	Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Beran	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	RT 03 RW 03 Dk Ngampon			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	200 m	Pembangunan talud RT 03 RW 03 Dk Ngampon Kelurahan Beran	200 m	150.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
01	04	16	066	Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Kedungjenar	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	Jl. Tuntang			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	400 m	Pembangunan jaling Jl. Tuntang Kel. Kedungjenar Kec. Blora	400 m	200.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	Jl. Manggar			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	400 m	Pembangunan Jaling Jl. Manggar kel. Kedungjenar	400 m	500.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	RW 2 (Perempatan SMPN 2 ke Timur sampai Jl Serayu)			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	400 m	Pembangunan Jaling/Drainase RW 2 (Perempatan SMP 2 ke timur s/d Jl. Serayu) Kel. Kedungjenar Kec. Blora	400 m	550.000.000	Dana Infrastruktur	m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	Jl. Brantas Kel. Kedungjenar			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	400 m	Pembangunan Jaling Jl. Brantas Kel. Kedungjenar Kec. Blora	400 m	300.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	RT 01 Rw 02			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	200 m	Peningkatan saluran air RT 01 Rw 02	200 m	150.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	Jalan Musi			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	250 m	Peningkatan Jalan Musi	250 m	200.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	Jalan Serayu			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	400 m	Pembangunan Jalan Lingkungan dan Drainase Jalan Serayu Kel. Kedungjenar	400 m	350.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	RT 02 RW 03			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	250 m	Pembangunan Drainase Lingkungan RT 02 RW 03 Kel. Kedungjenar	250 m	200.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
01	04	16	067	Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Mlangsen	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	RW 3			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	1200 m	Pembangunan Jalan Lingkungan Kelurahan Mlangsen RW 3, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora	1200 m	1.132.800.000	BANKEU PROV	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	Jl. Delima			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	400 m	Peningkatan Jaling//Drainase Jl. Delima Kel. Mlangsen Kec. Blora	400 m	400.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	Jl. Melati dan Jl. Mawar			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	400 m	Peningkatan Jaling Jl. Melati dan Jl. Mawar Kel. Mlangsen Kec. Blora	400 m	500.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	RT 05 dan RT 06 Jl. Mangga, Jl. Manggis, Jl. Nangka			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	750 m	Peningkatan Jalan Lingkungan RT 05 dan RT 06 Jl. Mangga, Jl. Manggis, Jl. Nangka	750 m	700.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	Belakang Klenteng RT 08 RW 01			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	150 m	Peningkatan Jaling/Drainase Belakang Klenteng RT 08 RW 01 Kel. Mlangsen Kec. Blora	150 m	150.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	Jl. Manggal			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	500 m	Peningkatan Jaling/Drainase Jl. Manggal Kel. Mlangsen Kec. Blora	500 m	380.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
01	04	16	068	Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Jetis	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	RT 02 RW 04			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	250 m	Peningkatan Jalan Lingkungan RT 02 RW 04 Kel. Jetis Kec. Blora	250 m	200.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
01	04	16	069	Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Tambahrejo	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan				Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	1500 m	Pembangunan Jalan Lingkungan Kelurahan Tambahrejo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora	1500 m	1.132.800.000	BANKEU PROV	m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	Gang Nakulo			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	500 m	Gorong-Gorong dan Revilatisasi Saluran Drainase Lingkungan Gang Nakulo Kel Tambahrejo Kec.Blora	2 Unit	450.000.000	BANKEU PROV	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	RW 1			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	550 m	Pembangunan Jaling/Drainase RW 1 Kel. Tambahrejo	550 m	500.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
01	04	16	070	Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Kauman	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan				Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	650 m	Pembangunan Jalan Lingkungan Kelurahan Kauman, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora	650 m	604.160.000	BANKEU PROV	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan				Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	2500 m	Pembangunan Drainase Kelurahan Kauman Kecamatan Blora	2500 m	2.282.500.000	BANKEU PROV	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	04	16	071	Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Sonorejo	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	Dukuh Kajangan			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	500 m	Paving Dukuh Kajangan Kelurahan Sonorejo	500 m	300.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
01	04	16	072	Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Kunden	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	Jl. RA Kartini Lr.II dan Lr. III			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	550 m	Pembangunan Jaling/Drainase Jl. RA Kartini Lr.II dan Lr. III Kel. Kunden	550 m	500.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
01	04	16	073	Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Tempelan	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	Komplek Kaplingan Kridosono			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	600 m	Peningkatan Jaling Komplek Kaplingan Kridosono Kel. Tempelan Kec. Blora	600 m	500.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	Jl Dr Sutomo Lorong 5			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	250 m	Peningkatan Jalan (Drainase dan Paving) Jl Dr Sutomo Lorong 5 Kel. Tempelan	250 m	200.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	Jalan Tentara Pelajar Gang 3 dan Gang Pakel			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	250 m	Paving jalan Tentara Pelajar Gang 3 dan Gang Pakel	250 m	200.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
01	04	16	075	Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Karangjati	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	RW 3			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	800 m	Pembangunan Jalan Lingkungan Karangjati RW 3,Kelurahan Karangjati, Kecamatan Blora	800 m	755.200.000	BANKEU PROV	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan				Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	1000 m	Pembangunan Drainase Kelurahan Karangjati, Kecamatan Blora	1000 m	1.369.500.000	BANKEU PROV	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	RT 05, 06 RW 05 Perumnas Karangjati			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	250 m	Normalisasi Drainase RT 05, 06 RW 05 Perumnas Karangjati	250 m	200.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
01	04	16	077	Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Ngawen	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	Belakang Pasar Ngawen RT 03 RW 01			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	250 m	Pembangunan Drainase belakang Pasar Ngawen RT 03 RW 01 Kel. Ngawen	250 m	200.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	Lorong 2 Sawahan RT 04 RW 05			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	250 m	Peningkatan Jalan Lorong 2 Sawahan RT 04 RW 05 Kel. Ngawen Kec. Ngawen	250 m	200.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
01	04	16	078	Pembangunan Jalan Lingkungan / Drainase / Talud Kel. Kunduran	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan	RT. 05 RW.02			Panjang jalan lingkungan/drainase/talud yang dibangun	0 m	Pembangunan Drainase RT 05 RW 02 Kel. Kunduran	0 m	200.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	04	20		PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN				Pemakaman umum yang terpelihara						700.000.000			0				
01	04	20	006	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Makam Watu Gede			Jumlah sarana dan prasarana pemakaman yang dibangun	1 Unit	Pembangunan Jalan/Drainase/Talud Makam Watu Gede Kec. Bogorejo	500 m	550.000.000	Dana Infrastruktur	0 Unit	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Makam Perumahan Kidang Kencana Asri			Jumlah sarana dan prasarana pemakaman yang dibangun	1 Unit	Pembangunan Pagar Makam Perumahan Kidang Kencana Asri Kel. Jepon Kec. Jepon	200 m	150.000.000	Dana Infrastruktur	Unit	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
01	04	22		PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)				Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan						4.791.232.000			0				
01	04	22	006	Pemeliharaan ruang terbuka hijau	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-				Luas RTH yang dikelola dalam kondisi baik	1000 m2	Ruang Terbuka Hijau dalam Kondisi Baik	1 Tahun	1.000.000.000	Dana Infrastruktur	0 m2	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
01	04	22	014	Perbaikan Taman Seribu Lampu Kecamatan Cepu	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Kecamatan Cepu			Luas RTH yang ditata dan ditingkatkan kualitasnya	1000 m2	Tertatanya lingkungan dan estetika Taman Seribu Lampu	1000 m2	2.616.232.000	Dana Infrastruktur	0 m2	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
01	04	22	024	Pengadaan Kendaraan Operasional	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	DINRUMKIMHUB			Jumlah kendaraan operasional yang diadakan	1 Unit	Tersedianya mobil operasional pick up taman	1 Unit	175.000.000	PAD, DAU, DBH	0 Unit	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
01	04	22	055	Pembangunan dan Penataan RTH Wilayah I	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Tugu Batas Kota Sisi Utara			Luas RTH yang dibangun/ ditata/ ditingkatkan kualitasnya	100 m2	Penataan Lingkungan dan estetika Taman Tugu Batas Kota sisi Timur	100 m2	200.000.000	Dana Infrastruktur	0 m2	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	RT 05 RW 05			Luas RTH yang dibangun/ ditata/ ditingkatkan kualitasnya	100 m2	Peningkatan taman di RT 05 RW 05 Perumnas	100 m2	200.000.000	Dana Infrastruktur	0 m2	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Lingkungan Perumahan			Luas RTH yang dibangun/ ditata/ ditingkatkan kualitasnya	100 m2	Penataan Estetika Lingkungan Perumahan Karangjati Kec. Blora	100 m2	200.000.000	Dana Infrastruktur	m2	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Taman Bangkle			Luas RTH yang dibangun/ ditata/ ditingkatkan kualitasnya	100 m2	Penataan Lingkungan dan estetika Taman bangkle	100 m2	200.000.000	Dana Infrastruktur	0 m2	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
01	04	22	056	Pembangunan dan Penataan RTH Wilayah II	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Taman Aryo Jipang			Luas RTH yang dibangun/ ditata/ ditingkatkan kualitasnya	100 m2	Penataan Lingkungan dan estetika Taman Aryo Jipang selatan Terminal Kecamatan cepu	100 m2	200.000.000	Dana Infrastruktur	0 m2	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
01	04	24		PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH				Persentase luas bangunan/ gedung yang dibangun pada wilayah strategis dan cepat tumbuh	0,02					60.030.000.000			5.000.000.000				
01	04	24	145	Rehabilitasi Masjid Agung Baitunnur Blora	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-				Persentase penyelesaian rehabilitasi Masjid Agung Baitunnur sesuai desain perencanaan	50 %	Terwujudnya pembangunan tempat ibadah	1 Unit	1.000.000.000	Dana Infrastruktur	100 %	5.000.000.000	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	04	24	154	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Kabupaten Blora			Luas Kawasan Strategis yang terbangun	1 m2	Terwujudnya Pemeliharaan srana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman dan peningkatan perekonomian masyarakat	1 Tahun	1.000.000.000	Dana Infrastruktur	0 m2	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
01	04	24	182	Pembangunan Trotoar/Drainase I	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Jl. Mr. Iskandar			Panjang trotoar/drainase yang dibangun	900 m	Pembangunan Trotoar / Drainase Jl. Mr. Iskandar Kec. Blora	900 m	4.000.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Jl. Jenderal Sudirman			Panjang trotoar/drainase yang dibangun	1500 m	Pembangunan Trotoar Jalan Jederal Sudirman, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora	1500 m	4.500.000.000	BANKEU PROV	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
01	04	24	183	Pembangunan Trotoar/Drainase II	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Jl. Raya Blora-Ngawen			Panjang trotoar/drainase yang dibangun	3000 m	Pembangunan Trotoar Jalan Raya Blora-Ngawen, Kecamatan Ngawen	3000 m	9.000.000.000	BANKEU PROV	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Jl. Ahmad Yani			Panjang trotoar/drainase yang dibangun	1500 m	Pembangunan Trotoar Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora	1500 m	4.500.000.000	BANKEU PROV	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Jl. Reksodiputro			Panjang trotoar/drainase yang dibangun	1500 m	Pembangunan Trotoar / Drainase Jl. Reksodiputro Kec. Blora	1500 m	4.420.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Jl. Mr. Iskandar			Panjang trotoar/drainase yang dibangun	1500 m	Pembangunan Trotoar Jalan Mr. Iskandar	1500 m	4.500.000.000	BANKEU PROV	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Pasar Jepon			Panjang trotoar/drainase yang dibangun	1500 m	Pembangunan Trotoar di Lingkungan Pasar Jepon, Kecamatan Jepon	1500 m	4.500.000.000	BANKEU PROV	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
01	04	24	184	Pembangunan Trotoar/Drainase III	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Jl. Pemuda			Panjang trotoar/drainase yang dibangun	2000 m	Pembangunan Trotoar Jalan Pemuda Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora	2000 m	6.000.000.000	BANKEU PROV	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Jl. Raya Randublatung			Panjang trotoar/drainase yang dibangun	2000 m	Pembangunan Trotoar Jalan Raya Randublatung Kecamatan Randublatung	2000 m	6.000.000.000	BANKEU PROV	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
01	04	24	185	Rehabilitasi Trotoar/Drainase I	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Jl. Gatot Subroto			Panjang trotoar/drainase yang direhabilitasi	2000 m	Rehabilitasi Trotoar Jalan Gatot Subroto	2000 m	6.000.000.000	BANKEU PROV	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Jl. Arum dalu			Panjang trotoar/drainase yang direhabilitasi	623 m	Finishing Trotoar Jl. Arum Dalu Kec. Blora	623 m	500.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Jl.Kenanga			Panjang trotoar/drainase yang direhabilitasi	263 m	Rehabilitasi Trotoar/Drainase Jl. Kenanga Koplakan Kec. Blora	263 m	700.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Jl.Sumodarsono			Panjang trotoar/drainase yang direhabilitasi	500 m	Rehabilitasi Trotoar/Drainase Jl. Sumodarsono Kec. Blora	500 m	2.910.000.000	Dana Infrastruktur	0 m	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
01	04	24	189	Perencanaan kawasan strategis dan cepat tumbuh	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-				Jumlah dokumen perencanaan kawasan strategis dan cepat tumbuh yang disusun	10 Dokumen	Terwujudnya DED Lapangan GOLF	1 Paket	500.000.000	PAD, DAU, DBH	0 Dokumen	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
01	04	26		PROGRAM PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM										11.000.000.000			6.500.000.000				
01	04	26	003	Pembayaran tagihan rekening listrik penerangan jalan umum (PJU)	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	DINRUMKIMHUB			Persentase pemenuhan tagihan listrik PJU	100 %	Prasarana Penerangan Lingkungan yang Baik	1 Tahun	5.500.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	5.500.000.000	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
01	04	26	004	Meterisasi PJU Rayon PLN Cepu	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Rayon PLN Cepu			Jumlah PJU yang dimeterisasi	17 titik lampu	Prasarana Penerangan Lingkungan yang Baik	17 Unit	200.000.000	Dana Infrastruktur	0 titik lampu	200.000.000	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
01	04	26	005	Meterisasi PJU Rayon PLN Blora	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Rayon PLN Blora			Jumlah PJU yang dimeterisasi	17 titik lampu	Prasarana Penerangan Lingkungan yang Baik	17 Unit	200.000.000	Dana Infrastruktur	0 titik lampu	600.000.000	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
01	04	26	007	Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kecamatan Todanan	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Kecamatan todanan			Jumlah titik lampu PJU yang ditambah	17 titik lampu	Prasarana Penerangan Lingkungan yang Baik	17 Unit	200.000.000	Dana Infrastruktur	0 titik lampu	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
01	04	26	008	Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kecamatan Banjarejo	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Kecamatan Banjarejo			Jumlah titik lampu PJU yang ditambah	17 titik lampu	Prasarana Penerangan Lingkungan yang Baik	17 Unit	200.000.000	Dana Infrastruktur	0 titik lampu	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
01	04	26	009	Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kecamatan Kunduran	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Kecamatan Kunduran			Jumlah titik lampu PJU yang ditambah	17 titik lampu	Prasarana Penerangan Lingkungan yang Baik	17 Unit	200.000.000	Dana Infrastruktur	0 titik lampu	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
01	04	26	010	Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kecamatan Ngawen	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Kecamatan Ngawen			Jumlah titik lampu PJU yang ditambah	17 titik lampu	Prasarana Penerangan Lingkungan yang Baik	17 Unit	200.000.000	Dana Infrastruktur	0 titik lampu	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
01	04	26	011	Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kecamatan Japah	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-				Jumlah titik lampu PJU yang ditambah	3 titik lampu	Penambahan lampu jalan Dk Karanggeneng	3 Unit	50.000.000	Dana Infrastruktur	0 titik lampu	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-				Jumlah titik lampu PJU yang ditambah	2 titik lampu	Penambahan lampu penerangan jalan di Desa Padaan	2 Unit	50.000.000	Dana Infrastruktur	0 titik lampu	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Kecamatan Japah			Jumlah titik lampu PJU yang ditambah	17 titik lampu	Prasarana Penerangan Lingkungan yang Baik	17 Unit	200.000.000	Dana Infrastruktur	0 titik lampu	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	04	26	012	Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kecamatan Jepon	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-				Jumlah titik lampu PJU yang ditambah	3 titik lampu	Penambahan lampu penerangan jalan di Desa Puledagel	3 Unit	50.000.000	Dana Infrastruktur	0 titik lampu	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Kecamatan Jepon			Jumlah titik lampu PJU yang ditambah	17 titik lampu	Prasarana Penerangan Lingkungan yang Baik	17 Unit	200.000.000	Dana Infrastruktur	0 titik lampu	200.000.000	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
01	04	26	013	Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kecamatan Jiken	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-				Jumlah titik lampu PJU yang ditambah	17 titik lampu	Prasarana Penerangan Lingkungan yang Baik	17 Unit	200.000.000	Dana Infrastruktur	0 titik lampu	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
01	04	26	014	Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kecamatan Kedungtuban	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-				Jumlah titik lampu PJU yang ditambah	17 titik lampu	terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan penerangan jalan	17 Unit	200.000.000	Dana Infrastruktur	0 titik lampu	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
01	04	26	015	Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kecamatan Jati	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-				Jumlah titik lampu PJU yang ditambah	17 titik lampu	Prasarana Penerangan Lingkungan yang Baik	17 Unit	200.000.000	Dana Infrastruktur	0 titik lampu	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
01	04	26	016	Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kecamatan Randublatung	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-				Jumlah titik lampu PJU yang ditambah	17 titik lampu	Penambahan lampu PJU	17 Unit	200.000.000	Dana Infrastruktur	0 titik lampu	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
01	04	26	017	Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kecamatan Bogorejo	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Kecamatan Bogorejo			Jumlah titik lampu PJU yang ditambah	17 titik lampu	Prasarana Penerangan Lingkungan yang Baik	17 Unit	200.000.000	Dana Infrastruktur	0 titik lampu	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
01	04	26	018	Pemeliharaan Jaringan PJU se-Kabupaten Blora dan Pemeliharaan Lampu Higmass serta Lampu Jembatan	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-				Persentase jaringan PJU, lampu highmass dan lampu jembatan dalam kondisi baik	30 %	Pemeliharaan lampu highmass dan lampu jembatan	30 Unit	150.000.000	Dana Infrastruktur	0 %	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Rayon Cepu			Persentase jaringan PJU, lampu highmass dan lampu jembatan dalam kondisi baik	100 %	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penerangan jalan Umum PJU Wilayah II	1 Tahun	200.000.000	Dana Infrastruktur	0 %	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Rayon Blora			Persentase jaringan PJU, lampu highmass dan lampu jembatan dalam kondisi baik	100 %	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum PJU Wilayah I	1 Tahun	550.000.000	Dana Infrastruktur	0 %	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
01	04	26	035	Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kecamatan Blora	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Kecamatan Blora			Jumlah titik lampu PJU yang ditambah	100 titik lampu	penambahan lampu PJU	100 Unit	200.000.000	Dana Infrastruktur	0 titik lampu	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-				Jumlah titik lampu PJU yang ditambah	17 titik lampu	Penerangan Jalan Umum Kel. Tambahrejo Kec. Blora	17 Unit	200.000.000	BANKEU PROV	0 titik lampu	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-				Jumlah titik lampu PJU yang ditambah	6 titik lampu	Penambahan lampu penerangan jalan di Desa Temurejo	6 Unit	100.000.000	Dana Infrastruktur	0 titik lampu	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-				Jumlah titik lampu PJU yang ditambah	3 titik lampu	Penambahan lampu penerangan jalan Desa Andongrejo	3 Unit	50.000.000	Dana Infrastruktur	0 titik lampu	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-				Jumlah titik lampu PJU yang ditambah	3 titik lampu	Penambahan lampu penerangan jalan Desa Plantungan	3 Unit	50.000.000	Dana Infrastruktur	0 titik lampu	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-				Jumlah titik lampu PJU yang ditambah	3 titik lampu	Penambahan lampu penerangan jalan Kelurahan sonorejo	3 Unit	50.000.000	Dana Infrastruktur	0 titik lampu	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
01	04	26	036	Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kecamatan Tunjungan	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-				Jumlah titik lampu PJU yang ditambah	17 titik lampu	Prasarana Penerangan Lingkungan yang Baik	17 Unit	200.000.000	Dana Infrastruktur	0 titik lampu	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
01	04	26	037	Pemeliharaan Jaringan Listrik PJU Wilayah I	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-				Persentase jarinngan PJU dalam kondisi baik	1 %	Prasarana Penerangan Lingkungan yang Baik	1 Paket	200.000.000	Dana Infrastruktur	0 %	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
01	04	26	038	Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kecamatan Cepu	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Kecamatan Cepu			Jumlah titik lampu PJU yang ditambah	17 titik lampu	Penambahan lampu PJU	17 Unit	200.000.000	Dana Infrastruktur	0 titik lampu	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
01	04	26	039	Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kecamatan Sambong	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-				Jumlah titik lampu PJU yang ditambah	17 titik lampu	Penambahan lampu PJU	17 Unit	200.000.000	Dana Infrastruktur	0 titik lampu	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
01	04	26	040	Penambahan Titik Lampu PJU Wilayah Kecamatan Kradenan	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-				Jumlah titik lampu PJU yang ditambah	17 titik lampu	Penambahan lampu PJU	17 Unit	200.000.000	Dana Infrastruktur	0 titik lampu	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
01	04	26	041	Pemeliharaan Jaringan Listrik PJU Wilayah II	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-				Persentase jaringan listrik PJU dalam kondisi baik	100 %	Prasarana Penerangan Lingkungan yang Baik	1 Paket	200.000.000	Dana Infrastruktur	0 %	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
01	04	27		PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH				Cakupan pelayanan sanitasi	95,96%					12.293.000.000			0				
								Persentase penduduk yang mendapatkan air minum yang aman	66,71%												
01	04	27	010	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum Eks Kawedanan Blora	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas air bersih dan sanitasi				Jumlah sarana dan prasarana air minum yang dibangun	50 SR	Peningkatan SPAM PAMSIMAS Desa Prantaan Kecamatan Bogorejo	50 SR	393.750.000	DAK FISIK	0 SR	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas air bersih dan sanitasi				Jumlah sarana dan prasarana air minum yang dibangun	50 SR	Peningkatan SPAM PAMSIMAS Desa Kawengan Kecamatan Jepon	50 SR	393.750.000	DAK FISIK	0 SR	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas air bersih dan sanitasi				Jumlah sarana dan prasarana air minum yang dibangun	10 SR	Perpipaan PAMSIMAS Desa Sendangrejo Kecamatan Banjarejo	10 SR	105.000.000	DAK FISIK	0 SR	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas air bersih dan sanitasi				Jumlah sarana dan prasarana air minum yang dibangun	50 SR	Peningkatan SPAM PAMSIMAS Desa Kembang Kecamatan Banjarejo	100 SR	768.750.000	DAK FISIK	50 SR	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas air bersih dan sanitasi				Jumlah sarana dan prasarana air minum yang dibangun	0 SR	Perpipaan PAMSIMAS Desa Soko Kecamatan Jepon	10 SR	105.000.000	DAK FISIK	0 SR	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas air bersih dan sanitasi				Jumlah sarana dan prasarana air minum yang dibangun	50 SR	Pembangunan Baru SPAM Desa Patalan Kecamatan Blora	50 SR	393.750.000	DAK FISIK	0 SR	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas air bersih dan sanitasi				Jumlah sarana dan prasarana air minum yang dibangun	10 SR	Perpipaan PAMSIMAS Desa Bleboh Kecamatan Jiken	10 SR	105.000.000	DAK FISIK	0 SR	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas air bersih dan sanitasi				Jumlah sarana dan prasarana air minum yang dibangun	50 SR	Peningkatan SPAM PAMSIMAS Desa Purwosari Kec. Blora	50 SR	393.750.000	DAK FISIK	0 SR	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas air bersih dan sanitasi				Jumlah sarana dan prasarana air minum yang dibangun	50 SR	Peningkatan SPAM PAMSIMAS Desa Sambongrejo Kec. Tunjungan	50 SR	393.750.000	DAK FISIK	0 SR	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas air bersih dan sanitasi				Jumlah sarana dan prasarana air minum yang dibangun	50 SR	Peningkatan SPAM PAMSIMAS Desa Purworejo Kec. Blora	50 SR	393.750.000	DAK FISIK	0 SR	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas air bersih dan sanitasi				Jumlah sarana dan prasarana air minum yang dibangun	10 SR	Perpipaan PAMSIMAS Desa Nglangitan Kecamatan Tunjungan	10 SR	105.000.000	DAK FISIK	0 SR	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas air bersih dan sanitasi				Jumlah sarana dan prasarana air minum yang dibangun	10 SR	Perpipaan PAMSIMAS Desa Tunjungan Kecamatan Tunjungan	10 SR	105.000.000	DAK FISIK	0 SR	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas air bersih dan sanitasi				Jumlah sarana dan prasarana air minum yang dibangun	50 SR	Pembangunan PAB Desa Tamanrejo Kec. Tunjungan	50 SR	393.750.000	DAK FISIK	0 SR	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
01 04 27 011	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum Eks Kawedanan Cepu	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas air bersih dan sanitasi				Jumlah sarana dan prasarana air minum yang dibangun	10 SR	Perpipaan PAMSIMAS Desa Biting Kecamatan Sambong	10 SR	105.000.000	DAK FISIK	0 SR	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas air bersih dan sanitasi				Jumlah sarana dan prasarana air minum yang dibangun	10 SR	Perpipaan PAMSIMAS Desa Giyanti Kecamatan Sambong	10 SR	105.000.000	DAK FISIK	0 SR	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas air bersih dan sanitasi				Jumlah sarana dan prasarana air minum yang dibangun	50 SR	Peningkatan SPAM PAMSIMAS Desa Mernung kecamatan Cepu	50 SR	393.750.000	DAK FISIK	0 SR	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas air bersih dan sanitasi				Jumlah sarana dan prasarana air minum yang dibangun	50 SR	Pembangunan Baru SPAM Desa Cabeyan Kecamatan Cepu	50 SR	393.750.000	DAK FISIK	0 SR	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas air bersih dan sanitasi				Jumlah sarana dan prasarana air minum yang dibangun	50 SR	Pembangunan Baru SPAM Desa Kapuan Kecamatan Cepu	50 SR	393.750.000	DAK FISIK	0 SR	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas air bersih dan sanitasi				Jumlah sarana dan prasarana air minum yang dibangun	50 SR	Pembangunan Baru SPAM Getas Kecamatan Cepu	50 SR	393.750.000	DAK FISIK	0 SR	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
01 04 27 012	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum Eks Kawedanan Randublatung	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas air bersih dan sanitasi				Jumlah sarana dan prasarana air minum yang dibangun	50 SR	Peningkatan SPAM PAMSIMAS Desa Tobo Kecamatan Jati	50 SR	393.750.000	DAK FISIK	SR	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas air bersih dan sanitasi				Jumlah sarana dan prasarana air minum yang dibangun	50 SR	Peningkatan SPAM PAMSIMAS Desa Tlogotuwung Kec. Randublatung	50 SR	393.750.000	DAK FISIK	0 SR	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas air bersih dan sanitasi				Jumlah sarana dan prasarana air minum yang dibangun	10 SR	Perpipaan PAMSIMAS Desa Kadengan Kecamatan Randublatung	10 SR	105.000.000	DAK FISIK	0 SR	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas air bersih dan sanitasi				Jumlah sarana dan prasarana air minum yang dibangun	50 SR	Pembangunan PAB Desa Jegong Kecamatan Jati	50 SR	393.750.000	DAK FISIK	0 SR	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas air bersih dan sanitasi				Jumlah sarana dan prasarana air minum yang dibangun	50 SR	Pembangunan PAB Desa Jegong Kecamatan Jati	50 SR	393.750.000	DAK FISIK	0 SR	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
01 04 27 013	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum Eks Kawedanan Ngawen	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas air bersih dan sanitasi				Jumlah sarana dan prasarana air minum yang dibangun	50 SR	Pembangunan Baru SPAM Desa Klokah Kecamatan Kunduran	50 SR	393.750.000	DAK FISIK	SR	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas air bersih dan sanitasi				Jumlah sarana dan prasarana air minum yang dibangun	10 SR	Perpipaan PAMSIMAS Desa Berbak Kecamatan Ngawen	10 SR	105.000.000	DAK FISIK	0 SR	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas air bersih dan sanitasi				Jumlah sarana dan prasarana air minum yang dibangun	50 SR	Peningkatan SPAM PAMSIMAS Desa Karangtengah Kecamatan Ngawen	50 SR	393.750.000	DAK FISIK	0 SR	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
		Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas air bersih dan sanitasi				Jumlah sarana dan prasarana air minum yang dibangun	10 SR	Perpipaan PAMSIMAS Desa Semawur Kecamatan Ngawen	10 SR	105.000.000	DAK FISIK	0 SR	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas air bersih dan sanitasi				Jumlah sarana dan prasarana air minum yang dibangun	50 SR	Pembangunan PAB Desa Muraharjo Kecamatan Kunduran	50 SR	393.750.000	DAK FISIK	50 SR	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas air bersih dan sanitasi				Jumlah sarana dan prasarana air minum yang dibangun	50 SR	Peningkatan SPAM PAMSIMAS Kalangrejo Kec. Kunduran	50 SR	393.750.000	DAK FISIK	0 SR	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
01	04	27	014	Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Eks Kawedanan Blora	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas air bersih dan sanitasi				Jumlah sarana dan prasarana sanitasi yang dibangun	50 SR	Pembangunan Sanitasi Komunal Kel. Jepon Kec. Jepon	50 SR	367.500.000	DAK FISIK	0 SR	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas air bersih dan sanitasi				Jumlah sarana dan prasarana sanitasi yang dibangun	10 SR	Pembangunan Sanitasi Komunal Desa Bangoan Kec. Jiken	10 SR	157.500.000	DAK FISIK	0 SR	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas air bersih dan sanitasi				Jumlah sarana dan prasarana sanitasi yang dibangun	10 SR	Pembangunan Sanitasi Komunal Desa Patalan Kecamatan Blora	10 SR	157.500.000	DAK FISIK	0 SR	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas air bersih dan sanitasi				Jumlah sarana dan prasarana sanitasi yang dibangun	10 SR	Pembangunan Sanitasi Komunal Desa Adirejo Kecamatan Tunjungan	10 SR	157.500.000	DAK FISIK	0 SR	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas air bersih dan sanitasi				Jumlah sarana dan prasarana sanitasi yang dibangun	10 SR	Pembangunan Sanitasi Komunal Desa Waru Kecamatan Jepon	10 SR	157.500.000	DAK FISIK	0 SR	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas air bersih dan sanitasi				Jumlah sarana dan prasarana sanitasi yang dibangun	5 SR	Pembangunan Sanitasi Komunal Kelurahan Kauman Kecamatan Blora	5 SR	63.000.000	DAK FISIK	0 SR	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
01	04	27	015	Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Eks Kawedanan Cepu	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas air bersih dan sanitasi				Jumlah sarana dan prasarana sanitasi yang dibangun	50 SR	Pembangunan Sanitasi Komunal Kel. Tambakromo Kec. Cepu	50 SR	367.500.000	DAK FISIK	0 SR	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas air bersih dan sanitasi				Jumlah sarana dan prasarana sanitasi yang dibangun	10 SR	Pembangunan Sanitasi Komunal Desa Cabeyan Kec. Cepu	10 SR	157.500.000	DAK FISIK	0 SR	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas air bersih dan sanitasi				Jumlah sarana dan prasarana sanitasi yang dibangun	10 SR	Pembangunan Sanitasi Komunal Desa Kapuan Kec. Cepu	10 SR	157.500.000	DAK FISIK	0 SR	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
01	04	27	018	Perencanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas air bersih dan sanitasi				Jumlah dokumen/laporan perencanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan	10 Laporan	Terlaksananya Biaya Penunjang Kegiatan Pamsimas dan Kegiatan Sanitasi dan Bankeu	1 Tahun	250.000.000	PAD, DAU, DBH	0 Laporan	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
01	04	27	019	Pengadaan sarana angkut air limbah	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas air bersih dan sanitasi				Jumlah sarana angkut air limbah yang diadakan	2 Unit	Pengadaan truk tinja	2 Unit	1.000.000.000	DAK FISIK	0 Unit	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
02				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	09			PERHUBUNGAN																	
02	09	15		PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN				Tersedianya informasi perhubungan	1 tahun					195.000.000			0				
								Tersedianyan halte pada setiap kecamatan yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.													
02	09	15	002	Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya pelayanan perhubungan darat				Jumlah dokumen kebijakan dan NSPM yang disusun	1 Dokumen	Terwujudnya Dokumen Kajian Penyusunan Master Plan	1 Dokumen	100.000.000	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0 Dokumen	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
02	09	15	003	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya pelayanan perhubungan darat				Persentase pemenuhan koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasiilitas perhubungan yang disepakati dan ditindaklanjuti	1 %	Terlaksananya koordinasi forum lalu lintas	1 Tahun	20.000.000	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0 %	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
02	09	15	004	Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya pelayanan perhubungan darat				Jumlah peserta sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	1 Orang	terlaksananya partisipasi aktif bagi masyarakat dalam peningkatan keselamatan transportasi darat	1 Tahun	50.000.000	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0 Orang	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
02	09	15	008	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya pelayanan perhubungan darat				Jumlah laporan memuat data kepadatan / volume lalu lintas	1 Laporan	Tersusunnya data kepadatan / volume lalu lintas	1 Tahun	25.000.000	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0 Laporan	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
02	09	16		PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ				Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu,marka,guardrail,APILL,dll) pada jalan kabupaten						650.000.000			0				
02	09	16	001	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-				Persentase sarana alat pengujian kendaraan bermotor dalam kondisi baik	100 %	Terlaksananya perawatan dan perbaikan alat uji kendaraan bermotor (BBM,Suku Cadang dan Kalibrasi)	1 Tahun	150.000.000	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0 %	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
02	09	16	005	Rehabilitasi/pemeliharaan rambu lalu lintas	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-				Persentase rambu lalu lintas dalam kondisi baik	1 %	Berkurangnya angka kecelakaan lalu lintas	1 Paket	50.000.000	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0 %	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
02	09	16	006	Pengadaan kendaraan operasional perhubungan	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-				Jumlah kendaraan operasional yang diadakan	1 Unit	Terwujudnya pengadaan Kendaraan Operasional Aero Platform	1 Unit	450.000.000	Dana Infrastruktur	0 Unit	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
02	09	17		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN				Peningkatan keselamatan lalu lintas						525.000.000			190.000.000				
02	09	17	004	Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-				Persentase pelayanan uji kelayakan sarana transportasi	1 %	Tersedianya biaya uji kendaraan bermotor dan ketersediaan plat uji, stiker tanda samping dan buku uji/smart card dan stiker	1 Tahun	250.000.000	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0 %	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	09	17	005	Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-				Jumlah operasi angkutan umum di jalan raya	1 Kali	Tersedianya kelaikan angkutan umum di jalan	1 Tahun	50.000.000	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0 Kali	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
02	09	17	011	Pengumpulan dan analisis database pelayanan jasa angkutan	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-				Jumlah laporan yang memuat pelayanan jasa angkutan yang disusun	1 Laporan	Tersedianya database angkutan dan sosialisasi petugas parkir	1 Tahun	20.000.000	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0 Laporan	20.000.000	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
02	09	17	014	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-				Jumlah peserta sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	1 Orang	Terlaksananya sosialisasi pengujian kendaraan bermotor bagi pengusaha angkutan dan awak angkutan untuk keselamatan di jalan raya	1 Paket	20.000.000	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0 Orang	20.000.000	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
02	09	17	015	Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-				Jumlah penyelenggaraan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	2 Kali	terlaksananya pemilihan awak angkutan umum teladan/AKUT dan pelajar pelopor	2 Orang	35.000.000	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0 Kali	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
02	09	17	016	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-				Jumlah karosesi dan perbengkelan yang dibina	1 pelaku usaha	terwujudnya pembinaan karoseri dan perbengkelan	1 Tahun	25.000.000	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0 pelaku usaha	25.000.000	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
02	09	17	019	Posko Lebaran, Natal, dan Tahun Baru	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-				Jumlah titik posko untuk lebaran, natal, dan tahun baru	10 titik lokasi	Terlaksananya pemantauan dan pengaturan arus lalu lintas, angkutan lebaran,Natal, Tahun Baru, serta kesenian dan hiburan umum	1 Tahun	125.000.000	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0 titik lokasi	125.000.000	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
02	09	18		PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN				Reaktivasi bandara Ngloram	1 bandara					7.400.000.000			10.000.000.000				
								Pembangunan terminal barang (pelataran tempat parkir truk)													
								Pembangunan halte													
								tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam kabupaten/trayek													
02	09	18	002	Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Terminal Type C Wulung			Jumlah gedung terminal / halte bus yang dibangun	1 Unit	Pembangunan Kios Terminal Type C Wulung, Kecamatan Randublatung	1 Paket	900.000.000	BANKEU PROV	0 Unit	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Kecamatan Kunduran			Jumlah gedung terminal / halte bus yang dibangun	1 Unit	Pembangunan Terminal Type C Kecamatan Kunduran	1 Paket	3.000.000.000	BANKEU PROV	0 Unit	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Kecamatan Todanan			Jumlah gedung terminal / halte bus yang dibangun	1 Unit	Pembangunan Terminal Type C Kecamatan Todanan	1 Paket	2.500.000.000	BANKEU PROV	0 Unit	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	3		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	09	18	004	Pengadaan Tanah Perluasan Bandara Ngloram	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-				Luas lahan yang dibebaskan	2000 m2	Terealisasinya pengadaan tanah untuk perluasan bandara Ngloram	2000 m2	1.000.000.000	Dana Infrastruktur	200000 m2	10.000.000.000	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
02	09	19		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS										1.120.000.000			1.549.000.000				
02	09	19	001	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-				Jumlah Rambu, RPPJ, Cermin tikungan, Rambu Rambu Lalu Lintas lainnya yang dipasang	150 Unit	terpasangnya traffic light 2 buah, RPPJ 20 buah, rambu 120 buah, guardrail 100m, lampu flassing 8 unit	150 Unit	620.000.000	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0 Unit	1.024.000.000	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
02	09	19	002	Pengadaan marka jalan	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-				Luas marka jalan yang dipasang	3000 m2	Berkurangnya angka kecelakaan lalu lintas	3000 m2	450.000.000	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0 m2	450.000.000	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
02	09	19	005	Pengawalan dan Pengamanan Lalu Lintas	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-				Jumlah pelaksanaan pengawalan dan pengamanan lalu lintas	50 Kali	Terlaksananya Pengawalan dan Pengamanan Lalu Lintas	1 Tahun	50.000.000	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0 Kali	75.000.000	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
02	09	20		PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR										25.000.000			25.000.000				
02	09	20	003	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-				Jumlah kendaraan yang dilakukan uji petik	1 Unit	Terlaksananya uji petik kendaraan bermotor	1 Paket	25.000.000	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0 Unit	25.000.000	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
01				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																	
01	04			PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN																	
01	04	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran						0			0				
								Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran													
01	04	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat	100 %	Terpenuhinya jasa surat menyurat	12 Bulan	10.000.000	PAD, DAU, DBH	0 %	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
01	04	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	100 %	Tercukupinya kebutuhan listrik, air dan internet	1 Tahun	450.000.000	PAD, DAU, DBH	0 %	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	04	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100 %	Terawatnya kendaraan dinas, dan terbayarnya pajak kendaraan Dinas 13 Mobil operasinal dan 33 sepeda motor dinas	1 Tahun	60.000.000	PAD, DAU, DBH	0 %	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
01	04	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan	100 %	Tersedianya jasa administrasi keuangan dan pengelolaan barang daerah	1 Tahun	200.000.000	PAD, DAU, DBH	0 %	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
01	04	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor	1 %	Lingkungan kantor yang bersih dan terbayarnya 4 PPT Petugas Kebersihan	1 Tahun	50.000.000	PAD, DAU, DBH	0 %	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
01	04	01	009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja	100 %	Perbaikan peralatan kantor yang optimal	1 Tahun	25.000.000	PAD, DAU, DBH	0 %	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
01	04	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	100 %	Tersedianya alat tulis kantor untuk penunjang operasional kerja	1 Tahun	150.000.000	PAD, DAU, DBH	0 %	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
01	04	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100 %	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	60.000.000	PAD, DAU, DBH	0 %	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
01	04	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	Tersedianya komponen-komponen instalasi listrik	1 Tahun	27.000.000	PAD, DAU, DBH	0 %	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
01	04	01	013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang optimal	1 Paket	200.000.000	PAD, DAU, DBH	0 %	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	04	01	014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga	100 %	Tersedianya 3 kompor gas, 3 tabung gas, 6 buah panci, 4 set cangkir tamu, 120 gelas, 50 piring, 1 buah rak dan 5 nampan	1 Paket	10.000.000	PAD, DAU, DBH	0 %	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
01	04	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	Tersedianya 8 jenis surat kabar dan buku perundang-undangan	12 Bulan	10.000.000	PAD, DAU, DBH	0 %	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
01	04	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat	100 %	Tersedianya 22080 gelas teh, ekstra fooding kacang hijau, 750 dos snack, 750 dos makan, 50 dos air mineral	1 Tahun	120.000.000	PAD, DAU, DBH	0 %	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
01	04	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	1 %	Tersedianya biaya rakor dan konsultasi ke luar daerah	1 Tahun	175.000.000	PAD, DAU, DBH	0 %	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
01	04	01	019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Tersedianya biaya rakor dan konsultasi ke dalam daerah	1 Tahun	135.000.000	PAD, DAU, DBH	0 %	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
01	04	01	020	Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan dukungan pelayanan perkantoran	100 %	Terpenuhinya kebutuhan jasa administrasi perkantoran, jasa pengamanan dan jasa kebersihan	1 Tahun	285.000.000	PAD, DAU, DBH	0 %	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
01	04	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur						0			0				
01	04	02	010	Pengadaan mebeler	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan mebeler	100 %	Tersedianya 50 buah kursi rapat, 2 set kukrsi tamu, 10 buah meja rapat, 4 buah meja kerja pelayanan keuangan	1 Paket	75.000.000	PAD, DAU, DBH	0 %	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
01	04	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Tersedianya bangunan kantor yang memadai dan layak	1 Tahun	400.000.000	PAD, DAU, DBH	0 %	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	04	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	100 %	Terpeliharanya 16 Kendaraan Operasional Dinas	1 Tahun	80.000.000	PAD, DAU, DBH	0 %	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
01	04	02	029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeler	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase mebeler dalam kondisi baik	100 %	Terawatnya mebeler kantor, 3 set meja kursi tamu, 30 kursi kerja, 10 buah meja kerja 4 buah rak buku, 4 buah almari arsip	1 Tahun	10.000.000	PAD, DAU, DBH	0 %	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
01	04	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				Pemenuhan kebutuhan pakaian seragam dinas						0			0				
								Pemenuhan kebutuhan pakaian seragam dinas													
01	04	03	002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi				Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	1 Unit	Terpenuhinya 120 pakaian olahraga, 120 sepatu olahraga, 17 pakaian dinas perhubungan, 195 seragam petugas parkir	1 Tahun	100.000.000	PAD, DAU, DBH	0 Unit	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
01	04	03	005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi				Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	1 Unit	Terpenuhinya 34 seragam adat jawa	1 Tahun	10.000.000	PAD, DAU, DBH	0 Unit	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
01	04	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				Peningkatan kapasitas SDM aparatur	4 wilayah					0			0				
01	04	05	001	Pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal	30 Orang	Terpenuhinya biaya diklat dan pelatihan teknis	1 Tahun	110.000.000	PAD, DAU, DBH	0 Orang	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
01	04	05	002	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Se Kabupaten Blora			Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan	4 Orang	Terselenggaranya Sosialisasi dan Pembinaan Petugas Parkir dan Terlaksananya Pameran	4 Wilayah	50.000.000	PAD, DAU, DBH	0 Orang	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
01	04	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				Nilai Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)						0			0				
								Pemenuhan kebutuhan pelaporan kinerja dan keuangan													

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	04	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	DINRUMKIMHUB			Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	1 Pameran Paket	10.000.000	PAD, DAU, DBH	0 Laporan	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
01	04	06	002	Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	DINRUMKIMHUB			Jumlah laporan keuangan semesteran	1 Laporan	Tersusunnya laporan keuangan semesteran SKPD	1 Paket	5.000.000	PAD, DAU, DBH	0 Laporan	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
01	04	06	004	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	DINRUMKIMHUB			Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Paket	10.000.000	PAD, DAU, DBH	0 Laporan	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
01	04	06	005	Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	DINRUMKIMHUB			Jumlah rencana kinerja dan penetapan kinerja	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja SKPD	1 Dokumen	10.000.000	PAD, DAU, DBH	0 Dokumen	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
01	04	06	006	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	DINRUMKIMHUB			Jumlah laporan akuntabilitas kinerja SKPD	1 Laporan	Tersusunnya Laporan Akuntablilitas Kinerja SKPD	1 Dokumen	5.000.000	PAD, DAU, DBH	0 Laporan	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
01	04	06	007	Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	DINRUMKIMHUB			Jumlah dokumen RKA-SKPD dan DPA SKPD	2 Dokumen	Tersusunnya Dokumen RKA dan RKA	2 Dokumen	5.000.000	PAD, DAU, DBH	0 Dokumen	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
01	04	06	008	Penyusunan dan Evaluasi Standarisasi Harga Indeks	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	DINRUMKIMHUB			Jumlah dokumen standarisasi harga indeks	2 Dokumen	Dokumen Harga Bahan dan Upah Tahun 2019	2 Dokumen	20.000.000	PAD, DAU, DBH	0 Dokumen	0	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	1		
TOTAL														150.281.072.000			24.264.000.000				

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KABUPATEN BLORA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																	
01	06			KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																	
01	06	15		PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN				Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)						972.500.000			610.000.000				
01	06	15	001	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Penciptaan Iklim Politik Yang Kondusif	-	blora			Jumlah peserta gladi lapangan, HUT Linmas, Pengiriman Pelatihan linmas	200 Orang	terpenuhinya jumlah peserta gladi lapangan, pembinaan Linmas,dan peningkatan ketrampilan	200 Orang	95.000.000	Bagi Hasil Pajak Rokok Daerah	200 Orang	125.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	Anggota Satlinmas	
01	06	15	003	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Penciptaan Iklim Politik Yang Kondusif	-	blora			Jumlah peserta yang mendapatkan pembekalan dan pelatihan anggota Satpol PP	100 Orang	terpenuhinya jumlah peserta latihan yang menguasai materi kesemaptaan dan pelatihan	100 Orang	90.000.000	Bagi Hasil Pajak Rokok Daerah	40 Orang	50.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	Anggota Satpol PP Kab. Blora	
01	06	15	004	Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	Penciptaan Iklim Politik Yang Kondusif	-	Blora			Jumlah pemantauan kebisingan dan gangguan kegiatan masyarakat	9 Kali	Terpenuhinya jumlah pemantauan kebisingan dan gangguan kegiatan masyarakat yang dilaksanakan oleh petugas	9 Kali	10.000.000	Bagi Hasil Pajak Rokok Daerah	50 Kali	50.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	Masyarakat	
01	06	15	005	Pengendalian keamanan lingkungan	Penciptaan Iklim Politik Yang Kondusif	-	blora			Jumlah petugas yang melaksankan PAM keamanan dan ketertiban (HUT, Lebaran, Hari Jadi, Natal dan Tahun Baru, Pam palang pintu kereta oleh linmas)	600 Orang	terpenuhinya petugas linmas melaksakan pam hari raya, hut Ri, Hari jadi Kab, Tahun Baru, Natal, perlintasan KA tanpa plang	600 Orang	70.000.000	Bagi Hasil Pajak Rokok Daerah	700 Orang	125.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	Anggota Satlinmas	
01	06	15	006	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Penciptaan Iklim Politik Yang Kondusif	-	blora			Jumlah dokumen data keamanan lingkungan yang tersedia	1 Dokumen	tersusunnya dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan program	1 Dokumen	7.500.000	Bagi Hasil Pajak Rokok Daerah	1 Dokumen	10.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	Masyarakat	
01	06	15	007	Pengendalian keamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah	Penciptaan Iklim Politik Yang Kondusif	-	blora			Jumlah PAM Linmas selama proses Pemilu Presiden dan Anggota Legislatif	6880 Orang	terpenuhinya Pam Linmas selama Pemilu	100 %	600.000.000	Bagi Hasil Pajak Rokok Daerah	2345 Orang	150.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	Anggota Satlinmas	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	06	15	009	Penegakan, penindakan pelanggaran Perda	Penciptaan Iklim Politik Yang Kondusif	-	Blora			Jumlah Kecamatan yang ditangani Pelanggaran Perda	16 Kec	terlaksananya penanganan Pelanggaran Perda non yustisi, pro yustisi, pengawasan perda dan penderasan pajak	16 Kec	100.000.000	Bagi Hasil Pajak Rokok Daerah	16 Kec	100.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	Masyarakat	
01	06	16		PROGRAM PEMELIHARAAN KAMTRAMTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL				Cakupan Patroli petugas Satpol PP						2.941.440.000			3.015.000.000				
01	06	16	001	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Penciptaan Iklim Politik Yang Kondusif	-	blora			Jumlah Operasi Penyidikan dan Penyelidikan Pelanggaran Perda	10 Kali	Terselidikinya kasus pelanggaran perda	10 Laporan	30.000.000	Bagi Hasil Pajak Rokok Daerah	12 Kali	50.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	Masyarakat	
01	06	16	002	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Penciptaan Iklim Politik Yang Kondusif	-	blora			Jumlah masyarakat yang memahami perda beserta sanksi nya	120 Orang	terpenuhinya jumlah peserta yang memahami perda pro yustisi dan non yustisi	120 Orang	35.000.000	Bagi Hasil Pajak Rokok Daerah	150 Orang	50.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	Masyarakat	
01	06	16	003	Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan	Penciptaan Iklim Politik Yang Kondusif	-	Blora			Jumlah petugas yang memahami Perda terbaru dan prioritas Satpol PP	90 Orang	Terpenuhinya penyuluhan Perda terbaru dan prioritas	90 Orang	30.000.000	Bagi Hasil Pajak Rokok Daerah	90 Orang	50.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	Anggota Satpol PP Kab. Blora	
01	06	16	004	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Penciptaan Iklim Politik Yang Kondusif	-	Blora			Jumlah anggota yang melaksanakan pengamanan, PAM,penertiban, PKL, Siswa, PNS dan patroli	6656 Orang	terpenuhinya jumlah PAM Lebaran, Natal, Tahun BAru, Penertiban Pelajar, PGOT, Reklame, PKL, Pengawalan Pejabat	6656 Orang	2.463.940.000	Bagi Hasil Pajak Rokok Daerah	6656 Orang	2.555.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	Masyarakat dan Anggota Satpol PP Kab. Blora	
01	06	16	005	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Penciptaan Iklim Politik Yang Kondusif	-	blora			Jumlah dokumen data kamtrabtibmas dan tindak kriminal	1 Dokumen	tersusunya dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan program kamtramtibmas dan pencegahan tindak kriminal	1 Dokumen	7.500.000	Bagi Hasil Pajak Rokok Daerah	1 Dokumen	10.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	Masyarakat	
01	06	16	010	Pemberantasan pita cukai palsu dan rokok polos	Penciptaan Iklim Politik Yang Kondusif	-	blora			Jumlah sosialisasi dan operasi pita cukai palsu dan rokok polos	41 Kali	Terlaksanya sisialisasi tentang pita cukai palsu dan rokok polos	400 Orang	300.000.000	DBHCHT	40 Kali	250.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	Masyarakat	
01	06	16	011	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Lain dalam Pencegahan Pelanggaran Perda	Penciptaan Iklim Politik Yang Kondusif	-	blora			Jumlah masyarakat yang memahami perda perda terbaru yang harus dipatuhi	100 Orang	terpenuhinya jumlah masyarakat paham peraturan daerah	99 Orang	75.000.000	Bagi Hasil Pajak Rokok Daerah	80 Orang	50.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	Pedagang Kaki Lima	
01	06	17		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN				Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten						37.000.000			50.000.000				
01	06	17	001	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	Penciptaan Iklim Politik Yang Kondusif	-	blora			Jumlah penambahan anggota linmas baru	40 Orang	terpenuhinya jumlah anggota linmas baru yang terekrut dan terlatih	40 Orang	37.000.000	Bagi Hasil Pajak Rokok Daerah	50 Orang	50.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	Anggota Satlinmas	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	06	18		PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)				Penyuluhan tentang miras, narkoba dan perjudian kepada masyarakat di kecamatan						37.500.000			60.000.000				
01	06	18	001	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Penciptaan Iklim Politik Yang Kondusif	-	Blora			Jumlah masyarakat yang mendapatkan Penyuluhan dan Operasi Peredaran Minuman Keras dan Narkoba	90 Orang	Terlaksanya penyuluhan dan operasi pencegahan peredaran penggunaan minuman keras dan narkoba	90 Orang	30.000.000	Bagi Hasil Pajak Rokok Daerah	125 Orang	50.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	Masyarakat	
01	06	18	008	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Penciptaan Iklim Politik Yang Kondusif	-	Blora			Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	1 Dokumen	terpenuhinya jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan program pemberantasan penyakit masyarakat	10 Kali	7.500.000	Bagi Hasil Pajak Rokok Daerah	1 Dokumen	10.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	Masyarakat	
01	06	19		PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM				Jumlah anggota linmas yang ditingkatkan pemahamannnya						52.000.000			80.000.000				
01	06	19	001	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana	Penciptaan Iklim Politik Yang Kondusif	-	Blora			Jumlah desa/kelurahan yang terdata daerah rawan bencana bersama satlinmas	15 Desa/Kelurahan	terpenuhinya koordinasi dengan pemerintah desa /kelurahan dalam pencegahan bencana	15 Desa/Kelurahan	15.000.000	Bagi Hasil Pajak Rokok Daerah	20 Desa/Kelurahan	30.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	Pemerintah Desa/Kel dan Anggota Linmas Desa/Kel	
01	06	19	005	Pelatihan dan simulasi penanganan bencana	Penciptaan Iklim Politik Yang Kondusif	-	blora			Jumlah anggota linmas yang memahami penanganan pertama saat terjadi bencana	100 Orang	terpenuhinya jumlah anggota linmas yang memahami penanganan bencana	100 Orang	37.000.000	Bagi Hasil Pajak Rokok Daerah	100 Orang	50.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	Anggota Linmas Desa/Kel	
01	06	20		PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN				Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten Blora						645.000.000			810.000.000				
01	06	20	005	Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	Penciptaan Iklim Politik Yang Kondusif	-	blora			Jumlah peserta diklat	50 Orang	terpenuhinya jumlah peserta yang memahami pertolongan dan pencegahan kebakaran untuk masyarakat	50 Orang	28.000.000	Bagi Hasil Pajak Rokok Daerah	50 Orang	35.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	Relawan Pemadam Kebakaran	
01	06	20	008	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Penciptaan Iklim Politik Yang Kondusif	-	blora			Jumlah sarana dan prasarana	4 Jenis	terpenuhinya jumlah alat pemadam kebakaran	4 Jenis	20.000.000	Bagi Hasil Pajak Rokok Daerah	10 Unit	150.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	Satpol PP Kab. Blora	
01	06	20	009	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Penciptaan Iklim Politik Yang Kondusif	-	blora			Persentase sarpras pencegahan bahaya kebakaran dalam kondisi baik	5 Unit	terpenuhinya mobil damkar yang terpelihara	5 Unit	36.000.000	Bagi Hasil Pajak Rokok Daerah	5 Unit	50.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	Satpol PP Kab. Blora	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	06	20	011	Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	Penciptaan Iklim Politik Yang Kondusif	-	blora			Jumlah lokasi daerah rawan kebakaran yang dikendalikan	14 Lokasi	terpenuhinya data pengawasan dan pendataan lokasi rawan kebakaran	1 Dokumen	15.000.000	Bagi Hasil Pajak Rokok Daerah	20 Lokasi	25.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	Tempat usaha (Pabrik,bengkel, SPBU dll)	
01	06	20	012	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Penciptaan Iklim Politik Yang Kondusif	-	blora			Persentase pemenuhan layanan penanggulangan bahaya kebakaran	100 %	terlaksananya pemadaman kebakaran, terpenuhinya honor petugas pemadam dan mamin piket	12 Bulan	546.000.000	Bagi Hasil Pajak Rokok Daerah	100 %	550.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	Masyarakat korban musibah kebakaran dan anggota pemadam kebakaran	
01				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																	
01	06			KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																	
01	06	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran						0			0				
01	06	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat	100 %	tersusunnya administrasi keuangan dan terkirimnya surat menyurat	12 Bulan	3.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	5.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	Satpol PP Kab. Blora	
01	06	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	100 %	terpenuhinya pembayaran telepon dan listrik	12 Bulan	81.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	85.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	Satpol PP Kab. Blora	
01	06	01	003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	pemenuhan kebutuhan jasa perawatan peralatan dan perlengkapan kantor	35 Unit	20.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	25.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	Satpol PP Kab. Blora	
01	06	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100 %	Pemenuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	45 Unit	23.835.000	PAD, DAU, DBH	100 %	30.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	Satpol PP Kab. Blora	
01	06	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan	100 %	terbayarnya jasa honorarium administrasi keuangan	12 Bulan	105.400.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	120.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	Pengelola Adm. Keuangan dan Barang Daerah Satpol PP Kab. Blora	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	06	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor	100 %	terpenuhinya alat, bahan dan tenaga kebersihan kantor dan lingkungannya selama satu tahun	12 Bulan	22.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	30.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	Satpol PP Kab. Blora	
01	06	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	blora			Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	100 %	Terpenuhinya alat tulis kantor selama 1 Tahun	12 Bulan	38.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	45.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	Satpol PP Kab. Blora	
01	06	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100 %	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	9.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	10.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	Satpol PP Kab. Blora	
01	06	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	blora			Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik	12 Bulan	20.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	25.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	Satpol PP Kab. Blora	
01	06	01	013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Unit	45.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	80.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	Satpol PP Kab. Blora	
01	06	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	blora			Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	terpenuhinya kebutuhan surat kabar dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	8.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	10.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	Satpol PP Kab. Blora	
01	06	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	blora			Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat	100 %	tersediaanya makanan dan minuman untuk rapat dan harian	12 Bulan	30.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	35.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	Satpol PP Kab. Blora	
01	06	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	blora			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	terpenuhinya jumlah operasional perjalanan luar daerah	12 Bulan	120.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	150.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	Satpol PP Kab. Blora	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	06	01	019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Blora			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	terpenuhinya jumlah operasional perjalanan dalam daerah	12 Bulan	110.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	110.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	Satpol PP Kab. Blora	
01	06	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur						0			0				
01	06	02	010	Pengadaan mebeler	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Blora			Persentase pemenuhan mebeler	100 %	terpenuhinya kebutuhan mebeler kantor	4 Unit	50.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	80.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	Satpol PP Kab. Blora	
01	06	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	blora			Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor yang memadai dan terawat dengan baik	1 Unit	65.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	100.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	Satpol PP Kab. Blora	
01	06	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Blora			Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	100 %	terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	12 Unit	150.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	150.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	Satpol PP Kab. Blora	
01	06	02	029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeler	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Blora			Persentase mebeler dalam kondisi baik	100 %	terpenuhinya pemeliharaan mebeler kantor	20 Unit	15.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	20.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	Satpol PP Kab. Blora	
01	06	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				Pemenuhan kebutuhan pakaian seragam dinas						0			0				
01	06	03	002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi	Blora			Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	200 Unit	terpenuhinya jumlah pakaian dinas yang dibutuhkan anggota	200 Set	205.000.000	PAD, DAU, DBH	200 Unit	215.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	Anggota Satpol PP Kab. Blora	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	06	03	005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi	Blora			Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	90 Unit	terpenuhinya seragam olahraga anggota	90 Unit	30.000.000	PAD, DAU, DBH	120 Unit	40.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	Anggota Satpol PP Kab. Blora	
01	06	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				Pemenuhan kebutuhan pelaporan kinerja dan keuangan						0			0				
01	06	06	005	Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Blora			Jumlah rencana kinerja dan penetapan kinerja	5 Dokumen	terpenuhinya susunan rencana dan laporan kinerja, keuangan selama setahun	5 Dokumen	5.000.000	PAD, DAU, DBH	5 Dokumen	5.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	Satpol PP Kab. Blora	
TOTAL														5.840.675.000			5.995.000.000				

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KABUPATEN BLORA

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																	
01	13			SOSIAL																	
01	13	15		PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT), DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA				Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial						40.000.000			50.000.000				
01	13	15	002	Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Kab. Blora			Jumlah orang keluarga miskin yang mendapatkan pelatihan ketrampilan usaha	120 Orang	meningkatnya ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin	120 Orang	40.000.000	PAD, DAU, DBH	120 Orang	50.000.000	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	Keluarga Miskin	
01	13	16		PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL				Persentase korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80 %					1.385.000.000			1.815.000.000				
01	13	16	002	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	-	Kab. Blora			Jumlah Korban Eksploitasi Perdagangan Perempuan dan Anak yang mendapatkan Jaminan Perlindungan Sosial dan Hukum	200 Orang	Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi anak bermasalah dengan hukum dan korban ekploitasi perempuan dan anak	200 Orang	50.000.000	PAD, DAU, DBH	200 Orang	60.000.000	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak di 4 kawedanan di kab. Blora	
01	13	16	004	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	-	Panti Pelayanan di Kab. Blora			jumlah Anak Terlantar, Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal yang mendapatakan pelatihan ketrampilan	70 Orang	Meningkatnya ketrampilan dan praktek belajar kerja sehingga anak mandiri dan dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar	70 Keg	50.000.000	PAD, DAU, DBH	70 Orang	60.000.000	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	nak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal	
01	13	16	007	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	-	Kab. Blora			Jumlah Bulan operasional pelayanan kesejahteraan sosial untuk PMKS	12 Bulan	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada PMKS, Terlaksananya Kegiatan Upacara HKSN, Terlaksananya Program Penanganan Fakir miskin di kab. Blora	12 Bulan	385.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	450.000.000	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	PMKS	
01	13	16	010	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	-	Kab. Blora			jumlah korban bencana yang memperoleh bantuan	400 Orang	Terbantunya masyarakat fakir miskin dan masyarakat yang mengalami korban bencana alam maupun bencana sosial	400 Orang	150.000.000	PAD, DAU, DBH	400 Orang	200.000.000	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	masyarakat yang mengalami masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	13	16	011	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	-	Kab. Blora			Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi dan monitoring	1 Laporan	terwujudnya monitoring evaluasi dan pelaporan	1 Laporan	15.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Laporan	20.000.000	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	Laporan hasil kegiatan	
01	13	16	012	Pelayanan pengemis, gelandangan dan orang terlantar kehabisan bekal (PGOT) dan razia tuna sosial	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	-	Kab. Blora			jumlah pengemis, gelandangan dan orang terlantar,tuna sosial yang mendapatkan pelayanan sosial	150 Orang	Terwujudnya pelayanan sosial bagi orang terlantar dalam perjalanan dan terwujudnya penjangkauan terhadap PGOT dan WTS	150 Orang	50.000.000	PAD, DAU, DBH	150 Orang	60.000.000	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	pengemis, gelandangan dan orang terlantar kehabisan bekal (PGOT) dan razia tuna sosial	
01	13	16	013	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS (PKH)	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	-	Kab Blora			Jumlah rakor operator dan pendamping PKH	10 Kali	Meningkatnya pelayanan Kesejahteraan Sosial Program Keluarga Harapan	10 Kali	130.000.000	PAD, DAU, DBH	10 Kali	140.000.000	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	Pendamping PKH	
01	13	16	014	Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Singgah dan TMP	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	-	Rumah Singgah di Ngampel, TMP Whira Bhakti Blora, TMP Nusa Bhakti Cepu, TMP Sukma Kencana Randublatung			Persentase kondisi Taman Makam Pahlawan Nasional dan Rumah Singgah yang terpelihara dengan baik	100 %	Terlaksananya Pemeliharaan dan Pelestarian Nilai-nilai keperintisan Kepahlawanan (TMP) dan Kesetiakawanan sosial (Rumah Singgah) bagi PMKS dan Operasional Peringatan Hari Pahlawan)	100 %	55.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	75.000.000	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	Sarana dan Prasarana Rumah Singgah dan TMP	
01	13	16	015	Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kemiskinan	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	-	Kab. Blora			Jumlah desa/kelurahan yang tersusun data base kemiskinan yang terupdate	295 Desa/Kelurahan	Ketersediaan database kemiskinan yang terupdate dan tersedianya 1 aplikasi pelayanan PMKS	295 Desa/Kelurahan	500.000.000	PAD, DAU, DBH	295 Desa/Kelurahan	750.000.000	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	Keluarga Miskin	
01	13	18		PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA				Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial						200.000.000			250.000.000				
01	13	18	004	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Kab. Blora			jumlah penyandang cacat dan eks trauma yang mendapatkan pelatihan ketrampilan	200 Orang	Meningkatnya kemandirian penyandang cacat untuk meningkatkan taraf hidup	200 Orang	200.000.000	PAD, DAU, DBH	200 Orang	250.000.000	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	penyandang cacat dan eks trauma	
01	13	19		PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN / PANTI JOMPO				Persentase panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan social	100%					226.000.000			370.000.000				
01	13	19	003	Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Kab. Blora			Jumlah panti/ rumah singgah bagi PMKS yang memperoleh operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana	26 Unit	Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	26 Unit	101.000.000	PAD, DAU, DBH	26 Unit	200.000.000	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	13	19	008	Sosialisasi dan pembinaan panti asuhan	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Kab. Blora			Jumlah peserta sosialisasi panti asuhan/jompo	50 Orang	Terwujudnya Sosialisasi dan pembinaan Panti asuhan	50 Orang	50.000.000	PAD, DAU, DBH	50 Orang	70.000.000	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	panti asuhan	
01	13	19	009	Jambore anak panti	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Kab. Blora			Jumlah peserta porseni anak panti	50 Orang	Terwujudnya pelaksanaan Jambore Anak Panti	50 Orang	75.000.000	PAD, DAU, DBH	50 Orang	100.000.000	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	anak panti	
01	13	21		PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL										625.000.000			940.000.000				
01	13	21	003	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	-	Mlangsen, KECAMATAN BLORA			Jumlah tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan dan/atau fasilitasi	70 Orang	Terselenggaranya Bulan Karang Taruna	70 Orang	145.000.000	PAD, DAU, DBH	80 Orang	150.000.000	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	TKS, TKSK, TAGANA, Karang Taruna, PSM DAN LK3	RESES
					Percepatan Pengentasan Kemiskinan	-	Adirejo, KECAMATAN TUNJUNGAN			Jumlah tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan dan/atau fasilitasi	70 Orang	Teselenggaranya Pembinaan Karangtaruna Desa Adirejo Kec. Tunjungan	70 Orang	30.000.000	PAD, DAU, DBH	70 Orang	40.000.000	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	TKS, TKSK, TAGANA, Karang Taruna, PSM DAN LK3	RESES
					Percepatan Pengentasan Kemiskinan	-	Kab. Blora			Jumlah tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan dan/atau fasilitasi	70 Orang	Terselenggaranya Pemberdayaan TKS, TKSK, TAGANA, Karang Taruna, PSM dan LK3 dari 16 kec	70 Orang	450.000.000	PAD, DAU, DBH	70 Orang	750.000.000	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	TKS, TKSK, TAGANA, Karang Taruna, PSM DAN LK3	
02				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																	
02	02			PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																	
02	02	15		PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN				Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	8					175.000.000			255.000.000				
								Persentase SKPD menyusun analisis gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	40												

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	02	15	003	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	-	Kab. Blora			Jumlah Peserta sosialisasi terkait kesetaraan gender dan perlindungan anak	499 Orang	Menurunnya kasus KDRT di Kabupaten Blora melalui kegiatan sosialisasi KDRT dan seminar HIV bagi perempuan kelompok rentan	500 Orang	50.000.000	PAD, DAU, DBH	500 Orang	75.000.000	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	Perempuan dan Anak	
02	02	15	005	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	-	Kab. Blora			Jumlah peserta sosialisasi dan advokasi Kabupaten Layak Anak	80 Orang	Meningkatnya pemahaman kota layak anak	80 Orang	25.000.000	PAD, DAU, DBH	80 Orang	30.000.000	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	Anak di Kab. Blora	
02	02	15	006	Lomba Kreativitas Anak	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	-	Kab. Blora			Jumlah anak yang mengikuti Lomba Krativitas anak dan terselenggaranya Hari Anak Tingkat Kabupaten	400 Anak	Meningkatnya budaya tradisional khususnya Budaya Jawa bagi anak-anak dan pengembangan kreatifitas anak PAUD melalui peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Kabupaten	400 Orang	100.000.000	PAD, DAU, DBH	400 Anak	150.000.000	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	Anak	
02	02	16		PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK				Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan	7 kelompok					505.000.000			705.000.000				
								Persentase Focal point aktif	75 %												
02	02	16	001	Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak	Kab. Blora			Jumlah kegiatan advokasi dan Fasilitasi PUG bagi perempuan	2 Kali	Meningkatnya dukungan dan apresiasi masyarakat terhadap peran serta perempuan dalam pembangunan melalui peringatan Hari Kartini (500 org) dan Hari Ibu (500 orang) serta santunan anak janda miskin 50 org	2 Kali	100.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Kali	150.000.000	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	Perempuan Kab. Blora	
02	02	16	002	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak	Kab.Blora			Jumlah kecamatan yang dibentuk P2TP2	3 Kec	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada korban kekerasan terhadap perempuan	3 Kec	50.000.000	PAD, DAU, DBH	3 Kec	70.000.000	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	Perempuan Kab. Blora	
02	02	16	005	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak	Kab. Blora			Jumlah kegiatan anak, termasuk forum anak yang ada di Kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan	1 Kali	Peningkatan dan penguatan lembaga pengarusutamaan	1 Kali	50.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Kali	60.000.000	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	lembaga pengarusutamaan gender dan anak	
02	02	16	006	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak	Kab. Blora			Jumlah SKPD yang melaksanakan PPRG	45 SKPD	meningkatnya kualitas SDM Perencanaan ARG melalui refresh kegiatan Focl Point SKPD bagi Subag Perencanaan/Program SKPD se Kab. Blora dan bintek PPRG Meoda Proba	45 SKPD	100.000.000	PAD, DAU, DBH	45 SKPD	150.000.000	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	lembaga perempuan dan anak	
02	02	16	008	Pengembangan sistem informasi gender dan anak	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak	Kab. Blora			Jumlah aplikasi yang dikembangkan dan diupdate yang memuat profil anak	1 Aplikasi	Tersedianya data pilah anak	1 Tahun	55.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Aplikasi	75.000.000	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	sistem informasi gender dan anak	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	02	16	010	Bimbingan Teknis Desa Prima	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak	Kab. Blora			Jumlah Desa Prima yang terbentuk	2 Desa	Terwujudnya Bimtek dan Pembinaan di Desa Pronakis	2 Desa	150.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Desa	200.000.000	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	Desa Prima	
02	02	17		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN				Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	0 kasus					75.000.000			100.000.000				
02	02	17	001	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan daerah	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak	Kab. Blora			Jumlah Desa yang telah dibina GSI	48 Desa	Menurunnya angka kematian ibu dan bayi di Kab. Blora melalui terlaksananya rakor Poktajab GSIB,Pemilihan pelaksana terbaik Kecamatan Sayang Ibu dan Bayi Tk. Kab. Blora dan Pembinaan Kecamatan Sayang Ibu dan Bayi	48 Desa	75.000.000	PAD, DAU, DBH	48 Desa	100.000.000	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	kebijakan perlindungan perempuan daerah	
01				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																	
01	13			SOSIAL																	
01	13	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100					0			0				
01	13	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat	100 %	Terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran	12 Bulan	5.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	6.500.000	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	jasa surat menyurat	
01	13	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	100 %	Kelancaran administrasi perkantoran melalui ketersediaan sarana dan prasarana jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	100 %	100.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	125.000.000	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	
01	13	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100 %	Kelancaran operasional kantor melalui kelancaran administrasiperijinan kendaraan dinas	100 %	12.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	20.000.000	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	
01	13	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan	100 %	Terwujudnya kelancaran adminitrasi perkantoran melalui tersedianya honor pengelola keuangan SKPD	100 %	105.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	125.000.000	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	Penyediaan jasa administrasi keuangan	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	13	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor	100 %	Kelancaran administrasi perkantoran melalui kebersihan dan keindahan sarana dan prasarana gedung kantor	100 %	15.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	20.000.000	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	Penyediaan jasa kebersihan kantor	
01	13	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	100 %	Kelancaran adminitrasi perkantoran melalui ketersediaan alat tulis kantor	100 %	50.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	60.000.000	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	Penyediaan alat tulis kantor	
01	13	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kab.Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100 %	Kelancaran admnistrasi perkantoran melalui ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	100 Bulan	26.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	30.000.000	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	
01	13	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	Kelancaran adminitrasi perkantoran melalui ketersediaan alat dan komponen instalasi listrik penerangan gedung kantor	100 %	10.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	15.000.000	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	
01	13	01	013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	kelancaran administrasi perkantoran melalui Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	45.925.000	PAD, DAU, DBH	100 %	50.000.000	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	
01	13	01	014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga	100 %	kelancaran administrasi perkantoran melalui ketersediaan alat-alat rumah tangga(1 jam dinding, 3 cermin hias,1 lemari makan,1 rak piring, 2 dosin gelas,2 ceret, 2 piring, 2 sendok& dingin, 10 serbet,bendera 1,2 tempat minum besar panas dan 1 umbul2)	100 %	5.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	6.000.000	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	Penyediaan peralatan rumah tangga	
01	13	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	Kelancaran administrasi perkantoran melalui tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan (3 eks suara merdeka,jawa pos,kompas,cempaka,diva)	100 %	11.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	15.000.000	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	
01	13	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat	100 %	Kelancaran administrasi perkantoran melalui ketersediaan makana dan minuman harian	100 %	35.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	45.000.000	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	Penyediaan makanan dan minuman	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	13	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kab.Blora			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Kelancaran administrasi perkantoran melalui ketersediaan perjalanan dina luar daerah	100 %	135.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	150.000.000	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	
01	13	01	019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kab. Blora			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Kelancaran adminitrasi perkantoran melalui ketersediaan perjalanan dinas dalam daerah dan monitoring evaluasi kegiatanverval jamkesda	100 %	90.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	100.000.000	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	
01	13	01	020	Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kab. Blora			Persentase pemenuhan dukungan pelayanan perkantoran	100 %	Ketersediaan penyediaan honor tenaga kontrak	100 %	190.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	250.000.000	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran	
01	13	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %					0			0				
01	13	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kab. Blora			Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Peningkatan kinerja melalui ketersediaan sarna dan prasarana gedung kantor yang memadai	100 %	130.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	150.000.000	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	
01	13	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kab. Blora			Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	100 %	Peningkatan kinerja melalui ketersediaan sarana dan prasarana kendaraan dinas yang memadai dan terawat dengan bail	100 %	75.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	100.000.000	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	
01	13	02	028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kab. Blora			Persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	99 %	Peningkatan kinerja melalui ketersediaan sarana dan prasarana peralatan gedung kantor yang memadai dan terawat dengan baik (10 laptop, 30 printer, 27 komputer,1 monitor,1 kamera, 1 telepon,1 mesin fax, 8 AC)	100 %	15.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	20.000.000	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	
01	13	02	042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kab. Blora			Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	1 Unit	Peningkatan kinerja melalui ketesediaan sarana dan prasaran gedung kantor yang memadai (rehap pagar TMP Cepu)	1 Unit	25.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Unit	30.000.000	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	
01	13	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				Pemenuhan kebutuhan pakaian seragam dinas						0			0				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Pemenuhan kebutuhan pakaian seragam dinas													
01	13	03	005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi	Kab.Blora			Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	70 Unit	peningkatan disiplin dan kinerja melalui ketersediaan pakaian khusus hari-hari tertentu	70 Unit	35.000.000	PAD, DAU, DBH	70 Unit	40.000.000	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	
01	13	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				Peningkatan kapasitas SDM aparatur						0			0				
01	13	05	001	Pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kab. Blora			Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal	5 Orang	Peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan formal dan non formal	5 Orang	5.000.000	PAD, DAU, DBH	5 Orang	10.000.000	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	Pendidikan dan pelatihan formal	
01	13	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				Pemenuhan kebutuhan pelaporan kinerja dan keuangan	100 %					0			0				
01	13	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kab. Blora			Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 Laporan	Peningkatan kinerja melalui ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (laporan LKJip, LPPD, Evaluasi Renja, CaLK,Aset)	6 Laporan	7.500.000	PAD, DAU, DBH	6 Laporan	10.000.000	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	
01	13	06	005	Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kab. Blora			Jumlah rencana kinerja dan penetapan kinerja	6 Dokumen	peningkatan kinerja melalui ketersediaan pelaporan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kerja (Renja, RKA/DPA,Penetapan Kinerja, SIRUP, SAKIP)	6 Dokumen	7.500.000	PAD, DAU, DBH	6 Dokumen	10.000.000	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	Laporan capaian kinerja dan keuangan	
TOTAL														4.365.925.000			5.872.500.000				

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KABUPATEN BLORA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																	
01	06			KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																	
01	06	19		PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM				Jumlah anggota linmas yang ditingkatkan pemahamannnya	120 orang					1.220.000.000			775.500.000				
								Jumlah Relawan	305 orang												
								Tingkat Waktu Tanggap (Respon time rata) daerah Layanan	60 menit												
								Persentase Aparatur Petugas Penanggulangan Bencana yang memenui Standar Kualifikasi	80%												
								Cakupan Pelayanan Penanganan Bencana di Kabupaten Blora	97%												
01	06	19	001	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana	Penciptaan Iklim Politik Yang Kondusif	-	-			Jumlah desa/kelurahan yang terdata daerah rawan bencana bersama satlinmas	275 Desa/Kelurahan	Terlaksananya pemantauan daerah potensi bencana dan apel siaga	16 Kec	75.000.000	PAD, DAU, DBH	320 Desa/Kelurahan	82.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1	masyarakat dan aparat umum	
01	06	19	003	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	Penciptaan Iklim Politik Yang Kondusif	-				jumlah peralatan untuk evakuasi pada saat terjadi bencana alam	5 Jenis	Terpenuhinya peralatan penanggulangan bencana yang terdiri dari Mobil Tangki 1 unit, Lighting Tower Dynamic 2 unit, Pompa Kebakaran Double Output 1 unit, Tangga Sliding 2 unit dan Tenda Posko Family 2 unit	100 %	715.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Unit	220.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	06	19	004	Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara	Penciptaan Iklim Politik Yang Kondusif	-	-			jumlah logistik dan obat - obatan yang terbagi untuk penduduk ditempat penampungan sementara	400 Paket	Terpenuhinya logistik korban bencana alam	400 Paket	200.000.000	PAD, DAU, DBH	440 Paket	220.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1	masyarakat terkena bencana	
01	06	19	005	Pelatihan dan simulasi penanganan bencana	Penciptaan Iklim Politik Yang Kondusif	-	-			jumlah peserta pelatihan dan simulasi penanganan bencana	320 Orang	Terlaksananya pelatihan dan simulasi bagi masyarakat	320 Orang	200.000.000	PAD, DAU, DBH	320 Orang	220.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1	Petugas penanganan bencana	
01	06	19	008	Inventarisasi dan identifikasi kerusakan pasca bencana	Penciptaan Iklim Politik Yang Kondusif	-	-			Jumlah laporan inventarisasi dan identifikasi kerusakan pasca bencana	16 Laporan	Data akurat	16 Laporan	30.000.000	PAD, DAU, DBH	16 Laporan	33.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1	Jumlah bencana yang terinventarisasi dan teridentifikasi	
01	13			SOSIAL																	
01	13	16		PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL				Persentase korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat						559.400.000			612.400.000				
01	13	16	010	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	-	-			Persentase penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	100 %	Terpenuhinya kebutuhan air bersih akibat musim kemarau bagi masyarakat terdampak	500 Unit	529.400.000	PAD, DAU, DBH	500 Unit	579.400.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1		
01	13	16	011	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	-	-			Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi	1 Dokumen	Terlaksananya kegiatan monev dan pelaporan	25 Laporan	30.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	33.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1		
01				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																	
01	13			SOSIAL																	
01	13	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100					0			0				
01	13	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	-			Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat	100 %	Terlaksananya Pengiriman surat menyurat	12 Bulan	7.500.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	8.250.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1		
01	13	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	-			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	100 %	Terciptanya komunikasi perkantoran yang lancar dan penggunaan air dan listrik secara optimal	12 Bulan	90.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	137.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	13	01	003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	-			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	Terwujudnya pelaksanaan administrasi yang lancar dan tertib	30 Jenis	35.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	16.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1		
01	13	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	-			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100 %	Terlaksananya perpanjangan / penggantian STNK mobil/motor dan KIR mobil	21 Unit	55.000.000	PAD, DAU, DBH	21 Unit	60.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1		
01	13	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	-			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan	100 %	Tersedianya honorarium tenaga administrasi keuangan	12 Bulan	62.500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	77.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1		
01	13	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	-			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor	100 %	Tersediannya jasa dan bahan kebersihan kantor	22 Jenis	57.800.000	PAD, DAU, DBH	100 %	63.580.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1		
01	13	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	-			Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	100 %	Tersediannya jumlah kebutuhan alat tulis kantor	12 Bulan	45.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	77.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1		
01	13	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	-			Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100 %	Tersediannya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	25.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	33.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1		
01	13	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	-			Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	Peningkatan penerangan	20 Jenis	20.775.000	PAD, DAU, DBH	100 %	22.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	13	01	013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	-			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	Tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor berupa TV 1 unit, Proyektor 1 unit dan Printer 2 unit, Vacum cleaner 1 unit, Alat Pencuci Mobil 1 unit , Drone 1 unit	6 Jenis	27.500.000	PAD, DAU, DBH	100	165.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1		
01	13	01	014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	-			Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga	100 %	Terpenuhinya peralatan rumah tangga berupa kompor gas 1 unit, rak piring 2 unit, jemuran baju 4 unit	3 Jenis	20.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	22.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1		
01	13	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	-			Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	Terciptanya peningkatan pengetahuan aparatur	48 Buah	10.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	19.250.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1		
01	13	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	-			Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat	100 %	Terpenuhinya makan, minum harian, rapat dan tamu	12 Bulan	74.500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	66.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1		
01	13	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	-			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Terpenuhinya perjalanan dinas keluar daerah	20 Kali	275.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	275.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1		
01	13	01	019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	-			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Terpenuhinya perjalanan dinas dalam daerah	15 Kali	50.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	110.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1		
01	13	01	020	Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	-			Persentase pemenuhan dukungan pelayanan perkantoran	100 %	Terwujudnya keamanan dan operasional kantor lainnya	5 Orang	87.700.000	PAD, DAU, DBH	100 %	87.700.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	13	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur						0			0				
01	13	02	010	Pengadaan mebeler	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	-			Persentase pemenuhan mebeler	100 %	Tersediannya rak logistik, front office, kursi tamu, rak peralatan, dan rak dapur	5 Jenis	70.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	55.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1		
01	13	02	012	Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	-			Persentase pemenuhan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor	100 %	Terwujudnya bangunan gudang 2 lokal dan lanjutan pavingisasi lingkungan kantor	2 Jenis	500.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	550.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1		
01	13	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	-			Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	100 %	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	24 Kali	65.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	165.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1		
01	13	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				Pemenuhan kebutuhan pakaian seragam dinas						0			0				
01	13	03	002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi	-			Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	100 Unit	Tersediannya Pakaian Dinas Lapangan BPBD, Pakaian Olah Raga, Pakaian Adat	75 Buah	81.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	82.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1		
01	13	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				Peningkatan kapasitas SDM aparatur						0			0				
01	13	05	001	Pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	-			Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal	29 Orang	Terlatihnya aparatur, Terwujudnya kaji pasca bencana dan Terwujudnya desa tangguh bencana	29 Orang	25.000.000	PAD, DAU, DBH	29 Orang	40.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1		
01	13	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				Pemenuhan kebutuhan pelaporan kinerja dan keuangan						0			0				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	13	06	004	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	-			Jumlah laporan keuangan akhir tahun	5 Laporan	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	5 Laporan	10.000.000	PAD, DAU, DBH	5 Laporan	16.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1		
01	13	06	005	Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	-			Jumlah rencana kinerja dan penetapan kinerja	5 Dokumen	Tersusunnya renstra, renja dari penetapan kinerja SKPD, penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	5 Dokumen	6.000.000	PAD, DAU, DBH	5 Dokumen	16.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1		
TOTAL														3.479.675.000			3.553.680.000				

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KABUPATEN BLORA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																	
02	05			LINGKUNGAN HIDUP																	
02	05	15		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN				Prosentase usaha dan/ atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pengelolaan lingkungan hidup	100%					3.100.000.000			6.700.000.000				
								Standart IKLH Kabupaten Blora	68,5												
								Rasio cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan	100%												
								Prosentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	100%												
02	05	15	001	Koordinasi penilaian kota sehat/adipura	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup				Persentase kader Kalpataru yang dibina	100 %	Terwujudnya kader kalpataru	100 %	0	-	100 %	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Titik pantau adipura, LBS, LKBH	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup				Jumlah buku profil yang disusun (profil Adipura, profil desa LBS, profil LKBH)	23 Buku	Tersusunnya buku profil Adipura, profil desa LBS dan profil LKBH	23 Buku	0	-	23 %	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Titik pantau adipura, LBS, LKBH	
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup				Jumlah peningkatan kualitas titik pantau Adipura, LBS dan LKBH	162 Lokasi	Tercapainya lingkungan kota, kelurahan, desa yang bersih, sehat dan hijau	162 Lokasi	90.000.000	PAD, DAU, DBH	162 %	300.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Titik pantau adipura, LBS, LKBH	
02	05	15	003	Pemantauan kualitas lingkungan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup				Jumlah dokumen laporan pemantauan kualitas lingkungan	1 Dokumen	Tersusunnya buku laporan pemantauan kualitas lingkungan	1 Dokumen	0	-	1 Dokumen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	DAS Bengawan Solo dan DAS Lusi	
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup				Jumlah titik sampling pemantauan kualitas lingkungan	78 titik sampling	Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan serta uji kualitas air dan udara ambien	78 titik sampling	70.000.000	PAD, DAU, DBH	300 Dokumen	400.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	DAS Bengawan Solo dan DAS Lusi	
02	05	15	004	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup				Jumlah laporan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	1 Laporan	Tersusunnya laporan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	1 Laporan	0	-	1 Laporan	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Blora	
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup				Jumlah pengawasan usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	30 Lokasi	Terlaksananya pengawasan usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	30 Lokasi	50.000.000	PAD, DAU, DBH	100 Laporan	200.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Blora	
02	05	15	006	Pengelolaan B3 dan limbah B3	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup				Jumlah sarana prasarana pengelolaan limbah B3	1 Unit	Terbangunnya sarana prasarana pengelolaan limbah B3	0	0	-	1 Unit	100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Usaha dan/ atau kegiatan penghasil limbah B3	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup				Persentase usaha dan/ atau kegiatan yang memperoleh Rekomendasi Teknis Izin Pengelolaan Limbah B3 skala Kabupaten	100 %	Terwujudnya penerbitan Rekomendasi Teknis Pengelolaan Limbah B3	0	0	-	100 Unit	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Usaha dan/ atau kegiatan penghasil limbah B3	
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup				Jumlah dokumen perencanaan teknis pengelolaan limbah B3	1 Dokumen	Tersusunnya dokumen perencanaan teknis pengelolaan limbah B3	0	0	-	1 Unit	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Usaha dan/ atau kegiatan penghasil limbah B3	
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup				Jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang mendapat bimbingan teknis/ workshop/ pembinaan pengelolaan limbah B3 dan limbah medis	30 usaha/kegiatan	Terlaksananya bimbingan teknis/ workshop/ pembinaan pengelolaan limbah B3 dan limbah medis	0	0	-	30 Unit	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Usaha dan/ atau kegiatan penghasil limbah B3	
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup				Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pemantauan pengelolaan limbah B3	30 usaha/kegiatan	Terlaksananya pemantauan pengelolaan limbah B3	30 usaha/kegiatan	0	-	30 Unit	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Usaha dan/ atau kegiatan penghasil limbah B3	
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup				Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan identifikasi dan inventarisasi limbah B3 dan limbah medis	30 usaha/kegiatan	Terlaksananya identifikasi dan inventarisasi limbah B3 dan limbah medis	30 usaha/kegiatan	70.000.000	PAD, DAU, DBH	30 Unit	200.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Usaha dan/ atau kegiatan penghasil limbah B3	
02 05 15 008	Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup				Jumlah dokumen inventarisasi kerusakan lahan eks. pertambangan minerba	1 Dokumen	Tersusunnya dokumen inventarisasi kerusakan lahan eks pertambangan minerba	0	0	-	1 Dokumen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Kabupaten Blora	
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup				Jumlah bibit tanaman konservasi di lahan eks. pertambangan minerba	500 bibit tanaman	Terlaksananya konservasi di lahan eks pertambangan minerba	500 Bibit	50.000.000	PAD, DAU, DBH	1000 Dokumen	300.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Kabupaten Blora	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	05	15	010	Koordinasi pengelolaan prokasih/superkasih	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup				Jumlah lokasi gerakan program kali bersih	1 Lokasi	Terwujudnya gerakan program kali bersih	1 Lokasi	30.000.000	PAD, DAU, DBH	5 Lokasi	200.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Kabupaten Blora	
02	05	15	011	Pengembangan produksi ramah lingkungan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup				Jumlah pilot project produksi ramah lingkungan	1 proyek percontohan	Terwujudnya pilot project produksi ramah lingkungan	0	0	-	1 proyek percontohan	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	KSM persampahan	
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup				Jumlah peserta pembinaan/ sarasehan/ FGD/ pelatihan/ in house training pengembangan produksi ramah lingkungan	50 Orang	Terwujudnya pembinaan/ sarasehan/ FGD/ pelatihan/ in house training pengembangan produksi ramah lingkungan	50 Orang	55.000.000	PAD, DAU, DBH	50 proyek percontohan	150.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	KSM persampahan	
02	05	15	014	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup				Jumlah lokasi Pilot Project Desa Mandiri Energi (DEM)	1 Lokasi	Terwujudnya pilot project Desa Mandiri Energi (DEM)	0	0	-	1 Lokasi	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Kelompok/ kader lingkungan	
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup				Jumlah kelompok/ kader yang mendapat pelatihan dan pemberdayaan kader lingkungan	10 Kelompok	Terlaksananya pelatihan dan pemberdayaan kader lingkungan	10 Kelompok	40.000.000	PAD, DAU, DBH	10 Lokasi	200.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Kelompok/ kader lingkungan	
02	05	15	017	Pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup				Persentase jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang memperoleh Rekomendasi Teknis Izin Pembuangan Air Limbah	100 %	Terwujudnya penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Pembuangan Air Limbah	100 %	0	-	100 %	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Blora	
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup				Jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang dilakukan pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	20 usaha/kegiatan	Terlaksananya pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan	20 usaha/kegiatan	30.000.000	PAD, DAU, DBH	50 %	250.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Blora	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	05	15	018	Pengadaan alat-alat laboratorium lingkungan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup				Jumlah bahan kimia dan reagensia	2 Paket	Tersedianya bahan kimia, reagen/reaktan, CRM/SRM dan lainnya	2 Paket	0	-	2 Paket	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	UPT Laboratorium Lingkungan	
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup				Jumlah peralatan laboratorium dan sarana prasarana pendukung laboratorium	2 Paket	Tersedianya peralatan laboratorium beserta sarana prasarana pendukung	2 Paket	275.000.000	PAD, DAU, DBH	4 Paket	1.500.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	UPT Laboratorium Lingkungan	
02	05	15	019	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup				Persentase perawatan, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan laboratorium	100 %	Terlaksananya perawatan, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan laboratorium	100 %	0	-	100 %	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	UPT Laboratorium Lingkungan	
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup				Persentase penerapan sistem manajemen mutu laboratorium menuju laboratorium terakreditasi dan teregistrasi	100 %	Terwujudnya penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkungan menuju laboratorium terakreditasi dan teregistrasi	100 %	0	-	100 %	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	UPT Laboratorium Lingkungan	
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup				Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan dan penambahan analis laboratorium	6 Orang	Terwujudnya pelatihan teknis laboratorium dan penambahan analis laboratorium	6 Orang	140.000.000	PAD, DAU, DBH	8 %	700.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	UPT Laboratorium Lingkungan	
02	05	15	020	Koordinasi penyusunan dokumen lingkungan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup				Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan instrument lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, DPLH/ DELH, Audit Lingkungan, Analisis Resiko Lingkungan)	100 %	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan instrument lingkungan	100 %	200.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	200.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Kabupaten Blora	
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup				Persentase pelaksanaan penilaian dokumen lingkungan (AMDAL dan/atau UKL-UPL) serta rekomendasi dan penerbitan Izin Lingkungan	100 %	Terlaksananya penilaian dokumen lingkungan	100 %	0	-	100 %	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Kabupaten Blora	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	05	15	024	Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lingkungan (DAK)	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup				Jumlah peralatan laboratorium untuk uji kualitas air dan pendukungnya	1 Paket	Terwujudnya peralatan laboratorium untuk uji kualitas air dan pendukungnya	1 Paket	2.000.000.000	DAK FISIK	1 Paket	2.000.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	UPT Laboratorium Lingkungan	
02	05	16		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM				Rasio Cakupan penghijauan di wilayah Sumber Mata Air	1,2%					235.000.000			1.675.000.000				
								Prosentase jumlah sumur resapan dan lubang resapan biopori yang berhasil dimanfaatkan	100%												
								Prosentase desa yang menerapkan program desa berwawasan lingkungan	100%												
02	05	16	005	Pengendalian dampak perubahan iklim	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah dokumen inventarisasi dan pengukuran gas rumah kaca (GRK) termasuk pembuatan profil dokumen gas rumah kaca (GRK) dan RAD	2 Dokumen	Terlaksananya inventarisasi dan pengukuran gas rumah kaca beserta pembuatan profil gas rumah kaca	0	0	-	2 Dokumen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Kabupaten Blora	
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah desa yang dilakukan verifikasi proklim (program kampung iklim)	1 Desa	Terwujudnya program kampung iklim	1 Desa	0	-	2 Dokumen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Kabupaten Blora	
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah pembinaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan kegiatan rencana aksi daerah pengurangan emisi gas rumah kaca (RAD GRK)	1 Kali	Terlaksananya RAD pengurangan emisi gas rumah kaca	1 Kali	70.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	500.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Kabupaten Blora	
02	05	16	007	Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah dokumen inventarisasi dan identifikasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air	1 Dokumen	Tersusunnya dokumen inventarisasi dan identifikasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air	0	0	-	1 Dokumen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Kabupaten Blora	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah lokasi konservasi di daerah tangkapan air	1 Lokasi	Terlaksananya konservasi di daerah tangkapan air	1 Lokasi	50.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	300.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Kabupaten Blora	
02	05	16	010	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah dokumen profil pengelolaan tutupan vegetasi	1 Dokumen	Tersusunnya laporan profil pengelolaan tutupan vegetasi	0	0	-	1 Dokumen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Kabupaten Blora	
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah dokumen keanekaragaman hayati	1 Dokumen	Tersusunnya dokumen keanekaragaman hayati	0	0	-	1 Dokumen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Kabupaten Blora	
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah bibit tanaman konservasi Taman Kehati atau Taman Hijau, penyediaan bibit tanaman bersifat insidentil/ permintaan	800 bibit tanaman	Terlaksananya pengadaan bibit tanaman konservasi	800 Bibit	35.000.000	PAD, DAU, DBH	1000 Dokumen	500.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Kabupaten Blora	
02	05	16	014	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah Sumur Resapan dan Lubang Resapan Biopori yang terbangun	50 Unit	Terbangunnya sumur resapan dan lubang resapan biopori	0 Unit	0	-	50 Unit	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Kabupaten Blora	
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah bibit tanaman konservasi yang disediakan	1300 bibit tanaman	Terwujudnya bibit tanaman konservasi	1300 Bibit	50.000.000	PAD, DAU, DBH	1000 Unit	300.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Kabupaten Blora	
02	05	16	016	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah dokumen laporan tahun pelaksanaan program kegiatan	1 Dokumen	Tersedianya dokumen laporan tahun pelaksanaan program kegiatan	1 Dokumen	30.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	75.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Dinas Lingkungan Hidup	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	05	18		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP				Institusi pendidikan yang menerapkan program sekolah berwawasan lingkungan / sekolah adiwiyata						150.000.000			1.100.000.000				
02	05	18	001	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah fasilitasi peringatan Hari Lingkungan Hidup, HPSN, Expo/ Pameran, pengembangan Eco Office, Blora Green & Clean serta hari-hari lingkungan hidup lainnya	2 Keg	Jumlah fasilitasi pameran, HPSN maupun hari-hari lingkungan hidup	2 Keg	0	-	5 Keg	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Kabupaten Blora	
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah sekolah yang diberikan pembinaan Adiwiyata	40 Sekolah	Terwujudnya pembinaan sekolah Adiwiyata	40 Sekolah	60.000.000	PAD, DAU, DBH	50 Keg	500.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Kabupaten Blora	
02	05	18	002	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah publikasi media tentang Kota Blora yang Bersih, Hijau dan Sehat serta penyebarluasan informasi mengenai pengelolaan lingkungan hidup	1 Paket	Terwujudnya publikasi media mengenai pengelolaan lingkungan hidup	0	0	-	1 Paket	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Kabupaten Blora	
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah dokumen SILHD	1 Dokumen	Tersusunnya dokumen SILHD	0	0	-	1 Paket	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Kabupaten Blora	
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah aplikasi database SILHD yang dikembangkan dan dipelihara	1 Aplikasi	Terwujudnya aplikasi database SILHD beserta sarana prasarana pendukung	0	0	-	1 Paket	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Kabupaten Blora	
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah dokumen IKPLHD	1 Dokumen	Tersusunnya dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	1 Dokumen	90.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Paket	600.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Kabupaten Blora	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	05	19		PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI				Prosentase jumlah instalasi pengolah limbah cair yang berhasil dimanfaatkan						543.750.000			700.000.000				
								Pemantauan uji kualitas udara													
								Pemantauan uji kualitas limbah cair													
02	05	19	002	Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah laporan pemantauan kualitas udara	1 Dokumen	Tersusunnya laporan pemantauan kualitas udara	1 Dokumen	0	-	1 Dokumen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Kabupaten Blora	
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah titik sampling pengujian kualitas udara	30 titik sampling	Terlaksananya sampling dan uji kualitas udara	30 titik sampling	53.750.000	PAD, DAU, DBH	50 Dokumen	100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Kabupaten Blora	
02	05	19	003	Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah laporan pengujian limbah padat dan limbah cair	1 Dokumen	Tersusunnya laporan pengujian limbah padat dan limbah cair	1 Dokumen	0	-	1 Dokumen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Kabupaten Blora	
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah titik sampling pengujian limbah padat/ limbah cair	50 titik sampling	Terlaksananya sampling dan uji kualitas limbah padat/limbah cair	50 titik sampling	40.000.000	PAD, DAU, DBH	100 Dokumen	100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Kabupaten Blora	
02	05	19	005	Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah peserta penyuluhan tentang pengendalian polusi dan pencemaran	50 Orang	Terlaksananya penyuluhan tentang pengendalian polusi dan pencemaran	50 Orang	50.000.000	PAD, DAU, DBH	100 Orang	200.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Kabupaten Blora	
02	05	19	007	Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi (DAK)	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah Instalasi Pengolahan Air Limbah Usaha Skala Kecil (IPAL USK) yang dibangun	10 Unit	Terbangunnya IPAL USK Tahu	10 Unit	150.000.000	DAK FISIK	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Kabupaten Blora	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	05	19	009	Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Bagi Masyarakat di Lingkungan Industri (DBHCHT)	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah pengujian kualitas udara di lingkungan industri	20 titik sampling	Terlaksananya sampling dan pengujian kualitas udara di lingkungan industri	20 titik sampling	0	-	20 titik sampling	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Kabupaten Blora	
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah peserta sosialisasi kepada masyarakat tentang sistem manajemen lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup	50 Orang	Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat tentang sistem manajemen lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup	50 Orang	250.000.000	DBHCHT	50 titik sampling	300.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Kabupaten Blora	
02	05	23		PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN										10.350.000.000			20.100.000.000				
02	05	23	001	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kinerja pengelolaan persampahan				Jumlah dokumen kebijakan dan pembinaan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	2 Dokumen	Tersusunnya kebijakan pengelolaan sampah	2 Dokumen	100.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Dokumen	100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3	Dinas Lingkungan Hidup	
02	05	23	002	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kinerja pengelolaan persampahan				Jumlah Truk Tinja	3 Unit	Terwujudnya Truk Tinja	0 Unit	0	-	1 Unit	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Dinas Lingkungan Hidup	
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kinerja pengelolaan persampahan				Jumlah Arm Roll	3 Unit	Terwujudnya Arm Roll	0 Unit	0	-	1 Unit	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Dinas Lingkungan Hidup	
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kinerja pengelolaan persampahan				Jumlah kendaraan pengangkut sampah roda tiga	5 Unit	Terwujudnya kendaraan pengangkut sampah roda tiga	5 Unit	0	-	10 Unit	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Dinas Lingkungan Hidup	
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kinerja pengelolaan persampahan				Jumlah operasional rutin dan suku cadang peralatan	2 Paket	Terlaksananya operasional rutin persampahan	2 Paket	0	-	2 Unit	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Dinas Lingkungan Hidup	
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kinerja pengelolaan persampahan				Jumlah prasarana sarana operasional pengelolaan persampahan	1 Unit	Terwujudnya sarana prasarana operasional persampahan	1 Unit	550.000.000	Dana Infrastruktur	8 Unit	1.700.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Dinas Lingkungan Hidup	
02	05	23	004	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kinerja pengelolaan persampahan				Persentase sarana prasarana persampahan dalam kondisi baik	100 %	Terwujudnya pemeliharaan sarana prasarana persampahan	100 %	0	-	100 %	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Dinas Lingkungan Hidup	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kinerja pengelolaan persampahan				Jumlah bulan layanan operasional persampahan	12 Bulan	Tercapainya pelayanan kebersihan kepada masyarakat	12 Bulan	1.700.000.000	Dana Infrastruktur	12 %	3.500.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Dinas Lingkungan Hidup	
02	05	23	005	Pengadaan Bak Kontainer Sampah	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kinerja pengelolaan persampahan				Jumlah bak kontainer	6 Unit	Terwujudnya bak kontainer sampah	6 Unit	200.000.000	Dana Infrastruktur	10 Unit	800.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Kabupaten Blora	
02	05	23	006	Pengadaan Landasan Bak Kontainer sampah	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kinerja pengelolaan persampahan				Jumlah fasilitas pembangunan landasan bak kontainer sampah	2 Lokasi	Terwujudnya landasan bak kontainer sampah	2 Lokasi	300.000.000	Dana Infrastruktur	10 Lokasi	1.000.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Kabupaten Blora	
02	05	23	007	Rehabilitasi Pagar TPA Blora	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kinerja pengelolaan persampahan	TPA Blora			panjang pagar TPA Blora yang direhabilitasi	150 m	Terwujudnya rehabilitasi pagar TPA Blora	150 m	300.000.000	Dana Infrastruktur	800 m	500.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	TPA Blora	
02	05	23	024	Pembangunan Pagar TPA Cepu	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kinerja pengelolaan persampahan	TPA Cepu			Panjang pagar TPA Cepu yang dibangun	200 m	Terbangunnya pagar TPA Cepu	200 m	400.000.000	Dana Infrastruktur	800 m	500.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	TPA Cepu	
02	05	23	040	Peningkatan Pengelolaan Persampahan dan TPA	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kinerja pengelolaan persampahan	TPA Blora dan TPA Cepu			Jumlah kegiatan peningkatan pengelolaan persampahan TPA (controlled landfill/sanitary landfill)	2 Lokasi	Terwujudnya peningkatan pengelolaan persampahan TPA Blora dan TPA Cepu menuju sanitary landfill	2 Lokasi	1.200.000.000	Dana Infrastruktur	2 Lokasi	2.700.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	TPA Blora dan TPA Cepu	
02	05	23	043	Pengadaan Tanah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Blora dan Cepu	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kinerja pengelolaan persampahan				Jumlah lokasi pengadaan tanah TPA di Kabupaten Blora	1 Lokasi	Tersedianya penambahan luasan tanah TPA	1 Lokasi	600.000.000	Dana Infrastruktur	1 Lokasi	3.000.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Kabupaten Blora	
02	05	23	050	Pembangunan Drainase TPA	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kinerja pengelolaan persampahan				panjang drainase yang terbangun	100 m	Terbangunnya drainase TPA	100 m	200.000.000	Dana Infrastruktur	200 m	500.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3	Kabupaten Blora	
02	05	23	053	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (DAK)	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kinerja pengelolaan persampahan				Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	8 Unit	Terwujudnya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	8 Unit	4.000.000.000	DAK FISIK	10 Unit	5.000.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3	Kabupaten Blora	
02	05	23	054	Pengolahan Sampah (DAK)	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kinerja pengelolaan persampahan				Jumlah rumah pengomposan	2 Unit	Terwujudnya rumah pengomposan	2 Unit	600.000.000	DAK FISIK	2 Unit	600.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3	Kabupaten Blora	
02	05	23	055	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan (BANPROV)	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kinerja pengelolaan persampahan				Jumlah Alat Pengangkut Sampah Roda 3	4 Unit	Terwujudnya alat pengangkut sampah roda 3	4 Unit	200.000.000	BANKEU PROV	4 Unit	200.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3	Kabupaten Blora	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																	
02	05			LINGKUNGAN HIDUP																	
02	05	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	1 Tahun					0			0				
02	05	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat	100 %	Terkirimnya surat-surat dinas	100 %	10.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	15.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Dinas Lingkungan Hidup	
02	05	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	100 %	Terwujudnya kelancaran komunikasi, kebutuhan air dan listrik perkantoran	100 %	150.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	175.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Dinas Lingkungan Hidup	
02	05	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100 %	Terwujudnya kelancaran kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	100 %	75.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Kabupaten Blora	
02	05	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan	100 %	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan	100 %	180.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	200.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Dinas Lingkungan Hidup	
02	05	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor	100 %	Tercapainnya lingkungan kerja yang bersih, sehat dan nyaman	100 %	70.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Dinas Lingkungan Hidup	
02	05	01	009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja	100 %	Tersedianya peralatan perlengkapan kerja yang memadai	100 %	50.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	50.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	10 Jenis	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	05	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	100 %	Terwujudnya kelancaran kegiatan administrasi perkantoran	100 %	75.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Dinas Lingkungan Hidup	
02	05	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100 %	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan cetak dan penggandaan	100 %	25.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	30.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Dinas Lingkungan Hidup	
02	05	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	Terwujudnya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor	100 %	20.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	30.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Dinas Lingkungan Hidup	
02	05	01	013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	140.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	137.500.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Kabupaten Blora	
02	05	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	Terwujudnya peningkatan sumber daya aparatur	100 %	10.000.000	PAD, DAU, DBH	6 Jenis	10.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Dinas Lingkungan Hidup	
02	05	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat	100 %	Terwujudnya kebutuhan makanan dan minuman	100 %	80.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Dinas Lingkungan Hidup	
02	05	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	100 %	200.105.000	PAD, DAU, DBH	100 %	225.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Dinas Lingkungan Hidup	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	05	01	019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	100 %	75.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	85.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Dinas Lingkungan Hidup	
02	05	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%					0			0				
02	05	02	005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	7 Unit	Terwujudnya kendaraan dinas operasional	7 Unit	145.000.000	PAD, DAU, DBH	10 Unit	200.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Dinas Lingkungan Hidup	
02	05	02	010	Pengadaan mebeler	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan mebeler	100 %	Tersedianya mebeler untuk menunjang kegiatan perkantoran	100 %	75.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	110.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Dinas Lingkungan Hidup	
02	05	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Terwujudnya gedung kantor yang layak dan memadai	100 %	65.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	100.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Dinas Lingkungan Hidup	
02	05	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	100 %	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional roda 4 dan roda 2	100 %	130.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	170.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Dinas Lingkungan Hidup	
02	05	02	026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Terwujudnya perlengkapan gedung kantor yang memadai	100 %	60.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	150.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Dinas Lingkungan Hidup	
02	05	02	028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Terwujudnya peralatan gedung kantor yang memadai	100 %	40.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	110.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Dinas Lingkungan Hidup	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	05	02	029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeler	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase mebeler dalam kondisi baik	100 %	Terwujudnya fasilitas/ sarana prasarana kerja yang memadai	100 %	49.750.000	PAD, DAU, DBH	100 %	200.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Dinas Lingkungan Hidup	
02	05	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				Pemenuhan kebutuhan pakaian seragam dinas	162					0			0				
02	05	03	005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi				Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	160 Paket	Terwujudnya pakaian khusus hari-hari tertentu	160 Paket	160.000.000	PAD, DAU, DBH	160 Paket	250.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Dinas Lingkungan Hidup	
02	05	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				Peningkatan kapasitas SDM aparatur	5 orang					0			0				
02	05	05	001	Pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal	5 Orang	Terwujudnya peningkatan kapasitas ASN	5 Orang	50.000.000	PAD, DAU, DBH	5 Orang	55.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Dinas Lingkungan Hidup	
02	05	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				Nilai Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	B					0			0				
								Pemenuhan kebutuhan pelaporan kinerja dan keuangan	100%												
02	05	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 Laporan	Tersusunya dokumen LRA dan capaian kinerja	6 Laporan	4.000.000	PAD, DAU, DBH	6 Laporan	5.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1		
02	05	06	002	Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah laporan keuangan semesteran	2 Laporan	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	2 Laporan	4.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Laporan	5.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Dinas Lingkungan Hidup	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	05	06	004	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah laporan keuangan akhir tahun	6 Laporan	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	6 Laporan	4.000.000	PAD, DAU, DBH	6 Laporan	5.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1		
02	05	06	005	Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah rencana kinerja dan penetapan kinerja	4 Dokumen	Tersusunnya dokumen renja, penetapan kinerja dan LKjIP	4 Dokumen	4.000.000	PAD, DAU, DBH	4 Dokumen	5.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1		
02	05	06	006	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah laporan akuntabilitas kinerja SKPD	8 Laporan	Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja	8 Laporan	4.000.000	PAD, DAU, DBH	8 Laporan	10.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Dinas Lingkungan Hidup	
02	05	06	007	Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah dokumen RKA-SKPD dan DPA SKPD	8 Dokumen	Terwujudnya dokumen RKA-OPD dan DPA-OPD	8 Dokumen	4.000.000	PAD, DAU, DBH	8 Dokumen	10.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Dinas Lingkungan Hidup	
TOTAL														16.337.605.000			33.017.500.000				

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KABUPATEN BLORA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																	
02	06			ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																	
02	06	15		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				Kepemilikan KTP	100%					4.046.405.500			5.663.012.000				
								Rasio pasangan berakte nikah	100%												
								Kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun	100%												
								Rasio bayi berakte kelahiran	99%												
02	06	15	003	Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil				Jumlah lokasi sistem administrasi kependudukan yang dipelihara dengan baik	17 Lokasi	Jumlah pemeliharaan tower, maintenance komputer, suku cadang komputer dinas dan 16 kecamatan, sewa tanah di kembang bogorejo untuk 10 tahun, relokasi tower 3 titik, jaringan internet, honorarium harlep 4 orang	100 %	407.748.000	PAD, DAU, DBH	17 Lokasi	565.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	dindukcapil dan 16 kecamatan	
02	06	15	006	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil				Jumlah buku profil/induk penduduk	693 Buku	Jumlah belanja cetak BIP 339.500 lembar, penjilidan BIP 323 buku, cetak buku profil kependudukan 370 buku	100 %	174.407.500	PAD, DAU, DBH	693 Buku	180.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	Masyarakat	
02	06	15	007	Penyediaan informasi dapat diakses masyarakat	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil				Jumlah buku arsip catatan sipil yang terpelihara dengan baik	3200 Buku	Jumlah penjilidan berkas dan register akta capil, fumigasi arsip, digitalisasi arsip pencatatan sipil, dan honorarium harlep 2 orang	100 %	159.004.000	PAD, DAU, DBH	3200 Buku	336.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	Masyarakat	
02	06	15	008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil				Jumlah lembar blanko catatan sipil yang disediakan	2000 lembar	Jumlah pengadaan blangko security printing akta capil	12 Bulan	100.000.000	PAD, DAU, DBH	100000 lembar	500.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	Masyarakat	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	06	15	009	Pengembangan database kependudukan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil				Jumlah rekaman pemutakhiran database kependudukan	22500 record	Jumlah entry data kematian, entry data perkawinan, entry sampah/ganda, aplikasi pendaftaran penduduk online, aplikasi digitalisasi berkas dafduk, aplikasi register desa online	100 %	172.500.000	PAD, DAU, DBH	22500 record	172.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	Masyarakat	
02	06	15	011	Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil				Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	420 Orang	Jumlah operator bintek operator pelayanan adminduk dan capil	100 %	150.000.000	PAD, DAU, DBH	420 Orang	350.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	Aparatur dindukcapil	
02	06	15	012	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil				Persentase pemenuhan kebutuhan media sosialisasi kebijakan kependudukan	100 %	Jumlah iklan layanan, leaflet 5000 lembar, cetak buku saku informasi layanan kependudukan 370	100 %	33.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	125.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	Dindukcapil	
02	06	15	019	Pelaksanaan Program KTP Elektronik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil				Jumlah KTP el yang dicetak	25000 keping	Jumlah pelayanan KTP-el (perekaman, cetak KTP-el dan pelayanan door to door), lembur perekaman dan cetak KTP-el. honorarium harlep 3 orang	100 %	192.300.000	PAD, DAU, DBH	25000 keping	200.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	Masyarakat	
02	06	15	020	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil				Jumlah layanan pendaftaran penduduk yang diproses	20000 Berkas	Cetak KIA 20.000 keping	100 %	536.934.000	PAD, DAU, DBH	20000 Berkas	500.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	Masyarakat	
02	06	15	021	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil				Jumlah akte catatan sipil yang diterbitkan	25000 akte	Jumlah akta catatan sipil yang diterbitkan	100 %	236.000.000	PAD, DAU, DBH	25000 akte	850.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	Masyarakat	
02	06	15	022	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil				Persentase pemenuhan pelaksanaan pengembangan SAK Terpadu	100 %	Jumlah sosialisasi kebijakan dukcapil 6 kali, pelayanan keliling pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 75 kali, pembentukan tim lintas sektor 2 tim, penyediaan petugas pelayanan 1 orang, pengadaan ribbon, film printer, cleaning kit untuk cetak ktp-el	100 %	1.884.512.000	DAK NON FISIK	100 %	1.884.512.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	Aparatur masyarakat, dindukcapil	
02				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																	
02	06			ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	06	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%					0			0				
02	06	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat	100 %	Terkirimnya surat dinas	12 Bulan	6.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	6.330.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	Dindukcapil	
02	06	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	100 %	Terbayarnya rekening air, telepon, internet dan listrik	12 Bulan	228.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	285.840.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	Dindukcapil	
02	06	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100 %	Terbayarnya tagihan pajak kendaraan dinas/operasional 5 mobil dan 34 motor	12 Bulan	13.360.000	PAD, DAU, DBH	100 %	17.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	Dindukcapil	
02	06	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan	100 %	Terbayarnya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	136.125.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	150.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	Dindukcapil	
02	06	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor	100 %	Terbayarnya belanja alat-alat kebersihan kantor dan honorarium penjaga kebersihan	12 Bulan	61.200.000	PAD, DAU, DBH	100 %	65.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	Dindukcapil	
02	06	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	100 %	5 panel color ribbon YMCKO (R5FPOO308) 80 unit, CEANING KIT (ck P0308) 9 unit	12 Bulan	109.130.000	PAD, DAU, DBH	12 %	109.130.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	Dindukcapil	
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	100 %	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	150.738.500	PAD, DAU, DBH	100 %	160.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	Dindukcapil	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	06	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100 %	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 7 jenis	12 Bulan	25.039.000	PAD, DAU, DBH	100 %	29.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	Dindukcapil	
02	06	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	20.900.000	PAD, DAU, DBH	100 %	23.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	Dindukcapil	
02	06	01	013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	DINDUKCAPIL			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	10.000.000	PAD, DAU, DBH	6 Jenis	15.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	Dindukcapil	
02	06	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	Terbayarnya langganan bahan bacaan dan surat kabar kantor	12 Bulan	5.300.000	PAD, DAU, DBH	100 %	7.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	Dindukcapil	
02	06	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat	100 %	Terbayarnya makan dan minuman pegawai rapat dan tamu	12 Bulan	39.194.000	PAD, DAU, DBH	100 %	42.040.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	Dindukcapil	
02	06	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	121.100.000	PAD, DAU, DBH	63 Kali	169.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	Dindukcapil	
02	06	01	019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Terlaksananya rapat/koordinasi/konsultasi/monitoring, kurir surat dalam daerah	12 Bulan	39.590.000	PAD, DAU, DBH	100 %	49.235.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	Dindukcapil	
02	06	01	020	Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan dukungan pelayanan perkantoran	100 %	Terbayarnya honorarium Tenaga sopir, keamanan, dan front office	12 Bulan	59.308.000	PAD, DAU, DBH	100 %	67.600.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	Dindukcapil	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan									
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	06	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%					0			0				
02	06	02	007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan perlengkapan gedung kantor	100 %	Terbayarnya pengadaan perlengkapan gedung kantor : pengadaan rak baja untuk arsip 4 buah, genset, tenda 2 buah	12 Bulan	178.400.000	PAD, DAU, DBH	100 %	200.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	dindukcapil	
02	06	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	DINDUKCAPIL			Persentase pemenuhan peralatan gedung kantor	100 %	Tersedianya Pengadaan Peralatan gedung kantor : Printer KTP-el 7 buah, Singnature pad 1 buah, finger scanner 1 buah, iris mata 1 buah, kamera 1 buah, cardreader 1 buah	12 Bulan	290.870.000	PAD, DAU, DBH	100 %	290.870.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	Dindukcapil	
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan peralatan gedung kantor	100 %	Terbayarnya pengadaan peralatan gedung kantor : Pengadaan printer dotmetrik 1 buah, pengadaan laptop ADB 1 unit, printer laserjet pelayanan dinas 6 buah,	12 Bulan	97.975.000	PAD, DAU, DBH	100 %	500.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	Dindukcapil	
02	06	02	010	Pengadaan mebeler	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan mebeler	100 %	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai : meja dan kursi kerja	12 Bulan	8.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	Dindukcapil	
02	06	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	100 %	150.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	150.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	Dindukcapil	
02	06	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	100 %	Terbayarnya perawatan kendaraan dinas/operasional yang baik dan layak pakai : 5 mobil	12 Bulan	125.378.000	PAD, DAU, DBH	100 %	164.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	Dindukcapil	
02	06	02	026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Terbayarnya jasa pemeliharaan perlengkapan gedung kantor : pencuci gorden, penggantian kunci pintu dan jendela, AC, cctv, genset, soud system, pompa air	12 Bulan	19.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	22.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	Dindukcapil	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan									
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	06	02	028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Terbayarnya perawatan peralatan gedung kantor : servis AC, servis komputer, servis printer	12 Bulan	23.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	25.800.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	Dindukcapil	
02	06	02	029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeler	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase mebeler dalam kondisi baik	100 %	Terbayarnya perawatan mebeler	12 Bulan	17.500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	17.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	Dindukcapil	
02	06	02	030	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Terpeliharanya plafon, railling tangga ruang perkawinan	161.85 m2	150.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	150.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1		
02	06	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				Pemenuhan kebutuhan pakaian seragam dinas	100%					0			0				
02	06	03	005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi				Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	93 Unit	Terbayarnya pengadaan pakaian olahraga dan seragam front office	12 Bulan	27.900.000	PAD, DAU, DBH	93 Orang	27.900.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	Dindukcapil	
02	06	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				Pemenuhan kebutuhan pelaporan kinerja dan keuangan	100					0			0				
02	06	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Laporan	terbayarnya laporan capaian kinerja keuangan dan kegiatan, honorarium tenaga administrasi perkantoran	12 Bulan	29.404.000	PAD, DAU, DBH	4 Laporan	32.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	Dindukcapil	
02	06	06	002	Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah laporan keuangan semesteran	1 Laporan	Tersusunnya laporan keuangan semesteran SKPD	12 Bulan	6.648.000	PAD, DAU, DBH	1 Laporan	6.648.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	Dindukcapil	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	06	06	004	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	100 %	6.648.000	PAD, DAU, DBH	1 Laporan	6.648.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	Dindukcapil	
02	06	06	005	Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah rencana kinerja dan penetapan kinerja	7 Dokumen	Tersusunnya renja dan perjanjian kinerja	100 %	6.860.000	PAD, DAU, DBH	7 Dokumen	6.860.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	Dindukcapil	
02	06	06	006	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah laporan akuntabilitas kinerja SKPD	6 Laporan	Tersusunnya Laporan akuntabilitas kinerja SKPD	100 %	6.648.000	PAD, DAU, DBH	6 Laporan	6.648.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	Dindukcapil	
02	06	06	007	Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah dokumen RKA-SKPD dan DPA SKPD	4 Dokumen	Tersusunnya RKA-SKPD dan DPA-SKPD	100 %	6.860.000	PAD, DAU, DBH	4 Dokumen	6.860.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	dindukcapil	
TOTAL														6.222.481.000			8.502.421.000				

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KABUPATEN BLORA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																	
02	07			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																	
02	07	15		PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN				Jumlah Posyantek Aktif	1 Unit					2.226.910.000			1.520.000.000				
02	07	15	001	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	-	Kab. Blora			Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat pedesaaan yang diberdayakan	28 Organisasi	Terlaksananya rakor tenaga pendamping profesional (P3MD), rakor, pembinaan dan pelatihan eks.PNPM Mandiri, monitoring dan evaluasi keberdayaan kelembagaan dan organisasi masyarakat perdesaan	28 Organisasi	112.000.000	PAD, DAU, DBH	28 Organisasi	500.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	Masyarakat Desa	
02	07	15	002	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	-	Kab. Blora			Jumlah peserta pelatihan MIS bagi desa pamsimas	30 Orang	Terlaksananya pelatihan Management Informasi Sistem (MIS) bagi desa pamsimas	30 Orang	20.000.000	PAD, DAU, DBH	30 Orang	65.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	KP-SPAMS dan KPM	
					Percepatan Pengentasan Kemiskinan	-	Kab. Blora			Jumlah peserta pelatihan penguatan kelembagaan KPSPAM desa	127 Orang	Terlaksananya pemberdaaan masyarakat pasca konstruksi, memfasilitasi asosiasi KP-SPAM dan kader KP-SPAM desa serta diklat kader pemberdayaan masyarakat	127 Orang	86.600.000	PAD, DAU, DBH	127 Orang	330.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	KP-SPAMS dan KPM	
02	07	15	003	Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	-	Kab. Blora			Jumlah pameran dan gelar TTG Nasional dan PIN yang diikuti	3 Kali	Terlaksananya rakor pelaksanaan/tinjauan gelar TTG, PIN, PPD Nasional dan sosialisasi posyantek	3 Kali	81.000.000	PAD, DAU, DBH	3 Kali	250.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	Inventor dan Posyantek	
02	07	15	005	Sosialisasi Teknologi Tepat Guna dan Posyantek	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	-	Kab. Blora			Jumlah peserta sosialisasi TTG dan Posyantek antar desa	180 Orang	Terlaksananya sosialisasi TTG dan posyantek guna pemberdayaan masyarakat di Kab. Blora	180 Orang	13.210.000	PAD, DAU, DBH	240 Orang	125.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	Masyarakat dan calon pengurus	
02	07	15	006	Penguatan Pos Pelayanan Teknologi	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	-	Kab. Blora			Jumlah peserta yang mendapatkan fasilitasi penguatan posyantekdes	180 Orang	Terlaksananya sosialisasi wartek pada posyantekdes	180 Orang	17.430.000	PAD, DAU, DBH	240 Orang	250.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	Masyarakat dan calon pengurus	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	07	15	007	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	-				Jumlah desa yang menerima kegiatan TMMD (APBD Kabupaten)	12 Desa	terlaksanany kegiatan TMMD	12 Desa	1.193.975.000	PAD, DAU, DBH	12 Desa	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	Masyarakat Kab Blora	
					Percepatan Pengentasan Kemiskinan	-				Jumlah desa yang menerima kegiatan TMMD (APBD Provinsi)	12 Desa	Terlaksananya kegiatan TMMD di 12 desa	12 Desa	561.600.000	BANKEU PROV	0 Desa	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	Masyarakat Kab Blora	
02	07	15	008	Pemberian stimulan pembangunan desa	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	-				Jumlah desa yang menerima bantuan keuangan, DD, ADD, BHPR	271 Desa	Terlaksananya bantuan keuangan, DD,ADD,BHPRD	271 Desa	120.335.000	PAD, DAU, DBH	Desa	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	Masyarakat kab Blora	
02	07	15	009	Pendampingan KPMD	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	-				Jumlah desa yang didampingi KPMD	271 Desa	Terlaksananya pendampingan KPMD di desa	271 Desa	5.760.000	PAD, DAU, DBH	Desa	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	Masyarakat kab Blora	
02	07	15	010	Rintisan desa berdikari	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	-				Jumlah desa yang menerima bantuan keuagan rintisan desa berdikari	10 Desa	Terlaksananya desa berdikari di 10 desa	10 Desa	15.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Desa	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	Masyarakat Kab Blora	
02	07	16		PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN				Jumlah BUMDes	151					200.000.000			950.000.000				
02	07	16	002	Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa	Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran desa, dan kualitas pengelolaan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Kab. Blora			Jumlah BUMDes yang mendapatkan pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik desa	145 BUMDes	Penguatan kelembagaan BUMDes dan BUMDes Bersama melalui rakor dan pelatihan, pembinaan, monitoring dan evaluasi	145 BUMDes	170.000.000	PAD, DAU, DBH	190 BUMDes	650.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	Kelompok BUMDes	
02	07	16	008	Fasilitasi pembentukan BUMDes Bersama	Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran desa, dan kualitas pengelolaan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Kab. Blora			Jumlah BUMDes Bersama yang mengikuti pelatihan	6 BUMDes	Terbentuknya BUMDes Bersama	6 BUMDes	30.000.000	PAD, DAU, DBH	15 BUMDes	300.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3	Kelompok BUMDes Bersama	
02	07	18		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA				Persentase aparatur desa/ kelurahan telah dilatih manajemen pengelolaan desa/kelurahan	100 %					276.360.000			520.000.000				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	07	18	001	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan pedesaan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran desa, dan kualitas pengelolaan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Kab. Blora			Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan pembekalan aparatur desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan	813 Orang	Terselenggaranya bintek aparatur perencanaan kawasan pembangunan desa (RKPDesa)	813 Orang	78.960.000	PAD, DAU, DBH	813 Orang	170.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	Aparatur pemerintah desa	
02	07	18	002	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran desa, dan kualitas pengelolaan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Kab. Blora			Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	271 Orang	Meningkatnya kemampuan aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa	271 Orang	126.000.000	PAD, DAU, DBH	271 Orang	230.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	Aparatur pemerintah desa	
02	07	18	003	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran desa, dan kualitas pengelolaan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Kab. Blora			Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa	542 Orang	Meningkatnya kapasitas pemerintah desa dalam bidang penyusunan anggaran desa (APBDes)	542 Orang	71.400.000	PAD, DAU, DBH	542 Orang	120.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	Aparatur pemerintah desa	
02	07	19		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN				Posyandu Aktif	100 %					1.060.775.000			1.343.175.000				
								Jumlah usaha ekonomi produktif perempuan yang terlatih	80 kelompok												
02	07	19	001	Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Kab. Blora			Jumlah usaha ekonomi produktif perempuan yang terlatif	80 Orang	Meningkatnya kualitas SDM Perempuan pedesaan, tercapainya lapangan pekerjaan baru bagi perempuan pedesaan	80 Orang	110.775.000	PAD, DAU, DBH	85 Orang	363.175.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	Perempuan pedesaan	
02	07	19	002	Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Kab. Blora			Persentase PKK yang mendapatkan pembinaan	100 %	Peningkatan kapasitas PKK	100 %	800.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	850.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	.PKK Kabupaten PKK Kecamatan dan PKK Desa	
02	07	19	003	Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengembangan Posyandu	Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Kab. Blora			Jumlah posyandu yang terintegrasi	318 Posyandu	Meningkatnya SDM Posyandu, terlaksananya revitalisasi posyandu, terpilihnya pelaksana terbaik posyandu pedesaan.	318 Posyandu	150.000.000	PAD, DAU, DBH	324 pelaku usaha	130.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	Perempuan di pedesaan	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	07	20		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, ADAT DAN SOSIAL BUDAYA				Persentase desa/kelurahan memiliki profil desa/kelurahan	100 %					128.800.000			400.000.000				
02	07	20	001	Pendayagunaan profil desa dan evaluasi pemberdayaan masyarakat desa	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	-	Kab. Blora			Jumlah desa/kelurahan yang memiliki profil desa/kelurahan	295 Desa/Kelurahan	Terdatanya potensi dan perkembangan desa. Terpilihnya pemenang lomba desa.	295 Desa/Kelurahan	99.000.000	PAD, DAU, DBH	295 Desa/Kelurahan	200.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	Aparat Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa	
02	07	20	002	Pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, adat dan sosial budaya	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	-	Kab. Blora			Jumlah desa adat yang mendapatkan pembinaan	16 Desa	Mengenalkan kegiatan kelompok adat pada masyarakat	16 Desa	29.800.000	PAD, DAU, DBH	16 Desa	200.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	Satgas Pelestarian dan pengembangan adat	
02				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																	
02	07			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																	
02	07	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%					0			0				
02	07	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Blora, Jl. Gor Mustika No. 8 Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat	100 %	Tersedianya kebutuhan surat menyurat.	100 %	14.045.000	PAD, DAU, DBH	100 %	20.175.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	Dinas PMD Kab. Blora	
02	07	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	DINAS PMD KAB. BLORA			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	100 %	tersedianya fasilitas jaringan rekening listrik , air , telepon , internet, Fax, radio spot yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	87.668.000	PAD, DAU, DBH	100 %	150.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	Dinas PMD kab. Blora	
02	07	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	DINAS PMD KAB. BLORA			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100 %	tersedianya kendaraan dinas yang tertib pajak guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	20.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	35.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	Dinas PMD kab. Blora	
02	07	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	DINAS PMD KAB. BLORA			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan	100 %	meningkatnya kinerja pengelola keuangan kantor	100 %	105.400.000	PAD, DAU, DBH	100 %	120.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	Dinas PMD kab. Blora	
02	07	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	DINAS PMD KAB. BLORA			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor	100 %	Prosentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor	100 %	39.700.000	PAD, DAU, DBH	100 %	66.350.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	07	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	DINAS PMD KAB. BLORA			Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	52 %	Prosentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor	100 %	60.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	85.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	Dinas PMD Kab. Blora	
02	07	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	DINAS PMD KAB. BLORA			Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100 %	Prosentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100 %	30.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	35.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	Dinas PMD Kab. Blora	
02	07	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	DINAS PMD KAB. BLORA			Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	Prosentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	100 %	25.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	35.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	Dinas PMD Kab. Blora	
02	07	01	013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas PMD Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	Pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor (belanja modal, almari, komputer PC, laptop, printer, UPS, meja kerja, meja rapat, kursi kerja, kursi rapat, kamera dan soundsistem)	100 %	190.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	200.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	Dinas PMD Kab. Blora	
02	07	01	014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas PMD Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga	100 %	Persentasi pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga	100 %	35.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	75.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
02	07	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas PMD Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	7.500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	10.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
02	07	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas PMD Kab.Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat1	100 %	30.950.000	PAD, DAU, DBH	100 %	50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
02	07	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas PMD Kab. Blora			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	130.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	250.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
02	07	01	019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas PMD Kab. Blora			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	130.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	130.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	07	01	020	Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Persentase pemenuhan dukungan pelayanan perkantoran	100 %	Persentase pemenuhan dukungan pelayanan perkantoran	100 %	20.500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
02	07	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	1 unit					0			0				
02	07	02	005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas PMD Kab. Blora			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	2 Unit	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1 Unit	46.000.000	PAD, DAU, DBH	3 Unit	100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	Dinas PMD Kab. Blora	
02	07	02	007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas PMD Kab. Blora			Persentase pemenuhan perlengkapan gedung kantor	100 %	Persentase pemenuhan perlengkapan gedung kantor	100 %	150.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	200.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
02	07	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas PMD Kab. Blora			Persentase pemenuhan peralatan gedung kantor	100 %	Persentase pemenuhan peralatan gedung kantor	100 %	50.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
02	07	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas PMD Kab. Blora			Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	100 Bulan	50.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
02	07	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas PMD Kab. Blora			Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	100 %	Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	100 %	190.067.000	PAD, DAU, DBH	100 %	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
02	07	02	028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas PMD Kab. Blora			Persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 Jenis	30.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	30.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
02	07	02	045	Rehabilitasi sedang/berat bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas PMD Kab. Blora			Persentase bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Persentase bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	50.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	90.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
02	07	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR										0			0				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	07	03	005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi	Dinas PMD Kab. Blora			Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	35 Unit	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	35 Unit	50.000.000	PAD, DAU, DBH	35 Unit	75.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
02	07	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR										0			0				
02	07	05	001	Pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas PMD Kab. Blora			Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal	2 Orang	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal	2 Orang	5.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Orang	15.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
02	07	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										0			0				
02	07	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas PMD Kab. Blora			Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7 Laporan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7 Laporan	28.575.000	PAD, DAU, DBH	7 Laporan	36.750.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
02	07	06	005	Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas PMD Kab. Blora			Jumlah rencana kinerja dan penetapan kinerja	3 Dokumen	Jumlah rencana kinerja dan penetapan kinerja	3 Dokumen	39.350.000	PAD, DAU, DBH	3 Dokumen	24.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
TOTAL														5.507.600.000			6.815.450.000				

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KABUPATEN BLORA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan									
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																	
02	08			PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																	
02	08	15		PROGRAM KELUARGA BERENCANA				Cakupan peserta KB Aktif	69					8.822.390.000			8.367.040.000				
02	08	15	001	Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	Dinas Dalduk dan KB			Jumlah peserta KB dari masyarakat miskin yang tidak masuk daftar JKN yang dilayani	1370 Orang	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pelayanan dari akseptor KB keluarga pra sejahtera	1370 Orang	600.000.000	PAD, DAU, DBH	1500 Orang	668.600.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	Aparatur dan Akseptor	
02	08	15	002	Pelayanan KIE	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	Dinas Dalduk dan KB			Jumlah peserta seminar kesehatan reproduksi wanita dan promosi konseling kesehatan reproduksi dalam KKBPK	300 Orang	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) program Kesehatan Reprosuksi melalui seminar kesehatan reproduksi bagi organisasi wanita, tersebarnya pelayanan KIE program KB bagi Wanita Pedesaan	300 Orang	70.000.000	PAD, DAU, DBH	350 Orang	350.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	Mitra dan pelaksana program KB	
02	08	15	004	Promosi pelayanan KHIBA	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	Dinas Dalduk dan KB			Jumlah kader yang mendapatkan pembinaan KHIBA	200 Orang	Meningkatnya pengetahuan PUS dan Remaja tentang kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak (KHIBA) dan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)	200 Orang	70.000.000	PAD, DAU, DBH	300 Orang	200.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	Pasangan Usia Subur	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan									
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	08	15	005	Pembinaan keluarga berencana	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	Dinas Dalduk dan KB			Jumlah kegiatan pembinaan keluarga berencana	4 Keg	Terlaksananya Rakerda, Lomba Program Kependudukan, Rakor KB, Pelatihan Petugas RR	4 Keg	108.000.000	PAD, DAU, DBH	5 Keg	300.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	Pengelola Program KB di Tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kel, Mitra kerja, siswa, Mahasiswa	
02	08	15	007	Kegiatan DAK bidang keluarga berencana	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	16 Balai Penyuluh KB			Jumlah sarana prasarana operasional KB di lapangan	7 Jenis	Meningkatnya sarana prasarana Operasional KB di lapangan : Almari alokon, Mobil Mupen, Sepeda Motor, Laptop, Komputer, Pengembangan Balai, BKB Kit Stunting	7 Jenis	2.383.350.000	DAK FISIK	4 Jenis	1.000.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	Gedung Balai Penyuluhan KB Kecamatan	
02	08	15	008	Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola Program KKBPK	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	Dinas Dalduk dan KB			Jumlah peserta seminar bagi pengelola KKBPK dan tenaga kontrak PLKB	175 Orang	Meningkatnya kualitas SDM bagi pengelola Program KKBPK (PKB/ Kader KB) dan honorarium tenaga kontrak PLKB	175 Orang	447.600.000	PAD, DAU, DBH	175 Orang	600.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	Pengelola Program KKBPK	
02	08	15	009	Pelayanan Konseling KB	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	Dinas Dalduk dan KB			Jumlah peserta kegiatan pelayanan dan konseling KB melalui momen kegiatan dengan mitra kerja	1000 Orang	Terlayaninya calon akseptor KB dan Konseling KB	1000 Orang	180.000.000	PAD, DAU, DBH	1000 Orang	285.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	PKK, Muslimat, Aisyiyah, Bhayangkara dan TNI	
02	08	15	010	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	Dinas Dalduk dan KB			Jumlah kebutuhan operasional kegiatan di balai penyuluhan KB, distribusi alokon, integrasi program KKBPK dan program pembinaan lainnya di Kampung KB	16 Kec	Tercukupinya kebutuhan pelaksanaan kegiatan di balai penyuluhan KB, distribusi alkon ke faskes KB dan integrasi program KKBPK	16 Kec	4.963.440.000	DAK NON FISIK	16 Kec	4.963.440.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	16 Balai Penyuluh KB dan 43 Faskes KB	
02	08	16		PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA										1.320.000.000			1.930.000.000				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan									
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	08	16	001	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	Dinas Dalduk dan KB			Jumlah kegiatan publikasi program KKB dan penyuluhan	9 Jenis	Terlaksananya advokasi dan KIE secara aktual dan tepat sasaran seperti Publikasi Radio, Liputan Media Cetak, Editting liputan/shotting, pameran pentas seni dalam peringatan hari jadi	9 Jenis	100.000.000	PAD, DAU, DBH	9 Jenis	220.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	Guru dan Masyarakat Umum	
02	08	16	002	Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	Dinas Daduk dan KB			Jumlah kader yang mendapatkan pembinaan	370 Orang	Meningkatnya partisipasi kader terhadap program KB dan Reward untuk Kader PPKBD	370 Orang	910.000.000	PAD, DAU, DBH	370 Orang	1.000.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	PPKBD sekabupaten blora dan kader KB	
02	08	16	003	Orientasi program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	Dinas Dalduk dan B			Jumlah peserta sosialisasi penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja	150 Orang	meningkatnya pengetahuan kelompok remaja tentang pentingnya penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja	150 Orang	45.000.000	PAD, DAU, DBH	300 Orang	190.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	Remaja dan masyarakat pedesaan	
02	08	16	004	Orientasi Program KKBPK di Tingkat Lini Lapangan	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	Dinas Dalduk dan KB			Jumlah peserta sosialisasi program KKBPK kepada toga dan tomas di 16 kecamatan	275 Orang	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman toma/toga/lsm tentang KKBPK	275 Orang	100.000.000	PAD, DAU, DBH	500 Orang	160.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	Toga/ toma/ LSM di kabupaten blora	
02	08	16	005	Fasilitasi forum pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	Dinas Dalduk dan KB			Jumlah orang yang mengikuti kegiatan seleksi pemilihan Duta Genre dan jumlah monitoring PIK	150 Orang	Tersosialisasinya Program Genre melalui kelompok PIK R/M	150 Orang	100.000.000	PAD, DAU, DBH	300 Orang	170.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	Remaja anggota kelompok PIK R/ M di kabupaten blora	
02	08	16	006	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	Dinas Dalduk dan KB			Jumlah peserta penyuluhan bahaya narkoba dan HIV/AIDS	500 Orang	Meningkatnya pengetahuan pelajar tetang bahaya narkoba, seks bebas dan penyakit menular seksual	500 Orang	65.000.000	PAD, DAU, DBH	1000 Orang	190.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	Pelajar 12 sekolah di 12 kecamatan	
02	08	18		PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI				Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	76					350.000.000			1.100.000.000				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan									
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	08	18	001	Fasilitasi pembentukan kelompok peduli masyarakat peduli KB	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	Dinas Dalduk dan KB			Jumlah kelompok masyarakat peduli KB	6 Kelompok	Meningkatnya jumlah anggota kelompok kegiatan masyarakat peduli KB	6 Kelompok	95.000.000	PAD, DAU, DBH	6 Kelompok	325.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	Peserta KB dan calon akseptor KB	
02	08	18	002	Fasilitasi Forum Komunikasi bagi Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	Dinas Dalduk dan KB			Jumlah peserta sosialisasi program kependudukan keluarga berencana	420 Orang	Terlaksananya Lomba Kader PPKBD dalam rangka mendukung program KKBPK	420 Orang	130.000.000	PAD, DAU, DBH	420 Orang	475.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	Instuti masyarakat pedesaan (IMP)/ PPKBD	
02	08	18	003	Fasilitasi Pembinaan Kesertaan KB	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	Dinas Dalduk dan KB			Jumlah peserta pembinaan kesertaan KB	100 Orang	Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana	100 Orang	35.000.000	PAD, DAU, DBH	300 Orang	150.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	Peserta KB aktif	
02	08	18	004	Fasilitasi Bagi Mitra Kerja dalam Pengendalian Penduduk	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	Dinas Dalduk dan KB			Jumlah kegiatan mitra kerja dalam pengendalian penduduk	6 Keg	Terselenggaranya fasilitasi Mitra kerja koalisi kependudukan	6 Keg	90.000.000	PAD, DAU, DBH	6 Keg	150.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	Pengelola program KKBPK	
02	08	24		PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BKB - POSYANDU - PADU				Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	72					49.000.000			85.000.000				
02	08	24	001	Pengkajian pengembangan model operasional BKB-posyandu-PADU	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	Dinas Dalduk dan KB			Jumlah kader yang mengikuti pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD	100 Orang	Terlaksananya pengembangan model operasional BKB Holistik Integratif	100 Orang	27.000.000	PAD, DAU, DBH	200 Orang	50.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	Kader posyandu dan kader BKB	
02	08	24	002	Pengumpulan bahan-bahan informasi tentang pengasuhan dan pembentukan tumbuh kembang anak	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	Dinas Dalduk dan KB			Jumlah kartu pedoman tumbuh kembang anak	1000 lembar	Terisinya kartu tumbuh kembang anak oleh Kader Bina Keluarga Balita	1000 lembar	22.000.000	PAD, DAU, DBH	1200 lembar	35.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	Kader pengelola program BKB	
02				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																	
02	08			PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																	
02	08	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100					0			0				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan									
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	08	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Dalduk dan KB			Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat	100 %	Terkirimnya surat dinas dengan lancar	12 Bulan	8.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	10.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	Surat menyurat pada Dinas Dalduk dan KB Kabupaten Blora	
02	08	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Dalduk dan KB			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	100 %	Terbayarnya rekening telepon, listrik dan internet	12 Bulan	80.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	90.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	Jaringan listrik, telepon, air dan internet Dinas Dalduk dan KB Kabupaten Blora	
02	08	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Dalduk dan KB			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100 %	Terbayarnya pajak kendaraan dinas	12 Bulan	22.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	30.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	Kendaraan dinas roda dua dan roda empat kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Blora	
02	08	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Dalduk dan KB			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan	100 %	Terbayarnya honorarium bagi pengelola keuangan perangkat daerah	12 Bulan	150.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	160.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	Pengelolaan keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Blora	
02	08	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Dalduk dan KB			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor	100 %	Terpeliharanya kantor menjadi bersih dan rapi para pegawai nyaman dalam melaksanakan tugas	12 Bulan	59.400.000	PAD, DAU, DBH	100 %	57.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Blora dan Gudang Alokon	
02	08	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Dalduk dan KB			Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	100 %	Terbelinya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	65.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	65.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Blora	
02	08	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Dalduk dan KB			Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100 %	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan, spanduk, penggandaan dll.	12 Bulan	10.198.000	PAD, DAU, DBH	100 %	16.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Blora	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan									
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	08	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Dalduk dan KB			Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	Tersedianya komponen instalasi listrik /penerangan gedung kantor	12 Bulan	10.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	20.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	Lampu-lampu penerangan kantor di Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Blora	
02	08	01	013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Dalduk dan KB			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	Tersedianya peralatandan dan perlengkapan kantor sebanyak 5 jenis	5 Jenis	29.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	85.650.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Blora	
02	08	01	014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Dalduk dan KB			Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga	100 %	Terbelinya peralatan rumah tangga : dispenser, pompa air, kitchen set, sendok, karpet, gelas, piring makan, penyaring air,bendera merah putih	9 Jenis	10.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	20.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Blora	
02	08	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Dalduk dan KB			Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	Tersedianya bahan bacaan dan surat kabar yang dapat menunjang bertambahnya informasi bagi aparat	12 Bulan	10.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	8.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	Karyawan dan karyawati Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Blora	
02	08	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Dalduk dan KB			Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat	100 %	Tersedianya minuman harian bagi pegawai dan makanan dan minuman rapat	12 Bulan	65.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	60.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	Seluruh karyawan dan karyawati Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Blora	
02	08	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Dalduk dan KB			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Peningkatan kinerja dan peningkatan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah	12 Bulan	150.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	155.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Blora	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan									
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	08	01	019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Dalduk dan KB			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Terlaksananya koordinasi, monitoring dan pembinaan dalam daerah	12 Bulan	107.800.000	PAD, DAU, DBH	100 %	120.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	Pejabat struktural dan staff	
02	08	01	020	Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Dalduk dan KB			Persentase pemenuhan dukungan pelayanan perkantoran	100 %	Terbayarnya honor tenaga sopir, tenaga keamanan	12 Bulan	46.400.000	PAD, DAU, DBH	100 %	50.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
02	08	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100					0			0				
02	08	02	005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Dalduk dan KB			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1 Unit	Terpenuhinya kebutuhan kendaraan roda empat untuk operasional kegiatan di lapangan	1 Unit	250.000.000	PAD, DAU, DBH	0 Unit	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
02	08	02	007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Dalduk dan KB			Persentase pemenuhan perlengkapan gedung kantor	100 %	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	2 Jenis	20.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	20.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	Perlengkapan gedung kantor	
02	08	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Dalduk dan KB			Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Gedung Kantor terpelihara dengan baik	12 Bulan	20.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	41.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	Gedung kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
02	08	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Dalduk dan KB			Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	100 %	Kendaraan dinas operasional terawat dengan baik siap untuk dipergunakan	12 Bulan	60.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	85.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	Kendaraan dinas roda empat kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Blora	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan									
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	08	02	028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Dalduk dan KB			Persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Peralatan kantor terpelihara dengan baik	12 Bulan	10.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	14.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
02	08	02	029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeler	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Dalduk dan KB			Persentase mebeler dalam kondisi baik	100 %	Mebeler kantor terpelihara dengan baik	30 Buah	25.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	12.500.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
02	08	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				Pemenuhan kebutuhan pakaian seragam dinas	100					0			0				
02	08	03	005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi	Dinas Dalduk dan KB			Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	115 Unit	Terlaksananya pengadaan pakaian hari-hari tertentu untuk seluruh karyawan	115 Unit	41.250.000	PAD, DAU, DBH	0 Unit	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
02	08	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				Peningkatan kapasitas SDM aparatur	100					0			0				
02	08	05	001	Pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Dalduk dan KB			Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal	1 Orang	Terlatihnya pegawai dalam menguasai ketrampilan dan kecakapan dalam pelaksanaan program / kegiatan baru	1 Orang	10.000.000	PAD, DAU, DBH	3 Orang	30.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	Pejabat struktural pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Blora	
02	08	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				Pemenuhan kebutuhan pelaporan kinerja dan keuangan	100					0			0				
02	08	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Dalduk dan KB			Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7 Laporan	Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan dan kegiatan, terselenggaranya rapat koordinasi penyusunan laporan	7 Laporan	80.000.000	PAD, DAU, DBH	7 Laporan	80.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	laporan kinerja OPD	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan									
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	08	06	005	Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Dalduk dan KB			Jumlah rencana kinerja dan penetapan kinerja	5 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan SKPD	5 Dokumen	8.800.000	PAD, DAU, DBH	5 Laporan	20.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
TOTAL														11.889.238.000			12.731.190.000				

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KABUPATEN BLORA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																	
02	10			KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	
02	10	15		PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA				Perangkat Daerah yang telah memiliki jaringan internet	100%					948.600.000			1.586.000.000				
02	10	15	002	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK				Jumlah titik lokasi OPD yang terkoneksi dengan jaringan DINKOMINFO guna menunjang gerakan smart city	8 titik lokasi	Tercapainya Tower Standing	8 titik lokasi	257.160.000	PAD, DAU, DBH	8 titik lokasi	700.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	Kabupaten Blora	
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK				Presentase infrastruktur TIK dalam kondisi baik guna menunjang gerakan smart City	70 %	Kelancaran Layanan LPSE, WAN, LAN	70 %	171.440.000	PAD, DAU, DBH	80 titik lokasi	300.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	Kabupaten Blora	
02	10	15	003	Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK				Jumlah perserta pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi	50 Orang	Terlaksananya hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat	50 Orang	15.000.000	PAD, DAU, DBH	50 Orang	21.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	Kabupaten Blora	
02	10	15	005	Pengadaan alat studio dan komunikasi	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK				Jumlah perangkat alat studio dan komunikasi yang diadakan	3 Unit	Tersedianya peralatan studio	3 Unit	35.000.000	PAD, DAU, DBH	3 Unit	80.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1		
02	10	15	006	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK				Jumlah aplikasi yang adakan, diperbarui/diupgrade	2 Aplikasi	Terwujudnya portal smart city	2 Aplikasi	420.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Aplikasi	430.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	10	15	007	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK				Jumlah dokumen pedoman/acuan dalam merumuskan kebijan komunikasi dan informasi (SOP, Master Plan, Blue Print)	1 Dokumen	Meningkatnya kinerja secara efektif dan efisien	1 Dokumen	50.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	55.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	Kabupaten Blora	
02	10	16		PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI				Jumlah menara telekomunikasi	151					30.000.000			55.000.000				
02	10	16	001	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah dokumen yang merumuskan kebijakan bidang komunikasi dan informasi	1 Dokumen	Meningkatnya pemahaman tentang radiasi terhadap warga di lingkungan tower	10 Kec	30.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	55.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	Kabupaten Blora	
02	10	17		PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI				Persentase Perangkat Daerah yang memiliki SDM berkeahlian teknologi informasi	10					100.000.000			160.000.000				
02	10	17	001	Pelatihan SDM bidang komunikasi dan informasi	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah website resmi yang dikelola	2 website	terlaksananya website yang dikelola dengan baik	2 website	50.000.000	PAD, DAU, DBH	3 website	100.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	Kabupaten Blora	
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah aparatur OPD yang terlatih di bidang Komunikasi dan nformasi	250 Orang	Terlaksananya Pelatihan Aparatur Kabupaten Blora	250 Orang	50.000.000	PAD, DAU, DBH	250 website	60.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	Kabupaten Blora	
02	10	18		PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA										638.500.000			755.000.000				
02	10	18	001	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah warga masyarakat yang memperoleh informasi tentang pembangunan daerah	200 Orang	Terlaksanaya informasi pembangunan daerah	200 Orang	28.000.000	PAD, DAU, DBH	250 Orang	30.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	Kabupaten Blora	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	10	18	002	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang wajib dipublikasikan	100 %	Tersampaikannya informasi pembangunan daerah melalui media tradisional penyelenggaraan pemerintah daerah dan terwujudnya informasi pembangunan daerah melalui media cetak (Iklan Sosialisasi APBD 2019, LPJ 2018, LPPD 2018, Advetorial 2019, APBD Perubahan 20	100 %	135.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	270.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	kabupaten Blora	
02	10	18	003	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Presentase layanan penyebarluasan informasi melalui LPPL	100 %	Terlaksanakannya informasi di LPPL Gagak Rimang Blora	100 %	75.500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	55.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	Kabupaten Blora	
02	10	18	004	Sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai Tembakau (DBHCHT)	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah warga masyarakat yang memperoleh sosialisasi tentang cukai	100 Orang	Tersosialisasikannya ketentuan kelancaran sosialisasi di bidang cukai (DBHCHT) melalui media	100 Orang	400.000.000	DBHCHT	150 Orang	400.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	Kabupaten Blora	
02	10	19		PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI DAERAH										163.500.000			400.000.000				
02	10	19	002	Koordinasi bidang komunikasi dan informasi antar lintas SKPD, lintas instansi vertikal di daerah, BUMD, dan swasta lokal	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah lembaga yang dikoordinasikan dalam bidang komunikasi dan informasi antar lintas SKPD, lintas vertikal di daerah, BUMD, dan swasta lokal	10 Lembaga	Terwujudnya hubungan harmonis antar provider, TPTMT dan warga	10 Lembaga	26.000.000	PAD, DAU, DBH	10 Lembaga	50.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	Kabupaten Blora	
02	10	19	003	Penguatan sinergisitas dan kemitraan pemerintah dan media massa	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah media massa yang bersinergi dengan pemerintah daerah	11 media massa	Terwujudnya kesinambungan antara pemerintah dengan media massa	11 media massa	65.000.000	PAD, DAU, DBH	11 media massa	240.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	Kabupaten Blora	
02	10	19	005	Revitalisasi pendayagunaan media center daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase terlayaninya kebutuhan wartawan dan masyarakat dalam pemanfaatan Media Center	100 %	Terjalinnya hubungan yang sinergis kemitraan pemerintah dan media massa	100 %	12.500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	30.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	Kabupaten Blora	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	10	19	007	Penyusunan desain detail jaringan komunikasi	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah dokumen desain detail jaringan komunikasi yang disusun	1 Dokumen	Tersedianya name plate menara telekomunikasi (tower)	1 Dokumen	40.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	50.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	Kabupaten Blora	
02	10	19	015	Pemberdayaan KIM dan FK Metra	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah kelompok informasi masyarakat dan media tradisional yang diberdayakan	11 Kelompok	Terlaksananya kegiatan KIM dan FK Metra	11 Kelompok	20.000.000	PAD, DAU, DBH	11 Kelompok	30.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	Kabupaten Blora	
02	10	20		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDM APARATUR PADA SKPD YANG MENANGANI URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI DI DAERAH				Keterbukaan komunikasi publik	100 %					12.500.000			35.000.000				
02	10	20	009	Orientasi atas SKPD tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase OPD selaku PPID pembantu yang bertugas sebagai pengelola informasi publik berfungsi sesuai tugasnya	100 %	Tersedianya informasi publik bagi PPID, OPD dan UPTD se Kab. Blora	100 %	12.500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	35.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	Kabupaten Blora	
02	10	21		PROGRAM PENINGKATAN TATA LAKSANA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				Informasi kebijakan daerah	100 %					153.400.000			400.000.000				
02	10	21	003	Penyediaan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi	100 %	Terwujudnya informasi kepada masyarakat melalui papan informasi baliho	100 %	87.400.000	PAD, DAU, DBH	100 %	270.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	Kabupaten Blora	
02	10	21	005	Pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster, leaflet, baliho dan lainnya	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Prosentase informasi yang terpublikasi melalui poster, leaflet, baliho dan lainnya	100 %	Terlaksananya penyebarluasan informasi kebujakan dengan melalui poster, leaflet, baliho dan lainnya	100 %	25.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	35.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	Kabupaten Blora	
02	10	21	009	Komunikasi publik melalui dialog interaktif radio dan televisi	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah tayangan dan dialog publik melalui radio dan televisi	1 Kali	Terwujudnya informasi publik kepada masyarakat lewat liputan atau siaran TV	1 Kali	25.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Kali	65.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	Kabupaten Blora	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	10	21	011	Pelayanan informasi melalui media online	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Prosentase berita atau informasi yang terpublikasi melaui media online	100 %	Terwujudnya informasi kepada masyarakat melalui website dan media sosial (medsos)	100 %	16.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	30.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	Kabupaten Blora	
02	14			STATISTIK																	
02	14	15		PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH				Ketersediaan dokumen IKK	100 %					100.000.000			190.000.000				
02	14	15	001	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	-	Meningkatnya kualitas pelayanan statistik, kearsipan, persandian, dan transmigrasi				Jumlah dokumen informasi data statistik daerah kepada masyarakat	1 Dokumen	Termutakhirnya analisa data Blora dalam Angka	1 Dokumen	25.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	50.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	Kabupaten Blora	
02	14	15	002	Pengelolaan, updating dan analisis data statistik daerah	-	Meningkatnya kualitas pelayanan statistik, kearsipan, persandian, dan transmigrasi				Jumlah Dokumen Kabupaten Blora Dalam Angka yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	1 Dokumen	Terwujudnya update dan termuthairnya Satu Data Blora	1 Dokumen	25.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	50.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	Kabupaten Blora	
02	14	15	004	Pengolahan, updating dan analisis data PDRB	-	Meningkatnya kualitas pelayanan statistik, kearsipan, persandian, dan transmigrasi				Jumlah Dokumen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	1 Dokumen	Termutakhirnya dokumen analisa PDRB	1 Dokumen	25.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	40.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	Kabupaten Blora	
02	14	15	006	Penyusunan IKK	-	Meningkatnya kualitas pelayanan statistik, kearsipan, persandian, dan transmigrasi				Jumlah dokumen IKK yang termutakhir	1 Dokumen	Termutakhirnya buku indeks kemahalan kontruksi	1 Dokumen	25.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	50.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	Kabupaten Blora	
02	19			PERSANDIAN																	
02	19	15		PROGRAM SANDI DAN TELEKOMUNIKASI										67.500.000			95.000.000				
02	19	15	001	Pengadaan peralatan dan perlengkapan sandi dan telekomunikasi	-	Meningkatnya kualitas pelayanan statistik, kearsipan, persandian, dan transmigrasi				Jumlah peralatan dan perlengkapan sandi dan telekomunikasi yang diadakan	1 Unit	Terlaksananya tugas persandian	1 Unit	45.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Unit	60.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	Kabupaten Blora	
02	19	15	002	Peningkatan dan pengembangan SDM sandi dan telekomunikasi	-	Meningkatnya kualitas pelayanan statistik, kearsipan, persandian, dan transmigrasi				Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek persandian	8 Orang	Terlatihnya aparatur sandi dan telekomunikasi	8 Orang	22.500.000	PAD, DAU, DBH	8 Orang	35.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1		
02				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																	
02	10			KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	10	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %					0			0				
02	10	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat	100 %	Tersedianya Paket Surat, Paket Pos, Materai@3000 (220 lmbr), Materai@ 6000 (300 lmbr)	100 %	3.500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	5.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	Kabupaten Blora	
02	10	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	100 %	Tersedianya Jasa Listrik, Telpfon, Internet, Bandwith dan Wifi + Hotspot	100 %	1.121.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	1.300.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	Kabupaten Blora	
02	10	01	003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	Tersedianya Pemeliharaan Mesin Ketik, Printer Ink Jet, Printer Laser jet, Komputer Laptop dan AC	100 %	3.500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	7.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	Kabupaten Blora	
02	10	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100 %	Tersedianya Perawatan dan Pajak Kendaraan 4 Mobil, 1 KIR Mobil unit, 15 Kendaraan roda dua	100 %	8.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	14.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	Kabupaten Blora	
02	10	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan	100 %	Tersedianya jasa administrasi keuangan dan pengelolaan barang daerah	100 %	83.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	95.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	Kabupaten Blora	
02	10	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	DINKOMINFO Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor	100 %	Tersedianya alat kebersihan kantor dan jasa kebersihan kantor	100 %	13.500.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	22.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1		
02	10	01	009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	DINKOMINFO Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja	100 %	Terpeliharanya perangkat keras, lunak, dan alat pendukung persandian	100 %	10.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	40.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	10	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	DINKOMINFO Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	100 %	Tersedianya alat tulis kantor (ATK) untuk penunjang operasional kerja	100 %	41.500.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	50.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1		
02	10	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	DINKOMINFO Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100 %	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100 %	14.500.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	20.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1		
02	10	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	Tersedianya bahan atau barang komponen listrik	100 %	10.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	13.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	Kabupaten Blora	
02	10	01	013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang optimal	100 %	85.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	150.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	Kabupaten Blora	
02	10	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	Tersedianya jenis surat kabar dan buku perundang undangan	100 %	20.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	30.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	Kabupaten Blora	
02	10	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat	100 %	Tersedianya makan minum harian dan tersedianya makan minum kegiatan rapat dan tamu	100 %	75.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	80.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	Kabupaten Blora	
02	10	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Tersedianya biaya rakor dan konsultasi luar daerah	100 %	108.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	165.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	Kabupaten Blora	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	10	01	019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Tersedianya biaya rakor dan konsultasi dalam daerah	100 %	52.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	65.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	Kabupaten Blora	
02	10	01	020	Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan dukungan pelayanan perkantoran	100 %	Tersedianya honorarium tenaga Non PNS	100 %	108.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	150.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	Kabupaten Blora	
02	10	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %					0			0				
02	10	02	003	Pembangunan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 Unit	Tersedianya bangunan kantor yang memadai	1 Paket	60.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Unit	5.200.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	Kabupaten Blora	
02	10	02	010	Pengadaan mebeler	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan mebeler	100 %	Tersedianya mebeler untuk meningkatkan kinerja dan efektifitas pelaksanaan kinerja	100 %	20.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	30.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	Kabupaten Blora	
02	10	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor	100 %	75.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	60.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	Kabupaten Blora	
02	10	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	100 %	Terpenuhinya biaya perawatan 5 mobil dan 17 kendaraan roda dua	100 %	50.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	67.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	Kabupaten Blora	
02	10	02	029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeler	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase mebeler dalam kondisi baik	100 %	Terpeliharanya mebeler kantor	100 %	5.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	15.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	Kabupaten Blora	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	10	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				Pemenuhan kebutuhan pakaian seragam dinas	100 %					0			0				
02	10	03	005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi				Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	55 Unit	Ketersediaan pakaian Dinas hari-hari tertentu	55 Unit	40.000.000	PAD, DAU, DBH	60 Unit	55.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	Kabupaten Blora	
02	10	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				Peningkatan kapasitas SDM aparatur	100 %					0			0				
02	10	05	001	Pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal	11 Orang	Tersedianya pendidikan dan pelatihan formal untuk peningkatan kinerja pegawai	11 Orang	20.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Orang	30.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1		
02	10	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				Nilai Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	100 %					0			0				
								Pemenuhan kebutuhan pelaporan kinerja dan keuangan	100 %												
02	10	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10 Laporan	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Bulan	20.000.000	PAD, DAU, DBH	7 Laporan	30.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	Kabupaten Blora	
TOTAL														4.260.500.000			11.369.500.000				

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KABUPATEN BLORA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																	
02	12			PENANAMAN MODAL																	
02	12	15		PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI				Tersedianya informasi peluang usaha sektor/ bidang usaha unggulan	6					518.450.000			905.000.000				
								Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten	1												
								Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan	4												
02	12	15	002	Pengembangan potensi unggulan daerah	-	-	DPMPTSP Kab. Blora			Jumlah buku yang disusun yang memuat potensi unggulan daerah untuk investensi	1 Buku	Terciptanya peluang investasi di daerah	2 Tahun	61.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Buku	90.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1		
02	12	15	005	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	-	-	DPMPTSP Kab. Blora			Jumlah keikutsertaan dalam koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	3 Kali	Terwujudnya rakor, perencanaan dan pengembangan PM	3 Kali	40.000.000	PAD, DAU, DBH	16 Kali	60.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1		
02	12	15	006	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	-	-	DPMPTSP Kab. Blora			Jumlah koordinasi Kerjasama dibidang penanaman modal dengan instasi pemerintah dan dunia usaha	5 Kali	Terlaksananya koordinasi dan kerjasama PM	4 Kali	80.000.000	PAD, DAU, DBH	4 Kali	160.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1		
02	12	15	008	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	-	-	DPMPTSP Kab. Blora			Jumlah pengusaha yang dipantau, dibina, diawasi kesesuaian usahanya dengan perizinan usaha	50 pengusaha	Meningkatnya kerjasama di bidang PM	50 pengusaha	90.000.000	PAD, DAU, DBH	10 pengusaha	160.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1		
02	12	15	010	Penyelenggaraan pameran investasi	-	-				Jumlah pameran investasi yang diikuti	1 Kali	Jumlah pameran investasi yang diikuti	1 Kali	100.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Kali	110.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1		
					-	-	DPMPTSP Kab. Blora			Jumlah pameran investasi yang diikuti	3 Kali	Meningkatnya calon investor	3 Jenis	147.450.000	PAD, DAU, DBH	3 Kali	325.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	12	16		PROGRAM PENINGKATAH IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI				Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	630					418.500.000			1.475.000.000				
								Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	4,5 T												
								Terselenggaranya pelayanan perijinan dan non perijinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal: Pendaftaran Penanamanan Modal Dalam Negeri, Ijin prinsip Penanamanan Modal D	2 hari												
02	12	16	001	Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur	-	Meningkatnya nilai realisasi investasi dan kualitas pelayanan perijinan	DPMPTSP Kab. Blora			Jumlah dokumen kebijakan Investasi	3 Dokumen	Meningkatnya fasilitas kerjasama PM	3 Kali	20.000.000	PAD, DAU, DBH	3 Dokumen	35.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1		
02	12	16	002	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	-	Meningkatnya nilai realisasi investasi dan kualitas pelayanan perijinan				Jumlah investor /calon investor yang difasilitasi untuk kerjasama di bidang penanaman modal	50 pelaku usaha	Peningkatan kerjasama dan koordinasi pelaku usaha	50 pelaku usaha	100.000.000	PAD, DAU, DBH	50 pelaku usaha	110.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1		
					-	Meningkatnya nilai realisasi investasi dan kualitas pelayanan perijinan	DPMPTSP kab. Blora			Jumlah investor /calon investor yang difasilitasi untuk kerjasama di bidang penanaman modal	50 pelaku usaha	Peningkatan kerjasama dan koordinasi pelaku usaha	50 Perusahaan	120.000.000	PAD, DAU, DBH	50 pelaku usaha	160.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1		
02	12	16	004	Pengembangan sistem informasi penanaman modal	-	Meningkatnya nilai realisasi investasi dan kualitas pelayanan perijinan				Jumlah aplikasi investasi yang dipelihara, dikembangkan dan diupdate	1 Aplikasi	Jumlah aplikasi investasiyang dipelihara, dikembangkan dan diupdate	1 Aplikasi	100.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Aplikasi	110.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1		
					-	Meningkatnya nilai realisasi investasi dan kualitas pelayanan perijinan	DPMPTSP Kab. Blora			Jumlah aplikasi investasi yang dipelihara, dikembangkan dan diupdate	1 Aplikasi	Terciptanya peningkatan dan realisasi investasi	1 Paket	58.500.000	PAD, DAU, DBH	1 Aplikasi	1.000.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1		
02	12	16	009	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	-	Meningkatnya nilai realisasi investasi dan kualitas pelayanan perijinan	DPMPTSP Kab. Blora			Jumlah laporan monitong dan evaluasi	5 Laporan	Terwujudnya laporan PM	5 Dokumen	20.000.000	PAD, DAU, DBH	5 Laporan	60.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1		
02	12	20		PROGRAM PELAYANAN PERIJINAN				Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	8					1.099.000.000			2.030.000.000				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	12	20	001	Penyusunan sistem informasi dan dokumen perijinan	-	-				Jumlah aplikasi sistem informasi PTSP yang dipelihara, dikembangkan dan diupdate	1 Aplikasi	Jumlah aplikasi sistem informasi PTSPyang dipelihara, dikembangkan dan diupdate	1 Aplikasi	100.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Aplikasi	110.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1		RESES
					-	-	DPMPTSP Kab. Blora			Jumlah aplikasi sistem informasi PTSP yang dipelihara, dikembangkan dan diupdate	1 Aplikasi	Meningkatnya pelayanan perijinan	1 Aplikasi	200.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Aplikasi	310.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1		
02	12	20	002	Sosialisasi pelayanan dan perijinan terpadu	-	-				Jumlah peserta sosialisasi pelayanan dan perizinan terpadu	50 Orang	Jumlah peserta sosialisasi pelayanan dan perizinan terpadu	50 Orang	150.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Orang	110.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1		
					-	-	DPMPTSP Kab. Blora			Jumlah peserta sosialisasi pelayanan dan perizinan terpadu	50 Orang	Meningkatnya penyelenggaraan PTSP	16 Kec	150.000.000	PAD, DAU, DBH	50 Orang	310.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1		
02	12	20	003	Penyusunan Rancangan Peraturan Perijinan	-	-	DPMPTSP Kab. Blora			Jumlah rancangan peraturan perizinan yang disusun	2 Ranperda/Perbup	Terwujudnya kegiatan PM dan PTSP yang kondusif	2 Ranperda/Perbup	150.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Ranperda/Perbup	260.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1		
					-	-				Jumlah rancangan peraturan perizinan yang disusun	1 Ranperda/Perbup	Jumlah rancangan peraturan yang perizinan yang disusun	1 Ranperda/Perbup	100.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Ranperda/Perbup	110.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1		
02	12	20	004	Penyusunan penetapan perijinan	-	-	DPMPTSP Kab. Blora			Persentase perizinan yang diproses	100 %	Terwujudnya kelancaran proses PTSP	1000 Dokumen	229.000.000	PAD, DAU, DBH	1000 %	760.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1		
02	12	20	006	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	-	-	DPMPTSP Kab. Blora			Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayana PTSP	70 %	Meningkatnya kepuasan masyarakat tentang layanan PTSP	70 %	20.000.000	PAD, DAU, DBH	75 %	60.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1		
02				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																	
02	12			PENANAMAN MODAL																	
02	12	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	10					0			0				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	12	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	DPMPTSP Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat	100 %	Terciptanya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	7.500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	7.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1		
02	12	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	DPMPTSP Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	100 %	Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas	100 Kali	220.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	240.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1		
02	12	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	DPMPTSP Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100 %	Terlaksananya perizinan kendaraan dinas operasional	100 Kali	8.200.000	PAD, DAU, DBH	100 %	10.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1		
02	12	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	DPMPTSP Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan	100 %	Terciptanya peningkatan kinerja aparatur	100 %	131.700.000	PAD, DAU, DBH	100 %	136.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1		
02	12	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	DPMPTSP Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor	100 %	Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas	100 Jenis	39.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	135.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1		
02	12	01	009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	DPMPTSP Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja	100 %	Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas	100 Jenis	40.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	60.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1		
02	12	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	DPMPTSP Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	100 %	Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas	100 Jenis	100.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	160.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1		
02	12	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	DPMPTSP Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100 %	Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas	100 Jenis	100.000.000	PAD, DAU, DBH	26 %	150.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	12	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	DPMPTSP Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	30.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	50.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1		
02	12	01	013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	DPMPTSP Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas	100 Paket	200.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	250.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1		
02	12	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	DPMPTSP Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur	100 Jenis	9.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	20.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1		
02	12	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	DPMPTSP Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat	850 %	Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas	850 Buah	70.000.000	PAD, DAU, DBH	850 %	90.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1		
02	12	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	DPMPTSP Kab. Blora			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	415 %	Tercapainya kelancaran pelayanan perizinan dan PM	415 Kali	200.000.000	PAD, DAU, DBH	415 %	310.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1		
02	12	01	019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	DPMPTSP Kab.Blora			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	372 %	Tercapainya kelancaran pelayanan perizinan dan PM	372 Kali	40.000.000	PAD, DAU, DBH	372 %	50.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1		
02	12	01	020	Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan dukungan pelayanan perkantoran	100 %	Peningkatan keamanan, kebersihan dan jasa lainnya	100 %	50.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	60.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1	Tenaga honorarium, sopir, tenaga kebersihan	
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	DPMPTSP Kab.Blora			Persentase pemenuhan dukungan pelayanan perkantoran	100 %	Peningkatan keamanan, kebersihan dan jasa lainnya	100 %	103.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	130.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3	Tenaga honorarium, sopir, tenaga kebersihan	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	12	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	1 Unit Mobil					0			0				
02	12	02	005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	DPMPTSP Kab. Blora			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	2 Unit	Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas	2 Unit	400.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Unit	480.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1		
02	12	02	010	Pengadaan mebeler	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	DPMPTSP Kab. Blora			Persentase pemenuhan mebeler	100 %	Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	50.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	250.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1		
02	12	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	DPMPTSP Kab. Blora			Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	6 %	Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas	6 Jenis	100.000.000	PAD, DAU, DBH	5 %	450.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1		
02	12	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	DPMPTSP Kab. Blora			Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	100 %	Meningkatnya kinerja aparatur	100 Unit	60.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	75.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1		
02	12	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR										0			0				
02	12	03	005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi	DPMPTSP Kab. Blora			Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	40 Unit	Meningkatnya kinerja aparatur	40 Set	40.000.000	PAD, DAU, DBH	40 Unit	55.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1		
02	12	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR										0			0				
02	12	05	001	Pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	DPMPTSP Kab. Blora			Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal	20 Orang	Terciptanya peningkatan kinerja aparatur	20 Orang	30.000.000	PAD, DAU, DBH	20 Orang	150.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	12	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										0			0				
02	12	06	004	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	DPMPTSP Kab. Blora			Jumlah laporan keuangan akhir tahun	4 Laporan	Meningkatnya kinerja aparatur	4 Dokumen	4.500.000	PAD, DAU, DBH	4 Laporan	8.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1		
02	12	06	005	Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	DPMPTSP Kab. Blora			Jumlah rencana kinerja dan penetapan kinerja	4 Dokumen	Meningkatnya kinerja aparatur	4 Dokumen	4.500.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	8.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1		
02	12	06	006	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	DPMPTSP Kab. Blora			Jumlah laporan akuntabilitas kinerja SKPD	4 Laporan	Meningkatnya kinerja aparatur	4 Dokumen	4.500.000	PAD, DAU, DBH	4 Laporan	8.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1		
TOTAL														4.077.850.000			7.752.000.000				

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KABUPATEN BLORA

DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan									
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																	
02	13			KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA																	
02	13	16		PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN				Jumlah pemuda berprestasi	100 orang					612.000.000			1.650.000.000				
								Jumlah organisasi pemuda yang memiliki legalitas organisasi dari Pemerintah Kabupaten	55 organisasi												
02	13	16	001	Pembinaan organisasi kepemudaan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	-				Jumlah Pengurus Organisasi yang mengikuti pembinaan	1 Orang	Kegiatan Sosialisasi dan Pembinanaan Organisasi	1 Orang	5.000.000	PAD, DAU, DBH	100 Orang	200.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Pemuda/ Pemudi Se Kabupaten Blora dan Organisasi Kepemudaan (KNPI, Fatayat, Pramuka)	
02	13	16	002	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	-				Jumlah pemuda yang mengikuti pendidikan pelatihan dasar kepemimpinan	95 Orang	Lomba TUB-BB Peserta Didik SMP/Mts dan SMA/SMK/MA Sederajat Tingkat Kabupaten Blora, Eks Karesidenan Pati dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, Pelaksanaan Kegiatan PASKIBRAKA Kabupaten Blora Tahun 2018 serta Pembayaran Honorarium Tenaga Administrasi Seksi	95 Orang	570.000.000	PAD, DAU, DBH	190 Orang	850.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Pemuda/ Pemudi Se Kabupaten Blora dan SMA/ SMK/ MA Se Kabupaten Blora	
02	13	16	003	Fasilitasi aksi bakti sosial kepemudaan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	-				Jumlah orang yang mengikuti Aksi Bhakti Sosial	10 Orang	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkwalitas (Bhakti Sosial)	10 Orang	5.000.000	PAD, DAU, DBH	375 Orang	450.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Pemuda/ Pemudi Se Kabupaten Blora, Organisasi Kepemudaan(KNPI, Karang Taruna) dan Masyarakat	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan									
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	13	16	007	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	-	kab. Blora			Jumlah pemuda yang telah terbina tentang pelopor keamanan lingkungan	10 Orang	Terlaksananya pembinaan pemuda dalam menjaga lingkungan (Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan)	10 Orang	5.000.000	PAD, DAU, DBH	50 Orang	100.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Pemuda/ Pemudi Se Kabupaten Blora, Organisasi Kepemudaan(KNPI, Karang Taruna) dan Masyarakat	
02	13	16	009	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	-	BLORA			Jumlah orang yang mengikuti monitoring dan evaluasi	5 Orang	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan kepemudaan, keolahragaan dan sarana prasarana	5 Kelompok	27.000.000	PAD, DAU, DBH	51 Kelompok	50.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Organisasi Kepemudaan, Pemuda yang berprestasi dan Sarpras olahraga	
02	13	17		PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA				Jumlah pemuda yang mampu berwirausaha	170 orang					15.000.000			445.000.000				
02	13	17	001	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Kab. Blora			Jumlah pemuda yang dilatih berwirausaha	5 Orang	Pemuda yang berwirausaha	5 Orang	5.000.000	PAD, DAU, DBH	75 Orang	115.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Pemuda/ Pemudi Se Kabupaten Blora, Organisasi Kepemudaan(KNPI, Fatayat, Karang Taruna) dan Masyarakat	
02	13	17	002	Pelatihan keterampilan bagi pemuda	Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Kab. Blora			Jumlah pemuda yang dilatih ketrampilan	5 Orang	Menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi pemuda	5 Orang	5.000.000	PAD, DAU, DBH	90 Orang	120.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Pemuda/ Pemudi Se Kabupaten Blora, Organisasi Kepemudaan(KNPI, Fatayat, Karang Taruna) dan Masyarakat	
02	13	17	003	Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP)	Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Kab. Blora			Jumlah kelompok usaha pemuda yang dilatih ketampilan	1 Kelompok	Tercapainya pelatihan pemuda dalam kelompok usaha pemuda produktif dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan dan menciptakan lapangan pekerjaan	1 Kelompok	5.000.000	PAD, DAU, DBH	25 Kelompok	210.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Pemuda/ Pemudi Se Kabupaten Blora, Organisasi Kepemudaan(KNPI, Fatayat, Karang Taruna) dan Masyarakat	
02	13	20		PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA				Jumlah medali tingkat provinsi yang diperoleh	91 medali					795.200.000			2.315.000.000				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan									
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	13	20	003	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Kab. Blora			Jumlah atlet/orang yang mengikuti pembinaan sebagai olahragawan berbakat	15 Orang	Lomba Gerak Jalan 28 Km Tingkat Provinsi Jawa Tengah, Lomba lari 5 K dan 11 K dalam Rangka Hari Jadi Kabupaten Blora serta terkirimnya peserta Lomba Tenis Lapangan Antar Dinas Se Jawa Tengah Tahun 2019	15 Orang	50.000.000	PAD, DAU, DBH	523 Orang	410.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Pelajar, Pemuda, Atlet dan masyarakat umum	
02	13	20	004	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Kab. Blora			Jumlah kelompok yang mengikuti pembinaan cabang olahraga prestasi tingkat Daerah	32 Kelompok	Invitasi Bola Voli Putra dan Putri Antar Kecamatan Se Kabupaten Blora, Turnamen Sepak Bola Antar Kecamatan Se Kabupaten Blora dalam Rangka Hari Jadi Kabupaten Blora Tahun 2019	32 Kelompok	50.000.000	PAD, DAU, DBH	48 Kelompok	300.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Kecamatan Se Kabupaten Blora	
02	13	20	005	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Kab. Blora			Jumlah kelompok yang mengikuti Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	1 Kelompok	Terlaksananya lomba senam antar OPD Se Kabupaten Blora, Pelaksanaan HAORNAS di Kabupaten Blora dan Terkirimnya peserta Upacara HAORNAS Tingkat Propinsi Jawa Tengah	1 Kelompok	5.000.000	PAD, DAU, DBH	49 Kelompok	230.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	OPD Se Kabupaten Blora	
02	13	20	006	Penyelenggaraan kompetisi olah raga	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Kab. Blora			Jumlah atlit yang ikut kompetisi di Tingkat Kabupaten, Karesidenan, Tingkat Provinsi Jawa Tengah	720 Orang	Terlaksananya POPDA SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Sederajat dari Tingkat Kabupaten Blora, Eks. Karesidenan dan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2019 serta Pembayaran Honorarium Tenaga Administrasi Seksi Olahraga sebanyak 3 Orang	720 Orang	622.200.000	PAD, DAU, DBH	720 Orang	780.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Pelajar	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan									
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	13	20	007	Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Kab. Blora			Jumlah kelompok/regu yang mengikuti pemasalan olahraga	10 Kelompok	Lomba Gerak Jalan Ketepatan Waktu Pelajar SD/MI, SMP/MTs, SMA/ SMK/ MA dan Umum Putra Putri Tingkat Kabupaten Blora dan Kejuaraan Motor Cross Tingkat Kabupaten Blora	10 Orang	5.000.000	PAD, DAU, DBH	550 Orang	375.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Pelajar, pemuda dan Masyarakat	
02	13	20	009	Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Kab. Blora			Jumlah koordinasi yang dilakukan guna mendukung peningkatan prestasi olahraga	10 Kali	Terpenuhi Pendatan dan Validasi Data Keolahragaan	10 Kali	38.000.000	PAD, DAU, DBH	20 Kali	60.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Atlit, Pelatih dan Tenaga Ahli di Bidang Olahraga	
02	13	20	011	Pengembangan olahraga rekreasi	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	DINPORABUDPAR			Jumlah tim pelajar yang berminat di olahraga rekreasi	10 Kelompok	Lomba kasti dan lomba bakiak antar pelajar SD/MI, SMP/ MTs dan SMA/ SMK/ MA putra put Se Kabupaten Blora Tahun 2020	10 Kelompok	25.000.000	PAD, DAU, DBH	48 Kelompok	160.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	SD/ MI, SMP/ MTs, SMA/ SMK/ MA Se Kabupaten Blora	
02	13	21		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA				Lapangan Olahraga	760 Lapangan					15.202.800.000			12.550.000.000				
								Gelanggang olahraga	2 gedung												
02	13	21	002	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	BLORA			Jumlah fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang ditingkatkan	1 Fasilitas	Terbangunya stadion kridaloka, Gor Mustika, Lapangan tenis pringgondani, Gor kolonel Sunandar	1 Paket	25.000.000	Dana Infrastruktur	3 Paket	1.900.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Sarana prasarana olahraga	
					Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	Kel. Jepon Kec. Jepon Kab. Blora			Jumlah fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang ditingkatkan	1 Fasilitas	Terbangunya Lapangan sepak bola stadion Kridhaloka	1 Paket	15.000.000.000	DAK FISIK	1 Paket	10.000.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Sarana prasarana olahraga	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan									
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	13	21	006	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	-	BLORA			Jumlah fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara	2 Fasilitas	Pengecatan Atap Baja, Tembok dan Pagar Keliling GOR Mustika Blora dan Pengecatan Pagar Besi Stadion Kridosono, Pekerjaan Lanjutan Pembenahan Lantai Tribun GOR Mustika Blora, Pengecatan Pagar dan Pengecoran Selokan GOR Mustika, Pembayaran Honorarium Tenaga	2 Fasilitas	177.800.000	Dana Infrastruktur	7 Fasilitas	650.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	GOR Mustika, Lapangan Tenis Pringgondani, GOR Kolonel Sunandar, Stadion Kridosono dan Lapangan Golf Blora	
02	16			KEBUDAYAAN																	
02	16	15		PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA				Jumlah kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	3 kali					150.000.000			75.000.000				
02	16	15	001	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kab. Blora			Jumlah kegiatan pelestarian adat budaya, aktualisasi adat budaya yang dilaksanakan	3 Keg	Terlaksanannya pelestarian adat budaya, aktualisasi upacara adat dan kepercayaan kepada Tuhan YME, Terlaksananya kursus Pranatacara	3 Keg	150.000.000	PAD, DAU, DBH	3 Paket	75.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Masyarakat dan sekolah	
02	16	16		PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA				Persentase Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	32.5%					358.000.000			740.000.000				
02	16	16	001	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya pelestarian keragaman dan kekayaan budaya daerah	Blora dan Jawa Tengah			Jumlah barang bercorak kesenian kebudayaan yang diganti untung	1 Buah	Meningkatnya kemampuan SDM organisasi kemasyarakatan di bidang budaya dan bertambahnya koleksi temuan benda cagar budaya	1 Kali	18.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Kali	35.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Masyarakat umum	
02	16	16	002	Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya pelestarian keragaman dan kekayaan budaya daerah	Kab. Blora			Jumlah Dokumen ensiklopedia yang dihasikan	10 Dokumen	Tersediannya transkrip dan terjemahan naskah kuno serta terlaksanannya bedah naskah kuno	10 Dokumen	20.000.000	PAD, DAU, DBH	10 Dokumen	35.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Masyarakat dan sekolah	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	16	16	003	Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya pelestarian keragaman dan kekayaan budaya daerah	Kab. Blora			Jumlah dokumen cagar budaya yang daerah yang teregistrasi	1 Dokumen	Teregistrasinya cagar budaya daerah	1 Dokumen	15.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	90.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Masyarakat	
02	16	16	004	Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya pelestarian keragaman dan kekayaan budaya daerah	BLORA			Jumlah orang yang paham tentang undang-undang cagar budaya	60 Orang	Meningkatnya pengetahuan dan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	60 Dokumen	20.000.000	PAD, DAU, DBH	60 Orang	30.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Masyarakat dan sekolah	
02	16	16	005	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya pelestarian keragaman dan kekayaan budaya daerah	BLORA			Jumlah benda situs budaya yang dilestarikan	4 Lokasi	Terlindunginya situs cagar budaya dan terkelolanya peninggalan sejarah purbakala. Terselenggaranya LKTI sejarah budaya Blora. Terbangun nya infrastruktur pelindung situs cagar budaya di Kec. Kradenan.	4 Lokasi	100.000.000	PAD, DAU, DBH	4 Lokasi	185.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Masyarakat dan siswa SLTA	
02	16	16	006	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya pelestarian keragaman dan kekayaan budaya daerah	BLORA			Jumlah sumberdaya manusia yang paham tentang peninggalan cagar udaya	3 Orang	Meningkatnya apresiasi dan pengetahuan potensi budaya dan pariwisata	3 Orang	60.000.000	PAD, DAU, DBH	8 Orang	130.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Masyarakat dan sekolah	
02	16	16	009	Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya pelestarian keragaman dan kekayaan budaya daerah	DINPORABUDPAR			Jumlah rakor yang diadakan dan jumlah rakor budaya yang diikuti	7 Kali	terlaksananya rakor budaya	7 Kali	20.000.000	PAD, DAU, DBH	8 Kali	85.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Masyarakat	
02	16	16	010	Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya pelestarian keragaman dan kekayaan budaya daerah	Blora			Jumlah kegiatan kebudayaan dan cagar budaya yang dimonitor	5 Keg	Terlaksananya kegiatan monitoring /pengawasan cagar budaya dan pemantauan kegiatan adat istiadat blora	5 Keg	10.000.000	PAD, DAU, DBH	10 Keg	25.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	masyarakat	
02	16	16	011	Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya pelestarian keragaman dan kekayaan budaya daerah	Kab. Blora			Jumlah cagar budaya yang terpelihara	2 Lokasi	erawatnya gedung museum mahameru , gedung replika fosil gajah beserta benda cagar budaya di dalam nya.	2 Lokasi	30.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Lokasi	50.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Aset Pemkab Blora	
02	16	16	012	Pengelolaan karya cetak dan karya rekam	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya pelestarian keragaman dan kekayaan budaya daerah	Kab. Blora			Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang didokumentasukan	32 Buah	Tersedianya rekam cetak dan digital potensi cagar budaya Blora.	32 Buah	60.000.000	PAD, DAU, DBH	50 Buah	35.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Masyarakat	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	16	16	013	Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya pelestarian keragaman dan kekayaan budaya daerah	Kab. Blora			Jumlah data situs cagar budaya yang diidentifikasi	500 Data	terlaksana nya kegiatan riset / kajian tentang sejarah kepurbakalaan ,tercetak nya database,banner dan liflet tentang cagar budaya Blora.	500 lembar	5.000.000	PAD, DAU, DBH	1000 Data	40.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Masyarakat	
02	16	17		PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA				Cakupan sumber daya manusia kesenian	90 %					1.672.000.000			2.750.000.000				
								Cakupan gelar seni	100 %												
								Cakupan kajian seni	91 %												
								Cakupan fasilitasi seni	78 %												
02	16	17	001	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya pelestarian keragaman dan kekayaan budaya daerah	Kab. Blora			Jumlah pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah yang dilaksanakan	4 Keg	meningkatkan kreatifitas seniman film & pengembangan kesenian serta kebudayaan daerah di kalangan pelajar & umum, apresiasi seni, festival film remaja & umum, workshop seni	4 Keg	232.000.000	PAD, DAU, DBH	5 Keg	300.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Masyarakat Umum dan Sekolah	
02	16	17	002	Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya pelestarian keragaman dan kekayaan budaya daerah	Kab. Blora			Jumlah informasi tentang seni dan budaya	1 Dokumen	tersedianya database keragaman seni budaya & profil budaya kearifan lokal blora	1 Dokumen	5.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	80.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Masyarakat / Organisasi	
02	16	17	003	Penyelenggaraan dialog kebudayaan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya pelestarian keragaman dan kekayaan budaya daerah	Kab. Blora			Jumlah dialog kebudayaan yang diikuti	1 Keg	Penyelenggaraan dialog kebudayaan/ sarasehan budaya	1 Keg	20.000.000	PAD, DAU, DBH	1	70.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Tokoh Masyarakat / Budayawan	
02	16	17	004	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya pelestarian keragaman dan kekayaan budaya daerah	Kab. Blora			Jumlah pentas seni dan pertunjukan seni yang dilaksanakan	27 Kali	Terlaksananya pagelaran seni budaya daerah dan terpeliharanya budaya, seni tradisional dimasyarakat, pameran seni rupa, parade theater dolanan anak dan Pagelaran seni (barong, tari, kethoprak, wayang kulit , Tayub , Hadroh., dll)	27 Kali	1.000.000.000	PAD, DAU, DBH	30 Kali	750.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Aparatur, Masyarakat, Seniman	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	16	17	005	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya pelestarian keragaman dan kekayaan budaya daerah	BLORA			Jumlah festifal budaya daerah yang diselenggarakan	2 Keg	Meningkatkan apresiasi seni serta meningkatkan kualitas kesenian masyarakat, festival barong , fEstival tayub , Festival Seni tari dan Festival batik blora, parade musik menyambut tahun baru, bantuan penyelenggaraan festival seni budaya di masyarakat.	2 Keg	140.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Keg	500.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Aparatur, Seniman, Masyarakat	
02	16	17	008	Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya pelestarian keragaman dan kekayaan budaya daerah	Kab. Blora			Jumlah LSM dan perusahaan swasta yang difasilitasi kemitraan kebudayaan	1 Lembaga	terjalinya kerjasama pengelolaan budaya bersama mitra LSM/swasta	1 Lembaga	5.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Lembaga	100.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Aparatur dan masyarakat	
02	16	17	009	Fasilitasi pembentukan kemitraan usaha profesi antardaerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya pelestarian keragaman dan kekayaan budaya daerah	Kab. Blora			Jumlah kerjasama dengan institusi, lembaga, usaha profesi tentang seni budaya di luar daerah	1 Kerja Sama	Terselenggaranya kerjasama dengan institusi, lembaga, usaha prifesi tentang seni budaya ditingkat Prop. Jateng dan luar Jawa	1 Kerja Sama	20.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Kerja Sama	200.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Aparatur dan masyarakat	
02	16	17	010	Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antardaerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya pelestarian keragaman dan kekayaan budaya daerah	Kab. Blora			Jumlah keikutsertaan dalam festival kebudayaan antardaerah	2 Kali	Keikutsertaan dalam festifal tari antar daerah, terselenggaranya parade seni budaya tingkat Prop. jateng dan pengiriman duta seni Blora di TMII serta pengiriman Tim kesenian ke Luar jawa	2 Kali	250.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Kali	750.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Aparatur, seniman dan masyarakat	
03				URUSAN PILIHAN																	
03	02			PARIWISATA																	
03	02	15		PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA				Presentase obyek wisata yang dipromosikan	85 %					393.000.000			700.000.000				
								Kunjungan wisata	230.000 orang												
03	02	15	003	Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata	Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya kunjungan wisatawan di obyek wisata unggulan daerah	Kab. Blora			Jumlah Event/ Atraksi Seni/ Budaya yang Dilaksanakan	3 Kali	Mempromosikan pengrajin industri pariwisata Kabupaten Blora	3 Kali	215.000.000	PAD, DAU, DBH	3 Kali	350.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	UKM dan Sekolah	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
03	02	15	005	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya kunjungan wisatawan di obyek wisata unggulan daerah	Kab. Blora			Jumlah Produk Promosi Pariwisata	4 Paket	Pelaksanaan pameran dan promosi kepariwisataan	4 Paket	178.000.000	PAD, DAU, DBH	4 Paket	350.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Masyarakat umum	
03	02	16		PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA				Jumlah obyek wisata unggulan	22 objek					5.660.964.000			4.700.000.000				
								Jumlah restoran	85 buah												
								Jumlah penginapan / hotel	38 buah												
								Jumlah pokdarwis aktif	5 kelompok												
03	02	16	002	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya kunjungan wisatawan di obyek wisata unggulan daerah	Blora			Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Daya Tarik Wisata	5 Lokasi	Terbangunya sarana dan prasarana Daya Tarik Wisata	5 Lokasi	4.938.964.000	DAK FISIK	4 Lokasi	3.000.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Masyarakat umum	
					Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya kunjungan wisatawan di obyek wisata unggulan daerah	Kab. Blora			Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Daya Tarik Wisata	2 Lokasi	Terbangunya sarana dan prasarana Daya Tarik Wisata	2 Lokasi	150.000.000	Dana Infrastruktur	4 Lokasi	500.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Masyarakat umum	
03	02	16	003	Pengembangan jenis paket wisata unggulan	Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya kunjungan wisatawan di obyek wisata unggulan daerah	Kab. Blora			Jumlah Atraksi Wisata yang diselenggarakan	18 Paket	Terselenggaranya atraksi wisata untuk pengenalan obyek wisata	18 Paket	120.000.000	PAD, DAU, DBH	20 Paket	350.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Masyarakat umum	
03	02	16	008	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana obyek wisata	Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya kunjungan wisatawan di obyek wisata unggulan daerah	Kab. Blora			Jumlah fasilitas Sarana dan Prasarana Daya Tarik Wisata yang dipelihara	1 Fasilitas	Terpeliharanya obyek wisata yang rapi, bersih dan nyaman	1 Paket	10.000.000	Dana Infrastruktur	1 Paket	50.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Masyarakat umum	
03	02	16	009	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya kunjungan wisatawan di obyek wisata unggulan daerah				Jumlah Usaha Pariwisata yang telah Didata	6 Dokumen	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kepariwisataan	6 Dokumen	33.000.000	PAD, DAU, DBH	7 Dokumen	250.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Hotel, DTW, Rumah makan dan karaoke	
03	02	16	010	Pemeliharaan obyek wisata	Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya kunjungan wisatawan di obyek wisata unggulan daerah				Jumlah Daya Tarik Wisata yang dipelihara	1 Lokasi	Terwujudnya pemeliharaan obyek wisata	1 Lokasi	397.000.000	Dana Infrastruktur	1 Lokasi	450.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Tirtonadi dan tenaga Harlep	
03	02	16	011	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Sasana Bakti	Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya kunjungan wisatawan di obyek wisata unggulan daerah	Gedung sasana bakti Jl. Alun-alun utara			Jumlah fasilitas yang dipelihara	1 Fasilitas	Telaksananya Pemeliharaan Gedung Sasana Bhakti	1 Paket	2.000.000	Dana Infrastruktur	0 Paket	0	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Sasana Bhakti	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
03	02	16	012	Penataan Kawasan Sunan Pojok	Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya kunjungan wisatawan di obyek wisata unggulan daerah	Kawasan sunan Pojok jl. Alun-alun selatan			Jumlah fasilitas yang dibangun/ditingkatkan	1 Fasilitas	Terlaksananya Area Parkir dan Food court	1 Paket	10.000.000	Dana Infrastruktur	1 Paket	100.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Kawasan Sunan Pojok	
03	02	17		PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN				Pemilihan duta wisata	40 orang					370.000.000			1.700.000.000				
03	02	17	007	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Pengembangan Ekonomi Lokal	-				Jumlah orang peserta Kakang Mbakyu Duta Wisata Kabupaten Blora dan Pemandu Wisata	40 Orang	Terpilihnya duta wisata kabupaten dan provinsi	40 Orang	200.000.000	PAD, DAU, DBH	40 Orang	400.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Pelajar dan Mahasiswa	
03	02	17	008	Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Pengembangan Ekonomi Lokal	-				Jumlah Kelompok Masyarakat yang di kirimkan	3 Kelompok	Terselenggaranya lomba kelompok sadar wisata dan lomba desa wisata dan Festifal desa wisata	3 Kelompok	60.000.000	PAD, DAU, DBH	7 Kelompok	850.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Pokdarwis dan Desa Wisata	
03	02	17	009	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Pengembangan Ekonomi Lokal	-				Jumlah Pembelajaran dari pelaku wisata	1 Lokasi	Terlaksananya Varm Tour Pariwisata di luar daerah	1 Lokasi	60.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Lokasi	200.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Biro perjalanan, Pokdarwis, Desa Wisata	
03	02	17	010	Pembinaan sektor pendukung pariwisata	Pengembangan Ekonomi Lokal	-				Jumlah pembinaan kepada pelaku wisata	6 Jenis	Meningkatkan kemampuan sektor pendukung bidang pariwisata	6 Jenis	50.000.000	PAD, DAU, DBH	7 Jenis	250.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Karaoke, Hotel, Rumah makan, DPW, Pokdarwis, Desa Wisata	
02				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																	
02	13			KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA																	
02	13	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %					0			0				
02	13	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat	100 %	Tersedianya materai @3000 500 lb materai 6000 750 lb dan paket surat	100 %	35.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	38.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	DINPORABUDPAR	
02	13	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	100 %	Tersedianya Jasa listrik, telepon banwich dan internet	12 Bulan	385.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	425.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	DINPORABUDPAR	
02	13	01	003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	Tersedianya belanja jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	5.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	12.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	DINPORABUDPAR	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	13	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100 %	Terpenuhinya pajak 10 sepeda motor dan 6 Mobil Dinas	100 %	15.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	20.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Kendaraan dinas	
02	13	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan	100 %	Tersedianya Jasa administrasi keuangan dan Pengelola barang daerah	100 %	174.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	180.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Aparatur di lingkup DINPORABUDPAR	
02	13	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor	100 %	Lingkungan kantor yeng bersih	100 %	50.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	130.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	DINPORABUDPAR	
02	13	01	009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja	100 %	Peralatan kantor yang optimal	100 %	5.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	12.500.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Peralatan kerja	
02	13	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	100 %	Tersedianya alat tulis kantor sebagai penunjang oprasional kantor	100 %	70.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	90.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	DINPORABUDPAR	
02	13	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100 %	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100 %	18.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	24.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	DINPORABUDPAR	
02	13	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	Penerangan kantor yang optimal	100 %	5.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	9.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	DINPORABUDPAR	
02	13	01	013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	Pekerjaan menjadi lebih lancar	100 %	70.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	200.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
02	13	01	014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga	100 %	Tersedianya peralatan rumah tangga yang optimal	100 %	5.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	75.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Peralatan rumah tangga	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	13	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	Tersedianya surat kabar dan majalah dan buku pengetahuan	100 %	8.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	12.500.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Aparatur di lingkup DINPORABUDPAR	
02	13	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat	100 %	Tersedianya makan dan minum untuk harian pegawai, tamu dan untuk rapat	100 %	75.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	100.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Aparatur di lingkup DINPORABUDPAR	
02	13	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Tersedianya biaya rakor dan konsultasi luar daerah	100 %	145.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	165.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Aparatur di lingkup DINPORABUDPAR	
02	13	01	019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Tersedianya baiaya Rakor dan konsulasi luar daerah	100 %	40.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	78.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Aparatur di Lingkup DINPORABUDPAR	
02	13	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur						0			0				
02	13	02	005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1 Unit	Tersedianya sepeda motor untuk membantu mobilitas pegawai	1 Unit	20.000.000	PAD, DAU, DBH	5 Unit	480.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Aparatur di Lingkup DINPORABUDPAR	
02	13	02	007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan perlengkapan gedung kantor	100 %	Tersedianya kelengkapan untuk menunjang gedung kantor	100 %	50.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	200.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Perlengkapan gedung	
02	13	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan peralatan gedung kantor	100 %	Tersedianya peralatan untuk mendukung fungsi gedung kantor yang optimal	100 %	10.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	125.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Peralatan gedung	
02	13	02	010	Pengadaan mebeler	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan mebeler	100 %	Tersedianya meja kursi tamu, meja kursi rapat, Meja kursi kerja, almari arsip, loker, bupet	100 %	25.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	170.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Mebeller	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	13	02	011	Pengadaan instalasi air, listrik, dan telepon	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan instalasi air, listrik dan telepon	100 %	Tercukupinya air bersih dan penerangan dilingkungan gedung kantor	100 %	10.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	50.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	DINPORABUDPAR	
02	13	02	012	Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor	100 %	Terbangunya halaman belakang (paving) dan Kanopi	100 %	120.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	500.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	DINPORABUDPAR	
02	13	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Terpeliharanya gedung kantor yang optimal	100 %	5.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	30.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Gedung kantor DINPORABUDPAR	
02	13	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	100 %	Terpenuhinya biaya perawatan kendaraan dinas oprasional	100 %	40.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	75.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Kendaraan DInas	
02	13	02	029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeler	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase mebeler dalam kondisi baik	100 %	Terpeliharanya mebeler kantor	100 %	5.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	20.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Mebeller	
02	13	02	031	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi air, listrik, dan telepon	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase instalasi air, listrik, dan telepon dalam kondisi baik	100 %	Instalasi air listrik dan telpon yang berfungsi secara optimal	100 %	5.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	9.500.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	DINPORABUDPAR	
02	13	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				Pemenuhan kebutuhan pakaian seragam dinas	100%					0			0				
02	13	03	002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi				Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	90 Unit	Meningkatnya kedisiplinan aparatur	90 Set	25.000.000	PAD, DAU, DBH	90 Set	50.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Aparatur di Lingkup DINPORABUDPAR	
02	13	03	004	Pengadaan pakaian KORPRI	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi				Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	90 Unit	Meningkatnya kedisiplinan aparatur	90 Set	15.000.000	PAD, DAU, DBH	90 Set	25.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Aparatur di Lingkup DINPORABUDPAR	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan									
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	13	03	005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi				Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	90 Unit	Meningkatnya kedisiplinan aparatur	90 Set	15.000.000	PAD, DAU, DBH	90 Set	25.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Aparatur di Lingkup DINPORABUDPAR	
02	13	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				Peningkatan kapasitas SDM aparatur	100%					0			0				
02	13	05	001	Pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal	1 Orang	Meningkatnya kemampuan SDM aparatur	1 Orang	8.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Orang	15.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Aparatur di Lingkup DINPORABUDPAR	
02	13	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				Pemenuhan kebutuhan pelaporan kinerja dan keuangan	100%					0			0				
02	13	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	Tersusunya laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	1.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	5.500.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	DINPORABUDPAR	
02	13	06	004	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	DINPORABUDPAR			Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	Terselesaikanya laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	1.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Laporan	1.200.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1		
02	13	06	005	Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah rencana kinerja dan penetapan kinerja	3 Dokumen	laporan Renstra, renja dan penetapan kinerja SKPD	3 Laporan	1.000.000	PAD, DAU, DBH	3 Dokumen	1.250.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	DINPORABUDPAR	
02	13	06	007	Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah dokumen RKA-SKPD dan DPA SKPD	2 Dokumen	Terselesaikanya dokumen RKA dan DPA SKPD	2 Dokumen	1.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Dokumen	750.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	DINPORABUDPAR	
TOTAL														26.690.964.000			30.979.200.000				

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KABUPATEN BLORA

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																	
02	17			PERPUSTAKAAN																	
02	17	15		PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				Jumlah Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan	30451					11.079.000.000			1.427.900.000				
								Jumlah Perpustakaan sekolah & Desa yang terbina	215												
								Jumlah pengunjung perpustakaan	105000												
02	17	15	001	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya minat baca di perpustakaan daerah				Jumlah APE yang tersedia	90 Jenis	Meningkatnya minat baca anak melalui permainan dan film edukatif	90 Jenis	100.000.000	PAD, DAU, DBH	95 Jenis	150.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	Pemustaka Dinas Perpustakaa dan Kearsipan	
02	17	15	002	Pengembangan minat dan budaya baca	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya minat baca di perpustakaan daerah				Jumlah pemustaka yang mendapatkan peningkatan kapasitas perpustakaan	1750 Orang	Meningkatnya minat baca masyarakat Kabupaten Blora	1750 Orang	20.000.000	PAD, DAU, DBH	2000 Orang	45.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	Pemustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
					Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya minat baca di perpustakaan daerah				Jumlah jam pelaksanaan oelayanan hari Sabtu dan Minggu	480 Jam	Meningkatnya minat baca masyarakat Kabupaten Blora	480	200.000.000	PAD, DAU, DBH	480 Orang	285.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	Pemustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
02	17	15	003	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya minat baca di perpustakaan daerah				Jumlah lomba perpustakaan	5 Jenis	Meningkatnya minat baca masyarakat Kabupaten Blora	5 Jenis	50.000.000	PAD, DAU, DBH	7 Jenis	55.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	Perpustakaan umu, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	
					Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya minat baca di perpustakaan daerah				Jumlah peserta bintek	40 Orang	Meningkatnya pengetahuan pengelolaan perpustakaan	40 Orang	85.000.000	PAD, DAU, DBH	40 Jenis	110.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	Perpustakaan umu, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	
02	17	15	004	Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya minat baca di perpustakaan daerah				Jumlah peserta rapat koordinasi	50 Orang	Meningkatnya pengetahuan dan kerjasama bidang perpustakaan	50 Orang	55.000.000	PAD, DAU, DBH	55 Orang	100.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	Kepala Desa se Kabupaten Blora	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	17	15	006	Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya minat baca di perpustakaan daerah				Jumlah lokasi cakupan pelayanan perpustakaan keliling	150 Lokasi	Peningkatan budaya baca masyarakat Kab. Blora / Pelajar	150 Lokasi	80.000.000	PAD, DAU, DBH	150 Lokal	90.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	SD/MI, SMP/MTs, Pondok Pesantren, Perpustakaan Desa di Kabupaten Blora	
02	17	15	008	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya minat baca di perpustakaan daerah				Jumlah penyelenggaraan pameran buku	2 Kali	Meningkatnya kebiasaan dan minat baca masyarakat Kabupaten Blora	2 Kali	129.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Kali	140.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	Masyarakat di wilayah Kabupaten Blora	
02	17	15	009	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum di daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya minat baca di perpustakaan daerah				Jumlah bahan pustaka (majalah, buku, koran, tabloid, terbitan duta pustaka)	6430 Eks	Tersedianya buku bacaan, buku siap otomasi dan terbitnya majalah duta pustaka	6430 Eks	300.000.000	PAD, DAU, DBH	6500 Eks	312.900.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blora	
02	17	15	010	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya minat baca di perpustakaan daerah				Jumlah perpustakaan binaan	70 Lokasi	Tersedianya data / laporan perpustakaan binaan	70 Lokasi	30.000.000	PAD, DAU, DBH	100 Lokasi	60.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	Perpustakaan se Kabupaten BLora	
02	17	15	011	Pengembangan sarana informasi perpustakaan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya minat baca di perpustakaan daerah				Jumlah pakat pemeliharaan jaringan otomasi	1 Paket	Meningkatnya layanan perpustakaan yang efektif dan efesien dengan otomasi perpustakaan	1 Paket	30.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Paket	80.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	Pemustaka Kabupaten BLora	
02	17	15	012	Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang Bermutu	Meningkatnya minat baca di perpustakaan daerah				Jumlah gedung layanan perpustakaan yang dibangun	1 Unit	Pembangunan gedung perpustakaan	1 Paket	10.000.000.000	DAK FISIK	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blora dan Seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Blora	
02	17	16		PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN KOLEKSI PUSTAKA				Jumlah bahan pustaka yang sudah diselamatkan/dilestarikan	950					34.000.000			53.000.000				
02	17	16	001	Pendataan karya cetak dan karya rekam	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah buku karya kearifan lokal	25 Eks	Terhimpunnya buku karya kearifan lokal	25 Eks	25.000.000	PAD, DAU, DBH	30 Eks	35.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	Penulils Blora	
02	17	16	003	Pelestarian karya cetak dan karya rekam	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah koleksi yang dilestarikan	3834 Eks	Tabloid / Majalah, Koran dan Kliping yang telah di Jilid	3834 Eks	9.000.000	PAD, DAU, DBH	4048 Eks	18.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	Bahan Pustaka yang rusak	
02	18			KEARSIPAN																	
02	18	16		PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH				Persenate Arsip Tekstual yang terolah dengan baik	9750					755.000.000			755.000.000				
								Jumlah Arsip Non Tekstual yang Terolah dengan baik	450												

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Jumlah Arsip/Dokumen yang telah di duplikat dalam bentuk informatika	18000												
02	18	16	001	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya kualitas pelayanan statistik, kearsipan, persandian, dan transmigrasi				Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan arsip yang tersedia	10 Unit	Rak arsip foto, film dan rak arsip blue print	10 Unit	40.000.000	PAD, DAU, DBH	10 Unit	40.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	Tersedianya sarana prasarana pengolahan dan penyimpanan arsip	
02	18	16	002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya kualitas pelayanan statistik, kearsipan, persandian, dan transmigrasi				Jumlah SKPD yang mendapatkan pembinaan/monitoring/evaluasi kearsipan	40 SKPD	Pengelolaan arsip yang baik di SKPD	40 SKPD	95.000.000	PAD, DAU, DBH	40 SKPD	95.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1		
02	18	16	003	Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya kualitas pelayanan statistik, kearsipan, persandian, dan transmigrasi				Jumlah arsip/dokumen yang telah di duplikat dalam bentuk informatika	18000 Berkas	Jumlah arsip/dokumen yang telah diduplikat dalam bentuk informatika	18000 Berkas	20.000.000	PAD, DAU, DBH	18000 Berkas	20.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	Dokumen/arsip daerah	
02	18	16	005	Pembangunan Data Base Informasi Kearsipan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya kualitas pelayanan statistik, kearsipan, persandian, dan transmigrasi				Jumlah jaringan SIKD dan aplikasi SIMARDI yang dikembangkan dan dipelihara	2 Aplikasi	Tersedianya Jaringan SIKD dan Aplikasi SIMARDI (Aplikasi pengolahan arsip dinamis aktif dan in aktif)	2 Aplikasi	210.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Paket	210.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	Terbentuknya database informasi kearsipan di Kab. Blora	
02	18	16	006	Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya kualitas pelayanan statistik, kearsipan, persandian, dan transmigrasi				Jumlah pengelola arsip yang mengikuti sosialisasi	250 Orang	40 peserta Sosialisasi perda dan 210 peserta bintek pengelola arsip SKPD/desa	250 Orang	200.000.000	PAD, DAU, DBH	250 Orang	200.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	Pengelola kearsipan desa dan SKPD	
02	18	16	007	Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya kualitas pelayanan statistik, kearsipan, persandian, dan transmigrasi				Jumlah penyelenggaraan pameran dan publikasi arsip	2 Kali	Terselenggaranya pameran kearsipan dan publikasi arsip, lomba foto arsip tempo doeloe	2 Kali	190.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Kali	190.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	Masyarakat umum / pengguna arsip	
02	18	17		PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN				Jumlah dokumen/Arsip yang terpelihara dengan baik	128000					150.000.000			150.000.000				
02	18	17	002	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya kualitas pelayanan statistik, kearsipan, persandian, dan transmigrasi	Depo arsip			Jumlah arsip in aktif yang terpelihara	128000 Berkas	Arsip in aktif yang terolah dan terpelihara	128000 Berkas	150.000.000	PAD, DAU, DBH	128000 Berkas	150.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	Dokumen/arsip daerah	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																	
02	17			PERPUSTAKAAN																	
02	17	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%					0			0				
02	17	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat	100 %	250 perangko, 500 materai dan 100 surat tercatat	100 %	3.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	3.200.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	DPK Kab. Blora	
02	17	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	100 %	rekening telepon, air, listrik dan internet	100 %	135.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	227.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	Gedung DPK Kab. Blora	
02	17	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100 %	Pembayaran pajak dan KIR kendaraan dinas/operasional	100 %	11.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	11.500.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	Kendaraan dinas/operasional DPK Kab.Blora	
02	17	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan	100 %	Terbayarnya honor tenaga administrasi keuangan dan barang daerah	100 %	106.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	106.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	Petugas administrasi keuangan dan barang daerah	
02	17	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor	100 %	Pembelian bahan dan alat kebersihan	100 %	33.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	135.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	Gedung DPK Kab. blora	
02	17	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	100 %	Pengadaan alat tulis kantor	100 %	34.716.000	PAD, DAU, DBH	100 %	370.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	Karyawan/Karyawati DPK Kab. Blora	
02	17	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100 %	Pengadaan barang cetakan dan penggandaan	100 %	30.300.000	PAD, DAU, DBH	100 %	32.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	DPK Kab. Blora	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	17	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	Pengadaan peralatan listrik	100 %	14.300.000	PAD, DAU, DBH	100 %	17.500.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	DPK Kab. Blora	
02	17	01	013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	Proyektor, bendera, umbul-umbul, bunga, pot bunga, taplak meja, flashdisk dll	100 %	34.500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	155.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	DPK Kab. Blora	
02	17	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	Tersedianya bahan bacaan/koran	100 %	5.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	5.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	DPK Kab. Blora	
02	17	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat	100 %	Tersedianya makan dan minum harian pegawai, manmin rapat, manmin tamu dan manmin kegiatan	100 %	57.100.000	PAD, DAU, DBH	100 %	57.500.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	Karyawan dan tamu DPK Kab. Blora	
02	17	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100 %	166.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	180.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	ASN DPK kab. Blora	
02	17	01	019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	100 %	20.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	22.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	ASN DPK Kab. Blora	
02	17	01	020	Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan dukungan pelayanan perkantoran	100 %	Terbayarnya tenaga honorer dan tenaga lepas lainnya	100 %	40.700.000	PAD, DAU, DBH	4 Orang	78.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	Tenaga ahli/narasumber non PNS	
02	17	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur						0			0				
								Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%												

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	17	02	005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	7 Unit	Kendaraan dinas/operasional roda dua	7 Unit	140.000.000	PAD, DAU, DBH	3 Unit	50.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	ASN DPK Kab. Blora	
02	17	02	010	Pengadaan mebeler	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan mebeler	100 %	podium 1 unit, almari penyimpanan 1 unit, meja kerja pejabat 2 unit, kursi kerja pejabat 2 unit	100 %	30.000.000	PAD, DAU, DBH	3 Unit	30.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	DPK Kab. Blora	
02	17	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	100 %	Pemenuhan jasa servis dan BBM kendaraan dinas/operasional	100 %	80.300.000	PAD, DAU, DBH	100 %	102.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	Kendaraan Dinas/Operasional DPK Kab. Blora	
02	17	02	028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Jasa servis peralatan gedung kantor	100 %	24.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	25.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	Peralatan gedung DPK Kab.Blora	
02	17	02	029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeler	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase mebeler dalam kondisi baik	100 %	Jasa pemeliharaan mebeler	100 %	10.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	15.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	DPK Kab. Blora	
02	17	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				Pemenuhan kebutuhan pakaian seragam dinas	37					0			0				
02	17	03	005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi				Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	44 Unit	Pakaian seragam hari-hari tertentu	44 Unit	25.000.000	PAD, DAU, DBH	44 Unit	27.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	Karyawan/Karayawati DPK Kab. Blora	
02	17	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				Peningkatan kapasitas SDM aparatur	15					0			0				
02	17	05	001	Pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal	15 Orang	Pegawai/ASN yang yang dikirim mengikuti diklat/bimtek/pelatihan	15 Orang	25.000.000	PAD, DAU, DBH	15 Orang	27.500.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	Karyawan/Karyawati DPK Kab. Blora	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	17	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				Pemenuhan kebutuhan pelaporan kinerja dan keuangan	100%					0			0				
02	17	06	005	Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah rencana kinerja dan penetapan kinerja	6 Dokumen	Dokumen perencanaan dan pelaporan	6 Dokumen	24.300.000	PAD, DAU, DBH	6 Dokumen	8.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	DPK Kab. Blora	
TOTAL														13.067.216.000			4.070.100.000				

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KABUPATEN BLORA

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
03				URUSAN PILIHAN																	
03	01			KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
03	01	20		PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN				Tingkat cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	57 %					2.871.835.900			1.070.000.000				
								Produksi perikanan budidaya	870.421 kg												
03	01	20	001	Pengembangan bibit ikan unggul	Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya produksi dan produktvitas perikanan				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pembibitan ikan unggul	100 %	Pembangunan sumur bor air tawar untuk bak pengelolaan limbah	2 Unit	55.000.000	DAK FISIK	100 %	0	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1	BBI	
					Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya produksi dan produktvitas perikanan				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pembibitan ikan unggul	100 %	Paket penetasan	1 Paket	20.000.000	DAK FISIK	100 %	0	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1	BBI	
					Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya produksi dan produktvitas perikanan				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pembibitan ikan unggul	100 %	Penyediaan calon induk unggul dan pakannya	1 Paket	180.000.000	DAK FISIK	100 %	0	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1	BBI	
					Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya produksi dan produktvitas perikanan				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pembibitan ikan unggul	100 %	Paket pengukuran dan pemeriksaan kesehatan	1 Paket	25.000.000	DAK FISIK	100 %	0	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1	BBI	
					Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya produksi dan produktvitas perikanan				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pembibitan ikan unggul	100 %	Paket pemeliharaan larva	1 Paket	15.000.000	DAK FISIK	100 %	0	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1	BBI	
					Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya produksi dan produktvitas perikanan	BBI Kajengan dan Purwosari			Jumlah bibit ikan unggul yang diproduksi	150000 Ekor	Tersedianya pakan ikan dan cacing sutra di Balai Benih Ikan Kajengan dan Purwosari	1 Paket	110.500.000	PAD, DAU, DBH	2 %	120.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1	BBI	
03	01	20	002	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya produksi dan produktvitas perikanan				Jumlah pokdakan yang terdampingi dalam pembudidayaan ikan	16 Kelompok	Meningkatnya ketrampilan Pokdakan dan UPR dalam berbudidaya ikan	9 Kelompok	25.000.000	PAD, DAU, DBH	36 Kelompok	100.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1	kelompok ternak ikan	
03	01	20	003	Pembinaan dan pengembangan perikanan	Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya produksi dan produktvitas perikanan				Jumlah kelompok pelaku perikanan yang terbina dalam pengembangan perikanan	16 Kelompok	Berkembangnya kelompok/mandiri pelaku perikanan di Kab. Blora	16 Kelompok	35.000.000	PAD, DAU, DBH	47 Kelompok	100.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1		
03	01	20	004	Pengembangan Kolamisasi Pedesaan	Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya produksi dan produktvitas perikanan				Jumlah pokdakan yang diberikan bantuan sarana dan prasarana kolam yang baik	1 Kelompok	Rehab kolam atau bak pemijahan	359 m2	125.325.900	DAK FISIK	2 Kelompok	200.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blora	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya produksi dan produktvitas perikanan	1.Desa Sidomulyo, Kec. Banjarejo; 2. Desa Tinapan, Kec. Todanan			Jumlah pokdakan yang diberikan bantuan sarana dan prasarana kolam yang baik	2 Kelompok	Tersedianya paket budidaya patin di kolam	2 Paket	200.000.000	DAK FISIK	0 Kelompok	0	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	3	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blora	
		Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya produksi dan produktvitas perikanan	1. Desa Nglobo, Kec. Jiken; 2. Ds. Nglarohgunung, Kec. Jepon; 3. Ds. Andongrejo, Kec. Blora; 4. Ds. Bajo, Kec. Kedungtuban; 5. Desa Wado, Kec. Kedungtuban			Jumlah pokdakan yang diberikan bantuan sarana dan prasarana kolam yang baik	5 Kelompok	Tersedianya paket budidaya lele di kolam	5 Paket	500.000.000	DAK FISIK	0 Kelompok	0	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	3	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blora	
		Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya produksi dan produktvitas perikanan	BBI Kajengan, Todanan			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana BBI	100 %	Tersedianya bangunan kolam/bak pengolahan limbah yang memadahi	114 m2	140.220.000	DAK FISIK	0 Kelompok	0	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	3	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blora	
		Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya produksi dan produktvitas perikanan	Kel. Karangjati, Kec. Blora			Jumlah pokdakan yang diberikan bantuan sarana dan prasarana kolam yang baik	1 Kelompok	Tersedianya paket percontohan budidaya gurame	1 Paket	100.000.000	DAK FISIK	0 Kelompok	0	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	3	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blora	
		Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya produksi dan produktvitas perikanan	BBI Kajengan, Todanan			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana BBI	100 %	Tersedianya bangunan tandon yang memadahi	8 m2	92.500.000	DAK FISIK	0 Kelompok	0	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	3	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blora	
		Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya produksi dan produktvitas perikanan	BBI Kajengan, Todanan			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana BBI	100 %	Tersedianya saluran air pasok (masuk) dan buang (keluar) dalam kondisi baik	230 m2	265.190.000	DAK FISIK	0 Kelompok	0	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	3	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blora	
		Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya produksi dan produktvitas perikanan	BBI Kajengan, Todanan			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana BBI	100 %	Tersedianya bak sterilisasi roda kendaraan dan bak disinfeksi alas kaki/footbath	139 m2	125.100.000	DAK FISIK	0 Kelompok	0	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	3	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blora	
		Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya produksi dan produktvitas perikanan				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana BBI	100 %	Paket pemijahan buatan	1 Paket	40.000.000	DAK FISIK	0 Kelompok	0	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blora	
		Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya produksi dan produktvitas perikanan	BBI Desa Kajengan, Kec. Todanan			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana BBI	100 %	Tersedianya kolam atau bak induk/calon induk dalam kondisi baik	1344 m2	672.000.000	DAK FISIK	0 Kelompok	0	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	3	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blora	
		Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya produksi dan produktvitas perikanan				Jumlah pokdakan yang diberikan bantuan sarana dan prasarana kolam yang baik	2 Kelompok	Tersedianya bibit ikan lele	2000 Ekor	45.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Kelompok	300.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blora	
		Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya produksi dan produktvitas perikanan				Jumlah pokdakan yang diberikan bantuan sarana dan prasarana kolam yang baik	1 Kelompok	Pengembangan budidaya ikan	1 Kel	50.000.000	PAD, DAU, DBH	0 Kelompok	0	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blora	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
03	01	20	005	Pendataan dan pengolahan data statistik perikanan	Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya produksi dan produktvitas perikanan				Jumlah dokumen yang memuat data statistik perikanan	4 Dokumen	Tersedianya sampling data statistik perikanan	4 Dokumen	15.000.000	PAD, DAU, DBH	4 Dokumen	100.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1		
03	01	20	007	Penebaran bibit ikan di perairan umum	Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya produksi dan produktvitas perikanan	Kab. Blora			Jumlah bibit ikan unggul yang ditebar	21000 Ekor	Tersalurnya benih ikan di perairan umum	21000 Ekor	36.000.000	PAD, DAU, DBH	80000 Ekor	150.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1		
03	01	21		PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP				Produksi perikanan tangkap	296 ton					1.110.000.000			150.000.000				
03	01	21	001	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	Pengembangan Ekonomi Lokal	-				Jumlah Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap yang Terdampingi dengan baik	6 Kelompok	Terbinanya nelayan tangkap	6 Kelompok	10.000.000	PAD, DAU, DBH	6 Kelompok	150.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1	kelompok nelayan perikanan tangkap	
					Pengembangan Ekonomi Lokal	-	1. Desa Nglungger, Kec. Kradenan; 2. Desa Ketuwan, Kec. Kedungtuban; 3. Desa Nglanjuk, Kec. Cepu; 4. Desa Panolan, Kec. Kedungtuban; 5. Desa Jipang, Kec. Cepu			Jumlah Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap yang Terdampingi dengan baik	55 Kelompok	Tersedianya perahu/kapal penangkap ikan berukuran kecil beserta mesin, alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan	55 Paket	1.100.000.000	DAK FISIK	0 Kelompok	0	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	3	kelompok nelayan perikanan tangkap	
03	01	23		PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN				Tingkat Konsumsi Ikan Penduduk	10 kg/kap					140.000.000			180.000.000				
								Jumlah produksi hasil olahan ikan	958 ton												
03	01	23	002	Optimalisasi pengelolaan produksi perikanan	Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Kab. Blora dan Prov. Jateng			Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan pengelolaan produksi perikanan	5 Kelompok	Terselenggaranya lomba cipta menu berbahan baku ikan	5 Jenis	140.000.000	PAD, DAU, DBH	5 Kelompok	180.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1		
03	03			PERTANIAN																	
03	03	20		PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK				Jumlah ternak yang terlayani pengobatan dan pencegahan penyakit	5000 ekor					6.447.836.000			1.055.000.000				
03	03	20	001	Pendataan masalah peternakan	Pengembangan Ekonomi Lokal	Terpeliharanya produksi dan produktivitas pertanian dan populasi hewan ternak				Jumlah buku pendataan masalah peternakan yang disusun	1 Buku	Tersedianya informasi tentang data statistik dan parameter peternakan	1 Dokumen	15.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Buku	150.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
03	03	20	002	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Pengembangan Ekonomi Lokal	Terpeliharanya produksi dan produktivitas pertanian dan populasi hewan ternak	3 Puskeswan : Puskeswan Kel. Balun, Kec. Cepu; Puskeswan Ds. Jagong,Kec. Kunduran; Desa Kamolan, Kec. Blora			Jumlah ternak yang terlayani dalam Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular ternak	5000 Ekor	Tersedianya peralatan Lab.Keswan yang memadahi	3 Paket	600.000.000	DAK FISIK	5000 Ekor	0	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	3		
					Pengembangan Ekonomi Lokal	Terpeliharanya produksi dan produktivitas pertanian dan populasi hewan ternak	Luar Daerah Blora			Jumlah ternak yang terlayani dalam Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular ternak	5000 Ekor	Terampilnya petugas paramedis keswan	2 Orang	60.000.000	PAD, DAU, DBH	4 Ekor	120.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1		
					Pengembangan Ekonomi Lokal	Terpeliharanya produksi dan produktivitas pertanian dan populasi hewan ternak	Puskeswan			Jumlah ternak yang terlayani dalam Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular ternak	5000 Ekor	Tersedianya stok obat untuk hewan ternak	1 Paket	308.836.000	PAD, DAU, DBH	500 Ekor	350.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1		
03	03	20	004	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	Pengembangan Ekonomi Lokal	Terpeliharanya produksi dan produktivitas pertanian dan populasi hewan ternak	Kab. Blora			Jumlah ternak yang diawasi perdagangannya antar daerah	100 Ekor	Terlaksananya pengambilan dan pemeriksaan sample brucellosis ternak dan pemeriksaan kebuntingan pada sapi	100 Ekor	19.000.000	PAD, DAU, DBH	600 Ekor	125.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1		
03	03	20	006	Pelayanan Peningkatan Keamanan Produk-Produk Pangan Asal Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	Pengembangan Ekonomi Lokal	Terpeliharanya produksi dan produktivitas pertanian dan populasi hewan ternak	RPH Desa Kamolan, Kec. Blora			Jumlah sampel produk pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal yang diperiksa	106 Sampel	Tersedianya perlatan RPH yang memadahi	1 Paket	1.000.000.000	DAK FISIK	106 Sampel	0	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	3		
					Pengembangan Ekonomi Lokal	Terpeliharanya produksi dan produktivitas pertanian dan populasi hewan ternak	Kab. Blora			Jumlah sampel produk pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal yang diperiksa	106 Sampel	Terlaksananya medical check up terhadap bahan pangan asal ternak	106 Ekor	40.000.000	PAD, DAU, DBH	250 Sampel	250.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1		
03	03	20	007	Monitoring Penerapan Kesejahteraan Hewan dan Pencegahan Serta Penanggulangan Penyaakit Zoonosis	Pengembangan Ekonomi Lokal	Terpeliharanya produksi dan produktivitas pertanian dan populasi hewan ternak	Kab. Blora			Jumlah pelaku usaha yang dimonitoring terkait penerapan kesejahteraan hewan dan pencegahan serta penanggulangan penyakit zoonosis	10 pelaku usaha	Meningkatnya pengetahuan pelaku usaha tentang penerapan kesrawan	10 pelaku usaha	35.000.000	PAD, DAU, DBH	15 pelaku usaha	60.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1		
03	03	20	008	Pembangunan/Rehab Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan/Ternak	Pengembangan Ekonomi Lokal	Terpeliharanya produksi dan produktivitas pertanian dan populasi hewan ternak	Desa Jagong, Kec. Kunduran			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Puskeswan	100 %	Tersedianya gedung Puskeswan dalam kondisi baik	1 Paket	75.000.000	DAK FISIK	0 %	0	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	3	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blora	
					Pengembangan Ekonomi Lokal	Terpeliharanya produksi dan produktivitas pertanian dan populasi hewan ternak	Desa Wulung, Kec. Randublatung			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Puskeswan	100 %	Tersedianya bangunan Puskeswan di Kec. Randublatung yang memadahi	1 Unit	600.000.000	DAK FISIK	0 %	0	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	3	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blora	
					Pengembangan Ekonomi Lokal	Terpeliharanya produksi dan produktivitas pertanian dan populasi hewan ternak	Desa Balun, Kec. Cepu			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana RPH	100 %	Tersedianya gedung RPH Cepu dalam kondisi baik	1 Paket	195.000.000	DAK FISIK	0 %	0	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	3	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blora	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Pengembangan Ekonomi Lokal	Terpeliharanya produksi dan produktivitas pertanian dan populasi hewan ternak	Desa Kamolan, Kec. Blora			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana RPH	100 %	Tersedianya bangunan Rumah Potong Hewan (RPH) yang memadahi	1 Unit	3.000.000.000	DAK FISIK	0 %	0	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	3	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blora	
					Pengembangan Ekonomi Lokal	Terpeliharanya produksi dan produktivitas pertanian dan populasi hewan ternak				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana RPH	100 %	Tersedianya lahan siap pakai untuk pembangunan RPH	1 Paket	500.000.000	Dana Infrastruktur	0 %	0	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blora	
03	03	21		PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN				Populasi Sapi Potong	247494					8.478.842.000			1.714.400.000				
								Populasi Kambing	140513												
03	03	21	001	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak	Pengembangan Ekonomi Lokal	Terpeliharanya produksi dan produktivitas pertanian dan populasi hewan ternak	BIBD			Jumlah kelompok ternak yang diberikan bantuan sarana dan prasarana pembibitan ternak	1 Kelompok	Tersedianya sarpras BIBD	1 Paket	25.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Kelompok	50.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1	BIBD	
03	03	21	002	Pembibitan dan perawatan ternak	Pengembangan Ekonomi Lokal	Terpeliharanya produksi dan produktivitas pertanian dan populasi hewan ternak	BIBD Tunjungan			Jumlah hewan ternak mendapatkan perawatan dan pembibitan	1 Kelompok	Tersedianya pengadaan peralatan laboratorium Inseminasi Buatan yang memadahi	1 Paket	3.300.000.000	DAK FISIK	1 Kelompok	0	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	3	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blora	
					Pengembangan Ekonomi Lokal	Terpeliharanya produksi dan produktivitas pertanian dan populasi hewan ternak	DInas Peternakan dan Perikanan Kab. Blora			Jumlah hewan ternak mendapatkan perawatan dan pembibitan	3 Kelompok	Terpenuhinya sarpras operasional	3 Paket	130.000.000	PAD, DAU, DBH	3 Kelompok	150.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blora	
03	03	21	003	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Pengembangan Ekonomi Lokal	Terpeliharanya produksi dan produktivitas pertanian dan populasi hewan ternak	Kab. Blora			Jumlah bibit ternak yang terdistribusi ke masyarakat	4 Ekor	Terlaksananya verifiksi kelompok	16 Kec	25.000.000	PAD, DAU, DBH	4 Ekor	30.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1		
					Pengembangan Ekonomi Lokal	Terpeliharanya produksi dan produktivitas pertanian dan populasi hewan ternak	Kab. Blora			Kelompok ternak Mukti Lestari RT.02 RW.05	4 Ekor	Tersalurnya ternak sapi indukan kepada masyarakat	4 Ekor	100.000.000	PAD, DAU, DBH	10 Ekor	295.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1		
					Pengembangan Ekonomi Lokal	Terpeliharanya produksi dan produktivitas pertanian dan populasi hewan ternak				Jumlah bibit ternak yang terdistribusi ke masyarakat	10 Ekor	Pendistribusian kambing kepada masyarakat	10 Ekor	25.000.000	PAD, DAU, DBH	0 Ekor	0	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1		RESES
03	03	21	006	Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak	Pengembangan Ekonomi Lokal	Terpeliharanya produksi dan produktivitas pertanian dan populasi hewan ternak	Kab. Blora			Jumlah kelompok ternak yang diberikan bantuan vaksin dan pakan ternak ternak	5 Kelompok	Meningkatnya ketrampilan kelompok	5 Kelompok	24.874.000	PAD, DAU, DBH	6 Kelompok	100.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
03	03	21	009	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Pengembangan Ekonomi Lokal	Terpeliharanya produksi dan produktivitas pertanian dan populasi hewan ternak	Kab. Blora			Jumlah laporan monitong dan evaluasi pelaksanaan program	12 Laporan	Tersedianya pelaporan hasil monev dan verifikasi proposal	12 Bulan	40.800.000	PAD, DAU, DBH	12 Laporan	64.400.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1		
03	03	21	013	Pendampingan program perbibitan nasional	Pengembangan Ekonomi Lokal	Terpeliharanya produksi dan produktivitas pertanian dan populasi hewan ternak	Kab. Blora			Jumlah kelompok ternak yang didampingi dalam Program Perbibitan Nasional	4 Kelompok	Berkembangnya dan meningkatnya pengetahuan kelompok perbibitan	4 Kelompok	48.252.000	PAD, DAU, DBH	5 Kelompok	70.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1		
03	03	21	014	Sentra Peternakan Rakyat (SPR)	Pengembangan Ekonomi Lokal	Terpeliharanya produksi dan produktivitas pertanian dan populasi hewan ternak	Kab. Blora			Jumlah kelompok ternak yang didampingi dalam pengembangan Sentra Peternakan Rakyat (SPR)	8 Kelompok	Terbinanya kelompok SPR	8 Kelompok	9.916.000	PAD, DAU, DBH	10 Kelompok	70.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1		
03	03	21	015	Peningkatan Angka Kebuntingan Sapi Induk	Pengembangan Ekonomi Lokal	Terpeliharanya produksi dan produktivitas pertanian dan populasi hewan ternak	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora			Jumlah Sapi Induk yang bunting	20000 Ekor	Tersedianya sarana angkutan N2 Cair	1 Paket	800.000.000	DAK FISIK	20000 Ekor	0	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	3		
					Pengembangan Ekonomi Lokal	Terpeliharanya produksi dan produktivitas pertanian dan populasi hewan ternak	Balai Pelatihan			Jumlah Sapi Induk yang bunting	20000 Ekor	Tersedianya petugas ATR/ISRA yang bersertfikasi	10 Orang	75.000.000	PAD, DAU, DBH	20000 Ekor	75.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1		
					Pengembangan Ekonomi Lokal	Terpeliharanya produksi dan produktivitas pertanian dan populasi hewan ternak	Balai Pelatihan			Jumlah Sapi Induk yang bunting	20000 Ekor	Tersedianya petugas PKb yang bersertifikasi	20 Orang	150.000.000	PAD, DAU, DBH	20 Ekor	150.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1		
					Pengembangan Ekonomi Lokal	Terpeliharanya produksi dan produktivitas pertanian dan populasi hewan ternak	Kab. Blora			Jumlah Sapi Induk yang bunting	20000 Ekor	Tersusunnya laporan hasil pendampingan Upsus Siwab	12 Bulan	580.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Ekor	600.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1		
					Pengembangan Ekonomi Lokal	Terpeliharanya produksi dan produktivitas pertanian dan populasi hewan ternak	Luar daerah blora			Jumlah Sapi Induk yang bunting	20000 Ekor	Tersedianya para petugas bersertifikasi sebagai inseminator	40 Orang	300.000.000	PAD, DAU, DBH	20000 Ekor	60.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1		
					Pengembangan Ekonomi Lokal	Terpeliharanya produksi dan produktivitas pertanian dan populasi hewan ternak				Jumlah Sapi Induk yang bunting	2000 Ekor	Pelayanan IB	2000 Ekor	100.000.000	PAD, DAU, DBH	0 Ekor	0	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1		
03	03	21	016	Pembangunan/Rehab Sarana dan Prasarana Peningkatan Hasil Produksi Peternakan	Pengembangan Ekonomi Lokal	Terpeliharanya produksi dan produktivitas pertanian dan populasi hewan ternak	BIBD Tunjungan			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana BIBD	100 %	Tersedianya perbaikan kandang Bull, kandang koleksi semen, paving Balai, Gudang Pakan dalam keadaan baik	4 Paket	745.000.000	DAK FISIK	0 %	0	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	3	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blora	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Pengembangan Ekonomi Lokal	Terpeliharanya produksi dan produktivitas pertanian dan populasi hewan ternak	BIBD Desa Sambongrejo, Kec. Tunjungan			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana BIBD	100 %	Tersedianya bangunan laboratorium BIBD yang representatif	1 Unit	2.000.000.000	DAK FISIK	0 %	0	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	3	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blora	
03	03	22		PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN				Jumlah promosi pemasaran hasil produksi peternakan unggulan	2 kali					313.364.000			935.000.000				
03	03	22	004	Pembangunan pusat-pusat etalase/eksebisi/promosi atas hasil produksi peternakan	Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Kabupaten Blora			Jumlah unit promosi atas hasil produksi peternakan yang dibangun	1 Unit	Terlaksananya promosi hasil produksi peternakan dengan menyebarka leafleat ke masyarakat	100 lembar	20.000.000	PAD, DAU, DBH	100 Unit	120.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1		
03	03	22	007	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	Pengembangan Ekonomi Lokal	-				Jumlah keikutsertaan/penyelenggaraan dalam acara promosi hasil produksi peternakan unggulan daerah	1 Kali	Terselenggaranya lomba ternak sapi	1 Kali	274.274.000	PAD, DAU, DBH	3 Kali	700.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1	kelompok ternak	
03	03	22	010	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat	Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blora			Jumlah dokumen yang memuat informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat	12 Dokumen	Tersedianya dokumen informasi pasar atas hasil peternakan per bulan	12 Dokumen	9.090.000	PAD, DAU, DBH	12 Dokumen	45.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1		
03	03	22	011	Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat	Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blora			Jumlah kelompok peternak yang mendapatkan penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat	1 Kelompok	Terselenggaranya Bintek/Pelatihan olahan hasil produk peternakan	1 Paket	10.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Kelompok	70.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1		
03	03	23		PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN										2.094.840.000			1.400.000.000				
03	03	23	002	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Pengembangan Ekonomi Lokal	-				Jumlah Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna yang tersedia	1 Unit	Tersedianya bangunan unit pengolahan pakan	1 Unit	750.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Unit	0	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1		
					Pengembangan Ekonomi Lokal	-				Jumlah Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna yang tersedia	1 Unit	Tersedianya sarpras teknologi peternakan tepat guna	1 Paket	544.840.000	PAD, DAU, DBH	1 Unit	600.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1		
					Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blora			Jumlah Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna yang tersedia	1 Unit	Terselenggaranya pelatihan pakan ternak (Bank Pakan)	1 Paket	800.000.000	DBHCHT	0 Unit	800.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1		
03				URUSAN PILIHAN																	
03	01			KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
03	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	12 bulan					0			0				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
03	01	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat	100 %	Lancarnya pelayanan administrasi dan surat menyurat	100 %	2.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	3.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1		
03	01	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab.Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	100 %	Lancarnya komunikasi lewat telepon, internet, tersedianya air bersih dan penerangan kantor	100 %	76.250.000	PAD, DAU, DBH	100 %	110.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1		
03	01	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100 %	Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional siap pakai	100 %	21.250.000	PAD, DAU, DBH	100 %	25.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1		
03	01	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab.Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan	100 %	Meningkatnya kinerja pegawai dan tertibnya administrasi kegiatan	100 %	130.830.000	PAD, DAU, DBH	100 %	155.130.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1		
03	01	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor	100 %	Terpeliharanya kebersihan dan terciptanyan kenyamanan kantor	100 %	41.190.000	PAD, DAU, DBH	100 %	41.192.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1		
03	01	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Peternakan dan Perikanan kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	100 %	Lancarnya penyelenggaraan administrasi perkantoran	100 %	68.750.000	PAD, DAU, DBH	100 %	77.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1		
03	01	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100 %	Terpenuhinya bahan cetakan dan penggandaan	100 %	19.650.000	PAD, DAU, DBH	100 %	22.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1		
03	01	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	Tersedianya komponen alat listrik dan elektronik	100 %	11.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	14.500.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1		
03	01	01	014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga	100 %	Tersedianya peralatan rumah tangga	100 %	4.020.000	PAD, DAU, DBH	100 %	28.800.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
03	01	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	6.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	14.500.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1		
03	01	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat	100 %	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu	100 %	98.395.000	PAD, DAU, DBH	100 %	117.370.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1		
03	01	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Regional dan Nasional			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Terlaksananya rakor tingkat regional maupun nasional	100 %	467.058.000	PAD, DAU, DBH	100 %	448.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1		
03	01	01	019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	16 Kecamatan			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Terlaksanaya fungsi koordinasi organisasi	100 %	100.500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	200.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1		
03	01	01	020	Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blora			Persentase pemenuhan dukungan pelayanan perkantoran	100 %	Terpenuhinya honor pegawai tidak tetap sopir dan penjaga keamanan kantor	100 %	119.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	119.300.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1		
03	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	12 bln					0			0				
03	01	02	003	Pembangunan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Jl. Blora - Rembang Km. 3 Blora (eks Gedung Dinpertan KP)			Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 Unit	Tersedianya gedung kantor yang memadai	1 Unit	1.000.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Unit	5.000.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	3		
03	01	02	005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blora			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	2 Unit	Tersedianya sarana transportasi untuk operasional kantor	2 Unit	40.000.000	PAD, DAU, DBH	10 Unit	250.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1		
03	01	02	007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blora			Persentase pemenuhan perlengkapan gedung kantor	100 %	Tersedianya filling kabinet	100 %	20.605.000	PAD, DAU, DBH	100 %	263.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
03	01	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blora			Persentase pemenuhan peralatan gedung kantor	100 %	Tersedianya peralatan gedung kantor	100 %	72.600.000	PAD, DAU, DBH	100 %	288.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1		
03	01	02	010	Pengadaan mebeler	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blora			Persentase pemenuhan mebeler	100 %	Tercukupinya mebeler yang menunjang kinerja aparatur	100 %	19.600.000	PAD, DAU, DBH	100 %	137.900.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1		
03	01	02	011	Pengadaan instalasi air, listrik, dan telepon	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blora			Persentase pemenuhan instalasi air, listrik dan telepon	100 %	Tersedianya jaringan listrik dan daya listrik	100 %	1.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	10.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1		
03	01	02	012	Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blora			Persentase pemenuhan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor	100 %	Tersedianya pagar yang memadai untuk kemanan kantor	100 %	1.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	150.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1		
03	01	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blora			Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Terawatnya gedung kantor	100 %	10.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	45.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1		
03	01	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blora			Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	100 %	Terawatnya kendaraan dinas/operasional	100 %	110.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	120.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1		
03	01	02	026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blora			Persentase perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Terawatnya perlengkapan gedung kantor	100 %	3.500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	6.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1		
03	01	02	028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blora			Persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Terawatnya peralatan gedung kantor	100 %	5.200.000	PAD, DAU, DBH	100 %	7.500.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1		
03	01	02	029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeler	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blora			Persentase mebeler dalam kondisi baik	100 %	Terawatnya mebeler gedung kantor	100 %	3.500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	6.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
03	01	02	042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BBI Kajengan dan Purwosari			Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	2 Unit	Terlaksananya Rehab Kolam Ikan di 2 lokasi BBI	2 Lokasi	1.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Unit	150.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1		
03	01	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				Pemenuhan kebutuhan pakaian seragam dinas	150 stel					0			0				
03	01	03	005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blora			Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	150 Unit	Terpenuhinya kebutuhan pakaian olahraga untuk menunjang kinerja aparatur	150 Unit	97.500.000	PAD, DAU, DBH	150 Set	100.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1		
03	01	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				Peningkatan kapasitas SDM aparatur	12 bln					0			0				
03	01	05	001	Pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kab. Blora / Luar Blora			Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal	2 Orang	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blora	2 Orang	10.800.000	PAD, DAU, DBH	6 Orang	30.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1		
03	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				Pemenuhan kebutuhan pelaporan kinerja dan keuangan	7 dok					0			0				
								Nilai Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	80%												
03	01	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blora			Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 Laporan	Tersedianya laporan LPPD dan LKJIP	2 Laporan	31.550.000	PAD, DAU, DBH	2 Laporan	35.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1		
03	01	06	004	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blora			Jumlah laporan keuangan akhir tahun	2 Laporan	Tersedianya laporan keuangan/Calk dan KIB	2 Laporan	24.350.000	PAD, DAU, DBH	2 Laporan	30.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
03	01	06	005	Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blora			Jumlah rencana kinerja dan penetapan kinerja	3 Dokumen	Tersusunnya renstra, renja dan penetapan kinerja	3 Dokumen	18.166.000	PAD, DAU, DBH	3 Dokumen	30.000.000	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1		
TOTAL														24.092.981.900			14.538.592.000				

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KABUPATEN BLORA

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																	
02	03			PANGAN																	
02	03	15		PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN				Ketersediaan energi perkapita	286.669,91 ton					2.489.000.000			3.525.000.000				
								Ketersediaan pangan utama	3,184018485 kkal/kap/hari												
								Ketersediaan protein perkapita	78,05 gr/kap/hari												
								Penguatan cadangan pangan	20.000 ton												
								Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	77,78 %												
								Stabilitas harga dan pasokan pangan	90 %												
								Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	67,2 %												
								Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	90 %												
								Penanganan desa rentan pangan	4 Desa												
02	03	15	001	Penanganan daerah rawan pangan	Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya akses, distribusi dan konsumsi pangan masyarakat	Kabupaten Blora			Jumlah desa tertanggulanginya kerawanan pangan dan gizi masyarakat	3 Desa	Jumlah bantuan bahan pangan non beras oleh masyarakat	300 Paket	50.000.000	PAD, DAU, DBH	3 Desa	100.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Desa Rawan pangan	
					Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya akses, distribusi dan konsumsi pangan masyarakat	Kabupaten Blora			Jumlah desa tertanggulanginya kerawanan pangan dan gizi masyarakat	4 Desa	Terbacanya Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan	5 SKPD	35.000.000	PAD, DAU, DBH	5 Desa	50.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Desa Rawan pangan	
02	03	15	003	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya akses, distribusi dan konsumsi pangan masyarakat	Kabupaten Blora			Jumlah dokumen Laporan Neraca Bahan Makanan (NBM)	5 Dokumen	Jumlah Buku Informasi Neraca Bahan Makanan di Kabupaten Blora oleh pemangku kebijakan	5 SKPD	45.000.000	PAD, DAU, DBH	5 Buku	50.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Masyarakat Blora	
02	03	15	005	Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah	Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya akses, distribusi dan konsumsi pangan masyarakat	9 Kecamatan (Masing-masing 3 Desa, Masing-masing Desa 10 Rumah Tangga)			Jumlah buku Pola Pangan Harapan (PPH) Kab. Blora	5 Buku	Jumlah Buku informasi tentang Pola Konsumsi melalui Pola Pangan Harapan oleh para pemangku kebijakan	5 SKPD	35.800.000	PAD, DAU, DBH	5 Buku	40.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Masyarakat Blora	
02	03	15	009	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya akses, distribusi dan konsumsi pangan masyarakat	16 Desa/Kelurahan di Kabupaten Blora			Jumlah Desa yang mengikuti lomba pemanfaatan pekarangan	16 Desa	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat bantuan saprodi untuk pengembangan percontohan/Demplot Optimalisasi Pekarangan	16 Desa/Kelurahan	162.400.000	PAD, DAU, DBH	16 Desa/Kelurahan	175.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	3	Desa/Kelurahan di Wilayah Kab. Blora	
02	03	15	011	Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya akses, distribusi dan konsumsi pangan masyarakat	Wilayah Kabupaten Blora			Jumlah laporan Pola Pangan Harapan (PPH) Kab. Blora	12 Laporan	Jumlah buku informasi tentang harga bahan pangan pokok dan harga gabah/beras	12 Laporan	30.000.000	PAD, DAU, DBH	80 %	40.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Masyarakat Kab. Blora	
02	03	15	013	Pengembangan cadangan pangan daerah	Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya akses, distribusi dan konsumsi pangan masyarakat	Kabupaten Blora			Jumlah gabah yang diperbantukan untuk cadangan pangan daerah	25 Ton	Jumlah gabah yang tersedia	25 Ton	213.200.000	PAD, DAU, DBH	30 Ton	250.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Cadangan Pangan Daerah	
02	03	15	014	Pengembangan desa mandiri pangan	Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya akses, distribusi dan konsumsi pangan masyarakat	8 Desa Mandiri Pangan dan 1 Kawasan Mandiri Pangan			Jumlah desa mandiri pangan yang diberdayakan	13 Desa	Jumlah Desa/Kawasan Mandiri Pangan	13 Lokasi	35.000.000	PAD, DAU, DBH	13 Kelompok	50.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Desa Mandiri Pangan	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	03	15	017	Pengembangan pertanian pada lahan kering	Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya akses, distribusi dan konsumsi pangan masyarakat	Eks Lapangan Golf dan Pendopo Kabupaten			Jumlah kebun bibit yang terpelihara	2 Lokasi	jumlah lokasi kebun percontohan	2 Lokasi	130.600.000	PAD, DAU, DBH	2 Lokasi	150.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Lapangan golf dan pendopo kabupaten	
02	03	15	018	Pengembangan lumbung pangan desa	Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya akses, distribusi dan konsumsi pangan masyarakat	Ds. Sambongrejo Kec. Ngawen, Ds. Jepangrejo Kec. Blora, Ds. Sarimulyo Kec. Ngawen			Jumlah gabah yang diperbantkan untuk cadangan pangan desa	3 Ton	Jumlah lumbung pangan masyarakat yang dibangun	3 Paket	750.000.000	DAK FISIK	5 Lokasi	1.250.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompok lumbung	
					Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya akses, distribusi dan konsumsi pangan masyarakat	Ds. Sambongrejo Kec. Ngawen, Ds. Jepangrejo Kec. Blora, Ds. Sarimulyo Kec. Ngawen			Jumlah gabah yang diperbantkan untuk cadangan pangan desa	3 Ton	Jumlah sarana pendukung lumbung pangan masyarakat	3 Paket	210.000.000	DAK FISIK	5 Lokasi	350.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompok lumbung	
					Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya akses, distribusi dan konsumsi pangan masyarakat	10 Kelompok Lumbung di Kabupaten Blora			Jumlah gabah yang diperbantkan untuk cadangan pangan desa	10 Ton	Jumlah kelompok yang diberikan pembinaan dan bantuan gabah untuk pengembangan LPMD yang lebih maju	10 Kelompok	45.000.000	PAD, DAU, DBH	10 Lokasi	60.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompok lumbung	
02	03	15	019	Pengembangan model distribusi pangan yang efisien	Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya akses, distribusi dan konsumsi pangan masyarakat	10 Kelompok Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)			Jumlah pertemuan apresiasi LDPM yang terselenggara	10 Kali	Termanfaatkannya pemberdayaan LDPM dan PUPM untuk akses distribusi pangan yang lebih merata	10 Kelompok	45.000.000	PAD, DAU, DBH	10 Kelompok	65.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	
02	03	15	022	Peningkatan mutu dan keamanananan pangan	Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya akses, distribusi dan konsumsi pangan masyarakat	Sekolah Dasar (SD) atau MI di Kabupaten Blora			Jumlah rapat dan koordinasi pengawasan mutu dan keamanan produk pangan segar	1 Kali	Termanfaatkannya menu B2SA untuk siswa SD/MI	1500 Orang	50.000.000	PAD, DAU, DBH	1500 Paket	75.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	3	Kelompok Wanita Tani Kab. Blora	
					Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya akses, distribusi dan konsumsi pangan masyarakat	10 Kelompok Wanita di Kabupaten Blora			Jumlah rapat dan koordinasi pengawasan mutu dan keamanan produk pangan segar	1 Kali	Jumlah Anggota Kelompok yang mengikuti pertemuan Pengolahan Produk Pangan Lokal dan Terwujudnya Pengawasan Mutu Produk Pangan Olahan	100 Orang	70.000.000	PAD, DAU, DBH	100 Paket	85.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompok Wanita Tani Kab. Blora	
02	03	15	029	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan dan produk pertanian	Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya akses, distribusi dan konsumsi pangan masyarakat	kebun Benih Padi sendangharjo dan wilayah sekitar			Jumlah benih padi berkualitas yang di produksi	25 Ton	Tersalurkannya benih padi padi, gerakan tanam dan koordinasi RDKK	5 Paket	312.000.000	PAD, DAU, DBH	30 Ton	400.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Balai Perbenihan Sendangharjo dan Wlayah Sekitar	
02	03	15	030	Penyuluhan sumber pangan alternatif	Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya akses, distribusi dan konsumsi pangan masyarakat	Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, Nasional/Pusat			Jumlah keikut sertaan Lomba ciptra menu B2SA dan lomba kudapan berbahan pangan local	3 Kali	Terpromosikannya produk pangan olahan di tingkat lokal, provinsi dan nasional	3 Kali	145.000.000	PAD, DAU, DBH	3 Kali	175.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kabupaten Blora/Provinsi/Nasional	
					Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya akses, distribusi dan konsumsi pangan masyarakat	Kabupaten Blora/Provinsi Jawa Tengah/Nasional			Jumlah keikut sertaan Lomba ciptra menu B2SA dan lomba kudapan berbahan pangan local	3 Kali	Meningkatnya Kreativitas Anggota Kelompok Wanita dalam mengolah Menu B2SA dan Terwujudnya Promosi Produk Pangan Lokal di Tingkat Provinsi/Pusat	50 Orang	80.000.000	PAD, DAU, DBH	25 Kali	100.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kabupaten Blora/Provinsi/Nasional	
02	03	15	033	Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya akses, distribusi dan konsumsi pangan masyarakat	Kabupaten Blora			Jumlah Pertemuan koordinasi Dewan Ketahanan Pangan yang di ikuti	1 Kali	Tersusunnya hasil kesepakatan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	1 Laporan	45.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Kali	60.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kabupaten Blora	
03				URUSAN PILIHAN																	
03	03			PERTANIAN																	
03	03	15		PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI				Cakupan bina kelompok petani	84 %					200.000.000			615.000.000				
03	03	15	001	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Pengembangan Ekonomi Lokal	Terpeliharanya produksi dan produktivitas pertanian dan populasi hewan ternak	Kabupaten Blora			Jumlah petani dan pelaku agribisnis yang dilatih	30 Orang	Terdampinginya Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian di pedesaaan	30 Desa/Kelurahan	25.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Angkatan	70.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Pemuda Tani di Kab. Blora	
					Pengembangan Ekonomi Lokal	Terpeliharanya produksi dan produktivitas pertanian dan populasi hewan ternak	Kecamatan Jati			Jumlah petani dan pelaku agribisnis yang dilatih	30 Orang	Jumlah kelompok tani yang mengikuti pelatihan pengendalian hama dan penyakit tanaman terpadu	30 Orang	25.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Angkatan	70.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Pemuda Tani di Kab. Blora	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Pengembangan Ekonomi Lokal	Terpeliharanya produksi dan produktivitas pertanian dan populasi hewan ternak	Kabupaten Blora			Jumlah petani dan pelaku agribisnis yang dilatih	30 Orang	Jumlah kelompok tani yang mengikuti pelatihan	30 Kelompok	50.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Angkatan	150.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Pemuda Tani di Kab. Blora	
03	03	15	003	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Pengembangan Ekonomi Lokal	Terpeliharanya produksi dan produktivitas pertanian dan populasi hewan ternak	Blora			Jumlah kelompok tani yang dilatih keterampilan kelembagaan dan kepengurusan kelompok tani	60 Kelompok	Jumlah pengurus gapoktan yang mengikuti pelatihan dalam menejemen keuangan	60 Orang	25.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Angkatan	150.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	KTNA Kab. Blora	
					Pengembangan Ekonomi Lokal	Terpeliharanya produksi dan produktivitas pertanian dan populasi hewan ternak	Kelompok tani Kab. Blora			Jumlah kelompok tani yang dilatih keterampilan kelembagaan dan kepengurusan kelompok tani	1 Kelompok	Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan Peningkatan kemampuan pengurus kelompok tani dalam pengelolaan organisasi	30 Orang	25.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Angkatan	75.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	KTNA Kab. Blora	
					Pengembangan Ekonomi Lokal	Terpeliharanya produksi dan produktivitas pertanian dan populasi hewan ternak	KTNA kabupaten Blora			Jumlah kelompok tani yang dilatih keterampilan kelembagaan dan kepengurusan kelompok tani	18 Kelompok	Terfasilitasinya Sarasehan KTNA	18 Kali	50.000.000	PAD, DAU, DBH	900 Angkatan	100.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	KTNA Kab. Blora	
03	03	16		PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN				Jumlah Promosi produk unggulan pertanian/ perkebunan	4 kali					585.000.000			670.000.000				
03	03	16	007	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah	Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Blok T Blora			Jumlah promosi produk unggulan komoditas pertanian Kab. Blora (Gelar potensi pertanian)	1 Kali	Jumlah promosi hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat Kabupaten Blora	1 Kali	275.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Kali	300.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Produk unggulan Kecamatan	
03	03	16	015	Perencanaan dan pengawasan peptisida	Pengembangan Ekonomi Lokal	-	16 Kecamatan			Prosentase lahan pertanian yang terkendali dari serangan OPT	100 %	Stabilisasi produksi padi	500.000 Ton	100.000.000	PAD, DAU, DBH	16 Kec	120.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Petani Kabupaten Blora	
03	03	16	020	Promosi hasil produksi dan perlindungan tanaman hortikultura	Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Tingkat Nasional, regional dan lokal			Jumlah pameran komoditas hortikultura yang diikuti tingkat lokal, regional dan nasional	4 Kali	Jumlah mengikuti Pameran komoditas hortikultura ditingkat nasional, regional dan lokal	4 Kali	210.000.000	PAD, DAU, DBH	4 Kali	250.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Produk unggulan hortikultura Kab. Blora	
03	03	17		PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN				Persentase kelompok tani menerapkan teknologi pertanian/perkebunan (intensifikasi dan mekanisasi pertanian)	84 %					9.941.600.000			5.743.000.000				
03	03	17	001	Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Kab. Blora			Jumlah kelompok tani yang mendapatkan hasil penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	5 Kelompok	Tersedianya teknologi terapan spesifik lokal komoditas pertanian	5 Paket	45.000.000	PAD, DAU, DBH	8 Kelompok	100.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompok tani	
03	03	17	002	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Kelompok Tani Desa Bacem, KECAMATAN Banjarejo			Panjang prasarana pertanian yang dibangun	1000			0	-		0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompoktani di Kabupaten Blora, Kebun Benih Tanaman Pangan Sendangharjo	
					Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Kelompok tani fajar Tani Dk. Boto, Ds.Sendangwungu, KECAMATAN BANJAREJO			Jumlah Alsintan yang diadakan	1 Unit	Jumlah Hand Traktor	1 Unit	30.000.000	PAD, DAU, DBH	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompoktani di Kabupaten Blora, Kebun Benih Tanaman Pangan Sendangharjo	RESES
					Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Kelompok tani Bogasari Dk. Nguleng, Ds.Sambongwangan, KECAMATAN RANDUBLATUNG			Panjang prasarana pertanian yang dibangun	300 Meter	JUT yang dibangun	300 Meter	50.000.000	PAD, DAU, DBH	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompoktani di Kabupaten Blora, Kebun Benih Tanaman Pangan Sendangharjo	RESES
					Pengembangan Ekonomi Lokal	-	kelompok tani Sri Rejeki Dk. Nglinggo, Ds. Ngloram, KECAMATAN CEPU			Panjang prasarana pertanian yang dibangun	500 Meter	JUT yang dibangun	500 Meter	100.000.000	PAD, DAU, DBH	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompoktani di Kabupaten Blora, Kebun Benih Tanaman Pangan Sendangharjo	RESES
					Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Kelompok tani Karya Tani RT 04 RW 02 Ds. Sumurboto, KECAMATAN JEPON			Jumlah Alsintan yang diadakan	2 Unit	Jumlah Alsintan yang dibantukan (mini combine harvester, pompa air)	2 Unit	150.000.000	PAD, DAU, DBH	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompoktani di Kabupaten Blora, Kebun Benih Tanaman Pangan Sendangharjo	RESES
					Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Kelompok tani Ngudi Makmur Ds. Sumurboto Kec. Jepon			Jumlah Alsintan yang diadakan	1 Unit	Jumlah alsintan (Pompa air)	1 Paket	50.000.000	PAD, DAU, DBH	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompoktani di Kabupaten Blora, Kebun Benih Tanaman Pangan Sendangharjo	RESES

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Kelompok Tani Semi Barokah Dk. Nglaren Ds. Mendenrejo, KECAMATAN KRADENAN			Panjang prasarana pertanian yang dibangun	500 Meter	rehabilitasi saluran irigasi yang dilaksanakan	500 Paket	100.000.000	PAD, DAU, DBH	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompoktani di Kabupaten Blora, Kebun Benih Tanaman Pangan Sendangharjo	RESES
		Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Kelompok tani Sidomukti 2 Ds. Bandungrojo, KECAMATAN NGAWEN			Panjang prasarana pertanian yang dibangun	500 Meter	JUT yang dibangun	500 Meter	125.000.000	PAD, DAU, DBH	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompoktani di Kabupaten Blora, Kebun Benih Tanaman Pangan Sendangharjo	RESES
		Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Kelompok Tani Sidomukti 1 Ds. Bandungrojo, KECAMATAN NGAWEN			Panjang prasarana pertanian yang dibangun	500 Meter	JUT yang dibangun	500 Meter	125.000.000	PAD, DAU, DBH	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompoktani di Kabupaten Blora, Kebun Benih Tanaman Pangan Sendangharjo	RESES
		Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Kelompok tani Sidomukti Dk. Sukorejo Ds. Sukorejo, KECAMATAN TUNJUNGAN			Panjang prasarana pertanian yang dibangun	300 Meter	JUT yang dibangun	300 Meter	50.000.000	PAD, DAU, DBH	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompoktani di Kabupaten Blora, Kebun Benih Tanaman Pangan Sendangharjo	RESES
		Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Kelompok tani Sidomulyo Ds. Purwosari, KECAMATAN BLORA			Panjang prasarana pertanian yang dibangun	500 Meter	JUT yang dibangun	500 Meter	100.000.000	PAD, DAU, DBH	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompoktani di Kabupaten Blora, Kebun Benih Tanaman Pangan Sendangharjo	RESES
		Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Kelompok Tani UNGGUL Ds. Tempuran, KECAMATAN BLORA			Panjang prasarana pertanian yang dibangun	500 Meter	JUT yang dibangun	500 Meter	100.000.000	PAD, DAU, DBH	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompoktani di Kabupaten Blora, Kebun Benih Tanaman Pangan Sendangharjo	RESES
		Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Kelompok Tani Makmur Ds. Singonegoro, KECAMATAN JIKEN			Jumlah Alsintan yang diadakan	1 Unit	Jumlah Hand Traktor	1 Unit	30.000.000	PAD, DAU, DBH	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompoktani di Kabupaten Blora, Kebun Benih Tanaman Pangan Sendangharjo	RESES
		Pengembangan Ekonomi Lokal	-	1. Kelompok Tani Mekar Sari Ds. Singonegoro, KECAMATAN JIKEN 2. kelompok Tani Tunas Muda Dk. Suruan Ds.Cokrowati, KECAMATAN TODANAN 3. Kelompok tani Muncul Dk. Padas, Ds. Todanan, KECAMATAN TODANAN			Jumlah Alsintan yang diadakan	3 Unit	Jumlah Corn Seeler dan Hand Traktor	3 Unit	90.000.000	PAD, DAU, DBH	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompoktani di Kabupaten Blora, Kebun Benih Tanaman Pangan Sendangharjo	RESES
		Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Kelompok tani "Sido Rukun" Dk. Pancur Ds. Kacangan, KECAMATAN TODANAN			Panjang prasarana pertanian yang dibangun	600 Meter	JUT yang dibangun	600 Meter	150.000.000	PAD, DAU, DBH	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompoktani di Kabupaten Blora, Kebun Benih Tanaman Pangan Sendangharjo	RESES
		Pengembangan Ekonomi Lokal	-	JUT Desa Nglengkir RT 03 RW 03 , KECAMATAN BOGOREJO			Panjang prasarana pertanian yang dibangun	400 Meter	JUT yang dibangun	400 Meter	60.000.000	PAD, DAU, DBH	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompoktani di Kabupaten Blora, Kebun Benih Tanaman Pangan Sendangharjo	RESES
		Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Kelompok Tani "Bumi Makmur" Dk. Sambeng, Ds. Sambeng kec. Todanan			Panjang prasarana pertanian yang dibangun	600 Meter	JUT yang dibangun	600 Meter	150.000.000	PAD, DAU, DBH	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompoktani di Kabupaten Blora, Kebun Benih Tanaman Pangan Sendangharjo	RESES
		Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Kelompok Tani Suka Tani Ds. Jepangrejo Kec. Blora			Panjang prasarana pertanian yang dibangun	1000 Meter	JUT yang dibangun	1000 Meter	200.000.000	PAD, DAU, DBH	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompoktani di Kabupaten Blora, Kebun Benih Tanaman Pangan Sendangharjo	RESES
		Pengembangan Ekonomi Lokal	-	1. Kelompok Tani Kamulyan Ds. Kamolan, KECAMATAN BLORA 2. kelompok tani Sri Raharjo Dk. Ngepung Ds. Muraharjo, KECAMATAN KUNDURAN			Panjang prasarana pertanian yang dibangun	1500 Meter	JUT yang dibangun	1500 Meter	300.000.000	PAD, DAU, DBH	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompoktani di Kabupaten Blora, Kebun Benih Tanaman Pangan Sendangharjo	RESES
		Pengembangan Ekonomi Lokal	-	1. kelompok Unggul Jaya Ds. Dringo, KECAMATAN TODANAN 2. Kelompok Tani Tunas Mulya Dk. Suruan Ds. Cokrowati Kec. Todanan 3. Kelompok Tani Karangmulyo 2 Dk. Karanganyar, Ds. Karanganyar, KECAMATAN TODANAN			Panjang prasarana pertanian yang dibangun	2100 Meter	Jaringan Irigasi dan JUT yang dibangun	2100 Meter	500.000.000	PAD, DAU, DBH	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompoktani di Kabupaten Blora, Kebun Benih Tanaman Pangan Sendangharjo	RESES
		Pengembangan Ekonomi Lokal	-	1. Kelompok Tani maju Makmur Ds.Dringo, KECAMATAN TODANAN 2. kelompok tani Balong Jaya Dk. Balong, Ds.Tlogowungu, KECAMATAN JAPAH 3. Kelompok tani Moya Makmur Ds. Tunjungan, KECAMATAN TUNJUNGAN			Panjang prasarana pertanian yang dibangun	1600 Meter	JUT yang dibangun	1600 Meter	350.000.000	PAD, DAU, DBH	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompoktani di Kabupaten Blora, Kebun Benih Tanaman Pangan Sendangharjo	RESES
		Pengembangan Ekonomi Lokal	-	1. Kelompok Tani Sumber Makmur, Dk. Tengger Ds.Sidomulyo, KECAMATAN BANJAREJO 2. Kelompok tani Mekar Sari I, Dk. Gesik, RT 05 RW 01 Ds. Sumberejo, KECAMATAN NGAWEN (Ketua Moh. Solikin = 085525860833)			Jumlah Alsintan yang diadakan	2 Unit	Jumlah hand Traktor	2 Unit	60.000.000	PAD, DAU, DBH	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompoktani di Kabupaten Blora, Kebun Benih Tanaman Pangan Sendangharjo	RESES
		Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Kelompok Tani Agung Jaya Dk. Banyuurip Ds. Banjarejo, KECAMATAN BANJAREJO			Jumlah Alsintan yang diadakan	1 Unit	Jumlah Hand Traktor	1 Unit	30.000.000	PAD, DAU, DBH	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompoktani di Kabupaten Blora, Kebun Benih Tanaman Pangan Sendangharjo	RESES

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pengembangan Ekonomi Lokal	-	1. Kelompok Tani "Tani Makmur II" Ds. Banjarejo, KECAMATAN BANJAREJO 2. kelompok Tani Desa Tanggel Kec. Randublatung 3. Kelompok Tani " Rukun Makaryo RT 11/05 Dk. Ngembag Ds. Gabusan Kec. Jati 4. Kelompok Tani " Tani Makmu			Jumlah Alsintan yang diadakan	7 Unit	Jumlah hand Traktor, dan Submer Sibble	7 Unit	260.000.000	PAD, DAU, DBH	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompoktani di Kabupaten Blora, Kebun Benih Tanaman Pangan Sendangharjo	RESES
		Pengembangan Ekonomi Lokal	-	1. Kelompok tani Tambah Mulyo Ds. Tanjung, KECAMATAN KEDUNGTUBAN, 2. Kelompok tani Bina Usaha Desa Brumbung, Kec. Jepon 3. LMDH Jati Unggul Dsn. Goito, Ds. Mendenrejo, KECAMATAN KRADENAN			Panjang prasarana pertanian yang dibangun	1700 Meter	Jalan Usaha Tani yang dibangun	1700 Meter	365.000.000	PAD, DAU, DBH	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompoktani di Kabupaten Blora, Kebun Benih Tanaman Pangan Sendangharjo	RESES
		Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Kelompok Tani Sumber Rejeki Ds. Bajo, KECAMATAN KEDUNGTUBAN,			Jumlah Alsintan yang diadakan	1 Unit	Jumlah hand traktor	1 Unit	30.000.000	PAD, DAU, DBH	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompoktani di Kabupaten Blora, Kebun Benih Tanaman Pangan Sendangharjo	RESES
		Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Ds. Wonosemi Kec. Banjarejo, Ds. Cokrowati Kec. Todanan, Ds. Bogowanti Kec. Ngawen, Ds. Ledok Kec. Sambong			Panjang prasarana pertanian yang dibangun	1000 Meter	Jumlah sumur lapang yang dibangun	50 Unit	250.000.000	DAK FISIK	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompoktani di Kabupaten Blora, Kebun Benih Tanaman Pangan Sendangharjo	
		Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Ds. Nglengkir Kec. Bogorejo, Ds. Candi Kec. Todanan			Panjang prasarana pertanian yang dibangun	1000 Meter	Jumlah embung yang dibangun	2 Unit	1.000.000.000	DAK FISIK	2	1.200.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompoktani di Kabupaten Blora, Kebun Benih Tanaman Pangan Sendangharjo	
		Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Ds. Mulyorejo Kec. Cepu, Ds. Punggursugih Kec. Ngawen			Panjang prasarana pertanian yang dibangun	2 Meter	Jumlah Dam Parit yang dibangun	2 Paket	300.000.000	DAK FISIK	2	400.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompoktani di Kabupaten Blora, Kebun Benih Tanaman Pangan Sendangharjo	
		Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Desa Getas, Kec. Cepu			Panjang prasarana pertanian yang dibangun	1000 Meter	Jumlah Gelontoran besar yang dibangun	1 Paket	750.000.000	DAK FISIK	1	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompoktani di Kabupaten Blora, Kebun Benih Tanaman Pangan Sendangharjo	
		Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Desa Bangoan			Panjang prasarana pertanian yang dibangun	1000 Meter	Pertanian	1 Paket	0	-	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompoktani di Kabupaten Blora, Kebun Benih Tanaman Pangan Sendangharjo	MUSRENBANGCAM
		Pengembangan Ekonomi Lokal	-	1. Ds. Bicak, Kec. Todanan 2. Ds. Bacem, Kec. Jepon 3. Ds. Kapuan, Kec. Cepu 4. Ds Keser, Kec. Tunjungan 5. Ds. Tengger, Kec. japah			Panjang prasarana pertanian yang dibangun	5000 Meter	Jumlah JUT yang dibangun	5 Lokasi	1.000.000.000	DAK FISIK	5000	1.100.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompoktani di Kabupaten Blora, Kebun Benih Tanaman Pangan Sendangharjo	
		Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Desa Kapuan Kecamatan Cepu			Panjang prasarana pertanian yang dibangun	500 Meter	Tersedianya Jalan Usaha Tani	1 Paket	0	-	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompoktani di Kabupaten Blora, Kebun Benih Tanaman Pangan Sendangharjo	MUSRENBANGCAM
		Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Ds. Dalangan			Panjang prasarana pertanian yang dibangun	1000 Meter	Masyarakat Desa Dalangan	1 Lokasi	0	-	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompoktani di Kabupaten Blora, Kebun Benih Tanaman Pangan Sendangharjo	MUSRENBANGCAM
		Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Dusun Keser, Dusun Dukoh, Dusun Bengir Desa Keser			Panjang prasarana pertanian yang dibangun	3500 Meter	Peningkatan Hasil Produksi Pertanian	1 Lokasi	0	-	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompoktani di Kabupaten Blora, Kebun Benih Tanaman Pangan Sendangharjo	MUSRENBANGCAM
		Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Ds. Kamolan, Ds. Jepangrejo, Kel. Kedungjenar			Panjang prasarana pertanian yang dibangun	3000 Meter	JUT yang dibangun	3000 Meter	600.000.000	BANKEU PROV	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompoktani di Kabupaten Blora, Kebun Benih Tanaman Pangan Sendangharjo	
		Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Kelompok tani Ds. Bacem Kec Banjarejo			Panjang prasarana pertanian yang dibangun	1000 Meter	JUT yang dibangun	1000 Meter	200.000.000	PAD, DAU, DBH	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompoktani di Kabupaten Blora, Kebun Benih Tanaman Pangan Sendangharjo	
		Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Kelompok tani Kab. Blora			Jumlah Alsintan yang diadakan	20 Unit	peningkatan pemanfaatan alsintan bagi kelompok tani	20 Kelompok	0	-	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompoktani di Kabupaten Blora, Kebun Benih Tanaman Pangan Sendangharjo	MUSRENBANGCAM
		Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Kab. Blora			Jumlah Alsintan yang diadakan	10 Unit	peningkatan pemanfaatan alsintan bagi kelompok tani	10 Kelompok	0	-	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompoktani di Kabupaten Blora, Kebun Benih Tanaman Pangan Sendangharjo	MUSRENBANGCAM
		Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Kab. Blora			Jumlah Alsintan yang diadakan	1 Unit	tersedianya rumah karantina burung hantu	1 Lokasi	0	-	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompoktani di Kabupaten Blora, Kebun Benih Tanaman Pangan Sendangharjo	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Kebun Benih Padi Sendangharjo			Panjang prasarana pertanian yang dibangun	1000 Meter	panjang jaringan irigasi di kebun benih sendangharjo	1000 Meter	100.000.000	PAD, DAU, DBH	1	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompoktani di Kabupaten Blora, Kebun Benih Tanaman Pangan Sendangharjo	
					Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Kelompoktani di Kabupaten Blora dan Kebun Benih Sendangharjo			Jumlah Alsintan yang diadakan	100 Unit	Meningkatnya pemanfaatan alsintan di tingkat kelompok tani	100 Kelompok	0	-	100	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompoktani di Kabupaten Blora, Kebun Benih Tanaman Pangan Sendangharjo	MUSRENBANGCAM
03	03	17	004	Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Kab. Blora			Jumlah kelompok tani yang meningkat pengetahuan dan keterampilan dalam penerapan teknologi pertanian/perkebunan	5 Kelompok	Dihasilkanya rekomendasi teknologi anjuran komoditas pertanian spesifik lokal	5 Poktan	40.000.000	PAD, DAU, DBH	10 Paket	100.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompok tani	
03	03	17	007	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Pengembangan Ekonomi Lokal	-	16 kecamatan			Jumlah Dokumen Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan	1 Dokumen	Terselenggaranya Kegiatan Monev dan pelaporan kegiatan PD	16 Kec	170.000.000	PAD, DAU, DBH	16 Kec	180.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Desa dan kelompok tani kab. Blora	
03	03	17	010	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi perkebunan tepat guna	Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Ds.Mojorembun,Sumber,Mendenrejo (Kec.Kradenan), Ds.Sumberejo (Kec.Ngawen)			Jumlah kelompok tani yang mengikuti pelatihan dan menerima bantuan sarpras perkebunan	5 Kelompok	Bertemunya petani dengan pengusaha tembakau untuk kemitraan	5 Kali	100.000.000	DBHCHT	5 Kelompok	110.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompok tani komoditas perkebunan	
					Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Ds.Andongrejo,ds.Purworejo,kec.Blora,ds.Puledagel,kec.Jepon			Jumlah kelompok tani yang mengikuti pelatihan dan menerima bantuan sarpras perkebunan	3 Kelompok	Tersedianya bantuan plastik UV untuk pasca panen tembakau	3 Paket	30.000.000	DBHCHT	3 Kelompok	33.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompok tani komoditas perkebunan	
					Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Ds.Nglangitan, ds.Kedungrejo, kec.Tunjungan, ds.Sumberejo, ds.Karangtengah, kec.Ngawen, ds.Andongrejo, kec.Blora, ds.Puledagel, ds.Palon, kec.Jepon, ds.Pengkolrejo, kec.Japah			Jumlah kelompok tani yang mengikuti pelatihan dan menerima bantuan sarpras perkebunan	8 Kelompok	Tersedianya bantuan terpal untuk petani tembakau	40 Unit	10.000.000	DBHCHT	8 Kelompok	11.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompok tani komoditas perkebunan	
					Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Ds. Dringo dan Ds. Bedingin, Kec. Todanan,ds.Karangtengah,kec.Ngawen			Jumlah kelompok tani yang mengikuti pelatihan dan menerima bantuan sarpras perkebunan	3 Kelompok	Tersedianya bantuan sumur gali untuk petani tembakau	9 Unit	45.000.000	DBHCHT	3 Kelompok	49.500.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompok tani komoditas perkebunan	
					Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Ds.Kutukan, kec.Randublatung, ds.Tunjungan, ds.Nglangitan, kec.Tunjungan, ds.Sumberejo, kec.Ngawen, ds.Japah, kec.Japah, ds.Gadu, kec.Sambong, ds.Jomblang, kec.Jepon			Jumlah kelompok tani yang mengikuti pelatihan dan menerima bantuan sarpras perkebunan	7 Kelompok	Tersedianya bantuan pupuk untuk petani tembakau	10 Ton	100.000.000	DBHCHT	7 Kelompok	110.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompok tani komoditas perkebunan	
					Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Kab.Probolinggo,Prov.Jawa Timur			Jumlah kelompok tani yang mengikuti pelatihan dan menerima bantuan sarpras perkebunan	0 Kelompok	Menambah wawasan dan pengetahuan petani tentang kelembagaan ekonomi tembakau	50 Orang	100.000.000	DBHCHT	50 Kelompok	110.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompok tani komoditas perkebunan	
					Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Ds.Pilang,Ds.Kutukan,Ds.Temulus,Ds.Sumberejo (Kec.Randublatung)			Jumlah kelompok tani yang mengikuti pelatihan dan menerima bantuan sarpras perkebunan	5 Kelompok	Bertambahnya pengetahuan petani untuk meningkatkan kualitas/mutu tembakau	5 Kali	79.000.000	DBHCHT	5 Kelompok	86.900.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompok tani komoditas perkebunan	
					Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Ds.Pilang,Ds.Kutukan,Ds.Temulus,Ds.Sumberejo (Kec.Randublatung),Ds.Mojorembun,Sumber,Mendenrejo (Kec.Kradenan), Ds.Sumberejo (Kec.Ngawen)			Jumlah kelompok tani yang mengikuti pelatihan dan menerima bantuan sarpras perkebunan	5 Kelompok	Bertambahnya pengetahuan petani tentang tembakau	10 Kali	200.000.000	DBHCHT	5 Kelompok	220.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompok tani komoditas perkebunan	
					Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Ds.Kedungrejo, kec.Tunjungan, ds.Karangtengah, kec.Ngawen, ds.Jepangrejo, ds.Purworejo, kec.Blora, ds.Wonosemi, ds.Sendangwungu, kec.Banjarejo, ds.Palon, kec.Jepon, ds.Pengkolrejo, kec.Japah			Jumlah kelompok tani yang mengikuti pelatihan dan menerima bantuan sarpras perkebunan	8 Kelompok	Tersedianya bantuan pompa air untuk petani tembakau	8 Unit	40.000.000	DBHCHT	8 Kelompok	44.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompok tani komoditas perkebunan	
					Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Ds.Kutukan, ds.Sumberejo, kec.Randublatung, ds.Kedungrejo, ds.Nglangitan, kec.Tunjungan, ds.Jepangrejo, ds.Purworejo, kec.Blora, ds.Wonosemi, kec.Banjarejo, ds.Puledagel, ds.Palon, kec.Jepon			Jumlah kelompok tani yang mengikuti pelatihan dan menerima bantuan sarpras perkebunan	9 Kelompok	Tersedianya bantuan handsprayer untuk petani tembakau	30 Unit	24.000.000	DBHCHT	9 Kelompok	27.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompok tani komoditas perkebunan	
					Pengembangan Ekonomi Lokal	-	ds.Tunjungan, kec.Tunjungan, ds.Sumberejo, kec.Ngawen, ds.Jepangrejo, ds.Andongrejo, kec.Blora, ds.Puledagel, ds.Palon, ds.Jomblang, kec.Jepon, ds.Pengkolrejo, ds.Tengger, ds.Japah, kec.Japah, ds.Klokah, kec.Kunduran, ds.Gadu,kec.Sambong, ds.B			Jumlah kelompok tani yang mengikuti pelatihan dan menerima bantuan sarpras perkebunan	14 Kelompok	Tersedianya bantuan cultivator untuk petani tembakau	14 Unit	182.000.000	DBHCHT	14 Kelompok	196.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompok tani komoditas perkebunan	
					Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Ds.Sumberejo,Ds.Kutukan, kec.Randublatung,ds.Mojorembun,kec.Kradenan,ds.Sendangwungu,kec.Banjarejo			Jumlah kelompok tani yang mengikuti pelatihan dan menerima bantuan sarpras perkebunan	4 Kelompok	Tersedianya bantuan kendaraan roda 3 untuk petani tembakau	4 Unit	120.000.000	DBHCHT	4 Kelompok	132.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompok tani komoditas perkebunan	
					Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Ds.Kedungwaru,kec.Kunduran,ds.Ngapus,kec.Japah			Jumlah kelompok tani yang mengikuti pelatihan dan menerima bantuan sarpras perkebunan	2 Kelompok	Tersedianya bantuan handtraktor untuk keltan komoditas tebu	2 Unit	70.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Kelompok	77.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompok tani komoditas perkebunan	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Ds.Kedungwaru,kec.Kunduran,ds.Ngapus,kec.Japah			Jumlah kelompok tani yang mengikuti pelatihan dan menerima bantuan sarpras perkebunan	2 Kelompok	Bertambahnya pengetahuan tentang mekanisasi untuk keltan komoditas tebu	2 Kelompok	66.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Kelompok	72.600.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompok tani komoditas perkebunan	
03	03	17	011	Penelitian dan pengembangan teknologi perkebunan tepat guna	Pengembangan Ekonomi Lokal	-	ds.Ngapus kec. Japah, ds. Balong, kec. Kunduran			Jumlah kelompok tani yang mengikuti pelatihan dan pengembangan tebu	2 Kelompok	Bertambahnya pengetahuan petani tentang budidaya tebu	2 Kali	20.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Kelompok	24.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompok tani komoditas perkebunan	
					Pengembangan Ekonomi Lokal	-	ds.Ngapus dan ds.Kalinanas, kec. Japah, ds. Balong, kec. Kunduran,ds.Tinapan,kec.Todanan			Jumlah kelompok tani yang mengikuti pelatihan dan pengembangan tebu	4 Kelompok	Tersedianya bantuan Pupuk NPK sebanyak 100 kg/ha	40 Ha	40.000.000	PAD, DAU, DBH	4 Kelompok	44.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompok tani komoditas perkebunan	
					Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			Jumlah kelompok tani yang mengikuti pelatihan dan pengembangan tebu	0 Kelompok	Terkoordinasinya kegiatan pengembangan tebu	100 Orang	30.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Kelompok	36.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompok tani komoditas perkebunan	
03	03	17	012	Penguatan kelembagaan dan pengelolaan pasca panen perkebunan	Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Ds.Karangjong,kec.Ngawen,ds.Karanganyar,kec.Todanan			Jumlah kelompok tani yang mengikuti pelatihan pasca panen komoditas perkebunan dan bantuan alat	2 Kelompok	Bertambahnya pengetahuan petani tentang pasca Panen Mete	2 Kelompok	50.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Kelompok	60.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompok tani komoditas perkebunan	
					Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Ds.Karangjong,kec.Ngawen,ds.Karanganyar,kec.Todanan			Jumlah kelompok tani yang mengikuti pelatihan pasca panen komoditas perkebunan dan bantuan alat	2 Kelompok	Tersedianya alat pasca panen mete	100 Unit	50.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Kelompok	60.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompok tani komoditas perkebunan	
					Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Ds.Japah, kec.Japah, ds.Tamanrejo, kec.Tunjungan, ds.Purworejo, kec.Blora, ds.Palon, kec.Jepon			Jumlah kelompok tani yang mengikuti pelatihan pasca panen komoditas perkebunan dan bantuan alat	4 Kelompok	Bertambahnya pengetahuan tentang kelembagaan untuk kelompok tani komoditas perkebunan	4 Kelompok	50.000.000	PAD, DAU, DBH	4 Kelompok	60.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompok tani komoditas perkebunan	
03	03	17	013	Penyediaan saran dan prasarana produksi hortikultura	Pengembangan Ekonomi Lokal	-	1. Kelompok tani Sumber Makmur Ds. Kedungrejo, Kec. Tunjungan 2. Kelompok tani Unggul Ds. Temuran Kec. Blora			Jumlah sarana dan prasarana komoditas hortikultura yang diadakan	2 Unit	Jumlah Jalan Produksi yang dibangun	2000 Meter	400.000.000	DAK FISIK	3000 Meter	600.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompok tani	
					Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Desa Tempurejo Kec Blora			Jumlah sarana dan prasarana komoditas hortikultura yang diadakan	1 Unit	Jumlah irigasi perpipaan 1 unit	1 Paket	125.600.000	PAD, DAU, DBH	2 Meter	500.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompok tani	
03	03	18		PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN				Ubi Kayu	52.523 ton					680.800.000			1.152.000.000				
								Kedelai	11.078 ton												
								Jagung	271.253 ton												
								Padi sawah	414.472 ton												
								Padi ladang	36.256 ton												
								Cabe merah	5.542 ton												
								Cabe rawit	1.390 ton												
								Bawang merah	1.147 ton												
								Jeruk siam	1.244 ton												
								Tembakau	1.425 ton												
								Tebu	18.500 ton												
								Kelapa	90 ton												
								Mete	218 ton												
03	03	18	008	Pengembangan bibit unggul perkebunan	Pengembangan Ekonomi Lokal	Terpeliharanya produksi dan produktivitas pertanian dan populasi hewan ternak				Jumlah bibit unggul perkebunan (tebu, kelapa, mete)	0 bibit tanaman	Bertambahnya pengetahuan petani tentang budidaya kopi	1 Kelompok	12.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Kelompok	14.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompok tani komoditas perkebunan	
					Pengembangan Ekonomi Lokal	Terpeliharanya produksi dan produktivitas pertanian dan populasi hewan ternak	ds.Pojokwatu,kec.Sambong (Musrenbangcam)			Jumlah bibit unggul perkebunan (tebu, kelapa, mete)	500 bibit tanaman	Tersedianya bibit unggul kelapa	1 Kelompok	10.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Kelompok	11.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompok tani komoditas perkebunan	
					Pengembangan Ekonomi Lokal	Terpeliharanya produksi dan produktivitas pertanian dan populasi hewan ternak				Jumlah bibit unggul perkebunan (tebu, kelapa, mete)	0 bibit tanaman	Bertambahnya pengetahuan petani tentang budidaya kapas	1 Kelompok	12.600.000	PAD, DAU, DBH	1 Kelompok	15.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompok tani komoditas perkebunan	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Pengembangan Ekonomi Lokal	Terpeliharanya produksi dan produktivitas pertanian dan populasi hewan ternak				Jumlah bibit unggul perkebunan (tebu, kelapa, mete)	0 bibit tanaman	Tersedianya bibit unggul kopi	1000 bibit tanaman	20.000.000	PAD, DAU, DBH	1000 Kelompok	22.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompok tani komoditas perkebunan	
					Pengembangan Ekonomi Lokal	Terpeliharanya produksi dan produktivitas pertanian dan populasi hewan ternak				Jumlah bibit unggul perkebunan (tebu, kelapa, mete)	0 bibit tanaman	Terpanennya kapas	2 Ha	12.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Kelompok	15.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompok tani komoditas perkebunan	
					Pengembangan Ekonomi Lokal	Terpeliharanya produksi dan produktivitas pertanian dan populasi hewan ternak	ds.Blungun, kec.Jepon, ds. Prantaan, kec.Bogorejo, ds.Sidomulyo, kec.Banjarejo, ds.Kedungrejo, kec.Tunjungan, ds.Purworejo, kec.Blora, ds.Pojokwatu, kec.Sambong			Jumlah bibit unggul perkebunan (tebu, kelapa, mete)	0 bibit tanaman	Tersedianya jamur metarhizium	0.4 Ton	50.000.000	PAD, DAU, DBH	0.4 Kelompok	55.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompok tani komoditas perkebunan	
					Pengembangan Ekonomi Lokal	Terpeliharanya produksi dan produktivitas pertanian dan populasi hewan ternak	ds.Blungun, kec.Jepon, ds. Prantaan, kec.Bogorejo, ds.Sidomulyo, kec.Banjarejo, ds.Kedungrejo, kec.Tunjungan, ds.Purworejo, kec.Blora, ds.Pojokwatu, kec.Sambong			Jumlah bibit unggul perkebunan (tebu, kelapa, mete)	0 bibit tanaman	Tumbuhnya kesadaran petani untuk mengendalikan OPT kelapa	6 Kelompok	111.000.000	PAD, DAU, DBH	6 Kelompok	120.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompok tani komoditas perkebunan	
					Pengembangan Ekonomi Lokal	Terpeliharanya produksi dan produktivitas pertanian dan populasi hewan ternak	ds.Blungun, kec.Jepon, ds. Prantaan, kec.Bogorejo, ds.Sidomulyo, kec.Banjarejo, ds.Kedungrejo, kec.Tunjungan, ds.Purworejo, kec.Blora			Jumlah bibit unggul perkebunan (tebu, kelapa, mete)	3000 bibit tanaman	Tersedianya bibit unggul kelapa	5 Kelompok	60.000.000	PAD, DAU, DBH	5 Kelompok	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompok tani komoditas perkebunan	
03	03	18	010	Pengembangan bibit unggul hortikultura	Pengembangan Ekonomi Lokal	Terpeliharanya produksi dan produktivitas pertanian dan populasi hewan ternak	Desa Ngloram			Jumlah bibit hortikultura	0 bibit tanaman	Peningkatan Ekonomi Petani	1 Desa	0	-	0 bibit tanaman	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompok tani	MUSRENBANGCAM
					Pengembangan Ekonomi Lokal	Terpeliharanya produksi dan produktivitas pertanian dan populasi hewan ternak	Desa Gadu			Jumlah bibit hortikultura	0 bibit tanaman	Jumlah Bibit tanaman hortikultura yang di bantukan	1 Desa	0	-	0 bibit tanaman	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompok tani	MUSRENBANGCAM
					Pengembangan Ekonomi Lokal	Terpeliharanya produksi dan produktivitas pertanian dan populasi hewan ternak	Desa Sambongrejo			Jumlah bibit hortikultura	0 bibit tanaman	Jumlah Bibit tanaman hortikultura yang di bantukan	1 Desa	0	-	0 bibit tanaman	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompok tani	MUSRENBANGCAM
					Pengembangan Ekonomi Lokal	Terpeliharanya produksi dan produktivitas pertanian dan populasi hewan ternak	Desa Gagakan			Jumlah bibit hortikultura	0 bibit tanaman	Jumlah Bibit tanaman hortikultura yang di bantukan	0 Desa	0	-	0 bibit tanaman	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompok tani	MUSRENBANGCAM
					Pengembangan Ekonomi Lokal	Terpeliharanya produksi dan produktivitas pertanian dan populasi hewan ternak	Desa Sambongrejo, Desa Temengeng, Desa Pojokwatu			Jumlah bibit hortikultura	0 bibit tanaman	tersedianya bantuan bibit tanaman hortikultura untuk Masyarakat	3 Desa	0	-	0 bibit tanaman	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompok tani	MUSRENBANGCAM
					Pengembangan Ekonomi Lokal	Terpeliharanya produksi dan produktivitas pertanian dan populasi hewan ternak	Kec. Tunjungan, Jepon, Bogorejo, Jiken, Sambong dan Kec. Cepu			Jumlah bibit hortikultura	18500 bibit tanaman	Bibit unggul untuk kelompok tani	18500 bibit tanaman	230.000.000	PAD, DAU, DBH	10 bibit tanaman	600.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kelompok tani	
03	03	18	011	Penyediaan sarana produksi hortikultura	Pengembangan Ekonomi Lokal	Terpeliharanya produksi dan produktivitas pertanian dan populasi hewan ternak	Kecamatan Ngawen, Kecamatan Jati, Kecamatan Sambong dan Kecamatan Jepon			Jumlah kelompok tani yang menerima bantuan sarana produksi hortikultura	20 Kelompok	Kawasan sayuran bawang merah	20 Ha	163.200.000	PAD, DAU, DBH	30 Ha	300.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	kelompok tani	
03	03	19		PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN				Persentase tenaga penyuluh pertanian/perkebunan yang telah mengikuti pelatihan	100 %					1.535.200.000			3.300.000.000				
03	03	19	001	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Kab. Blora			Jumlah penyuluh pertanian yang meningkat kompetensinya	127 Orang	Terfasilitasinya pelaksanaan penyuluhan di Kelompok Tani	100 Kelompok	96.000.000	DAK FISIK	10 Unit	350.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Penyuluh pertanian PNS, THL TBPP dan PPS	
					Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Kab. Blora			Jumlah penyuluh pertanian yang meningkat kompetensinya	127 Orang	Jumlah sarpras pendukung BPP (jar internet)	16 BPP	200.000.000	DAK FISIK	16 Unit	300.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Penyuluh pertanian PNS, THL TBPP dan PPS	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Kec. Jepon			Jumlah penyuluh pertanian yang meningkat kompetensinya	127 Orang	Bangunan pendukung BPP yang dibangun (tempat pertemuan petani dan tempat parkir kendaraan roda dua)	1 Paket	250.000.000	DAK FISIK	5 Unit	750.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Penyuluh pertanian PNS, THL TBPP dan PPS	
					Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Kec. Sambong			Jumlah penyuluh pertanian yang meningkat kompetensinya	127 Orang	Jumlah gedung BPP yang dibangun	1 BPP	500.000.000	DAK FISIK	2 Unit	1.000.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Penyuluh pertanian PNS, THL TBPP dan PPS	
					Pengembangan Ekonomi Lokal	-	BPP Kec. Blora			Jumlah penyuluh pertanian yang meningkat kompetensinya	127 Orang	Meningkatnya kapasitas Penyuluh Pertanian dan tenaga harian lepas	127 Orang	109.000.000	PAD, DAU, DBH	140 Unit	200.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Penyuluh pertanian PNS, THL TBPP dan PPS	
03	03	19	003	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian /perkebunan	Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Kab. Blora			Jumlah dokumen program penyuluhan pertanian yang tersusun	1 Dokumen	Tersedianya programa penyuluhan tingkat kecamatan dan kabupaten, tersusunya RDK/RDKK, terdesiminasinya materi penyuluhan melalui media, serta adanya pemenang lomba bidang pertanian	16 Kec	305.200.000	PAD, DAU, DBH	2000 Poktan	450.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Penyuluh Pertanian PNS, THL TBPP dan PPS	
03	03	19	004	Bantuan operasional pos penyuluh desa	Pengembangan Ekonomi Lokal	-	10 desa			Jumlah POSLUHDES yang menerima bantua operasional	10 Posluhdes	Meningkatnya kapasitas Pos Penyuluhan Desa dalam pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Pertanian	10 Desa/Kelurahan	75.000.000	PAD, DAU, DBH	20 Desa	250.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	POSLUHDES	
03				URUSAN PILIHAN																	
03	03			PERTANIAN																	
03	03	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	12 bln					0			0				
								Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	12 bln												
03	03	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat	100 %	Jumlah surat yang dikirim	1000 Buah	3.000.000	PAD, DAU, DBH	1000 Buah	8.500.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Aparatur Dinas	
03	03	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Blora dan 16 BPP Kecamatan			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	100 %	Terlaksananya komunikasi lewat telpon dan internet, tersedianya air bersih dan penerangan kantor	12 Bulan	390.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	400.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Sumber daya air, listrik dan telepon	
03	03	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100 %	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2 yang terpelihara perizinannya	55 Unit	50.000.000	PAD, DAU, DBH	60 Unit	55.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kendaraan Dinas	
03	03	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan	100 %	Jumlah tenaga pengelola administrasi keuangan Dinas	38 Orang	200.000.000	PAD, DAU, DBH	38 Orang	210.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Pengelola administrasi keuangan Dinas	
03	03	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor	100 %	Jumlah tenaga outsourhing kebersihan dan keamanan kantor	6 Orang	270.000.000	PAD, DAU, DBH	6 Orang	285.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Tenaga Outsourching kebersihan dan keamanan Dinas	
03	03	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan 16 UPT Dinas di Kecamatan			Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	100 %	Jumlah alat tulis kantor	40 Jenis	110.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	125.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Aparatur Dinas	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
03	03	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100 %	tersedianya bahan cetak dan penggandaan	12 Bulan	20.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	30.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Aparatur Dinas	
03	03	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Blora dan 16 UPT Kecamatan			Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	penyediaan komponen instalasi listrik, air dan telepon	12 Bulan	50.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Sarana pendukung gedung kantor	
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	Jumlah lampu penerangan kantor	10 Buah	90.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Bulan	100.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Sarana pendukung gedung kantor	
03	03	01	014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga	100 %	Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga	15 Jenis	50.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	30.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Aparatur Dinas	
03	03	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	Jumlah bahan bacaan yang tersedia untuk aparatur dinas	10200 Eks	20.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	85.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Aparatur Dinas	
03	03	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat	100 %	Meningkatnya kinerja dan kesehatan karyawan	12 Bulan	150.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	160.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Karyawan dan Karyawati Dinas	
03	03	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Regional dan Nasional			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Jumlah perjalanan rapat-rapat koordinasi dan konsultansi ke luar daerah	320 Kali	285.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	300.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Aparatur Dinas	
03	03	01	019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	16 Kecamatan			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Jumlah perjalanan rapat-rapat koordinasi dan konsultansi ke dalam daerah	500 Kali	150.000.000	PAD, DAU, DBH	550 Kali	200.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Aparatur Dinas	
03	03	01	020	Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Blora			Persentase pemenuhan dukungan pelayanan perkantoran	100 %	Jumlah Supir, Tenaga keamanan, kebersihan dan tenaga lepas lainya	27 Orang	346.800.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	360.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Tenaga Keamanan, kebersihan, sopir dan tenaga lepas kantor	
03	03	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	12 bln					0			0				
								Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	12 bln												
03	03	02	003	Pembangunan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Ds. Geneng Kec. Jepon			Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 Unit	Terlaksananya pembangunan gedung sarana penyuluhan dan informasi penyuluhan	1 Paket	30.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Paket	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	bangunan kantor	
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			Jumlah gedung kantor yang dibangun	0 Unit	terlaksananya pembangunan gudang alsintan	1 Paket	0	-	1 Paket	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	bangunan kantor	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kel. Jepon Kec. jepon			Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 Unit	terlaksananya pemindahan tower radio	1 Paket	10.000.000	PAD, DAU, DBH	0 Paket	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	bangunan kantor	
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			Jumlah gedung kantor yang dibangun	0 Unit	terlaksananya pengurugan lokasi gudang arsip	1 Paket	0	-	0 Paket	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	bangunan kantor	
03 03 02 009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas pertanian dan ketahanan pangan Kab. blora			Persentase pemenuhan peralatan gedung kantor	0 %	tersedianya papan informasi kegiatan dinas dan produk2 unggulan pertanian	0 Buah	0	-	0 %	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Sarana Prasarana kantor	
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Blora			Persentase pemenuhan peralatan gedung kantor	100 %	Jumlah AC untuk gedung pertemmuan Dinas	6 Unit	200.000.000	PAD, DAU, DBH	0 %	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Sarana Prasarana kantor	
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Blora			Persentase pemenuhan peralatan gedung kantor	100 %	Jumlah genset untuk penerangan kantor	1 Unit	200.000.000	PAD, DAU, DBH	0 %	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Sarana Prasarana kantor	
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			Persentase pemenuhan peralatan gedung kantor	100 %	Jumlah CCTV untuk penunjang keamanan dan kenyamanan kantor	10 Buah	10.000.000	PAD, DAU, DBH	1 %	12.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Sarana Prasarana kantor	
03 03 02 010	Pengadaan mebeler	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas pertanian dan ketahanan pangan			Persentase pemenuhan mebeler	100 %	tersedinya mebeler untuk kenyamanan aparatur	8 Set	100.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Paket	50.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Mebeler kantor	
03 03 02 012	Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			Persentase pemenuhan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor	100 %	Terlaksananya pembangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor	1 Paket	125.600.000	PAD, DAU, DBH	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Bangunan kantor	
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			Persentase pemenuhan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor	100 %	terlaksananya pembangunan drainase sebagai bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor	1 Paket	0	-	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Bangunan kantor	
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas pertanian dan ketahanan pangan			Persentase pemenuhan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor	100 %	Terlaksananya pembangunan kantin	1 Paket	50.000.000	PAD, DAU, DBH	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Bangunan kantor	
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			Persentase pemenuhan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor	100 %	Terlaksananya pembangunan tempat parkir kendaraan roda 2 dan roda 4	1 Paket	100.000.000	PAD, DAU, DBH	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Bangunan kantor	
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			Persentase pemenuhan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor	100 %	Pembangunan pos jaga	1 Paket	20.000.000	PAD, DAU, DBH	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Bangunan kantor	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			Persentase pemenuhan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor	100 %	Terlaksananya pembangunan rumah genset	1 Paket	50.000.000	PAD, DAU, DBH	0	0	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Bangunan kantor	
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan			Persentase pemenuhan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor	100 %	Terlaksananya pembangunan bangunan pendukung rumah Dinas (finishing pavingisasi halaman kantor)	1 Paket	212.000.000	PAD, DAU, DBH	1	125.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Bangunan kantor	
03	03	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BPP Kecamatan			Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Jumlah BPP Dinas kecamatan yang di rehabilitasi	1 Paket	20.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Paket	45.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Bangunan kantor BPP	
03	03	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	100 %	Terpeliharanya kendaraan Dinas Operasional	8 Unit	127.000.000	PAD, DAU, DBH	8 Unit	130.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Kendaraan Dinas/operasional	
03	03	02	028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan			Persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	terlaksananya perawatan peralatan kantor	5 Jenis	30.000.000	PAD, DAU, DBH	4 Jenis	40.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Perlengkapan dan peralatan kantor	
03	03	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				Pemenuhan kebutuhan pakaian seragam dinas	35 paket					0			0				
03	03	03	005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	35 Unit	Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas hari tertentu	35 Set	15.000.000	PAD, DAU, DBH	40 Buah	20.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Aparatur Dinas	
03	03	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				Peningkatan kapasitas SDM aparatur	15 orang					0			0				
03	03	05	001	Pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Regional Kabupaten dan Provinsi			Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal	15 Orang	Jumlah Aparatur yang mengikut pendidikan dan pelatihan guna peningkatan keterampilan dan pengetahuan	15 Orang	90.000.000	PAD, DAU, DBH	15 Orang	100.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Aparatur Dinas	
03	03	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										0			0				
03	03	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas pertanian dan ketahanan pangan			Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Laporan	Tersedianya dokumen laporan Capaian Kinerja SKPD	4 Laporan	5.000.000	PAD, DAU, DBH	4 Laporan	5.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Akuntabilitas Kinerja Dinas	
03	03	06	004	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dinas pertanian dan ketahanan pangan			Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	Terlaksananya pembuatan laporan keuangan akhir PD	1 Laporan	2.500.000	PAD, DAU, DBH	2 Laporan	5.000.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1	Laporan keuangan Dinas	
TOTAL														19.013.500.000			17.885.500.000				

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KABUPATEN BLORA

DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																	
02	11			KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH																	
02	11	16		PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL DAN MENENGAH				Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	6.775 unit					500.000.000			600.000.000				
02	11	16	003	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah	Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi, serta kemandirian usaha mikro kecil dan menengah	Kab. Blora			Jumlah pelaku UKM yang yang bermitra /bekerja sama baik lokal maupun regional	75 Orang	Terbentuknya kerjasama dan kemitraan antar UKM lokal dan regional	75 Orang	150.000.000	PAD, DAU, DBH	75 Orang	150.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	UKM di Kabupaten Blora	
02	11	16	005	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi, serta kemandirian usaha mikro kecil dan menengah	Kab. Blora			Jumlah sarana promosi bagi UKM yang dikembangkan	1 Paket	Tersedianya sarana promosi hasil produksi UKM	1 Paket	50.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Paket	100.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	UKM di Kab. Blora	
02	11	16	006	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi, serta kemandirian usaha mikro kecil dan menengah	Kab. Blora			Jumlah peserta baru yang dilatihkewirausahaan	100 Orang	Meningkatkan kualitas SDM dan menciptakan lapangan kerja baru	100 Orang	100.000.000	DBHCHT	100 Orang	100.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	UKM di Kab. Blora	
					Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi, serta kemandirian usaha mikro kecil dan menengah	Desa Getas			Jumlah peserta baru yang dilatihkewirausahaan	20 Orang	Meningkatkan kualitas SDM dan menciptakan lapangan kerja baru	20 Orang	20.000.000	PAD, DAU, DBH	20 Orang	20.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	UKM di Kab. Blora	MUSRENBANGCAM
					Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi, serta kemandirian usaha mikro kecil dan menengah	Kelurahan Karangboyo			Jumlah peserta baru yang dilatihkewirausahaan	20 Orang	Terwujudnya Peningkatan SDM dan Menciptakan Lapangan Kerja	20 Orang	25.000.000	PAD, DAU, DBH	20 Orang	25.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	UKM di Kab. Blora	MUSRENBANGCAM
					Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi, serta kemandirian usaha mikro kecil dan menengah	RT. 01 RW. 06 Desa Megeri			Jumlah peserta baru yang dilatihkewirausahaan	20 Orang	Terwujudnya Peningkatan SDM dan Menciptakan Lapangan Kerja	20 Orang	20.000.000	PAD, DAU, DBH	20 Orang	20.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	UKM di Kab. Blora	MUSRENBANGCAM

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi, serta kemandirian usaha mikro kecil dan menengah	Kelurahan Balun			Jumlah peserta baru yang dilatihkewirausahaan	25 Orang	Peningkatan SDM dan Menciptakan Lapangan Kerja	25 Orang	10.000.000	PAD, DAU, DBH	20 Orang	10.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	UKM di Kab. Blora	MUSRENBANGCAM
					Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi, serta kemandirian usaha mikro kecil dan menengah	Desa Mulyorejo			Jumlah peserta baru yang dilatihkewirausahaan	20 Orang	Peningkatan Ketrampilan Perekonomian Masyarakat	20 Orang	25.000.000	PAD, DAU, DBH	25 Orang	25.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	UKM di Kab. Blora	MUSRENBANGCAM
02	11	16	007	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD	Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi, serta kemandirian usaha mikro kecil dan menengah	Kab. Blora			Jumlah pengelola koperasi / KUD yang pemahaman tentang manajemen koperasi meningkat	135 Pengelola Kop/KUD	Meningkatnya pemahaman manajemen koperasi bagi pengelola koperasi/KUD	135 Pengelola Kop/KUD	100.000.000	PAD, DAU, DBH	150 Pengelola Kop/KUD	150.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Pengelola koperasi / KUD se-Kab. Blora	
02	11	17		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH				Persentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk	0,6%					710.000.000			631.529.000				
02	11	17	001	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Kab. Blora			Jumlah orang/UKM yang pemahaman tentang permodalan meningkat	50 Orang/UMKM	Jumlah orang/ UKM yang mengakses permodalan	50 Orang	50.000.000	PAD, DAU, DBH	50 Orang	30.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	UKM di Kab. Blora	
02	11	17	002	Pengembangan klaster bisnis	Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Kab. Blora			Jumlah sentra/klaster UKM yang meningkat pemahamannya tentang pengembangan klaster bisnis	30 Orang/UMKM	Jumlah sentra/klaster/kelompok UKM baru yang dibentuk	1 Kelompok	50.000.000	PAD, DAU, DBH	40 Orang	45.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	UKM di Kab. Blora	
02	11	17	006	Pengembangan sarana pemasaran produk usaha mikro kecil menengah	Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Blok T			Jumlah sarana pemasaran yang dikembangkan/dibentuk	1 Paket	Meningkatnya sarana pemasaran produk usaha mikro kecil menengah (Tenda Limas Blok T)	1 Paket	150.000.000	PAD, DAU, DBH	0	0	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	UKM di Kab. Blora	RESES
					Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Kab. Blora			Jumlah sarana pemasaran yang dikembangkan/dibentuk	1 Paket	Meningkatnya sarana pemasaran produk usaha mikro kecil menengah	1 Paket	50.000.000	PAD, DAU, DBH	1	200.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	UKM di Kab. Blora	
					Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Kab. Blora			Jumlah sarana pemasaran yang dikembangkan/dibentuk	1 Paket	Meningkatnya sarana pemasaran produk usaha mikro kecil menengah	1 Paket	150.000.000	DBHCHT	1	106.529.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	UKM di Kab. Blora	
02	11	17	009	Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah	Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Kab. Blora			Jumlah pameran yang diselenggarakan /diikuti	8 pameran	Terselenggaranya kegiatan promosi produk UMKM melalui pameran.	8 Pameran Paket	260.000.000	PAD, DAU, DBH	9 Pameran Paket	250.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	UKM di Kab. Blora	
02	11	18		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI				Persentase koperasi aktif	80,5%					300.000.000			298.000.000				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Persentase koperasi sehat	30%												
02	11	18	005	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi, serta kemandirian usaha mikro kecil dan menengah	Kab. Blora			Jumlah koperasi yang dibina, diawasi dandidampingi agar berprestasi	45 Pengurus Koperasi	Tersedianya data klasifikasi koperasi yang berprestasi	1 Paket	75.000.000	PAD, DAU, DBH	50 Pengurus Koperasi	70.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Koperasi di Kab. Blora	
02	11	18	007	Penyebaran model - model pola pengembangan koperasi	Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi, serta kemandirian usaha mikro kecil dan menengah	Kab. Blora			Jumlah koperasi yang mendapatkan sosialisasi dan pelatihan tentang perkoperasian	70 Kop/KUD	Terlaksananya Peningkatan Wawasan Perkoperasian	70 Kop/KUD	100.000.000	PAD, DAU, DBH	85 Kop/KUD	0	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Koperasi/KUD di Kab. Blora	
					Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi, serta kemandirian usaha mikro kecil dan menengah	Kab. Blora			Jumlah koperasi yang mendapatkan sosialisasi dan pelatihan tentang perkoperasian	50 Kop/KUD	Terlaksananya Peningkatan Wawasan Perkoperasian	50 Kop/KUD	100.000.000	DBHCHT	50 Kop/KUD	208.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Koperasi/KUD di Kab. Blora	
02	11	18	009	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi, serta kemandirian usaha mikro kecil dan menengah	Kab. Blora			Jumlah dokumen Kebijakan berupa rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi terhadap Koperasi dan UMKM Penerima Dana Bergulir/ Dana Penyertaan Modal	1 Dokumen	Jumlah Koperasi dan UMKM Penerima Dana Bergulir/ Dana Penyertaan Modal yang dipantau dan di evaluasi	120 kumkm	25.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	20.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Koperasi dan UMKM Penerima Dana Bergulir/Dana Penyertaan Modal	
03				URUSAN PILIHAN																	
03	06			PERDAGANGAN																	
03	06	15		PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN				Persentase cakupan pasar yang diawasi	100%					2.180.000.000			3.155.000.000				
03	06	15	003	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Kab. Blora			Jumlah kecamatan yang terdapat unit perdagangan barang / jasa yang diawasi	16 Kec	Terkontrolnya kualitas peredaran barang dan jasa di Kab. Blora	16 Kec	120.000.000	PAD, DAU, DBH	16 Kec	130.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Toko/swalayan/pasar se-Kab. Blora	
03	06	15	004	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah	Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Dindagkop dan UKM Kab. Blora			Jumlah UTTP yang diawasi	1 UTTP	Jumlah sarana dan prasarana dalam mendukung pembentukan Unit Metrologi Legal yang tersedia	1 Paket	600.000.000	DAK FISIK	1 Paket	600.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	UTTP di Kab. Blora	
					Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Dindagkop dan UKM Kab. Blora			Jumlah UTTP yang diawasi	1 UTTP	Jumlah sarana dan prasarana dalam mendukung pembentukan Unit Metrologi Legal yang tersedia	1 Paket	1.400.000.000	DAK FISIK	1 Paket	1.400.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	UTTP di Kab. Blora	
					Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Kab. Blora			Jumlah UTTP yang diawasi	24000 UTTP	terciptanya pasar tertib ukur dan tertib niaga dalam transaksi perdagangan di kabupaten blora	100 %	40.000.000	PAD, DAU, DBH	24000 Paket	1.000.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	UTTP di Kab. Blora	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
03	06	15	005	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Kab. Blora			Jumlah dokumen Kebijakan berupa rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kegiatan bidang perdagangan	1 Dokumen	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan bidang perdagangan	1 Dokumen	20.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	25.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Pengusaha/Pedagang/UKM di Kab. Blora	
03	06	17		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR				Nilai ekspor produk-produk asal Kabupaten Blora	US$ 2.884.411					430.000.000			655.000.000				
03	06	17	002	Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya nilai ekspor dan tertatanya pasar tradisional dan Pedagang Kaki Lima	Kab. Blora			Jumlah pedagang/UKM yang menerima informasi peluang pasar yang disediakan	50 umkm	Meningkatnya wawasan bagi UMKM mengenai peluang pasar perdagangan luar negeri	50 umkm	20.000.000	PAD, DAU, DBH	50 umkm	25.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Pedagang/UKM di Kab. Blora	
03	06	17	008	Membangun jejaring dengan eksportir	Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya nilai ekspor dan tertatanya pasar tradisional dan Pedagang Kaki Lima	Kab. Blora dan Luar Kab. Blora			Jumlah pameran produk UMKM yang diikuti dalam rangka membangun kerjasama dengan pasar luar negeri	5 pameran	Meningkatnya Promosi dan Minat Beli terhadap Produk UMKM	5 Pameran Paket	400.000.000	PAD, DAU, DBH	6 Pameran Paket	600.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Pedagang/UKM di Kab. Blora	
03	06	17	009	Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha	Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya nilai ekspor dan tertatanya pasar tradisional dan Pedagang Kaki Lima	Kab. Blora			Jumlah pengusaha/asosiasi/UKM yang mengikuti koordinasi program pengembangan ekspor	20 umkm	Terselenggaranya kegiatan pengembangan ekspor	20 umkm	10.000.000	PAD, DAU, DBH	25	30.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Pengusaha/Asosiasi/UKM di Kab. Blora	
03	06	18		PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI				Persentase pasar tradisional yang memenuhi syarat kenyamanan dan kesehatan	50%					30.759.200.000			32.245.000.000				
03	06	18	003	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya nilai ekspor dan tertatanya pasar tradisional dan Pedagang Kaki Lima	Kab. Blora			Jumlah kecamatan yang digunakan sebagai tempat pengembangan pasar dan pendistribusian barang/produk	16 Kec	Tersalurnya Pendistribusian Barang/Produk melalui Pasar Murah	16 Kec	200.000.000	PAD, DAU, DBH	16 Kec	250.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Pasar Rakyat di Kab. Blora	
					Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya nilai ekspor dan tertatanya pasar tradisional dan Pedagang Kaki Lima	Kab. Blora			Jumlah kecamatan yang digunakan sebagai tempat pengembangan pasar dan pendistribusian barang/produk	5 Kec	Tersedianya pasar rakyat/daerah yang nyaman, bersih dan sehat	5 Lokasi	10.000.000.000	DAK FISIK	5 Kec	10.000.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Pasar Rakyat di Kab. Blora	
03	06	18	004	Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan	Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya nilai ekspor dan tertatanya pasar tradisional dan Pedagang Kaki Lima	Desa Sidorejo Kec. Kedungtuban			Jumlah bulan dalam pemantauan kegiatanpengembangan kerjasama kemitraandengan masyarakat	12 Bulan	Tercukupnya Kebutuhan Operasional Resi Gudang	12 Bulan	25.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	30.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Pengelola SRG di Kab. Blora	
03	06	18	006	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya nilai ekspor dan tertatanya pasar tradisional dan Pedagang Kaki Lima	Kab. Blora			Jumlah buku/ data informasi perdagangan terkait hasil pemantauan stok distribusi dan harga kebutuhan pokok kab. Blora	5 Paket	Tersedianya informasi perdagangan di Kab. Blora	5 Dokumen	70.000.000	PAD, DAU, DBH	5 Paket	80.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Pasar di Kabupaten Blora	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
03	06	18	007	Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya nilai ekspor dan tertatanya pasar tradisional dan Pedagang Kaki Lima	Kab. Blora			Jumlah orang yang pemahaman tentang penggunaan produk dalam negeri meningkat	40 Orang	Meningkatnya wawasan peserta sosialisasi tentang penggunaan produk dalam negeri	40 Orang	20.000.000	PAD, DAU, DBH	40 Orang	30.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Pengusaha di Kabupaten Blora	
03	06	18	008	Rehabilitasi/pemeliharaan pasar daerah	Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya nilai ekspor dan tertatanya pasar tradisional dan Pedagang Kaki Lima	15 Pasar di Kab. Blora			Jumlah pasar daerah yang direhabilitasi / dipelihara	15 pasar	Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan Pasar Daerah	15 pasar	900.000.000	Dana Infrastruktur	15 pasar	900.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Pasar Rakyat/Daerah di Kab. Blora	
					Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya nilai ekspor dan tertatanya pasar tradisional dan Pedagang Kaki Lima	Todanan, KECAMATAN TODANAN			Jumlah pasar daerah yang direhabilitasi / dipelihara	1 pasar	Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan Pasar Daerah	1 pasar	100.000.000	Dana Infrastruktur	0 pasar	0	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Pasar Rakyat/Daerah di Kab. Blora	RESES
					Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya nilai ekspor dan tertatanya pasar tradisional dan Pedagang Kaki Lima	Desa Seso, Kec. Jepon dan Cepu, KECAMATAN CEPU			Jumlah pasar daerah yang direhabilitasi / dipelihara	2 pasar	Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan Pasar	2 pasar	330.000.000	Dana Infrastruktur	0 pasar	0	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Pasar Rakyat/Daerah di Kab. Blora	RESES
					Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya nilai ekspor dan tertatanya pasar tradisional dan Pedagang Kaki Lima	Wulung, KECAMATAN RANDUBLATUNG			Jumlah pasar daerah yang direhabilitasi / dipelihara	1 pasar	Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan Pasar Daerah (Kios Pasar)	1 pasar	250.000.000	Dana Infrastruktur	0 pasar	0	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Pasar Rakyat/Daerah di Kab. Blora	RESES
					Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya nilai ekspor dan tertatanya pasar tradisional dan Pedagang Kaki Lima	2 pasar rakyat (Pasar Rakyat Cepu Induk dan Pasar Rakyat Randublatung)			Jumlah pasar daerah yang direhabilitasi / dipelihara	2 pasar	Tersedianya pasar rakyat/daerah yang nyaman, bersih dan sehat	2 pasar	7.000.000.000	BANKEU PROV	2 pasar	7.000.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Pasar Rakyat/Daerah di Kab. Blora	
03	06	18	009	Pembangunan pasar rakyat	Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya nilai ekspor dan tertatanya pasar tradisional dan Pedagang Kaki Lima	1 Pasar Rakyat di Kab. Blora (Pasar Rakyat Blora)			Jumlah Pasar Rakyat yang tersedia untuk meningkatkan kegiatan perdagangan	1 pasar	Meningkatnya Fasilitas untuk Pasar Rakyat dalam rangka peningkatan kualitas kegiatan perdagangan	1 pasar	100.000.000	Dana Infrastruktur	1 pasar	100.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Pasar di Kabupaten Blora	
					Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya nilai ekspor dan tertatanya pasar tradisional dan Pedagang Kaki Lima	1 Pasar Rakyat di Kab. Blora (Pasar Rakyat Blora)			Jumlah Pasar Rakyat yang tersedia untuk meningkatkan kegiatan perdagangan	1 pasar	Meningkatnya Fasilitas untuk Pasar Rakyat dalam rangka peningkatan kualitas kegiatan perdagangan	1 pasar	10.000.000.000	BANKEU PROV	1 pasar	10.000.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Pasar di Kabupaten Blora	
03	06	18	010	Pembangunan ruko/ kios	Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya nilai ekspor dan tertatanya pasar tradisional dan Pedagang Kaki Lima	Kab. Blora			Jumlah bangunan Ruko/Kios yang tersedia untuk meningkatkan kegiatan perdagangan	1 Lokasi	Meningkatnya Kualitas Ruko/Kios yang berpengaruh positif untuk kegiatan perdagangan	2 Lokasi	1.050.000.000	Dana Infrastruktur	2 Lokasi	3.000.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Ruko/Kios di Kab. Blora	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
03	06	18	011	Memfasilitasi akses data dan informasi pasar	Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya nilai ekspor dan tertatanya pasar tradisional dan Pedagang Kaki Lima	Kabupaten Blora			Jumlah pasar yang di data jumlah Pedagang dan Omset Pasar se-Kabupaten Blora	15 pasar	Tersedianya pendataan pedagang dan data omset pasar se-Kab. Blora	15 pasar	100.000.000	PAD, DAU, DBH	15 pasar	225.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Pasar di Kabupaten Blora	
03	06	18	012	Intensifikasi dan efisiensi pungutan retribusi pasar	Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya nilai ekspor dan tertatanya pasar tradisional dan Pedagang Kaki Lima	Kabupaten Blora			Jumlah pasar yang dipantau jumlah setoran PAD dari penarikan retribusi pasar	15 pasar	Meningkatnya PAD se-Kabupaten Blora	15 pasar	100.000.000	PAD, DAU, DBH	15 pasar	125.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Pasar di Kabupaten Blora	
03	06	18	013	Pembinaan bagi pengelola dan pedagang pasar tradisional	Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya nilai ekspor dan tertatanya pasar tradisional dan Pedagang Kaki Lima	Kabupaten Blora			Jumlah Pengelola dan Pedagang Pasar Tradisional yang dibina tentang pengelolaan pasar yang baik	50 Orang	Meningkatnya pemahaman pengelola dan pedagang pasar tradisional dalam pengelolaan pasar yang baik	50 Orang	60.000.000	PAD, DAU, DBH	50 Orang	125.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Pengelola dan Pedagang Pasar di Kab. Blora	
03	06	18	014	Pengelolaan kebersihan pasar tradisional	Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya nilai ekspor dan tertatanya pasar tradisional dan Pedagang Kaki Lima	Kabupaten Blora			Jumlah pasar yang dipelihara kebersihannya	15 pasar	Meningkatnya pengelolaan kebersihan pasar	15 pasar	434.200.000	PAD, DAU, DBH	15 pasar	350.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Pasar di Kabupaten Blora	
03	06	18	015	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya nilai ekspor dan tertatanya pasar tradisional dan Pedagang Kaki Lima	Kabupaten Blora			Jumlah dokumen Kebijakan berupa rekomendasi pengelolaan pasar yang baik	1 Dokumen	Tersedianya dokumen kebijakan berupa rekomendasi pengelolaan pasar yang baik, nyaman dan sehat	1 Dokumen	20.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	30.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Pasar di Kabupaten Blora	
03	06	19		PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKILIMA DAN ASONGAN				Jumlah cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	245 orang					300.000.000			690.000.000				
								Jumlah lokasi PKL yang tertata	10 lokasi												
03	06	19	001	Pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan	Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya nilai ekspor dan tertatanya pasar tradisional dan Pedagang Kaki Lima	Kabupaten Blora			Jumlah PKL dan Asongan yang dibina tentang penertiban PKL	120 PKL & Asongan	Terbinanya PKL dan Asongan	120 PKL & Asongan	150.000.000	DBHCHT	120 PKL & Asongan	150.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	PKL dan Asongan di Kab. Blora	
					Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya nilai ekspor dan tertatanya pasar tradisional dan Pedagang Kaki Lima	Kab. Blora			Jumlah PKL dan Asongan yang dibina tentang penertiban PKL	60 PKL & Asongan	Terbinanya PKL dan Asongan	60 PKL & Asongan	50.000.000	PAD, DAU, DBH	60 PKL & Asongan	40.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	PKL dan Asongan di Kab. Blora	
03	06	19	003	Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya nilai ekspor dan tertatanya pasar tradisional dan Pedagang Kaki Lima	Kab. Blora			Jumlah lokasi penataan tempat berusaha buar bagi PKL dan Asongan	1 Lokasi	Tempat Usaha PKL & Asongan Tertata dengan baik	1 Lokasi	100.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Lokasi	500.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	PKL dan Asongan di Kab. Blora	
03				URUSAN PILIHAN																	
03	06			PERDAGANGAN																	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
03	06	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%					0			0				
03	06	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dindagkop dan UKM Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat	100 %	Terkirimnya surat - surat dinas	12 Bulan	6.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	6.500.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Aparatur	
03	06	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dindagkop dan UKM Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	100 %	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air, telepon dan listrik	12 Bulan	360.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	365.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Aparatur	
03	06	01	003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dindagkop dan UKM Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	9.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	10.500.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Aparatur	
03	06	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dindagkop dan UKM Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100 %	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan tertib administrasi perijinan	12 Bulan	15.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	25.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Aparatur	
03	06	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dindagkop dan UKM Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan	100 %	Pengelolaan administrasi keuangan dan barang daerah dengan baik dan lancar	12 Bulan	300.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	350.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1		
03	06	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dindagkop dan UKM Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor	100 %	Terciptanya suasana kerja yang nyaman dan terciptanya kebersihan kantor dan pasar daerah	12 Bulan	200.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	250.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Aparatur	
03	06	01	009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dindagkop dan UKM Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja	100 %	Tercukupinya peralatan dan perlengkapan kantor yang layak pakai dan baik	12 Bulan	100.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	125.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Aparatur	
03	06	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dindagkop dan UKM Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	100 %	Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	12 Bulan	199.938.000	PAD, DAU, DBH	100 %	200.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Aparatur	
03	06	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dindagkop dan UKM Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100 %	Terpenuhinya penyediaan cetak retribusi pasar dalam rangka pemungutan PAD pasar	12 Bulan	225.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	200.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Aparatur	
03	06	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dindagkop dan UKM Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	12 Bulan	35.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	40.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Aparatur	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
03	06	01	013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dindagkop dan UKM Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	Tercukupinya peralatan dan perelengkapan kantor untuk aparatur dan operasional	12 Bulan	200.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	250.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Aparatur	
03	06	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dindagkop dan UKM Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan pegawai tentang informasi terkini	12 Bulan	30.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	35.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Aparatur	
03	06	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dindagkop dan UKM Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat	100 %	Tercukupinya makan minum untuk tamu, pegawai dan rapat yang dapat menunjang kegiatan dinas	12 Bulan	88.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	95.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Aparatur	
03	06	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dindagkop dan UKM Kab. Blora			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultansi ke luar daerah	12 Bulan	298.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	300.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Aparatur	
03	06	01	019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dindagkop dan UKM Kab. Blora			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultansi ke dalam daerah	12 Bulan	190.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	195.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Aparatur	
03	06	01	020	Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dindagkop dan UKM Kab. Blora			Persentase pemenuhan dukungan pelayanan perkantoran	100 %	Persentase pemenuhan dalam mendukung pelayanan perkantoran	100 %	350.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	375.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Aparatur	
03	06	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%					0			0				
03	06	02	003	Pembangunan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dindagkop dan UKM Kab. Blora			Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 Unit	Tersedianya bangunan gedung kantor yang representatif	1 Paket	1.150.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Unit	500.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Aparatur	
03	06	02	005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dindagkop dan UKM Kab. Blora			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1 Unit	Tersedianya sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik dan layak	1 Unit	250.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Unit	0	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Aparatur	
03	06	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dindagkop dan UKM Kab. Blora			Persentase pemenuhan peralatan gedung kantor	100 %	Tersedianya sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik dan layak	2 Jenis	20.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	20.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Aparatur	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
03	06	02	010	Pengadaan mebeler	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dindagkop dan UKM Kab. Blora			Persentase pemenuhan mebeler	100 %	Tersedianya sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik dan layak	5 Jenis	100.000.000	PAD, DAU, DBH	0	0	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Aparatur	
03	06	02	011	Pengadaan instalasi air, listrik, dan telepon	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dindagkop dan UKM Kab. Blora			Persentase pemenuhan instalasi air, listrik dan telepon	100 %	Tersedianya sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik dan layak	1 Paket	25.000.000	PAD, DAU, DBH	0	0	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Aparatur	
03	06	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dindagkop dan UKM Kab. Blora			Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	100 %	Tersedianya sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik dan layak	100 %	125.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	130.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Aparatur	
03	06	02	048	Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor UPTD se-Kab. Blora	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dindagkop dan UKM Kab. Blora			Persentase gedung kantor UPTD dalam kondisi baik	100 %	Tersedianya sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik dan layak	100 %	200.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	200.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Aparatur	
03	06	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				Pemenuhan kebutuhan pakaian seragam dinas	100%					0			0				
03	06	03	005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi	Dindagkop dan UKM Kab. Blora			Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	210 Unit	Meningkatnya kualitas disiplin Aparatur	210 Buah	150.000.000	PAD, DAU, DBH	215 Buah	160.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Aparatur	
03	06	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				Peningkatan kapasitas SDM aparatur	100%					0			0				
03	06	05	001	Pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dindagkop dan UKM Kab. Blora			Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal	3 Orang	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur	3 Orang	15.000.000	PAD, DAU, DBH	3 Orang	15.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Aparatur	
03	06	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				Pemenuhan kebutuhan pelaporan kinerja dan keuangan	100%					0			0				
03	06	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dindagkop dan UKM Kab. Blora			Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 Laporan	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 Laporan	9.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Laporan	10.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Aparatur	
03	06	06	004	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dindagkop dan UKM Kab. Blora			Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD sebagai dasar evaluasi kegiatan	1 Laporan	12.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Laporan	12.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Aparatur	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
03	06	06	005	Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dindagkop dan UKM Kab. Blora			Jumlah rencana kinerja dan penetapan kinerja	2 Dokumen	Tersedianya dokumen renja, renstra dan penetapan kinerja sebagai acuan/pedoman kegiatan.	2 Dokumen	9.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Dokumen	9.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Aparatur	
03	06	06	006	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dindagkop dan UKM Kab. Blora			Jumlah laporan akuntabilitas kinerja SKPD	1 Laporan	Tersedianya dokumen LAKIP SPD sebagai evaluasi kinerja instansi pemerintah.	1 Laporan	9.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Laporan	10.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	Aparatur	
TOTAL														39.859.138.000			42.162.529.000				

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KABUPATEN BLORA

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																	
02	01			TENAGA KERJA																	
02	01	15		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	8 %					1.259.000.000			1.630.000.000				
								Persentase tenagakerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	7,5 %												
02	01	15	002	Pembangunan balai latihan kerja	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Kabupaten Blora			Jumlah gedung pelatihan yang dibangun	1 Paket	terpenuhinya pembangunan gedung pelatihan	1 Paket	719.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Paket	800.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1		
02	01	15	006	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Kabupaten Blora			Jumlah orang yang mendapatkan pelatihan keterampilan pencari kerja	144 Orang	meningkatkan keterampilan bagi pencari kerja	144 Orang	360.000.000	DBHCHT	240 Orang	600.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1		
02	01	15	007	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Kabupaten Blora			jumlah sarana prasarana BLK yang dilakukan pemeliharaan	9 Kelas kejuruan	terpeliharanya sarana prasarana BLK	9 Kejuruan	20.000.000	PAD, DAU, DBH	9 Kejuruan	30.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1		
02	01	15	011	Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan bagi Pencari Kerja (DBHCHT)	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Kabupaten Blora			jumlah pengadaan peralatan penunjang pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	1 Paket	terpenuhinya sarana dan prasarana BLK	1 Paket	160.000.000	DBHCHT	1 Paket	200.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1		
02	01	16		PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA										285.000.000			395.000.000				
02	01	16	001	Penyusunan informasi bursa kerja	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Kabupaten Blora			Jumlah Laporan Bulanan Bursa Ketenagakerjaan	72 Laporan	terpenuhinya jumlah laporan bulanan bursa ketenagakerjaan	72 Laporan	30.000.000	PAD, DAU, DBH	72 Laporan	40.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1		
02	01	16	002	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Kabupaten Blora			jumlah pencari kerja yang memperoleh informasi kesempatan kerja	1000 Orang	terwujudnya informasi bursa kerja	1000 Orang	70.000.000	PAD, DAU, DBH	1000 Orang	75.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1		
02	01	16	005	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Kabupaten Blora			jumlah masyarakat yang memproleh pelatihan kewirausahaan	40 Orang	terlaksanakannya pelatihan kewiurausahaan	40 Orang	60.000.000	PAD, DAU, DBH	60 Orang	130.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	01	16	006	Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Kabupaten Blora			jumlah masyarakat yang memperoleh pelatihan ketrampilan	60 Orang	terwujudnya kelompok usaha mikro mandiri	60 Orang	125.000.000	PAD, DAU, DBH	60 Orang	150.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1		
02	01	17		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN										220.000.000			300.000.000				
02	01	17	002	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	-	Kabupaten Blora			jumlah perusahaan yang memperoleh fasilitasi perselisihan hubungan industrial	75 Perusahaan	terpenuhinya hak dan kewajiban para pekerja di ketenagakerjaan	75 Perusahaan	80.000.000	PAD, DAU, DBH	75 Perusahaan	100.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1		
02	01	17	003	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	-	Kabupaten Blora			jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja	75 Perusahaan	terselenggaranya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan ditempat kerja	75 Perusahaan	70.000.000	PAD, DAU, DBH	75 Perusahaan	100.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1		
02	01	17	004	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	-	Kabupaten Blora			Jumlah perusahaan yang memperoleh fasilitasi pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	75 Perusahaan	terwujudnya hubungan industrial yang sehat di perusahaan	75 Perusahaan	70.000.000	PAD, DAU, DBH	75 Perusahaan	100.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1		
03				URUSAN PILIHAN																	
03	07			PERINDUSTRIAN																	
03	07	16		PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH				Nilai produksi industri	Rp 1.296.724.867					9.853.000.000			5.500.000.000				
								Cakupan kelompok pengrajin yang dibina	828 IKM												
								Cakupan pelaku IKM yang mengikuti promo produk	12 pengrajin												
03	07	16	001	Fasilitasi bagi industri kecil menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya jumlah, produktivitas dan profitabilitas industri	Kabupaten Blora			Jumlah orang yang mendapatkan fasilitasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya	40 Orang	meningkatnya jumlah industri	40 Orang	75.000.000	PAD, DAU, DBH	40 Orang	100.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1		
03	07	16	002	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya jumlah, produktivitas dan profitabilitas industri	Kabupaten Blora			Jumlah orang yang mendapat pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan Klaster Industri	60 Orang	meningkatnya keterampilan IKM	60 Orang	125.000.000	PAD, DAU, DBH	60 Orang	150.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1		
03	07	16	009	Revitalisasi Sentra IKM	Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya jumlah, produktivitas dan profitabilitas industri	Sentra IKM Jepon			Jumlah mesin/ peralatan guna melengkapi sarana produksi dan sarana pembinaan IKM	1 Paket	Meningkatnya sarana dan prasarana IKM	1 Lokasi	9.453.000.000	DAK FISIK	1 Paket	5.000.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya jumlah, produktivitas dan profitabilitas industri	Kabupaten Blora			Jumlah pembangunan fisik sarana produksi, sarana pembinaan dan sarana penunjang lainnya yang diperlukan dalam sentra	1 Paket	Meningkatnya sarana dan prasarana IKM	1 Lokasi	0	-	0 Paket	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1		
03	07	16	010	Penyediaan Sarana dan Prasarana Klaster Industri	Pengembangan Ekonomi Lokal	Meningkatnya jumlah, produktivitas dan profitabilitas industri	Kabupaten Blora			Jumlah sarana dan prasarana klaster industri untuk pameran	3 Kali	terpenuhinya pameran produk unggulan	3 Kali	200.000.000	PAD, DAU, DBH	3 Kali	250.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1		
03	07	17		PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI				Persentase industri yang telah menerapkan teknologi	40 %					280.000.000			350.000.000				
03	07	17	001	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Kabupaten Blora			Jumlah IKM yang mendapat pelatihan peningkatan SDM dalam penerapan teknologi industri	40 IKM	meningkatnya kemampuan teknologi industri	40 Orang	75.000.000	PAD, DAU, DBH	40 Orang	100.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1		
03	07	17	002	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Kabupaten Blora			Jumlah perajin yang mendapatkan pengembangan dan pelayanan teknologi industri	60 perajin	meningkatnya kualitasnya SDM pelaku usaha	60 Orang	125.000.000	PAD, DAU, DBH	60 Orang	150.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1		
03	07	17	005	Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi (DBHCHT)	Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Kabupaten Blora			Jumlah perajin yang meningkat kemampuan industri berbasis teknologi	40 perajin	orang yang mendapatkan pelatihan berbasis teknologi	40 Orang	80.000.000	DBHCHT	40 Orang	100.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1		
03	07	19		PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL				Jumlah industri	11805					45.000.000			50.000.000				
03	07	19	002	penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Pengembangan Ekonomi Lokal	-	Kabupaten Blora			Jumlah kecamatan yang didata industri	3 Kec	update data industri	3 Kec	45.000.000	PAD, DAU, DBH	3 Kec	50.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1		
03	08			TRANSMIGRASI																	
03	08	17		PROGRAM TRANSMIGRASI REGIONAL				Jumlah Transmigran diberangkatkan	15 KK					114.999.400			210.000.000				
03	08	17	001	Penyuluhan transmigrasi regional	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya kualitas pelayanan statistik, kearsipan, persandian, dan transmigrasi	Kabupaten Blora			jumlah desa calon transmigran yang memperoleh penyuluhan	3 Desa	meningkatnya calon wawasan transmigran	3 Desa	20.000.000	PAD, DAU, DBH	5 Desa	50.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1		
03	08	17	003	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya kualitas pelayanan statistik, kearsipan, persandian, dan transmigrasi	Kabupaten Blora			Jumlah MoU kerjasama dengan daerah penempatan transmigrasi	2 Dokumen	terprnuhinya kerjasama antar daerah	2 Dokumen	49.999.400	PAD, DAU, DBH	2 Dokumen	60.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
03	08	17	004	Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya kualitas pelayanan statistik, kearsipan, persandian, dan transmigrasi	Kabupaten Blora			Jumlah transmigran yang diberangkatkan	15 KK	terpenuhinya transmigran yang diberangkatkan	15 KK	45.000.000	PAD, DAU, DBH	20 KK	100.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1		
03				URUSAN PILIHAN																	
03	07			PERINDUSTRIAN																	
03	07	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %					0			0				
								Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	12 bulan												
03	07	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat	100 %	tersedianya jasa surat menyurat (materai 400 lb, surat 2120 bh)	100 %	15.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	22.500.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1		
03	07	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	100 %	kelancaran proses komunikasi dan terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sumber daya listrik (12 bulan)	100 %	125.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	150.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1		
03	07	01	003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	terawatnya sarana dan prasarana kantor (AC, Laptop 20 buah, dan komputer 12 buah)	100 %	50.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	75.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1		
03	07	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100 %	terwujudnya pemeliharaan perijinan kendaraan dinas (mobil 5 unit, motor 20 unit)	22 Unit	20.000.000	PAD, DAU, DBH	22 Unit	25.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1		
03	07	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan	100 %	terbayarnya honorium jasa administrasi keuangan (27 orang)	100 %	150.000.000	PAD, DAU, DBH	30 Orang	165.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1		
03	07	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor	100 %	Terwujudnya kebersihan lingkungan kantor (Jasa Kebersihan 2 orang 12 bulan, Alat-alat Kebersihan 34 jenis)	100 %	44.000.000	PAD, DAU, DBH	600 m2	50.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
03	07	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	100 %	tersedianya kebutuhan alat tulis kantor (56 jenis barang ATK 12 bulan)	100 %	75.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	80.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1		
03	07	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100 %	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dokumen (Spanduk 15 buah, 109.000 lembar fotocopy)	100 %	25.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	37.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1		
03	07	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	tersedianya kebutuhan listrik/ penerangan bangunan kantor (lampu, stopkontak, saklar, kabel, steker selama 12 bulan)	100 %	40.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	50.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1		
03	07	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	tersedianya sarana sumber informasi (Suara merdeka 1 bh 12 bln, Jawa Pos 1 bh 12 bln, Jateng Pos 1 bh 12 bln, Wawasan 1 bh 12 bln, Memorandum 4 bh, Majalah 4 bh)	100 %	20.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	28.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1		
03	07	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat	100 %	tersedianya kebutuhan makan minum harian dan rapat (air mineral gelas 42 dus x 12 bl, air galon 50 dus, air botol mineral 10 dus, snack 55 x 48 minggu)	100 %	60.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	75.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1		
03	07	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	terwujudnya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	400 Kali	200.000.000	PAD, DAU, DBH	400 Kali	265.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1		
03	07	01	019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	terselenggarakannya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	400 Kali	85.000.000	PAD, DAU, DBH	400 Kali	110.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1		
03	07	01	020	Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan dukungan pelayanan perkantoran	100 %	tersedianya jasa pendukung perkantoran (tenaga honorer 13 orang, instruktur senam 1 orang)	100 %	189.600.000	PAD, DAU, DBH	100 %	200.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
03	07	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan					0			0				
03	07	02	007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan perlengkapan gedung kantor	100 %	terpenuhinya perlengkapan gedung kantor (12 bulan)	100 %	94.200.000	PAD, DAU, DBH	1 Paket	200.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1		
03	07	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan peralatan gedung kantor	100 %	tersedianya peralatan kantor (Komputer 2 unit, Notebook 3 unit, printer 5 unit, soundsystem 1 paket, soundsystem portable 1 unit)	100 %	95.185.600	PAD, DAU, DBH	100 %	150.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1		
03	07	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	terawatnya gedung kantor (rehab kantor, pengecatan pagar dan gedung)	100 %	115.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	200.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1		
03	07	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	100 %	terawatnya kendaraan dinas/ operasional (12 bulan)	100 %	55.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	75.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1		
03	07	02	029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeler	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Persentase mebeler dalam kondisi baik	100 %	terawatnya mebeler kantor (meja, kursi, almari)	100 %	30.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	75.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1		
03	07	02	030	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Persentase bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Terpeliharanya bangunan pendukung gedung kantor (Tempat Parkir dan bangunan pendukung lain)	100 %	100.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	200.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1		
03	07	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				Pemenuhan kebutuhan pakaian seragam dinas	1 paket					0			0				
								Pemenuhan kebutuhan pakaian seragam dinas													

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
03	07	03	005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi	Kabupaten Blora			Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	50 Unit	tersedianya pakaian hari tertentu	50 Unit	36.000.000	PAD, DAU, DBH	50 Orang	50.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1		
03	07	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				Peningkatan kapasitas SDM aparatur	10 kali					0			0				
03	07	05	001	Pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal	10 Orang	peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan formal	10 Kali	25.000.000	PAD, DAU, DBH	10 Kali	75.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1		
03	07	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				Nilai Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	100 %					0			0				
								Pemenuhan kebutuhan pelaporan kinerja dan keuangan	100 %												
03	07	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Laporan	laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kerja	12 Laporan	3.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Laporan	10.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1		
03	07	06	002	Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Jumlah laporan keuangan semesteran	2 Laporan	Tersusunnya laporan keuangan semesteran SKPD	2 Dokumen	3.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Dokumen	5.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1		
03	07	06	004	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Dokumen	3.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	5.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1		
03	07	06	005	Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Jumlah rencana kinerja dan penetapan kinerja	3 Dokumen	terpenuhinya penyusunan renja dan penempatan kerja	3 Dokumen	3.000.000	PAD, DAU, DBH	3 Dokumen	10.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
03 07 06 006	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Jumlah laporan akuntabilitas kinerja SKPD	1 Laporan	laporan akuntabilitas kinerja SKPD yang tersusun	1 Dokumen	3.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	5.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	1		
TOTAL											13.720.985.000			10.827.500.000				

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KABUPATEN BLORA

SEKRETARIAT DAERAH

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
04	01			ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																	
04	01	16		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH				Terlaksananya rakor forkopimda	1					4.722.662.000			3.795.800.000				
								Terlaksananya rakor pejabat SKPD	70												
04	01	16	001	Dialog/audensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial kemasyarakatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Umum			Jumlah kegiatan Dialog/audensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial kemasyarakatan	15 Kali	Dialog Bupati, Wakil dengan tokoh masyarakat	15 Kali	405.472.000	PAD, DAU, DBH	20 Kali	645.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	16	002	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Umum			Jumlah kegiatan Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	10 Kali	Lancarnya Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara	5 Kali	50.000.000	PAD, DAU, DBH	7 Kali	74.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	16	004	Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Umum			Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi antar forkopimda dan pejabat pemerintah daerah	36 Dokumen	Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah	36 Dokumen	1.700.000.000	PAD, DAU, DBH	36 Dokumen	30.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Tapem			Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi antar forkopimda dan pejabat pemerintah daerah	66 Dokumen	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi antar forkopimda dan pejabat pemerintah daerah	66 Dokumen	202.190.000	PAD, DAU, DBH	66 Dokumen	210.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	16	005	Kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Umum			Presentase pemenuhan Kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan	100 %	Kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	100 %	150.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	253.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	16	006	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Umum			Presentase pemenuhan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya yang dilaksanakan	100 %	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	100 %	1.302.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	1.640.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	16	007	Pelayanan jasa pemeliharaan kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Umum			Jumlah orang yang menerima pelayanan jasa pemeliharaan kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	2 Orang	General chek up kesehatan Bupati dan wakil	100 %	18.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Orang	19.800.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	16	008	Penyediaan makanan dan minuman serta kebutuhan rumah tangga rumah dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Umum			Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman serta kebutuhan rumah tangga rumah dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	Tersedianya makanan dan minuman rumah tangga Bupati dan Wakil	12 Bulan	895.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	924.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	23		PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI				Persentase organisasi perangkat daerah dengan skor nilai pelayanan publik "baik"	70					5.000.000			70.000.000				
04	01	23	002	Penilaian pelaksanaan pelayanan publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Ortala Setda			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Pelayanan Publik	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penilaian Penilaian Palayanan Publik	1 Dokumen	5.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	70.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1	Perangkat Daerah di Kabupaten Blora	
04	01	24		PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT				Terselesainya kasus hukum di lembaga peradilan dan memperoleh kekuatan hukum	1					97.969.000			300.000.000				
04	01	24	002	Penyelesaian kasus litigasi dan non litigasi	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Hukum			Jumlah kasus hukum yang ditangani dilembaga peradilan	1 Kasus	putusan perkara perdata/TUN/IP/Arbitrase	1 Kasus	97.969.000	PAD, DAU, DBH	3 Kasus	300.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	25		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH				Terlaksananya kerjasama antar pemerintah daerah di bidang ekonomi	2 kerjasama					180.000.000			250.000.000				
								Terlaksananya kerjasama antar pemerintah daerah dengan pihak ketiga, serta SKPD dengan pihak ketiga	12 kerjasama												
04	01	25	001	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Tapem			Jumlah kerjasama di bidang pelayanan publik	17 Dokumen	Jumlah kerjasama di bidang pelayanan publik	17 Dokumen	90.000.000	PAD, DAU, DBH	20 Dokumen	100.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1	Masyarakat, pemerintah, dan swasta	
04	01	25	002	Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Tapem			Jumlah kegiatan kerjasama di bidang ekonomi	3 Keg	Jumlah kerjasama di bidang ekonomi	3 Keg	90.000.000	PAD, DAU, DBH	3 Keg	150.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1	Pemerintah, swasta, dan masyarakat	
04	01	26		PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				Terselenggarnya kadarkum tk Kab/Bakorwil/Provinsi	2					829.535.000			1.310.000.000				
								Tersusununnya dan Beredarnya Himpunan Perda, Perbup, Keputusan Bupati & WPU	500												
								Terselenggaranya Bintek, Produk Hukum	12												
								Peningkatan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum	12												

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Penyuluhan hukum peraturan perundang-undangan	4												
								Terselenggarnya kadarkum tk Kab/Bakorwil/Provinsi													
								Tersusunnya Peraturan Bupati	4												
								Tersusunnya Ranperda	10												
04	01	26	002	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Tapem			Jumlah rancangan peraturan perundang undangan	1 Dokumen	Tersusunnya ranperda tentang Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Blora	1 Dokumen	20.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Dokumen	30.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bag. Pemerintahan Desa			Jumlah penyusunan Ranperda dan perbup yang ditetapkan	3 Dokumen	Tersusunnya Ranperda, Peraturan Bupati, Naskah Akademik, dan Asistensi tentang Pemerintahan Desa	3 Dokumen	223.570.000	PAD, DAU, DBH	4 Dokumen	375.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Hukum			Jumlah penyusunan Ranperda dan perbup yang ditetapkan	13 Ranperda/Perbup	tersusunnya raperda dan peraturan Bupati	13 Ranperda/Perbup	145.944.000	PAD, DAU, DBH	15 Dokumen	170.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	26	003	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Hukum			Jumlah perda yang ditetapkan	10 Perda	ditetapkannya peraturan daerah	10 Perda	102.790.000	PAD, DAU, DBH	14 Perda	170.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	26	004	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Hukum			Jumlah Laporan Aksi HAM	5 Laporan	diketahuinya pelaksanaan, pemenuhan, penegakan HAM dan penilaian HAM kab. peduli HAM	5 Laporan	20.195.000	Bagi Hasil Pajak Rokok Daerah	5 Laporan	30.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	26	005	Publikasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Hukum			Jumlah Himpunan PERDA, WPU, Lembaran Lepas SK dan Perbup	500 Buku	publikasi perda, WPU, perbup dan lembaran lepas	500 Buku	88.200.000	Bagi Hasil Pajak Rokok Daerah	650 Buku	120.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	26	006	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi, dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Hukum			Jumlah pengkajian produk Hukum	12 Produk hukum	ditetapkannya produk hukum daerah	12 Produk hukum	30.000.000	PAD, DAU, DBH	22 Produk hukum	75.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	26	008	Peningkatan sistem jaringan dokumentasi informasi hukum	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Hukum			Jumlah bulan pemeliharaan sistem jaringan dokumentasi informasi hukum	12 Bulan	tercapainya pembinaan, pembelian buku, pengembangan JDIH (Aplikasi), peningkatan pelayanan Informasi Hukum	12 Bulan	83.500.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	200.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	26	009	Penyuluhan hukum peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Hukum			jumlah Penyuluhan Hukum	4 Kali	meningkatkan kesadaran hukum	4 Kali	81.836.000	Bagi Hasil Pajak Rokok Daerah	6 Kali	80.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	26	010	Pembinaan Kadarkum.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Hukum			jumlah Lomba kadarkum tingkat Kabupaten/Provinsi dan meningkatkan pemahaman masy. Terhadap hukum	2 Kali	meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, penyuluhan hukum	2 Kali	33.500.000	PAD, DAU, DBH	4 Kali	60.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	31		PROGRAM KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH				Jumlah organisasi perangkat daerah yang dievaluasi struktur dan uraian tugasnya	1 dokumen					242.000.000			170.000.000				
04	01	31	001	Penyusunan pedoman umum perangkat daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Ortala Setda			Jumlah Perbup yang ditetapkan	1 Perbup	Jumlah Peraturan Bupati yang ditetapkan	1 Perbup	110.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Perbup	10.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1	Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana Perangkat Daerah se-Kabupaten Blora	
04	01	31	002	Pembentukan perangkat daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Ortala Setda			Jumlah Rancangan Perda Yang disusun	1 Dokumen	Jumlah Rancangan Perda Yang disusun	1 Dokumen	70.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DAERAH	1	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora	
04	01	31	003	Penyusunan pedoman teknis perangkat daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Ortala Setda			Jumlah Peraturan/ Keputusan Bupati yang ditetapkan	8 Produk hukum	Jumlah Perbup Yang ditetapkan	8 Dokumen	30.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Dokumen	100.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora	
04	01	31	006	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Ortala Setda			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan evaluasi	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Monev	1 Dokumen	2.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	10.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	31	009	Pelaksanaan analisis jabatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Ortala Setda			Jumlah Dokumen Hasil Anjab	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Anjab	2 Perbup	30.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Perbup	50.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1	Jabatan struktural dan jabatan pelaksana se-Kabupaten Blora	
04	01	32		PROGRAM KETATALAKSANAAN PERANGKAT DAERAH				Persentase organisasi perangkat daerah yang menyusun SOP, SPP dan IKM "baik"	70%					230.000.000			255.000.000				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	32	002	Penyusunan pedoman pakaian dinas	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya penerapan standar pelayanan pada perangkat daerah yang memberikan pelayanan publik dan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Bagian Ortala Setda			Jumlah Dokumen Pakaian Dinas	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Peraturan Bupati	1 Perbup	5.000.000	PAD, DAU, DBH	0	0	SEKRETARIAT DAERAH	1	Perangkat Daerah se Kabupaten Blora	
04	01	32	005	Penyusunan pedoman hubungan kerja perangkat daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya penerapan standar pelayanan pada perangkat daerah yang memberikan pelayanan publik dan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Bagian Ortala Setda			Jumlah Dokumen Hubungan Kerja yang disusun	1 Dokumen	Jumlah Keputusan/Peraturan Bupati yang disusun	1 Dokumen	5.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	10.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	32	009	Pengkoordinasian dan fasilitasi pelayanan publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya penerapan standar pelayanan pada perangkat daerah yang memberikan pelayanan publik dan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Bagian Ortala Setda			Jumlah Dokumen pelayanan publik yang disusun	1 Dokumen	Peningkatan Koordinasi dan fasilitasi Pelayanan Publik	1 Keg	130.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	150.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	32	011	Bimbingan teknis penyusunan SPP	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya penerapan standar pelayanan pada perangkat daerah yang memberikan pelayanan publik dan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Bagian Ortala Setda			Jumlah Peserta Bintek penyusunan SPP	50 Orang	Peningkatan Administrasi Pelayanan Publik	50 Orang	40.000.000	PAD, DAU, DBH	50 Orang	45.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	32	017	Monitoring dan evaluasi pelayanan publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya penerapan standar pelayanan pada perangkat daerah yang memberikan pelayanan publik dan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Bagian Ortala Setda			Jumlah Dokumen monitoring dan evaluasi pelayanan publik	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Monev	1 Dokumen	50.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	50.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	33		PROGRAM PENDAYAGUNAAN APARATUR DAERAH										230.000.000			500.000.000				
04	01	33	001	Penyelenggaraan rapat koordinasi PAN daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Ortala Setda			Jumlah penyelenggaraan rakor PAN daerah	1 Kali	Peningkatan Koordinasi Peningkatan Kinerja Aparatur Daerah	1 Keg	25.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Kali	75.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	33	002	Publikasi /sosialisasi kebijakan PAN daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Ortala Setda			Jumlah peserta sosialisasi kebijakan PAN daerah	50 Orang	Peningkatan Koordinasi Peningkatan Kinerja Aparatur	1 Keg	25.000.000	PAD, DAU, DBH	71 Orang	75.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	33	003	Penyusunan kebijakan bidang PAN daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Ortala Setda			Jumlah Dokumen Kebijakan PAN daerah yang disusun	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Keputusan/Peraturan Bupati	1 Dokumen	150.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	300.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	33	004	Fasilitasi/koordinasi peningkatan sumber daya aparatur	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Ortala Setda			Jumlah Kegiatan Peningkatan Kinerja	1 Kali	Peningkatan Kinerja Aparatur	1 Keg	30.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Kali	50.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	34		PROGRAM KOORDINASI BIDANG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				Persentase jumlah SKPD yang mengumumkan seluruh paket Pengadaan Barang/ jasa pemerintah yang diumumkan pada SiRUP						1.004.482.000			1.560.000.000				
04	01	34	002	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Blora	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Administrasi Pembangunan Setda			Jumlah dokumen Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	Tertatanya Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Blora	1 Dokumen	37.918.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	45.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	34	004	Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Administrasi Pembangunan Setda			Prosentase monev kegiatan fisik konstruksi di Kab.Blora	75 %	Mengurangi Permasalahan dalam Pelaksanaan Pembangunan	75 %	54.225.000	PAD, DAU, DBH	75 %	225.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	34	008	Pembentukan dan pelaksanaan ULP	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Administrasi Pembangunan Setada			Prosentase pelayanan Pengadaan Barang/Jasa di ULP	100 %	Terlaksananya proses pengadaan Barang/Jasa melalui ULP	100 %	727.734.000	PAD, DAU, DBH	100 %	750.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	34	009	Sosialisasi Peraturan tentang Pelaksanaan Pembangunan/Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Administrasi Pembangunan Setda			jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Peraturan tentang pelaksanaan Pembangunan/Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	90 Orang	Meningkatnya kompetensi/SDM pelaksana pembangunan	90 Orang	31.125.000	PAD, DAU, DBH	90 Orang	125.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	34	010	Fasilitasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Uji Kompetensi Tenaga Kerja	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Administrasi Pembangunan Setda			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang mengikuti Fasilitasi Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	30 Orang	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi	30 Orang	51.790.000	PAD, DAU, DBH	60 Orang	175.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	34	011	Fasilitasi Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Administrasi Pembangunan Setda			Jumlah petugas admin SiRUP PD yang mengikuti kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rencana Umum Pengadaan	55 Orang	Jumlah paket pengadaan barang/jasa pemerintah yang diumumkan pada SiRUP	3500 Paket	54.130.000	PAD, DAU, DBH	55 Orang	125.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	34	012	Koordinasi Sistem Monitoring Tim Evaluasi Penyerapan dan Realisasi Anggaran (TEPRA)	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Administrasi Pembangunan Setda			Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Tim TEPRA	12 Kali	Jumlah Dokumen Laporan Bulanan Pelaksanaan APBD dan TEPRA yang tersusun	12 Dokumen	47.560.000	PAD, DAU, DBH	12 Dokumen	115.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	36		PROGRAM KOORDINASI TERPADU BIDANG PEREKONOMIAN				Jumlah koordinasi bidang perekonomian						582.250.000			720.000.000				
04	01	36	002	Kesiapan ketersediaan kepokmas	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bag Perekonomian			Jumlah laporan harga kebutuhan pokok masyarakat menjelang hari raya keagamaan dan tahun baru	2 Laporan	tersusunnya laporan harga kebutuhan pokok masyarakat menjelang hari raya keagamaan dan tahun baru	7 Laporan	30.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Laporan	40.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	36	003	Fasilitasi penguatan ekonomi sektor riil	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bag Perekonomian dan Dekranasda			Jumlah kegiatan dalam rangka penguatan kelembagaan Dekranasda dan pelaksaan kegiatan dekranas	2 Kali	terlaksananya peran serta lomba rancang busana, terlaksananya partisipasi HUT dekranasda	100 %	200.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Kali	160.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	36	004	Fasilitasi penguatan dan penataan manajemen perusahaan milik daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bag Perekonomian dan BUMD			Jumlah BUMD yang difasilitasi penguatan dan penataan manajemen	6 BUMD	terlaksananya rakor BUMD, RUPS, monev BUMD dan terealisasinya penyertaan modal pemerintah daerah	100 %	72.250.000	PAD, DAU, DBH	6 BUMD	120.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	36	008	Fasilitasi dan koordinasi dengan SKPD bidang ekonomi	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bag Perekonomian			Jumlah SKPD bidang ekonomi yang difasilitasi dan dikoordinasi	52 SKPD	meningkatnya pelaksanaan koordinasi bidang ekonomi, laporan pupuk dan Tim KP3, laporan rastra, laporan LPG, terlaksananya sosialisasi gugus tugas dan rakor Tim TPID Kab Blora, terbayarnya honor bagi pegawai honorer daerah	52 SKPD	130.000.000	PAD, DAU, DBH	52 SKPD	250.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	36	009	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (DBHCHT)	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bag Perekonomian dan sekretariat DBHCHT			Jumlah peserta sosialisasi ketentuan dibidang cukai	100 Orang	lancarnya laporan penggunaan DBHCHT, terlaksananya sosialiasasi ketentuan di bidang cukai, koordinasi dan konsultasi terkait cukai	12 Bulan	150.000.000	DBHCHT	100 Orang	150.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	37		PROGRAM KOORDINASI BIDANG TATA PEMERINTAHAN				Terlaksananya rakor dan monitoring	0 kali					555.710.000			875.000.000				
								Terlaksananya lelang	24 kali												
								Terlaksananya penyusunan dokumen memori serah terima jabatan Bupati Blora	0 dokumen												
								Tersusunnya dokumen LKP- AMJ	0 dokumen												

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Terlaksananya PATEN di Kab. Blora dan studi orientasi	3 kecamatan												
								Terlaksananya penegasan batas daerah dan inventarisasi pilar batas	2 dokumen												
								Tersusunnya dokumen LPPD	30 dokumen												
								Tersusunnya dokumen LKPJ	140 dokumen												
04	01	37	001	Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Tapem			Jumlah buku LPPD Kabupaten Blora	60 Buku	Kegiatan penyusunan dokumen LPPD Kabupaten Blora Tahun 2018	60 Buku	200.000.000	PAD, DAU, DBH	60 Buku	150.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	37	002	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Tapem			Jumlah buku LKPJ Bupati Blora	140 Buku	Jumlah buku LKPJ Bupati Blora	140 Buku	140.000.000	PAD, DAU, DBH	140 Buku	155.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	37	003	Pelelangan pengelolaan tanah eks bengkok/bondo desa/kelurahan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Tapem			Jumlah kelurahan dalam pelaksanaan lelang tanah eks bengkok/bondo desa/kelurahan	24 Kel	Jumlah pelaksanaan lelang tanah eks bengkok/bondo desa/kelurahan	24 Kel	26.100.000	PAD, DAU, DBH	24 Kel	30.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	37	010	Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Tapem			Jumlah kecamatan yang mendapat pembinaan terkait PATEN	16 Kec	Terlaksananya PATEN di 16 Kecamatan di Kabupaten Blora dan study orientasi ke Kabupaten/ Kota Propinsi lain terkait PATEN, PATEN award	16 Kec	76.000.000	PAD, DAU, DBH	16 Kec	210.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	37	011	Penegasan Batas Daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Tapem			Jumlah kegiatan koordinasi penegasan batas daerah	2 Keg	Terlaksananya penegasan batas daerah dan inventarisasi pilar batas	2 Keg	10.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Keg	15.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	37	012	Inventarisasi Administrasi Pemerintahan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Tapem			Jumlah dokumen inventarisasi administrasi pemerintahan	1 Dokumen	Kegiatan inventarisasi administrasi pemerintahan	1 Dokumen	15.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	15.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	37	014	Fasilitasi dan Koordinasi Pemilu dan Pilkada	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Tapem			Jumlah kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pemilu dan Pilkada	3 Keg	Dukungan Koordinasi Pemilu dan Pilkada	3 Keg	88.610.000	PAD, DAU, DBH	3 Keg	300.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	3	KPU	
04	01	38		PROGRAM KOORDINASI BIDANG PEMERINTAHAN DESA										373.000.000			1.255.000.000				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	38	001	Fasilitasi dan koordinasi bidang pemerintahan desa	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bag. Pemerintahan Desa			Jumlah desa yang difasilitasi dan dikoordinasi dalam bidang pemerintahan desa	4 Desa	Terlaksananya pelaksanaan pelayanan bidang pemerintahan desa	4 Desa	25.000.000	PAD, DAU, DBH	16 Desa	75.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1	Desa di Kabupaten Blora	
04	01	38	002	Sosialisasi kepada aparatur pemerintah desa dan BPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bag. Pemerintahan Desa			Jumlah aparatur pemerintah desa dan BPD yang mendapatkan sosialisasi	271 Orang	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada aparatur pemerintah desa dan pengisian BPD	1 Keg	50.000.000	PAD, DAU, DBH	271 Orang	50.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1	Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Blora	
04	01	38	003	Sosialisasi peraturan mengenai pemerintahan desa	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bag. Pemerintahan Desa			Jumlah peserta yang meningkat wawasan dan pengetahuan Kepala Desa/Perangkat Desa/Kasipem dan Camat tentang Peraturan Pemerintahan Desa	271 Orang	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan Kades/perangkat desa/Kasipem dan Camat tentang Peraturan Pemerintahan Desa	1 Keg	30.000.000	PAD, DAU, DBH	271 Orang	150.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1	Kades/Perangkat Desa, KasiPem dan Camat se-Kabupaten Blora	
04	01	38	004	Inventarisasi kekayaan desa	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bag. Pemerintahan Desa			Jumlah dokumen updating data inventarisasi kekayaan desa	1 Dokumen	Updating data inventarisasi kekayaan desa	1 Buku	15.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	40.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1	Desa di Kab. Blora	
04	01	38	005	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bag. Pemerintahan Desa			Jumlah desa yang dimonitoring dan dievaluasi	20 Desa	Terlaksananya monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ranperdes	20 Dokumen	28.000.000	PAD, DAU, DBH	16 Kec	40.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1	Desa di Kabupaten Blora	
04	01	38	006	Pengelolaan kekayaan desa	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bag. Pemerintahan Desa			Prosentase penyelesaian penataan asset dan kekayaan desa dengan baik dan benar	100 %	Tercapainya prosentase penyelesaian penataan asset, kekayaan desa dengan baik dan benar	100 %	45.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	250.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1	Desa di Kabupaten Blora	
04	01	38	007	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bag. Pemerintahan Desa			Jumlah aparatur desa yang dilatih dalam bidang manajemen pemerintahan desa	271 Orang	Bertambahnya wawasan dan ketrampilan bagi aparatur pemerintah desa	1 Keg	25.000.000	PAD, DAU, DBH	271 Orang	200.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1	Aparatur Pemerintah Desa	
04	01	38	008	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bag. Pemerintahan Desa			Jumlah peserta Sosialisasi permendagri tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa dengan data update dalam jaringan sistem informasi manajemen pemerintahan desa	271 Orang	Terlaksananya penyusunan batas antar desa	1 Keg	50.000.000	PAD, DAU, DBH	271 Orang	150.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1	Desa di Kabupaten Blora	
04	01	38	009	Pengelolaan Jaringan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Desa	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bag. Pemerintahan Desa			Jumlah desa dengan data update dalam jaringan sistem informasi manajemen pemerintahan desa	16 Desa	Tercapainya informasi yang akurat dan mudah di Desa	16 Laporan	35.000.000	PAD, DAU, DBH	16 Desa	150.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1	Desa di Kabupaten Blora	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	38	010	Desk Pemilihan Kepala Desa	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bag. Pemerintahan Desa			Jumlah Desa yang mendapat fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	271 Desa	Tercapainya pengisian dan pembinaan Kepala Desa	1 Keg	50.000.000	PAD, DAU, DBH	271 Desa	50.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1	Desa di Kabupaten Blora	
04	01	38	011	Pembinaan Teknis Administrasi Pemerintahan Desa	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bag. Pemerintahan Desa			Jumlah desa yang mendapat pembinaan teknis pemerintahan desa	16 Desa	Tercapainya pembinaan tekhnis bagi Pemerintahan Desa	1 Keg	20.000.000	PAD, DAU, DBH	16 Desa	100.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1	Desa di Kabupaten Blora	
04	01	39		PROGRAM KOORDINASI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT				Koordinasi bidang kesehatan , tenaga kerja , transmigrasi serta kesejahteraan sosial lainnya	100%					4.598.500.000			5.414.600.000				
								Koordinasi & pemantauan di bidang pemuda , olahraga , pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.	100%												
								Koordinasi dan pemantaauan di bidang pendidikan perpustakaan, kebudayaan urusan agama serta melaksanakan pelayanan administrasi	100%												
								Jumlah survey monitoring dan evaluasi pelaporan bidang kesejahteraan rakyat.	50 kali												
								Jumlah fasilitasi kegiatan keagamaan masyarakat se Kabupaten Blora	100%												
04	01	39	001	Koordinasi dan pemantauan dibidang kesehatan, tenaga kerja, Transmigrasi serta kesejahteraan sosial lainnya	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Prosentase Koordinasi dan Pemantauan dibidang Kesehatan, tenaga Kerja, Transmigrasi serta Kesejahteraan Sosial lainnya	100 %	Prosentase terlaksananya koordinasi dan pemantauan dibidang kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi serta kesejahteraan sosial lainnya	100 %	70.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	100.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1	-	
04	01	39	002	Koordinasi dan Pemantauan dibidang Pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Prosentase Koordinasi dan Pemantauan dibidang Pemuda, Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	100 %	Prosentase terlaksananya koordinasi dan pemantauan dibidang Pemuda, Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	100 %	140.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	200.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1	-	
04	01	39	003	Koordinasi dan pemantauan dibidang pendidikan, perpustakaan, kebudayaan, urusan agama serta melaksanakan pelayanan administrasi	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Prosentase Koordinasi dan Pemantauan dibidang Pendidikan, Perpustakaan, Kebudayaan, Urusan Agama serta Melaksanakan Pelayanan Administrasi	100 %	Prosentase terlaksananya koordinasi dan pemantauan dibidang Pendidikan, Perpustakaan, Kebudayaan, Urusan Agama serta terlaksananya pelayanan administrasi	100 %	450.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	550.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1	-	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	39	004	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Jumlah survey dan monitoring bidang Kesejahteraan Rakyat	50 Kali	Prosentase terlaksananya survey, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kesejahteraan rakyat	100 %	40.000.000	PAD, DAU, DBH	100 Kali	80.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1	calon dan penerima hibah bidang keagamaan	
04	01	39	005	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Masyarakat se Kabupaten Blora	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Prosentase pemenuhan fasilitasi keagamaan	100 %	Prosentase terfasilitasinya kegiatan Guru Madin, TPQ & Sekolah Minggu, Pengajian/Dzikir/Sholawat/Khoul, Peringatan Hari Besar Keagamaan, Kegiatan MTQ/MHQ/STQ dan fasilitasi Hewan Qurban	100 %	3.398.500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	3.934.600.000	SEKRETARIAT DAERAH	1	Masyarakat Kabupaten Blora	
04	01	39	006	Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Jumlah Calon Jamaah Haji Kabupaten Blora yang terlayani	400 Orang	Prosentase terfasilitasinya Jamaah Haji Kabupaten Blora	100 %	500.000.000	PAD, DAU, DBH	550 Orang	550.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	3	Jamaah haji Kab. Blora	
04	01	40		PROGRAM KOORDINASI BIDANG KEHUMASAN				Jumlah kegiatan kepala daerah yang dipublikasikan melalui media massa/elektronik						658.440.000			1.620.000.000				
04	01	40	001	Fasilitasi analisis berita dan pengelolaan pendapat umum	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Humas dan Protokol Setda Blora			Jumlah kliping dan berita tentang blora bagi kepala daerah yang disusun	4 Buah	Bertambahnya informasi bagi Kepala Daerah dalam rangka pengambilan kebijakan	12 Bulan	170.000.000	PAD, DAU, DBH	4 Buah	430.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	40	002	Pelayanan kehumasan bagi kepala daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Humas dan Protokol Setda Blora			Jumlah publikasi pemerintah daerah melalui sambutan,baliho dan foto	5 publikasi	Tersampaikannya program kerja Kepala Daerah	12 Bulan	166.350.000	PAD, DAU, DBH	5 publikasi	400.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	40	003	Penyerbarluasan informasi melalui media massa	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Humas dan Protokol Setda Blora			Jumlah publikasi pengisian berita di media sosial	3 publikasi	Tersedianya dokumentasi/berita tentang Blora dan Kepala Daerah	12 Bulan	266.740.000	PAD, DAU, DBH	3 publikasi	610.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	40	004	Penerbitan majalah/jurnal/buletin/leaflet/brosur/poster	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Humas dan Protokol Setda Blora			jumlah lealfet/booklet informasi Kabupaten Blora yang diterbitkan	2000 Buah	Tersebarnya informasi tentang potensi Kabupaten Blora	12 Bulan	25.350.000	PAD, DAU, DBH	200 Buah	140.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	40	005	Pengembangan informasi dokumentasi kehumasan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Humas dan Protokol Setda Blora			Jumlah peserta bintek fotografer	12 Orang	Tersedianya dokumen kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah	12 Bulan	30.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Orang	40.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	41		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN DAERAH										63.000.000			122.000.000				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	41	001	Penyelenggaraan upacara rutin berkala dan hari besar nasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Humas dan Protokol Setda Blora			Jumlah upacara rutin berkala dan hari besar nasional yang terlaksana	4 Kali	Meningkatnya rasa nasionalisme PNS Kabupaten Blora	12 Bulan	17.460.000	PAD, DAU, DBH	14 Kali	22.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	41	002	Penyelenggaraan keprotokolan dan pelayanan kedinasan kepala daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan penyelenggaraan keprotokolan dan pelayanan kedinasan kepala daerah	100 %	Terlaksananya kegiatan keprotokolan bagi Kepala Daerah	12 Bulan	45.540.000	PAD, DAU, DBH	100 %	100.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	43		PROGRAM KOORDINASI BIDANG PERTANAHAN DAN PERMUKAAN BUMI										35.000.000			40.000.000				
04	01	43	001	Pembakuan nama-nama rupabumi	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya kualitas pelayanan statistik, kearsipan, persandian, dan transmigrasi	Bagian Tapem			Jumlah dokumen pembakuan nama rupabumi	1 Dokumen	Terwujudnya pembakuan nama - nama rupabumi di Kabupaten Blora	1 Dokumen	20.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	20.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	43	006	Pengadaan tanah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya kualitas pelayanan statistik, kearsipan, persandian, dan transmigrasi	Bagian Tapem			Jumlah fasilitasi penyelesaian pertanahan	4 Keg	Terpenuhinya fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	4 Keg	15.000.000	PAD, DAU, DBH	4 Keg	20.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	46		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLA KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH										149.250.000			189.350.000				
04	01	46	001	Konsolidasi pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Setda	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Umum			Jumlah dokumen administrasi keuangan yang baik	12 Dokumen	Terlaksananya penyusunan laporan aset dan laporan keuangan	12 Dokumen	149.050.000	PAD, DAU, DBH	12 Dokumen	189.050.000	SEKRETARIAT DAERAH	1	Bag. Pemerintahan Desa	
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bag. Pemerintahan Desa			Jumlah dokumen administrasi keuangan yang baik	1 Dokumen	Adanya dokumen administrasi keuangan yang baik	12 Bulan	200.000	PAD, DAU, DBH	12 Dokumen	300.000	SEKRETARIAT DAERAH	1	Bag. Pemerintahan Desa	
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
04	01			ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																	
04	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%					0			0				
04	01	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Hukum			Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat	100 %	terlaksananya tertib administrasi perkantoran, pembelian meterai & biaya pengiriman pos surat	100 %	700.000	PAD, DAU, DBH	100 %	800.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat	100 %	Prosentase terpenuhinya kebutuhan surat menyurat	100 %	3.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	3.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Perekonomian			Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat	100 %	Tersedianya materai, perangko	12 Bulan	1.500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	2.200.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bag. Pemerintahan Desa			Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat	100 %	Tercukupinya prosentase pengiriman surat dan pembelian materai	100 %	1.500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	3.750.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat	100 %	Terlaksananya tertib administrasi perkantoran	12 Bulan	1.200.000	PAD, DAU, DBH	100 %	2.700.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Administrasi Pembangunan			Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat	100 %	Jumlah surat terkirim dan tertib administrasi keuangan	12 Bulan	2.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	5.500.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Umum			Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat	100 %	Tersedianya materai dan perangko	100 %	103.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	118.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04 01 01 002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Organisasi dan Tata Laksana			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	100 %	peningkatan kinerja pelayanan	12 Bulan	8.500.000	PAD, DAU, DBH	-12 Bulan	15.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Hukum			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	100 %	terwujudnya alat komunikasi penunjang kegiatan	100 %	7.000.000	PAD, DAU, DBH	100 Bulan	7.200.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	100 %	Terbayarnya jasa internet	12 Bulan	7.200.000	PAD, DAU, DBH	100 Bulan	7.200.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Administrasi Pembangunan			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	100 %	Terpenuhinya Sarana Komunikasi pada ULP	12 Bulan	3.500.000	PAD, DAU, DBH	100 Bulan	9.500.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	100 %	Terwujudnya kelancaran komunikasi	12 Bulan	12.114.000	PAD, DAU, DBH	100 Bulan	12.114.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Tapem			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	100 %	Jumlah pemenuhan pembayaran telepon, air, listrik dan internet	12 Bulan	15.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	18.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Umum			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	100 %	Tersedianya jasa komunikasi listrik, telepon, air	12 Bulan	769.000.000	PAD, DAU, DBH	100 Bulan	772.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04 01 01 003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Umum			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	Tersedianya jasa sewa tratak, sound system	12 Bulan	80.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	305.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04 01 01 006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Hukum			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100 %	tertib administrasi pajak	100 %	4.500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	5.500.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Administrasi Pembangunan			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100 %	Terpenuhinya perijinana kendaraan dinas	9 Unit	2.400.000	PAD, DAU, DBH	100 %	2.400.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	8 %	terpenuhinya administrasi perijinan kendaraan dinas	8 Unit	3.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	3.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kab Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100 %	terbayarnya perizinan kendaraan untuk 2 roda 4 dan 7 roda 2	9 Unit	3.600.000	PAD, DAU, DBH	100 %	0	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bag. Pemerintahan Desa			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100 %	Tercukupinya prosentase perijinan kendaraan dinas operasional	100 %	1.800.000	PAD, DAU, DBH	100 %	3.250.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100 %	Tertib administrasi pajak	12 Bulan	3.360.000	PAD, DAU, DBH	100 %	3.360.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Tapem			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100 %	Jumlah kendaraan dinas yang memerlukan perijinan pajak	11 Unit	3.200.000	PAD, DAU, DBH	11 %	3.500.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Umum			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100 %	Terpenuhinya jasa KIR dan perijinan kendaraan	50 Unit	50.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	65.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04 01 01 007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan	100 %	peningkatan kinerja pengelola keuangan	12 Bulan	48.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	50.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Hukum			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan	100 %	tercapainya pelaksanaan tugas sehari-hari	100 Orang	31.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	35.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Administrasi Pembangunan			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan	12 %	Tersedianya Laporan Administarsi Keuangan	12 Bulan	37.242.000	PAD, DAU, DBH	12 %	50.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan	100 %	Prosentase terpenuhinya jasa pengelola administrasi keuangan, barang dan jasa	100 %	47.500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	47.500.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Perekonomian			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan	100 %	Terbayarnya honor administrasi keuangan	12 Bulan	38.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	38.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan	100 %	Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan dan barang daerah	12 Bulan	37.400.000	PAD, DAU, DBH	100 %	37.400.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bag. Pemerintahan Desa			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan	100 %	Prosentase Kelancaran dalam pelaksanaan tugas	100 %	39.630.000	PAD, DAU, DBH	100 %	47.500.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Tapem			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan	100 %	Jumlah tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan	12 Bulan	44.000.000	PAD, DAU, DBH	12 %	45.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Umum			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan	100 %	Terbayarnya honorarium jasa administrasi keuangan	12 Bulan	5.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	7.500.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04 01 01 008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Hukum			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor	100 %	terbayarnya jasa petugas kebersihan dan belanja alat kebersihan	100 %	4.200.000	PAD, DAU, DBH	100 %	5.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Organisasi dan Tata Laksana			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor	100 %	terciptanya kenyamanan ruang kantor	12 Bulan	4.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	10.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Administrasi Pembangunan			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor	100 %	Terciptanya Lingkungan Kerja Yang Nyaman	12 Bulan	5.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	13.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor	100 %	Prosentase terpenuhinya ruang kerja yang bersih dan nyaman	100 %	4.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	4.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Perekonomian			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor	100 %	Terwujudya kebersihan, keindahan dan kesehatan ruangan	12 Bulan	12.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	12.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Tapem			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor	100 %	Jumlah tersedianya jasa dan alat kebersihan kantor	12 Bulan	10.600.000	PAD, DAU, DBH	12 %	12.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bag. Pemerintahan Desa			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor	100 %	Terwujudnya prosentase kebersihan, keindahan dan kesehatan ruangan/mobil dinas	100 %	10.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	22.500.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor	100 %	Terwujudnya kebersihan dan keindahan kantor	12 Bulan	1.200.000	PAD, DAU, DBH	100 %	6.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Umum			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor	100 %	Tersedianya bahan alat kebersihan	12 Bulan	350.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	495.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04 01 01 009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Organisasi Tata Laksana			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja	100 %	terciptanya kelancaran kerja	100 %	5.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	9.500.000	SEKRETARIAT DAERAH	1	Peralatan Kerja di Bag. Pemerintahan Desa	
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Hukum			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja	100 %	terpenuhinya peralatan kerja yang telah diperbaiki	100 %	4.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	6.500.000	SEKRETARIAT DAERAH	1	Peralatan Kerja di Bag. Pemerintahan Desa	
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja	100 %	Prosentase terpeliharanya peralatan kerja yang layak pakai	100 %	2.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	2.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1	Peralatan Kerja di Bag. Pemerintahan Desa	
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kab.Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja	100 %	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	10.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	12.500.000	SEKRETARIAT DAERAH	1	Peralatan Kerja di Bag. Pemerintahan Desa	
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja	100 %	Terpeliharanya peralatan kantor yang memadai	12 Bulan	1.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	2.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1	Peralatan Kerja di Bag. Pemerintahan Desa	
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bag. Pemerintahan Desa			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja	100 %	Adanya perbaikan peralatan kerja	100 %	350.000	PAD, DAU, DBH	100 %	1.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1	Peralatan Kerja di Bag. Pemerintahan Desa	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04 01 01 010	Penyediaan alat tulis kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Organisasi Tata Laksana			Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	100 %	terpenuhinya alat tulis kantor	100 %	13.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	16.500.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Hukum			Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	100 %	terpenuhinya alat tulis kantor	100 %	18.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	20.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Administrasi Pembangunan			Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	12 %	Terwujudnya Kelancaran Administrasi Kantor	12 Bulan	25.000.000	PAD, DAU, DBH	12 %	15.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	100 %	Tercukupinya kebutuhan kertas,tinta,catridge, dan perlengkapan ATK lainnya	12 Bulan	12.500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	15.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	100 %	Prosentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	7.500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	8.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bag. Pemerintahan Desa			Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	100 %	Terpenuhinya prosentase kebutuhan alat tulis kantor	100 %	18.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	25.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	100 %	Lancarnya administrasi kantor	12 Bulan	6.500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	12.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Tapem			Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	100 %	Jumlah tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	30.000.000	PAD, DAU, DBH	12 %	35.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Umum			Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	100 %	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	70.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	84.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04 01 01 011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Organisasi Tata Laksana			Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100 %	Tersedianya barang penggandaan dan cetakan	100 %	3.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	11.500.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Hukum			Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	30000 %	terpakainya foto copy dan tercetaknya kop garuda	100 %	6.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	6.500.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Administrasi Pembangunan			Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	6 %	Terpenuhinya barang cetakan kantor	12 Bulan	10.500.000	PAD, DAU, DBH	12 %	15.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100 %	Prosentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	5.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	5.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100 %	Tercukupinya kebutuhan cetak, stopmap, dan fotocopy	12 Bulan	9.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	10.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bag. Pemerintahan Desa			Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100 %	Terpenuhinya prosentase kebutuhan penggadaan	100 %	6.500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	10.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100 %	Lancarnya administrasi kantor	12 Bulan	3.700.000	PAD, DAU, DBH	100 %	15.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Tapem			Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100 %	Jumlah tersedianya barang cetak dan penggandaan	6 Jenis	10.800.000	PAD, DAU, DBH	6 %	12.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Umum			Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100 %	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	11 Jenis	30.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	60.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	Tersedianya komponen instalasi listrik	12 Bulan	1.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	1.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Umum			Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	Tersedianya komponen instalasi listrik	21 Jenis	50.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	78.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	01	013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Organisasi Tata Laksana			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	peningkatan kinerja pelayanan	100 %	12.500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	0	SEKRETARIAT DAERAH	1		
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Hukum			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	terpenuhinya peralatan perkantoran penunjang kegiatan	100 %	43.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	65.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Administrasi Pembangunan			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	6 %	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Unit	13.065.000	PAD, DAU, DBH	5 %	50.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	Prosentase terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	100 %	12.500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	5.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	Tersedianya peralatan kantor yang mendukung kinerja	12 Bulan	16.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	64.850.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Tapem			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	Jumlah pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	4 Jenis	30.000.000	PAD, DAU, DBH	6 %	32.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	01	014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Umum			Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga	100 %	Tersedianya peralatan rumah tangga rumah jabatan	24 Jenis	50.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	112.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04 01 01 015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Hukum			Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	terbacanya bahan bacaan bagi pegawai	100 %	4.800.000	PAD, DAU, DBH	100 %	6.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Organisasi tata Laksana			Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	Peningkatan Pengetahuan	100 Bulan	3.500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	9.500.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Administrasi Pembangunan			Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 %	Peningkatan pengetahuan	3 Jenis	4.860.000	PAD, DAU, DBH	3 %	9.500.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	Terbayarnya bahan bacaan	12 Bulan	4.200.000	PAD, DAU, DBH	100 %	4.500.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	Prosentase terpenuhinya kebutuhan informasi dan wawasan pegawai	100 %	4.800.000	PAD, DAU, DBH	100 %	5.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bag. Pemerintahan Desa			Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	Tercapainya Prosentase penyediaan bahan bacaan dan bertambahnya pengetahuan aparatur	100 %	4.850.000	PAD, DAU, DBH	100 %	5.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	Bertambahnya informasi dan pengetahuan staf dan pimpinan	12 Bulan	7.452.000	PAD, DAU, DBH	100 %	13.500.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Tapem			Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	Jumlah pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan perundang-undangan	4 Jenis	5.000.000	PAD, DAU, DBH	4 %	6.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Umum			Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	Tersedianya bahan bacaan	12 Jenis	87.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	88.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04 01 01 017	Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat	100 %	Peningkatan kinerja pelayanan	12 Bulan	13.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	15.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Hukum			Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat	100 %	tercapinya kebutuhan makan minum bagi pegawai	100 Bulan	5.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	6.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Administrasi Pembangunan			Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat	12 %	Terpenuhinya hidangan rapat dan tersedianya makan minum harian	12 Bulan	50.000.000	PAD, DAU, DBH	12 %	50.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat	100 %	Prosentase terpenuhinya makan minum rapat dan harian pegawai	100 %	8.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	8.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat	100 %	Tersedianya air minum, snack, dan makan untuk kebutuhan harian pegawai, tamu dan rapat	12 Bulan	35.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	38.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bag. Pemerintahan Desa			Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat	100 %	Terpenuhinya prosentase penyediaan makanan dan minuman	100 %	10.500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	13.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat	100 %	Meningkatnya kinerja pegawai	11 Bulan	21.800.000	PAD, DAU, DBH	100 %	35.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Tapem			Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat	100 %	Jumlah pemenuhan kebutuhan makan minum rapat	12 Bulan	10.800.000	PAD, DAU, DBH	12 %	12.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Umum			Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat	100 %	Makan & minum harian pegawai, rapat dan tamu	12 Bulan	300.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	397.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04 01 01 018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Hukum			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	terlaksanakannya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100 %	75.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	100.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Ortala Setda			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Peningkatan kinerja pelayanan	100 %	30.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	71.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Administrasi Pembangunan			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Peningkatan Kualitas Kerja Dinas	100 %	79.800.000	PAD, DAU, DBH	100 %	110.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Prosentase terpenuhinya koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi tingkat provinsi dan eks-karesidenan	100 %	17.600.000	PAD, DAU, DBH	100 %	18.500.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Perekonomian			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Terlaksananya perjalanan daerah untuk konsultasi dan koordinasi	12 Bulan	50.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	80.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bag. Pemerintahan Desa			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Terpenuhinya prosentase kebutuhan rapat - rapat dan konsultasi ke luar daerah	100 %	48.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	75.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	39.800.000	PAD, DAU, DBH	100 %	65.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Tapem			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Prosentase pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi	100 %	86.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	90.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Umum			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Terlaksananya rakor dan konsultasi ke luar daerah	100 %	600.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	846.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04 01 01 019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kab. Blora			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Peningkatan kinerja pelayanan	12 Bulan	5.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	6.500.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Hukum			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	terlaksanakannya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	100 %	4.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	7.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Administrasi Pembangunan			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Peningkatan Kaulitas Kerja Dinas	100 %	7.500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	25.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kab. Blora			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Prosentase terpenuhinya koordinasi dan konsultasi dengan dinas terkait di dalam daerah	100 %	8.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	9.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kab. Blora			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	12 %	Terlaksananya perjalanan daerah untuk konsultasi dan koordinasi dalam daerah	12 Bulan	25.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	30.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bag. Pemerintahan Desa			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Terlaksananya Prosentase Pelaksanaan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	100 %	25.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	35.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Terserapnya informasi dan referensi dari kecamatan-kecamatan yanga ada di Blora	12 Bulan	67.360.000	PAD, DAU, DBH	100 %	91.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Tapem			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Prosentase pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi	100 %	20.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	15.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Umum			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Terlaksananya rakor ke dalam daerah	100 %	100.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	207.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04 01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%					0			0				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	02	003	Pembangunan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 Unit	Pembangunan gedung kantor	1 Paket	200.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Unit	200.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	02	005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Umum			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1 Unit	Pengadaan mobil	1 Unit	30.000.000	PAD, DAU, DBH	0 Unit	0	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	02	006	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Umum			Persentase pemenuhan perlengkapan rumah jabatan/dinas	100 %	Penyediaan perlengkapan rumah jabatan	17 Jenis	50.000.000	PAD, DAU, DBH	17 %	112.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	02	007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bag. Pemerintahan Desa			Pembelian perlengkapan kantor	100 %	Perlengkapan kantor yang mendukung kinerja pegawai	100 %	15.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	55.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Umum			Persentase pemenuhan perlengkapan gedung kantor	100 %	Penyediaan perlengkapan gedung kantor	17 Jenis	50.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	108.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	02	008	Pengadaan peralatan rumah jabatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Umum			Persentase pemenuhan peralatan rumah dinas/jabatan	100 %	Penyediaan kebutuhan peralatan rumah jabatan	4 Jenis	50.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	73.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bag. Pemerintahan Desa			Persentase pemenuhan peralatan gedung kantor	100 %	Tersedianya peralatan kerja yang memadai	100 %	3.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	57.500.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Umum			Persentase pemenuhan peralatan gedung kantor	100 %	Penyediaan kebutuhan peralatan kantor	4 Jenis	50.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	68.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	02	010	Pengadaan mebeler	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bag. Pemerintahan Desa			Persentase pemenuhan mebeler	100 %	Terpenuhinya mebeler kantor	100 %	5.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	40.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan mebeler	100 %	Tersedianya mebeler kantor yang mendukung kinerja	12 Bulan	2.500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	5.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Umum			Persentase pemenuhan mebeler	100 %	Penyediaan mebeler kantor	3 Jenis	15.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	198.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	02	020	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Umum			Persentase rumah jabatan dalam kondisi baik	100 %	Pemeliharaan rumah dinas Bupati dan wakil, Tersedianya honorarium tenaga harian lepas	2 Paket	480.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	720.688.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kab. Blora			Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Terpeliharanya gedung kantor	1 Paket	5.000.000	PAD, DAU, DBH	0 %	0	SEKRETARIAT DAERAH	1		
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Umum			Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Pemeliharaan gedung kantor	1 Paket	300.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	294.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	02	023	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Umum			Persentase mobil jabatan dalam kondisi baik	100 %	Servis, ganti ban, ganti oli, tune up	7 Unit	165.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	172.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Ortala			Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	100 %	Peningkatan kinerja pelayanan	1 Buah	5.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Buah	0	SEKRETARIAT DAERAH	1		
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Hukum			Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	100 %	terbelinya suku cadang, pengganti olie, service kendaraan	100 Unit	6.500.000	PAD, DAU, DBH	100 Buah	9.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kab. Blora			Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	100 %	Prosentase terpenuhinya kendaraan dinas operasional kantor yang layak pakai	100 %	7.500.000	PAD, DAU, DBH	100 Buah	8.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Administrasi Pembangunan			Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	100 %	Optimalnya pengoperasian kendaraan dinas	9 Unit	15.000.000	PAD, DAU, DBH	100 Buah	30.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kab. Blora			Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	100 %	Tercukupinya kondisi kendaraan dinas yang baik	12 Bulan	15.000.000	PAD, DAU, DBH	100 Buah	15.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bag. Pemerintahan Desa			Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	100 %	Tercukupinya kondisi kendaraan dinas yang baik	100 Bulan	12.000.000	PAD, DAU, DBH	100 Buah	27.500.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Kabupaten Blora			Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	100 %	Tersedianya kendaraan operasional yang layak pakai	12 Bulan	13.604.000	PAD, DAU, DBH	100 Buah	18.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Tapem			Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	100 %	Jumlah kendaraan dinas yang memerlukan pemeliharaan rutin berkala	11 Unit	25.000.000	PAD, DAU, DBH	11 Buah	30.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Umum			Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	100 %	Servis, ganti ban, ganti oli, tune up	50 Unit	195.000.000	PAD, DAU, DBH	100 Buah	290.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04 01 02 025	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Umum			Persentase perlengkapan rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik	100 %	Tersedianya jasa pemeliharaan perlengkapan rumah jabatan	8 Jenis	41.500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	74.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04 01 02 026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Ortala			Persentase perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Peningkatan Kinerja Pelayanan	1 Paket	2.000.000	PAD, DAU, DBH	1 %	7.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Administrasi Pembangunan			Persentase perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Optimalnya kinerja pegawai	100 %	2.500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	3.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kab. Blora			Persentase perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Perlengkapan kantor yang menunjang kinerja pegawai	12 Bulan	1.500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	1.500.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bag. Pemerintahan Desa			Persentase perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Perlengkapan kantor yang menunjang kinerja pegawai	100 %	2.500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	4.750.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Kabupaten Blora			Persentase perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Lancarnya pelaksanaan tugas staf	12 Bulan	1.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	4.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Umum			Persentase perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Tersedianya jasa pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	4 Jenis	44.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	45.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	02	027	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Umum			Persentase peralatan rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik	100 %	Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan rumah jabatan	100 %	27.500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	29.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	02	028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Umum			Persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan gedung kantor	100 %	32.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	64.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Tapem			Persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Peningkatan kinerja aparatur daerah	100 %	14.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	15.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Administrasi Pembangunan			Persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	25 %	Optomalnya kinerja pegawai	12 Bulan	4.600.000	PAD, DAU, DBH	12 %	6.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	02	029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeler	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Umum			Persentase mebeler dalam kondisi baik	100 %	Tersedianya jasa pemeliharaan mebeler kantor	9 Unit	19.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	42.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bag. Pemerintahan Desa			Persentase mebeler dalam kondisi baik	100 %	Tersedianya mebeler kantor yang memadai	100 %	500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	1.250.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	02	040	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Umum			Jumlah rumah jabatan yang direhabilitasi	100 Unit	Rehabilitasi rumah jabatan	2 Unit	250.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Unit	500.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	02	042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Umum			Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	1 Unit	Rehabilitasi gedung kantor	1 Unit	100.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Unit	200.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				Pemenuhan kebutuhan pakaian seragam dinas	100%					0			0				
04	01	03	002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi	Bagian Umum			Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	7 Unit	Pengadaan pakaian dinas bupati, wakil bupati dan ajudan	7 Unit	88.000.000	PAD, DAU, DBH	7 Unit	89.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	03	004	Pengadaan pakaian KORPRI	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi	Bagian Umum			Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	9 Unit	Pengadaan pakaian KORPRI	9 Unit	7.700.000	PAD, DAU, DBH	7 Unit	7.700.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04	01	03	005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi	Bagian Umum			Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	30 Unit	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	30 Unit	80.000.000	PAD, DAU, DBH	30 Unit	116.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi	Bagian Tapem			Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	14 Set	Jumlah tersedianya pakaian khusus hari - hari tertentu	14 Set	14.000.000	PAD, DAU, DBH	14 Unit	14.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Kabupaten Blora			Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	13 Unit	Tersedianya pakaian dinas yang menunjang kinerja	12 Bulan	2.000.000	PAD, DAU, DBH	13 Unit	5.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi	Bag. Pemerintahan Desa			Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	4 Set	Tercukupinya kebutuhan pakaian khusus hari teretentu/ kirab hari jadi	4 Set	3.600.000	PAD, DAU, DBH	4 Unit	4.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi	Kab. Blora			Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	4 Unit	Tercukupinya pakaian khusus untuk hari jadi kab blora	4 Paket	6.000.000	PAD, DAU, DBH	100 Unit	6.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi	Bagian Hukum			Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	4 Unit	terpakaianya pakaian utk hari-hari tertentu	4 Unit	4.000.000	PAD, DAU, DBH	4 Unit	5.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi	Bagian Administrasi Pembangunan			Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	10 Unit	Terpenuhinya Pakaian Tradisional	10 Set	5.000.000	PAD, DAU, DBH	10 Unit	11.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi	Kab. Blora			Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	15 Unit	Peningkatan kinerja pelayanan	15 Set	15.000.000	PAD, DAU, DBH	100 Unit	16.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1		
04 01 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				Peningkatan kapasitas SDM aparatur						0			0				
04 01 05 001	Pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Umum			Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal	5 Orang	Pengiriman peserta diklat	5 Orang	30.000.000	PAD, DAU, DBH	5 Orang	45.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1	ASN pada Bagian Ortala Setda Kabupaten Blora	
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Kabupaten Blora			Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal	4 Orang	Meningkatnya kualitas SDM di bidang kehumasan	4 Orang	3.000.000	PAD, DAU, DBH	4 Orang	12.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1	ASN pada Bagian Ortala Setda Kabupaten Blora	
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Tapem			Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal	5 Orang	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan bintek/diklat	5 Orang	15.000.000	PAD, DAU, DBH	5 Orang	15.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1	ASN pada Bagian Ortala Setda Kabupaten Blora	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bag. Pemerintahan Desa			Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal	2 Orang	Peningkatan kapasitas aparatur	2 Orang	7.500.000	PAD, DAU, DBH	2 Orang	8.500.000	SEKRETARIAT DAERAH	1	ASN pada Bagian Ortala Setda Kabupaten Blora	
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kab. Blora			Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal	2 Orang	Terkirimnya pegawai untuk pendidikan dan pelatihan	2 Orang	8.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Orang	10.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1	ASN pada Bagian Ortala Setda Kabupaten Blora	
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Hukum			Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal	4 Orang	meningkatnya kinerja aparatur	4 Orang	17.000.000	PAD, DAU, DBH	4 Orang	25.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1	ASN pada Bagian Ortala Setda Kabupaten Blora	
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Administrasi Pembangunan			Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal	10 Orang	Peningkatan Kompetensi Pegawai	10 Orang	13.500.000	PAD, DAU, DBH	10 Orang	45.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1	ASN pada Bagian Ortala Setda Kabupaten Blora	
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Ortala			Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal	2 Orang	Peningkatan SDM aparatur	1 Paket	5.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Orang	30.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1	ASN pada Bagian Ortala Setda Kabupaten Blora	
04 01 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				Nilai Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)						0			0				
					Pemenuhan kebutuhan pelaporan kinerja dan keuangan													
04 01 06 005	Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Administrasi Pembangunan Setda			Jumlah rencana kinerja dan penetapan kinerja	1 Dokumen	Dokumen Rencana Kerja SKPD Setda Kab. blora	1 Dokumen	8.068.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	15.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1	Penyelenggara tugas dan fungsi Perangkat Daerah	
		Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian ortala Setda			Jumlah rencana kinerja dan penetapan kinerja	3 Dokumen	Peningkatan nilai Evaluasi Kinerja SKPD Setda	3 Dokumen	5.000.000	PAD, DAU, DBH	3 Dokumen	7.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1	Penyelenggara tugas dan fungsi Perangkat Daerah	
04 01 06 006	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Bagian Ortala			Jumlah laporan akuntabilitas kinerja SKPD	3 Dokumen	Tersusunnya dokumen LKjIP, PK dan RKT Setda Kab. Blora	3 Dokumen	5.000.000	PAD, DAU, DBH	3 Dokumen	5.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	1	Penyelenggara tugas dan fungsi Perangkat Daerah	
TOTAL											21.376.753.000			28.189.362.000				

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KABUPATEN BLORA

SEKRETARIAT DPRD

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
04	01			ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																	
04	01	15		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				Jumlah ranperda inisiatif yang disahkan menjadi perda inisiatif	25 Ranperda					13.570.000.000			18.707.000.000				
04	01	15	001	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK				Jumlah Ranperda yang dibahas	15 Ranperda	Terlaksananya pembahasan rancangan peraturan daerah	12 Bulan	1.500.000.000	PAD, DAU, DBH	15 Buah	1.600.000.000	SEKRETARIAT DPRD	1		
04	01	15	003	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK				Jumlah pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan dewan	120 Kali	Terlaksananya rapat-rapat dewan	120 Kali	350.000.000	PAD, DAU, DBH	120 Kali	400.000.000	SEKRETARIAT DPRD	1		
04	01	15	004	Rapat-rapat paripurna	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK				Jumlah rapat-rapat paripurna	20 Kali	Terlaksananya rapat-rapat paripurna	20 Kali	450.000.000	PAD, DAU, DBH	20 Kali	500.000.000	SEKRETARIAT DPRD	1		
04	01	15	005	Kegiatan reses	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK				Jumlah pelaksanaan reses untuk menjaring aspirasi masyarakat	3 Kali	Terlaksananya reses	45 Orang	2.000.000.000	PAD, DAU, DBH	45 Orang	2.500.000.000	SEKRETARIAT DPRD	1		
04	01	15	006	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK				Jumlah kunjungan kerja dalam daerah utk meningkatkan wawasan aggota dewan	12 Kali	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah untuk meningkatkan wawasan dewan	12 Kali	250.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Kali	350.000.000	SEKRETARIAT DPRD	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	15	007	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK				Jumlah bintek/workshop untuk meningkatkan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	6 Kali	Jumlah bintek/workshop untuk meningkatkan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	6 Kali	2.150.000.000	PAD, DAU, DBH	6 Kali	3.500.000.000	SEKRETARIAT DPRD	1		
04	01	15	009	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK				Jumlah kunjungan kerja luar daerah untuk menambah wawasan dan pengetahuan anggota DPRD	12 Kali	Terlaksananya kunjungan kerja luar daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	12 Kali	5.000.000.000	PAD, DAU, DBH	14 Kali	6.500.000.000	SEKRETARIAT DPRD	1		
04	01	15	010	Asuransi kesehatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK				Jumlah anggota dewan yang melakukan pemeriksanaan kesehatan	45 Orang	Jumlah anggota dewan yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan	45 Orang	120.000.000	PAD, DAU, DBH	45 Orang	120.000.000	SEKRETARIAT DPRD	1		
04	01	15	011	Penyusunan peraturan daerah inisiatif	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK				Jumlah perda inisiatif yang dibahas dan ditetapkan	22 Perda	Tersusunnya Ranperda Inisiatif	22 Perda	1.000.000.000	PAD, DAU, DBH	25 Perda	2.000.000.000	SEKRETARIAT DPRD	1		
04	01	15	014	Penyusunan Prolegda	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK				Jumlah Dokumen Program Legislasi Daerah yang disusun	22 Ranperda	Jumlah Prolegda yang disusun	1 Dokumen	40.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	50.000.000	SEKRETARIAT DPRD	1		
04	01	15	019	Fasilitasi hubungan masyarakat dengan DPRD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK				Jumlah leaflet , DVD dan selayang pandang yang diterbitkan	12 Kali	Jumlah leaflet, DVD dan selayang pandang yang diterbitkan	12 Kali	150.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Kali	225.000.000	SEKRETARIAT DPRD	1		
04	01	15	020	Fasilitasi kegiatan komisi dan fraksi	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK				Jumlah fasilitator kegiatan komisi dan fraksi di DPRD	8 Orang	Jumlah fasilitator kegiatan komisi dan fraksi	8 Orang	400.000.000	PAD, DAU, DBH	8 Orang	550.000.000	SEKRETARIAT DPRD	1		
04	01	15	021	Fasilitasi Keprotokolan, Kedinasan, pimpinan dan Anggota DPRD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK	Setwan			Jumlah kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan yang difasilitasi dan dipublikasikan langsung ke masyarakat	12 Kali	Terlaksananya protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD	12 Bulan	10.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Kali	12.000.000	SEKRETARIAT DPRD	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	15	022	Dokumentasi kebijakan dan kegiatan DPRD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK				Jumlah buku / arsip tentang peraturan perundang-undangan	1 Buku	Tersedianya sistem informasi perundang-undangan	1 Buku	150.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Sistem	400.000.000	SEKRETARIAT DPRD	1		
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
04	01			ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																	
04	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%					0			0				
04	01	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat	100 %	Jumlah layanan pengiriman surat yang dipenuhi	12 Bulan	35.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	40.000.000	SEKRETARIAT DPRD	1		
04	01	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	100 %	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar	12 Bulan	190.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	220.000.000	SEKRETARIAT DPRD	1		
04	01	01	003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang direalisasikan	12 Bulan	10.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	15.000.000	SEKRETARIAT DPRD	1		
04	01	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100 %	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipenuhi kebutuhan dan perizinannya	12 Bulan	40.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	50.000.000	SEKRETARIAT DPRD	1		
04	01	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan	100 %	Jumlah layanan administrasi keuangan yang direalisasikan	12 Bulan	175.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	185.000.000	SEKRETARIAT DPRD	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor	100 %	Jumlah alat dan bahan pembersih yang digunakan untuk membersihkan bangunan gedung kantor dan lingkungannya	21 Buah	170.000.000	PAD, DAU, DBH	25 Buah	180.000.000	SEKRETARIAT DPRD	1		
04	01	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	100 %	Jumlah alat tulis kantor yang direalisasikan untuk menunjang kegiatan	12 Bulan	110.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	180.000.000	SEKRETARIAT DPRD	1		
04	01	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100 %	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang direalisasikan	175 Buah	75.000.000	PAD, DAU, DBH	200 Buah	90.000.000	SEKRETARIAT DPRD	1		
04	01	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dipenuhi kebutuhannya	25 Buah	20.000.000	PAD, DAU, DBH	25 Buah	30.000.000	SEKRETARIAT DPRD	1		
04	01	01	013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang direalisasikan	1 Buah	17.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Buah	20.000.000	SEKRETARIAT DPRD	1		
04	01	01	014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga	100 %	Jumlah peralatan rumah tangga yang direalisasikan	10 Buah	20.000.000	PAD, DAU, DBH	15 Buah	25.000.000	SEKRETARIAT DPRD	1		
04	01	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang direalisasikan	8 Eks	50.000.000	PAD, DAU, DBH	8 Eks	55.000.000	SEKRETARIAT DPRD	1		
04	01	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat	100 %	Jumlah makan minum pegawai, tamu dan rapat yang direalisasikan	1400 Buah	140.000.000	PAD, DAU, DBH	1700 Buah	160.000.000	SEKRETARIAT DPRD	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, DKI Jakarta			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	2 Kali	1.500.000.000	PAD, DAU, DBH	3 Kali	1.800.000.000	SEKRETARIAT DPRD	1		
04	01	01	019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan-kecamatan			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	20 Kali	35.000.000	PAD, DAU, DBH	20 Kali	40.000.000	SEKRETARIAT DPRD	1		
04	01	01	020	Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan dukungan pelayanan perkantoran	100 %	Jumlah jasa tenaga pendukung pelayanan perkantoran yang dibayar tiap bulan	32 Orang	670.000.000	PAD, DAU, DBH	32 Orang	670.000.000	SEKRETARIAT DPRD	1		
04	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%					0			0				
04	01	02	007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Jalan A. Yani 36 Blora			Persentase pemenuhan perlengkapan gedung kantor	100 %	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	30 Unit	30.000.000	PAD, DAU, DBH	40 Unit	40.000.000	SEKRETARIAT DPRD	1		
04	01	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan peralatan gedung kantor	100 %	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	8 Unit	20.000.000	PAD, DAU, DBH	20 Unit	200.000.000	SEKRETARIAT DPRD	1		
04	01	02	010	Pengadaan mebeler	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan mebeler	100 %	Jumlah mebeler yang diadakan	10 Unit	200.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	50.000.000	SEKRETARIAT DPRD	1		
04	01	02	011	Pengadaan instalasi air, listrik, dan telepon	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan instalasi air, listrik dan telepon	100 %	Tersedianya instalasi air bersih untuk kantor	3 Paket	40.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	15.000.000	SEKRETARIAT DPRD	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	02	012	Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor	100 %	Tersedianya mushola	1 Unit	200.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	200.000.000	SEKRETARIAT DPRD	1		
04	01	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Jalan A. Yani 36 Blora			Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik	1 Paket	200.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Paket	200.000.000	SEKRETARIAT DPRD	1		
04	01	02	023	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Persentase mobil jabatan dalam kondisi baik	100 %	Jumlah mobil jabatan dalam kondisi baik	8 Unit	150.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	155.000.000	SEKRETARIAT DPRD	1		
04	01	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	100 %	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	6 Unit	90.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	95.000.000	SEKRETARIAT DPRD	1		
04	01	02	028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Jumlah peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 Unit	60.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	70.000.000	SEKRETARIAT DPRD	1		
04	01	02	029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeler	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase mebeler dalam kondisi baik	100 %	Jumlah mebeler dalam kondisi baik	5 Paket	80.000.000	PAD, DAU, DBH	10 Paket	125.000.000	SEKRETARIAT DPRD	1		
04	01	02	030	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Persentase bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Terpeliharanya garasi / tempat parkir	4 Paket	40.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	45.000.000	SEKRETARIAT DPRD	1		
04	01	02	031	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi air, listrik, dan telepon	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase instalasi air, listrik, dan telepon dalam kondisi baik	98 %	Terpeliharanya instalasi listrik dan telepon kantor	2 Paket	40.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	45.000.000	SEKRETARIAT DPRD	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	02	042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	1 Unit	Jumlah gedung/kantor yang direhabilitasi	1 Paket	475.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Unit	1.500.000.000	SEKRETARIAT DPRD	1		
04	01	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				Pemenuhan kebutuhan pakaian seragam dinas	Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya untuk mendukung kinerja pegawai					0			0				
04	01	03	002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi				Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	180 Unit	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	180 Buah	200.000.000	PAD, DAU, DBH	180 Buah	200.000.000	SEKRETARIAT DPRD	1		
04	01	03	005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi				Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	200 Unit	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu dan pakaian adat yang diadakan	200 Buah	175.000.000	PAD, DAU, DBH	210 Buah	200.000.000	SEKRETARIAT DPRD	1		
04	01	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				Peningkatan kapasitas SDM aparatur	Meningkatnya pengetahuan aparatur Setwan					0			0				
04	01	05	001	Pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal	13 Orang	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal	13 Orang	153.000.000	PAD, DAU, DBH	20 Orang	350.000.000	SEKRETARIAT DPRD	1		
04	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				Nilai Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)						0			0				
								Pemenuhan kebutuhan pelaporan kinerja dan keuangan													
04	01	06	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Laporan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Laporan	10.000.000	PAD, DAU, DBH	3 Laporan	10.000.000	SEKRETARIAT DPRD	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	06	004	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah laporan keuangan akhir tahun	2 Laporan	Jumlah laporan akhir tahun yang disusun	2 Laporan	10.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Laporan	10.000.000	SEKRETARIAT DPRD	1		
04	01	06	005	Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Jumlah rencana kinerja dan penetapan kinerja	2 Dokumen	Tersusunnya renstra, renja dan penetapan kinerja OPD	2 Dokumen	10.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Dokumen	10.000.000	SEKRETARIAT DPRD	1		
TOTAL														19.010.000.000			25.987.000.000				

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KABUPATEN BLORA

KECAMATAN BLORA

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
04	01			ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																	
04	01	44		PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN				Terselenggaranya koordinasi dan pelayanan pada kecamataan	28 desa/kelurahan					269.000.000			274.000.000				
04	01	44	001	Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Blora			Presentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	100 %	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan	28 Desa/Kelurahan	45.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	45.000.000	KECAMATAN BLORA	1	Meningkatkan penerapan standar pelayanan dan kepuasan pada Kecamatan	
04	01	44	002	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Blora			Presentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	100 %	Tersedianya dokumen Kamtibmas	28 Dokumen	30.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	30.000.000	KECAMATAN BLORA	1	Meningkatkan penerapan standar pelayanan dan kepuasan pada Kecamatan	
04	01	44	003	Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Blora			Presentase penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan	100 %	Tersedianya dokumen data pelanggaran peraturan perundang-undangan diwilayah desa/kelurahan	28 Dokumen	15.000.000	PAD, DAU, DBH	28 Desa/Kelurahan	15.000.000	KECAMATAN BLORA	1	Meningkatkan penerapan standar pelayanan dan kepuasan pada Kecamatan	
04	01	44	005	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Blora			Prosentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	100 %	Tersedianya dokumen data kependudukan, pertanahan, produk hukum dan pemerintahan	28 Dokumen	64.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	64.000.000	KECAMATAN BLORA	1	Meningkatkan penerapan standar pelayanan dan kepuasan pada Kecamatan	
04	01	44	006	Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Blora			Presentase pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	95 %	Tersedianya dokumen laporan pelaksanaan pemerintahan Desa/Kelurahan dan inventarisasi kekayaan desa	28 Dokumen	20.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	20.000.000	KECAMATAN BLORA	1	Meningkatkan penerapan standar pelayanan dan kepuasan pada Kecamatan	
04	01	44	008	Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Blora			Presentase pelaksanaan kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	99 %	Terlaksananya Sosialisasi RASTRA	4 Kali	80.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	80.000.000	KECAMATAN BLORA	1	Meningkatkan penerpan standar pelayanan dan kepuasan pada Kecamatan	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	44	009	Koordinasi kegiatan pelayanan masyarakat di kelurahan dan desa	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Blora			Prosentase pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di kelurahan dan desa	98 %	Tingkat pemahaman masyarakat tentang ijin mendirikan bangunan dan ijin UMKM diwilayah Kecamatan	28 Desa/Kelurahan	15.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	20.000.000	KECAMATAN BLORA	1	Meningkatkan penerapan standar pelayanan dan kepuasan pada Kecamatan	
04	01	45		PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KELURAHAN				Terkoordinasikannya peningkatan kualitas pelayanan pada kelurahan						2.196.590.000			2.196.590.000				
04	01	45	001	Penyediaan operasional kebutuhan rutin kelurahan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	12 Kelurahan			Prosentase pemenuhan operasional kegiatan kelurahan	95 %	Tersedianya data dan laporan pelaksanaan kegiatan Kelurahan	144 Dokumen	1.200.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	1.200.000.000	KECAMATAN BLORA	1	Meningkatkan penerapan standar pelayanan dan kepuasan pada Kelurahan	
04	01	45	003	Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kelurahan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	12 Kelurahan			Persentase pemenuhan pelayanan masyarakat pada kelurahan	100 %	Meningkatnya kinerja RT/RW , Modin dan Tenaga Tidak tetap Kelurahan dalam pelayanan	12 Bulan	702.100.000	PAD, DAU, DBH	100 %	702.100.000	KECAMATAN BLORA	1	Meningkatkan penerapan standar pelayanan dan kepuasan pada Kelurahan	
04	01	45	008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	12 Kelurahan			Prosentase sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun dan terpelihara	100 %	Tersedianya gedung kantor dan lingkungan kantor yang memadai	12 Unit	294.490.000	PAD, DAU, DBH	100 File	294.490.000	KECAMATAN BLORA	1	Meningkatkan penerapan standar pelayanan dan kepuasan pada Kelurahan	
04	01	47		PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA UMUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN										240.000.000			240.000.000				
04	01	47	002	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	12 Kelurahan			Persentase pelaksanaan Kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	Bertambahnya gizi Balita di kelurahan	3280 Orang	240.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	240.000.000	KECAMATAN BLORA	1	Meningkatkan sarana dan prasarana umum dan pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan	
04	01	48		PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH KECAMATAN				Terselenggaranya kegiatan pengembangan wilayah kecamatan						80.040.000			82.040.000				
04	01	48	001	Evaluasi Perencanaan dan Keuangan Desa	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Blora			Jumlah dokumen evaluasi perencanaan dan keuangan desa	16 Dokumen	Tersedianya Dokumen RKPDes, APBDes	16 Dokumen	15.000.000	PAD, DAU, DBH	16 Dokumen	17.000.000	KECAMATAN BLORA	1	Meningkatkan upaya pengembangan Wilayah Kecamatan	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	48	002	Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Blora			Jumlah dokumen musyawarah pembangunan desa/kelurahan dan kecamatan	29 Dokumen	Tersedianya dokumen data hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan	29 Dokumen	30.000.000	PAD, DAU, DBH	29 Dokumen	30.000.000	KECAMATAN BLORA	1	Meningkatkan upaya pengembangan wilayah Kecamatan	
04	01	48	003	Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Blora			Prosentase hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan	90 %	Tersedianya dokumen data hasil penarikan PBB Desa/Kelurahan	28 Dokumen	35.040.000	PAD, DAU, DBH	100 %	35.040.000	KECAMATAN BLORA	1	meningkatkan upaya pengembangan wilayah Kecamatan	
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
04	01			ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																	
04	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	10 Jenis					0			0				
04	01	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat	100 %	Tersedianya dokumen keuangan	12 Dokumen	2.400.000	PAD, DAU, DBH	100 %	2.500.000	KECAMATAN BLORA	1	Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pada kecamatan	
04	01	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	100 %	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	12 Bulan	30.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	35.000.000	KECAMATAN BLORA	1	Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pada kecamatan	
04	01	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	90 %	Tersedianya kendaraan dinas/operasional kantor	20 Unit	4.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	5.000.000	KECAMATAN BLORA	1	Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pada kecamatan	
04	01	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan	100 %	Terlaksananya kegiatan SKPD	12 Bulan	49.500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	49.500.000	KECAMATAN BLORA	1	Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pada kecamatan	
04	01	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor	100 %	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	26 Jenis	5.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	6.000.000	KECAMATAN BLORA	1	Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	100 %	Tersedianya Alat Tulis Kantor	50 Jenis	42.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	43.000.000	KECAMATAN BLORA	1	Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pada kecamatan	
04	01	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100 %	Tersedianya spanduk, amplop dinas dan foto copy	3 Jenis	10.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	11.000.000	KECAMATAN BLORA	1	Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pada kecamatan	
04	01	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	Tersedianya komponen listrik	16 Jenis	5.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	6.000.000	KECAMATAN BLORA	1	Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pada kecamatan	
04	01	01	013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	Tersedianya perlengkapan kantor	10 Jenis	100.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	100.000.000	KECAMATAN BLORA	1	Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pada kecamatan	
04	01	01	014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga	100 %	Tersedianya peralatan rumah tangga	20 Jenis	10.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	12.000.000	KECAMATAN BLORA	1	Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan	
04	01	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	95 %	Meningkatnya pengetahuan karyawan	30 Orang	3.900.000	PAD, DAU, DBH	100 %	3.900.000	KECAMATAN BLORA	1	Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pada kecamatan	
04	01	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat	100 %	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, makanan dan minuman rapat	120 Kali	50.500.000	PAD, DAU, DBH	98 %	65.000.000	KECAMATAN BLORA	1	Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pada kecamatan	
04	01	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Blora			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	90 %	Terlaksananya Rakor dan konsultasi diluar daerah	24 Kali	12.000.000	PAD, DAU, DBH	95 %	15.000.000	KECAMATAN BLORA	1	Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pada kecamatan	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	01	019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Blora			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	98 %	Terlaksananya rakor dan konsultasi dalam daerah	189 Kali	50.000.000	PAD, DAU, DBH	98 %	52.000.000	KECAMATAN BLORA	1	Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan	
04	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur						0			0				
04	01	02	003	Pembangunan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Blora			Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 Unit	Tersedianya Gedung Kantor	1 Unit	1.000.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Unit	1.000.000.000	KECAMATAN BLORA	1	Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan	
04	01	02	005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Blora			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1 Unit	Kendaraan dinas/operasional	1 Unit	20.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Unit	40.000.000	KECAMATAN BLORA	1	Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan	
04	01	02	010	Pengadaan mebeler	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Blora			Persentase pemenuhan mebeler	100 %	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	6 Jenis	72.032.000	PAD, DAU, DBH	100 %	100.000.000	KECAMATAN BLORA	1	Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan	
04	01	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Blora			Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	100 %	Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang memadai	12 Unit	20.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	20.000.000	KECAMATAN BLORA	1	Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan	
04	01	02	028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Blora			Persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	90 %	Tersedianya peralatan kantor yang memadai	12 Unit	5.000.000	PAD, DAU, DBH	95 %	5.000.000	KECAMATAN BLORA	1	Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan	
04	01	02	030	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Blora			Persentase bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Pavingisasi lingkungan kantor	1 Unit	50.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Unit	100.000.000	KECAMATAN BLORA	1	Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan	
04	01	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				Pemenuhan kebutuhan pakaian seragam dinas						0			0				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	03	005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi	Kecamatan Blora			Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	30 Unit	Tersedianya seragam olahraga karyawan	30 Unit	12.000.000	PAD, DAU, DBH	30 Set	20.000.000	KECAMATAN BLORA	1	Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan	
04	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										0			0				
04	01	06	005	Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Blora			Jumlah rencana kinerja dan penetapan kinerja	3 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan	3 Dokumen	3.000.000	PAD, DAU, DBH	3 Laporan	3.000.000	KECAMATAN BLORA	1	Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan	
TOTAL														4.341.962.000			4.486.530.000				

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KABUPATEN BLORA

KECAMATAN JEPON

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
04	01			ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																	
04	01	44		PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN				Terselenggaranya koordinasi dan pelayanan pada kecamataan	100%					287.850.000			300.000.000				
04	01	44	001	Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jepon			Presentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	100 %	Tersedianya dokumen data PKK Desa/Kelurahan	25 Desa/Kelurahan	22.800.000	PAD, DAU, DBH	25 Desa/Kelurahan	40.000.000	KECAMATAN JEPON	1	Pemerintahan Desa/Kelurahan	
04	01	44	002	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jepon			Presentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	100 %	Laporan Ketentraman d an Ketertiban Umum di wilayah kecamatan	25 Laporan	45.000.000	PAD, DAU, DBH	25 Desa/Kelurahan	35.000.000	KECAMATAN JEPON	1	Pemerintah Desa/Kelurahan	
04	01	44	005	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jepon			Prosentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	100 %	terlaksananya Koordinasi Kades/Kalur/Sekdes/seklur perangakat desa/keluran pakaian paskibra dan forkompimcam	25 Desa/Kelurahan	80.000.000	PAD, DAU, DBH	25 Desa/Kelurahan	85.000.000	KECAMATAN JEPON	1	Dinas/Instansi/Pemerintah Desa.Kelurahan/BUMD	
04	01	44	008	Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jepon			Presentase pelaksanaan kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	100 %	Terlaksananya Rakor Rastra Penanggulangan Kemiskinan, GSIB, PHBS,Pasar Gratis, bunda PAUD, Pameran Pembagunan dan Rakor Penanggulangan isu strategis terkait kesehatan	25 Desa/Kelurahan	105.050.000	PAD, DAU, DBH	25 Desa/Kelurahan	105.000.000	KECAMATAN JEPON	1	Pemerintah Desa/Kelurahan	
04	01	44	009	Koordinasi kegiatan pelayanan masyarakat di kelurahan dan desa	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jepon			Prosentase pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di kelurahan dan desa	100 %	Terbitnya Dokumen/Sertifikat IUMK dan IMB	300 Dokumen	35.000.000	PAD, DAU, DBH	300 Dokumen	35.000.000	KECAMATAN JEPON	1	Pemerintah Desa/Kelurahan	
04	01	45		PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KELURAHAN				Terkoordinasikannya peningkatan kualitas pelayanan pada kelurahan	100%					290.028.000			298.528.000				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	45	001	Penyediaan operasional kebutuhan rutin kelurahan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kelurahan Jepon			Prosentase pemenuhan operasional kegiatan kelurahan	100 %	Lancarnya Kegiatan Operasional Kelurahan Jepon	100 %	100.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	100.000.000	KECAMATAN JEPON	1	Kelurahan Jepon	
04	01	45	003	Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kelurahan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kelurahan Jepon			Persentase pemenuhan pelayanan masyarakat pada kelurahan	100 %	Terlaksananya jasa pelayanan masyarakat dan tersedianya data RT/RW Kelurahan Jepon	1 Kel	126.500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	135.000.000	KECAMATAN JEPON	1	Kelurahan Jepon	
04	01	45	008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kelurahan Jepon			Prosentase sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun dan terpelihara	100 %	Terehabnya sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor Kelurahan Jepon	1 Unit	63.528.000	PAD, DAU, DBH	1 Kel	63.528.000	KECAMATAN JEPON	1	Kelurahan Jepon	
04	01	47		PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA UMUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN				Terselenggaranya Penyediaan sarana dan prasarana umum dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan	1 Kel					20.000.000			20.000.000				
04	01	47	002	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jepon			Persentase pelaksanaan Kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	Terpenuhinya PMT Balita di Kelurahan Jepon	1 Kel	20.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Kel	20.000.000	KECAMATAN JEPON	1	Kelurahan Jepon	
04	01	48		PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH KECAMATAN				Terselenggaranya kegiatan pengembangan wilayah kecamatan	100%					68.966.000			75.000.000				
04	01	48	001	Evaluasi Perencanaan dan Keuangan Desa	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jepon			Jumlah dokumen evaluasi perencanaan dan keuangan desa	24 Dokumen	Tersedianya Dokumen RPDes dan APBDes	24 Desa	15.000.000	PAD, DAU, DBH	24 Desa	20.000.000	KECAMATAN JEPON	1	Pemerintah Desa/Kelurahan	
04	01	48	002	Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jepon			Jumlah dokumen musyawarah pembangunan desa/kelurahan dan kecamatan	26 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	26 Dokumen	30.000.000	PAD, DAU, DBH	25 Desa/Kelurahan	30.000.000	KECAMATAN JEPON	1	Pemerintah Desa/Kelurahan	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	48	003	Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jepon			Prosentase hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan	100 %	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Penderasan PBB	25 Desa/Kelurahan	23.966.000	PAD, DAU, DBH	25 Desa/Kelurahan	25.000.000	KECAMATAN JEPON	1	Pemerintah Desa/Kelurahan	
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
04	01			ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																	
04	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %					0			0				
04	01	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jepon			Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat	100 %	Lancarnya kegiatan pengiriman surat menyurat dan Dokumen administrasi keuangan	365 lembar	2.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	2.500.000	KECAMATAN JEPON	1	Belanja Benda Pos	
04	01	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jepon			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	100 %	Lancarnya komunikasi dan terpenuhinya kebutuhan listrik, telepon dan internet	12 Bulan	38.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	65.000.000	KECAMATAN JEPON	1	Belanja Jasa Telepon, Listrik dan Internet	
04	01	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jepon			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100 %	Tertibnya pembeyaran pajak Kendaraan Dinas Operasional	25 Unit	2.500.000	PAD, DAU, DBH	25 Unit	5.000.000	KECAMATAN JEPON	1	Pajak Kendaraan Dinas/Operasional	
04	01	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jepon			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan	100 %	Lancarnya pelaksanaan kegiatan	13 Orang	50.000.000	PAD, DAU, DBH	13 Orang	55.500.000	KECAMATAN JEPON	1	Jasa Administrasi Keuangan	
04	01	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor	100 %	Jasa Kebersihan dan Terciptanya lingkungan kerja yang nyaman	12 Bulan	32.100.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	32.100.000	KECAMATAN JEPON	1	Belanja alat Kebersihan dan Jasa Kebersihan Kantor	
04	01	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jepon			Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	100 %	Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	16.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	35.000.000	KECAMATAN JEPON	1	Belanja ATK	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jepon			Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100 %	Terpenuhinya kegiatan kantor	12 Bulan	5.500.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	7.500.000	KECAMATAN JEPON	1	Foto Copi dan Spanduk	
04	01	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jepon			Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	Tersedianya peralatan dan penerangan listrik	4 Jenis	2.500.000	PAD, DAU, DBH	5 Jenis	5.500.000	KECAMATAN JEPON	1	Belanja Komponen dan peralatan listrik	
04	01	01	013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jepon			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	Tersedianya peralatan kantor yang memadahi	1 Unit	7.500.000	PAD, DAU, DBH	2 Jenis	35.000.000	KECAMATAN JEPON	1	Kecamatan Jepon	
04	01	01	014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jepon			Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga	100 %	Terpenuhinya Taplak meja rapat	15 Set	5.500.000	PAD, DAU, DBH	2 Jenis	25.000.000	KECAMATAN JEPON	1	Belanja Taplak meja rapat	
04	01	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jepon			Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	Meningkatnya wawasan dan Pengetahuan pegawai	2 Jenis	4.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Jenis	4.500.000	KECAMATAN JEPON	1	Belanja Majalah/Surat Kabar	
04	01	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jepon			Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat	100 %	Terlaksananya Rakor kegiatan kantor	2500 Buah	20.000.000	PAD, DAU, DBH	2500	45.000.000	KECAMATAN JEPON	1	Belanja Makan dan Minum Rapat	
04	01	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jepon			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Terlaksanany laporan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	20 Laporan	10.000.000	PAD, DAU, DBH	20 Kali	12.500.000	KECAMATAN JEPON	1	Perjalanan Dinas luar daerah	
04	01	01	019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jepon			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Terlaksananya Rakor dan Konsultasi dalam daerah	550 Laporan	25.000.000	PAD, DAU, DBH	550 Kali	45.000.000	KECAMATAN JEPON	1	Perjalanan Dinas dalam daerah	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	01	020	Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jepon			Persentase pemenuhan dukungan pelayanan perkantoran	100 %	Terbayarnya jasa keamanan	1 Orang	9.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Orang	9.000.000	KECAMATAN JEPON	1	Jasa Keamanan Kantor	
04	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%					0			0				
04	01	02	007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jepon			Persentase pemenuhan perlengkapan gedung kantor	100 %	Tersedianya Perlengkapan kantor yang memadahi	2 Unit	11.150.000	PAD, DAU, DBH	2 Unit	35.000.000	KECAMATAN JEPON	1	Belanja AC	
04	01	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jepon			Persentase pemenuhan peralatan gedung kantor	100 %	Belanja LCD dan layar proyektor	1 Unit	10.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Unit	45.000.000	KECAMATAN JEPON	1	Belanja LCD/Infokus dan layar proyektor	
04	01	02	010	Pengadaan mebeler	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kercamatan Jepon			Persentase pemenuhan mebeler	100 %	Tersedianya Meja dan Kursi Kerja	4 Set	20.000.000	PAD, DAU, DBH	4 Set	75.000.000	KECAMATAN JEPON	1	Belanja Meja dan Kursi kantor	
04	01	02	011	Pengadaan instalasi air, listrik, dan telepon	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jepon			Persentase pemenuhan instalasi air, listrik dan telepon	100 %	Tersedianya daya listrik dari 7700 VA menjadi 23000 VA	1 Paket	70.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Paket	145.000.000	KECAMATAN JEPON	1	Tambah daya listrik dan rehabilitasi instalasi listrik	
04	01	02	021	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jepon			Persentase rumah dinas dalam kondisi baik	100 %	Terawatnya Rumah Dinas	1 Unit	2.500.000	PAD, DAU, DBH	1 Unit	5.000.000	KECAMATAN JEPON	1	Pengecatan/Perawatan Rumah Dinas	
04	01	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jepon			Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Terwujudnya gedung kantor dan pagar kantor yang bersih dan sehat	2 Unit	5.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Unit	15.000.000	KECAMATAN JEPON	1	Perawatan Gedung dan Pagar Kantor Kecamatan	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jepon			Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	100 %	Terwujudnya kendaraan dinas yang memadahi (2 mobil dan 28 Sepeda motor	2 Unit	2.500.000	PAD, DAU, DBH	2 Unit	35.000.000	KECAMATAN JEPON	1	Pemeliharaan Kendaraan dinas operasional	
04	01	02	026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jepon			Persentase perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Lancarnya kegiatan kantor	2 Jenis	2.500.000	PAD, DAU, DBH	2 Jenis	5.000.000	KECAMATAN JEPON	1	Servis AC, Kipas Angin	
04	01	02	028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jepon			Persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Terawatnya perlengkapan kantor	10 Unit	2.500.000	PAD, DAU, DBH	10 Unit	5.000.000	KECAMATAN JEPON	1	Pemeliharaan Komputer Laptop dan Printer	
04	01	02	029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeler	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jepon			Persentase mebeler dalam kondisi baik	100 %	Terpeliharanya mebeler kantor dan kenyaman dalam melaksanakan kegiatan administrasi kantor	10 Buah	2.500.000	PAD, DAU, DBH	10 Buah	55.000.000	KECAMATAN JEPON	1	Pemeliharaan Mebeler	
04	01	02	045	Rehabilitasi sedang/berat bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jepon			Persentase bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Tersedianya sarana Tempat Parkir Karyawan/Karyawati Kec.Jepon	1 Unit	2.500.000	PAD, DAU, DBH	1 Unit	350.000.000	KECAMATAN JEPON	1	Pembangunan Tempat Parkir Karyawan/Karyawati Kecamatan	
04	01	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				Pemenuhan kebutuhan pakaian seragam dinas	12 bulan					0			0				
04	01	03	001	Pengadaan mesin/kartu absensi	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi	Kecamatan Jepon			Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan	1 Unit	Meningkatkan displin pegawai	30 Orang	2.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Unit	4.500.000	KECAMATAN JEPON	1	Belanja Mesin Absensi	
04	01	03	005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi	Kecamatan Jepon			Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	30 Orang	Peningkatan disiplin Pegawai	30 Orang	2.500.000	PAD, DAU, DBH	30 Buah	7.500.000	KECAMATAN JEPON	1	Belanja seragam Olah raga	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										0			0				
04	01	06	005	Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jepon			Jumlah rencana kinerja dan penetapan kinerja	3 Dokumen	Tersedianya Dokumen Renja, Penetapan Kinerja dan Tenaga Kontrak 1 (satu) orang	3 Dokumen	16.900.000	PAD, DAU, DBH	3 Dokumen	0	KECAMATAN JEPON	1	Kecamatan Jepon	
TOTAL														1.048.994.000			1.859.628.000				

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KABUPATEN BLORA

KECAMATAN BOGOREJO

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
04	01			ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																	
04	01	44		PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN				Terselenggaranya koordinasi dan pelayanan pada kecamataan	14 desa					185.230.000			224.000.000				
04	01	44	001	Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Bogorejo			Presentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	100 %	Kegiatan Team Penggerak PPK Kecamatan dan desa	3 Keg	30.000.000	PAD, DAU, DBH	3 Keg	30.000.000	KECAMATAN BOGOREJO	1	PKK Kecamatan Bogorejo	
04	01	44	002	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Bogorejo			Presentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	100 %	Terlaksananya pemantauan ketertiban umum di desa	14 Desa	13.190.000	PAD, DAU, DBH	14 Desa	15.000.000	KECAMATAN BOGOREJO	1	Kamtibmas, Linmas	
04	01	44	005	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Bogorejo			Prosentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	100 %	Terbinanya administrasi pemerintahan	4 Keg	57.590.000	PAD, DAU, DBH	4 Keg	59.000.000	KECAMATAN BOGOREJO	1	Perangkat Desa, Paskibra, Forkompincam	
04	01	44	008	Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Bogorejo			Presentase pelaksanaan kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	100 %	Pemberdayaan Perempuan, Bunda Paud ,Pasar murah , kegiatan 17-an ,PUG ,Rakor Kesehatan	7 Keg	73.000.000	PAD, DAU, DBH	7 Keg	100.000.000	KECAMATAN BOGOREJO	1	Bunda Paud, Pasar Murah, PHBS/Kegiatan 17-an ,Sosialisasi Rastra, Rakor Kesehatan,rakor GSI dan Pameran Pembangunan	
04	01	44	009	Koordinasi kegiatan pelayanan masyarakat di kelurahan dan desa	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Bogorejo			Prosentase pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di kelurahan dan desa	100 %	Tercapainya pelayanan perijinan	14 Desa	11.450.000	PAD, DAU, DBH	14 Desa	20.000.000	KECAMATAN BOGOREJO	1	Pelayanan Perijinan	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	48		PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH KECAMATAN				Terselenggaranya kegiatan pengembangan wilayah kecamatan	14 desa					36.580.000			45.000.000				
04	01	48	001	Evaluasi Perencanaan dan Keuangan Desa	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Bogorejo			Jumlah dokumen evaluasi perencanaan dan keuangan desa	100 %	Tersedianya Dokumen APBDes dan RKPBDes	14 Desa	14.190.000	PAD, DAU, DBH	14 Desa	15.000.000	KECAMATAN BOGOREJO	1	Monitoring APBDes dan RKPBDes	
04	01	48	002	Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Bogorejo			Jumlah dokumen musyawarah pembangunan desa/kelurahan dan kecamatan	100 %	Tersedianya dokumen Perencanaan desa	14 Desa	12.390.000	PAD, DAU, DBH	14 Desa	15.000.000	KECAMATAN BOGOREJO	1	Musrenbang desa	
04	01	48	003	Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Bogorejo			Prosentase hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan	100 %	Pelunasan PBB tepat waktu	14 Desa	10.000.000	PAD, DAU, DBH	14 Desa	15.000.000	KECAMATAN BOGOREJO	1	Penderasan PBB	
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
04	01			ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																	
04	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	12 bulan					0			0				
04	01	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Bogorejo			Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat	100 %	tercapainya surat yang terkirim dan tertib admnistrasi	12 Bulan	2.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	3.500.000	KECAMATAN BOGOREJO	1	Pembelian ATK	
04	01	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Bogorejo			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	98 %	Kelancaran pembayaran rekening listrik dan telepon	12 Bulan	18.600.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	18.600.000	KECAMATAN BOGOREJO	1	listrik dan telepon Kantor	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	01	003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Bogorejo			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	Peralatan dan perlengkapan kantor terjamin	5 Unit	2.500.000	PAD, DAU, DBH	5 Unit	5.000.000	KECAMATAN BOGOREJO	1	karyawan kantor dan masyarakat	
04	01	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Bogorejo			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100 %	Tertib administrasi pajak kendaraan dinas	26 Unit	3.500.000	PAD, DAU, DBH	26 Unit	4.500.000	KECAMATAN BOGOREJO	1	Kendaraan Dinas Karyawan	
04	01	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Bogorejo			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan	100 %	Tercapainya ketepatan waktu dalam menyelesaikan administrasi keuangan	12 Bulan	43.200.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	45.000.000	KECAMATAN BOGOREJO	1	Pengelola Administrasi Keuangan	
04	01	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Bogorejo			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor	100 %	Terpenuhi honor tenaga kebersihan,peralatan Kebersihan kantor terjamin	12 Bulan	27.500.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	30.000.000	KECAMATAN BOGOREJO	1	tenaga kebersihan dan peralatan kebersihan	
04	01	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Bogorejo			Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	100 %	Tercapainya kegiatan administrasi kantor	12 Bulan	11.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	10.000.000	KECAMATAN BOGOREJO	1	Kantor Kecamatan Bogorejo	
04	01	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Bogorejo			Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100 %	Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran	12 Bulan	4.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	4.000.000	KECAMATAN BOGOREJO	1	Kantor Kecamatan Bogorejo	
04	01	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Bogorejo			Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	98 %	Terpenuhinya penerangan kantor	12 Bulan	2.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	6.500.000	KECAMATAN BOGOREJO	1	Kantor Kecamatan Bogorejo	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	01	013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Bogorejo			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	Tersedianya peralatan perlengkapan penunjang kerja	4 Unit	25.000.000	PAD, DAU, DBH	5 Unit	45.000.000	KECAMATAN BOGOREJO	1	Karyawan Kantor Kecamatan Bogorejo	
04	01	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Bogorejo			Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	Meningkatnya pengetahuan dan informasi pegawai	12 Bulan	2.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	2.000.000	KECAMATAN BOGOREJO	1	Kantor Kecamatan Bogorejo	
04	01	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Bogorejo			Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat	100 %	Tersedianya makan minum pegawai dan rapat rapat	12 Bulan	33.450.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	40.000.000	KECAMATAN BOGOREJO	1	Karyawan Kantor Kecamatan Bogorejo	
04	01	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Bogorejo			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	95 %	Kelancaran tugas Aparatur Pemerintah	12 Bulan	6.250.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	6.000.000	KECAMATAN BOGOREJO	1	Karyawan Kantor Kecamatan Bogorejo	
04	01	01	019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Bogorejo			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	98 %	Kelancaran tugas Aparatur Pemerintah	12 Bulan	32.690.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	35.000.000	KECAMATAN BOGOREJO	1	Karyawan Kantor Kecamatan Bogorejo	
04	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	1 Paket					0			0				
04	01	02	003	Pembangunan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Bogorejo			Jumlah gedung kantor yang dibangun	99 %	Tersedianya Gedung Kantor,Pagar kantor	1 Paket	1.000.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Paket	1.000.000.000	KECAMATAN BOGOREJO	1	Kantor Kecamatan Bogorejo	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	02	005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Bogorejo			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	3 Unit	Tersedianya kendaraan dinas	3 Unit	60.000.000	PAD, DAU, DBH	3 Unit	60.000.000	KECAMATAN BOGOREJO	1	Karyawan Kantor Kecamatan Bogorejo	
04	01	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Bogorejo			Persentase pemenuhan peralatan gedung kantor	100 %	Tersedianya peralatan Gedung kantor	2 Unit	10.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Unit	10.000.000	KECAMATAN BOGOREJO	1	Kantor Kecamatan Bogorejo	
04	01	02	010	Pengadaan mebeler	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Bogorejo			Persentase pemenuhan mebeler	100 %	terpenuhinya meubeleir kantor	2 Unit	12.000.000	PAD, DAU, DBH	3 Unit	20.000.000	KECAMATAN BOGOREJO	1	Kantor Kecamatan Bogorejo	
04	01	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Bogorejo			Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	98 %	Terpeliharanya kendaraan dinas roda dua dan roda empat	26 Unit	20.000.000	PAD, DAU, DBH	26 Unit	30.000.000	KECAMATAN BOGOREJO	1	Karyawan Kantor Kecamatan Bogorejo	
04	01	02	028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Bogorejo			Persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	98 %	Terpeliharanya peralatan kantor	3 Jenis	2.500.000	PAD, DAU, DBH	5 Jenis	5.000.000	KECAMATAN BOGOREJO	1	Kantor Kecamatan Bogorejo	
04	01	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				Pemenuhan kebutuhan pakaian seragam dinas	12 bulan					0			0				
04	01	03	005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi	Kecamatan Bogorejo			Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	100 %	Tersedianya pakaian hari hari tertentu	12 Bulan	10.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	10.000.000	KECAMATAN BOGOREJO	1	Karyawan Kantor Kecamatan Bogorejop	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										0			0				
04	01	06	004	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Bogorejo			Jumlah laporan keuangan akhir tahun	100 %	Terpenuhinya laporan keuangan akhir tahun	12 Bulan	1.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	1.000.000	KECAMATAN BOGOREJO	1	Kantor Kecamatan Bogorejo	
04	01	06	005	Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Bogorejo			Jumlah rencana kinerja dan penetapan kinerja	100 %	Tersedianya dokumen Renstra dan Renja OPD	12 Bulan	11.500.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	12.500.000	KECAMATAN BOGOREJO	1	Karyawan Kantor Kecamatan Bogorejo	
04	01	06	007	Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Bogorejo			Jumlah dokumen RKA-SKPD dan DPA SKPD	100 %	Tersedianya Dokumen RKA dan DPA OPD	4 Dokumen	2.500.000	PAD, DAU, DBH	4 Dokumen	2.500.000	KECAMATAN BOGOREJO	1	Kantor Kecamatan Bogorejo	
TOTAL														1.565.000.000			1.675.100.000				

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KABUPATEN BLORA

KECAMATAN TUNJUNGAN

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
04	01			ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																	
04	01	44		PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN				Terselenggaranya koordinasi dan pelayanan pada kecamataan	100%					199.204.000			260.000.000				
04	01	44	001	Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Tunjungan			Presentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	100 %	Terlaksananya Rakor Kaur, Rakor Kades	100 %	25.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	30.000.000	KECAMATAN TUNJUNGAN	1	Pemerintah Desa Kec. Tunjungan	
04	01	44	002	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Tunjungan			Presentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	100 %	Terlaksananya rakor bidang keamanan dan ketertiban, monitoring kamtibmas	15 Dokumen	25.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	35.000.000	KECAMATAN TUNJUNGAN	1	Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa	
04	01	44	003	Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Tunjungan			Presentase penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan	100 %	Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan monitoring	15 Desa	15.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	20.000.000	KECAMATAN TUNJUNGAN	1	Masyarakat Kecamatan Tunjungan dan Aparatnya	
04	01	44	005	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Tunjungan			Prosentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	100 %	Terlaksananya rakor Kades, rakor kasi desa dan pembinaan PASKIBRA Kecamatan	100 %	70.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	75.000.000	KECAMATAN TUNJUNGAN	1	Masyarakat dan Pelaksana Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa	
04	01	44	006	Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Tunjungan			Presentase pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	100 %	12 kali,6 kali, 12 kali , 74 anggota PASKIBRAKA	30 Kali	30.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	25.000.000	KECAMATAN TUNJUNGAN	1	Pemerintahan Desa	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	44	008	Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Tunjungan			Presentase pelaksanaan kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	100 %	Terlaksananya pembinaan PKK, Bunda PAUD, kegiatan lomba-loma dalam rangka HUT Kemerdekaan RI dan Hari Jadi Kab. Blora dan Karnaval	100 %	34.204.000	PAD, DAU, DBH	100 %	75.000.000	KECAMATAN TUNJUNGAN	1	Masyarakat, Pemerintah Kecamatan dan pemerintahan Desa	
04	01	47		PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA UMUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN				Terselenggaranya Penyediaan sarana dan prasarana umum dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan	100%					15.000.000			25.000.000				
04	01	47	002	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Tunjungan			Persentase pelaksanaan Kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	4 kali, 4 bulan 1 dokumen	1 Dokumen	15.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	25.000.000	KECAMATAN TUNJUNGAN	1		
04	01	48		PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH KECAMATAN				Terselenggaranya kegiatan pengembangan wilayah kecamatan	100%					63.645.000			115.000.000				
04	01	48	001	Evaluasi Perencanaan dan Keuangan Desa	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Tunjungan			Jumlah dokumen evaluasi perencanaan dan keuangan desa	100 %	Tersusunnya dokumen RKPDesa, APB Desa dan Laporan Keuangan 15 Desa	15 Dokumen	15.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	45.000.000	KECAMATAN TUNJUNGAN	1	Pemerintah Desa	
04	01	48	002	Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Tunjungan			Jumlah dokumen musyawarah pembangunan desa/kelurahan dan kecamatan	17 Dokumen	Tersedianya data Musrenbang tingkat Kabupaten, Kecamatan dan 15 Desa	17 Dokumen	30.000.000	PAD, DAU, DBH	17 Dokumen	45.000.000	KECAMATAN TUNJUNGAN	1	Pemerintah Desa	
04	01	48	003	Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Tunjungan			Prosentase hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan	100 %	Meningkatnya pembayaran PBB Desa	15 Desa	18.645.000	PAD, DAU, DBH	100 %	25.000.000	KECAMATAN TUNJUNGAN	1	Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa	
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
04	01			ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%					0			0				
04	01	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Tunjungan			Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat	100 %	terlaksananya pengiriman surat menyurat	100 %	3.021.000	PAD, DAU, DBH	100 %	4.500.000	KECAMATAN TUNJUNGAN	1	Aparatur Kecamatan Tunjungan	
04	01	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Tunjungan			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	100 %	Terbayarnya rekening listrik dan Biaya internet kantor	12 Bulan	15.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	20.000.000	KECAMATAN TUNJUNGAN	1	Aparatus Kecamatan Tunjngan	
04	01	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Tunjungan			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100 %	Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional	100 %	9.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	10.000.000	KECAMATAN TUNJUNGAN	1	Pemerintah Kecamatan Tunjungan	
04	01	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Tunjungan			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan	100 %	Terbayarnya honor petugas penata usahaan keuangan OPD	100 %	29.410.000	PAD, DAU, DBH	100 %	35.000.000	KECAMATAN TUNJUNGAN	1	Aparatur Kecamatan Tunjungan	
04	01	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Tunjungan			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor	100 %	Tersedianya peralatan dan bahan pembersih kantor, dan Honorarium Tenaga Kebersihan kantor	100 %	30.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	35.000.000	KECAMATAN TUNJUNGAN	1	kantor kecamatan Tunjungan	
04	01	01	009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Tunjungan			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja	100 %	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	100 %	25.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	55.265.000	KECAMATAN TUNJUNGAN	1	Pemerintah Kecamatan Tunjungan	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Tunjungan			Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	100 %	Tersedianya alat tulis kantor 32 macam	100 %	14.500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	35.000.000	KECAMATAN TUNJUNGAN	1	Kecamatan Tunjungan	
04	01	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Tunjungan			Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100 %	Terlaksananya penggandaan surat-surat, laporan dan cetak	100 %	7.368.000	PAD, DAU, DBH	100 %	20.000.000	KECAMATAN TUNJUNGAN	1	Kecamatan Tunjungan	
04	01	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Tunjungan			Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	Tersedianya komponen listrik/penerangan kantor	100 %	6.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	25.000.000	KECAMATAN TUNJUNGAN	1	Kecamatan Tunjungan	
04	01	01	013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Tunjungan			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	20.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	35.000.000	KECAMATAN TUNJUNGAN	1	Kecamatan Tunjungan	
04	01	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Tunjungan			Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	Terlaksananya pengadaan koran dan majalah	100 %	5.600.000	PAD, DAU, DBH	100 %	25.000.000	KECAMATAN TUNJUNGAN	1	Kecamatan Tunjungan	
04	01	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Tunjungan			Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat	100 %	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan rapat-rapat	100 %	25.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	35.000.000	KECAMATAN TUNJUNGAN	1	Aparatur Kecamatan Tunjungan	
04	01	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Tunjungan			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	100 %	12.500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	20.000.000	KECAMATAN TUNJUNGAN	1	Aparatus Kecamatan Tunjungan	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	01	019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Tunjungan			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	100 %	20.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	25.000.000	KECAMATAN TUNJUNGAN	1	Aparatus Kecamatan Tunjungan	
04	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%					0			0				
04	01	02	005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Tunjungan			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	2 Unit	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional	2 Unit	52.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Unit	52.000.000	KECAMATAN TUNJUNGAN	1	Aparatus Kecamatan Tunjungan	
04	01	02	010	Pengadaan mebeler	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan mebeler	100 %	Terlaksananya pengadaan mebeler kantor	100 %	15.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	27.000.000	KECAMATAN TUNJUNGAN	1	Kecamatan Tunjungan	
04	01	02	021	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase rumah dinas dalam kondisi baik	100 %	Terlaksananya Pemeliharaan rutin, berkala rumah dinas	100 %	12.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	25.000.000	KECAMATAN TUNJUNGAN	1	Kecamatan Tunjunga	
04	01	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Tunjungan			Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	100 %	Tersedianya kendaraan dinas yang baik	100 %	23.600.000	PAD, DAU, DBH	100 %	138.140.000	KECAMATAN TUNJUNGAN	1	Aparatur Kecamatan Tunjungan	
04	01	02	025	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase perlengkapan rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik	100 %	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan rumah dinas	100 %	5.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	7.500.000	KECAMATAN TUNJUNGAN	1	Kecamatan Tunjungan	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	02	029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeler	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase mebeler dalam kondisi baik	100 %	Terlaksananya pemeliharaan mebeler kantor	100 %	5.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	7.500.000	KECAMATAN TUNJUNGAN	1	Kantor Kecamatan Tunjungan	
04	01	02	042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Tunjungan			Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Terlaksananya rehab berta gedung kantor	1 Unit	200.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	1.500.000.000	KECAMATAN TUNJUNGAN	1	Pemerintah Kecamatan. Tunjungan	
04	01	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				Pemenuhan kebutuhan pakaian seragam dinas	100%					0			0				
04	01	03	005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi				Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	100 %	Terlaksananya pengadaan pakaian adat	10 Unit	10.800.000	PAD, DAU, DBH	20 Set	20.000.000	KECAMATAN TUNJUNGAN	1	Aparatur Kecamatan Tunjungan	
04	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				Pemenuhan kebutuhan pelaporan kinerja dan keuangan	100%					0			0				
04	01	06	005	Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Tunjungan			Jumlah rencana kinerja dan penetapan kinerja	100 %	Terlaksananya penyusunan Renja, Laporan evaluasi pelaksanaan Renja, LKJiP dan LPPD dll	6 Dokumen	5.000.000	PAD, DAU, DBH	6 Dokumen	15.000.000	KECAMATAN TUNJUNGAN	1	Kantor Kecamatan Tunjungan	
TOTAL														828.648.000			2.571.905.000				

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KABUPATEN BLORA

KECAMATAN BANJAREJO

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
04	01			ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																	
04	01	44		PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN				Terselenggaranya koordinasi dan pelayanan pada kecamataan	1 tahun					186.500.000			176.500.000				
04	01	44	001	Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Presentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	100 %	Tersedianya dokumen dan laporan gerakan sayang ibu dan anak	100 %	10.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	10.000.000	KECAMATAN BANJAREJO	1	Desa di wilayah kecamatan	
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Presentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	100 %	Tersedianya dokumen dan laporan pasar murah	100 %	10.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	10.000.000	KECAMATAN BANJAREJO	1	Desa di wilayah kecamatan	
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Presentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	100 %	Tersedianya dokumen data dan pemberdayaan sosial kemasyarakatan	100 %	15.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	15.000.000	KECAMATAN BANJAREJO	1	Desa di wilayah kecamatan	
04	01	44	002	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Presentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	100 %	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di desa	100 %	15.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	15.000.000	KECAMATAN BANJAREJO	1	Desa di wilayah kecamatan	
04	01	44	003	Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Presentase penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan	100 %	Tersedianya dokumen data pelanggaran peraturan perundang-undangan	100 %	16.500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	16.500.000	KECAMATAN BANJAREJO	1	Desa di wilayah kecamatan Banjarejo	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	44	005	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Prosentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	100 %	Tersedianya dokumen pelayanan	100 %	15.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	15.000.000	KECAMATAN BANJAREJO	1	wilayah kecamatan Banjarejo	
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Prosentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	100 %	Tersedianya dokumen IMB	100 %	10.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	10.000.000	KECAMATAN BANJAREJO	1	wilayah kecamatan Banjarejo	
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Prosentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	100 %	Tersedianya dokumen data kependudukan pertanahan,Produk Hukum desa dan pemerintahan	100 %	40.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	40.000.000	KECAMATAN BANJAREJO	1	wilayah kecamatan Banjarejo	
04	01	44	008	Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Presentase pelaksanaan kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	100 %	Tersedianya dokumen data dan laporan penerimaan Raskin,Rastra	100 %	15.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	15.000.000	KECAMATAN BANJAREJO	1	wilayah kecamatan Banjarejo	
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Presentase pelaksanaan kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	100 %	Tersedianya dokumen / data dan laporan PAUD	100 %	10.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	10.000.000	KECAMATAN BANJAREJO	1	wilayah kecamatan Banjarejo	
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Presentase pelaksanaan kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	100 %	Tersedianya dokumen laporan data dan laporan tentang pkk desa dan terselenggaranya pameran	100 Dokumen	30.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	20.000.000	KECAMATAN BANJAREJO	1	wilayah kecamatan Banjarejo	
04	01	48		PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH KECAMATAN				Terselenggaranya kegiatan pengembangan wilayah kecamatan						62.966.000			62.966.000				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	48	001	Evaluasi Perencanaan dan Keuangan Desa	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah dokumen evaluasi perencanaan dan keuangan desa	20 Dokumen	Tersedianya RKP desa	20 Dokumen	15.000.000	PAD, DAU, DBH	20 Dokumen	15.000.000	KECAMATAN BANJAREJO	1	Desa di wilayah kecamatan Banjarejo	
04	01	48	002	Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah dokumen musyawarah pembangunan desa/kelurahan dan kecamatan	20 Dokumen	Tersedianya dokumen data hasil Musrenbang desa	20 Dokumen	25.000.000	PAD, DAU, DBH	20 Dokumen	25.000.000	KECAMATAN BANJAREJO	1	Kecamatan Banjarejo	
04	01	48	003	Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Prosentase hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan	100 %	Tersedianya dokumen data evaluasi hasil penarikan PBB	100 %	22.966.000	PAD, DAU, DBH	100 %	22.966.000	KECAMATAN BANJAREJO	1	Desa di wilayah kecamatan Banjarejo	
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
04	01			ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																	
04	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%					0			0				
								Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran													
04	01	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat	100 %	terkirimnya surat dan tertibnya dokumen	100 %	5.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	5.000.000	KECAMATAN BANJAREJO	1	Kecamatan Banjarejo	
04	01	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	100 %	Terpenuhinya kebutuhan Listri dan Telekomunikasi	100 %	35.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	35.000.000	KECAMATAN BANJAREJO	1	Kecamatan Banjarejo	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100 %	Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang memadai	100 %	6.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	6.000.000	KECAMATAN BANJAREJO	1	Kecamatan Banjarejo	
04	01	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan	100 %	lancarnya pengelolaan keuangan,penata usahaan,dan laporan keuangan dan barang	100 %	50.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	50.000.000	KECAMATAN BANJAREJO	1	Kecamatan Banjarejo	
04	01	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor	100 %	Tersedianya alat - alat kebersihan kantor	100 %	50.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	50.000.000	KECAMATAN BANJAREJO	1	Kecamatan Banjarejo	
04	01	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	100 %	Tersedianya alat tulis kantor	100 %	40.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	40.000.000	KECAMATAN BANJAREJO	1	Kecamatan Banjarejo	
04	01	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100 %	Tersedianya cetakan, penggandaan, dan penjilidan	100 %	10.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	10.000.000	KECAMATAN BANJAREJO	1	Kecamatan Banjarejo	
04	01	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	Tersedianya komponan / alat listrik	100 %	11.500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	11.500.000	KECAMATAN BANJAREJO	1	Kecamatan Banjarejo	
04	01	01	013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	25.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	25.000.000	KECAMATAN BANJAREJO	1	Kecamatan Banjarejo	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	Meningkatkan wawasan pengetahuan karyawan / masyarakat umum	100 %	1.500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	1.500.000	KECAMATAN BANJAREJO	1	Kecamatan Banjarejo	
04	01	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat	100 %	Tersedianya makanan dan minuman	100 %	25.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	25.000.000	KECAMATAN BANJAREJO	1	Kecamatan Banjarejo	
04	01	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Terlaksananya rapat - rapat dan koordinasi konsultasi ke luar daerah dan pengadaan bbm	100 %	8.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	8.000.000	KECAMATAN BANJAREJO	1	Kecamatan Banjarejo	
04	01	01	019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Terlaksananya rapat - rapat dan koordinasi/ konsultasi ke dalam daerah dan BBM	100 %	30.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	30.000.000	KECAMATAN BANJAREJO	1	Kecamatan Banjarejo	
04	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	1 paket					0			0				
04	01	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan peralatan gedung kantor	100 %	Tersedianya peralatan gedung Kantor	100 %	16.500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	16.500.000	KECAMATAN BANJAREJO	1	Kecamatan Banjarejo	
04	01	02	010	Pengadaan mebeler	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan mebeler	100 %	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	100 %	10.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	10.000.000	KECAMATAN BANJAREJO	1	Kecamatan Banjarejo	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	02	021	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase rumah dinas dalam kondisi baik	100 %	Terpeliharanya rumah dinas	100 %	5.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	5.000.000	KECAMATAN BANJAREJO	1	Kecamatan Banjarejo	
04	01	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Terpeliharanya gedung kantor	100 %	10.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	10.000.000	KECAMATAN BANJAREJO	1	Kecamatan Banjarejo	
04	01	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	100 %	Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang memadai	100 %	25.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	25.000.000	KECAMATAN BANJAREJO	1	Kecamatan Banjarejo	
04	01	02	028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Tersedianya paralatan gedung kantor yang memadai	100 %	10.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	10.000.000	KECAMATAN BANJAREJO	1	Kecamatan Banjarejo	
04	01	02	029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeler	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase mebeler dalam kondisi baik	100 %	Terpeliharanya Mebel Kantor yang layak	100 %	5.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	5.000.000	KECAMATAN BANJAREJO	1	Kecamatan Banjarejo	
04	01	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR										0			0				
04	01	03	005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi				Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	30 Unit	Pengadaan pakaian Olah Raga	30 Buah	25.000.000	PAD, DAU, DBH	30 Unit	25.000.000	KECAMATAN BANJAREJO	1	Kecamatan Banjarejo	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										0			0				
04	01	06	005	Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah rencana kinerja dan penetapan kinerja	2 Dokumen	Dokumen SKPD dan Renja SKPD	2 Dokumen	5.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Dokumen	5.000.000	KECAMATAN BANJAREJO	1	Kecamatan Banjarejo	
TOTAL														657.966.000			647.966.000				

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KABUPATEN BLORA

KECAMATAN CEPU

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
04	01			ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																	
04	01	44		PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN				Terselenggaranya koordinasi dan pelayanan pada kecamataan	1 Kecamatan					275.000.000			325.500.000				
04	01	44	001	Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Presentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	100 %	Tersedianya laporan tentang Rakor perangkat Desa/Kelurahan,Dokumen dan data tentang keagamaan,pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan	6 Dokumen	35.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	15.500.000	KECAMATAN CEPU	1	Perangkat Desa dan Kelurahan serta masyarakat umum di Kecamatan Cepu	
04	01	44	002	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Presentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	100 %	Tersedianya laporan kamtibmas,terlaksananya Rakor SINERGITAS dan terwujudnya keamanan dan ketertiban dan sosiali IMB masyarakat	3 Laporan	40.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	65.000.000	KECAMATAN CEPU	1	Kecamatan Cepu	
04	01	44	003	Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Presentase penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan	100 %	Terselenggaranya Rakor penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan	3 Kali	30.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	60.000.000	KECAMATAN CEPU	1	Kecamatan Cepu	
04	01	44	005	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Prosentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	100 %	Terlaksananya rakord Kades/Kalur,Sekdes/Seklur,Kaur Pemerintahan,Pakaian Paskibra dan Forkompincam	17 Desa/Kelurahan	70.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	75.000.000	KECAMATAN CEPU	1	Kades/Kalur,Sekdes/Seklur,Kaur Pemerintahan dan Paskibraka di Kecamatan Cepu	
04	01	44	008	Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Presentase pelaksanaan kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	100 %	Tersedianya dokumen data dan laporan Sosialisasi Rastra, Penanggulangan Kemiskinan, GSI, PHBS, Pasar Murah, Bunda PAUD, Rakor Penanggulangan isu strategis nasional terkait kesehatan dan Pameran pembangunan potensi hasil pembangunan dan produk-produk UKM	6 Dokumen	70.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	75.000.000	KECAMATAN CEPU	1	Kecamatan Cepu	
04	01	44	009	Koordinasi kegiatan pelayanan masyarakat di kelurahan dan desa	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Prosentase pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di kelurahan dan desa	100 %	Terlaksananya sosialisasi dan pelayanan IMB dan Tersedianya tenaga pelayanan PATEN	100 %	30.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	35.000.000	KECAMATAN CEPU	1	Masyarakat umum yang membutuhkan pelayanan terkait kependudukan dan pelayanan lainya di Kecamatan Cepu	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	45		PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KELURAHAN				Terkoordinasikannya peningkatan kualitas pelayanan pada kelurahan	1 Kecamatan					1.184.030.000			1.190.000.000				
04	01	45	001	Penyediaan operasional kebutuhan rutin kelurahan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Prosentase pemenuhan operasional kegiatan kelurahan	100 %	Tersedianya data dan laporan tentang pelaksanaan kegiatan Kelurahan	6 Dokumen	654.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	660.000.000	KECAMATAN CEPU	1	Kelurahan di Kecamatan Cepu	
04	01	45	003	Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kelurahan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan pelayanan masyarakat pada kelurahan	409 %	Tersedianya dokumen data dan laporan tentang ruang lingkup RT/RW serta meningkatnya kinerja pelayanan RT/RW	437 Orang	400.250.000	PAD, DAU, DBH	100 %	400.000.000	KECAMATAN CEPU	1	Kelurahan di Kecaman Cepu	
04	01	45	008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Prosentase sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun dan terpelihara	100 %	Meningkatnya pelayanan Kelurahan	6 Keg	129.780.000	PAD, DAU, DBH	100 %	130.000.000	KECAMATAN CEPU	1	Kecamatan Cepu	
04	01	47		PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA UMUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN				Terselenggaranya Penyediaan sarana dan prasarana umum dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan						120.000.000			130.000.000				
04	01	47	002	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pelaksanaan Kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	Terselenggaranya Posyandu Kelurahan dengan baik	6 Dokumen	120.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	130.000.000	KECAMATAN CEPU	1	Posyandu Kelurahan di Kecamatan Cepu	
04	01	48		PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH KECAMATAN				Terselenggaranya kegiatan pengembangan wilayah kecamatan	1 Kecamatan					75.003.000			85.000.000				
04	01	48	001	Evaluasi Perencanaan dan Keuangan Desa	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah dokumen evaluasi perencanaan dan keuangan desa	11 Dokumen	Tersedianya dokumen RKPPDES, APBDES dan Laporan Bulanan APBDES	11 Desa	15.000.000	PAD, DAU, DBH	6 Dokumen	20.000.000	KECAMATAN CEPU	1	Desa di Kecamatan Cepu	
04	01	48	002	Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah dokumen musyawarah pembangunan desa/kelurahan dan kecamatan	18 Dokumen	Tersedianya dokumen data Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan	18 Dokumen	25.000.000	PAD, DAU, DBH	18 Dokumen	30.000.000	KECAMATAN CEPU	1	Masyarakat di wilayah Kecamatan Cepu	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	48	003	Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Prosentase hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan	100 %	Terlaksananya Penderasan PBB dan Sosialisasi PBB	100 %	35.003.000	PAD, DAU, DBH	100 %	35.000.000	KECAMATAN CEPU	1	Kecamatan Cepu	
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
04	01			ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																	
04	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%					0			0				
04	01	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat	100 %	Tersedianya Dokumen Kegiatan Kantor	100 %	1.200.000	PAD, DAU, DBH	100 %	1.296.000	KECAMATAN CEPU	1	Kecamatan Cepu	
04	01	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	100 %	Tersedianya Jasa air,telepon dan listrik	100 %	40.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	45.000.000	KECAMATAN CEPU	1	Kecamatan Cepu	
04	01	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100 %	Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional kantor	100 %	10.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	12.000.000	KECAMATAN CEPU	1	Kecamatan Cepu	
04	01	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan	100 %	Terlaksananya kegiatan OPD	11 Orang	57.300.000	PAD, DAU, DBH	100 %	58.000.000	KECAMATAN CEPU	1	Kecamatan Cepu	
04	01	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor	100 %	Terpeliharanya kebersihan kantor dan tenaga kebersihan	100 %	24.300.000	PAD, DAU, DBH	100 %	25.000.000	KECAMATAN CEPU	1	Kecamatan Cepu	
04	01	01	009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja	100 %	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor	100 %	3.500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	3.800.000	KECAMATAN CEPU	1	Kecamatan Cepu	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	100 %	Lancarnya tugas aparatur	17 Jenis	12.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	12.500.000	KECAMATAN CEPU	1	Kecamatan Cepu	
04	01	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100 %	Lancarnya pelaksanaan tugas aparatur	2500 Buah	6.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	6.500.000	KECAMATAN CEPU	1	Kecamatan Cepu	
04	01	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	8 Jenis	5.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	5.500.000	KECAMATAN CEPU	1	Kecamatan Cepu	
04	01	01	013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	4 Jenis	75.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	100.000.000	KECAMATAN CEPU	1	Kecamatan Cepu	
04	01	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan pegawai	3 Buah	4.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	4.500.000	KECAMATAN CEPU	1	Kecamatan Cepu	
04	01	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat	100 %	Terpenuhinya makan minum harian tamu, rapat dan kegiatan	3 Jenis	34.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	45.000.000	KECAMATAN CEPU	1	Kecamatan Cepu	
04	01	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Terlaksananya rakor dan konsultasi keluar daerah	15 Laporan	5.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	8.500.000	KECAMATAN CEPU	1	Kecamatan Cepu	
04	01	01	019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Terlaksananya koordinasi, konsultasi dalam daerah dan monitoring	250 Kali	42.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	65.000.000	KECAMATAN CEPU	1	Kecamatan Cepu	
04	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%					0			0				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	02	003	Pembangunan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 Unit	1 Gedung pelayanan yang memadai	1 Unit	200.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Unit	300.000.000	KECAMATAN CEPU	1	Kecamatan Cepu	
04	01	02	012	Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor	100 %	1 Pos Jaga dan 1 Kanopi Mushola	2 Unit	60.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	65.000.000	KECAMATAN CEPU	1	Kecamatan Cepu	
04	01	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Tersedianya gedung kantor yang memadai	1 Unit	50.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	45.000.000	KECAMATAN CEPU	1	Kecamatan Cepu	
04	01	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	100 %	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	14 Unit	40.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	45.000.000	KECAMATAN CEPU	1	Kecamatan Cepu	
04	01	02	028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai	13 Unit	5.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	7.000.000	KECAMATAN CEPU	1	Kecamatan Cepu	
04	01	02	029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeler	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase mebeler dalam kondisi baik	100 %	Service Jok Kursi	1 Unit	5.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	5.500.000	KECAMATAN CEPU	1	Kecamatan Cepu	
04	01	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				Pemenuhan kebutuhan pakaian seragam dinas						0			0				
04	01	03	005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi				Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	9 Unit	Tersedianya pakaian kirab hari jadi	9 Buah	2.700.000	PAD, DAU, DBH	9 Unit	5.000.000	KECAMATAN CEPU	1	Kecamatan Cepu	
04	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										0			0				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	06	005	Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah rencana kinerja dan penetapan kinerja	3 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan kantor	3 Dokumen	2.500.000	PAD, DAU, DBH	3 Dokumen	2.600.000	KECAMATAN CEPU	1	Kecamatan Cepu	
TOTAL														2.338.533.000			2.598.196.000				

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KABUPATEN BLORA

KECAMATAN JIKEN

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
04	01			ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																	
04	01	44		PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN				Terselenggaranya koordinasi dan pelayanan pada kecamataan	Kecamatan					220.000.000			179.000.000				
04	01	44	001	Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jiken			Presentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	100 %	Terlaksanaya koordinasi upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi, terlaksanaya koordinasi peningkatan dan kemampuan dasar masyakat dalam memperkecil angka kemiskinan.	37 Kali	30.000.000	PAD, DAU, DBH	37 Kali	15.000.000	KECAMATAN JIKEN	1	Masyarakat dan PKK Se Kecamatan Jiken	
04	01	44	002	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jiken			Presentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	100 %	Tersedianya Dokumen data Ketentraman dan ketertiban di Wil.Kecamatan dan desa, Terlaksananya Pembekalan Linmas e	30 Kali	35.000.000	PAD, DAU, DBH	30	12.000.000	KECAMATAN JIKEN	1		
04	01	44	005	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jiken			Prosentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	100 %	Terselenggaranya Rakor Kependudukan, Pertanahan, produk hukum dan pemerintahan dan Paskibraka Desas	82 Kali	65.000.000	PAD, DAU, DBH	82	20.000.000	KECAMATAN JIKEN	1		
04	01	44	008	Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jiken			Presentase pelaksanaan kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	100 %	Terlasananya Koordinasi, Pembinaan Bunda/Guru PAUD, lomba tk kabupaten, pasar murah. dan BOP Raskin	115 Jenis	55.000.000	PAD, DAU, DBH	115	120.000.000	KECAMATAN JIKEN	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	44	009	Koordinasi kegiatan pelayanan masyarakat di kelurahan dan desa	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jiken			Prosentase pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di kelurahan dan desa	100 %	Terlaksananya pelayanan IMB di Tingkat kecamatan	11 Desa	35.000.000	PAD, DAU, DBH	11	12.000.000	KECAMATAN JIKEN	1		
04	01	48		PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH KECAMATAN				Terselenggaranya kegiatan pengembangan wilayah kecamatan	Kecamatan					49.377.000			57.000.000				
04	01	48	001	Evaluasi Perencanaan dan Keuangan Desa	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jiken			Jumlah dokumen evaluasi perencanaan dan keuangan desa	44 Dokumen	Tersedianya Dokumen RKPDes, APBDes dan laporan APBDes	44 Dokumen	15.000.000	PAD, DAU, DBH	44	23.000.000	KECAMATAN JIKEN	1		
04	01	48	002	Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jiken			Jumlah dokumen musyawarah pembangunan desa/kelurahan dan kecamatan	100 Dokumen	Terlaksananya Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan	11 Desa	20.000.000	PAD, DAU, DBH	34	15.000.000	KECAMATAN JIKEN	1		
04	01	48	003	Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jiken			Prosentase hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan	100 %	Tersedianya dokumen data laporan hasil penarikan pajak bumi dan bangunan	11 Desa	14.377.000	PAD, DAU, DBH	11	19.000.000	KECAMATAN JIKEN	1		
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
04	01			ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																	
04	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%					0			0				
								Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran													

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jiken			Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat	100 %	Terkirimnya surat menyurat dan tertib administrasi	132 Buah	3.300.000	PAD, DAU, DBH	132	4.000.000	KECAMATAN JIKEN	1		
04	01	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jiken			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	100 %	Tersedianya jasa komunikasi dan listrik	12 Bulan	29.400.000	PAD, DAU, DBH	12	40.000.000	KECAMATAN JIKEN	1		
04	01	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kantor Kecamatan Jiken			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100 %	Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 dua , Roda 2 (14)	16 Buah	4.400.000	PAD, DAU, DBH	17 Buah	4.500.000	KECAMATAN JIKEN	1		
04	01	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jiken			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan	99 %	Terlaksananya kegiatan OPD	120 Kali	52.205.000	PAD, DAU, DBH	120	70.000.000	KECAMATAN JIKEN	1		
04	01	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jiken			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor	100 %	Kebersihan Kantor terjaga dan kebersihan kantor terpelihara	12 Bulan	17.820.000	PAD, DAU, DBH	24	24.712.000	KECAMATAN JIKEN	1		
04	01	01	009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jiken			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja	100 %	Tersedianya peralatan kerja yang memadai	12 Unit	4.200.000	PAD, DAU, DBH	12	6.000.000	KECAMATAN JIKEN	1		
04	01	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jiken			Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	100 %	Tersedianya Alat Tulis Kantor	47 Jenis	22.000.000	PAD, DAU, DBH	47	26.000.000	KECAMATAN JIKEN	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jiken			Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100 %	Tersedianya Cetak spanduk, RKA, DPA, Lap Keuangan dan fotocopy	97527 Dokumen	4.000.000	PAD, DAU, DBH	97527	8.000.000	KECAMATAN JIKEN	1		
04	01	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jiken			Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	Tersedianya Komponen instalasi listrik	6 Jenis	3.500.000	PAD, DAU, DBH	6	7.000.000	KECAMATAN JIKEN	1		
04	01	01	013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jiken			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	Tersedianya Perlengkapan dan peralatan kantor	31 Buah	6.000.000	PAD, DAU, DBH	31	25.000.000	KECAMATAN JIKEN	1		
04	01	01	014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jiken			Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga	100 %	Tersedianya peralatan rumah tangga	6 Jenis	2.000.000	PAD, DAU, DBH	6	10.000.000	KECAMATAN JIKEN	1		
04	01	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jiken			Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	Meningkatnya wawasan, pengetahuan karyawan	30 Orang	3.600.000	PAD, DAU, DBH	30	5.000.000	KECAMATAN JIKEN	1		
04	01	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jiken			Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat	100 %	Tersedianya Makanan dan minuman	4 Jenis	10.755.000	PAD, DAU, DBH	4	12.000.000	KECAMATAN JIKEN	1		
04	01	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jiken			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Terlaksananya rapat-rapat dan Koordinasi konsultasi ke luar daerah dan tercukupinya BBM	12 Bulan	8.300.000	PAD, DAU, DBH	12	6.000.000	KECAMATAN JIKEN	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	01	019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jiken			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Terlaksananya rapat-rapat dan koordinasi konsultasi dalam daerah dan kebutuhan BBM	120 Kali	48.500.000	PAD, DAU, DBH	120	50.000.000	KECAMATAN JIKEN	1		
04	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Kecamatan					0			0				
								Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	kecamatan												
04	01	02	003	Pembangunan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jiken			Jumlah gedung kantor yang dibangun	100 Unit	Tersediannya gedung kantor	1 Unit	1.000.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Unit	50.000.000	KECAMATAN JIKEN	1		
04	01	02	005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jiken			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1 Unit	Tersedianya kendaraan dinas operasional yang memadai	2 Unit	19.600.000	PAD, DAU, DBH	2	43.000.000	KECAMATAN JIKEN	1		
04	01	02	010	Pengadaan mebeler	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jiken			Persentase pemenuhan mebeler	100 %	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	25 Buah	5.500.000	PAD, DAU, DBH	25	20.000.000	KECAMATAN JIKEN	1		
04	01	02	021	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jiken			Persentase rumah dinas dalam kondisi baik	100 %	Tersedianya rumah dinas yang memadai	1 Unit	3.000.000	PAD, DAU, DBH	1	10.000.000	KECAMATAN JIKEN	1		
04	01	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jiken			Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Tersedianya Gedung kantor yang memadai	5 Unit	3.000.000	PAD, DAU, DBH	5	12.000.000	KECAMATAN JIKEN	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jiken			Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	100 %	Tersedianya kendaraan dinas operasional dan BBM yang memadai	12 Bulan	27.000.000	PAD, DAU, DBH	12	35.000.000	KECAMATAN JIKEN	1		
04	01	02	029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeler	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jiken			Persentase mebeler dalam kondisi baik	100 %	Terpenuhinya kebutahan peralatan mebelair yang memadai	15 Unit	5.000.000	PAD, DAU, DBH	15	8.000.000	KECAMATAN JIKEN	1		
04	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				Pemenuhan kebutuhan pelaporan kinerja dan keuangan	Kecamatan					0			0				
04	01	06	005	Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Jiken			Jumlah rencana kinerja dan penetapan kinerja	28 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan dan laporan keuangan	28 Dokumen	16.920.000	PAD, DAU, DBH	28	31.424.000	KECAMATAN JIKEN	1		
TOTAL														1.569.377.000			743.636.000				

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KABUPATEN BLORA

KECAMATAN SAMBONG

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
04	01			ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																	
04	01	44		PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN				Terselenggaranya koordinasi dan pelayanan pada kecamataan	10 desa					205.000.000			205.300.000				
04	01	44	001	Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Sambong			Presentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	100 %	Terlaksanaya koordinasi upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi, terlaksanaya koordinasi peningkatan dan kemampuan dasar masyakat dalam memperkecil angka kemiskinan dan kegiatan lomba-lomba daN PKK	10 Dokumen	35.000.000	PAD, DAU, DBH	10 Desa	40.000.000	KECAMATAN SAMBONG	1		
04	01	44	002	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	kecamatan Sambong			Presentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	100 %	Tersedianya Dokumen data Ketentraman dan ketertiban di Wil.Kecamatan dan desa, Terlaksananya rakor kantibmas,pembinaan linmas, ketentraman dan ketertiban pemilu	10 Dokumen	30.000.000	PAD, DAU, DBH	10 Desa	20.000.000	KECAMATAN SAMBONG	1		
04	01	44	003	Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Sambong			Presentase penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan	100 %	peraturan perundang-undangan	10 Desa	10.000.000	PAD, DAU, DBH	10 Desa	15.000.000	KECAMATAN SAMBONG	1		
04	01	44	005	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Sambong			Prosentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	100 %	Terselenggaranya Rakor kades, kalur, sekdes Kependudukan, Pertanahan, produk hukum dan pemerintahan dan Paskibraka, forkopincam	10 Dokumen	60.000.000	PAD, DAU, DBH	10 Desa	60.000.000	KECAMATAN SAMBONG	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	44	008	Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Sambong			Presentase pelaksanaan kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	100 %	Tereselenggaranya rakor penanggulangan isu strategis nasional terkait kesehatan untuk meningkatkan Peran Kecamatan Pasar Murah, Bunda PAUD, GSIB, PHBS	10 Desa	50.000.000	PAD, DAU, DBH	10 Desa	50.300.000	KECAMATAN SAMBONG	1		
04	01	44	009	Koordinasi kegiatan pelayanan masyarakat di kelurahan dan desa	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Sambong			Prosentase pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di kelurahan dan desa	100 %	Sosialisasi ijin mendirikan bangunan (IMB) dan IUMK dan koordinasi pelayanan,Paten Adminduk,Pengurusan KTP,KK,SKCK dan surat pindah	10 Desa	20.000.000	PAD, DAU, DBH	10 Desa	20.000.000	KECAMATAN SAMBONG	1		
04	01	48		PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH KECAMATAN				Terselenggaranya kegiatan pengembangan wilayah kecamatan	11 dokumen					45.000.000			50.000.000				
04	01	48	001	Evaluasi Perencanaan dan Keuangan Desa	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Sambong			Jumlah dokumen evaluasi perencanaan dan keuangan desa	10 Dokumen	tersedianya Dokumen RKPdes dan APBDes, Tersedianya dokumen laporan APBdes	10 Dokumen	15.000.000	PAD, DAU, DBH	10 Dokumen	20.000.000	KECAMATAN SAMBONG	1		
04	01	48	002	Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Sambong			Jumlah dokumen musyawarah pembangunan desa/kelurahan dan kecamatan	11 Dokumen	Terlaksananya Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan	11 Dokumen	20.000.000	PAD, DAU, DBH	11 Dokumen	20.000.000	KECAMATAN SAMBONG	1		
04	01	48	003	Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Sambong			Prosentase hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan	100 %	Tersedianya dokumen data laporan hasil penarikan pajak bumi dan bangunan	10 Dokumen	10.000.000	PAD, DAU, DBH	10 Dokumen	10.000.000	KECAMATAN SAMBONG	1		
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
04	01			ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																	
04	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	4 jenis					0			0				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Sambong			Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat	100 %	Tersedianya dokumen keuangan dan terkirimnya surat	220 Buah	2.000.000	PAD, DAU, DBH	220 Buah	2.000.000	KECAMATAN SAMBONG	1		
04	01	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Sambong			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	100 %	Tersedianya jasa komunikasi dan listrik	12 Bulan	36.500.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	36.500.000	KECAMATAN SAMBONG	1		
04	01	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Sambong			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100 %	Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional	17 Unit	4.500.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	6.000.000	KECAMATAN SAMBONG	1		
04	01	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Sambong			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan	100 %	Terlaksanaya kegiatan OPD	12 Tahun	44.900.000	PAD, DAU, DBH	12 Tahun	58.200.000	KECAMATAN SAMBONG	1		
04	01	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Sambong			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor	100 %	Kebersihan Kantor terjaga dan kebersihan kantor terpelihara	21 Jenis	15.000.000	PAD, DAU, DBH	21 Jenis	21.000.000	KECAMATAN SAMBONG	1		
04	01	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Sambong			Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	100 %	Tersedianya alat tulis kantor guna 33 kegiatan	27 Buah	15.188.000	PAD, DAU, DBH	27 Buah	20.000.000	KECAMATAN SAMBONG	1		
04	01	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Sambong			Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100 %	Tersediannya amplop, blangko, blangko kendali dan fotocopian	12 Bulan	4.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	6.000.000	KECAMATAN SAMBONG	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Sambong			Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	Tersedianya komponen listrik	10 Jenis	2.500.000	PAD, DAU, DBH	10 Jenis	15.000.000	KECAMATAN SAMBONG	1		
04	01	01	014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Sambong			Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga	100 %	Tersedianya penyediaan peralatan rumah tangga	9 Jenis	4.000.000	PAD, DAU, DBH	9 Jenis	4.000.000	KECAMATAN SAMBONG	1		
04	01	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Sambong			Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	Meningkatnya pengetahuan karyawan dan sumber informasi Kecamatan	3 Jenis	2.412.000	PAD, DAU, DBH	9 Jenis	2.500.000	KECAMATAN SAMBONG	1		
04	01	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Sambong			Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat	100 %	Tersedianya minuman rapat harian rapat dan tersedianya makanan dan minuman rapat	2000 Orang	20.000.000	PAD, DAU, DBH	2000 Orang	30.000.000	KECAMATAN SAMBONG	1		
04	01	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Sambong			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	35 %	Tersedianya Laporan Hasil Rakor dan Konsultasi Keluar Daerah	35 Kali	8.000.000	PAD, DAU, DBH	35 Kali	10.000.000	KECAMATAN SAMBONG	1		
04	01	01	019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Sambong			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Tersedianya Laporan Hasil Rakor dan Konsultasi Kedalam Daerah	220 Laporan	20.000.000	PAD, DAU, DBH	220 Laporan	25.000.000	KECAMATAN SAMBONG	1		
04	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	3 jenis					0			0				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	02	007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Sambong			Persentase pemenuhan perlengkapan gedung kantor	100 %	Tersediannya, teralis besi dan gorden kantor	2 Unit	40.000.000	PAD, DAU, DBH	4 Jenis	50.000.000	KECAMATAN SAMBONG	1		
04	01	02	010	Pengadaan mebeler	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Sambong			Persentase pemenuhan mebeler	100 %	Tersedianya kursi rapat, 5 almari buku, rak besi metal untuk penyimpan arsip	4 Jenis	10.000.000	PAD, DAU, DBH	4 Jenis	16.000.000	KECAMATAN SAMBONG	1		
04	01	02	012	Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Sambong			Persentase pemenuhan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor	100 %	Tereralisasinya 2 buah pintu pagar kantor kecamatan	2 Buah	30.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Buah	45.000.000	KECAMATAN SAMBONG	1		
04	01	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Sambong			Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	100 %	Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang memadai BBM kendaraan dinas Camat terpenuhi	17 Unit	7.500.000	PAD, DAU, DBH	17 Unit	12.000.000	KECAMATAN SAMBONG	1		
04	01	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				Pemenuhan kebutuhan pakaian seragam dinas	18					0			0				
04	01	03	002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi	Kecamatan Sambong			Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	18 Unit	Tersedianya pakaian hari-hari tertentu	18 Orang	7.500.000	PAD, DAU, DBH	18 Orang	9.000.000	KECAMATAN SAMBONG	1		
04	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				Pemenuhan kebutuhan pelaporan kinerja dan keuangan	4 dokumen					0			0				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	06	005	Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Sambong			Jumlah rencana kinerja dan penetapan kinerja	4 Dokumen	Tersusunnya Renstra, Renja, Penetapan Kinerja dan tersediannya tenaga honorer tenaga administrasi	4 Dokumen	16.000.000	PAD, DAU, DBH	4 Dokumen	16.000.000	KECAMATAN SAMBONG	1		
TOTAL														540.000.000			639.500.000				

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KABUPATEN BLORA

KECAMATAN KEDUNGTUBAN

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
04	01			ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																	
04	01	44		PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN										247.600.000			268.000.000				
04	01	44	001	Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Desa - desa se Kecamatan Kedungtuban			Presentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	100 %	Terselenggaranya koordinasi dan pelayanan pada kecamatan	17 Desa	40.000.000	PAD, DAU, DBH	17 Desa	45.000.000	KECAMATAN KEDUNGTUBAN	1	Kegiatan PKK, Pameran pembangunan potensi wilayah	
04	01	44	002	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Aparatur Desa dan Kecamatan			Presentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	100 %	Terselenggaranya koordinasi dan pelayanan pada kecamatan	17 Desa	38.000.000	PAD, DAU, DBH	100 Desa	38.000.000	KECAMATAN KEDUNGTUBAN	1	Rakor kamtimas, pembinaan Linmas, monitoring dan honorarium tenaga kontrak (pengamanan)	
04	01	44	003	Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Aparatur Kecamatan Kedungtuban			Presentase penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan	100 %	Terselenggaranya koordinasi dan pelayanan pada kecamatan	17 Desa	20.000.000	PAD, DAU, DBH	17 Desa	20.000.000	KECAMATAN KEDUNGTUBAN	1	Rakor Sosialisasi produk produk perundangan, Perda dan perjalanan dinas dalam daerah	
04	01	44	005	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Aparatur Kecamatan Kedungtuban			Prosentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	100 %	Terselenggaranya koordinasi dan pelayanan pada kecamatan	17 Desa	50.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	55.000.000	KECAMATAN KEDUNGTUBAN	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	44	008	Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Aparatur Kecamatan Kedungtuban			Presentase pelaksanaan kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	100 %	Terselenggaranya koordinasi dan pelayanan pada kecamatan	17 Desa	55.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	60.000.000	KECAMATAN KEDUNGTUBAN	1	Rastra, tasyakuran, PAUD, Kegiatan Pasar Murah ,Bayi kurang gizi, GSIB, PHBS	
04	01	44	009	Koordinasi kegiatan pelayanan masyarakat di kelurahan dan desa	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Aparatur Kecamatan Kedungtuban			Prosentase pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di kelurahan dan desa	100 %	Terselenggaranya koordinasi dan pelayanan pada kecamatan	17 Desa	44.600.000	PAD, DAU, DBH	17 Desa	50.000.000	KECAMATAN KEDUNGTUBAN	1	Pelayanan SKCK, IMB, KTP, KK, Jaskesda, BPJS, Ijin keramaian	
04	01	48		PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH KECAMATAN										61.598.000			63.000.000				
04	01	48	001	Evaluasi Perencanaan dan Keuangan Desa	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Desa - desa se Kecamatan Kedungtuban			Jumlah dokumen evaluasi perencanaan dan keuangan desa	17 Dokumen	Terselenggaranya kegiatan pengembangan wilayah kecamatan	17 Desa	15.000.000	PAD, DAU, DBH	17 Desa	15.000.000	KECAMATAN KEDUNGTUBAN	1		
04	01	48	002	Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Desa - desa se Kecamatan Kedungtuban			Jumlah dokumen musyawarah pembangunan desa/kelurahan dan kecamatan	17 Dokumen	Terselenggaranya kegiatan pengembangan wilayah kecamatan	17 Desa	25.000.000	PAD, DAU, DBH	17 Desa	26.000.000	KECAMATAN KEDUNGTUBAN	1		
04	01	48	003	Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Desa - desa se Kecamatan Kedungtuban			Prosentase hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan	100 %	Terselenggaranya kegiatan pengembangan wilayah kecamatan	17 Desa	21.598.000	PAD, DAU, DBH	17 Desa	22.000.000	KECAMATAN KEDUNGTUBAN	1		
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
04	01			ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																	
04	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran						0			0				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat	100 %	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	12 Bulan	2.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	2.000.000	KECAMATAN KEDUNGTUBAN	1	materai dan jasa surat	
04	01	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	100 %	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	12 Bulan	32.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	32.000.000	KECAMATAN KEDUNGTUBAN	1	Pembayaran Rekening listrik dan telepon	
04	01	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100 %	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	1 Tahun	5.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	6.000.000	KECAMATAN KEDUNGTUBAN	1	Jasa service, Pembayaran Pajak STNK	
04	01	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan	100 %	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	12 Bulan	45.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	50.000.000	KECAMATAN KEDUNGTUBAN	1	Jasa pengelola keuangan dan barang daerah	
04	01	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor	100 %	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	25 Jenis	17.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	17.000.000	KECAMATAN KEDUNGTUBAN	1		
04	01	01	009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja	100 %	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	12 Jenis	7.500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	8.000.000	KECAMATAN KEDUNGTUBAN	1		
04	01	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	100 %	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	37 Jenis	20.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	22.000.000	KECAMATAN KEDUNGTUBAN	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100 %	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	12 Bulan	4.500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	5.000.000	KECAMATAN KEDUNGTUBAN	1		
04	01	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	12 Jenis	5.500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	6.500.000	KECAMATAN KEDUNGTUBAN	1		
04	01	01	013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	6 Jenis	45.400.000	PAD, DAU, DBH	100 %	35.000.000	KECAMATAN KEDUNGTUBAN	1		
04	01	01	014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga	100 %	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	3 Jenis	5.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	20.000.000	KECAMATAN KEDUNGTUBAN	1		
04	01	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	1 Tahun	3.500.000	PAD, DAU, DBH	100	4.000.000	KECAMATAN KEDUNGTUBAN	1		
04	01	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat	100 %	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	12 Bulan	15.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	25.000.000	KECAMATAN KEDUNGTUBAN	1		
04	01	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	8 Laporan	4.500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	5.000.000	KECAMATAN KEDUNGTUBAN	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan									
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	01	019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	430 Laporan	50.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	60.000.000	KECAMATAN KEDUNGTUBAN	1		
04	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur						0			0				
04	01	02	003	Pembangunan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 Unit	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	1 Paket	200.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Unit	400.000.000	KECAMATAN KEDUNGTUBAN	1	Pelayanan masyarakat Kecamatan Kedungtuban	
04	01	02	021	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase rumah dinas dalam kondisi baik	100 %	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	1 Unit	5.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	5.000.000	KECAMATAN KEDUNGTUBAN	1		
04	01	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	1 Unit	15.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	25.000.000	KECAMATAN KEDUNGTUBAN	1		
04	01	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	100 %	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	1 Tahun	35.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	40.000.000	KECAMATAN KEDUNGTUBAN	1		
04	01	02	026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	2.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	3.000.000	KECAMATAN KEDUNGTUBAN	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	02	028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	6 Jenis	4.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	5.000.000	KECAMATAN KEDUNGTUBAN	1		
04	01	02	029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeler	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase mebeler dalam kondisi baik	100 %	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	5 Jenis	3.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	5.000.000	KECAMATAN KEDUNGTUBAN	1		
04	01	02	030	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	1 Paket	11.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	10.000.000	KECAMATAN KEDUNGTUBAN	1		
04	01	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR										0			0				
04	01	03	005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi				Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	30 Unit	Pemenuhan kebutuhan pakaian seragam dinas	30 Orang	8.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	10.000.000	KECAMATAN KEDUNGTUBAN	1		
04	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										0			0				
04	01	06	005	Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah rencana kinerja dan penetapan kinerja	3 Dokumen	Pemenuhan kebutuhan pelaporan kinerja dan keuangan	3 Dokumen	2.500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	3.500.000	KECAMATAN KEDUNGTUBAN	1		
TOTAL														856.598.000			1.135.000.000				

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KABUPATEN BLORA

KECAMATAN NGAWEN

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
04	01			ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																	
04	01	44		PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN				Terselenggaranya koordinasi dan pelayanan pada kecamataan	1					303.500.000			293.000.000				
04	01	44	001	Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Presentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	100 %	Terwujudnya peran serta gender dalam pembangunan	100 Keg	55.000.000	PAD, DAU, DBH	1	70.000.000	KECAMATAN NGAWEN	1		
04	01	44	002	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Presentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	100 %	Terciptanya kondusifitas wilayah kecamatan	100 %	45.000.000	PAD, DAU, DBH	1	33.000.000	KECAMATAN NGAWEN	1		
04	01	44	005	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	KECAMATAN NGAWEN			Prosentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	100 %	Terwujudnya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan	24 Kali	95.000.000	PAD, DAU, DBH	1 %	95.000.000	KECAMATAN NGAWEN	1		
04	01	44	008	Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kab. Blora			Presentase pelaksanaan kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	100 %	Terwujudnya pemberdayaan perempuan diwilayah kecamatan dan desa	27 Desa	73.500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	85.000.000	KECAMATAN NGAWEN	1	Kecamatan Ngawen	
04	01	44	009	Koordinasi kegiatan pelayanan masyarakat di kelurahan dan desa	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kab. Blora			Prosentase pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di kelurahan dan desa	100 %	pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di kelurahan dan desa	100 %	35.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	10.000.000	KECAMATAN NGAWEN	1	KECAMATAN NGAWEN	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	45		PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KELURAHAN				Terkoordinasikannya peningkatan kualitas pelayanan pada kelurahan	1					417.518.000			517.500.000				
04	01	45	001	Penyediaan operasional kebutuhan rutin kelurahan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di kelurahan dan desa			Prosentase pemenuhan operasional kegiatan kelurahan	100 %	Terselenggaranya administrasi perkantoran 2 kelurahan	2 Keg	200.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	220.000.000	KECAMATAN NGAWEN	1		
04	01	45	003	Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kelurahan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	KELURAHAN NGAWEN DAN PUNGGURSUGIH			Persentase pemenuhan pelayanan masyarakat pada kelurahan	100 %	Terselenggaranya pelayanan non administrasi kantor masyarakat kelurahan	100 %	111.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	167.500.000	KECAMATAN NGAWEN	1		
04	01	45	008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	KELURAHAN NGAWEN DAN PUNGGURSUGIH			Prosentase sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun dan terpelihara	100 %	Terpeliharanya Gedung kelurahan	100 %	106.518.000	PAD, DAU, DBH	100 %	130.000.000	KECAMATAN NGAWEN	1		
04	01	47		PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA UMUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN				Terselenggaranya Penyediaan sarana dan prasarana umum dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan	1					40.000.000			57.500.000				
04	01	47	002	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kab. Blora			Persentase pelaksanaan Kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam peningkatan PAD dan terwujudnya peningkatan gizi balita	100 %	40.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	57.500.000	KECAMATAN NGAWEN	1		
04	01	48		PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH KECAMATAN				Terselenggaranya kegiatan pengembangan wilayah kecamatan	1					67.786.000			80.000.000				
04	01	48	001	Evaluasi Perencanaan dan Keuangan Desa	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	KECAMATAN NGAWEN			Jumlah dokumen evaluasi perencanaan dan keuangan desa	27 Dokumen	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan dan pelaporan keuangan desa	100 %	15.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	25.000.000	KECAMATAN NGAWEN	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	48	002	Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	KECAMATAN NGAWEN			Jumlah dokumen musyawarah pembangunan desa/kelurahan dan kecamatan	29 Dokumen	Tersusunnya usulan pembangunan desa dan kecamatan	100 %	30.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	25.000.000	KECAMATAN NGAWEN	1		
04	01	48	003	Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kab. Blora			Prosentase hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan	100 %	Terwujudnya kelancaran pembayaran PBB dalam rangka realisasi PAD	100 %	22.786.000	PAD, DAU, DBH	100 %	30.000.000	KECAMATAN NGAWEN	1		
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
04	01			ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																	
04	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%					0			0				
04	01	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat	100 %	Terselenggaranya administrasi keuangan dan surat menyurat	100 %	3.200.000	PAD, DAU, DBH	100 %	3.900.000	KECAMATAN NGAWEN	1		
04	01	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	100 %	Tersedianya sarana komonikasi, penerangan dan air bersih	100 %	40.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	41.000.000	KECAMATAN NGAWEN	1		
04	01	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	KECAMATAN NGAWEN			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100 %	Perpanjangan STNK	100 %	4.800.000	PAD, DAU, DBH	100 %	5.000.000	KECAMATAN NGAWEN	1		
04	01	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan	100 %	Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	100 %	47.200.000	PAD, DAU, DBH	100 %	50.000.000	KECAMATAN NGAWEN	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor	100 %	Terwujudnya kebersihan dan kenyamanan kantor	100 %	32.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	38.000.000	KECAMATAN NGAWEN	1		
04	01	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	100 %	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100 %	32.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	40.000.000	KECAMATAN NGAWEN	1		
04	01	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100 %	Tersedianya kebutuhan cetak dan media publikasi	100 %	3.600.000	PAD, DAU, DBH	100 %	4.000.000	KECAMATAN NGAWEN	1		
04	01	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kab. Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	Tersedianya komponen alat-alat listrik	100 %	4.800.000	PAD, DAU, DBH	100 %	5.000.000	KECAMATAN NGAWEN	1		
04	01	01	013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	Tersedianya peralatan kantor yang memadai	100 %	20.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	32.000.000	KECAMATAN NGAWEN	1		
04	01	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	Tersedianya bahan bacaan	100 %	3.600.000	PAD, DAU, DBH	100 %	4.800.000	KECAMATAN NGAWEN	1		
04	01	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat	100 %	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi	100 %	25.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	38.000.000	KECAMATAN NGAWEN	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	100 %	12.300.000	PAD, DAU, DBH	100 %	18.000.000	KECAMATAN NGAWEN	1		
04	01	01	019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	KECAMATAN NGAWEN			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsoltasi dalam daerah	100 %	30.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	42.000.000	KECAMATAN NGAWEN	1		
04	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100					0			0				
04	01	02	005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	KECAMATAN NGAWEN			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	2 Unit	100	1 Keg	42.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Unit	42.000.000	KECAMATAN NGAWEN	1	KECAMATAN NGAWEN	
04	01	02	010	Pengadaan mebeler	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan mebeler	100 %	Tersedianya mebelair kantor yang standar	100 %	10.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	25.000.000	KECAMATAN NGAWEN	1		
04	01	02	021	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	KECAMATAN NGAWEN			Persentase rumah dinas dalam kondisi baik	100 %	Tersedianya sarana tempat tinggal pejabat yang layak	100 %	10.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	20.000.000	KECAMATAN NGAWEN	1		
04	01	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kab. Blora			Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Terpeliharanya gedung kantor	100 %	25.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	32.000.000	KECAMATAN NGAWEN	1		
04	01	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kab. Blora			Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	100 %	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	100 %	10.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	33.000.000	KECAMATAN NGAWEN	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR										0			0				
04	01	03	005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi	Kecamatan ngawen			Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	1 Unit	Terwujudnya kekompokan dan kedisiplinan aparatur	100 %	6.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Unit	7.500.000	KECAMATAN NGAWEN	1		
04	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										0			0				
04	01	06	005	Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Ngawen			Jumlah rencana kinerja dan penetapan kinerja	7 Dokumen	Tersusunnya rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kinerja	100 %	5.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	5.000.000	KECAMATAN NGAWEN	1		
TOTAL														1.195.304.000			1.434.200.000				

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KABUPATEN BLORA

KECAMATAN KUNDURAN

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
04	01			ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																	
04	01	44		PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN				Terselenggaranya koordinasi dan pelayanan pada kecamataan	3 kali					260.000.000			215.000.000				
04	01	44	001	Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Presentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	100 %	Rakor perangkat Desa dan Kelurahan,Rakor KESRA,Rakor Gerakan SAYANG IBU DAN ANAK	26 Desa	40.000.000	PAD, DAU, DBH	26 Desa	30.000.000	KECAMATAN KUNDURAN	1	Perangkat Desa dan Kelurahan serta masyarakat umum di Kecamatan Kunduran	
04	01	44	002	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Presentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	100 %	Rakor kamtibmas Desa/Kelurahan,,Rakor Sinergitas,Sosialisasi Penegakan Perda IMB	26 Desa	45.000.000	PAD, DAU, DBH	26 Desa	25.000.000	KECAMATAN KUNDURAN	1	Masyarakat Umum, Linmas	
04	01	44	005	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Prosentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	100 %	terselenggaranya rakor di bidang pemerintahan	26 Desa	75.000.000	PAD, DAU, DBH	26 Desa/Kelurahan	65.000.000	KECAMATAN KUNDURAN	1	desa dan kelurahan di Kecamatan Kunduran	
04	01	44	008	Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Presentase pelaksanaan kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	100 %	Rakor dan Pembinaan TP PKK,Pembinaan PAUD,BOP RASKIN,dan Pasar Murah	26 Desa	65.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Kec	60.000.000	KECAMATAN KUNDURAN	1	TP PKK, PAUD, Masyarakat Miskin, masyarakat Umum	
04	01	44	009	Koordinasi kegiatan pelayanan masyarakat di kelurahan dan desa	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Prosentase pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di kelurahan dan desa	100 %	Sosialisasi dan Pelayanan IMB dan Tenaga Pelayanan PATEN	26 Desa	35.000.000	PAD, DAU, DBH	26 Desa/Kelurahan	35.000.000	KECAMATAN KUNDURAN	1	masyarakat di wilayah Kecamatan Kunduran	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	45		PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KELURAHAN				Terkoordinasikannya peningkatan kualitas pelayanan pada kelurahan	sarana dan prasarana di kelurahan Kunduran menjadi baik					335.700.000			445.000.000				
04	01	45	001	Penyediaan operasional kebutuhan rutin kelurahan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Prosentase pemenuhan operasional kegiatan kelurahan	100 %	tercukupinya kebutuhan rutin kelurahan	1 Kel	112.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Desa/Kelurahan	120.000.000	KECAMATAN KUNDURAN	1	KELURAHAN KUNDURAN	
04	01	45	003	Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kelurahan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan pelayanan masyarakat pada kelurahan	100 %	pelayanan lancar dan sesuai standar pelayanan	1 Kel	68.500.000	PAD, DAU, DBH	1 Kel	75.000.000	KECAMATAN KUNDURAN	1	KELURAHAN KUNDURAN	
04	01	45	008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Prosentase sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun dan terpelihara	100 %	terpeliharanya sarana dan prasarana umum di kelurahan	1 Kel	155.200.000	PAD, DAU, DBH	2 Keg	250.000.000	KECAMATAN KUNDURAN	1	sarana dan prasarana di kelurahan Kunduran	
04	01	48		PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH KECAMATAN				Terselenggaranya kegiatan pengembangan wilayah kecamatan	26 dokumen					66.125.000			81.125.000				
04	01	48	001	Evaluasi Perencanaan dan Keuangan Desa	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah dokumen evaluasi perencanaan dan keuangan desa	26 Dokumen	terlaksananya kegiatan perencanaan dan pengawasan keuangan desa, tersusunnya dokumen perencanaan dan keuangan desa	26 Desa	15.000.000	PAD, DAU, DBH	26 Dokumen	25.000.000	KECAMATAN KUNDURAN	1	26 desa, 1 Kecamatan	
04	01	48	002	Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah dokumen musyawarah pembangunan desa/kelurahan dan kecamatan	1 Dokumen	musrenbang 25 desa, 1 kelurahan dan musrenbang Kecamatan	1 Kec	25.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Kec	30.000.000	KECAMATAN KUNDURAN	1	KECAMATAN KUNDURAN	
04	01	48	003	Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Prosentase hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan	26 %	tercapainya pembayaran PBB tepat waktu dan tepat jumlah	26 Desa	26.125.000	PAD, DAU, DBH	100 %	26.125.000	KECAMATAN KUNDURAN	1	25 desa , 1 kelurahan	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
04	01			ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																	
04	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran						0			0				
								Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	12 bulan												
04	01	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat	100 %	tersedianya kebutuhan materai untuk dokumen keuangan	100 %	3.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	3.000.000	KECAMATAN KUNDURAN	1	kegiatan kesekretariatan di Kecamatan Kunduran	
04	01	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	100 %	kebutuhan listrik, telepon dan internet kantor terpenuhi	100 %	24.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	25.000.000	KECAMATAN KUNDURAN	1	Jasa rekening listrik, telepon dan internet	
04	01	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100 %	pajak kendaraan dinas terbayar	100 %	5.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	5.000.000	KECAMATAN KUNDURAN	1	kendaraan dinas di Kecamatan Kunduran	
04	01	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan	100 %	jasa administrasi keuangan terpenuhi	100 %	65.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	68.000.000	KECAMATAN KUNDURAN	1	tim administrasi keuangan dan tim pengadaan barang dan jasa	
04	01	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor	100 %	kebutuhan untuk kegiatan kebersihan terpenuhi	100 %	12.800.000	PAD, DAU, DBH	1 %	14.100.000	KECAMATAN KUNDURAN	1	tenaga kebersihan dan kegiatan kebersihan di Kantor Kecamatan Kunduran	
04	01	01	009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja	100 %	terpeliharanya peralatan kerja kantor,kinerja lancar	100 %	5.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	7.000.000	KECAMATAN KUNDURAN	1	peralatan kerja di kantor Kecamatan Kunduran	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	100 %	terpenuhinya alat tulis kantor	100 %	7.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	11.000.000	KECAMATAN KUNDURAN	1	kegiatan administrasi dan kesekretariatan di Kecamatan Kunduran	
04	01	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100 %	terpenuhinya kebutuhan cetak amplop, spanduk dan penggandaan dokumen	100 %	5.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	7.000.000	KECAMATAN KUNDURAN	1	kegiatan cetak dan fotokopi di Kecamatan Kunduran	
04	01	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	terpenuhinya kebutuhan peralatan instalasi listrik	100 %	5.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	5.000.000	KECAMATAN KUNDURAN	1	instalasi listrik di kantor Kecamatan Kunduran	
04	01	01	013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	30.101.000	PAD, DAU, DBH	3 Unit	60.000.000	KECAMATAN KUNDURAN	1	APARATUR KECAMATAN KUNDURAN	
04	01	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	tersedianya bahan bacaan	100 %	1.500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	1.500.000	KECAMATAN KUNDURAN	1	aparatur Kecamatan Kunduran	
04	01	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat	100 %	terpenuhinya kebutuhan minuman pegawai dan tamu	100 %	7.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	7.500.000	KECAMATAN KUNDURAN	1	aparatur Kecamatan Kunduran	
04	01	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	terselenggaranya perjalanan dinas keluar daerah yang efektif	100 %	8.000.000	PAD, DAU, DBH	1 %	70.000.000	KECAMATAN KUNDURAN	1	aparatur Kecamatan Kunduran	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	01	019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	terselenggaranya perjalanan dinas ke dalam daerah yang efektif	100 %	50.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	70.000.000	KECAMATAN KUNDURAN	1	aparatur Kecamatan Kunduran	
04	01	01	020	Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan dukungan pelayanan perkantoran	100 %	terpenuhinya kebutuhan kemanan kantor	2 Orang	21.600.000	PAD, DAU, DBH	2 Orang	30.000.000	KECAMATAN KUNDURAN	1	KECAMATAN KUNDURAN	
04	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	3 unit					0			0				
04	01	02	007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan perlengkapan gedung kantor	100 %	tersdianya perlengkapan gedung kantor	100 %	8.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	10.000.000	KECAMATAN KUNDURAN	1		
04	01	02	010	Pengadaan mebeler	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan mebeler	100 %	tersedianya mebeler	100 %	35.000.000	PAD, DAU, DBH	20 %	80.000.000	KECAMATAN KUNDURAN	1	aparatur Kecamatan Kunduran	
04	01	02	012	Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor	100 %	tersedianya bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor	3 Unit	250.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Unit	50.000.000	KECAMATAN KUNDURAN	3	KECAMATAN KUNDURAN	
04	01	02	021	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase rumah dinas dalam kondisi baik	100 %	rumah dinas terpelihara	100 %	10.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	15.000.000	KECAMATAN KUNDURAN	1	Rumah dinas camat	
04	01	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	terpeliharanya gedung kantor	100 %	10.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	100.000.000	KECAMATAN KUNDURAN	1	gedung kantor	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	100 %	kendaraan dinas terpelihara	100 %	36.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	40.000.000	KECAMATAN KUNDURAN	1		
04	01	02	028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	terpeliharanya peralatan gedung kantor, kinerja lancar	100 %	8.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	8.000.000	KECAMATAN KUNDURAN	1		
04	01	02	029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeler	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase mebeler dalam kondisi baik	100 %	terpeliharanya mebeler kantor	100 %	5.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	5.000.000	KECAMATAN KUNDURAN	1		
04	01	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR										0			0				
04	01	03	005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi				Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	15 Unit	tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	100 %	8.000.000	PAD, DAU, DBH	9 Unit	10.000.000	KECAMATAN KUNDURAN	3		
04	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										0			0				
04	01	06	005	Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah rencana kinerja dan penetapan kinerja	3 Dokumen	tersusunnya dokumen Renja, Renstra dan Lap. Kinerja	100 %	2.000.000	PAD, DAU, DBH	3 Dokumen	2.500.000	KECAMATAN KUNDURAN	1		
TOTAL														1.283.826.000			1.445.725.000				

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KABUPATEN BLORA

KECAMATAN TODANAN

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
04	01			ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																	
04	01	44		PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN				Terselenggaranya koordinasi dan pelayanan pada kecamataan	100 %					185.500.000			280.000.000				
04	01	44	001	Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Todanan			Presentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	100 %	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat desa	25 Desa	5.500.000	PAD, DAU, DBH	25 Desa	17.000.000	KECAMATAN TODANAN	1	kader pemberdayaan masyarakat desa	
04	01	44	002	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Todanan			Presentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	100 %	Terlaksananya rakor kamtibmas, pembinaan linmas, ketentraman dan ketertiban pemilu	25 Desa	25.000.000	PAD, DAU, DBH	25 Desa	20.000.000	KECAMATAN TODANAN	1	Linmas	
04	01	44	005	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Todanan			Prosentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	100 %	Terwujudnya rakor kades, sekdes, kaur pemerintahan, pakaian paskibra dan forkopimcam	100 %	50.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	33.000.000	KECAMATAN TODANAN	1	Forkopimcam, paskibra, kepala desa, sekretaris desa danperangkat desa	
04	01	44	008	Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Todanan			Presentase pelaksanaan kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	100 %	Terselenggarakanya kegiatan PKK, Sosialisasi Rastra, Penanggulangan kemiskinan, GSI, PHBS, Pasar Murah, Bunda PAUD, Rakor penanggulangan isu strategis nasional terkait kesehatan dan Pameran Pembangunan	9 Keg	80.000.000	PAD, DAU, DBH	8 Keg	180.000.000	KECAMATAN TODANAN	1	PKK, PAUD, Masyarakat Miskin, UKM, Pemerintah Desa	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	44	009	Koordinasi kegiatan pelayanan masyarakat di kelurahan dan desa	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Todanan			Prosentase pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di kelurahan dan desa	100 %	Terwujudnya PATEN, Adminduk : pengurusan KTP, KK, SKCK, surat pindah, IMB dan IUMK	100 %	25.000.000	PAD, DAU, DBH	4 Keg	30.000.000	KECAMATAN TODANAN	1	Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa	
04	01	48		PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH KECAMATAN				Terselenggaranya kegiatan pengembangan wilayah kecamatan	100 %					68.744.000			87.000.000				
04	01	48	001	Evaluasi Perencanaan dan Keuangan Desa	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Todanan			Jumlah dokumen evaluasi perencanaan dan keuangan desa	25 Dokumen	Terwujudnya Evaluasi perencanaan dan keuangan desa	25 Dokumen	15.000.000	PAD, DAU, DBH	25 Dokumen	30.000.000	KECAMATAN TODANAN	1	Pemerintah Desa	
04	01	48	002	Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Todanan			Jumlah dokumen musyawarah pembangunan desa/kelurahan dan kecamatan	26 Dokumen	Terwujudnya perencanaan pembangunan desa dan kecamatan dengan baik dan benar	26 Dokumen	30.000.000	PAD, DAU, DBH	26 Dokumen	27.000.000	KECAMATAN TODANAN	1	Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan	
04	01	48	003	Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Todanan			Prosentase hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan	100 %	Terwujudnya pembayaran pajak bumi dan bangunan sesuai target dan kegiatan	100 %	23.744.000	PAD, DAU, DBH	100 %	30.000.000	KECAMATAN TODANAN	1	Pemerintah Desa dan petugas pemungut pajak bumi dan bangunan	
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
04	01			ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																	
04	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %					0			0				
04	01	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Todanan			Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat	100 %	Tersusunnya dokumen administrasi keuangan , materai, perangko	12 Bulan	4.000.000	PAD, DAU, DBH	80 Dokumen	6.000.000	KECAMATAN TODANAN	1	OPD lain	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Todanan			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	100 %	Terbayarnya jasa komunikasi, air dan listrik	12 Bulan	18.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	30.000.000	KECAMATAN TODANAN	1	Pemerintah Kecamatan	
04	01	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Todanan			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100 %	Terbayarnya pajak kendaraan dinas /operasional kantor	26 Unit	5.000.000	PAD, DAU, DBH	26 Unit	27.000.000	KECAMATAN TODANAN	1	Pemerintah Kecamatan	
04	01	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Todanan			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan	100 %	Terwujudnya kelancaran kegiatan pengeloaan adminstrasi keuangan dan barang	13 Orang	57.000.000	PAD, DAU, DBH	13 Orang	75.000.000	KECAMATAN TODANAN	1	Pejabat penatausahaan keuangan	
04	01	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Todanan			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor	100 %	Tersedianya jasa petugas kebersihan kantor , bahan pembersih dan alat pembersih	41 Jenis	18.000.000	PAD, DAU, DBH	41 Jenis	33.000.000	KECAMATAN TODANAN	1	Pemerintah Kecamatan	
04	01	01	009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Todanan			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja	100 %	Tercapainya pemeliharaan mebelair	13 Unit	2.500.000	PAD, DAU, DBH	4 Unit	15.000.000	KECAMATAN TODANAN	1	Pemerintah Kecamatan	
04	01	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Todanan			Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	100 %	Tersedianya ATK Kantor	35 Jenis	18.000.000	PAD, DAU, DBH	35 Jenis	23.000.000	KECAMATAN TODANAN	1	Pemerintah Kecamatan	
04	01	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Todanan			Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100 %	Terwujudnya fotocopy, cetak bener, amplop	6521 Buah	3.000.000	PAD, DAU, DBH	6521 Buah	6.000.000	KECAMATAN TODANAN	1	Pemerintah kecamatan, OPD lain dan Pemerintah Desa	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Todanan			Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	Tercukupinya sumber kebutuhan listrik dan penerangan kantor	8 Jenis	5.000.000	PAD, DAU, DBH	8 Jenis	7.500.000	KECAMATAN TODANAN	1	Pemerintah Kecamatan	
04	01	01	013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Todanan			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	Terpenuhinya peralatan kantor 2 unit komputer, layar proyektor, 4 Printer, 1 buah LCD	7 Unit	25.000.000	PAD, DAU, DBH	7 Unit	75.000.000	KECAMATAN TODANAN	1	Pemerintah Kecamatan	
04	01	01	014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Todanan			Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga	100 %	Terpenuhinya AC untuk rumah dinas	1 Unit	5.500.000	PAD, DAU, DBH	3 Unit	25.000.000	KECAMATAN TODANAN	1	Pemerintah Kecamatan	
04	01	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Todanan			Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	Terpenuhinya langganan Suara Merdeka	12 Bulan	1.800.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	2.500.000	KECAMATAN TODANAN	1	Pemerintah Kecamatan	
04	01	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Todanan			Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat	100 %	Terpenuhinya makan minum harian pegawai	12 Bulan	13.600.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	25.000.000	KECAMATAN TODANAN	1	Pemerintah Kecamatan dan tamu	
04	01	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Todanan			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Terselenggarakannya perjalanan dinas luar dareah yang efektif	20 Kali	5.000.000	PAD, DAU, DBH	20	20.000.000	KECAMATAN TODANAN	1	Pemerintah Kecamatan dan OPD Lain	
04	01	01	019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Todanan			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Terselenggarakannya rakor dan konsultasi dalam daerah	350 Kali	50.000.000	PAD, DAU, DBH	350 Kali	110.000.000	KECAMATAN TODANAN	1	Pemerintah Kecamatan dan OPD Lain	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur						0			0				
04	01	02	005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Todanan			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1 Unit	Terpenuhinya 1 unit kendaraan dinas roda 2 yang memadai	1 Unit	25.000.000	PAD, DAU, DBH	6 Unit	175.000.000	KECAMATAN TODANAN	3	Pemerintah Kecamatan	
04	01	02	007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Todanan			Persentase pemenuhan perlengkapan gedung kantor	100 %	Terpenuhinya 1 buah rak arsip yang memadai	1 Buah	5.000.000	PAD, DAU, DBH	4 Buah	50.000.000	KECAMATAN TODANAN	1	Pemerintah Kecamatan	
04	01	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Todanan			Persentase pemenuhan peralatan gedung kantor	100 %	Tersedianya Soud sistem Pendopo Kec.	1 Unit	5.000.000	PAD, DAU, DBH	4 Unit	90.000.000	KECAMATAN TODANAN	1	Pemerintah Kecamatan	
04	01	02	010	Pengadaan mebeler	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Todanan			Persentase pemenuhan mebeler	100 %	Terpenuhinya 2 buah kursi jabatan dan 16 buah kursi rapat	18 Unit	10.000.000	PAD, DAU, DBH	4 Jenis	75.000.000	KECAMATAN TODANAN	1	Pemerintah Kecamatan	
04	01	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Todanan			Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Terwujudnya gedung kantor yang memadai	1 Unit	100.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Unit	55.000.000	KECAMATAN TODANAN	1	Pemerintah Kecamatan	
04	01	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Todanan			Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	100 %	Terpeliharaanya kendaraan dinas 2 unit roda 4 dan 11 unit roda 2	13 Unit	10.000.000	PAD, DAU, DBH	13 Unit	35.000.000	KECAMATAN TODANAN	1	Pemerintah Kecamatan	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	02	028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Todanan			Persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Terpenuhinya pemeliharaan 4 unit AC gedung kantor	4 Unit	3.000.000	PAD, DAU, DBH	4 Unit	15.000.000	KECAMATAN TODANAN	1	Pemerintah Kecamatan	
04	01	02	029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeler	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Todanan			Persentase mebeler dalam kondisi baik	100 %	Terwujudnya pemeliharaan almari kantor	3 Unit	3.000.000	PAD, DAU, DBH	10 Unit	4.000.000	KECAMATAN TODANAN	1	Pemerintah Kecamatan	
04	01	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				Pemenuhan kebutuhan pakaian seragam dinas	100 %					0			0				
04	01	03	005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi	Kecamatan Todanan			Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	78 Unit	Terpenuhinya pakaian khusus hari-hari tertentu	78 Unit	15.100.000	PAD, DAU, DBH	78 Unit	35.000.000	KECAMATAN TODANAN	1	Pemerintah Kecamatan	
04	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				Pemenuhan kebutuhan pelaporan kinerja dan keuangan	100 %					0			0				
04	01	06	005	Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kecamatan Todanan			Jumlah rencana kinerja dan penetapan kinerja	10 Dokumen	Terpenuhinya Dokumen Renja, Renstra, IKU, LKJIP, PK, RKT,dan 2 orang tenaga administrasi	7 Unit	27.000.000	PAD, DAU, DBH	10 Dokumen	39.000.000	KECAMATAN TODANAN	1	Pemerintah Kecamatan, OPD lain	
TOTAL														688.744.000			1.420.000.000				

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KABUPATEN BLORA

KECAMATAN JAPAH

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
04	01			ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																	
04	01	44		PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN				Terselenggaranya koordinasi dan pelayanan pada kecamataan	1 Kec					269.000.000			269.000.000				
04	01	44	001	Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Presentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	100 %	Meningkatnya SDM Pengelola Keuangan Desa	100 %	35.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	35.000.000	KECAMATAN JAPAH	1	Masyarakat se-Kecamatan Japah	
04	01	44	002	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Presentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	100 %	Tersedianya Data Kecamatan dan Pengamanan Pemilu	100 %	40.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	40.000.000	KECAMATAN JAPAH	1	Petugas Keamanan dan Ketertiban se-Kecamatan Japah	
04	01	44	003	Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Presentase penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan	100 %	Terwujudnya Pelayanan yang Efektif dan Efisien	100 %	10.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	10.000.000	KECAMATAN JAPAH	1	Pemerintah Desa se-Kecamatan Japah	
04	01	44	005	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Prosentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	100 %	Terwujudnya Pemerintahan Desa yang Baik	100 %	60.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	60.000.000	KECAMATAN JAPAH	1	Pemerintah Desa se-Kecamatan Japah	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	44	008	Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Presentase pelaksanaan kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	100 %	Terlaksananya Pembinaan TP PKK, Lomba di tingkat Kecamatan dan Kabupaten, Pembinaan Bunda Paud, Terselenggaranya Pendistribusian Rastra, Rakor Satgas GSIB, Pasar Murah	100 %	82.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	82.000.000	KECAMATAN JAPAH	1	PKK, Bunda Paud, Masyarakat se-Kecamatan Japah	
04	01	44	009	Koordinasi kegiatan pelayanan masyarakat di kelurahan dan desa	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Prosentase pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di kelurahan dan desa	100 %	Paten, Adminduk, IMB dan IUMK	100 %	42.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	42.000.000	KECAMATAN JAPAH	1	Masyarakat se-Kecamatan Japah	
04	01	48		PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH KECAMATAN				Terselenggaranya kegiatan pengembangan wilayah kecamatan	100 %					54.042.000			54.042.000				
04	01	48	001	Evaluasi Perencanaan dan Keuangan Desa	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah dokumen evaluasi perencanaan dan keuangan desa	18 Dokumen	Terlaksananya Pengawasan Perencanaan dan Keuangan Desa	18 Dokumen	15.000.000	PAD, DAU, DBH	18 Dokumen	15.000.000	KECAMATAN JAPAH	1	Pemerintsh Desa se-Kecamatan Japah	
04	01	48	002	Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah dokumen musyawarah pembangunan desa/kelurahan dan kecamatan	20 Dokumen	Terlaksananya Musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten	20 Dokumen	25.000.000	PAD, DAU, DBH	20 Dokumen	25.000.000	KECAMATAN JAPAH	1	Pemerintah Kecamatan Japah	
04	01	48	003	Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Prosentase hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan	100 %	Tercapainya Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tepak Waktu	100 %	14.042.000	PAD, DAU, DBH	100 %	14.042.000	KECAMATAN JAPAH	1	Pemerintah Desa dan Petugas Pemungut PBB se-Kecamatan Japah	
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
04	01			ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %					0			0				
04	01	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat	100 %	Tersedianya Dokumen Keuangan	100 %	3.300.000	PAD, DAU, DBH	100 %	3.300.000	KECAMATAN JAPAH	1	Kecamatan Japah	
04	01	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	100 %	Tersedianya Jasa Listrik dan Internet	100 %	21.600.000	PAD, DAU, DBH	100 %	21.600.000	KECAMATAN JAPAH	1	Kecamatan Japah	
04	01	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100 %	Tersedianya Kendaraan Operasional Kantor	100 %	2.700.000	PAD, DAU, DBH	100 %	2.700.000	KECAMATAN JAPAH	1	Kecamatan Japah	
04	01	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan	100 %	Terlaksananya Pengelola Kegiatan OPD	100 %	50.800.000	PAD, DAU, DBH	100 %	50.800.000	KECAMATAN JAPAH	1	Kecamatan Japah	
04	01	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor	100 %	Tercukupinya Kebersihan Kantor	100 %	15.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	15.000.000	KECAMATAN JAPAH	1	Kecamatan Japah	
04	01	01	009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja	100 %	Tersedianya Peralatan Kantor yang Memadai	100 %	2.500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	2.500.000	KECAMATAN JAPAH	1	Kecamatan Japah	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	100 %	Tercukupinya Alat Tulis Kantor	100 %	19.500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	19.500.000	KECAMATAN JAPAH	1	Kecamatan Japah	
04	01	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100 %	Tersedianya Fotocopy dan Amplop Surat Dinas	100 %	3.900.000	PAD, DAU, DBH	100 %	3.900.000	KECAMATAN JAPAH	1	Kecamatan Japah	
04	01	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	Tersedianya Komponen Listrik	100 %	7.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	7.000.000	KECAMATAN JAPAH	1	Kecamatan Japah	
04	01	01	013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	Tersedianya Perlengkapan Kantor	100 %	25.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	25.000.000	KECAMATAN JAPAH	1	Kecamatan Japah	
04	01	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	Surat Kabar Sehingga Meningkatnya Pengetahuan Karyawan	100 %	4.080.000	PAD, DAU, DBH	100 %	4.080.000	KECAMATAN JAPAH	1	Kecamatan Japah	
04	01	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat	100 %	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	100 %	16.500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	16.500.000	KECAMATAN JAPAH	1	Kecamatan Japah	
04	01	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Terlaksananya Rakor dan Konsultasi di Luar Darah	100 %	5.700.000	PAD, DAU, DBH	100 %	5.700.000	KECAMATAN JAPAH	1	Kecamatan Japah	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	01	019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Terlaksananya Rakor dan Konsultasi Dalam Darah	100 %	32.500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	32.500.000	KECAMATAN JAPAH	1	Kecamatan Japah	
04	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %					0			0				
04	01	02	005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1 Unit	Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional	1 Unit	22.920.000	PAD, DAU, DBH	1 Unit	22.920.000	KECAMATAN JAPAH	1	Kecamatan Japah	
04	01	02	007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan perlengkapan gedung kantor	100 %	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100 %	10.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	10.000.000	KECAMATAN JAPAH	1	Kecamatan Japah	
04	01	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan peralatan gedung kantor	100 %	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	100 %	20.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	20.000.000	KECAMATAN JAPAH	1	Kecamatan Japah	
04	01	02	013	Pengadaan tanah gedung kantor, rumah dinas, dan rumah jabatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Luas tanah gedung kantor, rumah dinas, dan rumah jabatan yang diadakan	100 %	Terlaksananya Penggantian Tanah Desa untuk Kantor Kecamatan	100 %	1.000.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	1.000.000.000	KECAMATAN JAPAH	1	Kecamatan Japah	
04	01	02	021	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase rumah dinas dalam kondisi baik	100 %	Tersedianya Rumah Dinas Camat yang memadai	100 %	2.500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	2.500.000	KECAMATAN JAPAH	1	Kecamatan Japah	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	100 %	Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional yang Memadai	100 %	20.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	20.000.000	KECAMATAN JAPAH	1	Kecamatan Japah	
04	01	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				Pemenuhan kebutuhan pakaian seragam dinas	100 %					0			0				
04	01	03	005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi				Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	47 Paket	Tersedianya Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu	47 Paket	20.500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	20.500.000	KECAMATAN JAPAH	1	Kecamatan Japah	
04	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				Pemenuhan kebutuhan pelaporan kinerja dan keuangan	100 %					0			0				
04	01	06	005	Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah rencana kinerja dan penetapan kinerja	5 Dokumen	Tersedianya Dokumen Penetapan OPD	5 Dokumen	15.000.000	PAD, DAU, DBH	5 Dokumen	15.000.000	KECAMATAN JAPAH	1	Kecamatan Japah	
04	01	06	007	Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah dokumen RKA-SKPD dan DPA SKPD	4 Dokumen	Tersedianya Dokumen Keuangan RKA, DPA, dan RKA Perubahan, DPPA OPD	4 Dokumen	5.000.000	PAD, DAU, DBH	4 Dokumen	5.000.000	KECAMATAN JAPAH	1	Kecamatan Japah	
TOTAL														1.649.042.000			1.649.042.000				

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KABUPATEN BLORA

KECAMATAN RANDUBLATUNG

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
04	01			ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																	
04	01	44		PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN				Terselenggaranya koordinasi dan pelayanan pada kecamataan	1 Kec					245.000.000			257.250.000				
04	01	44	001	Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Presentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	100 %	terlaksananya kegiatan PKK Kecamatan	100 %	35.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	36.750.000	KECAMATAN RANDUBLATUNG	1		
04	01	44	002	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Presentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	100 %	terbinanya remaja desa/ linmas tersedianya laporan hasil monitoring trantib/operasi miras/rokok/cukai ilegal dan penertiban reklame	100 %	40.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	42.000.000	KECAMATAN RANDUBLATUNG	1	Masyarakat Umum	
04	01	44	005	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Prosentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	100 %	terwujudnya pemerintahan yang baik ,FORKOMPINCAM, rakor kades/kalur, sekdes/seklur, kaur pemerintahan dan pakaian paskibraka	100 %	70.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	73.500.000	KECAMATAN RANDUBLATUNG	1	Masyarakat umum	
04	01	44	008	Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Presentase pelaksanaan kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	100 %	terlaksananya sosialisasi rastra, ,penanggulangan kemiskinan, GSI, PHBS, bunda PAUD, rakor kesehatan, pasar murah dan pameran	100 %	70.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	73.500.000	KECAMATAN RANDUBLATUNG	1		
04	01	44	009	Koordinasi kegiatan pelayanan masyarakat di kelurahan dan desa	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Prosentase pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di kelurahan dan desa	100 %	meningkatnya pengurusan IMB , IUMK dan PATEN di Kecamatan	100 %	30.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	31.500.000	KECAMATAN RANDUBLATUNG	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	45		PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KELURAHAN				Terkoordinasikannya peningkatan kualitas pelayanan pada kelurahan	1 Kec					364.905.000			383.151.000				
04	01	45	001	Penyediaan operasional kebutuhan rutin kelurahan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Prosentase pemenuhan operasional kegiatan kelurahan	100 %	terpenuhinya operasional kelurahan, administrasi keuangan, terlaksananya lelang bengkok, PKK kelurahan dan jasa tenaga kebersihan	100 %	236.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	247.800.000	KECAMATAN RANDUBLATUNG	1	Pemerintah Desa di Kecamatan randublatung	
04	01	45	003	Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kelurahan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan pelayanan masyarakat pada kelurahan	100 %	terbayarnya jasa non PNS (tenaga administrasi), modin dan jasa rt/rw di kelurahan	100 %	111.250.000	PAD, DAU, DBH	100 %	116.813.000	KECAMATAN RANDUBLATUNG	1	Pemerintah desa di Kecamatan randublatung	
04	01	45	008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Prosentase sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun dan terpelihara	100 %	terpeliharanya sarana dan prasarana kelurahan	100 %	17.655.000	PAD, DAU, DBH	100 %	18.538.000	KECAMATAN RANDUBLATUNG	1	Pemerintah desa di Kecamatan randublatung	
04	01	47		PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA UMUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN				Terselenggaranya Penyediaan sarana dan prasarana umum dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan	1 Kec					40.000.000			42.000.000				
04	01	47	002	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pelaksanaan Kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	terlaksananya posyandu / pmt kelurahan	100 %	40.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	42.000.000	KECAMATAN RANDUBLATUNG	1	masyarakat umum	
04	01	48		PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH KECAMATAN				Terselenggaranya kegiatan pengembangan wilayah kecamatan	1 Kec					70.512.000			75.639.480				
04	01	48	001	Evaluasi Perencanaan dan Keuangan Desa	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah dokumen evaluasi perencanaan dan keuangan desa	16 Dokumen	tersedianya dokumen evaluasi RKPDes dan APBDes	16 Desa	15.000.000	PAD, DAU, DBH	16 Dokumen	15.750.000	KECAMATAN RANDUBLATUNG	1	Pemerintah desa di Kecamatan Randublatung	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	48	002	Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah dokumen musyawarah pembangunan desa/kelurahan dan kecamatan	19 Dokumen	terselenggaranya musrenbang Desa/kel dan Musrenbang Kecamatan	19 Dokumen	25.000.000	PAD, DAU, DBH	19 Dokumen	26.250.000	KECAMATAN RANDUBLATUNG	1	pemerintah desa di kecamatan randublatung	
04	01	48	003	Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Prosentase hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan	100 %	tercapainya target PBB	100 %	30.512.000	PAD, DAU, DBH	100 %	33.639.480	KECAMATAN RANDUBLATUNG	1	pemerintah desa di kecamatan randublatung	
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
04	01			ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																	
04	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	1 Kec					0			0				
04	01	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat	100 %	terbayarnya jasa kurir, materai dan perangko	100 %	3.750.000	PAD, DAU, DBH	100 %	3.935.000	KECAMATAN RANDUBLATUNG	1	Kecamatan Randublatung	
04	01	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	100 %	terbayarnya listrik, air, telepon, internet	100 %	32.460.000	PAD, DAU, DBH	100 %	34.083.000	KECAMATAN RANDUBLATUNG	1	Kecamatan Randublatung	
04	01	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100 %	terbayarnya pajak kendaraan operasional	14 Unit	3.350.000	PAD, DAU, DBH	100 %	3.515.500	KECAMATAN RANDUBLATUNG	1	Kecamatan Randublatung	
04	01	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan	100 %	terbayarnya jasa pengelola kegiatan keuangan	100 %	37.240.000	PAD, DAU, DBH	100 %	39.102.000	KECAMATAN RANDUBLATUNG	1	Kecamatan Randublatung	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor	100 %	terpenuhinya jasa petugas kebersihan kantor dan alat kebersihan kantor	100 %	38.552.000	PAD, DAU, DBH	100 %	40.480.000	KECAMATAN RANDUBLATUNG	1	Kecamatan Randublatung	
04	01	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	100 %	tersedianya alat tulis kantor	100 %	17.723.000	PAD, DAU, DBH	100 %	18.609.000	KECAMATAN RANDUBLATUNG	1	Kecamatan Randublatung	
04	01	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100 %	tersedianya barang cetakan dan fotocopy	100 %	6.850.000	PAD, DAU, DBH	100 %	7.192.500	KECAMATAN RANDUBLATUNG	1	Kecamatan Randublatung	
04	01	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	kecamatan Randublatung			Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	tersedianya komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	100 %	6.128.000	PAD, DAU, DBH	100 %	6.434.400	KECAMATAN RANDUBLATUNG	1	Kecamatan Randublatung	
04	01	01	013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	tersedianya laptop 2 unit dan almari kaca 1 unit	100 %	20.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	21.000.000	KECAMATAN RANDUBLATUNG	1	Kecamatan randublatung	
04	01	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	tersedianya majalah, tabloid dan surat kabar	100 %	6.720.000	PAD, DAU, DBH	100 %	7.056.000	KECAMATAN RANDUBLATUNG	1	Kecamatan Randublatung	
04	01	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat	100 %	tersedianya makan minum harian pegawai dan rapat	100 %	17.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	17.850.000	KECAMATAN RANDUBLATUNG	1	Kecamatan randublatung	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	terlaksananya rakor dan konsultasi keluar daerah	100 %	10.600.000	PAD, DAU, DBH	100 %	11.130.000	KECAMATAN RANDUBLATUNG	1	Kecamatan Randublatung	
04	01	01	019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	terlaksananya rakor dan konsultasi dalam daerah	100 %	66.700.000	PAD, DAU, DBH	100 %	70.035.000	KECAMATAN RANDUBLATUNG	1	Kecamatan Randublatung	
04	01	01	020	Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan dukungan pelayanan perkantoran	100 %	terbayarnya jasa keamanan kantor	100 %	30.602.000	PAD, DAU, DBH	100 %	32.132	KECAMATAN RANDUBLATUNG	1	Kecamatan randublatung	
04	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	1 Kec					0			0				
04	01	02	012	Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor	100 %	tersedianya paving dan gudang arsip	100 %	80.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	84.000.000	KECAMATAN RANDUBLATUNG	1	Kecamatan Randublatung	
04	01	02	021	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase rumah dinas dalam kondisi baik	100 %	tersedianya dapur rumah dinas camat yang baik kondisinya	100 %	5.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	5.250.000	KECAMATAN RANDUBLATUNG	1	kecamatan Randublatung	
04	01	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	terpenuhinya cat dan genting pendopo	100 %	28.325.000	PAD, DAU, DBH	100 %	29.741.000	KECAMATAN RANDUBLATUNG	1	Kecamatan Randublatung	
04	01	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	100 %	terpenuhinya servis, suku cadang dan minyak pelumas kendaraan	100 %	20.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	21.000.000	KECAMATAN RANDUBLATUNG	1	Kecamatan Randublatung	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	02	029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeler	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase mebeler dalam kondisi baik	100 %	terpenuhinya plitur mebeler	100 %	5.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	5.250.000	KECAMATAN RANDUBLATUNG	1	Kecamatan randublatung	
04	01	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				Pemenuhan kebutuhan pakaian seragam dinas	1 Kec					0			0				
04	01	03	005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi				Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	30 Unit	tersedianya pakaian batik dan olahraga	30 Unit	12.000.000	PAD, DAU, DBH	30 Unit	12.600.000	KECAMATAN RANDUBLATUNG	1	Kecamatan Randublatung	
04	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				Pemenuhan kebutuhan pelaporan kinerja dan keuangan	1 Kec					0			0				
04	01	06	005	Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah rencana kinerja dan penetapan kinerja	3 Dokumen	tersedianya renja, lppd dan lakip	3 Dokumen	2.000.000	PAD, DAU, DBH	3 Dokumen	2.100.000	KECAMATAN RANDUBLATUNG	1	Kecamatan randublatung	
TOTAL														1.170.417.000			1.198.436.012				

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KABUPATEN BLORA

KECAMATAN JATI

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
04	01			ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																	
04	01	44		PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN				Terselenggaranya koordinasi dan pelayanan pada kecamataan	12 Bulan					71.700.000			89.400.000				
04	01	44	001	Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Presentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	100 %	Jumlah pemberdayaan masyarakat dikelurahan dan desa	12 Desa	20.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Tahun	25.200.000	KECAMATAN JATI	1		
04	01	44	002	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Presentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	100 %	Jumlah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan	1 Tahun	7.500.000	PAD, DAU, DBH	1 Tahun	8.000.000	KECAMATAN JATI	1	Kecamatan Jati	
04	01	44	003	Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Presentase penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan	100 %	Jumlah penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan diwilayah kecamatan	1 Kali	5.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Kali	5.000.000	KECAMATAN JATI	1		
04	01	44	005	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Prosentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	100 %	Jumlah penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	1 Tahun	15.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	22.000.000	KECAMATAN JATI	1		
04	01	44	006	Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Presentase pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	100 %	Terpenuhinya Koordinasi dan pelayanan pada kecamatan	12 Desa	6.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	6.000.000	KECAMATAN JATI	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	44	008	Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Presentase pelaksanaan kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	100 %	Terpenuhinya Koordinasi dan pelayanan pada kecamatan	12 Desa	10.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	15.000.000	KECAMATAN JATI	1		
04	01	44	009	Koordinasi kegiatan pelayanan masyarakat di kelurahan dan desa	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Prosentase pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di kelurahan dan desa	100 %	Terpenuhinya Koordinasi dan pelayanan pada kecamatan	12 Desa	8.200.000	PAD, DAU, DBH	100 %	8.200.000	KECAMATAN JATI	1		
04	01	47		PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA UMUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN				Terselenggaranya Penyediaan sarana dan prasarana umum dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan	100%					70.000.000			75.000.000				
04	01	47	002	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pelaksanaan Kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	Terpenuhinya Koordinasi dan pelayanan pada kecamatan	12 Desa	70.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	75.000.000	KECAMATAN JATI	1		
04	01	48		PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH KECAMATAN				Terselenggaranya kegiatan pengembangan wilayah kecamatan	12 Desa					33.100.000			34.100.000				
04	01	48	001	Evaluasi Perencanaan dan Keuangan Desa	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah dokumen evaluasi perencanaan dan keuangan desa	12 Dokumen	Berkembangnya wilayah Desa	12 Desa	6.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Dokumen	7.000.000	KECAMATAN JATI	1		
04	01	48	002	Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah dokumen musyawarah pembangunan desa/kelurahan dan kecamatan	12 Dokumen	Terpenuhinya kebutuhan pengembangan wilayah kecamatan	12 Desa	10.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Dokumen	10.000.000	KECAMATAN JATI	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	48	003	Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Prosentase hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan	100 %	Berkembangnya wilayah Desa	12 Desa	17.100.000	PAD, DAU, DBH	100 %	17.100.000	KECAMATAN JATI	1		
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
04	01			ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																	
04	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	12 Bulan					0			0				
								Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	12 Bulan												
								Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran													
04	01	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat	100 %	Jumlah surat yang terkirim dan legalitas dokumen	1 Tahun	3.250.000	PAD, DAU, DBH	100 %	3.500.000	KECAMATAN JATI	1		
04	01	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	100 %	Jumlah alat komunikasi ,air dan listrik yang terbayar	1 Tahun	25.500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	26.000.000	KECAMATAN JATI	1		
04	01	01	003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	Jumlah peralatan dan perlengkapan dalam menunjang kelancaran pekerjaan	13 Jenis	30.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	57.000.000	KECAMATAN JATI	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100 %	Jumlah kendaraan yang mendapatkan pemeliharaan dan perijinan	19 Buah	4.300.000	PAD, DAU, DBH	100 %	4.600.000	KECAMATAN JATI	1		
04	01	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan	100 %	Jumlah administrasi pengelola keuangan yang terbayar	1 Tahun	30.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	45.000.000	KECAMATAN JATI	1		
04	01	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor	100 %	Prosentase kebersihan kantor	1 Tahun	40.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	43.500.000	KECAMATAN JATI	1	Kecamatan Jati	
04	01	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	100 %	Jenis ATK yg digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan	1 Tahun	12.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	20.000.000	KECAMATAN JATI	1		
04	01	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100 %	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	31 Dokumen	5.800.000	PAD, DAU, DBH	100 %	6.000.000	KECAMATAN JATI	1		
04	01	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	Jumlah komponen listrik yang digunakan untuk penerangan bangunan kantor	1 Tahun	5.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	8.300.000	KECAMATAN JATI	1		
04	01	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	19 Orang	2.400.000	PAD, DAU, DBH	100 %	2.400.000	KECAMATAN JATI	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat	100 %	Jumlah makanan dan minuman yang digunakan untuk mendukung kelancaran pekerjaan	1 Tahun	30.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	42.220.000	KECAMATAN JATI	1		
04	01	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	1 Tahun	6.550.000	PAD, DAU, DBH	100 %	7.550.000	KECAMATAN JATI	1		
04	01	01	019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	1 Tahun	50.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	50.000.000	KECAMATAN JATI	1		
04	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	1 Tahun					0			0				
								Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur													
04	01	02	007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan perlengkapan gedung kantor	100 %	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasaran aparatur	5 Paket	25.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	50.000.000	KECAMATAN JATI	1		
04	01	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan peralatan gedung kantor	9 %	Prosentase jumlah pengadaan peralatan kantor terhadap kebutuhan dalam pelaksanaan pekerjaan	9 Jenis	30.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	45.000.000	KECAMATAN JATI	1		
04	01	02	010	Pengadaan mebeler	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan mebeler	100 %	Jumlah pengadaan mebeler terhadap kebutuhan dalam pelaksanaan pekerjaan	5 Jenis	20.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	50.000.000	KECAMATAN JATI	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	02	011	Pengadaan instalasi air, listrik, dan telepon	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan instalasi air, listrik dan telepon	100 %	Terpenuhinya Jasa Air,Listrik dan Telepon	1 Paket	20.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	15.000.000	KECAMATAN JATI	1		
04	01	02	012	Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor	100 %	Tersedianya Bangunan Pendukung Gedung Kantor	3 Keg	200.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	1.000.000.000	KECAMATAN JATI	1		
04	01	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	100 %	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasaran aparatur	19 Jenis	25.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	25.000.000	KECAMATAN JATI	1		
04	01	02	029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeler	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase mebeler dalam kondisi baik	100 %	Prosentase mebeler dinas yang terpelihara	20 Unit	5.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	10.000.000	KECAMATAN JATI	1		
04	01	02	031	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi air, listrik, dan telepon	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase instalasi air, listrik, dan telepon dalam kondisi baik	100 %	Terpenuhinya kebutuhan air , listrik dan telepon	100 %	5.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	5.000.000	KECAMATAN JATI	1		
04	01	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				Pemenuhan kebutuhan pakaian seragam dinas						0			0				
								Pemenuhan kebutuhan pakaian seragam dinas													

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	03	001	Pengadaan mesin/kartu absensi	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi				Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan	1 Unit	Terpenuhinya kebutuhan mesin/kartu absensi	1 Unit	5.000.000	PAD, DAU, DBH	0 Unit	0	KECAMATAN JATI	1		
04	01	03	005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi				Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	20 Unit	Terpenuhinya kebutuhan seragam dinas	20 Jenis	15.000.000	PAD, DAU, DBH	20 Unit	25.000.000	KECAMATAN JATI	1		
04	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										0			0				
04	01	06	005	Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah rencana kinerja dan penetapan kinerja	2 Dokumen	Terpenuhinya Pelaporan kinerja dan keuangan	2 Dokumen	2.500.000	PAD, DAU, DBH	2 Dokumen	3.000.000	KECAMATAN JATI	1		
TOTAL														772.100.000			1.742.570.000				

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KABUPATEN BLORA

KECAMATAN KRADENAN

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
04	01			ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																	
04	01	44		PROGRAM KOORDINASI DAN PELAYANAN PADA KECAMATAN				Terselenggaranya koordinasi dan pelayanan pada kecamataan	1 Kecamatan					202.295.000			221.524.500				
04	01	44	001	Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	KECAMATAN KRADENAN			Presentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	100 %	Dokumen laporan hasil rakor dan pemantauan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dan kegiatan pro rakyat	30 Dokumen	14.000.000	PAD, DAU, DBH	30 Dokumen	15.400.000	KECAMATAN KRADENAN	1	Lembaga masyarakat,dinas/instansi dan desa di wilayah Kecamatan Kradenan	
04	01	44	002	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	KECAMATAN KRADENAN			Presentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	100 %	Tersedianya dokumen data rakor kamtibmas,pembinaan linmas,ketentraman dan ketertiban pemilu serta patroli hari-hari besar keagamaan	10 Dokumen	11.695.000	PAD, DAU, DBH	10 Dokumen	11.864.500	KECAMATAN KRADENAN	1	Desa di wilayah Kecamatan Kradenan	
04	01	44	005	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	KECAMATAN KRADENAN			Prosentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	100 %	Tersedianya dokumen data bidang pemerintahan, kependudukan, pertanahan dan pelayanan masyarakat, rakor forkompincam dan pakaian paskibraka	12 Dokumen	60.000.000	PAD, DAU, DBH	15 Dokumen	66.000.000	KECAMATAN KRADENAN	1	Desa di wilayah Kecamatan Kradenan	
04	01	44	008	Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	KECAMATAN KRADENAN			Presentase pelaksanaan kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	100 %	Tersedianya dok. data ruang lingkup PKK Kec. & Desa, dok. data lap. PAUD Desa, dok. data & laporan sosialisasi ranstra, penanggulangan kemiskinan GSI, PHBS ,dok. data & laporan Kec. Kradenan, laporan pelaksanaan pasar murah dan dok. data rakor penanggu	14 Dokumen	75.000.000	PAD, DAU, DBH	14 Dokumen	82.500.000	KECAMATAN KRADENAN	1	Organisasi masyarakat dan organisasi sosial (TP-PKK) di wilayah Kecamatan Kradenan,pengelola raskin dan pengelola produk unggulan Kecamatan	
04	01	44	009	Koordinasi kegiatan pelayanan masyarakat di kelurahan dan desa	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	KECAMATAN KRADENAN			Prosentase pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di kelurahan dan desa	100 %	Tersedianya dok.data rakor IMB dan IUMK, sosialisasi adminduk, dan jasa pengelola administrasi perkantoran di Kecamatan Kradenan	16 Kali	41.600.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	45.760.000	KECAMATAN KRADENAN	1	Desa se Kecamatan Kradenan	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	48		PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH KECAMATAN				Terselenggaranya kegiatan pengembangan wilayah kecamatan	1 Kecamatan					35.900.000			39.490.000				
04	01	48	001	Evaluasi Perencanaan dan Keuangan Desa	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	KECAMATAN KRADENAN			Jumlah dokumen evaluasi perencanaan dan keuangan desa	32 Dokumen	Tersedianya dokumen pengkajian proposal bankeu desa, RKPDes, APBDes, dan laporan Bulan Perekembangan APBDes	32 Dokumen	15.000.000	PAD, DAU, DBH	35 Dokumen	16.500.000	KECAMATAN KRADENAN	1	Desa se wilayah Kecamatan Kradenan	
04	01	48	002	Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	KECAMATAN KRADENAN			Jumlah dokumen musyawarah pembangunan desa/kelurahan dan kecamatan	12 Dokumen	Tersedianya dokumen data Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten	12 Dokumen	9.295.000	PAD, DAU, DBH	12 Dokumen	10.224.500	KECAMATAN KRADENAN	1	Aparatur Desa dan Kecamatan	
04	01	48	003	Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	KECAMATAN KRADENAN			Prosentase hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan	100 %	Tersedianya dokumen data dan laporan hasil penarikan pajak bumi dan bangunan (PBB)	10 Dokumen	11.605.000	PAD, DAU, DBH	10 Dokumen	12.765.500	KECAMATAN KRADENAN	1	Aparatur Desa dan Kecamatan	
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
04	01			ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																	
04	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%					0			0				
04	01	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	KECAMATAN KRADENAN			Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat	100 %	Tersedianya dokumen keuangan kantor dan terkirimnya surat	280 Dokumen	2.400.000	PAD, DAU, DBH	300 Dokumen	2.640.000	KECAMATAN KRADENAN	1	Kecamatan Kradenan	
04	01	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	KECAMATAN KRADENAN			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	100 %	Tersedianya sarana komunikasi, penerangan, air dan internet	12 Bulan	28.200.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	31.020.000	KECAMATAN KRADENAN	1		
04	01	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	KECAMATAN KRADENAN			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100 %	Tersedianya kendaraan dinas / operasional Kecamatan Kradenan yang layak	12 Bulan	5.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	5.500.000	KECAMATAN KRADENAN	1	Kecamatan Kradenan	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	KECAMATAN KRADENAN			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan	100 %	Terlaksananya kegiatan OPD dan jasa pengelola administrasi keuangan	12 Bulan	45.600.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	50.160.000	KECAMATAN KRADENAN	1	Kecamatan Kradenan	
04	01	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	KECAMATAN KRADENAN			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor	100 %	Tercapainya kebersihan kantor dan tersedianya jasa tenaga/pengelola kebersihan kantor	12 Bulan	11.700.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	12.870.000	KECAMATAN KRADENAN	1	Kecamatan Kradenan	
04	01	01	009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	KECAMATAN KRADENAN			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja	100 %	Tersedianya peralatan kerja yang baik	12 Bulan	5.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	5.500.000	KECAMATAN KRADENAN	1	Kecamatan Kradenan	
04	01	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	KECAMATAN KRADENAN			Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	100 %	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	15.314.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	16.845.400	KECAMATAN KRADENAN	1	Kecamatan Kradenan	
04	01	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	KECAMATAN KRADENAN			Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100 %	Tersedianya dokumen data / pelaporan dari kecamatan kradenan	35 Dokumen	6.500.000	PAD, DAU, DBH	35 Dokumen	7.150.000	KECAMATAN KRADENAN	1	Kecamatan Kradenan	
04	01	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	KECAMATAN KRADENAN			Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	Tersedianya kebutuhan peralatan listrik/ penerangan	22 Lokasi	6.763.000	PAD, DAU, DBH	25 Lokasi	7.439.300	KECAMATAN KRADENAN	1	Kecamatan Kradenan	
04	01	01	013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	KECAMATAN KRADENAN			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	2 Unit	15.000.000	PAD, DAU, DBH	5 Unit	16.500.000	KECAMATAN KRADENAN	1	Kecamatan Kradenan	
04	01	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	KECAMATAN KRADENAN			Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	Meningkatnya wawasan karyawan	12 Bulan	3.420.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	3.762.000	KECAMATAN KRADENAN	1	Kecamatan Kradenan	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	KECAMATAN KRADENAN			Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat	100 %	Tersedianya makan dan minum harian pegawai serta makan dan minum kegiatan rapat-rapat/pertemuan dan tamu	12968 Buah	26.600.000	PAD, DAU, DBH	13000 Buah	29.260.000	KECAMATAN KRADENAN	1	Kecamatan Kradenan	
04	01	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	KECAMATAN KRADENAN			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Terlaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	18 Kali	7.500.000	PAD, DAU, DBH	20 Kali	8.250.000	KECAMATAN KRADENAN	1	Kecamatan Kradenan	
04	01	01	019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	KECAMATAN KRADENAN			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Terlaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	280 Kali	42.000.000	PAD, DAU, DBH	300 Kali	46.200.000	KECAMATAN KRADENAN	1		
04	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%					0			0				
04	01	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	KECAMATAN KRADENAN			Persentase pemenuhan peralatan gedung kantor	100 %	Tersedianya peralatan gedung kantor	3 Unit	15.000.000	PAD, DAU, DBH	5 Unit	16.500.000	KECAMATAN KRADENAN	1		
04	01	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	KECAMATAN KRADENAN			Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Tersedianya gedung kantor yang memadai	1 Unit	37.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Unit	40.700.000	KECAMATAN KRADENAN	1	Kecamatan Kradenan	
04	01	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	KECAMATAN KRADENAN			Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	100 %	Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang memadai	17 Unit	25.000.000	PAD, DAU, DBH	20 Unit	27.500.000	KECAMATAN KRADENAN	1	Kecamatan Kradenan	
04	01	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				Pemenuhan kebutuhan pakaian seragam dinas	100%					0			0				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	03	005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi	KECAMATAN KRADENAN			Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	20 Unit	Tersedianya seragam batik lurik pegawai Kecamatan Kradenan	20 Set	5.500.000	PAD, DAU, DBH	20 Unit	6.050.000	KECAMATAN KRADENAN	1	Kecamatan Kradenan	
04	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				Pemenuhan kebutuhan pelaporan kinerja dan keuangan	100%					0			0				
04	01	06	005	Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	KECAMATAN KRADENAN			Jumlah rencana kinerja dan penetapan kinerja	4 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan kerja Kecamatan	4 Dokumen	4.500.000	PAD, DAU, DBH	6 Dokumen	4.950.000	KECAMATAN KRADENAN	1	Kecamatan Kradenan	
TOTAL														546.192.000			599.811.200				

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KABUPATEN BLORA

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
04	19			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI																	
04	19	15		PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN										115.000.000			150.000.000				
04	19	15	004	Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	Penciptaan Iklim Politik Yang Kondusif	Meningkatnya penegakan Perda				Jumlah kader FKDM yang mendapat pembekalan	200 Orang	MENINGKATNYA PERAN ANGGOTA FKDM SE KAB. BLORA	200 Orang	75.000.000	PAD, DAU, DBH	100 Orang	100.000.000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1	Tokoh Masyarakat (Kader Kewaspadaan Dini Masyarakat)	
04	19	15	008	Peningkatan Kewaspadaan dan Deteksi Dini bagi Pemuda dan Pelajar	Penciptaan Iklim Politik Yang Kondusif	Meningkatnya penegakan Perda				Jumlah peserta Deteksi dini dan cegah dini AGHT	100 Orang	Meningkatnya Kewaspadaan dan deteksi Dini Masyarakat Terhadap Ancaman, Gangguan, Tantangan dan Hambatan Kamtramtibmas di Masyarakat Khususnya generasi Muda	100 Orang	40.000.000	PAD, DAU, DBH	100 Orang	50.000.000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1		
04	19	16		PROGRAM PEMELIHARAAN KAMTRAMTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL										315.000.000			455.000.000				
04	19	16	002	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Penciptaan Iklim Politik Yang Kondusif	-				Jumlah Rakor kominda	12 Kali	Jumlah Peserta Rakor Kominda /FKD	200 Orang	200.000.000	PAD, DAU, DBH	200 Orang	250.000.000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1	Aparatur Sipil Negara	
04	19	16	006	Monitoring/pemantauan orang asing	Penciptaan Iklim Politik Yang Kondusif	-				Jumlah laporan orang asing	12 Laporan	Terlaksananya Monitoring Kegiatan Orang Asing di Kab. Blora	12 Laporan	15.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Laporan	50.000.000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1	Orang Asing di Kab. Blora	
04	19	16	007	Monitoring/pemantauan kegiatan organisasi kemasayarakatan	Penciptaan Iklim Politik Yang Kondusif	-				Jumlah ormas /LSM yang dipantau	10 Organisasi	Terlayaninya Pendaftaran ORMAS dan LSM	10 Dokumen	25.000.000	PAD, DAU, DBH	10 Dokumen	30.000.000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan									
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	19	16	008	Fasilitasi penyelenggaraan keamanan dalam negeri	Penciptaan Iklim Politik Yang Kondusif	-				Jumlah peserta Rakor Konflik sosial	100 Orang	Terlaksananya Pelatihan Penanganan Konflik Sosial	100 Orang	40.000.000	PAD, DAU, DBH	100 Orang	50.000.000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1	Aparat Sipil Negara / Tim Fasilitasi Konflik Sosial	
04	19	16	009	Forum komunikasi dan konsultasi organisasi kemasyarakatan/LSM	Penciptaan Iklim Politik Yang Kondusif	-				Jumlah peserta Rakor Ormas/LSM	200 Orang	Meningkatnya Pemahaman Dalam Berorganisasi dan Bermasyarakat	75 Orang	35.000.000	PAD, DAU, DBH	200 Orang	75.000.000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1	Pengurus Ormas dan LSM	
04	19	17		PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN				Jumlah tokoh masyarakat yang memahami peningkatan toleransi kerukunan antar umat beragama, nilai sosial dan solidaritas di kalangan masyarakat serta pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa	600					1.440.000.000			2.820.000.000				
04	19	17	001	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Penciptaan Iklim Politik Yang Kondusif	-				Jumlah tokoh toga dan tomas yang mendapatkan Penyuluhan dalam FKUB	300 Orang	Pemahaman dan kerukunan Antar Umat Beragama	300 Orang	125.000.000	PAD, DAU, DBH	400 Orang	175.000.000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1	Tokoh Agama dan Penghayat Kepercayaan di Kab. Blora	
04	19	17	002	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	Penciptaan Iklim Politik Yang Kondusif	-				Jumlah tokoh etnis yang mendapatkan penyuluhan wasbang	100 Orang	Meningkatnya Pemahaman Nilai Sosial dan Ikatan Solidaritas di Kalangan Masyarakat	100	40.000.000	PAD, DAU, DBH	100 Orang	45.000.000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1	Warga Etnis yang ada di Kab. Blora	
04	19	17	003	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Penciptaan Iklim Politik Yang Kondusif	-				Jumlah Kegiatan Peringatan Hari besar Nasional dan Daerah	2 Kali	1. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Tentang HUT Kemerdekaan RI 2. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Tentang Hari Jadi kabupaten Blora	2 Keg	975.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Keg	1.000.000.000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1		
04	19	17	004	Sarasehan generasi muda dengan Pejuang 45	Penciptaan Iklim Politik Yang Kondusif	-				Jumlah Peserta Pemahaman Nilai-nilai kejuangan 45	100 Orang	Terselenggaranya Kegiatan Sarasehan Generasi Muda Dengan Pejuang 45	100 Orang	40.000.000	PAD, DAU, DBH	100 Orang	50.000.000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1	Pemuda di Kab. Blora	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Penciptaan Iklim Politik Yang Kondusif	-				Jumlah Peserta Pemahaman Nilai-nilai kejuangan 45	200 Orang	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Kepengurusan DHC'45	200 Orang	100.000.000	PAD, DAU, DBH	0 Orang	0	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1	Pemuda di Kab. Blora	
04	19	17	005	Pemantapan Ideologi Negara	Penciptaan Iklim Politik Yang Kondusif	-				Jumlah peserta Penyuluhan Pemantapan Ideologi Negara	100 Orang	Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Pemantapan Ideologi Negara	100 Keg	35.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Keg	750.000.000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1		
04	19	17	006	Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila	Penciptaan Iklim Politik Yang Kondusif	-				Jumlah peserta revitalisasi nilai-nilai pancasila	150 Orang	Pembentukan satgas revolusi mental di Kabupaten	150 Orang	75.000.000	PAD, DAU, DBH	150 Orang	750.000.000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1	Masyarakat di Kab. Blora	
					Penciptaan Iklim Politik Yang Kondusif	-				Jumlah peserta revitalisasi nilai-nilai pancasila	100 Orang	Terbentuknya Satgas Revolusi Mental di Kab. Blora	100 Orang	50.000.000	PAD, DAU, DBH	100 Orang	50.000.000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1	Masyarakat di Kab. Blora	
04	19	18		PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN										400.000.000			330.000.000				
04	19	18	002	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan		-				Jumlah peserta ceramah wasbang di lingkungan Sekolah	300 Orang	1. Terlaksananya Kegiatan Seminar dan Wisata Wawasan Kebangsaan 2. Terlaksananya Kegiatan Diskusi Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme	300 Orang	150.000.000	PAD, DAU, DBH	300 Orang	160.000.000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1	Pemuda Pelajar se kab. Blora	
04	19	18	004	Pendidikan bela negara		-				Jumlah kader Bela negara	300 Orang	1. Terselenggaranya Ceramah Bela Negara dan Nasionalisme Bagi OKP 2. Terselenggaranya Pendidikan Bela Negara Bagi Pelajar 3. Terselenggaranya Sarasehan dan Upacara Peringatan Hari Bela Negara	300 Orang	250.000.000	PAD, DAU, DBH	300 Orang	170.000.000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1	Pemuda Pelajar se Kab. Blora dan Tokoh wanita	
04	19	20		PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)				Jumlah tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan pelajar yang mendapatkan penyuluhan Narkoba	400 orang					120.000.000			150.000.000				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	19	20	001	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Penciptaan Iklim Politik Yang Kondusif	-				Jumlah Tokoh/Anggota masyarakat yang mendapatkan penyuluhan	300 Orang	Meningkatnya Pengetahuan tentang bahaya Narkoba	300 Orang	120.000.000	PAD, DAU, DBH	300 Orang	150.000.000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1	Pemuda Pelajar, Tokoh Masyarakat	
04	19	21		PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT				Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	5					635.000.000			200.000.000				
								Tingkat partisipasi politik masyarakat kabupaten Blora	75												
04	19	21	001	Koordinasi forum-forum diskusi politik	Penciptaan Iklim Politik Yang Kondusif	-				Jumlah Tokoh/Pengurus partai peserta forum diskusi berpolitik	75 Orang	Meningkatnya pemahaman Kader Partai Politik tentang situasi Politik di Kabupaten Blora	75 Orang	30.000.000	PAD, DAU, DBH	75 Orang	40.000.000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1		
04	19	21	002	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Penciptaan Iklim Politik Yang Kondusif	-				Jumlah parpol yang dipantau	9 Parpol	Terpenuhinya Laporan Hasil Monitoring Kegiatan Parpol di Kabupaten Blora	9 Kelompok	35.000.000	PAD, DAU, DBH	9 Kelompok	40.000.000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1	Partai Politik di Kab. Blora	
04	19	21	003	Penelitian penyerahan permohonan bantuan politik	Penciptaan Iklim Politik Yang Kondusif	-				Jumlah Realisasi bantuan keuangan bagi parpol	9 Parpol	Terlaksananya Pencairan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Blora	9 Kelompok	20.000.000	PAD, DAU, DBH	9 Kelompok	30.000.000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1		
04	19	21	004	Sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula	Penciptaan Iklim Politik Yang Kondusif	-				Jumlah pemilih pemula yang mendapatkan pembekalan politik	1500 Orang	Meningkatnya Pemahaman Tata Cara Berpolitik Bagi Pemilih Pemula	1500 Orang	450.000.000	PAD, DAU, DBH	200 Orang	60.000.000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1		
04	19	21	005	Pendidikan politik bagi organisasi wanita	Penciptaan Iklim Politik Yang Kondusif	-				Jumlah pemilih wanita yang mendapatkan pembekalan politik	150 Orang	Meningkatnya Pemahaman Tata Cara Berpolitik Bagi Organisasi Wanita	150 Orang	40.000.000	PAD, DAU, DBH	100 Orang	30.000.000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1	Tokoh wanita, Organisasi Wanita/Perempuan	
04	19	21	007	Dukungan penyelenggaraan pemilu	Penciptaan Iklim Politik Yang Kondusif	-				Jumlah Kegiatan DKPP	2 Kali	Terselenggaranya Pemilu secara aman dan lancar	2 Kali	60.000.000	PAD, DAU, DBH	0	0	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1		
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
04	01			ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																	
04	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran						0			0				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran													
04	01	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat	100 %	Terpenuhinya Materai, Perangko dan Surat Menyurat	100 %	3.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	6.000.000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1		
04	01	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	100 %	Terbayarnya Rekeing Pemakaian Telp, Internet, Listrik dan Air	100 %	45.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	60.000.000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1		
04	01	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100 %	Terbayarnya Pajak / STNK Kendaraan Dinas/Operasional 4 mobil , 8 sepeda motor	100 %	6.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	6.500.000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1		
04	01	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan	100 %	Penatausahaan Keuangan dan Barang Daerah pada Kantor Kesbangpol	12 Bulan	60.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	75.000.000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1		
04	01	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor	100 %	Terbayarnya Hononarium Tenaga Kebersihan Kantor dan Tersedianya Alat/Bahan Kebersihan Kantor	100 %	35.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	40.000.000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1		
04	01	01	009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja	100 %	Tersedianya Peralatan Kerja Yang Memadahi	100 %	9.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	10.500.000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	100 %	Terpenuhinya Kebutuhan ATK	12 Bulan	23.035.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	35.000.000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1		
04	01	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100 %	Terpenuhinya Spanduk, barang Cetakan dan Penggandaan	100 %	10.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	13.000.000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1		
04	01	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	Tersedianya Alat Listrik / Penerangan Kantor	12 Bulan	3.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	3.500.000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1		
04	01	01	013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Memadai	3 Buah	150.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Set	70.000.000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1		
04	01	01	014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga	100 %	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor yang Memadai	3 Set	5.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Set	5.500.000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1		
04	01	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	Meningkatnya Pengetahuan Aparatur	2 Orang	12.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Orang	12.500.000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1		
04	01	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat	100 %	Terpenuhinya Makanan dan Minuman Kantor Kesbangpol Kab. Blora	12 Bulan	20.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	25.000.000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan									
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100 %	125.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	150.000.000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1		
04	01	01	019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	100 %	15.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	35.000.000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1		
04	01	01	020	Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan dukungan pelayanan perkantoran	100 %	Terbayarnya tenaga Sopir, Kemanan dll	4 Orang	75.000.000	PAD, DAU, DBH	5 Orang	80.000.000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2	Tenaga Kontrak Kerja	
04	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur						0			0				
								Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur													
04	01	02	010	Pengadaan mebeler	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan mebeler	100 %	Ter[enuhinya mebeler kursi tamu dan kursi eselon IV	100 %	25.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	30.000.000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2		
04	01	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Tersedianya Gedung / kantor yang Memadai	1 Paket	20.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Paket	25.000.000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1		
04	01	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	100 %	Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional yang Siap Pakai Dengan Baik	100 %	50.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	60.000.000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan									
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	01	02	029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeler	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase mebeler dalam kondisi baik	100 %	Tersedianya Mebeler kantor yang Memadahi	10 Buah	10.000.000	PAD, DAU, DBH	10 Buah	15.000.000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1		
TOTAL														3.726.035.000			4.862.500.000				

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KABUPATEN BLORA

INSPEKTORAT DAERAH

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
04	02			PENGAWASAN																	
04	02	20		PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH				Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti	100					3.864.575.000			4.150.000.000				
								Persentase laporan hasil tindak lanjut dan ekspose temuan hasil pengawasan yang telah disusun	100												
								Tingkat Maturitas SPIP	level 3												
04	02	20	001	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah laporan pemeriksaan internal secara berkala	144 Laporan	Tersusunnya laporan hasil pemeriksaaan reguler 144	144 Buah	1.100.000.000	PAD, DAU, DBH	144 Laporan	1.350.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	1		
04	02	20	002	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase penanganan pengaduan masyarakat	100 %	Penanganan pengaduan masyarakat	20 Laporan	106.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	110.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	1		
04	02	20	003	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah laporan PKS, PMPRB, Renaksi PPK, LHKASN, Reviu LKPD, Reviu laporan keuangan perangkat daerah, Reviu RKA, Reviu LKjIP,Penanganan Ijazah Palsu	9 Laporan	terpantaunya kebijakan KDH, PMPRB, ijasah palsu, renaksi PPK	9 Laporan	1.025.000.000	PAD, DAU, DBH	9 Laporan	1.025.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	02	20	006	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase penyusunan laporan tindak lanjut hasil pengawasan	100 %	tersusunnya laporan tindak lanjut	48 Laporan	125.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	125.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	1		
04	02	20	007	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah peserta rakor pengawasan antar APIP dan perangkat daerah	12 Orang	terlaksananya rakor antar apip dan perangkat daerah	12 Orang	60.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Orang	60.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	1		
04	02	20	008	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah laporan pemantauan tindak lanjut	12 Laporan	tersusunnya laporan hasil evaluasi temuan dan 1 laporan online	12 Laporan	65.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Laporan	75.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	1		
04	02	20	009	Evaluasi pengawasan pembangunan daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah laporan evaluasi pembangunan pada perangkat daerah	50 Laporan	tersusunnya 40 LHE monev dan 10 LHE AKIP	50 Laporan	135.000.000	PAD, DAU, DBH	50 Laporan	125.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	1		
04	02	20	010	Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase Maturitas SPIP Level 3	100 %	tersusunnnya dokumen RTP	100 %	23.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	40.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	1		
04	02	20	011	Sosialisasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah peserta pemahaman penyelenggaraan pemerintahan	5 Orang	meningkatnya pengetahuan personil inspektorat	5 Orang	35.000.000	PAD, DAU, DBH	5 Orang	30.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	1		
04	02	20	012	Pendataan dan penataan dokumen/arsip terkait pengawasan daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah dokumen /arsip terkait pengawasan yang tertata	1500 Eks	tersusunya klasifikasi data secara rapi	1500 Eks	10.000.000	PAD, DAU, DBH	1500 Eks	10.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	02	20	013	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase Penanganan Saber Pungli	100 %	terselenggaranya sosialisai dan pembinaan saber pungli	24 Kali	1.180.575.000	PAD, DAU, DBH	100 %	1.200.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	1		
04	02	21		PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN				Tingkat kapabilitas APIP	level 3					50.000.000			50.000.000				
04	02	21	001	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase kapabilitas aparat pengawasan level 3	100 %	meningkatnya kemapuan apip	10 Orang	50.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	50.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	1		
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
04	02			PENGAWASAN																	
04	02	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100					0			0				
04	02	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat	100 %	Terkirimnya surat- surat dinas	2450 Buah	15.400.000	PAD, DAU, DBH	100 %	16.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	1		
04	02	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	100 %	Lancarnya komunikasi, sumber daya air dan listrik	48 Jenis	160.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	160.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	1		
04	02	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100 %	Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional selama 1 tahun	41 Buah	12.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	13.200.000	INSPEKTORAT DAERAH	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	02	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan	100 %	Tersusunnya dokumen administrasi keuangan barang dan jasa	12 Orang	75.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	75.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	1		
04	02	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor	100 %	Terpenuhinya kebutuhan peralatan kebersihan 19 jenis	19 Jenis	55.550.000	PAD, DAU, DBH	100 %	19.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	1		
04	02	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	100 %	Terlaksananya administrasi kantor yang efektif	45 Jenis	52.800.000	PAD, DAU, DBH	100 %	54.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	1		
04	02	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100 %	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 6 jenis	6 Jenis	30.800.000	PAD, DAU, DBH	100 %	32.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	1		
04	02	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor 50 Buah	50 Buah	16.500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	17.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	1		
04	02	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	Meningkatnya pengawasan dan pengetahuan pegawai	46 Orang	12.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	13.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	1		
04	02	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat	100 %	Terpenuhinya makan minum rapat, tamu, harian	1994 Buah	34.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	35.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	02	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan inspektorat propinsi, BPK, BPKP	66 Kali	181.500.000	PAD, DAU, DBH	100 %	182.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	1		
04	02	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100					0			0				
04	02	02	005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	6 Unit	Meningkatnya operasional pengawasan	6 Unit	250.000.000	PAD, DAU, DBH	6 Unit	250.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	1		
04	02	02	007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan perlengkapan gedung kantor	100 %	tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai	2 Buah	150.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	175.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	1		
04	02	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan peralatan gedung kantor	100 %	tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai	3 Unit	55.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	56.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	1		
04	02	02	010	Pengadaan mebeler	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan mebeler	100 %	tersedianya mebeler kantor yang memadai 3 jenis	3 Jenis	50.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	50.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	1		
04	02	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Terpeliharanya gedung dan lingkungan kantor	100 %	25.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	25.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	02	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	100 %	tersedianya kendaraan dinas operasional yang memadai	41 Unit	100.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	100.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	1		
04	02	02	028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	tersedianya peralatan gedung kantor yang layak	50 Unit	20.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	20.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	1		
04	02	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR										0			0				
04	02	03	005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi				Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	46 Unit	tersedianya pakaian khusus hari hari tertentu	46 Buah	30.000.000	PAD, DAU, DBH	46 Unit	30.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	1		
04	02	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										0			0				
04	02	06	005	Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah rencana kinerja dan penetapan kinerja	3 Dokumen	terssusunnya renja, renstra, pk	3 Dokumen	3.000.000	PAD, DAU, DBH	3 Dokumen	10.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	1		
04	02	06	006	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah laporan akuntabilitas kinerja SKPD	1 Laporan	tersusunnya dokumen laporan kinerja instansi pemerintah	1 Dokumen	3.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Laporan	3.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	02	06	007	Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah dokumen RKA-SKPD dan DPA SKPD	2 Dokumen	tersusunnya dokumen RKA dan DPA	2 Dokumen	3.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Dokumen	50.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	1		
TOTAL														5.249.125.000			5.585.200.000				

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KABUPATEN BLORA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
04	03			PERENCANAAN																	
04	03	18		PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH				Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	100%					400.000.000			300.000.000				
04	03	18	002	Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan koordinasi BKPRD	100 %	Terwujudnya Koordinasi penataan ruang daerah yang lebih baik	100 %	150.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	100.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	Koordinasi penataan ruang daerah	
04	03	18	003	Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	1 Dokumen	Terwujudnya kajian perencanaan pengembangan wilayah	1 Dokumen	250.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	200.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	Kajian perencanaan pengembangan wilayah bagi pemerintah Kabupaten Blora	
04	03	19		PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR				Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar						225.000.000			175.000.000				
04	03	19	007	Koordinasi perencanaan penanganan perumahan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan perencanaan penanganan perumahan yang di tindaklanjuti dan di sepakati	100 %	Terwujudnya penanganan kawasan kumuh dan berkembangnya kawasan perumahan permukiman	100 %	75.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	75.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	Penanganan kawasan kumuh dan berkembangnya kawasan perumahan permukiman di Kabupaten Blora	
04	03	19	009	Koordinasi perencanaan air minum drainase dan sanitasi	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitas yang disepakati dan ditindaklanjuti	100 %	Terwujudnya desa penerima pamsimas dan terlaksananya koordinasi yang lebih baik	20 Desa	150.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	100.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	Masyarakat di desa penerima pamsimas	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	03	20		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				Persentase SKPD mampu menyusun dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	100%					1.325.000.000			1.330.000.000				
04	03	20	001	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah aparatur perencana yang ditingkatkan kemampuan teknisnya	50 Orang	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia aparat sipil negara (ASN) dalam merencanakan pembangunan daerah	50 Orang	1.225.000.000	PAD, DAU, DBH	50 Orang	1.230.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	pegawai di lingkunagan Bappeda Kabupaten Blora	
04	03	20	007	Pemeliharaan Aplikasi Sistim Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah aplikasi sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang dipelihara, dikembangkan dan di-update	1 Paket	Tersedianya jasa pemeliharaan software aplikasi sistim informasi perencanan pembangunan daerah (SIPPD) yang terintegrasi	1 Paket	100.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Aplikasi	100.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	Aplikasi Sistim Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
04	03	21		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				Kesesuaian Progran RKPD dengan Program RPJMD	88%					1.550.000.000			2.330.000.000				
								Kesesuaian Program di KUA PPAS dengn Program di RKPD	97%												
								Kesesuaian Kegiatan di KUA PPAS dengan Kegiatan di RKPD	80%												
								Kesesuaian Program di APBD dengan Program di RKPD	95,5%												
								Kesesuaian Kegiatan di APBD dengan Kegiatan di RKPD	75%												
								Realisasi Kinerja RKPD	100%												
								Realisasi Indikator Kinerja RPJMD	91%												
								Realisasi Indikator Kinerja RPJMD													

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	03	21	008	Penyusunan rancangan RKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya Pencapaian target indikator RPJMD				Jumlah dokumen rancangan RKPD yang disusun	1 Dokumen	Tersusunnya bahan konsultasi publik penyusunan RKPD 2019	1 Dokumen	330.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	350.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora	
04	03	21	009	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya Pencapaian target indikator RPJMD				Jumlah musrenbang RKPD yang dilaksanakan	1 Kali	Terselenggaranya Musrenbang RKPD	1 Kali	320.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Kali	330.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora	
04	03	21	010	Penetapan RKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya Pencapaian target indikator RPJMD				Jumlah dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah	1 Dokumen	Dokumen RKPD Tahun 2020	1 Dokumen	90.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	200.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora	
04	03	21	013	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya Pencapaian target indikator RPJMD				Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	3 Dokumen	Laporan DAK/TP Kabupaten Blora ; Laporan evaluasi RKPD	3 Dokumen	250.000.000	PAD, DAU, DBH	4 Dokumen	350.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora	
04	03	21	014	Penyusunan Perubahan RKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya Pencapaian target indikator RPJMD				Jumlah dokumen perubahan RKPD yang disusun	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2019	1 Dokumen	75.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	800.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora	
04	03	21	015	Penyusunan KUA dan PPAS	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya Pencapaian target indikator RPJMD				Jumlah dokumen rancangan KUA dan PPAS yang disusun	2 Dokumen	Tersedianya Dokumen KUA dan PPAS Sebagai Acuan Penyusunan RAPBD	2 Dokumen	235.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Dokumen	300.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	Pemerintah Kabupaten Blora	
04	03	21	016	Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya Pencapaian target indikator RPJMD				Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang disusun	1 Dokumen	Dokumen evaluasi RPJMD Paruh Waktu	1 Dokumen	250.000.000	PAD, DAU, DBH	4 Dokumen	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	03	22		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI				Tingkat Kesesuaian Perencanaan Bidang Ekonomi dengan Pelaksanaan	100%					505.000.000			510.000.000				
04	03	22	002	Penyusunan indikator ekonomi daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah dokumen Indikator Ekonomi Daerah	1 Dokumen	Tersedianya data Indikator Ekonomi Daerah untk penyusunan kebijakan pembangunan daerah	1 Dokumen	80.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	85.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	Pemerintah Daerah Kabupaten Blora	
04	03	22	010	Analisis Kesejahteraan Petani	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah dokumen analisis kesejahteraan petani	1 Dokumen	Tercukupinya data Penunjang kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi daerah	1 Dokumen	70.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	75.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	Pemerintah Daerah Kabupaten Blora	
04	03	22	012	Penyusunan Peraturan daerah tentang Rencana Pengembangan Industri Kawasan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah ranperda yang disusun	1 Ranperda	Tersedianya Perda RPIK	1 Perda	100.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Ranperda	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3	Pemerintah Daerah Kabupaten Blora	
04	03	22	013	Penyusunan perencanaan pembangunan bidang industri, penanaman modal dan tenaga kerja	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah dokumen perencanaan bidang investasi, penanaman modal, perindustrian dan tenaga kerja	1 Dokumen	Tersedianya dokumen profil ketenagakerjaan Kabupaten Blora	1 Dokumen	60.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	50.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3	Pemerintah Daerah Kabupaten Blora	
04	03	22	014	Penyusunan perencanaan pembangunan bidang pertanian	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang pertanian yang disusun	1 Dokumen	Tersedianya dokumen pemetaan Daerah Ketahanan dan Kerawanan Pangan serta ketersediaan pangan	1 Dokumen	85.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	85.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3	Pemerintah Daerah Kabupaten Blora	
04	03	22	016	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pertanian	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pertanian yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pertanian	1 Dokumen	40.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	65.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3	Pemerintah Daerah Kabupaten Blora	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	03	22	017	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang industri penanaman modal dan tenaga kerja	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan koordinasi perencanaan pembangunan bidang penanaman modal, investasi dan tenaga kerja yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang industri penaman modal dan investasi dan tenaga kerja	1 Dokumen	45.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	85.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3	Pemerintah Daerah Kabupaten Blora	
04	03	22	018	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang perdagangan koperasi dan UMKM	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan koordinasi perencanaan pembangunan bidang perdagangan, koperasi dan UMKM yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang perdagangan koperasi dan UMKM	1 Dokumen	25.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	65.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3	Pemerintah Daerah Kabupaten Blora	
04	03	23		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA				Tingkat Kesesuaian Perencanaan Bidang sosial budaya dengan Pelaksanaan	100%					610.000.000			650.000.000				
04	03	23	005	Program KHPPIA	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pelaksanaan Program KHPPIA	100 %	Terlaksananya Program Kelangsungan Hidup,Perlindungan Perempuan Ibu dan Anak	1 Laporan	20.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	50.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	Perempuan, Ibu dan anak di Kabupaten Blora serta Pemerintah Daerah Kabupaten Blora	
04	03	23	008	Penyusunan perencanaan pembangunan bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat yang disusun	1 Dokumen	Tersedianya dokumen perencaaan pembangunan bidang pendidikan	1 Dokumen	130.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	150.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3	Pemerintah Kabupaten Blora	
04	03	23	009	Penyusunan perencanaan pembangunan bidang kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang disusun	1 Dokumen	Penyusunan Kajian tentang pengembangan Rumah Sakit diKabupaten Blora	1 Dokumen	50.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	75.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3	Pemerintah Kabupaten Blora	
04	03	23	010	Penyusunan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan yang disusun	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	100.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	75.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3	Pemerintah Kabupaten Blora	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	03	23	011	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	prosentase pelaksanaan koodinasi bidang pendidikan dan kesra	100 %	110.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	100.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3	Bappeda Blora	
04	03	23	012	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan koordinasi perencanaan pembangunan bidang kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	prosentase pelaksanaan koodinasi bidang kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	100 %	50.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	50.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3	Pemerintah Kabupaten Blora	
04	03	23	013	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	prosentase pelaksanaan koodinasi bidang pemerintahan	100 %	150.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	150.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3	Bappeda blora	
04	03	24		PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM				Tingkat Kesesuaian Perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam dengan Pelaksanaan	100%					575.000.000			450.000.000				
04	03	24	004	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Prosentase koordinasi bidang praswil dan SDA yang terlaksana	100 %	125.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	100.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	Bappeda Kabupaten Blora	
04	03	24	026	Koordinasi Pengelolaan Infrastruktur di Wilayah Hutan Kabupaten Blora	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan koordinasi pengelolaan infrastruktur di Wilayah Hutan Kabupaten Blora	100 %	Terlaksananya koordinasi pengelolaan infrastruktur wilayah hutan	5 Kali	150.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	100.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	Pemerintah Kabupaten Blora	
04	03	24	027	Penyusunan perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah yang disusun	1 Dokumen	Tersedianya dokumen studi kelayakan jalan lingkar di Kab. Blora	1 Dokumen	300.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	250.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3	Pemerintah Kabupaten Blora	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	03	27		PROGRAM BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERSUMBER DARI PEMERINTAH PROVINSI SERTA PENDAMPINGANNYA				Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah bersumber dari pemerintah provinsi	100 %					805.000.000			1.085.000.000				
04	03	27	002	Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Blora (Bantuan Propinsi)	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah dokumen profil daerah Kabupaten Blora yang disusun	1 Dokumen	Dokumen Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Blora	1 Dokumen	50.000.000	BANKEU PROV	1 Dokumen	50.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	Pemerintah Kabupaten Blora	
04	03	27	003	Pendidikan Untuk Semua (PUS) (Bantuan Propinsi)	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah laporan pelaksanaan PUS	1 Laporan	Tersedianya kegiatan pendidikan dalam mendukung SDGs	1 Keg	50.000.000	BANKEU PROV	1 Laporan	50.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3	Pemerintah Kabupaten Blora	
04	03	27	004	Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Bantuan Propinsi)	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pelaksanaan koordinasi penanggulangan kemiskinan	100 %	Terwujudnya sinergitas dan kesepahaman pelaksanaan penanggulangan kemiskinan	3 Kali	50.000.000	BANKEU PROV	100 %	50.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	Pemerintah Kabupaten Blora	
04	03	27	005	FEDEP (Bantuan Propinsi)	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pelaksanaan kegiatan FEDEP	100 %	Penguatan , pembinaan dan pemberdayaan klaster - klater daerah	5 Kelompok	110.000.000	BANKEU PROV	100 %	110.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	5 klaster UMKM anggota FEDEP	
04	03	27	006	Kegiatan Pengawasan Peredaran GAKY (Bantuan Propinsi)	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pelaksanaan pengawasan peredaran GAKY	100 %	Meningkatanya konsumsi garam beryodium di masyarakat	1 Keg	50.000.000	BANKEU PROV	100 %	75.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	Pemerintah Kabupaten Blora	
04	03	27	007	Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Pendampingan)	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pelaksanaan koordinasi penanggulangan kemiskinan	100 %	Sinergitas dan kesepahaman pelaksanaan penanggulangan kemiskinan	3 Kali	50.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	100.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	Pemerintah Kabupaten Blora	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	03	27	009	Pendidikan Untuk Semua (PUS) (Pendampingan)	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah laporan pelaksanaan PUS	1 Laporan	Terlaksananya kegiatan pendidikan dalam mendukung SDGs	100 %	40.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Laporan	50.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3	Pemerintah Kabupaten Blora	
04	03	27	010	Penyusunan Profil Daerah (Pendampingan)	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah dokumen profil daerah Kabupaten Blora yang disusun	1 Dokumen	Tersedianya profil daerah untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	1 Dokumen	170.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	170.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	Pemerintah Kabupaten blora	
04	03	27	011	Koordinasi Pengawasan Peredaran GAKY (Pendampingan)	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pelaksanaan pengawasan peredaran GAKY	100 %	Meningkatanya konsumsi garam beryodium di masyarakat	95 %	20.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	30.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	Pemerintah Kkabupaten Blora	
04	03	27	08	FEDEP (Pendampingan)	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pelaksanaan kegiatan FEDEP	100 %	Terlaksananya koordinasi di tingkat regional dan provinsi, meningkatnya SDM 6 klaster, terbinanya 6 klaster FEDEP dan terfasilitasinya produk klaster.	5 Kelompok	215.000.000	PAD, DAU, DBH	5 %	400.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	5 klaster UMKM anggota FEDEP	
04	06			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																	
04	06	15		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK				Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan bidang penelitian dengan Roadmap SIDa	100%					1.000.000.000			1.300.000.000				
04	06	15	001	Penelitian Bidang Ekonomi	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah kajian penelitian bidang ekonomi	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Pengembangan Objek Wisata Kedungpupur	1 Dokumen	75.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	80.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	Pemerintah Kabupaten Blora	
04	06	15	002	Penelitian Bidang Sosial Budaya	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah kajian penelitian bidang sosial budaya	1 Dokumen	Tersedianya dokumen penelitian bidang sosiala budaya	1 Dokumen	75.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	70.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	Pemerintah Kabupaten Blora	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	06	15	003	Penelitian Bidang Infrastruktur	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah kajian penelitian bidang Infrasruktur dan pengembangan wilayah	1 Dokumen	Terlaksananya kegiatan pembangunan secara teratur	1 Dokumen	50.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Dokumen	50.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	Pemerintah Kabupaten Blora	
04	06	15	004	Rekayasa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian	1 rekomendasi	Terfasilitasinya kegiatan Dewan Riset Daerah, Tersedianya Jurnal Ilmiah	1 Paket	200.000.000	PAD, DAU, DBH	1 rekomendasi	250.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	Pemerintah Kabupaten Blora	
04	06	15	005	Riset Unggulan Daerah (RUD)	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian	10 rekomendasi	Ketersediaan informasi penunjang pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan dari hasil RUD	10 Dokumen	250.000.000	PAD, DAU, DBH	10 rekomendasi	300.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	Pemerintah Kabupaten Blora	
04	06	15	006	Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah keikutsertaan dalam PPI	3 Kali	penguatan kelembagaan inkubator bisnis dan teknologi, ikut serta dalam Pameran Produk Inovasi Jateng, Munculnya inovasi baru di Kabupaten Blora	3 Keg	350.000.000	PAD, DAU, DBH	3 Kali	550.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	Pameran Produk Inovasi	
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
04	03			PERENCANAAN																	
04	03	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	3128 M2					0			0				
04	03	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat	100 %	Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan	12 Bulan	5.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	5.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	Bidang-bidang dan sekretariat pada Bappeda kabupaten Blora	
04	03	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	100 %	Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan	12 Bulan	155.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	15.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	Sekretariat dan Bidang-bidang pada Bappeda Kabupaten Blora	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	03	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100 %	Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan	8 Unit	19.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	25.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	Bappeda kabupaten blora	
04	03	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan	100 %	Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang pada Perangkat daerah	12 Bulan	160.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	160.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	Pengelola keuangan pada Bappeda Blora	
04	03	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor	100 %	Kenyamanan dan kebersihan gedung kantor	100 %	30.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	30.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	pegawai di lingkungan Bappeda kabupaten Blora	
04	03	01	009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja	100 %	Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan	100 %	25.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	25.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	Bappeda Kabupaten Blora	
04	03	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	100 %	Tertib administrasi pengelolaan naskah kedinasan perangkat daerah	100 %	85.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	85.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	pegawai di lingkungan Bappeda Blora	
04	03	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100 %	Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan	12 Bulan	30.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	30.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	Bappeda Kabupaten Blora	
04	03	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	Menunjang kelancaran pelaksanaan dan proses admninstrasi serta tugas kedinasan	12 Bulan	25.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	25.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	Bappeda Kabupaten Blora	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	03	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	Mendukung, menambah serta meningkatkan kinerja SDM aparatur dalam pelaksanaan tugas kedinasan	12 Bulan	10.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	10.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	Pegawai di lingkungan Bappeda Kabupaten Blora	
04	03	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat	100 %	Tersedianya jamuan makanan dan minuman harian , tamu , rapat dan kegiatan pada perangkat daerah	12 Bulan	50.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	50.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	Pegawai dan tamu pada Bappeda Blora	
04	03	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam rangka tugas kedinasan.	12 Bulan	250.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	250.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	Pegawai Bappeda Kabupaten Blora	
04	03	01	019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	12 Bulan	35.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	35.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	Pegawai Bappeda Kabupaten Blora	
04	03	01	020	Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan dukungan pelayanan perkantoran	100 %	Jasa pengawalan dan keamanan kantor	3128 m2	199.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	200.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	karyawan/karyawai di lingkungan Bappeda Kabupaten Blora	
04	03	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%					0			0				
04	03	02	005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	5 Unit	Tersedianya kendaraan dinas operasional yang memenuhi standard	5 Unit	125.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Unit	25.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3	Pegawai Bappeda Kabupaten Blora	
04	03	02	010	Pengadaan mebeler	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan mebeler	100 %	Terlaksananya proses pengadan mebelair kantor sesuai dengan kebutuhan	3 Unit	50.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	25.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	Pegawai Bappeda Kabupaten Blora	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	03	02	012	Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase pemenuhan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor	100 %	Bangunan pendukung gedung kantor yang representatif	1 Lokasi	150.000.000	PAD, DAU, DBH	0 %	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3	karyawan/karyawati dan tamu Bappeda Blora	
04	03	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	100 %	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional guna menunjang kelancaran tugas kedinasan	7 Unit	60.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	60.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	Bappeda Kabupaten Blora	
04	03	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				Pemenuhan kebutuhan pakaian seragam dinas						0			0				
04	03	03	005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi				Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	50 Unit	Peningkatan kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) dalam berpakaian dinas	2 Jenis	60.000.000	PAD, DAU, DBH	50 Unit	60.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	Pegawai Bappeda Kabupaten blora	
04	03	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				Pemenuhan kebutuhan pelaporan kinerja dan keuangan	100%					0			0				
04	03	06	004	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah guna penyusunan kebijakan pembangunan daerah	1 Dokumen	8.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Laporan	8.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	Bappeda Kabupaten Blora	
04	03	06	005	Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah rencana kinerja dan penetapan kinerja	2 Dokumen	Tersedianya dokumen Renstra Rencana Kinerja dan Penetapan kinerja perangkat daerah	2 Dokumen	10.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Dokumen	20.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	Bappeda Kabupaten Blora	
04	03	06	006	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah laporan akuntabilitas kinerja SKPD	1 Laporan	Tersedianya dokumen laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Perangkat daerah	1 Dokumen	8.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Laporan	8.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	Bappeda Kabupaten Blora	
TOTAL														8.544.000.000			9.281.000.000				

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KABUPATEN BLORA

BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
04	04			KEUANGAN																	
04	04	17		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH										3.993.725.000			5.298.400.000				
04	04	17	002	Penyusunan standar satuan harga	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya kapasitas fiskal daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	BPPKAD			Jumlah dokumen Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga	100 Dokumen	Pengendalian besaran harga tahun 2019 tersusun	100 Buku	68.000.000	PAD, DAU, DBH	100 Buku	73.000.000	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1		
04	04	17	006	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya kapasitas fiskal daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	BPPKAD			Jumlah dokumen Ranperda APBD	110 Dokumen	Dasar hukum pelaksanaan APBD Tahun 2019 tersedia	110 Buku	200.000.000	PAD, DAU, DBH	110 Buku	380.000.000	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1		
04	04	17	008	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya kapasitas fiskal daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	BPPKAD			Jumlah dokumen Ranperda Perubahan APBD	110 Dokumen	Dasar hukum pelaksanaan perubahan APBD Tahun 2019 tersedia	110 Buku	200.000.000	PAD, DAU, DBH	110 Buku	384.000.000	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1		
04	04	17	030	Pemeliharaan aplikasi SIP APBD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya kapasitas fiskal daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	BPPKAD			Jumlah bulan layanan pemeliharaan aplikasi SIP APBD	1 Bulan	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan aplikasi	1 Tahun	50.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Tahun	50.000.000	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1		
04	04	17	031	Pemeliharaan sistem informasi keuangan daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya kapasitas fiskal daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	BPPKAD			Jumlah bulan layanan pemeliharaan Aplikasi Keuangan Daerah	12 Bulan	Terbayarnya pemeliharaan Aplikasi Keuangan Daerah	12 Bulan	50.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	78.000.000	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan									
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	04	17	038	Manajemen barang daerah, penataan, dan inventarisasi aset daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya kapasitas fiskal daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	BPPKAD			Jumlah buku Penataan dan Inventarisasi Aset dan Cek Fisik BMD	50 Buku	Pemahaman pengurus barang tentang pengelolaan BMD meningkat	50 SKPD	200.000.000	PAD, DAU, DBH	50 SKPD	260.000.000	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1		
04	04	17	039	Peningkatan pengelolaan aset daerah, penghapusan, dan penyelesaian kerugian barang daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya kapasitas fiskal daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	BPPKAD			Jumlah pelaksanaan Lelang, Penyelesaian Kerugian Daerah	100 Kali	Kegiatan lelang terlaksana, kegiatan MPTP TGR terlaksana, Perbud pengelolaan BMD tersusun, efisiensi pengelolaan BMD	100 %	190.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	200.000.000	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1		
04	04	17	040	Pembinaan, pengawasan, dan penilaian aset daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya kapasitas fiskal daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	BPPKAD			Jumlah sertifikat Penilaian, Pengamanan Aset Daerah, dan Pembuatan Sertifikat	100 sertifikat	Laporan penilaian tersusun	100 Buah	240.000.000	PAD, DAU, DBH	100 Buah	350.000.000	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1		
04	04	17	041	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya kapasitas fiskal daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	BPPKAD			Jumlah SKPD yang menyusun laporan keuangan	12 SKPD	Terbayarnya pemeliharaan Aplikasi Keuangan Daerah	12 Bulan	318.400.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	518.400.000	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1		
04	04	17	058	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya kapasitas fiskal daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	BPPKAD Kab.Blora			Jumlah aparatur pengelola keuangan daerah yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Tahun	Meningkatnya kemampuan aparatur pengelola keuangan daerah, lebih berkompeten, mampu menyusun laporan keuangan daerah secara tepat waktu, mempertahankan opini WTP, dan meningkatnya kualitas LKPD	1 Tahun	142.500.000	PAD, DAU, DBH	1 Tahun	10.000.000	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1		
04	04	17	059	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Aset Daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya kapasitas fiskal daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	BPPKAD Kab. Blora			Jumlah aparatur pengelola keuangan daerah yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Orang	Meningkatnya kemampuan aparatur pengelola aset OPD	1 Tahun	142.500.000	PAD, DAU, DBH	1 Tahun	10.000.000	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan									
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	04	17	060	Pengelolaan administrasi tata usaha keuangan daerah belanja langsung	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya kapasitas fiskal daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	BPPKAD			Jumlah bulan layanan tata usaha keuangan daerah belanja langsung	12 Bulan	Tata usaha keuangan daerah belanja langsung terpenuhi	12 Bulan	70.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	90.000.000	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1		
04	04	17	061	Pengelolaan administrasi tata usaha keuangan daerah belanja tidak langsung	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya kapasitas fiskal daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	BPPKAD			Jumlah bulan layanan administrasi tata usaha keuanagan daerah (belanja tidak langsung) yang akurat	12 Bulan	Administrasi tata usaha keuangan daerah belanja tidak langsung yang akurat	12 Bulan	30.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	40.000.000	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1		
04	04	17	062	Pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya kapasitas fiskal daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	BPPKAD			Jumlah bulan layanan penyediaan blangko SP2D, cetak daftar gaji, dan SKPP	12 Bulan	Blangko SP2D, daftar gaji dan SKPP tercetak	12 Bulan	290.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	335.000.000	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1		
04	04	17	063	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya kapasitas fiskal daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	BPPKAD			Jumah dokumen Ranperda tentang pertanggungjawaban APBD dan ranperkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	2 Dokumen	Ranperda tentang pertanggungjawaban APBD dan Ranperkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tercetak	2 Kali	200.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Kali	270.000.000	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1		
04	04	17	064	Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Pajak Daerah selain PBB P2 dan BPHTB	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya kapasitas fiskal daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	BPPKAD			Jumlah bulan sinkronisasi antara wajib pajak/retribusi dan pengelola pajak daerah	12 Bulan	Sinkronisasi antara wajib pajak / retribusi dan pengelola pajak daerah tercapai	12 Bulan	400.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	625.000.000	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1		
04	04	17	065	Pelayanan, penetapan dan penanganan keberatan pajak daerah selain PBB P2 dan BPPHTB	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya kapasitas fiskal daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	BPPKAD			Jumlah bulan layanan Prima dalam pelayanan, penetapan pajak daerah dan tersampaikannya SKPD ke wajib pajak	12 Bulan	Pelayanan yang prima, penetapan pajak daerah tercapai dan dari SKPD ke wajib pajak tersampaikan	12 Bulan	57.165.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	60.000.000	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan									
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	04	17	066	Penagihan dan pelaporan pajak daerah selain PBB P2 dan BPHTB	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya kapasitas fiskal daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	BPPKAD			Persentase target penerimaan pajak daerah selain PBB P2 dan BPHTB	1000 %	Target penerimaan pajak daerah tercapai	1000 Wajib Pajak	80.160.000	PAD, DAU, DBH	1000 Wajib Pajak	90.000.000	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1		
04	04	17	067	Pendataan dan penilaian PBB P2 dan BPHTB	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya kapasitas fiskal daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	BPPKAD			Jumlah data objek dan subjek pajak PBB P2	2000 objek	Data objek dan subjek pajak PBB P2 tersedia	2000 Orang	100.000.000	PAD, DAU, DBH	2000 Orang	250.000.000	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1		
04	04	17	068	Penagihan dan pelaporan pajak daerah PBB P2 dan BPHTB	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya kapasitas fiskal daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	BPPKAD			Persentase target penerimaan PBB P2 dan BPHTB	1000 %	Target penerimaan PBB P2 dan BPHTB tercapai	1000 Wajib Pajak	190.000.000	PAD, DAU, DBH	1000 Wajib Pajak	250.000.000	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1		
04	04	17	069	Pelayanan dan penetapan PBB P2 dan BPHTB	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Meningkatnya kapasitas fiskal daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	BPPKAD			Jumlah wajib pajak yang dilayani dan ditetapkan data objek dan subjek pajak PBB P2	550000 Wajib Pajak	Penetapan data objek dan subjek PBB P2 terlaksana	550000 Wajib Pajak	775.000.000	PAD, DAU, DBH	550000 Wajib Pajak	975.000.000	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1		
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
04	04			KEUANGAN																	
04	04	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										0			0				
04	04	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BPPKAD			Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat	12 %	Terkirimnya surat dinas	12 Bulan	11.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	11.000.000	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1		
04	04	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BPPKAD			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12 %	Tersedianya listrik, telepon dan internet	12 Bulan	265.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	265.000.000	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan									
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	04	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BPPKAD			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	45 %	Tertib administrasi pembayaran pajak kendaraan dinas	45 Buah	25.000.000	PAD, DAU, DBH	45 Buah	30.000.000	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1		
04	04	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BPPKAD			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan	12 %	Dokumen administrasi keuangan barang dan jasa terpenuhi	12 Bulan	1.676.500.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	1.676.500.000	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1		
04	04	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BPPKAD			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor	12 %	Terciptanya kantor yang bersih dan nyaman	12 Bulan	220.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	250.000.000	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1		
04	04	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BPPKAD			Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	12 %	Kelancaran pelaksanaan tugas	12 Bulan	130.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	150.000.000	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1		
04	04	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BPPKAD			Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12 %	Tercapainya kelancaran pelaksanaan tugas	12 Bulan	40.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	40.000.000	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1		
04	04	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BPPKAD			Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	Kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	25.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	25.000.000	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1		
04	04	01	013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BPPKAD			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 %	Terlaksananya kelancaran pekerjaan kantor	12 Bulan	150.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	300.000.000	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan									
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	04	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BPPKAD			Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 %	Meningkatnya pengetahuan aparatur	12 Bulan	22.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	22.000.000	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1		
04	04	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BPPKAD			Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat	12 %	Kelancaran pelaksanaan tugas	12 Bulan	180.940.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	180.000.000	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1		
04	04	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BPPKAD			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	12 %	Terlaksananya pelaksanaan rapat / konsultasi keluar daerah	12 Bulan	250.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	285.000.000	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1		
04	04	01	019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BPPKAD			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	12 %	Tercapainya kelancaran pelaksanaan tugas	12 Bulan	25.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	20.000.000	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1		
04	04	01	020	Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BPPKAD			Persentase pemenuhan dukungan pelayanan perkantoran	12 %	Jasa pelayanan kantor terpenuhi	12 Bulan	339.300.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	339.300.000	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1		
04	04	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										0			0				
04	04	02	003	Pembangunan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BPPKAD			Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 Unit	Pembangunan gedung utama II, gudang, tempat server, tempat almari besi tersedia	1 Paket	75.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Paket	100.000.000	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan									
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	04	02	005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BPPKAD			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	3 Unit	Kelancaran pelaksanaan tugas	1 Tahun	295.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Tahun	0	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1		
04	04	02	010	Pengadaan mebeler	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BPPKAD			Persentase pemenuhan mebeler	100 %	Tercapainya kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan kantor	100 %	67.372.000	PAD, DAU, DBH	100 %	80.000.000	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1		
04	04	02	012	Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BPPKAD			Persentase pemenuhan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor	1 %	Tersedianya pendukung gedung kantor	1 Paket	100.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Paket	100.000.000	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1		
04	04	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BPPKAD			Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	1 %	Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	15.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Tahun	20.000.000	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1		
04	04	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BPPKAD			Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	56 %	Terbayarnya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	56 Buah	84.000.000	PAD, DAU, DBH	56 Buah	90.000.000	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1		
04	04	02	028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BPPKAD			Persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	1 %	Terpeliharanya peralatan kantor	1 Tahun	85.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Tahun	100.000.000	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1		
04	04	02	029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeler	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BPPKAD			Persentase mebeler dalam kondisi baik	12 %	Terciptanya kelancaran tugas	12 Bulan	15.000.000	PAD, DAU, DBH	12 Bulan	20.000.000	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan									
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	04	02	031	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi air, listrik, dan telepon	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BPPKAD			Persentase instalasi air, listrik, dan telepon dalam kondisi baik	1 %	Kelancaran pelaksanaan tugas	1 Tahun	20.000.000	PAD, DAU, DBH	1 Tahun	50.000.000	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1		
04	04	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				Pemenuhan kebutuhan pakaian seragam dinas						0			0				
04	04	03	005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi	BPPKAD			Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	347 Unit	Tersedianya Pakaian Olahraga, Pakaian Tradisional	347 Buah	177.500.000	PAD, DAU, DBH	347 Buah	177.500.000	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1		
04	04	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR										0			0				
04	04	05	001	Pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BPPKAD			Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal	103 Orang	Peningkatan kualitas SDM aparatur	103 Orang	150.000.000	PAD, DAU, DBH	103 Orang	155.000.000	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1		
04	04	05	002	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BPPKAD			Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan	2 Orang	Pelaksanaan APBD lancar	2 Kali	63.000.000	PAD, DAU, DBH	2 Kali	70.000.000	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1		
TOTAL														8.500.337.000			9.854.700.000				

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KABUPATEN BLORA

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
04	05			KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																	
04	05	29		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional	12,36%					3.700.000.000			2.710.000.000				
								Persentase pejabat yang sesuai dengan kompetensi	52,76%												
04	05	29	001	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi	Semarang, Blora			Jumlah peserta Diklat Prajabatan	250 Orang	Persentase kelulusan peserta Diklat Prajabatan minimal dengan kategori Baik	100 %	2.250.000.000	PAD, DAU, DBH	100 Orang	1.000.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1		
04	05	29	002	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi	Semarang, Blora			Jumlah peserta Diklat PIM Tk. IV	36 Orang	Persentase kelulusan peserta Diklat PIM IV	100 %	0	-	100 %	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	ASN Kabupaten Blora yang menduduki eselon II	
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi	Semarang, Blora			Jumlah peserta Diklat PIM Tk. III	8 Orang	Persentase kelulusan peserta Diklat PIM III	100 %	0	-	100 %	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	ASN Kabupaten Blora yang menduduki eselon II	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan									
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi	Semarang, Kab. Blora			Jumlah peserta Diklat PIM Tk. II	3 Orang	Persentase kelulusan peserta Diklat PIM II	100 %	1.000.000.000	PAD, DAU, DBH	3 %	1.210.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	ASN Kabupaten Blora yang menduduki eselon II	
04	05	29	003	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi	Blora			Jumlah peserta penyelenggaraan diklat teknis	44 Orang	Persentase kelulusan peserta Diklat perpajakan bagi bendahara	100 %	0	-	100 %	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	ASN Kabupaten Blora	
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi	Blora, Semarang, dll			Jumlah pengiriman peserta diklat teknis	42 Orang	Persentase kelulusan peserta Diklat Teknis dan Fungsi	100 %	350.000.000	PAD, DAU, DBH	220 %	400.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	ASN Kabupaten Blora	
04	05	29	004	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi	Semarang, Blora, dll			Jumlah pengiriman peserta Diklat Fungsional	10 Orang	Persentase kelulusan peserta Diklat Fungsional	100 %	0	-	10 Orang	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	ASN Kabupaten Blora	
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi	-			Jumlah peserta penyelenggaraan diklat fungsional	40 Orang	Persentase peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur	20 %	100.000.000	PAD, DAU, DBH	40 Orang	100.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	ASN Kabupaten Blora	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan									
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	05	30		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR				Persentase penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin dan proses izin perkawinan dan perceraian	100					3.360.000.000			4.800.000.000				
04	05	30	007	Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BKD Kabupaten Blora			Persentase penyelesaian usulan tugas belajar dan izin belajar	100 %	Meningkatnya kompetensi aparatur	100 %	225.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	250.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	ASN Kabupaten Blora	
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BKD Kabupaten Blora			Jumlah peserta tugas belajar atas biaya pemerintah daerah	2 Orang	Meningkatnya kompetensi aparatur	100 %	0	-	100 %	360.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	ASN Kabupaten Blora	
04	05	30	027	Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BKD Kabupaten Blora			Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	44 Orang	Persentase peserta sosialisasi yang memiliki pemahaman yang sama ttg aturan kepegawaian	100 %	40.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	40.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	ASN Kabupaten Blora	
04	05	30	036	Pembinaan dan Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Wilayah Kabupaten Blora			Jumlah CPNS/PNS yang mengikuti pemantapan disiplin	50 Orang	Menurunnya pelanggaran disiplin PNS	50 %	0	-	100 %	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	ASN Kabupaten Blora	
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BKD Kabupaten Blora			Jumlah CPNS/PNS yang mengikuti pemantapan disiplin	250 Orang	Persentase CPNS yang meningkat tingkat kedisiplinannya	100 %	0	-	44 %	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	ASN Kabupaten Blora	
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Wilayah Kabupaten Blora			Jumlah SKPD yang dimonitoring terkait Penilaian Prestasi Kerja PNS	44 SKPD	Persentase SKPD yang melaksanakan Penyusunan Sasaran Kerja dan Penilaian Prestasi Kerja PNS	100 %	0	-	100 %	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	ASN Kabupaten Blora	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BKD Kab. Blora			Jumlah pejabat administrasi/fungsional yang mengikuti pemantapan penilaian SKP	67 Orang	Jumlah pejabat struktural yang memahami penilaian SKP	67 Orang	0	-	100 %	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	ASN Kabupaten Blora	
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Wilayah Kabupaten Blora			Jumlah SKPD yang disidak	16 SKPD	Persentase SKPD yang tertib presensi	100 %	0	-	100 %	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	ASN Kabupaten Blora	
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Wilayah Kabupaten Blora			Persentase penyelesaian kasus kepegawaian	100 %	Persentase kepastian hukum atas kasus kepegawaian / izin perceraian PNS	100 %	290.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	215.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	ASN Kabupaten Blora	
04	05	30	037	Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Jumlah PNS potensial yang mengikuti penilaian kompetensi	100 Orang	ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan kompetensinya	100 %	0	-	100 %	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	ASN Kabupaten Blora	
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Jumlah PNS yang diangkat dalam jabatan	450 Orang	Persentase keterisian jabatan struktural dan fungsional	100 %	0	-	100 %	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	ASN Kabupaten Blora	
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Jumlah pelantikan pejabat administrasi/fungsional	12 Kali	Persentase keterisian jabatan struktural dan fungsional	100 %	0	-	100 %	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	ASN Kabupaten Blora	
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Jumlah keputusan mutasi jabatan fungsional	30 Keputusan	Persentase keterisian jabatan struktural dan fungsional	100 %	0	-	100 %	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	ASN Kabupaten Blora	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Kabupaten Blora			Jumlah calon JPT/JPT yang mengikuti penilaian kompetensi	66 Orang	Persentase keterisian jabatan struktural dan fungsional	100 %	800.000.000	PAD, DAU, DBH	25 %	800.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	ASN Kabupaten Blora	
04	05	30	038	Pengadaan Aparatur Sipil Negara	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BKD Kabupaten Blora			Persentase sumpah janji PNS terselesaikan	100 %	Persentase keterisian formasi CPNS	100 %	0	-	100 %	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	ASN Kabupaten Blora	
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BKD Kabupaten Blora			Persentase SK CPNS ke PNS yang terselesaikan	100 %	Persentase keterisian formasi CPNS	100 %	0	-	100 %	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	ASN Kabupaten Blora	
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BKD Kabupaten Blora			Persentase keterisian formasi CPNS sesuai bidang dan kompetensi	100 %	Keterisian formasi CPNS	100 %	0	-	100 %	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	3	ASN Kabupaten Blora	
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BKD Kabupaten Blora			Jumlah dokumen usulan kebutuhan formasi CPNS	1 Dokumen	Keterisian formasi CPNS	100 %	1.200.000.000	PAD, DAU, DBH	1 %	2.090.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	3	ASN Kabupaten Blora	
04	05	30	039	Penyelenggaraan Administrasi Mutasi Kepangkatan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BKD Kabupaten Blora			Jumlah peserta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan ujian dinas	100 Orang	Persentase usulan kenaikan pangkat terselesaikan	100 %	0	-	100 %	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	ASN Kabupaten Blora	
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BKD Kabupaten Blora			Persentase penyelesaian usulan kenaikan pangkat PNS	100 %	Persentase usulan kenaikan pangkat terselesaikan	100 %	160.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	220.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	ASN Kabupaten Blora	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	05	30	040	Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Pegawai	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BKD Kabupaten Blora			Jumlah peserta pembekalan pra purna bhakti PNS	80 Orang	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi kesejehtaeraan pegawai	100 %	0	-	100 %	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	ASN Kabupaten Blora	
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BKD Kabupaten Blora			Persentase usulan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) terselesaikan	100 %	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi kesejehtaeraan pegawai	100 %	0	-	100 %	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	ASN Kabupaten Blora	
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BKD Kabupaten Blora			Persentase usulan penghargaan satya lencana karya yang terselesaikan	100 %	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi kesejehtaeraan pegawai	100 %	0	-	100 %	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	ASN Kabupaten Blora	
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BKD Kabupaten Blora			Persentase usulan karis, karsu, karpeg, KPE, dan taspen yang terselesaikan	100 %	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi kesejehtaeraan pegawai	100 %	245.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	345.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	ASN Kabupaten Blora	
04	05	30	041	Penyelenggaraan Administrasi Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BKD Kabupaten Blora			Persentase usluan pemindahan dan pemberhentian yang terselesaikan	100 %	Persentase pelayanan usulan pemberhentian dan pemindahan	100 %	0	-	100 %	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	ASN Kabupaten Blora	
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BKD Kabupaten Blora			Persentase usluan pemindahan dan pemberhentian yang terselesaikan	100 %	Persentase pelayanan usulan pemberhentian dan pemindahan	100 %	100.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	160.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	ASN Kabupaten Blora	
04	05	30	042	Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Kepegawaian	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BKD Kabupaten Blora			Jumlah file kepegawaian yang terupdate	8200 File	Persentase akurasi data kepegawaian	100 %	0	-	100 %	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	ASN Kabupaten Blora	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan									
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BKD Kabupaten Blora			Jumlah data kepegawaian yang terupdate	8200 Data	Persentase akurasi data kepegawaian	100 %	0	-	100 %	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	ASN Kabupaten Blora	
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BKD Kabupaten Blora			Jumlah aplikasi layanan administrasi kepegawaian	1 Aplikasi	Persentase akurasi data kepegawaian	100 %	300.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	320.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	ASN Kabupaten Blora	
04				FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
04	05			KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																	
04	05	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %					0			0				
								Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %												
04	05	01	001	Penyediaan jasa surat menyurat	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BKD Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat	100 %	Persentase surat menyurat yang terselesaikan	100 %	4.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	4.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	BKD Kabupaten Blora	
04	05	01	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BKD Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	100 %	Persentase tagihan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik terbayar	100 %	112.200.000	PAD, DAU, DBH	100 %	115.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	BKD Kabupaten Blora	
04	05	01	003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BKD Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	Persentase peralatan kerja yang terawat	100 %	15.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	15.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	BKD Kabupaten Blora	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	05	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BKD Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100 %	Persentase kendaraan dinas yang tertib pajak	100 %	7.800.000	PAD, DAU, DBH	100 %	8.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	BKD Kabupaten Blora	
04	05	01	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BKD Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan	100 %	Persentase tertib administrasi keuangan dan barang daerah	100 %	130.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	135.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	BKD Kabupaten Blora	
04	05	01	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BKD Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor	100 %	Persentase kebersihan kantor	100 %	165.000.000	PAD, DAU, DBH	100 Paket	210.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	BKD Kabupaten Blora	
04	05	01	010	Penyediaan alat tulis kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BKD Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor	100 %	Persentase pemenuhan alat tulis kantor	100 %	90.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	95.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	BKD Kabupaten Blora	
04	05	01	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BKD Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100 %	Persentase ketersdiaan barang cetakan dan penggandaan	100 %	17.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	17.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	BKD Kabupaten Blora	
04	05	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BKD Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	Persentase pemenuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	7.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	7.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	BKD Kabupaten Blora	
04	05	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BKD Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	persentase ketersediaan surat kabar harian	100 %	3.600.000	PAD, DAU, DBH	100	3.800.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	BKD Kabupaten Blora	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan									
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	05	01	017	Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BKD Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan minum harian pegawai, snack rapat dan jamuan tamu	100 %	28.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	26.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	BKD Kabupaten Blora	
04	05	01	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Luar daerah Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	persentase pemenuhan rakor keluar daerah	100 %	142.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	150.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	BKD Kabupaten Blora	
04	05	01	019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Dalam wilayah Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati	100 %	Persentase pelaksanaan rakor dalam daerah	100 %	13.312.000	PAD, DAU, DBH	100 Bulan	13.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	BKD Kabupaten Blora	
04	05	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	2 unit					0			0				
04	05	02	003	Pembangunan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BKD Kabupaten Blora			Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 Unit	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	1 Unit	200.000.000	PAD, DAU, DBH	0 Unit	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	BKD Kabupaten Blora	
04	05	02	007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BKD Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan perlengkapan gedung kantor	100 %	Persentase pemenuha perlengkapan gedung kantor	100 %	97.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	100.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	BKD Kabupaten Blora	
04	05	02	009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BKD Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan peralatan gedung kantor	100 %	persentase pemenuhan kebutuhan peralatan gedung kantor	100 %	128.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	60.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	BKD Kabupaten Blora	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	05	02	010	Pengadaan mebeler	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BKD Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan mebeler	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan mebeler	100 %	50.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	100.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	BKD Kabupaten Blora	
04	05	02	012	Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BKD Kabupaten Blora			Persentase pemenuhan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor	100 %	Persentase pemenuhan bangunan pendukung gedung kantor	100 %	50.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	50.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	BKD Kabupaten Blora	
04	05	02	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BKD Kabupaten Blora			Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Persentase gedung yang terpelihara	100 %	20.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	150.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	BKD Kabupaten Blora	
04	05	02	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BKD Kabupaten Blora			Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	100 %	Persentase kendaraan dinas yang terpelihara	100 %	60.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	65.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	BKD Kabupaten Blora	
04	05	02	028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BKD Kabupaten Blora			Persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Persentase peralatan gedung kantor yang terpelihara	100 %	20.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	12.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	BKD kabupaten Blora	
04	05	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				Pemenuhan kebutuhan pakaian seragam dinas						0			0				
								Pemenuhan kebutuhan pakaian seragam dinas													

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	05	03	005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi	BKD Kabupaten Blora			Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	50 Buah	Persentase pemenuhan kebutuhan pakaian khusus hari-hari tertentu	100 %	13.800.000	PAD, DAU, DBH	92 Buah	45.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	BKD Kabupaten Blora	
04	05	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				Peningkatan kapasitas SDM aparatur	100 %					0			0				
								Peningkatan kapasitas SDM aparatur	100 %												
04	05	05	002	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-				Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan	50 Orang	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 %	40.000.000	PAD, DAU, DBH	50 Orang	40.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1		
04	05	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				Nilai Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	B					0			0				
								Pemenuhan kebutuhan pelaporan kinerja dan keuangan	100 %												
								Nilai Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	B												
								Nilai Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	B												

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	prioritas daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	indikator kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2019		Prakiraan Maju Tahun 2020		Keterangan		Kelompok Sasaran Kegiatan	Asal Usulan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)	Sumber Dana	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
04	05	06	004	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora			Jumlah laporan keuangan akhir tahun	5 Laporan	Pemenuhan kebutuhan pelaporan kinerja dan keuangan	100 %	10.000.000	PAD, DAU, DBH	5 Laporan	10.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1		
04	05	06	005	Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BKD Kabupaten Blora			Jumlah rencana kinerja dan penetapan kinerja	3 Dokumen	Tersusunnya Renstra, Renja dan Penetapan Kinerja SKPD	3 Dokumen	7.500.000	PAD, DAU, DBH	3 Dokumen	7.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	BKD Kabupaten Blora	
04	05	06	006	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BKD Kabupaten Blora			Jumlah laporan akuntabilitas kinerja SKPD	2 Laporan	Tersusunnya LAKIP dan LKPJ SKPD	2 Dokumen	7.500.000	PAD, DAU, DBH	2 Dokumen	7.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	BKD Kabupaten Blora	
04	05	06	007	Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Akuntabel dan Bebas KKN	-	BKD Kabupaten Blora			Jumlah dokumen RKA-SKPD dan DPA SKPD	4 Dokumen	Tersusunnya RKA-SKPD dan DPA-SKPD	4 Dokumen	10.000.000	PAD, DAU, DBH	100 %	10.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	BKD Kabupaten Blora	
TOTAL														8.508.712.000			8.967.300.000				

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja pemerintah daerah adalah untuk memberikan gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, aspek pelayanan umum dan daya saing pada akhir periode masa jabatan.

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Blora dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dengan pendekatan perencanaan strategis dan sinergis, instansi pemerintah daerah lebih dapat menyelaraskan visi dan misi dengan potensi peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Upaya untuk meningkatkan masyarakat yang lebih sejahtera dilaksanakan melalui pembangunan secara berkelanjutan sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam menyelenggarakan pelaksanaan pembangunan secara terencana dan terukur. Pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dimulai dari perencanaan yang terpadu, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan direncanakan setiap 5 tahun yang menggambarkan visi dan misi, tujuan, sasaran, program dan secara sistematis di dalamnya memuat strategi kebijaksanaan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif, berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran.

Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi dan juga ditetapkan dengan memiliki indikator-indikator kinerja yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021. Target capaian indikator kinerja daerah yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2019 disajikan sebagaimana Tabel VI.1

Penetapan indikator kinerja pemerintah daerah bertujuan untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan

menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun 2019.

Tabel VI-1
Indikator Kinerja Utama

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019
	Sasaran Pokok Pembangunan Daerah	1. Pertumbuhan Ekonomi	%	5,0-5,3
		2. Inflasi	%	3-7
		3. Indeks Gini	Skala	0,39
		4. Indeks ketimpangan williamson (Indeks Ketimpangaan Regional)	Skala	0,300-0,400
		5. Persentase penduduk miskin	%	10,5-11,2
		6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	67,84
		7. Angka Usia Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,45
		8. Rata-rata lama sekolah	Tahun	6,4
		9. Usia Harapan Hidup	Tahun	73,95
		10. Pengeluaran Riil Per kapita	Ribu Rp	9.223
		11. Tingkat pengangguran terbuka	%	3,6
		12. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Skor	83,21
		13. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Skor	68,34
Meningkatkan Kapasitas, Kompetensi, etos kerja dan integritas Aparatur Sipil Negara	Terpenuhinya jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi	14. Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional	%	12,36
		15. Persentase pejabat yang sesuai dengan kompetensi	%	52,76
		16. Persentase penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin dan proses izin perkawinan dan perceraian	%	100
Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya penerapan standar pelayanan dan kepuasan masyarakat pada perangkat daerah yang memberikan pelayanan publik	17. Nilai Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	Nilai	B
		18. Persentase perangkat daerah yang menyusun SOP dan SPP dan IKM "baik"	%	100
	Meningkatnya cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	19. Rasio penduduk berKTP	%	98
		20. Rasio bayi berakte kelahiran	%	99
	Meningkatnya kualitas pelayanan statistik, kearsipan, persandian,	21. Persentase Keterisian data SIPD	%	90
		22. Tersedianya tanah untuk	%	100

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019
	dan transmigrasi	keperluan Pemerintah daerah		
		23. Persentase jenis informasi tingkat kabupaten yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan	%	100
		24. Prosentase dokumen/Arsip yang terpelihara dengan baik	%	90
		25. Jumlah Transmigran diberangkatkan	KK	15
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK	26. Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemda	SIMDA	7
	Meningkatnya kinerja DPRD dalam fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran.	27. Persentase Raperda masuk Prolegda (Propem-perda) yang Dibahas dan Ditetapkan	%	94
Meningkatnya kapasitas fiskal daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya pendapatan daerah dan kualitas pengelolaan keuangan daerah	28. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Status	WTP
		29. Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah per tahun	%	6,01
		30. Tingkat maturitas SPIP	Level	Level 3
		31. Tingkat kapabilitas APIP	Level	Level 3
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat.	Meningkatnya jumlah, produktivitas dan profitabilitas industri.	32. Jumlah Industri	unit	11.805
	Meningkatnya kualitas koperasi, serta kemandirian usaha mikro kecil dan menengah	33. Persentase koperasi sehat	%	60
		34. Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	unit	6.775
	Meningkatnya nilai ekspor dan tertatanya pasar tradisional	35. Nilai ekspor produk-produk asal Kabupaten Blora	US $	2.884.411
		36. Persentase pasar tradisional yang memenuhi syarat kenyamanan dan kesehatan	%	100
	Meningkatnya kunjungan wisatawan di obyek wisata unggulan daerah	37. Jumlah Kunjungan wisata	Orang	230.000
Meningkatkan produktivitas hasil pertanian, peternakan dan perikanan sebagai penunjang ketahanan pangan	Terpeliharanya produksi dan produktivitas pertanian dan populasi hewan ternak	38. Produktivitas Pangan Utama (Padi Sawah)	Ton/ha	51,25
		39. Produksi Padi sawah	ton	414.472
		40. Produksi Padi ladang	ton	36.156
		41. Produksi Jagung	ton	271.253
		42. Populasi Sapi Potong	ekor	247.494
	Meningkatnya produksi dan produktvitas perikanan budidaya.	43. Produksi Perikanan	Kg	870,421

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019
	Meningkatnya akses, distribusi dan konsumsi pangan masyarakat	44. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	67,2
Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup	Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup.	45. Standart IKLH Kabupaten Blora	%	68,50
		46. Prosentase usaha dan/ atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pengelolaan lingkungan hidup	%	100
	Meningkatnya kualitas dan kinerja pengelolaan persampahan	47. Persentase sampah yang terangkut	%	82,27
Meningkatkan minat dan realisasi investasi di Kabupaten Blora	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan investasi	48. Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Trilyun	4,50
		49. Terselenggaranya pelayanan perijinan dan nonperijinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal	Hari	1
Menurunkan pengangguran	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	50. Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	%	75
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian pendidikan	51. Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100
		52. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100
	Meningkatnya minat baca di perpustakaan daerah	53. Jumlah pengunjung perpustakaan	Orang	166.323
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk	54. Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 KH	9,5
		55. Angka Kematian Balita	per 1000 KH	10,5
		56. Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	105
		57. Presentase Gizi Buruk	%	0,07
		58. Status Akreditasi RSUD Blora versi KARS	Akreditasi	Paripurna
		59. Status Akreditasi RSUD Cepu versi KARS	Akreditasi	Paripurna
		60. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	6
Meningkatkan perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan	Meningkatnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	61. Persentase penurunan Jumlah PMKS	%	0,1
		62. Persentase PMKS skala kabupaten yang memperoleh	%	6,7

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019
Sosial (PMKS)	(PMKS)	bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar		
Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, serta keberdayaan masyarakat	Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran desa, dan kualias pengelolaan Lembaga Ekonomi Pedesaan	63. Persentase desa yang memiliki RPJMDes dan APBDes berkualitas baik.	%	95
		64. Prosentase jumlah BUMDes	%	50
	Meningkatnya perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak	65. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan	%	100
Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga, serta apresiasi seni dan budaya daerah	Meningkatnya kegiatan pemuda dan olahraga	66. Jumlah medali tingkat provinsi yang diperoleh	Medali	86
	Meningkatnya pelestarian keragaman dan kekayaan budaya daerah	67. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	32,5
		68. Cakupan kelompok seni yang dibina	%	60
Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	69. Persentase Jalan kondisi baik	%	63
		70. Persentase Jembatan dalam kondisi baik	%	79
	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas saluran drainase dan irigasi	71. Panjang salurah drainase dalam kondisi baik	Km	220,8
		72. Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	40,03
	Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang	73. Perda RDTR yang ditetapkan	dokumen	1
	Meningkatnya pelayanan perhubungan darat	74. Persentase prasarana perhubungan dalam kondisi baik	%	90
		75. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu,marka,guardrail, APILL,dll) pada jalan kota	%	94
Meningkatkan sarana dan prasarana dasar permukiman dan perumahan agar masyarakat hidup layak	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan kawasan kumuh perkotaan.	76. Luas kawasan kumuh di kawasan perkotaan	Ha	48
		77. Jumlah rumah tidak layak huni	Unit	67.247
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas air bersih dan sanitasi	78. Cakupan pelayanan air minum	%	66,71
		79. Cakupan pelayanan sanitasi	%	95,96
Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan	80. Presentase Capaian Indikator Kinerja RPJMD	%	91
		81. Kesesuaian Kegiatan di KUA PPAS dengan Kegiatan di RKPD	%	80
		82. Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penelitian dengan Roadmap SIDa	%	100
Meningkatkan Ketenteraman,	Meningkatnya	83. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,	%	85

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2019
ketertiban umum	penegakan Perda	ketentraman, keindahan) di kabupaten		
		84. Cakupan Penegakan Perda	%	78,49

Tabel VI-2
Indikator Kinerja Kunci

No	Urusan	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2019
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
1	**Pendidikan**				
		1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100
		2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100
		3.	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Usia 0-6 Tahun	%	45,68
		4.	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Usia 3-6 Tahun	%	70,41
		5.	Prosentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Terakreditasi.	%	51,69
		6.	APK SD/MI	%	108,50
		7.	APM SD/MI	%	92,75
		8.	APK SMP/MTs	%	104,80
		9.	APM SMP/MTs	%	73,50
		10.	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,30
		11.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,20
		12.	Rata-Rata Nilai UN SD/MI	-	6,80
		13.	Rata-rata Nilai UN SMP/MTs	-	6,60
		14.	Prosentase Ruang Kelas SD/MI Dalam Kondisi Baik	%	87,50
		15.	Prosentase Ruang Kelas SMP/MTs Dalam Kondisi Baik	%	82,50
		16.	Prosentase jumlah anak lulus sekolah yang tidak melanjutkan dan terlayani Paket A,B,C	%	46,40
		17.	Prosentase lembaga pendidikan non formal yang terakreditasi.	%	54,31
		18.	Guru TK yang memenuhi kualifikasi S1/D4	%	81,98
		19.	Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D4	%	89,05
		20.	Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D4	%	98,50
2	**Kesehatan**				

No	Urusan	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2019
		21.	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 KH	11,5
		22.	Angka Kematian Balita	per 1000 KH	13,2
		23.	Kasus Kematian Ibu	kasus	14
		24.	Presentase Gizi Buruk	%	0,11
		25.	Status Akreditasi RSUD Blora versi KARS	Akreditasi	Paripurna
		26.	Status Akreditasi RSUD Cepu versi KARS	Akreditasi	Paripurna
		27.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi	%	100
		28.	Cakupan kunjungan bayi	%	99,5
		29.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	98,5
		30.	Cakupan pelayanan nifas	%	99,8
		31.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	10
		32.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	65
		33.	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan	%	55
		34.	Proporsi terbinanya apotik dan toko obat	%	100
		35.	Proporsi Terbinanya warung sekolah dan penjaja makanan	%	65
		36.	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	pusk	26
		37.	Proporsi terbinanya sarana kesehatan	%	100
		38.	Rasio dokter umum per satuan penduduk	Per 100.000 penduduk	16
		39.	Rasio dokter gigi per satuan penduduk	Per 100.000penduduk	3
		40.	Rasio perawat per satuan penduduk	Per 100.000 penduduk	57
		41.	Jumlah Masyarakat Miskin yang mendapat pelayanan kesehatan	anak	100
		42.	Jumlah masyarakat yang dijamin kesehatannya melalui BPJS	jiwa	45.000
		43.	Proporsi Cakupan Pemeriksaaan Pra Usila dan Usila	%	84
		44.	Jumlah puskesmas	unit	26
		45.	Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan	%	98
		46.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	100
		47.	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 KH	11,5

No	Urusan	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2019
		48.	Angka Kematian Balita	per 1000 KH	13,2
		49.	Kasus Kematian Ibu	kasus	14
		50.	Cakupan pemeriksaan pada anak usia dini	%	75
		51.	Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	100
		52.	Cakupan Desa dengan UCI		100
		53.	Presentase Balita Gizi Buruk	%	0,11
		54.	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	2,4
		55.	Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan	%	100
		56.	Persentase Bayi ditimbang berat badannya (D/S)	%	83
		57.	Cakupan pelayanan anak balita	%	94,5
		58.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	100
		59.	Persentase Bayi mendapat kapsul vitamin A	%	100
		60.	Persentase Ibu hamil mendapat 90 tablet besi	%	95,5
		61.	Persentase ibu hamil mengalami KEK	%	5,7
		62.	Persentase Balita dengan Kekurangan Energi dan Protein (KEP)	%	3,9
		63.	Persentase kecamatan bebas rawan gizi	%	100
		64.	Cakupan penemuan TB	%	70
		65.	Cakupan penemuan dan penanganan DBD	%	100
		66.	Angka kematian DBD (Incidence Rate) IR	Per 100.000 penduduk	47
		67.	Angka kematian DBD (Case Fatality Rate) CFR	%	3
		68.	Cakupan penemuan dan penanganan Diaare	%	100
		69.	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi usia 15-49 tahun (per 100.000 penduduk).	per 100.000 penduduk	0,009
		70.	Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS	%	22
		71.	Proporsi penduduk yg terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pd obat antiretroviral	%	85
		72.	Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)	kasus	340
		73.	Persentase KLB dapat ditangani < 24 jam	%	100

No	Urusan	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2019
		74.	Penyakit Filariasis yang ditangani	%	100
		75.	Persentase kelurahan yang melaksanakan Posbindu	%	20
		76.	Persentase penduduk 15 tahun mendapat pelayanan tekanan darah	%	10
		77.	Persentase penduduk yang mendapatkan pemeriksaan obesitas 15 tahun	%	15
		78.	Persentase penduduk >5 tahun pemeriksaan gula darah	%	15
		79.	Persentase perempuan usia 30-15 tahun deteksi dini kanker servik dan payudara	%	15
		80.	Persentase kasus hipertensi yang mendapat pelayanan pengobatan	%	15
		81.	Persentase kasus DM mendapatkan pelayanan	%	15
		82.	Cakupan Rumah Sehat	%	74
		83.	Cakupan TTU yang memenuhi syarat kesehatan	%	92,5
		84.	Cakupan rumah tangga yang berPHBS		86
		85.	Cakupan kelurahan Siaga Aktif	%	100
		86.	BOR (Bed Occupancy Ratio	%	73,5
		87.	AVLOS (AverageLength of Stay)	hari	3
		88.	TOI (Turn Over Interval)	hari	2
		89.	BTO (Bed Turn Over)	kali	75
		90.	NDR (Net Death Rate)	orang	10
		91.	Jumlah Kunjungan Rawat Inap	orang	18.000
		92.	Jumlah Kunjungan Rawat Jalan	orang	47.500
		93.	Tingkat Kepuasan Pasien	%	84
		94.	Status Akreditasi Rumah Sakit versi KARS	Status	paripurna
		95.	Persentase pemenuhan kebutuhan Sarana Dan Prasarana Rumah	%	100
		96.	Cakupan pengobatan bagi pasien Rumah Sakit kurang mampu	%	100
		97.	BOR (Bed Occupancy Ratio)	%	70
		98.	AVLOS (Average Length of Stay	hari	5,56
		99.	TOI (Turn Over Interval)	hari	2,43
		100.	BTO (Bed Turn Over)	kali	49,06
		101.	NDR (Net Death Rate)	Orang	0,016
		102.	Jumlah Kunjungan Rawat Inap	Orang	10.426
		103.	Jumlah Kunjungan Rawat Jalan	Orang	25.959
		104.	Tingkat Kepuasan Pasien	%	83,03
		105.	Status Akreditasi Rumah Sakit versi KARS	status	paripurna

No	Urusan	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2019
		106.	Persentase pemenuhan kebutuhan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit per tahun	%	100
		107.	Jumlah pengobatan bagi pasien rumah sakit kurang mampu	orang	4610
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**				
		108.	Persentase Jalan Mantap	%	84,41
		109.	Persentase Jalan kondisi baik	%	63
		110.	Persentase Jembatan dalam kondisi baik	%	79
		111.	Perda RDTR yang ditetapkan	dokumen	1
		112.	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan	%	15
		113.	Panjang jembatan baru yang terbangun	km	0,2
		114.	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana	%	100
		115.	Persentase luas bangunan/ gedung yang dibangun pada wilayah strategis dan	%	0,20
		116.	Persentase realisis fisik pembangunan infrastruktur perdesaan per tahun	%	100
		117.	Perda RDTR yang ditetapkan	dok	1
		118.	Tersedianya informasi mengenai RDTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta	%	17
		119.	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah per HPl/ HGB	%	0,01
		120.	Ruang publik yang berubah peruntukannya	%	0
		121.	Cakupan pelayanan penerangan jalan umum	%	50
		122.	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan	%	15
		123.	Luasan tanah yang dibebaskan	Ha	0
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**				-
		124.	Luas kawasan kumuh di kawasan perkotaan	Ha	-
		125.	Jumlah rumah tidak layak huni	Unit	67.247
		126.	Persentase berkurangnya permukiman kumuh di perkotaan	%	0,67
		127.	Panjang saluran drainase dalam kondisi baik	Km	220,8
		128.	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi	%	40,03

No	Urusan	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2019
			baik		
		129.	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	%	45
		130.	Persentase penduduk yang mendapatkan air minum yang aman	%	66,71
		131.	Cakupan pelayanan sanitasi	%	95,96
5	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**				
		132.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) di kabupaten	%	85
		133.	Cakupan Penegakan Perda	%	78,49
		134.	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	kali	5
		135.	Tingkat partisipasi politik masyarakat kabupaten Blora	%	75
		136.	Jumlah tokoh masyarakat yang memahami peningkatan toleransi kerukunan antar umat beragama, nilai sosial dan solidaritas di kalangan masyarakat serta pelestarian nilai-nilai luhur budaya	org	300
		137.	Jumlah pemuda/pelajar yang mendapatkan Peningkatan Wawasan kebangsaan	org	200
		138.	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan	org	200
		139.	Terpeliharanya kondusifitas wilayah melalui kerjasama KOMINDA	kali	12
		140.	Jumlah tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan pelajar yang mendapatkan penyuluhan Narkoba	org	500
		141.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	85
		142.	Cakupan penegakan perda	%	78,49
		143.	Cakupan Patroli petugas Satpol PP	%	56,25
		144.	Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten	rasio	1,33
		145.	Penyuluhan tentang miras, narkoba dan perjudian kepada masyarakat di kecamatan	kecamatan	16
		146.	Jumlah anggota linmas yang ditingkatkan pemahamannnya	Orang	120
6	**Sosial**				
		147.	Persentase penanganan PMKS	%	0,26
		148.	Persentase PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	0,67
		149.	Persentase penyandang cacat fisik dan	%	4,79

No	Urusan	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2019
			mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan		
		150.	Persentase korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	80
		151.	Persentase panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan social	%	100
		152.	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanankesejahteraan social	%	100
		153.	Cakupan Pelayanan Penanganan Bencana di Kabupaten Blora	%	97
		154.	Tingkat Waktu Tanggap (Respon time rata) daerah Layanan	Menit	60
		155.	Persentase Aparatur Petugas Penanggulangan Bencana yang memenui Standar Kualifikasi	%	80
		156.	Jumlah Relawan	0rang	305
		157.	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten Blora	%	89
		158.	Tingkat Waktu Tanggap (Respon time rata) daerah Layanan	Menit	15
		159.	Persentase Aparatur Damkar yang menemui Standar Kualifikasi	%	88
		160.	Jumlah Damkar	Unit	1
		161.	Jumlah alat pemadam ringan	Unit	18
	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar				
7	**Tenaga Kerja**				
		162.	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	%	75
		163.	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	8
		164.	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	7,5
		165.	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,6
		166.	Angka keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	%	88
		167.	Persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	%	50
		168.	Buruh/ pekerja yang menjadi peserta program Jamsostek/ BPJS ketenagakerjan	orang	8250
8	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**				
		169.	Cakupan perempuan dan anak korban	%	100

No	Urusan	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2019
			kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan		
		170.	Persentase Focal point aktif	%	75
		171.	Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten, kecamatan dan	kelompok	7
		172.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	8
		173.	Persentase SKPD menyusun analisis gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	%	40
		174.	Kasus kekerasan terhadap perempuan	kasus	0
		175.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	%	100
9	**Pangan**				
		176.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	67,2
		177.	Ketersediaan pangan utama	Ton	286.669,91
		178.	Ketersediaan energi per kapita	kkal/ kap/ hari	3,184018485
		179.	Ketersediaan protein per kapita	gram/ kap/ hari	78,05
		180.	Penguatan cadangan pangan	ton	20.000
		181.	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	%	77,78
		182.	Stabilitas harga dan pasokan pangan	%	90
		183.	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	90
		184.	Penanganan desa rentan pangan	desa	4
10	**Pertanahan**				
		185.	Tersedianya tanah untuk keperluan Pemerintah daerah	%	100
		186.	Tersusunnya dokumen rupa bumi		14
11	**Lingkungan Hidup**				
		187.	Standart IKLH Kabupaten Blora	%	68,50
		188.	Prosentase usaha dan/ atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pengelolaan lingkungan hidup	%	100
		189.	Persentase sampah yang terangkut	%	82,27
		190.	Rasio cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan	%	100
		191.	Prosentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	%	100
		192.	Rasio Cakupan penghijauan di wilayah Sumber Mata Air	%	1,2

No	Urusan	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2019
		193.	Prosentase jumlah sumur resapan dan lubang resapan biopori yang berhasil dimanfaatkan	%	100
		194.	Prosentase desa yang menerapkan program desa berwawasan lingkungan	%	100
		195.	Institusi pendidikan yang menerapkan program sekolah berwawasan lingkungan / sekolah adiwiyata	sekolah	7
		196.	Prosentase jumlah instalasi pengolah limbah cair yang berhasil dimanfaatkan	%	100
		197.	Pemantauan uji kualitas udara	titik sampel	30
		198.	Pemantauan uji kualitas limbah cair	titik sampel	50
12	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**				
		199.	Rasio penduduk berKTP	%	98
		200.	Rasio bayi berakte kelahiran	%	99
		201.	Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak)	%	95
		202.	Kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun	%	96,5
		203.	Rasio pasangan berakte nikah	%	100
13	**Pemberdayaan Masyarakat Desa**				
		204.	Persentase desa yang memiliki RPJMDes dan APBDes berkualitas baik.	%	65
		205.	Jumlah BUMDes	unit	40
		206.	Posyandu Aktif	%	100
		207.	Jumlah usaha ekonomi produktif perempuan yang terlatih	kelompok	80
		208.	Jumlah Posyantek Aktif	unit	1
		209.	Persentase aparatur desa/ kelurahan telah dilatih manajemen pengelolaan desa/kelurahan	%	100
		210.	Persentase desa/kelurahan memiliki profil desa/kelurahan	%	100
14	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**				
		211.	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	6
		212.	Cakupan peserta KB aktif	%	69
		213.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 (semua cara dan cara modern)	%	81,12
		214.	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun	%	7
		215.	Jumlah kelompok Masyarakat Peduli KB	kelompok	6

No	Urusan	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2019
		216.	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	%	76
		217.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)ber-KB	%	72
15	**Perhubungan**				
		218.	Persentase prasarana perhubungan dalam kondisi baik	%	95
		219.	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu,marka,guardrail, APILL,dll) pada jalan kota	%	94
		220.	Tersedianya informasi perhubungan	Dokumen	1
		221.	Tersedianyan halte pada setiap kecamatan yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	unit	14
		222.	Peningkatan keselamatan lalu lintas	%	89
		223.	Pembangunan halte	Unit	1
		224.	tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam	Unit	9
		225.	Pembangunan terminal barang (pelataran tempat parkir truk)	unit	-
		226.	Reaktivasi bandara Ngloram	Unit	-
		227.	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu,marka,guardra il,APILL,dll) pada jalan kabupaten	%	94
		228.	Persentase prasarana perhubungan dalam kondisi baik	%	93
		229.	Persentase kendaraan yang lulus uji	%	89
16	**Komunikasi dan Informatika**				
		230.	Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemda	SIMDA	7
		231.	Perangkat Daerah yang telah memiliki jaringan internet	PD	46
		232.	Persentase Perangkat Daerah telah memiliki website	%	100
		233.	Jumlah menara telekomunikasi	unit	146
		234.	Informasi kebijakan daerah	dok	13
		235.	Keterbukaan komunikasi publik	kali	25
		236.	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki SDM berkeahlian teknologi informasi	%	33
		237.	Fasilitasi pembinaan PPID SKPD	%	46
		238.	Pelaksanaan desiminasi dan pendistribusian informasi nasional	kali	14
17	**Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**				

No	Urusan	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2019
		239.	Persentase koperasi sehat	%	30
		240.	Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	unit	6.775
		241.	Persentase koperasi sehat	%	30
		242.	Persentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk	%	0,6
18	**Penanaman Modal**				
		243.	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Trilyun	4,50
		244.	Terselenggaranya pelayanan perijinan dan non perijinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal	Hari	2
		245.	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/ bidang usaha unggulan	Dokumen	6
		246.	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerja sama kemitraan	Kali	4
		247.	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal provinsi	Kali	3
		248.	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten	Kali	1
		249.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Unit	630
		250.	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp	4,5 Trilyun
		251.	Terselenggaranya pelayanan perijinan dan non perijinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal: Pendaftaran Penanamanan Modal Dalam Negeri, Ijin prinsip Penanamanan Modal Dalam Negeri, Ijin Usaha Penanamanan Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja	Hari	2
		252.	Jenis Pelayanan Yang terlayani melalui Sistem informasi Pelayanan Perijinan	Ijin	17
		253.	Terimplementasikann ya Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	SPIPISE	8
19	**Kepemudaan dan Olahraga**				
		254.	Jumlah medali tingkat provinsi yang diperoleh	Medali	91
		255.	Jumlah pemuda yang mampu berwirausaha	Orang	170
		256.	Jumlah organisasi pemuda yang memiliki legalitas organisasi dari	organisasi	55

No	Urusan	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2019
			Pemerintah		
		257.	Jumlah pemuda berprestasi	orang	100
		258.	Jumlah pemuda yang mampu berwirausaha	orang	170
		259.	Jumlah medali tingkat provinsi yang diperoleh	medali	91
		260.	Gelanggang olahraga	gedung	2
		261.	Lapangan Olahraga	lapangan	760
20	**Statistik**				
		262.	Persentase Keterisian data SIPD	%	90
		263.	Ketersediaan dokumen IKK	dok	1
21	**Persandian**				
		264.	Persentase jenis informasi tingkat kabupaten yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan	%	100
		265.	Persentase informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampaikan kepada pihak terkait	%	100
22	**Kebudayaan**				
		266.	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	32,5
		267.	Cakupan kelompok seni yang dibina	%	60
		268.	Jumlah kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	kali	3
		269.	Cakupan kajian seni	%	91
		270.	Cakupan fasilitasi seni	%	78
		271.	Cakupan gelar seni	%	100
		272.	Cakupan sumber daya manusia kesenian	%	90
		273.	Persentase Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	32,5
23	**Perpustakaan**				
		274.	Jumlah pengunjung perpustakaan	Orang	69.000
		275.	Jumlah Perpustakaan sekolah & Desa yang terbina	Unit	215
		276.	Jumlah Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan	Eks.	30.451
		277.	Jumlah bahan pustaka yang sudah diselamatkan/dilestarikan	Eks	950
24	**Kearsipan**				
		278.	Jumlah dokumen/Arsip yang terpelihara dengan baik	Berkas	128.000
		279.	Persentase Arsip Tekstual yang terolah dengan baik	%	100
		280.	Jumlah Arsip Non Tekstual yang Terolah	Foto	450

No	Urusan	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2019
			dengan baik		
		281.	Jumlah Arsip/Dokumen yang telah di duplikat dalam bentuk informatika	Berkas	18000
C	**Urusan Pilihan**				
25	**Kelautan dan Perikanan**				
		282.	Produksi perikanan budidaya	Ton	421
		283.	Tingkat cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	%	57
		284.	Produksi perikanan tangkap	ton	296
		285.	Tingkat Konsumsi Ikan Penduduk	kg/kap.	10
		286.	Jumlah produksi hasil olahan ikan	ton	958
26	**Pariwisata**				
		287.	Jumlah Kunjungan wisata	Orang	230.000
		288.	Presentase obyek wisata yang dipromosikan	%	85
		289.	Jumlah obyek wisata unggulan	obyek	22
		290.	Jumlah pokdarwis	kelompok	5
		291.	Jumlah restoran	buah	85
		292.	Jumlah penginapan / hotel	buah	38
		293.	Pemilihan duta wisata	peserta	14
27	**Pertanian**				
		294.	Produktivitas Pangan Utama (Padi Sawah)	Ton/ha	51,25
		295.	Produksi Padi sawah	ton	414.472
		296.	Produksi Padi ladang	ton	36.156
		297.	Produksi Jagung	ton	271.253
		298.	Populasi Sapi Potong	ekor	247.494
		299.	Jagung	ton	271.253
		300.	Kedelai	ton	11.078
		301.	Ubi Kayu	ton	52.523
		302.	Cabe merah	ton	5.542
		303.	Cabe rawit	ton	1.390
		304.	Bawang merah	ton	1.147
		305.	Jeruk siam	ton	1.244
			Produksi Perkebunan :		
		306.	Tembakau	ton	1425
		307.	Tebu	ton	18.500
		308.	Kelapa	ton	90
		309.	Mete	ton	218
		310.	Jumlah Promosi produk unggulan pertanian/	kali	6

No	Urusan	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2019
			perkebunan		
		311.	Persentase kelompok tani menerapkan teknologi pertanian/perkebunan (intensifikasi dan mekanisasi pertanian)	%	81
		312.	Persentase tenaga penyuluh pertanian/perkebunan yang telah mengikuti pelatihan	%	100
		313.	Cakupan bina kelompok petani	%	84
		314.	Populasi Kambing	ekor	140.513
		315.	Jumlah ternak yang terlayani pengobatan dan pencegahan penyakit	ekor	11.000
		316.	Jumlah promosi pemasaran hasil produksi peternakan unggulan	kali	2
		317.	Jumlah lokasi yang dilakukan pemeriksaan daging	lokasi	30
		318.	Jumlah sarana dan prasarana teknologi peternakan	unit	8
28	**Perdagangan**				
		319.	Nilai ekspor produk-produk asal Kabupaten Blora	US $	2.884.411
		320.	Persentase pasar tradisional yang memenuhi syarat kenyamanan dan kesehatan	%	50
		321.	Persentase cakupan pasar yang diawasi	%	100
		322.	Persentase pasar tradisional yang memenuhi syarat kenyamanan dan kesehatan	%	50
		323.	Nilai ekspor produk- produk asal Kabupaten Blora	US$	2.884.411
		324.	Jumlah cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	Org	245
		325.	Jumlah lokasi PKL yang tertata	Lokasi	10
29	**Perindustrian**				
		326.	Jumlah Industri	unit	11.805
		327.	Cakupan pelaku IKM yang mengikuti promo produk	Perajin	12
		328.	Nilai produksi industri	Ribu Rupiah	1.296.724.867
		329.	Cakupan kelompok pengrajin yang dibina	IKM	828
		330.	Persentase industri yang telah menerapkan teknologi	%	40
30	**Transmigrasi**				
		331.	Jumlah Transmigran diberangkatkan	KK	15
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				
31	**Perencanaan**				

No	Urusan	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2019
		332.	Presentase Capaian Indikator Kinerja RPJMD	%	91
		333.	Kesesuaian Kegiatan di KUA PPAS dengan Kegiatan di RKPD	%	97
		334.	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	%	100
		335.	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan kota- kota menengah dan besar	%	100
		336.	Persentase SKPD mampu menyusun dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	%	100
		337.	Kesesuaian Progran RKPD dengan Program RPJMD	%	88
		338.	Kesesuaian Program di KUA PPAS dengn Program di RKPD	%	97
		339.	Kesesuaian Kegiatan di KUA PPAS dengan Kegiatan di RKPD	%	80
		340.	Kesesuaian Program di APBD dengan Program di RKPD	%	95,5
		341.	Kesesuaian Kegiatan di APBD dengan Kegiatan di RKPD	%	75
		342.	Realisasi Kinerja RKPD	%	100
		343.	Realisasi Indikator Kinerja RPJMD	%	91
		344.	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Bidang Ekonomi dengan Pelaksanaan	%	100
		345.	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Bidang sosial budaya dengan Pelaksanaan	%	100
		346.	Tingkat Kesesuaian Perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam dengan Pelaksanaan	%	100
		347.	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah bersumber dari pemerintah provinsi	%	100
		348.	Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah bersumber dari	%	100
		349.	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penelitian dengan Roadmap SIDa	%	100
32	**Keuangan**				
		350.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Status	WTP
		351.	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah per tahun	%	6,01
		352.	Persentase tanah milik Pemkab yang	%	64,17
33	**Kepegawaian**				
		353.	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional	Orang	12,36

No	Urusan	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2019
		354.	Persentase pejabat yang sesuai dengan kompetensi	%	52,76
		355.	Persentase penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin dan proses izin perkawinan dan perceraian	%	100
		356.	Jumlah ASN yang Pindah Tugas dan Pensiun	orang	600
34	**Sekretariat Daerah**				
		357.	Nilai Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	Nilai	B
		358.	Persentase perangkat daerah yang menyusun SOP dan SPP dan IKM "baik"	%	70
		359.	Nilai Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	nilai	B
		360.	Persentase organisasi perangkat daerah dengan skor nilai pelayanan publik "baik"	%	70
		361.	Persentase organisasi perangkat daerah yang menyusun SOP, SPP dan IKM "baik"	%	70
		362.	Jumlah organisasi perangkat daerah yang dievaluasi struktur dan uraian tugasnya	PD	24
		363.	Persentase aparat sipil negara yang mendapatkan pelatihan peningkatan kinerja	%	70
		364.	Koordinasi bidang kesehatan , tenaga kerja , transmigrasi serta kesejahteraan sosial lainnya	kali	50
		365.	Koordinasi & pemantauan di bidang pemuda , olahraga , pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.	kali	50
		366.	Koordinasi dan pemantauan di bidang pendidikan perpustakaan, kebudayaan urusan agama serta	kali	50
		367.	Jumlah survey monitoring dan evaluasi pelaporan bidang kesejahteraan rakyat.	lokasi	125
		368.	Jumlah fasilitasi kegiatan keagamaan masyarakat	Kegiatan	246
		369.	Pembangunan tempat ibadah	unit	1,00
		370.	Tersusunnya dokumen rencana kerja Setda Kab.Blora	Dokumen	1
		371.	Prosentase jumlah pengadaan barang/ jasa pemerintah yang dilaksanakan melalui ULP	%	100
		372.	Prosentase kegiatan fisik yang dilakukan monev pembangunan	%	60
		373.	Jml tenaga kerja konstruksi yang mengikuti fasilitasi sertifikasi/ lulus sertifikasi ketrampilan.	orang	60

No	Urusan	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2019
		374.	Persentase jumlah SKPD yang mengumumkan seluruh paket Pengadaan Barang/ jasa pemerintah yang diumumkan pada SiRUP	%	85
		375.	Persentase Jumlah SKPD yang melaporkan TEPRA melalui Sismontepra tepat waktu	%	80
		376.	Presentase Kegiatan Bupati / wakil yang terlayani dengan baik	%	100
		377.	Tersusunnya Ranperda	ranperda	3
		378.	Tersusunnya Peraturan Bupati	Perbub	6
		379.	Terlaksananya Sosialisasi Kepada Aparatur Pemerintah Desa dan BPD	kali	2
		380.	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan mengenai pemerintahan Desa	kali	2
		381.	Tersusunnya Dokumen Inventarisasi	dok	20
		382.	Terlaksananya Monev APBDesa	kali	16
		383.	Terselenggaranya Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Paket	1
		384.	Terlaksananya lelang	kali	24
		385.	Terlaksananya penyusunan dokumen memori serah terima jabatan Bupati Blora	dokumen	
		386.	Terlaksananya rakor dan monitoring	kali	
		387.	Tersusunnya dokumen LKP- AMJ	dokumen	
		388.	Terlaksananya PATEN di Kab. Blora dan studi orientasi	kecamatan	3
		389.	Terlaksananya penegasan batas daerah dan inventarisasi pilar batas	dokumen	2
		390.	Tersusunnya dokumen LPPD	dokumen	30
		391.	Tersusunnya dokumen LKPJ	dokumen	140
		392.	Terlaksananya Rakor Forkopimda	kali	1
		393.	Terlaksananya Rakor Pejabat SKPD	kali	70
		394.	Terlaksananya kerjasama antar pemerintah daerah dengan pihak ketiga, serta SKPD dengan pihak ketiga	Kerjasama	12
		395.	Terlaksananya kerjasama antar pemerintah daerah di bidang ekonomi	Kerjasama	2
		396.	Terselesainya kasus hukum di lembaga peradilan dan memperoleh kekuatan hukum	kasus	6
		397.	Tersusunnya Ranperda	ranperda	5
		398.	Jumlah Perda yang ditetapkan	perda	6
		399.	Tersusununnya dan Beredarnya Himpunan Perda, Perbup, Keputusan Bupati & WPU	buku	90
		400.	Terselenggaranya Bintek, Produk Hukum	Produk hukum	400

No	Urusan	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2019
		401.	Terselenggarnya kadarkum tk Kab/Bakorwil/Provinsi	kali	3
		402.	Pengendalian dan pembinaan peraturan perundang-undangan	Kec	16
		403.	Peningkatan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum	Paket	1
		404.	Penyuluhan hukum peraturan perundang- undangan	Kali	6
		405.	Jumlah kegiatan kepala daerah yang dipublikasikan melalui media massa/elektronik	kali	420
		406.	Jumlah Plakat lambang daerah dan pelatihan keprotokolan SKPD	buah	45
		407.	Jumlah upacara rutin berkala dan hari besar nasional yang diselenggarakan	kali	1
		408.	Jumlah koordinasi bidang perekonomian	tahun	1
		409.	Tersusunnya laporan penaausahaan keuangan sekretariat daerah	dok	144
35	**Sekretariat DPRD**				
		410.	Persentase Ranperda masuk Prolegda (Propem-perda) yang Dibahas dan Ditetapkan	%	94
		411.	Jumlah ranperda inisiatif yang disahkan menjadi perda inisiatif	Perda	3
36	**Pengawasan**				
		412.	Tingkat maturitas SPIP	Level	Level 3
		413.	Tingkat kapabilitas APIP	Level	Level 3
		414.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti	%	100
		415.	Persentase laporan hasil tindak lanjut dan ekspose temuan hasil pengawasan yang telah disusun	%	100
		416.	Tingkat Maturitas SPIP	%	level 3
		417.	Tingkat kapabilitas APIP	%	level 3
37	**Penelitian dan Pengembangan**				
		418.	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penelitian dengan Roadmap SIDa	%	100
38	**Kecamatan**				
		419.	Terselenggaranya koordinasi dan pelayanan pada kecamataan	kecamatan	16
		420.	Terselenggaranya Penyediaan sarana dan prasarana umum dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan	kecamatan	16

No	Urusan	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2019
		421.	Terselenggaranya kegiatan pengembangan wilayah kecamatan	kecamatan	16
		422.	Terkoordinasikannya peningkatan kualitas pelayanan pada kelurahan	kecamatan	16

BAB VII
PENUTUP

Guna menjaga kesinambungan pembangunan daerah, RKPD Kabupaten Blora Tahun 2019 harus dipedomani oleh Perangkat Daerah sebagai dasar dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan tahun 2019.

RKPD Kabupaten Blora Tahun 2019 juga menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) Kabupaten Blora Tahun 2019 dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk di dalamnya dunia usaha serta masyarakat dalam menyusun program/kegiatan sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan. Selain itu, nantinya menjadi instrumen untuk melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama berkaitan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaannya, RKPD mempunyai beberapa kaidah pelaksanaan, yaitu RKPD Tahun 2019 merupakan rencana kerja pemerintah daerah selama satu tahun dengan mendasarkan potensi yang tersedia, prioritas, target dan capaian yang telah ditetapkan.

Selanjutnya melalui pelaksanaan program/kegiatan dalam RKPD Kabupaten Blora Tahun 2019 ini, diharapkan mampu mendukung upaya menuju tercapainya cita-cita pembangunan Kabupaten Blora.

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO